GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD.
(2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(3) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2019.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB 1 : PENDAHULUAN
b. BAB 2 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c. BAB 3 : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB 4 : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
e. BAB 5 : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
f. BAB 6 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
g. BAB 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
h. BAB 8 : PENUTUP

(2) Rincian uraian RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi:

a. pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
b. dasar penyusunan Rancangan KUA Tahun Anggaran 2019 dan PPAS Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juni 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 31

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

RINCIAN URAIAN RKPD TAHUN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 6
1.3 Hubungan Antar Dokumen 9
1.3.1 Maksud 10
1.4 Maksud dan Tujuan 11
1.4.1 Tujuan 11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD 11

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **13**

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 13
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 13
2.1.1.1 Aspek Geografi 13
2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 13
2.1.1.1.2 Topografi 15
2.1.1.1.3 Geologi 17
2.1.1.1.4 Hidrologi 19
2.1.1.1.5 Klimatologi 23
2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan 23
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 26
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana 28
2.1.1.4 Demografi 31
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 33
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 33
2.1.2.1.1 Penduduk Miskin 33
2.1.2.1.2 Pendapatan Perkapita 38
2.1.2.1.3 Indeks Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Regional 41
2.1.2.1.4 Laju Inflasi 43
2.1.2.1.5 Nilai Tukar Petani (NTP) 46

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 47
2.1.2.2.1 Angka Melek Huruf (AMH) 49
2.1.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) 50
2.1.2.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 51
2.1.2.2.4 Jumlah Kematian Bayi 53
2.1.2.2.5 Angka Harapan Hidup (AHH) 54
2.1.2.2.6 Pengembangan Nilai-Nilai Gotong Royong, Penanganan PMKS, dan Multikulturalisme Di DIY 55
2.1.2.2.7 Potensi Konflik di DIY 57
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga 61
2.1.2.3.1 Budaya 61
2.1.2.3.2 Olah Raga 68
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 70
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 70
2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan 70
2.1.3.1.2 Urusan Kesehatan 73
2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum 83
2.1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 93
2.1.3.1.5 Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 99
2.1.3.1.6 Urusan Sosial 102
2.1.3.1.7 Urusan Tenaga Kerja 112
2.1.3.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 122
2.1.3.1.9 Urusan Pangan 130
2.1.3.1.10 Urusan Pertanahan 136
2.1.3.1.11 Urusan Lingkungan Hidup 139
2.1.3.1.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 152
2.1.3.1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 155
2.1.3.1.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 159
2.1.3.1.15 Urusan Perhubungan 162
2.1.3.1.16 Urusan Komunikasi dan Informatika 166
2.1.3.1.17 Urusan Koperasi,Usaha kecil,dan Menengah 169
2.1.3.1.18 Urusan Penanaman Modal 171
2.1.3.1.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga 174
2.1.3.1.20 Urusan Statisik 176
2.1.3.1.21 Urusan Persandian 178
2.1.3.1.22 Urusan Kebudayaan 178
2.1.3.1.23 Urusan Perpustakaan 189
2.1.3.1.24 Urusan Kearsipan 190

2.1.3.2 Fokus Layanan Pilihan 193
2.1.3.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan 193
2.1.3.2.2 Urusan Pariwisata 196
2.1.3.2.3 Urusan Pertanian 199
2.1.3.2.4 Urusan Kehutanan 205
2.1.3.2.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 207
2.1.3.2.6 Urusan Pedagangan 214
2.1.3.2.7 Urusan Perindustrian 216
2.1.3.2.8 Urusan Transmigrasi 219
2.1.3.3 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan 222
2.1.3.3.1 Urusan Sekretariat Daerah 222
2.1.3.3.2 Urusan Sekretariat DPRD 225
2.1.3.3.3 Urusan Inspektorat 229
2.1.3.3.4 Urusan Perencanaan 231
2.1.3.3.5 Urusan Keuangan 232
2.1.3.3.6 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 237
2.1.3.3.7 Urusan Penelitian dan Pengembangan .. 238
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 241
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 241
2.1.4.1.1 Aspek Kemampuan Ekonomian Daerah 241
2.1.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita 244
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 246
2.1.4.2.1 Penyediaan Air Minum 247
2.1.4.2.2 Penyediaan Komunikasi 248
2.1.4.2.3 Layanan Transportasi 251
2.1.4.2.4 Distribusi dan Produksi Energi 256
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi 257
2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas 257
2.1.4.3.2 Jumlah Demonstrasi 259
2.1.4.3.3 Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha 259
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 260
2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja 260
2.1.4.4.2 Rasio Ketergantungan 261
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 263
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 485
2.3.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 485
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 485

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 493

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 493
3.1.1 Struktur Sektor Ekonomi 493
3.1.2 Struktur Pengeluaran Dalam PDRB 497
3.1.3 Inflasi 499
3.1.4 ICOR 500
3.1.5 Ketenagakerjaan 502
3.1.6 Kemiskinan 506
3.1.7 Ketimpangan Regional 509
3.1.8 Ketimpangan Pendapatan 511
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 517
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 517
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 520
3.2.2.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 525
3.2.2.2 Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah 526
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah 534
3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 538
3.2.5 Strategi Keuangan Daerah 539

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ...543

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 543
4.1.1 Dasar Perumusan Tema RKPD 2019 550
4.1.2 RKPD DIY 2019 Menjadi Bagian Integral dari RPJMN 2015-2019 556
4.1.3 Penyelarasan Tema Pembangunan RKPD DIY 2019 dengan RKP 2019 558
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 561
4.2.1 Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional dan DIY 561
4.2.2 Interkoneksi Sasaran Pembangunan Nasional dan DIY 565
4.3 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kewilayahan 576
4.3.1 Konektivitas Pembangunan Antar Wilayah 579
4.3.2 Pembangunan Koridor Ekonomi Strategis 582
4.3.3 Penanggulangan Kemiskinan 583
4.3.4 Penurunan Ketimpangan Wilayah 584
4.3.5 Kestabilan Daya Dukung Lingkungan 585
4.4 Pokok Pokok Pikiran DPRD 595
4.4.1 Tujuan Pokok-pokok Pikiran DPRD 596
4.4.2 Permasalahan Pembangunan DIY dari Sudut Pandang DPRD 597
4.4.3 Rekomendasi dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY 604
4.4.4 Tanggapan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY 649

4.4.4.1 Bidang Pemerintahan 649
4.4.4.1.1 Urusan Ketertiban, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat 649
4.4.4.1.2 Urusan Pertanahan 652
4.4.4.1.3 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 654
4.4.4.1.4 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 655
4.4.4.1.5 Urusan Komunikasi dan Informatika 656
4.4.4.1.6 Urusan Persandian 657
4.4.4.1.7 Penunjang Urusan Pemerintahan 658
4.4.4.1.8 Urusan Keistimewaan Yogyakarta (Otonomi Khusus) 659
4.4.4.1.9 Urusan Penanganan Bencana 662
4.4.4.2 Bidang Ekonomi 663
4.4.4.2.1 Urusan Pariwisata 663
4.4.4.2.2 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 664
4.4.4.2.3 Urusan Perindustrian 665
4.4.4.2.4 Urusan Perdagangan 666
4.4.4.2.5 Urusan Penanaman Modal 667
4.4.4.2.6 Urusan Pertanian 667
4.4.4.2.7 Urusan Ketahanan Pangan 669
4.4.4.2.8 Urusan Kelautan dan Perikanan 670
4.4.4.2.9 Urusan Kehutanan 672
4.4.4.3 Bidang Pembangunan 674
4.4.4.3.1 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 674
4.4.4.3.2 Urusan Perumahan 679
4.4.4.3.3 Urusan Energi Sumber Daya Mineral 681
4.4.4.3.4 Urusan Perhubungan 682
4.4.4.4 Bidang Kesejahteraan Rakyat 685
4.4.4.4.1 Urusan Pendidikan 685
4.4.4.4.2 Urusan Pemuda dan Olahraga 686
4.4.4.4.3 Urusan Kesehatan 687
4.4.4.4.4 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 689
4.4.4.4.5 Urusan Sosial 691
4.4.4.4.6 Urusan Tenaga Kerja 693

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 697

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta 2019 697
5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia 697
5.1.2 Pertumbuhan Ekonomi 697
5.1.3 Kemiskinan 697

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul 2019 698
5.2.1 Indeks Pembangunan Manusia 698
5.2.2 Pertumbuhan Ekonomi 698
5.2.3 Kemiskinan 699
5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2019 700
5.3.1 Indeks Pembangunan Manusia 700
5.3.2 Pertumbuhan Ekonomi 700
5.3.3 Kemiskinan 700
5.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul 2019 702
5.4.1 Indeks Pembangunan Manusia 702
5.4.2 Pertumbuhan Ekonomi 702
5.4.3 Kemiskinan 702
5.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sleman 2019 703
5.5.1 Indeks Pembangunan Manusia 703
5.5.2 Pertumbuhan Ekonomi 704
5.5.3 Kemiskinan 704

BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 707

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 708
Dinas Kesehatan 737
RSJ Grhasia 751
RSP Respira 753
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM 754
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 772
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 783
Satuan Polisi Pamong Praja 792
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 804
Dinas Sosial 815
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 828
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 840
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 850
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 863
Dinas Perhubungan 875
Dinas Komunikasi dan Informatika 887
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 905
Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 913
Dinas Kebudayaan 923
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 931
Dinas Kelautan dan Perikanan 942
Dinas Pariwisata 951

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 961
Sekretariat Daerah 972
Biro Tata Pemerintahan 976
Biro Hukum 984
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam 997
Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan 1003
Biro Organisasi 1010
Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol 1016
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat 1026
Biro Bina Mental Spiritual 1033
Paniradya Keistimewaan 1041
Badan Penghubung Daerah 1046
Sekretariat DPRD 1053
Inspektorat 1065
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1076
Badan Pengelola Keuangan dan Aset 1095
Badan Kepegawaian Daerah 1112
Badan Pendidikan dan Pelatihan 1123
Urusan Kelembagaan 1133
Urusan Kebudayaan 1141
Urusan Pertanahan 1163
Urusan Tata Ruang 1174

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1191

BAB 8 PENUTUP 1201

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Jumlah Desa Menurut Kabupaten/ Kota dan Letak Geografis 15
Tabel 2-2 Debit Rerata Sungai di DIY 21
Tabel 2-3 Penggunaan Lahan DIY 24
Tabel 2-4 Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah DIY 28
Tabel 2-5 Data Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2013 - 2017 30
Tabel 2-6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2015-2017 dalam persen 34
Tabel 2-7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, 2012-2017 35
Tabel 2-8 Garis Kemiskinan Tahun 2013-2017 36
Tabel 2-9 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan berdasarakan Jenis Komoditas Makanan dan Non Makanan Tahun 2017 36
Tabel 2-10 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi di Jawa dan Nasional 37
Tabel 2-11 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi di Jawa dan Nasional 38
Tabel 2-12 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) 38
Tabel 2-13 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (%) 40
Tabel 2-14 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (%) 40
Tabel 2-15 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota ADHB Tahun 2013-2017 43
Tabel 2-16 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017 43
Tabel 2-17 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2013-2017 45
Tabel 2-18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY 48
Tabel 2-19 Tabel Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) DIY Tahun 2013 – 2017 56
Tabel 2-20 Organisasi Seni dan Budaya di DIY 64
Tabel 2-21 Adat, Seni dan Tradisi di DIY 65
Tabel 2-22 Budaya Benda di DIY Tahun 2013-2017 66

Tabel 2-23 SDM Olahraga DIY Tahun 2017 68
Tabel 2-24 Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga di DIY, Tahun 2014-2017 70
Tabel 2-25 Perkembangan Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2014-2017 76
Tabel 2-26 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2013 - 2017 77
Tabel 2-27 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY 78
Tabel 2-28 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2013-2017 79
Tabel 2-29 Jumlah dan Rasio Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, dan Tenaga Gizi Per 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2015 - 2017 80
Tabel 2-30 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan di DIY Tahun 2014-2017 82
Tabel 2-31 Daerah Irigasi di DIY Tahun 2015 84
Tabel 2-32 Daftar Ruas Jalan Provinsi 88
Tabel 2-33 Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2017 89
Tabel 2-34 Jumlah Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal 94
Tabel 2-35 Penanganan Kawasan Kumuh Berdasarkan Kewenangan 95
Tabel 2-36 Data Rumah Tidak Layak Huni di DIY, Tahun 2017 97
Tabel 2-37 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY Tahun 2013 - 2017 103
Tabel 2-38 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2013-2017 105
Tabel 2-39 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya di DIY Tahun 2013 - 2017 106
Tabel 2-40 Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya di DIY Tahun 2015 - 2017 107
Tabel 2-41 Presentase PMKS yang Memperoleh Bantuan di DIY tahun 2014 - 2017 108
Tabel 2-42 Persentase PMKS yang Tertangani di DIY Tahun 2014 - 2017 108
Tabel 2-43 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di DIY Tahun 2015 - 2017 109
Tabel 2-44 Tabel Jumlah dan Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di DIY Tahun 2015 - 2017 111
Tabel 2-45 Capaian Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Bantuan Sosial di DIY Tahun 2015 - 2017 112

Tabel 2-46 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (dalam ribu orang), Tahun 2013 – 2017 (Agustus) 114
Tabel 2-47 Tingkat Penangguran Terbuka di DIY Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2014 - 2017 119
Tabel 2-48 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Menurut Pendidikan Agustus Tahun 2016 – Agustus 2017 119
Tabel 2-49 Jumlah Perusahaan dan Perangkat Hubungan Industrial di DIY Tahun 2017 121
Tabel 2-50 Tabel Indeks Pembangunan Gender DIY 124
Tabel 2-51 Tabel Capaian IDG DIY Tahun 2011-2015 125
Tabel 2-52 Tabel Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin 126
Tabel 2-53 Tabel Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Usia dan Lokasi Lembaga Layanan 2015-2016 129
Tabel 2-54 Tabel Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten 2013-2017 138
Tabel 2-55 Status Mutu Air Sungai DIY dengan Metode Storet 139
Tabel 2-56 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut Periode I dengan Parameter Fisika 142
Tabel 2-57 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut Periode I dengan Parameter Kimia 142
Tabel 2-58 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut Periode I dengan Parameter Biologi 144
Tabel 2-59 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut Periode II dengan Parameter Fisika 144
Tabel 2-60 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut Periode II dengan Parameter Kimia 145
Tabel 2-61 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut Periode II dengan Parameter Biologi 146
Tabel 2-62 Lokasi Pemantauan Periode I Tahun 2017 147
Tabel 2-63 Hasil Pemantauan Fisik Udara Periode I Tahun 2017 149
Tabel 2-64 Angka DIY yang telah melakukan perekaman KTP El Penduduk 154
Tabel 2-65 Kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak usia 0 tahun s/d 18 tahun di DIY Tahun 2017 154
Tabel 2-66 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) Aktif di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 156
Tabel 2-67 Posyandu Aktif di DIY Tahun 2015-2017 157
Tabel 2-68 Jumlah PKK Aktif di DIY Tahun 2016 159
Tabel 2-69 Tabel Rasio Akseptor KB Tahun 2010-2016 161
Tabel 2-70 *Unmet Need* KB di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016 162

Tabel 2-71 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2008-2017 163
Tabel 2-72 Perbandingan Nilai V/C Ratio Tahun 2015 - 2017 165
Tabel 2-73 Data terkait Urusan Komunikasi dan Informatika 168
Tabel 2-74 Pengembangan Sistem Informasi di DIY 168
Tabel 2-75 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2013-2017 170
Tabel 2-76 Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2013-2017 170
Tabel 2-77 Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2013-2017 171
Tabel 2-78 Perkembangan Investasi di DIY Tahun 2013-2017 173
Tabel 2-79 Jumlah Atlet di DIY Tahun 2017 175
Tabel 2-80 Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga dan Sarana Olah Raga di DIY 176
Tabel 2-81 Realisasi Kinerja Urusan Persandian di DIY Tahun 2013-2017 178
Tabel 2-82 Budaya Benda di DIY 179
Tabel 2-83 Persebaran Benda, Bangunan, dan Situs Cagar Budaya Tahun 2017 180
Tabel 2-84 Penanganan Cagar Budaya Tahun 2012-2017 180
Tabel 2-85 Daftar Kawasan Cagar Budaya di DIY 181
Tabel 2-86 Jenis Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Tahun 2012-2017 182
Tabel 2-87 Persebaran Museum di DIY, Tahun 2017 183
Tabel 2-88 Jumlah Pengunjung Museum 2015 - 2017 185
Tabel 2-89 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY tahun 2012-2017 186
Tabel 2-90 Perkembangan Desa / Kelurahan Budaya di DIY hingga 2017 187
Tabel 2-91 Organisasi Seni dan Budaya di DIY 187
Tabel 2-92 Pelaku Seni dan Budaya di DIY Tahun 2012-2017 188
Tabel 2-93 Jumlah Sarana dan Prasrana di DIY Tahun 2012-2017 188
Tabel 2-94 Data Perpustakaan per Jenis Perpustakaan Tahun 2017 189
Tabel 2-95 Data Perpustakaan per Kabupaten/KotaTahun 2017 189
Tabel 2-96 Data Kearsipan di DIY 2013-2017 191
Tabel 2-97 Data Pengolahan Arsip Statis Tahun 2012-2017 192
Tabel 2-98 Data Arsip Inaktif Tahun 2012-2017 192
Tabel 2-99 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY 197
Tabel 2-100 Luas Lahan Sawah Beririgasi dan Non Irigasi di DIY 200
Tabel 2-101 Produksi Tanaman Pangan di DIY (dalam ton), Tahun 2013-2017 201

Tabel 2-102 Produksi Hortikultura di DIY (dalam ton), Tahun 2015-2017 202
Tabel 2-103 Populasi Ternak di DIY (dalam ekor), Tahun 2013-2017 ... 203
Tabel 2-104 Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Strategis di DIY 2013-2017 203
Tabel 2-105 Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2017 205
Tabel 2-106 Data Jenis Energi Baru Terbarukan 209
Tabel 2-107 Data Jenis Energi Baru Terbarukan yang mendukung capaian target di tahun 2017 210
Tabel 2-108 Konsumsi Listrik di DIY (GWH) 212
Tabel 2-109 Elastisitas Energi 212
Tabel 2-110 Jumlah Pemohon WIUP 213
Tabel 2-111 IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi 214
Tabel 2-112 Perkembangan Ekspor di DIY, Tahun 2013-2017 214
Tabel 2-113 Perkembangan Jumlah SIUP di DIY Berdasarkan Golongan Usaha, Tahun 2013 - 2017 215
Tabel 2-114 Perkembangan Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di DIY Per Kabupaten Kota, Tahun 2013-2017 215
Tabel 2-115 Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2013-2017 216
Tabel 2-116 Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2013-2017 217
Tabel 2-117 Data Sentra IKM di DIY per Kabupaten/Kota Tahun 2017. 218
Tabel 2-118 Jumlah Animo Masyarakat dan Pendaftar Transmigrasi di DIY Tahun 2013-2017 220
Tabel 2-119 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2013-2017 220
Tabel 2-120 Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2013-2016 221
Tabel 2-121 Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2017 222
Tabel 2-122 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat DPRDdi DIY Tahun 2013-2017 228
Tabel 2-123 Realisasi Pendapatan Daerah DIY Tahun Anggaran 2014 .. 234
Tabel 2-124 Kemampuan Keuangan Daerah DIY 235
Tabel 2-125 Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Pejabat Struktural 238
Tabel 2-126 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY, Tahun 2012-2016 245
Tabel 2-127 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, Tahun 2012-2016 245
Tabel 2-128 Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY 249
Tabel 2-129 Langganan Bandwidth Pemda DIY 249

Tabel 2-130 Jumlah Penumpang dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional Trans Jogja 2011-2017 255
Tabel 2-131 Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan 257
Tabel 2-132 Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan 257
Tabel 2-133 Persentase Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan 258
Tabel 2-134 Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 Penduduk DIY 258
Tabel 2-135 Jumlah Demonstrasi di DIY Tahun 2011-2016 259
Tabel 2-136 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017dan PK Tahun 2017 264
Tabel 2-137 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 267
Tabel 3-1 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (%), 2019-2022 496
Tabel 3-2 Proyeksi Nilai PDRB Riil (Juta Rupiah), 2019-2022 496
Tabel 3-3 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Juta Rupiah) 497
Tabel 3-4 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran, 2013-2017 (%) 498
Tabel 3-5 Proyeksi Nilai Inflasi (%), 2019-2022 500
Tabel 3-6 Proyeksi Nilai ICOR, 2019-2022 502
Tabel 3-7 Proyeksi Angkatan Kerja dan Penduduk yang Bekerja di DIY Tahun 2018-2022 503
Tabel 3-8 Nilai Indeks sentralitas D.I. Yogyakarta 2016 511
Tabel 3-9 Distribusi Pengeluaran di DIY Per Kelompok Penduduk September 2016 – September 2017 513
Tabel 3-10 Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk per Kelompok Pengeluaran Tahun 2014-2016 di Kabupaten/Kota di DIY 514
Tabel 3-11 Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha dan Desil Kelompok Pengeluaran DIY Tahun 2016 515
Tabel 3-12 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2017-2019 518
Tabel 3-13 Perubahan Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa 527
Tabel 3-14 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY 2012-2017 (dalam jutaan rupiah) 531
Tabel 4-1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 548
Tabel 4-2 Matrik Tema RKPD DIY 2019 dan Misi RPJMN 2015-2019 557
Tabel 4-3 Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2019 562
Tabel 4-4 Sasaran dan Program Pemerintah Daerah 563
Tabel 4-5 Interkoneksi Prioritas Nasional dan Tematik Pembangunan DIY 565

Tabel 4-6 Interkoneksi Sasaran Nasional dan Pemda DIY Tahun 2019 568
Tabel 6-1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Non Keistimewaan Tahun 2019 707
Tabel 6-2 Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Urusan Keistimewaan Tahun 2019 1132
Tabel 7-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta 1191
Tabel 7-2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Istimewa Yogyakarta 1192

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY 6
Gambar 1-2 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 10
Gambar 2-1 Peta Administrasi DIY 14
Gambar 2-2 Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota 14
Gambar 2-3 Peta Satuan Fisiografis DIY 17
Gambar 2-4 Peta Geologi DIY 18
Gambar 2-5 Persentase Luas Wilayah DIY menurut Jenis Tanah 19
Gambar 2-6 Peta Aliran Sungai DIY 20
Gambar 2-7 Peta Tutupan Lahan DIY 25
Gambar 2-8 Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019 28
Gambar 2-9 Piramida Penduduk DIY Tahun 2016 32
Gambar 2-10 Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY dan Nasional tahun 2013-2017 34
Gambar 2-11 Rasio Gini di DIY, Tahun 2013-2017 41
Gambar 2-12 Indeks Williamson DIY Tahun 2013-2017 42
Gambar 2-13 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional 44
Gambar 2-14 Nilai Tukar Petani DIY, Tahun 2013-2017 46
Gambar 2-15 Nilai Tukar Petani DIY Per Sub Sektor , Tahun 2014-2017 47
Gambar 2-16 Angka Melek Huruf tahun 2014 – 2017 50
Gambar 2-17 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY 51
Gambar 2-18 Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah DIY Tahun 2013-2016 52
Gambar 2-19 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016 53
Gambar 2-20 Jumlah Kematian Bayi di DIY Tahun 2011 - 2017 53
Gambar 2-21 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) DIY Tahun 2010 - 2017 55
Gambar 2-22 Perbandingan Indeks Potensi Konflik Dimensi Politik antara Tahun 2013/2014 dengan Tahun 2016 58
Gambar 2-23 Perbandingan Indeks Intensitas Konflik 59
Gambar 2-24 Indeks Potensi Konfilk Yang Bersumber dari Premanisme 60
Gambar 2-25 Perkembangan Premanisme di Wilayah Tempat Tingga 60
Gambar 2-26 Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2016 67

Gambar 2-27 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2014 - 2017 71
Gambar 2-28 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2017 72
Gambar 2-29 Jumlah Kematian Balita Tahun 2012 - 2017 74
Gambar 2-30 Perkembangan Jumlah Kematian Ibu di DIY Tahun 2011-2016 75
Gambar 2-31 Penyebab Kematian Ibu di DIY Tahun 2016 75
Gambar 2-32 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani di DIY Tahun 2014-2017 81
Gambar 2-33 Rencana jalur akses ke Borobudur melalui ruas Sentolo-Nanggulan-Dekso-Klangon 91
Gambar 2-34 Jalan Pendekat Gayamharjo - Lemah Abang dan Jembatan Lemah Abang 92
Gambar 2-35 Perkembangan IDI DIY 2009-2016 100
Gambar 2-36 Perkembangan Indeks Aspek IDI DIY, 2009-2016 101
Gambar 2-37 Grafik Persentase WKSBM yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos di DIY Tahun 2015 - 2017 110
Gambar 2-38 Penduduk Usia Kerja DIY Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan, Bulan Februari 2017 114
Gambar 2-39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2013-2017 115
Gambar 2-40 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013-2017 116
Gambar 2-41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Kabupaten Kota Agustus 2017 117
Gambar 2-42 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY dan Nasional, Tahun 2013-2017 (%) 118
Gambar 2-43 TPT menurut Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 (Agustus) 120
Gambar 2-44 Diagram Jumlah Ketersediaan Pangan Perkapita di DIY Tahun 2013-2017 131
Gambar 2-45 Grafik Jumlah Ketersediaan Energi di DIY Tahun 2013-2017 132
Gambar 2-46 Grafik ketersediaan Protein di DIY Tahun 2012-2017 132
Gambar 2-47 Grafik Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2013-2017 133
Gambar 2-48 Grafik Perkembangan Pangan dan Penyuluhan DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2013-2017 134
Gambar 2-49 Grafik Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2013-2017 135
Gambar 2-50 Grafik Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2013-2017 135

Gambar 2-51 Kelompok Binaan IPM di DIY Tahun 2014 s.d 2016 157
Gambar 2-52 Perubahan TFR di DIY Berdasarkan SDKI 160
Gambar 2-53 Persentase Realisasi Investasi Hingga Tahun 2017 Per Kabupaten/Kota 173
Gambar 2-54 Produksi Perikanan Tangkap DIY Tahun 2013 - 2017 193
Gambar 2-55 Jumlah Nelayan, Kapal Penangkap Ikan dan Rumah Tangga Perikanan dari tahun 2012-2016 194
Gambar 2-56 Produksi Perikanan Budidaya DIY Tahun 2013-2017 195
Gambar 2-57 Tingkat Konsumsi dan Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2012-2016 196
Gambar 2-58 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY 197
Gambar 2-59 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan DTW di DIY 198
Gambar 2-60 Sebaran Pengunjung ODTW di Kabupaten/Kota Tahun 2017 199
Gambar 2-61 Perkembangan Luas Lahan Sawah di DIY 200
Gambar 2-62 Grafik Proporsi Produksi Perkebunan DIY Tahun 2017 204
Gambar 2-63 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Triliun Rupiah), 2013-2017 . 241
Gambar 2-64 Kontribusi Terbesar terhadap PDRB ADHB DIY menurut Sektor (%), 2013-2017 243
Gambar 2-65 Kontribusi Terendah terhadap PDRB ADHB DIY menurut Sektor (%), Tahun 2013-2017 244
Gambar 2-66 Skema Jaringan Fiber Optik Mandiri Pemerintah DIY 251
Gambar 2-67 Rencana sistem jaringan jalan 252
Gambar 2-68 Rencana sistem jaringan jalan Rencana JORR 253
Gambar 2-69 Kawasan Perkotaan dan Bentuk Interaksi dengan Kota-kota di Sekitarnya 253
Gambar 2-70 Sistem Operasional Bus Trans Jogja 254
Gambar 2-71 Presentase Angkatan Kerja DIY Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017 261
Gambar 2-72 Angka Beban Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2013-2017 262
Gambar 3-1 Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2013-2017 494
Gambar 3-2 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi per Tahun 2013-2017 menurut Sektor (%) 495
Gambar 3-3 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor terhadap PDRB DIY (%), 2017 496
Gambar 3-4 Pertumbuhan 3 Komponen Penggunaan dalam Pembentukan PDRB DIY (%), Tahun 2013-2017 499
Gambar 3-5 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2013-2017 500
Gambar 3-6 Perkembangan ICOR DIY (PMTB + Perubahan Inventori), 2013-2017 501

Gambar 3-7 Perkembangan ICOR (PMTB + Perubahan Inventori) Kabupaten/Kota di DIY, 2012-2016 502
Gambar 3-8 Proyeksi Jumlah Pengangguran Terbuka DIY Tahun 2018-2022 (orang) 504
Gambar 3-9 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 - 2022 (%) 506
Gambar 3-10 Jumlah Penduduk Miskin September 2012 – September 2017 (ribuan orang) 507
Gambar 3-11 Persentase Penduduk Miskin September 2012 September 2017 508
Gambar 3-12 Proyeksi Persentase Penduduk Miskin di DIY Tahun 2019-2022 508
Gambar 3-13 Indeks Williamson DIY, Tahun 2013-2017 509
Gambar 3-14 Proyeksi Indeks Williamson DIY, Tahun 2018-2022 510
Gambar 3-15 Perkembangan Rasio Gini Menurut Daerah Tempat Tinggal 512
Gambar 3-16 Proyeksi Indeks Gini Tahun 2017 - 2022 514
Gambar 3-17 Produktivitas Tenaga Kerja per Lapangan Usaha (Juta Rupiah/Orang) Tahun 2016 516
Gambar 3-18 Peta Sebaran Pembangunan Infrastruktur DIY 540
Gambar 4-1 Tema RKP 2019- Tema RKPD DIY 2019 – Tema RKPD Kab/Kota 2019 560
Gambar 4-2 Konektivitas Pusat dan Sub Pusat Pertumbuhan 581
Gambar 4-3 Peta Pengembangan Koridor Ekonomi Strategis 583
Gambar 4-4 Dasar Pemikiran Penurunan Ketimpangan Wilayah 585
Gambar 4-5 Dukungan Lingkungan dalam Pembangunan 587
Gambar 4-6 Hubungan Kemampuan Sumber Daya Lahan, Daya Dukung, Kesesuaian, Kemanfaatan dan Kelayakan Pembangunan 590
Gambar 4-7 Peta Ekoregion DIY 592
Gambar 4-8 Peta Penutup Lahan DIY Tahun 2016 594

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan yang bersifat berkelanjutan serta semangat untuk menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah juga harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Implikasinya pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga harus diselaraskan dengan skema pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan yang telah diamanatkan secara lebih tegas dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah ditindaklanjuti dengan beberapa aturan-aturan pelaksanaan dan teknis.

Filosofi yang mendasari pembangunan DIY yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*. Filosofi itu adalah cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. *Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Lebih lanjut lagi, pembangunan DIY juga membawa

mandat pelaksanaan keistimewaan DIY yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seperti halnya dengan daerah lain, DIY juga menghadapi kompleksitas permasalahan di berbagai sektor dan kepentingan, di samping itu DIY juga harus mewujudkan cita-cita akhir pembangunan jangka panjang (Tahun 2025) yang harus dicapai yaitu masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Oleh karenanya proses pembangunan membutuhkan suatu landasan pemikiran yang komprehensif untuk meraih peluang dan tantangan yang ada dimana landasan ini mampu memetakan kerangka permasalahan secara jelas dan terukur dan juga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di tengah kompleksitas.

Mengacu visi pembangunan jangka panjang DIY sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. RPJMD 2017-2022 merupakan tahapan ketiga dari RPJPD DIY 2005-2025 dengan penekanan pada pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Sedangkan RKPD 2019 merupakan tahun kedua dari RPJMD DIY 2017-2022 yang menekankan pada penguatan SDM dan infrastruktur.

Terkait dengan input pembangunan, proses pembangunan juga mempertimbangkan optimalisasi sumber daya - sumber daya yang dimiliki daerah, dan peningkatan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat dan daerah yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangunan. Hal-hal tersebut menjadi tantangan yang harus diantisipasi di setiap proses pembangunan. Tantangan tersebut menuntut proses pembangunan di DI Yogyakarta untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan sebuah agenda pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh bagian masyarakat dan sektor di DI Yogyakarta. Gubernur DIY dalam pidato dihadapan sidang paripurna istimewa DPRD DIY pada tanggal 4 Agustus 2017 menyampaikan Tema Visi tahun 2017-2022 yaitu *"Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemulian Martabat Manusia Jogja"* yang dijabarkan kedalam lima kemuliaan atau "Panca Mulia". Tema tersebut dikemukakan agar pembangunan kedepan dapat lebih diarahkan untuk mengembangkan wilayah selatan DIY sehingga fenomena

kemiskinan dan ketimpangan wilayah yang sebagian besar berada di wilayah selatan DIY dapat teratasi.

Mengingat kedudukan strategis RKPD, perhatian yang besar dan komprehensif seyogyanya diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD mengingat pentingnya RKPD secara strategis dalam keseluruhan tahap pembangunan daerah. Proses yang terdiri dari beberapa tahapan dan cakupan yang komprehensif dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dokumen RKPD disusun melalui proses bertahap dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD.
   Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :
   a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

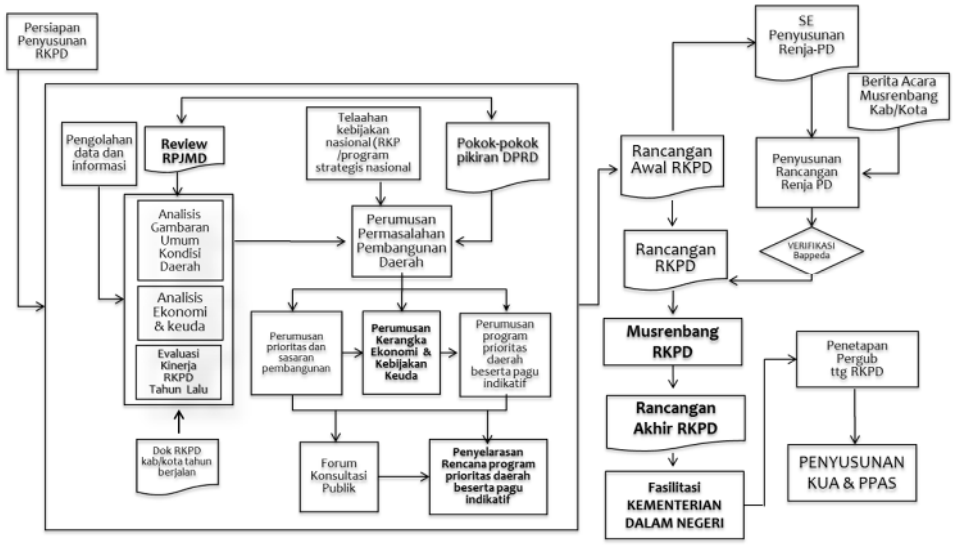
2. Penyusunan rancangan awal RKPD.
   Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.
   a. Perumusan rancangan awal RKPD.
      Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:
      1) Pengolahan data dan informasi.
      2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
      3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
      4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
      5) Penelaahan terhadap kabijakan pemerintah nasional.
      6) Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.
      7) Perumusan permasalahan pembangunan DIY.
      8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
      9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
      10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
      11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
      12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
   b. Penyajian rancangan awal RKPD.
      Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
      1) Pendahuluan.
      2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
      3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
      4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
      5) Rencana program prioritas daerah.

3. Penyusunan rancangan RKPD.
   Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja PD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja PD DIY sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY.

4. Pelaksanaan musrenbang RKPD.
   Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum PD. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara PD, Bappeda DIY dan Bappeda Kabupaten-kota mengenai kegiatan *sharing*. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup :
   a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah DIY dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
   b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah DIY pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD DIY dilaksanakan.
   c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan DIY.
   d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
   e. Sinergi dengan RKP.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD.
   Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan RKPD.
   RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Gambar 1-1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2019 didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan
20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas,

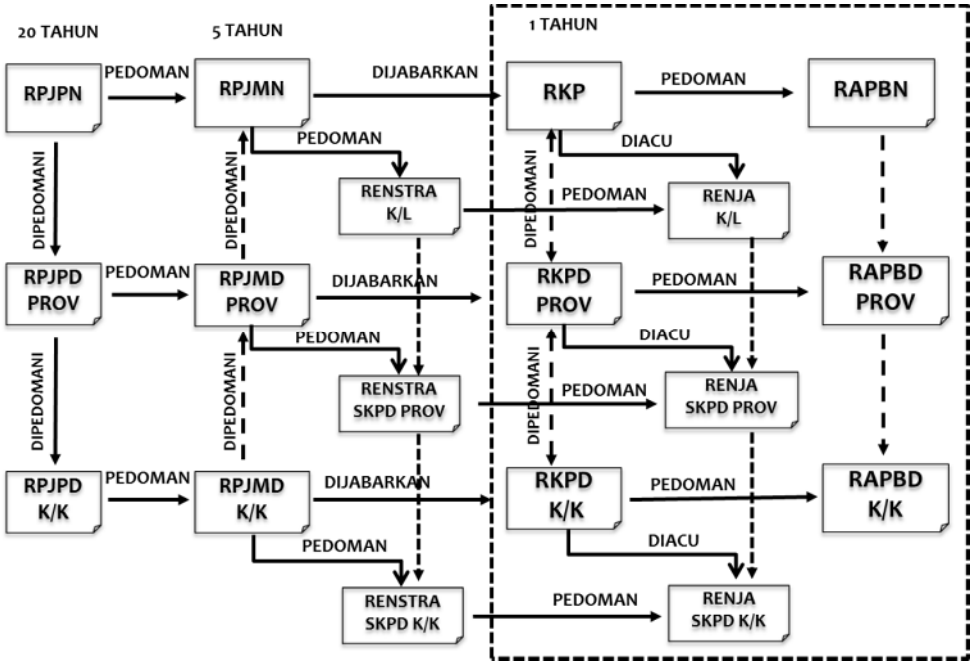
Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69).
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 45);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses

pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, Rencana Strategis (Renstra), RKPD, dan Renja. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Gambar 1-2 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di darah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

1.3.1 Maksud

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan dokumen RKPD dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan

program kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Tujuan

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2019 bertujuan :

1. Memberikan arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
2. Menjadi acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
3. Sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan.

   Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.

   Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

3. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah.

   Memuat penjelasan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

4. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

   Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan, dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019.

5. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kota

   Mengemukakan mengenai target kewilayahan DIY di Kabupaten Kota yang harus didukung oleh capaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kota.

6. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

   Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

7. Bab VII

   Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

8. Bab VIII

   Penutup

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

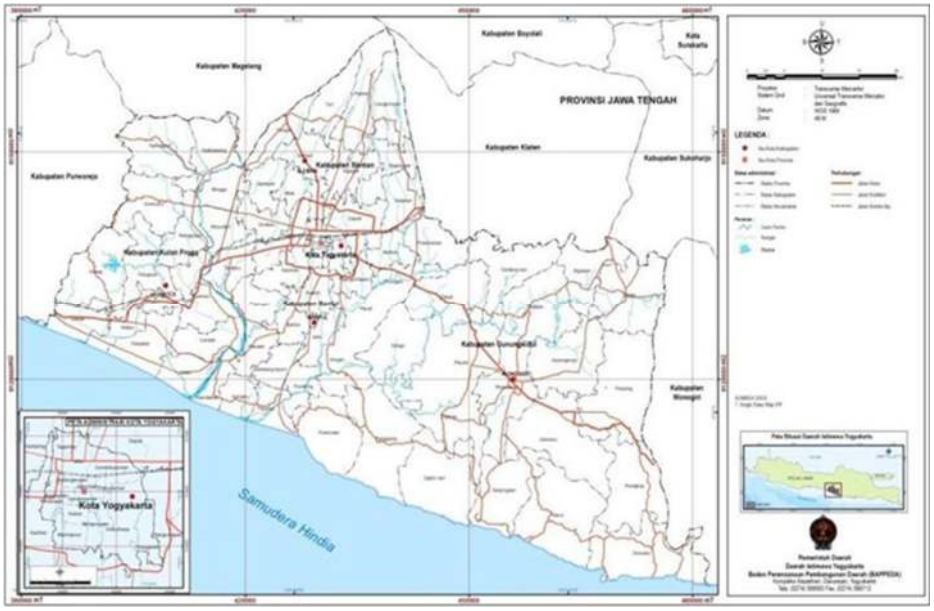
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Secara astronomis, DIY terletak diantara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur sedangkan secara geografis, DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa sisi selatan dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan sebelah selatan dengan Samudra Hindia.

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

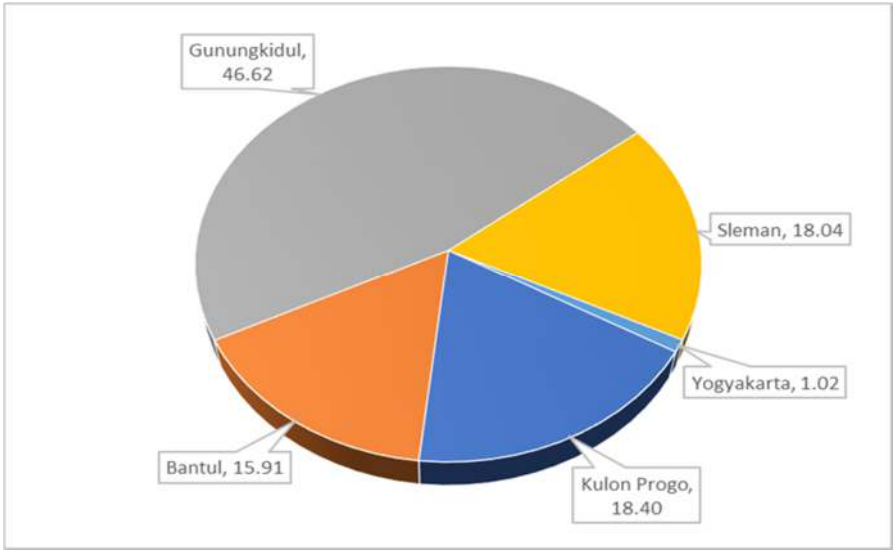
Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km^2 atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.860.359,67 km^2) dan merupakan provinsi dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Apabila ditinjau menurut kabupaten dan kota, wilayah di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu meliputi 46,63% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,02%.



sumber: Bappeda DIY, RTRW Provinsi DIY Tahun 2009-2029

Gambar 2-1 Peta Administrasi DIY

Secara Administratif, DIY terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan terdapat 438 desa/kelurahan.



Sumber: BPS, Statistik Daerah DIY 2017

Gambar 2-2 Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

DIY tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di DIY terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan daerah dataran. Jumlah desa di DIY menurut letak geografis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-1 Jumlah Desa Menurut Kabupaten/ Kota dan Letak Geografis

Kabupaten/ Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan /Desa	Pesisir	Lembah /DAS	Lereng/ Punggung Bukit	Dataran
Kulon Progo	Wates	12	88	10	-	22	56
Bantul	Bantul	17	75	5	-	11	59
Gunungkidul	Wonosari	18	144	18	-	56	70
Sleman	Sleman	17	86	-	-	11	75
KotaYogyakarta	Yogyakarta	14	45	-	-	-	45
DIY	Yogyakarta	78	438	33	0	100	305

sumber: BPS, DIY dalam Angka 2017

2.1.1.1.2 Topografi

Topografi merupakan studi tentang bentuk permukaan bumi. Topografi menampilkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identitas jenis lahan. Relief merupakan bentuk permukaan lahan yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan ketinggian *(amplitude)* dari permukaan bumi suatu bentang lahan *(landform)*. Topografi secara kualitatif adalah bentang lahan *(landform)* dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan kelas lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng dan bentuk lereng. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah dan sistem pengaliran. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis karena tingkat erosi lebih tinggi, sedangkan daerah dengan topografi datar memiliki lapisan tanah yang tebal karena tingkat sedimentasi lebih tinggi. Kecepatan pengaliran air pada topografi datar lebih kecil daripada topografi yang lebih miring.

Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Kemiringan lahan

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat kategori kemiringan, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km2, lahan dengan kemiringan 3-15%

seluas 767,46 km2, lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km^2, dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km^2.

b. Ketinggian lahan

Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian 100—499 mdpl sebesar 65,65%, wilayah dengan ketinggian 500—999 mdpl sebesar 5,04%, dan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%. Wilayah DIY terdiri dari ekosistem gunung api, *karst*, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumberdaya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:

1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km^2, ketinggian 150–700 m, terletak di KabupatenGunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping *(limestone)* yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran basin Wonosari. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ± 582,81 km^2, ketinggian 80–2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, KotaYogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.
3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas ± 215,62 km^2, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;
4. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km^2, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi

berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.



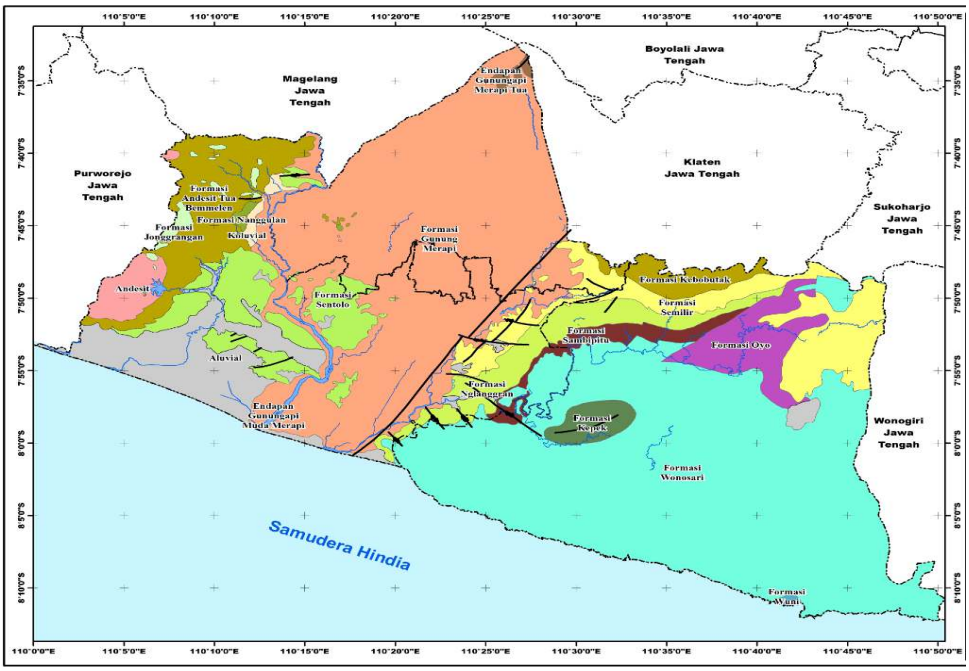
Sumber: Bappeda DIY, Tahun 2014

Gambar 2-3 Peta Satuan Fisiografis DIY

2.1.1.1.3 Geologi

Informasi geologi DIY diperoleh dari Peta Geologi DIY skala 1:100.000. Formasi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tmpk), Formasi Wonosari - Punung (Tmwl), Formasi Sentolo (Tmps), Formasi Oyo (Tmo), Formasi Wuni (Tmw), Formasi Sambipitu (Tmss), Formasi Semilir (Tms), Formasi Nglanggran (Tmng), Formasi Kebo-Butak (Tomk), dan Formasi Mandalika (Towm).

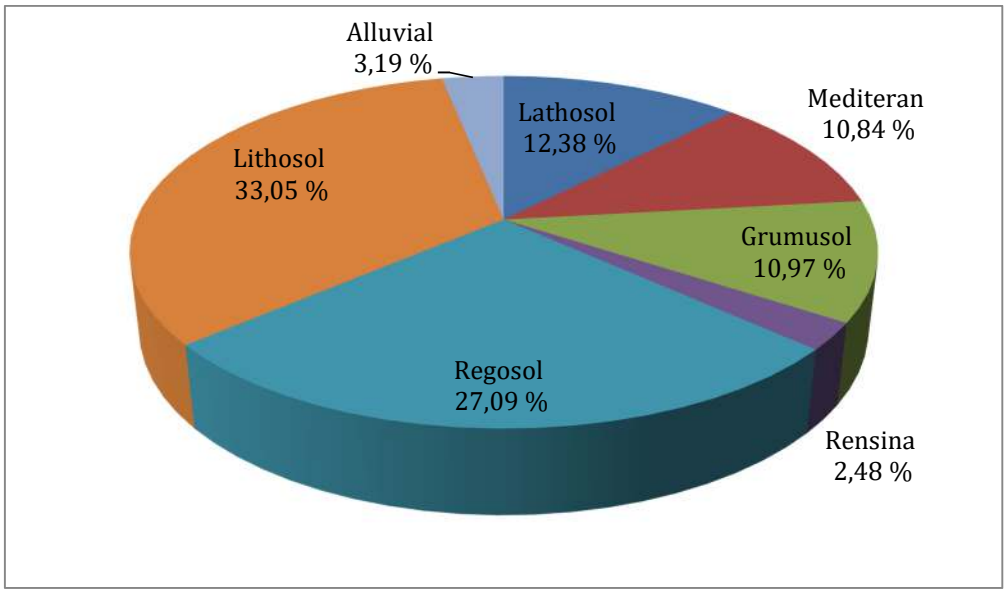
Daerah ini mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada Formasi Semilir (Tms), Formasi Oya (Tmo), Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) dan Formasi Kepek (Tmpk). Patahan berupa sesar turun dengan pola antithetic fault block, terdapat antara lain pada terban Bantul.



sumber: Bappeda DIY, Tahun 2017

Gambar 2-4 Peta Geologi DIY

Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Hal ini disebabkan karena letak DIY yang berada di dataran lereng Gunung Api Merapi yang mengandung tanah regosol seluas 863,06 km^2 atau sekitar 27,09%. Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api dan merupakan tanah aluvial yang baru diendapkan. Sementara jenis tanah lain di DIY berupa tanah aluvial seluas 101,74 km^2, lithosol 1.052,93 km^2, resina 78,83km^2, grumusol 349,35 km^2, mediteran 345,40 km^2, dan lathosol 394,49 km^2.

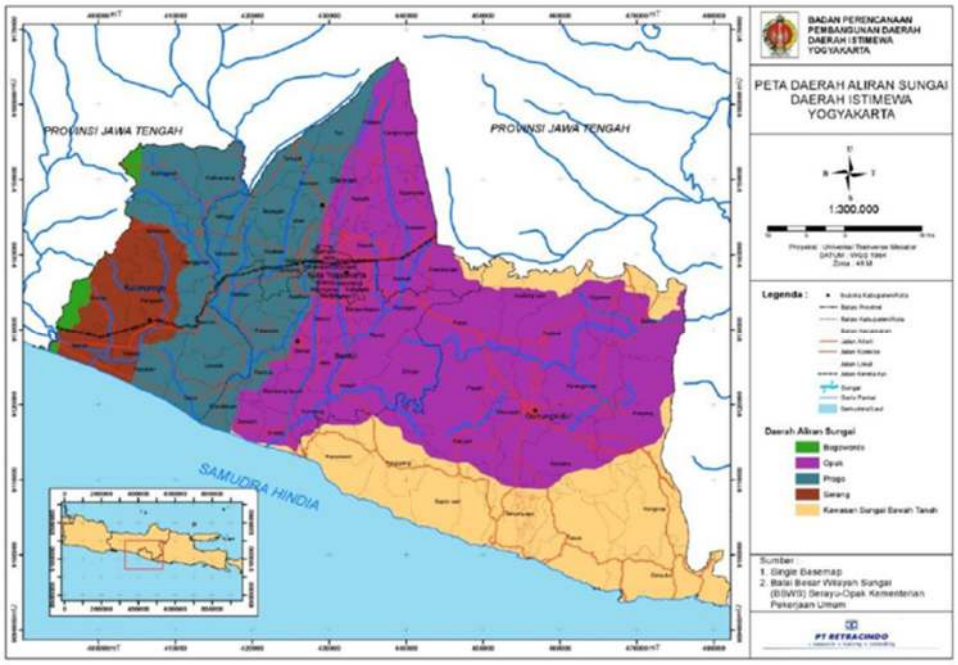


Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2017

Gambar 2-5 Persentase Luas Wilayah DIY menurut Jenis Tanah

2.1.1.1.4 Hidrologi

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbagi menjadi 4 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan sedikit DAS Bogowonto. Hanya DAS Serang yang seluruh wilayahnya berada di DIY sedangkan DAS lainnya sebagian wilayahnya terutama bagian hulunya berada di Provinsi Jawa Tengah. Peta pembagian DAS ini dapat dilihat pada Gambar Peta Aliran Sungai dibawah ini :



Sumber : Bappeda DIY, Roadmap pengelolaan dan Pengendalian LH, 2014

Gambar 2-6 Peta Aliran Sungai DIY

DAS tersebut yang bagian hilirnya langsung berakhir di Samudra Indonesia melalui wilayah Kabupaten Bantul, Kulon Progo atau Gunungkidul adalah:

a. DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul.
b. DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
c. DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekikjamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha.

Kondisi cadangan air tanah di wilayah DIY, dapat dilihat dari kondisi *aquifer* yang ada di wilayah tersebut. Pada prinsipnya, *aquifer* di wilayah DIY dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) *aquifer*, yaitu:

a. *Mayor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi

dan air baku). Termasuk daerah mayor *aquifer* adalah: Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman.

b. *Minor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah *minor aquifer* : Formasi Wates, Gumuk pasir.
c. *Poor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah *poor aquifer* adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambipitu dan Oyo, dan Andesite tua.
d. *Non Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah *non aquifer* adalah: Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggeran, serta Formasi Nanggulan.

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki pontensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara kuantitas masing-masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

Tabel 2-2 Debit Rerata Sungai di DIY

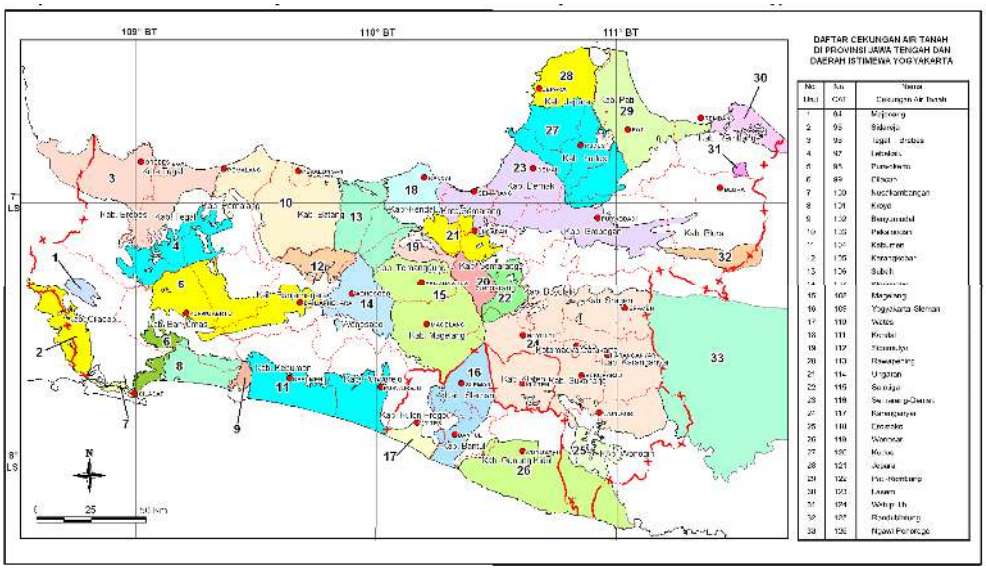
Sungai	Debit Rerata Bulanan (m^3/det)									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Sungai Progo (Duwet)	1,26	148,45	0,03	120,83	0,60	149,50	0,35	209,79	0,35	246,8
Sungai Bedog (Guwosari)	2,66	12,71	1,75	10,36	0,44	10,85	0,95	15,84	0,33	17,32
Sungai Code (Kaloran)	1,09	3,71	0,99	2,76	0,25	4,26	0,51	4,16	0,57	3,91
Sungai Winongo (Padokan)	0,21	5,01	0,26	4,59	0,53	7,17	0,27	6,94	0,16	7,68
Sungai Gadjahwong (Papringan)	0,43	2,67	0,26	2,48	0,42	2,46	0,22	2,35	0,31	5,25
Sungai Opak (Pulo)	0,02	0,89	0,05	0,74	0,07	1,52	0,10	2,70	0,29	1,36

Sumber: Bidang SDA, Dinas PUP ESDM 2017

Untuk sungai bawah tanah, debit rerata untuk sungai bawah tanah (SBT) Bribin sebesar 0,95 m^3/det, SBT Ngobaran 0,70 m^3/det, SBT Seropan 0,80 m^3/det, dan SBT Baron debit rerata 0,10 m^3/det.

Berdasarkan Permen ESDM No.02 Th.2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, terdapat 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) di DIY yaitu CAT Yogyakarta-Sleman, CAT Wates dan CAT Wonosari.

CAT Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebalah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Cekungan ini merupakan cekungan air tanah (CAT) yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1200 km^2, meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni: Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. CAT Wates terletak di sisi selatan Kulon Progo untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan CAT Wonosari berada di sisi selatan Gunungkidul, untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Gunungkidul.



Sumber : Permen ESDM No.02 Th.2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia

2.1.1.1.5 Klimatologi

Kondisi iklim sangat berpengaruh pada suatu daerah, baik pada potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. DIY terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau.

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di DIY juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Indonesia, terjadi banyak penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi.

Parameter iklim, seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan arah angin, sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Pada tahun 2016, DIY tercatat memiliki: a). rata-rata suhu udara minimum 22,6˚C dan maksimum 33,3˚C; b). rata-rata curah hujan perbulan maksimum 508,2 mm dengan rata-rata hari hujan per bulan maksimum 27 kali; c). kelembaban udara minimum 43% dan maksimum 100%; d). tekanan udara antara 1012,3 mb – 1014,8 mb; e). kecepatan angin minimum 6 knot dan maksimum 17 knot *(Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2017)*.

2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

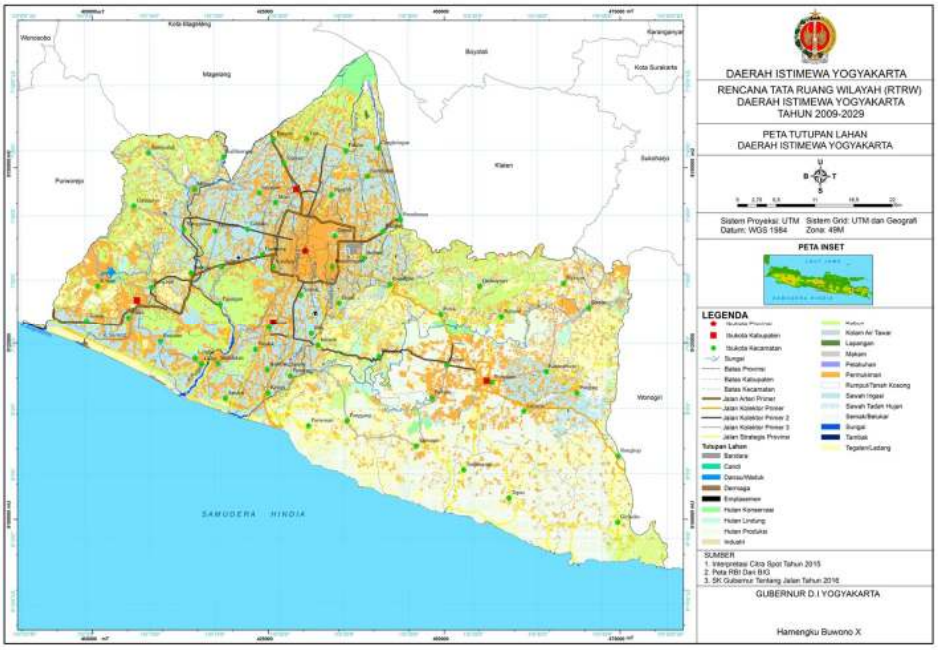
Berdasarkan data tutupan lahan tahun 2015 yang terdapat pada kajian peninjauan Perda DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY, penggunaan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi permukiman, semak/belukar, pertanian, perkebunan dan hutan. Dominasi penggunaan lahan terbesar yaitu permukiman seluas 86,634.80 Ha atau sebesar 27.321%, diikuti semak/belukar seluas 63,227.04 Ha atau sebesar 19.939%. Pertanian yang didominasi sawah irigasi dan tegalan/lading yaitu 17.547% atau sekitar 55,640.93 Ha untuk sawah irigasi dan 13.497% atau seluas 42,797.81 Ha untuk tegalan/lading, sedangkan

sawah tadah hujan hanya sekitar 0.940% atau 2,980.58 Ha. Perkebunan di wilayah DIY masih cukup luas yaitu sebesar 14.535% atau 46,089.80 Ha. Hutan yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi hanya sekitar 4.668% atau seluas 14,803.56 Ha. Penggunaan lahan lainnya selebihnya terdiri dari bandara, candi, danau/waduk, dermaga, emplasemen, industri, kolam, lapangan, makam, pelabuhan, tanah kosong, sungai dan tambak, seperti tabel berikut :

Tabel 2-3 Penggunaan Lahan DIY

PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)	Persentase
Bandara	295.08	0.093%
Candi	32.61	0.010%
Danau/Waduk	253.91	0.080%
Dermaga	57.22	0.018%
Emplasemen	138.76	0.044%
Hutan Konservasi	3,295.11	1.039%
Hutan Lindung	2,201.22	0.694%
Hutan Produksi	9,307.23	2.935%
Industri	35.82	0.011%
Kebun	46,089.80	14.535%
Kolam Air Tawar	39.61	0.012%
Lapangan	1.63	0.001%
Lapangan Olah Raga	111.49	0.035%
Makam	41.74	0.013%
Pelabuhan	2.81	0.001%
Permukiman	86,634.80	27.321%
Rumput/Tanah Kosong	1,193.52	0.376%
Sawah Irigasi	55,640.93	17.547%
Sawah Tadah Hujan	2,980.58	0.940%
Semak/Belukar	63,227.04	19.939%
Sungai	2,609.94	0.823%
Tambak	107.23	0.034%
Tegalan/Ladang	42,797.81	13.497%

Sumber : Peninjauan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY



Sumber : Peninjauan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY

Gambar 2-7 Peta Tutupan Lahan DIY

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang, kesesuaian penggunaan lahan di DIY pada tahun 2017 terhadap pola ruang RTRW DIY Perda Nomor 2 tahun 2010 seluas 205.504,6 Ha, atau sebesar 64,79% dengan tingkat kesesuaian paling tinggi pada kawasan cagar alam dan kawasan pertanian lahan kering. Kesesuaian pemanfaatan ruang secara detil ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2-5 Tabel Rincian Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan	Sesuai	Tidak Sesuai	Belum Terwujud	Grand Total
Cagar Alam	124,5	1163,8		**1288,3**
Cagar Alam Geologi	64432,9	20700,3		**85133,2**
Cagar Budaya	13,5	283,4		**296,9**
Hutan-Lindung	5020,0	39636,4		**44656,4**
Sekitar-danau/waduk	1001,2	111,4		**1112,6**
Sempadan Pantai	752,1	427,7		**1179,8**

Kawasan	Sesuai	Tidak Sesuai	Belum Terwujud	Grand Total
Sempadan Sungai	6976,0	5791,3		**12767,2**
Sempadan Waduk	46,5	155,7		**202,2**
Taman Ht Ry & HL	1456,9	3,9		**1460,9**
Waduk Tinalah	162,0	109,6		**271,7**
Kawasan Resapan Air	36645,7	0,0		**36645,7**
Total	**116631,3**	**68383,6**		**185014,9**
Persentase	63,04%	36,96%		

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2017

Tabel 2-6 Tabel Rincian Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang Kawasan Budidaya dan Total Niai Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Kawasan	Sesuai	Tidak Sesuai	Belum Terwujud	Grand Total
Hutan Penelitian	394,5	11,8	2,4	**408,7**
Hutan Produksi	5403,4	1045,3	4407,5	**10856,2**
Industri	0,0	179,5	639,5	**819,0**
Militer dan Kepolisian	1,1	193,5	417,2	**611,8**
Pariwisata	27,9	38,9	176,1	**242,9**
Pendidikan Tinggi	615,6	0,4	117,4	**733,3**
Permukiman Desa	24304,5	292,7	19265,0	**43862,1**
Permukiman Kota	9840,2	10,4	5793,4	**15644,0**
Pertambangan	518,5	1404,3		**1922,8**
Pertanian Lahan Basah	19622,5	4107,5	1759,0	**25489,1**
Pertanian Lahan Kering	27569,9	3821,5	987,0	**32378,4**
Suaka Marga Satwa	575,4	21,4		**596,8**
Total	**88873,3**	**11127,4**	**33564,4**	**133565,1**
Persentase	**66,54%**	**8,33%**	**25,13%**	
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	**= (63,04 % + 66,54 %) : 2 = 64,79 %**			

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2017

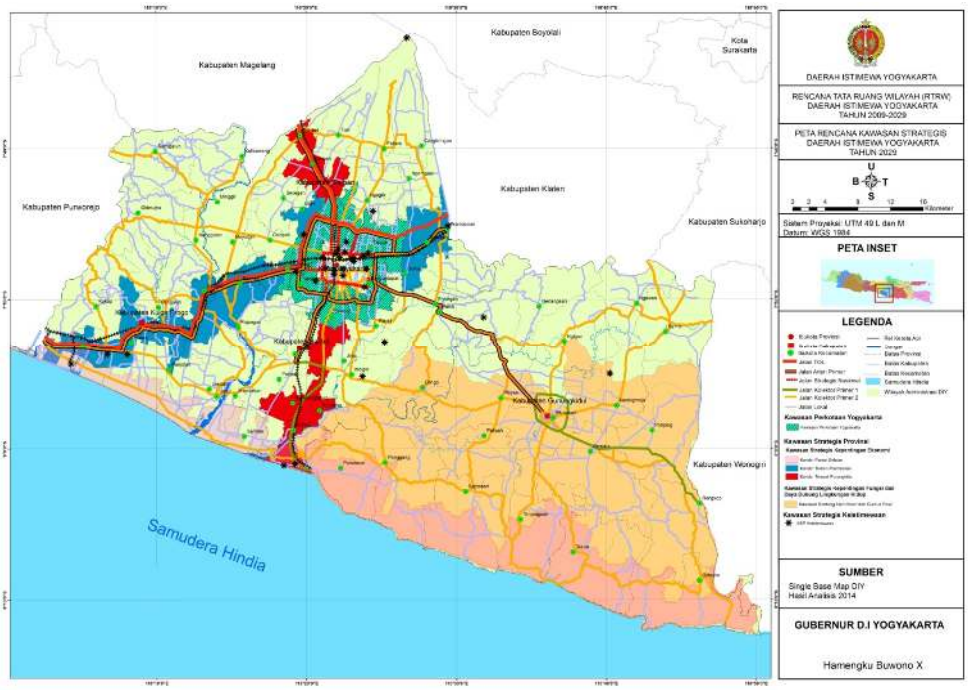
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) DIY, berada pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Berdasarkan kajian peninjauan Perda DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang kawasan budidaya terdiri dari : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan budidaya lainnya. Sedangkan potensi pengembangan wilayah sesuai dengan kawasan strategis provinsi terdiri atas: kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon-Prambanan, Kawasan Tempel-Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi terdiri atas Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan materi review RTRW DIY terdapat beberapa perubahan yang mempengaruhi perubahan potensi pengembangan wilayah. Perubahan yang terdapat materi review RTRW DIY diantaranya adanya perubahan sistem perkotaan, dimana Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang semula ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Wates dan Wonosari, menjadi ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Temon – Wates dan Kawasan Perkotaan Wonosari. Perubahan signifikan lainnya yaitu dengan adanya pengembangan bandar udara baru dan kota bandara (*Airport City*) serta *Aerotropolis* di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian bandar udara baru Yogyakarta di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pelabuhan laut di Pantai Selatan, serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.



Sumber: Peninjauan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY

Gambar 2-8 Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Pada rancangan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2018 – 2022 dijelaskan tentang potensi ancaman bencana yang menyajikan rincian indeks bahaya dengan luas daerah terpapar (hektar) untuk bencana yang berpotensi di wilayah DIY sebagai berikut :

Tabel 2-4 Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah DIY

No	Jenis Ancaman Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Banjir	158.551	Tinggi
2	Banjir Bandang	3.059	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	287.466	Sedang
4	Epidemi Dan Wabah Penyakit	20.317	Rendah

No	Jenis Ancaman Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
5	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	2.476	Sedang
6	Gempa bumi	313.315	Tinggi
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	12.757	Tinggi
8	Kegagalan Teknologi	1.901	Tinggi
9	Kekeringan	313.315	Tinggi
10	Letusan Gunungapi Merapi	7.755	Tinggi
11	Tanah Longsor	44.458	Tinggi
12	Tsunami	7.522	Tinggi

sumber: Kajian Rencana Pengurangan Risiko Bencana DIY 2018-2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kelas resiko bahaya di DIY berada pada kelas rendah, sedang, hingga tinggi. Adapun bencana dengan kelas bahaya rendah yaitu epidemi dan wabah penyakit, bencana yang memilik kelas bahaya sedang yaitu cuaca ekstrim dan gelombang ekstrim dan abrasi. Sedangkan bencana yang memiliki kelas bahaya tinggi yaitu banjir bandang, gempabumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kegagalan teknologi, letusan gunungapi, kebakaran hutan dan lahan dan tsunami. Penentuan indeks tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya yang paling besar, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam di wilayah DIY.

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial di DIY antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sementara itu, potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan non alam, selama ini masih relatif kecil.

Risiko bencana harus tetap menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah. Wilayah rawan bencana telah diidentifikasi. Kawasan rawan bencana gunung berapi di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman. Kawasan yang terdampak mencakup hampir seluruh wilayah DIY terutama Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi berpotensi terjadi pada kawasan lereng pegunungan di Kulon Progo yang mengacam wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat serta pada lereng pegunungan selatan

(Baturagung) yang mengancam wilayah Gunungkidul bagian utara dan Kabupaten Bantul bagian timur.

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan khususnya pada wilayah dengan bentang alam karst. Kawasan rawan bencana angin topan berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan daerah-daerah di Kabupaten Sleman bagian utara serta wilayah perkotaan Yogyakarta.

Kawasan rawan gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Di samping itu, secara geologi, di wilayah DIY terdapat beberapa sesar yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai merupakan wilayah yang rentan mengalami goncangan akibat gempabumi. Kawasan rawan bencana tsunami di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 m dari permukaan air laut.

Selama tahun 2013-2017, bencana alam yang cukup sering terjadi di DIY adalah bencana angin ribut/puting beliung, kebakaran hutan/lahan, tanah longsor dan banjir. Pada tahun 2015 sebanyak 102 kejadian bencana alam terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun 2016 dan 2017 kejadian bencana justru lebih sering terjadi masing-masing 234 kali dan 588 kali kejadian.

Tabel 2-5 Data Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2013 - 2017

Nama Kejadian	2013	2014	2015	2016	2017
Banjir	67	58	1	7	18
Tanah Longsor	332	46	17	80	141
Kebakaran Hutan/Lahan	33	18	40	NA	NA
Kebakaran	NA	NA	NA	102	150
Angin Kencang	371	206	35	30	99
Petir	NA	NA	NA	NA	8
Gelombang Pasang	NA	NA	NA	NA	3
Abrasi	NA	NA	NA	NA	4

Nama Kejadian	2013	2014	2015	2016	2017
Erosi	NA	NA	NA	NA	35
Tanah Amblas	NA	NA	NA	NA	3
Laka Laut	NA	NA	NA	NA	9
Laka Sungai	NA	NA	NA	NA	8
Laka Sumur	NA	NA	NA	NA	1
Pohon Tumbang	NA	NA	NA	NA	52
Dahan Patah	NA	NA	NA	NA	7
Rumah roboh	NA	NA	NA	NA	26
Penemuan Mayat	NA	NA	NA	NA	18
Gempa	2	3	8	14	5
Kekeringan	1	1	1	1	1
Gunung Meletus	0	1	0	0	0
JUMLAH	**806**	**333**	**102**	**234**	**588**

Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY, 2018

2.1.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut BPS Provinsi DIY pada tahun 2016 sebanyak 3.720.912 jiwa dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 49,45 persen atau sebanyak 1.839.951 jiwa dan penduduk perempuan 50,55 persen atau sebanyak 1.880.961 jiwa. Jumlah penduduk DIY terbesar tercatat berada di Kabupaten Sleman sebesar 1.180.479 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil sebanyak 416.683 jiwa berada di Kabupaten Kulon Progo. Komposisi penduduk berdasarkan umur dapat terlihat dalam gambar piramida penduduk berikut :



Sumber : BPS, DIY Dalam Angka 2017

Gambar 2-9 Piramida Penduduk DIY Tahun 2016

Pertumbuhan jumlah penduduk DIY dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Dari data BPS (DIY Dalam Angka 2017), tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk di DIY tahun 2010 – 2016 sebesar 1,18, dengan laju pertumbuhan terkecil di Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,08 dan tertinggi di Kabupaten Bantul sebesar 1,31.

Secara umum, kepadatan penduduk DIY pada tahun 2016 mencapai 1.167,97 jiwa per km^2. Tingkat kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota dari tingkat kepadatan tertinggi ke terendah berturut-turut sebagai berikut: 1) Kota Yogyakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 12.853,66 jiwa per km^2, 2) Kabupaten Sleman, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.053,65 jiwa per km^2, 3) Kabupaten Bantul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.940,47 jiwa per km^2, 4) Kabupaten Kulon Progo, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 710,74 jiwa per km^2, dan 5) Kabupaten Gunungkidul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 486,40 jiwa per km^2.

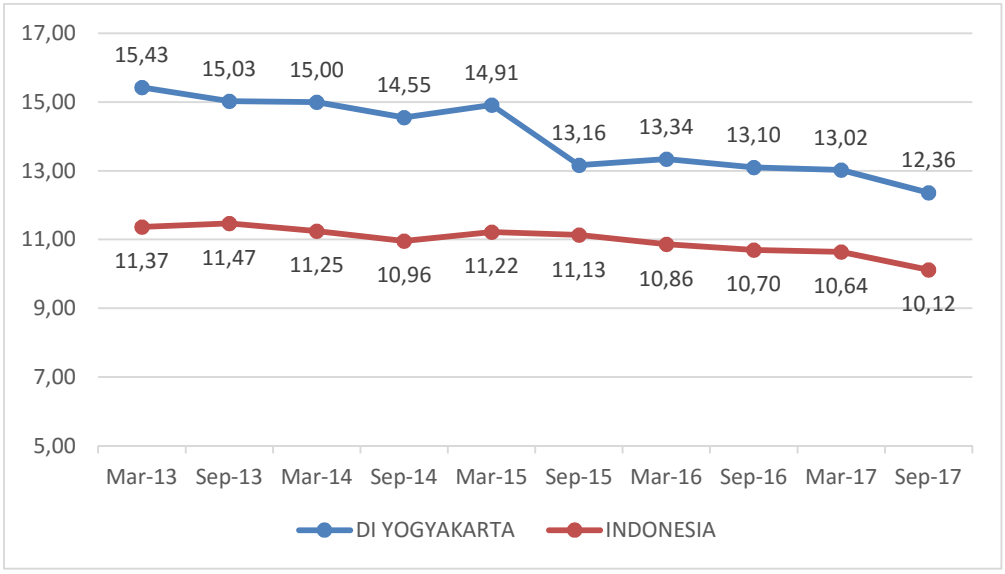
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara umum diukur dengan menggunakan indikator-indikator moneter seperti tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita. Tingkat kemiskinan menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan Sementara itu pendapatan perkapita menunjukan besarnya rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah. Meskipun mirip, kedua indikator tersebut umumnya menggunakan pendekatan perhitungan yang berbeda. Tingkat kemiskinan diperoleh dari data survei SUSENAS sementara itu pendapatan perkapita diperoleh dari data PDRB wilayah. Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan juga ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan antar pendapatan antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah.

2.1.2.1.1 Penduduk Miskin

Kemiskinan masih menjadi permasalahan pokok pembangunan DIY. Meskipun memiliki pola penurunan dari tahun ke tahun, tingkat kemiskinan di DIY yang mencapai 12,36% pada tahun 2017 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Angka tersebut jika dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, tingkat kemiskinan DIY merupakan yang tinggi. DKI Jakarta pada september 2017 tercatat hanya memiliki tingkat kemiskinan sebesar 3,78%, sementara itu Banten mencapai 5,59% Jawa Barat mencapai 7,83%, Jawa Timur mencapai 11,2% dan Jawa Tengah sebesar 12,23%.



Sumber: Susenas Maret 2013 – September 2017

Gambar 2-10 Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY dan Nasional tahun 2013-2017

Jika dilihat antar kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, kondisi ini sejalan dengan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

Tabel 2-6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2015-2017 dalam persen

Nama Wilayah	2015	2016	2017*
Kulon Progo	21,4	20,3	20,03
Bantul	16,33	14,55	14,07
Gunung Kidul	21,73	19,34	18,65
Sleman	9,46	8,21	8,13
Kota Yogyakarta	8,75	7,7	7,64

**) angka sementara*
Sumber : BPS

Dilihat dari karakter desa dan kota, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Hal tersebut menjelaskan mengapa Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan

Bantul yang masih didominasi wilayah pedesaan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Namun demikian, yang perlu menjadi perhatian juga adalah besarnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan jauh lebih besar dari jumlah penduduk miskin di pedesaan. Tahun 2017 ada sekitar 298,39 ribu penduduk miskin di wilayah perkotaan sementara di wilayah pedesaan hanya sekitar 167,94 ribu jiwa. Tingginya jumlah penduduk di wilayah perkotaan sejalan dengan tingginya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan tersebut

Tabel 2-7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, 2012-2017

Periode	Perkotaan		Pedesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)
Maret 2012	305,89	13,13	259,44	21,76
September 2012	306,50	13,10	255,60	21,29
Maret 2013	315,47	13,43	234,73	19,29
September 2013	325,53	13,73	209,66	17,62
Maret 2014	333,03	13,81	211,84	17,36
September 2014	324,43	13,36	208,15	16,88
Maret 2015	329,65	13,43	220,57	17,85
September 2015	292,64	11,93	192,91	15,62
Maret 2016	297,71	11,71	197,23	16,63
September 2016	301,25	11,68	187,58	16,27
Maret 2017	309,03	11,72	179,51	16,11
September 2017	298,39	11,00	167,94	15,86

Sumber: Susenas, Maret 2010 – September 2017

Tingkat kemiskinan ditentukan oleh besarnya garis kemiskinan. Penduduk yang miskin adalah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan yang merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Secara nasional maupun DIY, terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun. Kenaikan garis kemiskinan didorong oleh peningkatan harga-harga. Dibandingkan dengan wilayah perdesaan, garis kemiskinan di kota lebih tinggi. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

Tabel 2-8 Garis Kemiskinan Tahun 2013-2017

Periode	Perkotaan		Perdesaan	
	DIY	Indonesia	DIY	Indonesia
Mar-13	297.391	289.042	256.558	253.273
Sep-13	317.925	275.779	275.786	275.779
Mar-14	327.273	318.514	286.137	286.097
Sep-14	333.561	326.853	296.429	296.681
Mar-15	347.787	342.541	312.249	317.881
Sep-15	359.470	356.378	324.386	333.034
Mar-16	364.786	364.527	331.308	343.647
Sep-16	370.510	372.114	337.230	350.420
Mar-17	385.308	385.621	348.061	361.496
Sep-17	413.631	400.995	352.861	370.910

Sumber: Susenas Maret 2013 – September 2017

Dilihat dari kontribusinya, lima komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar pada garis kemiskinan makanan di perkotaan maupun di perdesaan yaitu beras, daging sapi, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan gula pasir. Dengan beras masih menjadi kontribusi tertinggi dalam garis kemiskinan, program-program terkait operasi pasar beras maupun beras untuk masyarakat miskin masih perlu dilanjutkan dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerima. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengeluaran untuk rokok kretek filter yang masih menempati urutan atas. Upaya-upaya promosi kesehatan untuk masyarakat perihal bahaya rokok harus terus diupayakan.

Tabel 2-9 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan berdasarakan Jenis Komoditas Makanan dan Non Makanan Tahun 2017

Jenis Komoditas	Perkotaan	Jenis Komoditas	Perdesaan
Garis Kemiskinan Makanan			
Beras	23,06	Beras	28,27
Daging Sapi	16,57	Rokok kretek filter	11,23
Rokok kretek filter	11,36	Daging Sapi	7,02
Telur ayam ras	5,79	Telur ayam ras	5,33
Gula pasir	4,42	Kue Basah	4,12

Jenis Komoditas	Perkotaan	Jenis Komoditas	Perdesaan
Garis Kemiskinan Non Makanan			
Perumahan	22,39	Perumahan	23,18
Bensin	21,5	Bensin	22,58
Listrik	13,94	Air	7,39
Pendidikan	9,32	KayuBakar	6,94
Perlengkapan Mandi	3,97	Listrik	5,76

Sumber: Susenas September 2017

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan (*poverty severity index*) dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di DIY cenderung mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, indeks kedalaman kemiskinan di DIY masih relatif lebih tinggi dari nasional. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Terdapat perbaikan atas kesenjangan pengeluaran tersebut

Tabel 2-10 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi di Jawa dan Nasional

Prov	Mar-12	Sep-12	Mar-13	Sep-13	Mar-14	Sep-14	Mar-15	Sep-15	Mar-16	Sep-16	Mar-17	Sep-17
DKI Jakarta	0,5	0,56	0,63	0,39	0,39	0,6	0,52	0,27	0,46	0,43	0,49	0,61
Jawa Barat	1,64	1,62	1,32	1,65	1,52	1,39	1,63	1,67	1,49	1,28	1,45	1,39
Jawa Tengah	2,27	2,39	2,21	2,37	2,25	2,09	2,44	2,17	2,37	2,12	2,21	2,11
DI Yogyakarta	3,47	2,89	2,4	2,13	2,19	2,35	2,93	2,32	2,3	1,75	2,19	2,09
Jawa Timur	1,81	1,93	1,84	2,07	1,85	1,86	2,06	2,13	1,99	1,95	1,87	2,09
Banten	0,74	0,95	0,7	1,02	0,83	0,79	0,94	0,9	0,8	0,76	0,86	0,78
Indonesia	1,88	1,9	1,75	1,89	1,75	1,75	1,97	1,84	1,94	1,74	1,83	1,79

Sumber: Susenas, Maret 2013 – September 2017

Tabel 2-11 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi di Jawa dan Nasional

Prov	Mar-13	Sep-13	Mar-14	Sep-14	Mar-15	Sep-15	Mar-16	Sep-16	Mar-17	Sep-17
DKI Jakarta	0,17	0,07	0,07	0,13	0,1	0,04	0,08	0,08	0,1	0,15
Jawa Barat	0,3	0,44	0,38	0,33	0,43	0,49	0,37	0,28	0,37	0,35
Jawa Tengah	0,54	0,59	0,56	0,51	0,65	0,59	0,63	0,54	0,57	0,55
DI Yogyakarta	0,55	0,46	0,48	0,61	0,83	0,63	0,59	0,36	0,55	0,46
Jawa Timur	0,43	0,5	0,44	0,45	0,52	0,61	0,47	0,47	0,45	0,56
Banten	0,16	0,29	0,19	0,18	0,23	0,21	0,17	0,17	0,19	0,16
Indonesia	0,43	0,48	0,43	0,44	0,53	0,51	0,53	0,44	0,48	0,46

Sumber: Susenas, Maret 2013 – September 2017

2.1.2.1.2 Pendapatan Perkapita

Kinerja perekonomian DIY selama kurun waktu 2013-2017 menunjukan peningkatan yang diindikasikan oleh selalu meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pada tahun 20131 nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 84,924 triliun dan pada tahun 2017 sudah mencapai Rp 119,172 triliun. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Tabel 2-12 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.449.019,7	9.769.112	10.848.369	11.456.173	11.933.401
Pertambangan dan Penggalian	495.039,5	537.599	573.133	593.156	615.943
Industri Pengolahan	11.563.733,8	12.614.921,0	13.236.292	14.547.753	15.636.603
Pengadaan Listrik dan Gas	86.515,1	89.669	92.610	141.794	173.689
Pengadaan Air,	89.645,3	102.670	109.697	114.765	121.272

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
Konstruksi	8.060.750,5	8.722.682	9.499.917	10.286.734	11.303.630
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.938.421,0	7.681.035	8.342.646	9.332.038	10.241.621
Transportasi dan Pergudangan	4.783.126,5	5.313.233	5.755.748	6.253.137	6.783.681
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.284.060,7	9.323.242	10.383.391	11.255.100	12.304.099
Informasi dan Komunikasi	7.572.218,9	7.897.507	8.244.242	8.957.494	9.789.586
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.170.932,7	3.602.561	.028.358	4.342.146	4.640.943
Real Estate	5.815.245,1	6.497.271	7.143.655	7.808.289	8.382.668
Jasa Perusahaan	855.439,4	956.391	1.048.359	1.115.194	1.207.970
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.702.818,7	7.492.246	8.348.234	9.217.108	10.213.350
Jasa Pendidikan	6.816.002,1	7.600.855	8.598.744	9.088.421	9.711.308
Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	2.094.674,4	2.276.361	2.553.551	2.764.049	3.004.112
Jasa Lainnya	2.147.020,2	2.351.975	2.589.171	2.824.990	3.109.029
PDRB	84.924.663,6	92.829.330	101.396.117	110.098.341	119.172.906

Sumber: BPS DIY 2018

Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus dirasakan hingga tahun 2017. Selama periode tahun 2013-2017 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tumbuh rata-rata sebesar 7,8%. Nilai PDRB per kapita tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 23,623 juta, kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp. 31,676 juta di tahun 2017.

Tabel 2-13 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (%)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341	119.172.906
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.594.854	3.637.116	3.679.176	3.720.912	3.762.167
PDRB per kapita adh. Berlaku	23.623.920	25.526.402	27.573.470	29.589.074	31.676.665
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. berlaku (%)	8,64	8,05	8,02	7,31	7,06

sumber : BPS DIY, Tahun 2018

Sementara untuk kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2010. Nilai riil PDRB per kapita dalam periode 2013 hingga 2017 tumbuh rata-rata sebesar 3,98%. PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

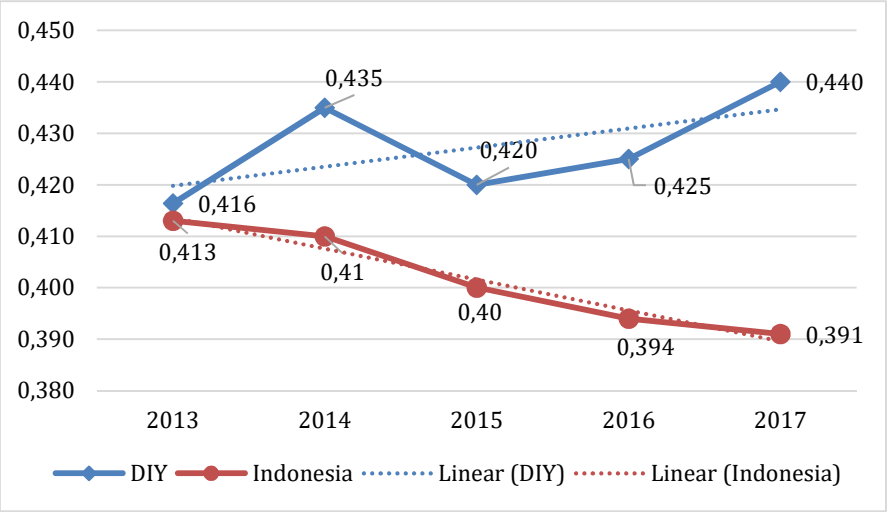
Tabel 2-14 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (%)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB adh. konstan 2010 (juta rupiah)	75.627.450	79.536.082	83.474.441	87.687.927	92.300.660
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.594.854	3.637.116	3.679.176	3.720.912	3.762.167
PDRB per kapita adh. konstan 2010 (juta rupiah)	21.037.697	21.867.898	22.688.352	23.566.246	24.533.908
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. konstan (%)	4,11	4,23	3,95	3,75	3,87

sumber : BPS DIY, Tahun 2018

2.1.2.1.3 Indeks Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Regional

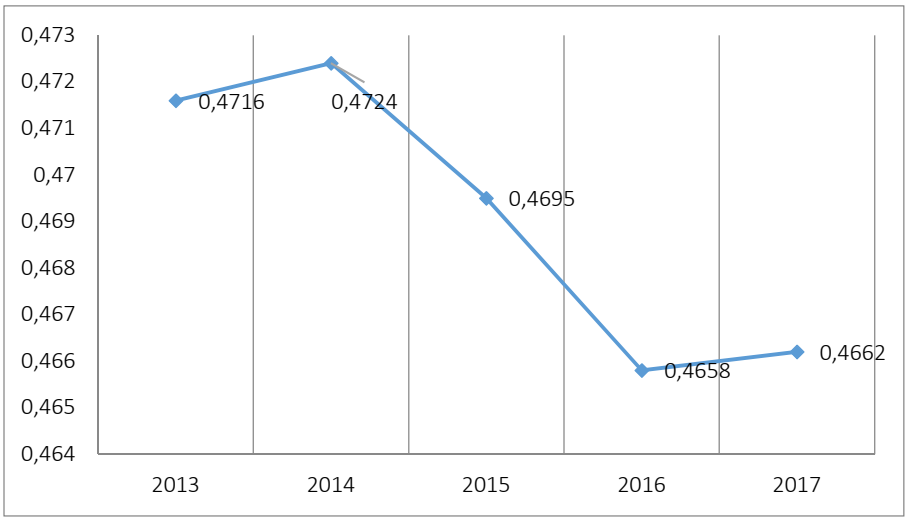
Untuk menilai kemerataan distribusi pendapatan dapat menggunakan Rasio Gini dan Kriteria Bank Dunia. Perkembangan rasio gini DIY dari tahun 2013 hingga tahun 2017 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 0,43%. Perkembangan Rasio Gini periode 2013-2017 masih berada di atas indeks Gini nasional atau distribusinya lebih timpang. Oleh karenanya masih perlu terobosan kebijakan untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat golongan bawah dalam rangka mengurangi kesenjangan dengan pendapatan masyarakat golongan atas.



Sumber: BPS DIY, 2018

Gambar 2-11 Rasio Gini di DIY, Tahun 2013-2017

Indeks Williamson pada periode 2013-2017 menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 0,4716 pada tahun 2013 menjadi 0,4662 pada tahun 2016. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar region (kabupaten/kota) di wilayah DIY semakin membaik. Hal ini pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang ke depan lebih diarahkan untuk pemerataan ekonomi antar kabupaten/kota. Perlu adanya kebijakan afirmatif untuk mendorong program pembangunan di arahkan ke daerah-daerah yang tertinggal.



Sumber : BPS DIY, 2017

Gambar 2-12 Indeks Williamson DIY Tahun 2013-2017

Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa Kota Yogyakarta merupakan kontributor utama perekonomian DIY dengan nilai PDRB terbesar. Sementara Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2017 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Kondisi ini juga tercermin dari sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Gunungkidul menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil.

Bila dilihat dari sisi pertumbuhan, Bantul merupakan daerah yang pertumbuhan ekonominya tercepat dalam periode lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,40%. Sementara Kota Yogyakarta yang mempunyai nilai PDRB terbesar justru pertumbuhannya merupakan yang terkecil. Hal ini disebabkan pemanfaatan sumberdaya di daerah Kota sudah hampir mendekati optimal. Sedangkan di sisi lain, perekonomian di kabupaten lain cenderung mengalami peningkatan seiring bertumbuhanya pusat kegiatan perekonomian baru.

Tabel 2-15 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota ADHB Tahun 2013-2017

Kabupaten /Kota	2013	2014	2015	2016	2017*	Rata-rata Pertumbuhan
Kulonprogo	6.489.594	7.056.572	7.671.548	8.312.455	9.063.335	8,71
Bantul	16.138.755	17.682.925	19.325.203	20.919.336	23.114.037	9,40
Gunungkidul	11.530.341	12.557.371	13.798.657	14.982.055	16.207.042	8,89
Sleman	28.295.363	30.912.239	33.826.505	36.939.696	40.087.445	9,10
Kota Yogyakarta	22.537.792	24.664.285	26.791.936	28.895.813	31.308.655	8,57
D I Y	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341	119.172.906	8,84

*sumber : BPS DIY, 2018, *) Angka Sementara*

2.1.2.1.4 Laju Inflasi

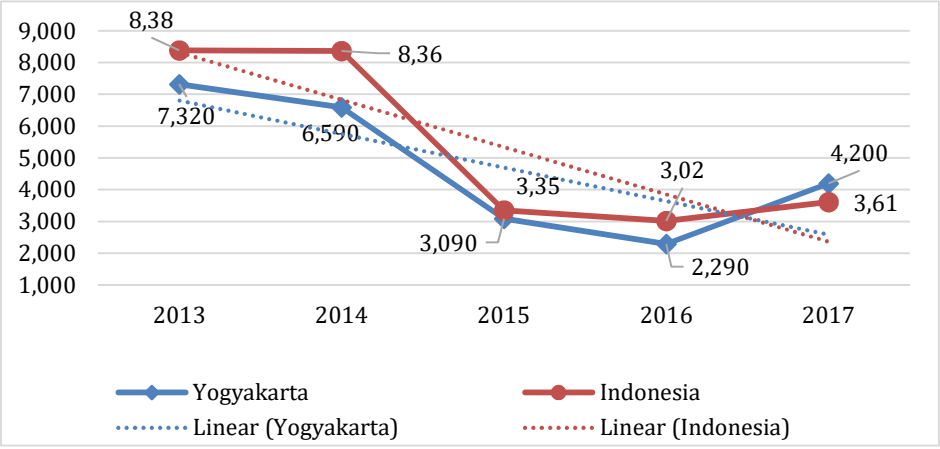
Inflasi merupakan indikator yang menunjukan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak lansung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Tabel 2-16 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017

Bulan	Inflasi Bulanan				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jan	0,96	1,05	0,13	0,53	1,24
Feb	0,93	0,07	-0,40	-0,09	0,36
Mar	0,79	0,14	0,15	0,02	-0,06
Apr	-0,3	0,07	0,38	-0,16	0,28
Mei	-0,29	0,05	0,36	0,08	0,33
Jun	0,84	0,43	0,35	0,43	0,69
Jul	2,58	0,85	0,63	0,94	0,43
Agt	0,87	0,09	0,33	-0,04	-0,45
Sep	-0,24	0,49	0,04	-0,16	0,13
Okt	0,61	0,28	0,01	0,05	0,16
Nov	0,2	1,13	0,13	0,32	0,2
Des	0,17	1,76	0,96	0,35	0,9
Inflasi Tahunan	7,32	6,59	3,09	2,29	4,20

Sumber: BPS DIY, 2018

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan *(demand side)* di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Yogyakarta mengalami angka tertinggi pada masa hari raya lebaran, serta liburan tengah tahun dan akhir tahun. Sementara dari sisi suplai, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gugur bunga.



Sumber: BPS DIY, 2018

Gambar 2-13 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional

Pola inflasi tahunan Yogyakarta selama tahun 2013-2017 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif walaupun memiliki kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan -1,39%. Hal ini berarti lebih rendah daripada rata-rata penurunan inflasi Indonesia sebesar 12,62%. Pola inflasi kota Yogyakarta dapat dipertahankan lebih rendah dari inflasi nasional sejak tahun 2013 hingga 2016, namun pada tahun 2017 inflasi Kota Yogyakarta berada di atas nasional. Kebijakan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga listrik bagi pelanggan non subsidi mempengaruhi peningkatan harga sewa bangunan dan ruang usaha. Selain itu, resiko peningkatan tarif angkutan sejalan dengan banyaknya libur panjang juga dapat mendorong tingginya inflasi komponen yang harganya diatur pemerintah (*admininstered price*).

Inflasi komponen inti dan komponen yang harganya diatur pemerintah dari tahun ke tahun (Desember 2016 – Desember 2017) masing-masing mengalami inflasi sebesar 3,05% dan 9,99%, sementara komponen yang fluktuatif (*volatile food*) mengalami deflasi sebesar 2,19%.

Sementara itu jika dilihat dari kelompok pengeluaran, terdapat tiga kelompok yang mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka inflasi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga kelompok tersebut adalah kelompok Bahan Makanan, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau, serta kelompok Kesehatan. Ketiga kelompok tersebut bahkan mencapai tingkat inflasi terendah dalam lima tahun terakhir. Bila melihat rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa kelompok transportasi dan komunikasi mengalami kecenderungan penurunan terbesar, yaitu -145,35%. Sedangkan kelompok kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar yang sebagian besar merupakan komponen yang harganya diatur oleh pemerintah mempunyai kecenderungan meningkat inflasinya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 50,53%.

Tabel 2-17 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2013-2017

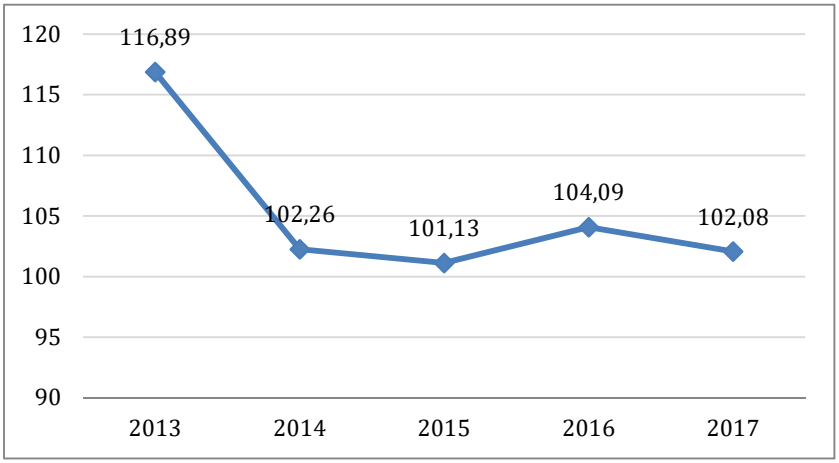
No	Kelompok Pengeluaran	Inflasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Bahan Makanan	12,31	7,70	4,64	4,77	2,71	-29,39
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	8,15	2,95	5,04	3,84	2,79	-11,03
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	5,18	8,92	4,41	1,64	5,63	50,53
4	Sandang	0	3,61	5,87	3,04	3,84	13,57
5	Kesehatan	3,08	5,49	4,21	4,17	2,76	5,04
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	3,17	2,37	1,36	2,40	2,81	6,43
7	Transportasi & komunikasi	10,45	9,36	-2,51	-2,06	6,72	-145,35
	Inflasi Kota Yogyakarta	7,32	6,59	3,09	2,29	4,20	-1,39

Sumber: BPS DIY, 2018

2.1.2.1.5 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang menjadi tolok ukur kesejahteraan petani. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) dimana produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Dengan demikian, semakin tinggi nilai NTP menunjukan petani menikmati selisih antara penjualan komoditas dengan harga biaya input produksi.

NTP DIY selama kurun waktu 2013-2017 menunjukkan kecenderungan menurun, namun sempat tercatat sedikit kenaikan pada tahun 2016 sebesar 104,09 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 (102,08). Pada tahun 2013 terdapat perbedaan metode penghitungan NTP sehingga menyebabkan angka NTP mulai tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan. Sementara itu, apabila mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya.

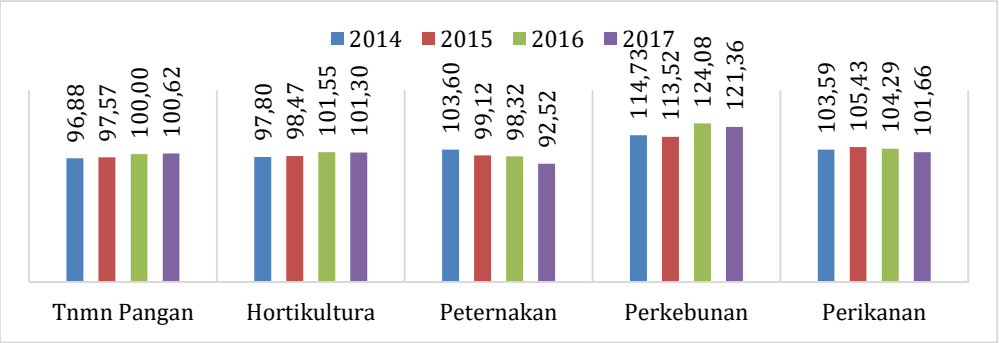


Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 2-14 Nilai Tukar Petani DIY, Tahun 2013-2017

Bila diulas lebih lanjut per subsektor dapat diketahui bahwa Sub Sektor Perkebunan Rakyat memiliki angka NTP terbesar pada tahun 2017 sebesar

121,36, walaupun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 124,08. Secara umum dapat diketahui bahwa petani yang bekerja di sub sektor tersebut dapat diasumsikan kesejahteraannya relatif lebih besar dibandingkan sub sektor lainnya. Sementara itu, sub sektor perikanan berada di peringkat kedua NTP terbesar pada tahun 2017 yaitu dengan nilai 101,66 atau menurun dibandingkan nilai tahun 2016 yang sebesar 104,29. Kedua subsektor tersebut selalu memiliki NTP terbesar dalam periode 5 tahun terakhir. Sub sektor peternakan merupakan satu-satunya sub sektor dengan nilai indeks NTP dibawah 100, yang artinya peningkatan pengeluaran yang harus dibayarkan petani lebih cepat dibanding dengan penerimaannya. Artinya kenaikan harga-harga produk peternakan tidak mampu mengimbangi kenaikan harga-harga barang konsumsi dan biaya produksi pada sub sektor tersebut, sehingga petani yang bekerja di sub sektor peternakan selalu mengalami defisit. Dapat diartikan pula bahwa daya saing produk peternakan relatif lebih rendah dibandingkan produk lain.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2018

Gambar 2-15 Nilai Tukar Petani DIY Per Sub Sektor , Tahun 2014-2017

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks

Kesejahteraan Rakyat (IKraR) sering digunakan sebagai ukuran dalam mengkaji kesejahteraan sosial di suatu wilayah.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pembangunan manusia D.I. Yogyakarta terus mengalami kemajuan selama periode 2014-2017. Bahkan, pada 2017 DIY menempati urutan kedua provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia.

Tabel 2-18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
Kota Yogyakarta	83,78	84,56	85,32	85,49
Kabupaten Bantul	77,11	77,99	78,42	78,67
Kabupaten Kulon Progo	70,68	71,52	72,38	73,23
Kabupaten Gunungkidul	67,03	67,41	67,82	68,73
Kabupaten Sleman	80,73	81,20	82,15	82,85
IPM	76,81	77,59	78,38	78,89

Sumber : BPS DIY, 2018

Di samping IPM, kita mengenal pula IKraR sebagai alat ukur kesejahteraan. Keduanya merupakan instrument pengukuran yang berpijak pada paradigma pembangunan manusia (*human centered development*). Jika IPM lebih menitik beratkan pada capaian keluaran (*output*), keberadaan IKraR sebagai pelengkap IPM dimaksudkan untuk mengukur ketersediaan akses untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu masyarakat sejahtera dan apakah akses tersebut telah dimanfaatkan oleh warga. Perumusan dan perhitungan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) didasari dengan pemikiran bahwa kesejahteraan bersifat holistik sehingga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, dengan mengacu pada batasan kesejahteraan yang digunakan, maka pengukurannya pun ditetapkan kedalam bentuk tiga dimensi, yakni: dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi politik, yang kemudian dijabarkan dengan demokrasi dan tata pemerintahan. Indeks IKraR adalah indeks kesejahteraan yang besaran nilainya merupakan penjumlahan dari 3 indeks tersebut.

Pada perilisan data IkraR yang diselenggarakan tahun 2016 oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), DIY meraih nilai IkraR sebesar 62,94. Dengan angka ini, DIY menjadi satu dari tiga provinsi di Indonesia yang paling stabil tingkat kesejahteraannya pada periode

2009-2014. Hal ini berarti, selama kurun waktu tersebut DIY telah berhasil mempertahankan kinerjanya dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan menyediakan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, ini tidak berarti bahwa pekerjaan Pemda DIY telah selesai. Terlebih, kestabilan tingkat kesejahteraan rakyat ini masih diikuti dengan tingginya angka kemiskinan.

Pembahasan kesejahteraan sosial tidak dapat lepas dari pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Pendidikan merupakan aspek penting pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan berkualitas dan kehidupan yang sehat merupakan bahan baku yang dinilai mampu melahirkan generasi-generasi terdidik dan tangguh untuk mencapai pemberdayaan manusia yang optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi sebuah urgensi yang hendaknya segera dibangun secara intensif dan berkesinambungan. Dalam hal ini, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu wilayah dalam menyelenggarakan pembangunan pendidikan antara lain meliputi: Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Sementara, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu wilayah dalam menyelenggarakan pembangunan pendidikan antara lain meliputi Angka kelangsungan hidup bayi dan angka harapan hidup (AHH). Di samping itu, dengan mengingat bahwa kesejahteraan sosial bersifat multidimensional, maka pembahasan juga akan meliputi kepemilikan lahan penduduk, rasio penduduk yang bekerja, pengembangan budaya gotong royong, penanganan PMKS, multikuluralisme, dan potensi konflik di DIY.

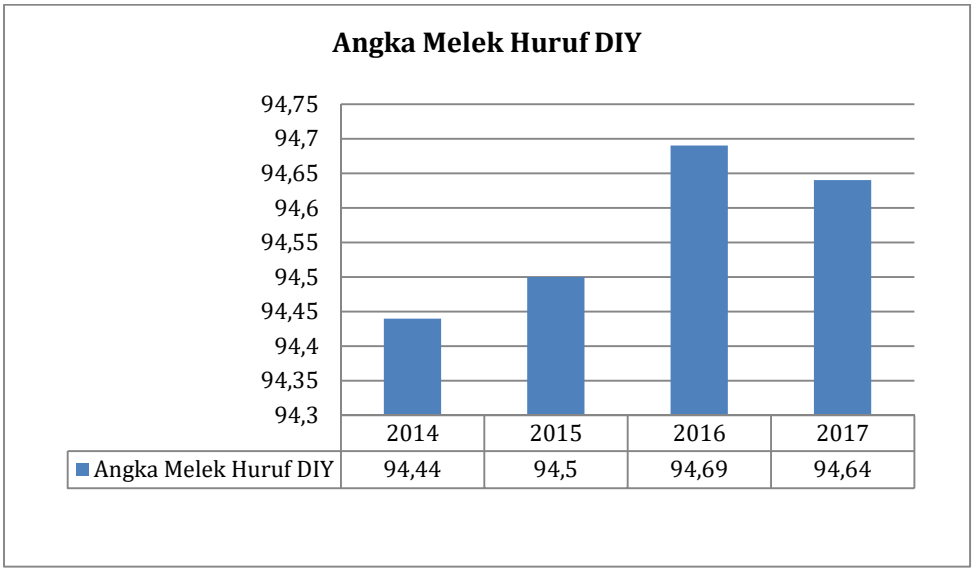
2.1.2.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa mempertimbangkan apakah penduduk tersebut mengerti apa yang di baca/ditulisnya. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan

menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Meskipun demikian, mulai tahun 2014 AMH tidak lagi menjadi salah satu indikator dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia. Angka Melek Huruf (AMH) dipandang mulai kurang relevan dalam pengukuran kualitas pendidikan, karena AMH di sebagian wilayah sudah cukup tinggi sehingga diperlukan indikator yang lebih menukik pada kualitas pendidikan untuk membedakan tingkat pendidikan antar daerah secara lebih tepat.

Secara umum, capaian AMH DIY tahun 2014 hingga 2016 sudah sangat baik dan memperlihatkan peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2017 menunjukkan penurunan dari 94,69 menjadi 94,64. menjadi Secara rinci, capaian AMH dapat dilihat dari grafik di bawah.



Sumber : BPS DIY, 2016 dan LKPJ DIY 2017

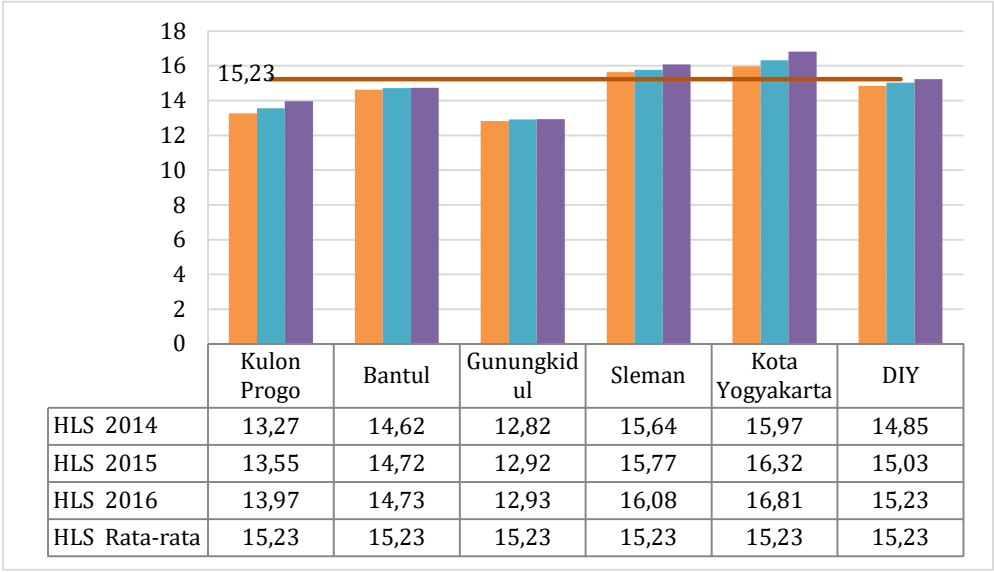
Gambar 2-16 Angka Melek Huruf tahun 2014 – 2017

2.1.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Indikator baru yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan sebagai pengganti Angka Melek Huruf dalam penghitungan IPM adalah Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang

ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Capaian AHLS DIY tahun 2016 adalah sebesar 15,23 tahun, meningkat 0,20 poin dari tahun 2015. Untuk kabupaten/kota, capaian tertinggi oleh Kota Yogyakarta sebesar 16,81 tahun dan capaian terendah oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 12,93 tahun.



	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
HLS 2014	13,27	14,62	12,82	15,64	15,97	14,85
HLS 2015	13,55	14,72	12,92	15,77	16,32	15,03
HLS 2016	13,97	14,73	12,93	16,08	16,81	15,23
HLS Rata-rata	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

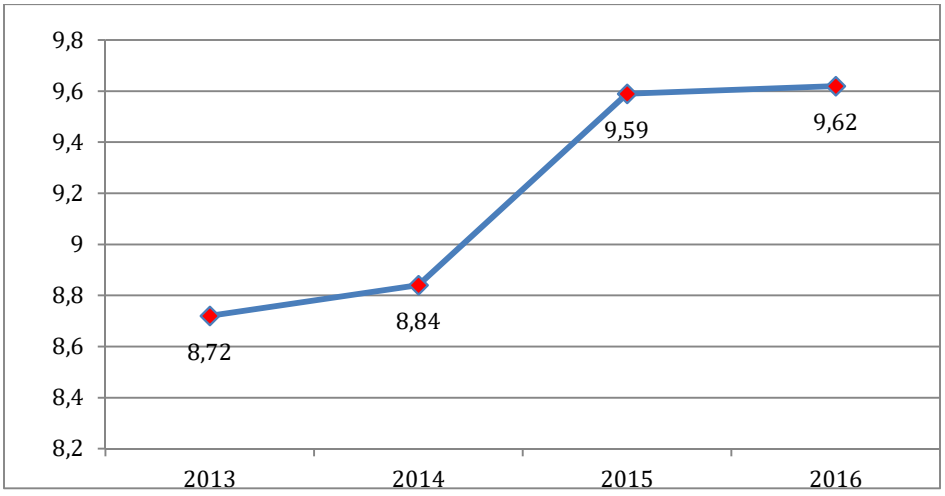
Gambar 2-17 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY

2.1.2.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka ini mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat di suatu wilayah akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

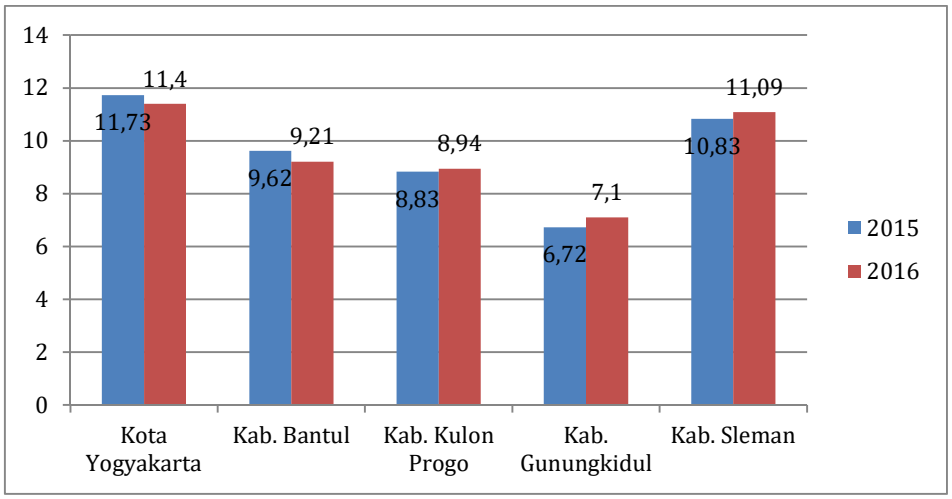
Pada tingkat nasional, RLS Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar 7,95 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,95 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Sementara itu di tingkat provinsi, capaian RLS DIY tahun 2016 mencapai angka

yang lebih tinggi dari capaian nasional, yakni 9,62 dan terus menunjukkan trend kenaikan selama 4 tahun terakhir, yaitu dari 8,72 di tahun 2013 berturut-turut meningkat menjadi 9,62 di tahun 2016. Namun, apabila menilik lebih rinci data capaian RLS per Kabupaten/Kota, dapat dilihat bahwa ketimpangan antar wilayah pun terjadi pada pembangunan sektor pendidikan. Capaian RLS tahun 2016 tertinggi di DY diraih oleh Kota Yogyakarta yakni sebesar 11,40 tahun sedangkan capaian terendah ada pada Kabupaten Gunungkidul yakni sebesar 7,10 tahun. Hal ini berarti rata-rata penduduk Kota Yogyakarta menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang menengah, sedangkan rata-rata penduduk Kabupaten Gunungkidul hanya mampu menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar. Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan di DIY. Terlebih, Pemda DIY telah menjadikan angka rata-rata lama sekolah sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) di dalam RPJMD 2017 – 2022.



Sumber : BPS DIY, Susenas 2015 dan 2016

Gambar 2-18 Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah DIY Tahun 2013-2016

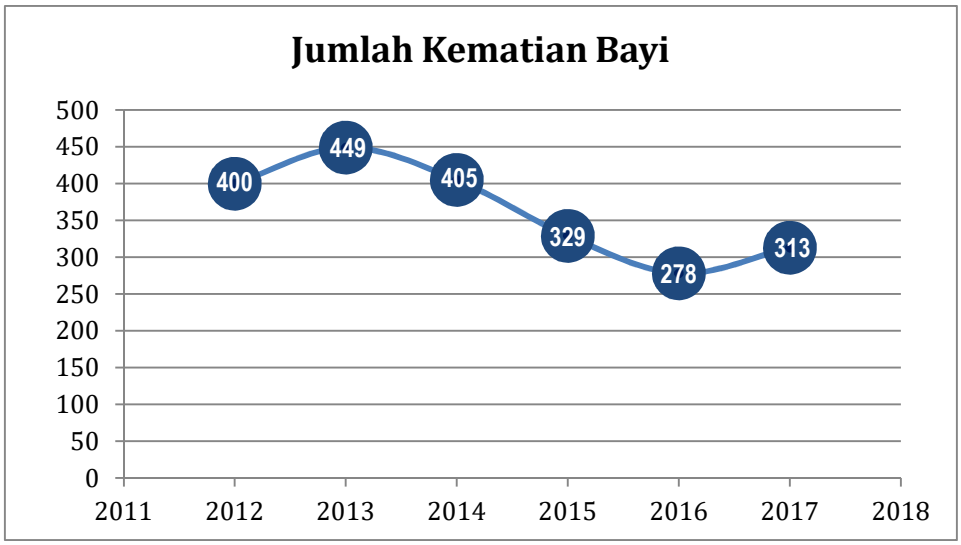


Sumber : BPS DIY, Susenas 2015 dan 2016

Gambar 2-19 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016

2.1.2.2.4 Jumlah Kematian Bayi

Jumlah Kematian Bayi di DIY dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian bayi. Dari data kurun waktu 2011-2017 diperoleh informasi perkembangan jumlah kematian bayi di DIY sebagai berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan DIY

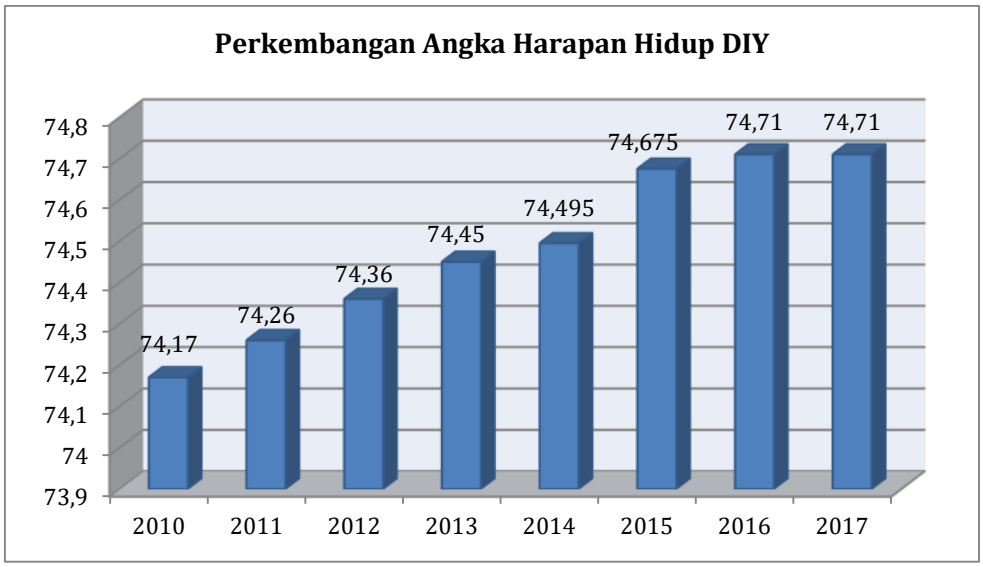
Gambar 2-20 Jumlah Kematian Bayi di DIY Tahun 2011 - 2017

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kematian bayi mengalami trend penurunan. Di tahun 2013, jumlah kematian bayi mengalami kenaikan 49 kasus dari tahun 2012. Setelah tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 jumlah kematian bayi di DIY terus mengalami penurunan. Penyebab umum kematian bayi di DIY adalah berat bayi lahir rendah (BBLR) dan sepsis. Penyebab lain kematian bayi di DIY antara lain asfiksi pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Kebijakan kesehatan bayi difokuskan pada intervensi layanan kesehatan meliputi peningkatan pelayanan neonatal dan ibu, peningkatan cakupan imunisasi, peningkatan upaya perubahan perilaku, dan penanganan permasalahan gizi bayi.

2.1.2.2.5 Angka Harapan Hidup (AHH)

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Menurut Statistik Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa angka harapan hidup saat lahir mencerminkan tingkat kematian keseluruhan populasi. Angka harapan hidup saat lahir merangkum pola mortalitas yang berlaku di semua kelompok umur pada tahun tertentu (anak dan remaja, dewasa, dan orang tua).

Perkembangan AHH di DIY dalam kurun waktu 2010-2017 menunjukkan peningkatan. Dari 74,17 di tahun 2010 meningkat menjadi 74,71 di tahun 2017 (angka sementara).



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2018

Gambar 2-21 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) DIY Tahun 2010 - 2017

AHH dipengaruhi dari beberapa faktor seperti kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Peran sektor kesehatan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan.

Peningkatan AHH yang terjadi di DIY dipengaruhi oleh banyak faktor. Kesehatan menjadi salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam peningkatan tersebut. Peran pengaruh kesehatan dalam meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dari semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat.

Dari capaian peningkatan AHH DIY diprediksi akan berpengaruh meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Sehingga diperlukan intervensi pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.

2.1.2.2.6 Pengembangan Nilai-Nilai Gotong Royong, Penanganan PMKS, dan Multikulturalisme Di DIY

Pengembangan nilai – nilai gotong royong di DIY tertuang dalam program dan kegiatan - kegiatan pemerintah seperti Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa melalui Model Global Gotong Royong dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

Desa melalui Model Segoro Amarto, Segoro Amarto berarti Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto. Prinsip Segoro Amarto adalah kemandirian, kepedulian sosial, gotong royong, dan kedisiplinan. Kebijakan Segoro Amarto bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial masyarakat, dan menjadikan kehidupan yang lebih nyaman, sejahtera dan mandiri. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Segoro Amarto dengan pendekatan good governance. Hal tersebut terlihat dari semakin berkembangnya tata pemerintahan yang baik, profesionalisme dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari segi sosial kemasyarakatan, dampak positif dari pelaksanaan Segoro Amarto adalah berkurangnya tingkat kemiskinan di DIY.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial terbagi menjadi 4 hal yaitu Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Untuk saat ini Pemerintah DIY memiliki 6 Panti untuk menyelesaikan permasalahan PMKS. Model penanganan PMKS ada 2 yaitu Model penanganan PMKS melalui Panti dan Model Penanganan PMKS melalui Luar Panti.

Tabel 2-19 Tabel Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) DIY Tahun 2013 – 2017

No	Bidang Urusan	Elemen	Tahun					Satuan
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	488.864	489.129	477.683	486.087	484.064	Orang

Sumber : Dinas Sosial DIY, Diolah

Jumlah PMKS di DIY fluktuatif dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 265 orang dari tahun 2013 sedangkan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11.446 orang dari tahun 2014. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 8.404 orang menjadi 484.064 orang hingga tahun 2017.

Multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui persamaan derajat atas elemen-elemen yang beragam yang ada pada satu masyarakat.

DIY memiliki predikat sebagai kota pendidikan dan *city of tolerance*. Predikat ini membentuk multikulturalisme di Yogyakarta. Sebagai kota pendidikan, Yogyakarta memiliki pengalaman multikultural yang panjang dan teruji, terutama dalam kontak dengan budaya lain yang datang bersama dengan para pelajar dan mahasiswa dari berbagai pelosok nusantara untuk belajar di Yogyakarta. Warga Yogyakarta memandang predikat *city of tolerance* yang disandang mempunyai kontribusi terhadap berbagai prestasi yang diraih kota ini. Toleransi yang berarti ada harmoni, saling pengertian, dan kesediaan untuk saling menerima, saling mengikuti dan mau bekerja sama. Karena itu toleransi dalam konteks ini mengandung makna yang lebih luas melampaui pengertian toleransi antar suku/etnis, agama dan kebudayaan.

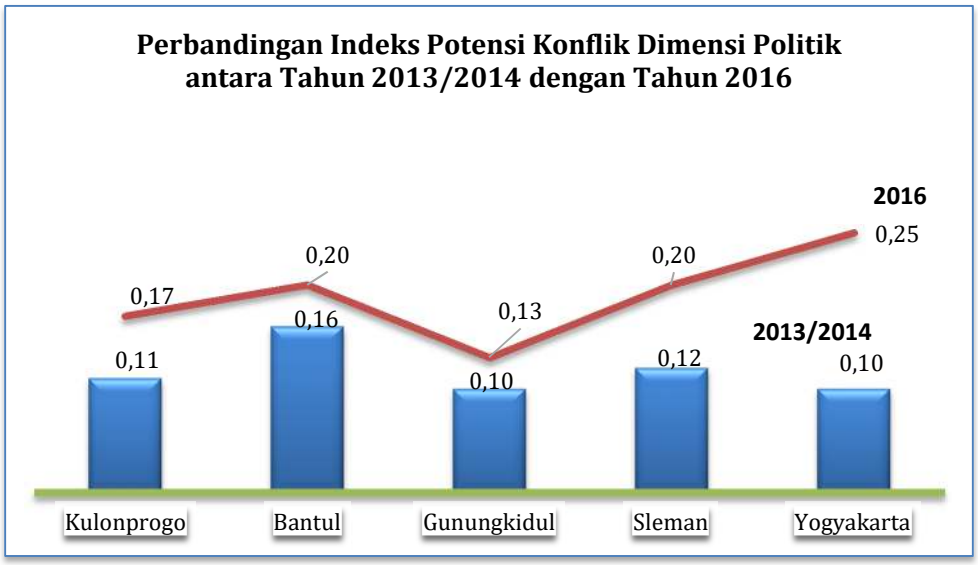
Toleransi dalam konteks ini menyentuh aspek struktur sebuah masyarakat di mana tidak ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang tidak dijembatani di dalam masyarakat yang dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat. Karena semangat toleransi dalam pengertian ini pula maka para warga, tanpa membedakan status dan kelas sosial, bisa memiliki tingkat kekompakan yang tinggi dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan kota sebagai tanggung jawab bersama.

Berangkat dari cara pandang di atas, realitas multikultural Yogyakarta tidak hanya menyangkut pengakuan dan memperhitungkan keragaman etnis/suku, bangsa, agama, kebudayaan, aliran politik, dan sebagainya tetapi juga keberagaman kelas sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, profesi, cara pandang, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, dan sebagainya, singkatnya semua komponen masyarakat Yogyakarta dengan segala realitas kehidupan mereka. Dengan demikian tidak ada kelompok masyarakat yang merasa dipinggirkan dan tidak mendapat perhatian yang layak dari pemerintah dan masyarakat lain.

2.1.2.2.7 Potensi Konflik di DIY

Kondisi DIY sebagai wilayah multikultural tak hanya dapat menjadi kekuatan bagi pembangunan, namun juga pemicu konflik jika tidak ditopang oleh kekuatan modal sosial yang memadai. Hingga saat ini DIY memang tidak memiliki sejarah konflik yang mengkhawatirkan. Namun, itu tak berarti daerah ini bebas dari kemungkinan terjadinya konflik sosial yang destruktif. Terlebih, DIY saat ini mengalami perubahan dinamika sosial yang cukup signifikan sebagai salah satu konsekuensi dari pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis seluruh elemen Pemerintah dan masyarakat DIY agar amanat Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebutkan bahwa tujuan keistimewaan DIY adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat dapat terlaksana.
Kajian perubahan sosial dan potensi konflik yang diselenggarakan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016 menemukan bahwa Indeks Potensi Konflik di DIY secara umum mengalami peningkatan. Pada dimensi politik, Indeks Potensi Konflik mengalami peningkatan dengan Kota Yogyakarta sebagai wilayah dengan indeks tertinggi, yakni 0,25. Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya, Gunung Kidul masih menjadi wilayah dengan indeks potensi konflik terendah.

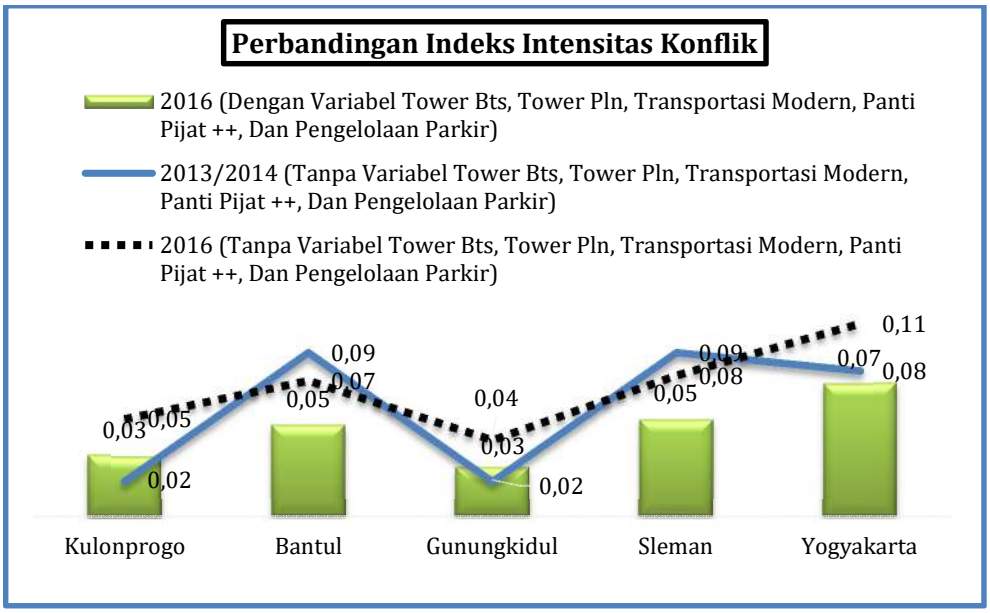


Sumber: PSKK UGM, 2017

Gambar 2-22 Perbandingan Indeks Potensi Konflik Dimensi Politik antara Tahun 2013/2014 dengan Tahun 2016

Selanjutnya, pada dimensi ekonomi, ditemukan bahwa intensitas konflik akibat perkembangan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta mengalami peningkatan, sedangkan di kabupaten yang lain mengalami penurunan. Jenis usaha yang dipersepsikan memiliki banyak dampak negatif di masyarakat secara ekonomi adalah pasar modern. Sedangkan sektor ekonomi yang masyarakat nilai paling memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial adalah panti pijat, rumah karaoke, sektor hunian modern dan

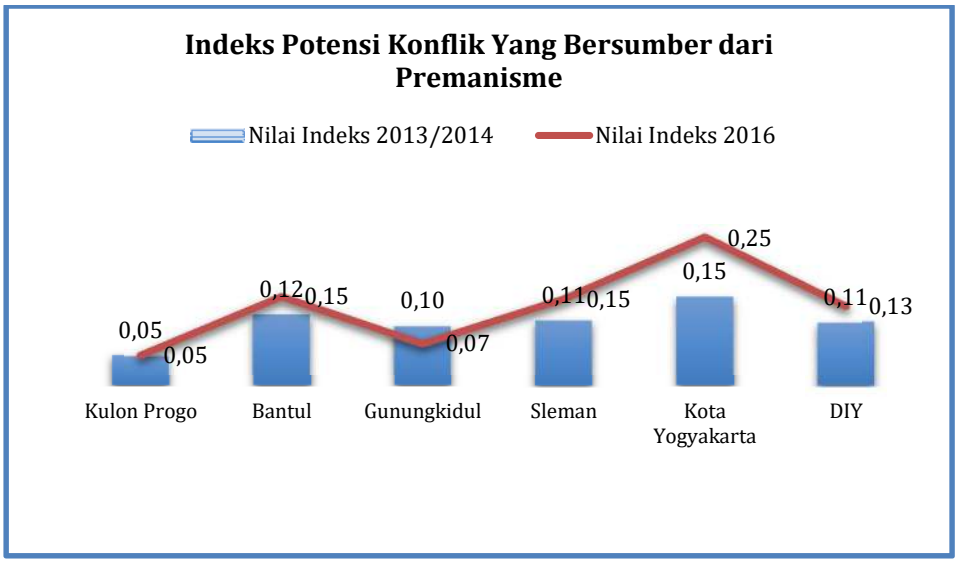
sektor ekonomi yang dinilai paling memberikan dampak negatif bagi aspek lingkungan adalah tower PLN dan rumah karaoke.



sumber : PSKK UGM, 2017

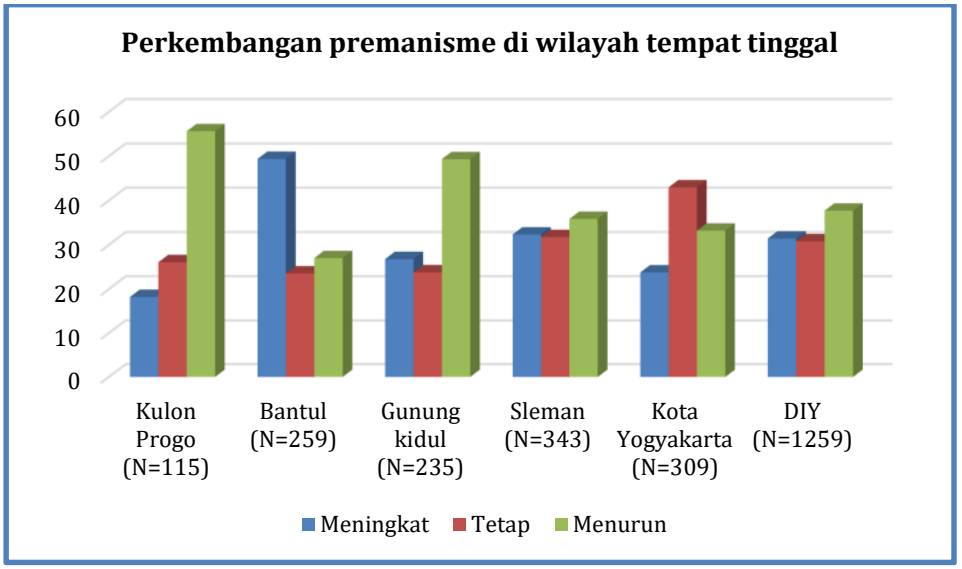
Gambar 2-23 Perbandingan Indeks Intensitas Konflik

Terakhir, pada dimensi sosial ditemukan bahwa Indeks Potensi Konflik yang bersumber dari kekerasan kelompok/premanisme mengalami peningkatan di Kabupaten Sleman, Bantul, namun tetap di Kulon Progo dan menurun di Kabupaten Gunungkidul. Secara keseluruhan, 50,48% masyarakat DIY memiliki persepsi bahwa aksi-aksi premanisme meningkat. Selanjutnya, ditemukan pula bahwa sebanyak 49,42% masyarakat Bantul memberikan persepsi bahwa telah terjadi peningkatan tindakan premanisme di wilayahnya. Angka tersebut merupakan persentase tertinggi di wilayah DIY bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, seperti Sleman sebesar 32,36%, Gunungkidul 26,81%, Kota Yogyakarta 23,78%, dan Kulonprogo 18,26%. Di samping itu, ditemukan bahwa potensi konflik yang bersumber dari kekerasan kelompok/premanisme ada indikasi bersinggungan dengan pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut, khususnya di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi pro-rakyat dinilai sangat penting untuk didorong dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang hanya berbasis pada kapital.



Sumber: PSKK UGM, 2017

Gambar 2-24 Indeks Potensi Konfilk Yang Bersumber dari Premanisme



Sumber: PSKK UGM, 2017

Gambar 2-25 Perkembangan Premanisme di Wilayah Tempat Tingga

Untuk mengatasi berbagai potensi konflik tersebut, Pemda DIY telah membentuk Tim Ketahanan Ekonomi dan Sosial. Tim ini bertujuan untuk meminimalisir indeks potensi konflik yang diakibatkan oleh dimensi ekonomi melalui penguatan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, tim ini bertugas menentukan rencana aksi dan menyusun master plan tentang bagaimana membangun ketahanan ekonomi dan sosial secara kolaboratif di DIY. Di samping itu, pada tahun 2017 pun telah disusun Peraturan Gubernur DIY Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pencegahan dan penghentian konflik serta pemulihan pascakonflik di DIY.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

2.1.2.3.1 Budaya

Yogyakarta Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja pada tahun 2022, tidak lepas dari Renaisans Yogyakarta yang dirumuskan lima tahun yang lalu, terutama dari aspek kebudayaan, yakni diukur dari tiga kualitas: kualitas sumber budaya, kualitas pengalaman perilaku budaya dan kualitas kesejahteraan hidup. Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggariskan bahwa Kewenangan kebudayaan DIY diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Fokus pembangunan kebudayaan mengacu kepada Perdais No 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan, yang mana kebudayaan di sini dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek Kebudayaan meliputi: nilai-nilai budaya; pengetahuan dan teknologi; bahasa; adat istiadat; tradisi luhur; benda; dan seni. Pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip: keterbukaan terhadap budaya lain; kemampuan mengolah budaya; kesadaran dialogis; kepribadian kuat; kesinambungan; dan kesatuan budaya mandiri.

Pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk: menguatkan karakter dan jati diri masyarakat; mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah; mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan

kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia; mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemeliharaan Kebudayaan dilakukan sebagai upaya mempertahankan Objek Kebudayaan agar tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengembangan Kebudayaan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada Objek Kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang. Penguatan Objek Kebudayaan dilakukan dengan cara: penyebarluasan; penelitian; pengayaan keberagaman; revitalisasi; adaptasi; reaktualisasi; rekayasa; pembudayaan; dan/atau internalisasi. Pemanfaatan melalui pendayagunaan dilakukan untuk memenuhi kepentingan meliputi: agama; sosial; ekonomi; pendidikan; ilmu pengetahuan dan teknologi; kebudayaan; dan pariwisata.

Yogyakarta memiliki Kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Nilai-nilai adiluhung seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig, serta sifat-sifat satriya yang berpegang pada etos Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh telah terwujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah yang kini dikenal sebagai DIY. Nilai-nilai luhur yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) selain memiliki cakupan keberlakuan di DIY, juga dapat disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa.

Dari sejarah terbentuknya, Kebudayaan Yogyakarta dirintis dan diperkaya oleh berbagai sumber, seperti: nilai-nilai luhur Kerajaan Mataram Islam di Kotagede; desain tata kota pemerintahan yang diciptakan oleh Pangeran Mangkubumi yang dikenal dengan saujana asosiatif (*associate cultural landscape*) yang merujuk pada sumbu imajiner dua kekuatan alam besar, yaitu Segara Kidul di selatan dan Gunung Merapi di utara; unsur-unsur budaya asing seperti budaya Kolonial, Indis, maupun Cina. Sumber utama yang memperkaya Kebudayaan Yogyakarta dari sejarahnya hingga kini adalah Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten.

Perda No 4 Tahun 2011 mencatat dan mendokumentasikan tata nilai budaya Yogyakarta yang dikategorikan dalam 14 tata nilai yang sebenarnya

kandungannya sangat kompleks, yaitu antara lain: tata nilai religio-spriritual; tata nilai moral; tata nilai kemasyarakatan; tata nilai adat dan tradisi; tata nilai pendidikan dan pengetahuan; tata nilai teknologi; tata nilai penataan ruang dan arsitektur; tata nilai mata pencaharian; tata nilai kesenian; tata nilai bahasa; tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan; tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan tata nilai semangat keyogyakartaan.

Penerapan nilai-nilai luhur budaya merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan lingkungan pendidikan binaan yang harmoni dan sustainable melalui pemanfaatan pengetahuan lokal (indigenous knowledge), pendekatan konstekstual serta pendekatan partisipatif. Penggalian konsep/teori serta best practices tentang kearifan lokal atas hasil rancangan masa lalu (traditional setting, modern setting) melalui design review maupun design practices sebagaimana merupakan suatu upaya dalam rangka "penyempurnaan" proses dan pendekatan perancangan pendidikan. Pemahaman atas potensi nilai-nilai luhur budaya dari stakeholder (akademisi, praktisi dan birokrat) menjadi penting dalam pemanfaatan penciptaan pola pendidikan binaan yang harmoni dan sustainable.

Pemahaman atas falsafah Hamemayu Hayuning Bawana, Golong Gilig, Sawiji, Greget, sengguh ora mingkuh perlu dilakukan dalam pendidikan. Pemahaman falsafah di atas diperlukan sebagai suatu bagian dari proses penguatan jatidiri dan pembentukan watak/karakter manusia berbudaya yang mampu mengembangkan kebudayaannya dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang, serta mampu menjadi pelecut pengembangan budaya lain di Indonesia dan di dunia. Hal ini penting karena Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, pusat budaya, dan tujuan wisata bertaraf dunia yang mampu menjadi candradimuka bagi masyarakatnya dan masyarakat yang hadir di Yogyakarta, sehingga akan muncul manusia berbudaya yang berwatak satriya untuk kebaikan, keutamaan, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Nilai-nilai luhur budaya yang diharapkan mewarnai sistem pendidikan DIY adalah: a. kejujuran; b. kerendahan hati; c. ketertiban/kedisiplinan; d. kesusilaan; e. kesopanan/kesantunan; f. kesabaran; g. kerjasama; h. toleransi; i. tanggungjawab; j. keadilan; k. kepedulian; l. percaya diri; m. pengendalian diri; n. integritas; o. kerja keras/ keuletan/ketekunan;p. ketelitian;q. kepemimpinan; dan/atau r. ketangguhan. Internalisasi nilai-nilai luhur budaya dalam semua

jenjang pendidikan dan lapisan masyarakat akan meningkatkan peranserta masyarakat dalam mengembangkan dan memelihara kebudayaan.

Capaian kinerja meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan kebudayaan dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah desa budaya dan organisasi budaya. Desa budaya merupakan desa yang masih memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan teknologi; bahasa; adat istiadat; tradisi luhur; benda; dan seni. Berdasarkan SK Gubernur No 262 Tahun 2016 telah ditetapkan 56 desa budaya di DIY. Penilaian kinerja pelestarian desa budaya diatur dalam Pergub 36 Tahun 2014 tentang Desa dan kelurahan Budaya.

Organisasi seni budaya yang tumbuh berkembang sepanjang tahun juga sangat signifikan.

Tabel 2-20 Organisasi Seni dan Budaya di DIY

Aset Budaya	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah	**4511**	**5549**	**5553**	**5797**	**5996**	**6845**
Organisasi Seni Rupa	8	16	17	17	17	17
Org Seni Pertunjukan	4231	5226	5241	5434	5543	6361
Org Perfilman	12	42	42	42	42	42
Lembaga Budaya	105	105	82	98	180	181
Lembaga Pendidikan Budaya	31	32	43	49	49	49
Desa Budaya	32	32	32	43	43	56
Organisasi Kepercayaan	90	94	94	112	120	137
Lembaga Adat Besar	2	2	2	2	2	2
Organisasi Maju	51	54	62	87	90	102*
Desa Budaya Maju	9	12	13	15	17	19*
Total Maju	**60**	**66**	**75**	**102**	**107**	**122**
Capaian	**1,33%**	**1,19%**	**1,35%**	**1,76%**	**1,78%**	**1,78%**

sumber : www.jogjabudaya.com, data diolah

Tabel 2-21 Adat, Seni dan Tradisi di DIY

Aset Budaya	Tahun					
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Jenis pakaian	15	15	15	15	35	38
Permainan tradisional	34	34	34	34	58	58
Makanan tradisional	138	147	147	149	180	208
Upacara Adat	358	452	459	473	475	478
Upacara Tradisi	34	35	35	35	35	35
Cerita Rakyat	37	37	37	37	37	37
Properti Adat, Tradisi, Kesenian	178	246	241	244	244	244
Jenis Seni	57	57	57	57	57	57
Jumlah	**851**	**1023**	**1025**	**1044**	**1121**	**1155**

Sumber: www.jogjabudaya.com, data diolah

Ruang ekspresi publik untuk mempertunjukkan kemampuan dan hasrat seni, sekaligus arena untuk berperanaktif dalam pelestarian budaya bagi masyarakat sedang diupayakan pembangunan Taman Budaya di Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan pusat kebudayaan berkelas internasional di Yogyakarta.

Kegiatan dilakukan dalam bentuk Festival Kebudayaan Yogyakarta, Festival Adat, Gelar Budaya Yogyakarta, Gelar Seni Desa Budaya, Dialog Budaya Yogya Semesta, Fasilitasi Adat Istiadat, Festival Jogja Tempo Dulu, Festival Dhaksinarga di Gunungkidul, Festival Menoreh di Kulon Progo, Festival Paseban di Bantul dan Festival Godong Opo-Opo di Kota, Festival Garis Imajiner di Sleman, Kompetisi Bahasa dan Sastra, dan lain-lainnya.

Dalam upaya pelestarian budaya tak benda hingga tahun 2017, 40 dari warisan budaya tak benda DIY telah menjadi bagian dari 594 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain pelestarian budaya tak benda, juga telah dilakukan upaya-upaya pemeliharaan dan pengembangan budaya benda, yaitu antara lain :

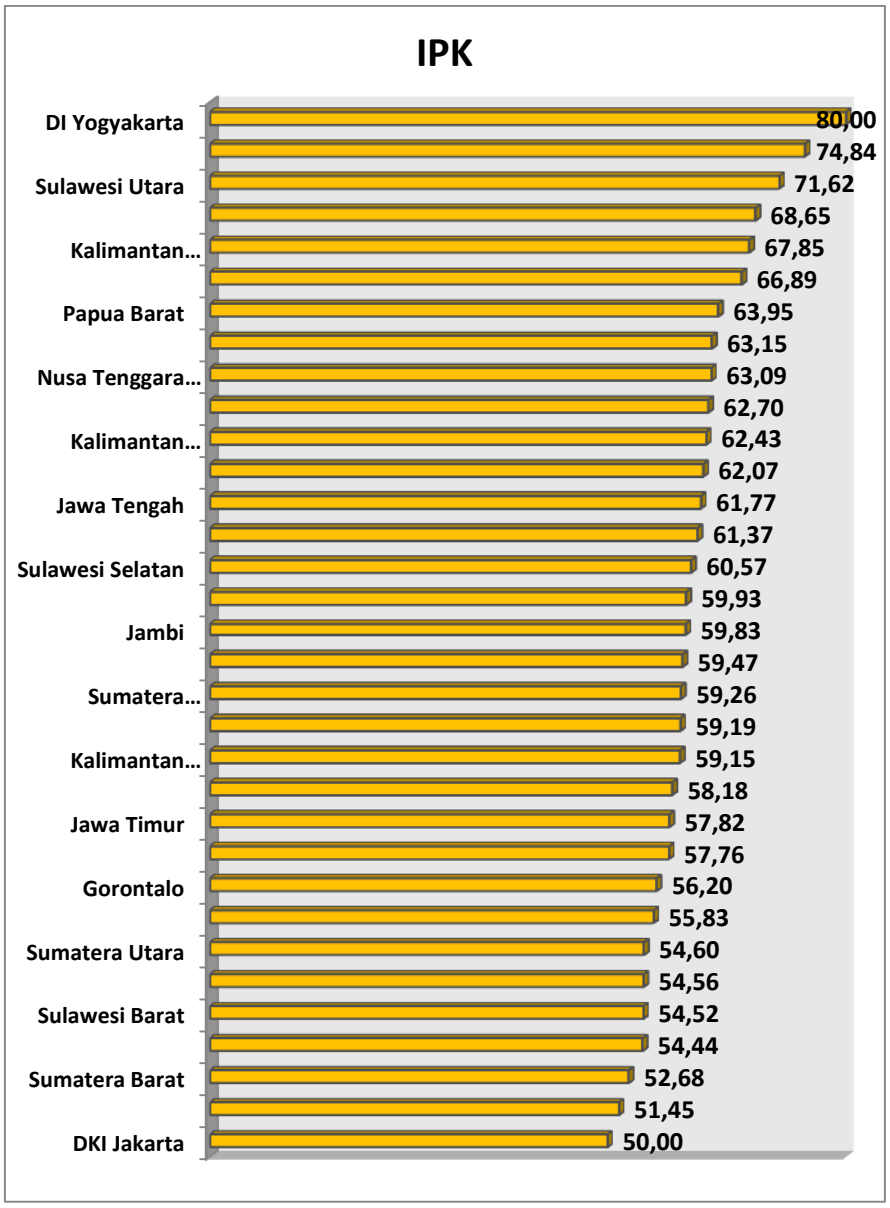
Tabel 2-22 Budaya Benda di DIY Tahun 2013-2017

Aset Budaya	2013	2014	2015	2016	2017
Struktur				0	34
Situs	176	184	343	339	343
Benda Cagar Budaya	762	763	764	807	808
Bangunan Cagar Budaya	947	877	881	1042	1041
Kawasan cagar budaya	13	13	15	17	17
Jumlah Budaya Benda	1898	1837	2003	2205	2243

Sumber: www.jogjabudaya.com

Pelestarian budaya benda berkolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan budaya klasik yang berupa candi-candi dan situs. Budaya benda ini merupakan bukti nyata perjalanan bersejarah masyarakat DIY sejak zaman prasejarah hingga sekarang, yang akan menjadi jatidiri bangsa. Tahun 2017 ruas jalan antara Tugu – Kraton – Panggung Krapyak yang dikenal dengan Sumbu Filosofi telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional dan masuk tentatif list Warisan Budaya Dunia UNESCO. Penyiapan teknis dan masyarakat dalam menghadapi Jogja sebagai Kota Warisan Budaya Dunia dengan Sumbu Filosofinya telah dilakukan. Keberadaan filosofi kehidupan yang terkandung dalam Sumbu Filosofi ini sangat langka di dunia. Apabila DIY berhasil masuk dalam Daftar Tetap Kota Warisan Budaya Dunia melalui Kawasan Sumbu Filosofi antara Tugu-Kraton-Panggung Krapyak, dimungkinkan komitmen pihak internasional untuk turut menjaga kelestarian kawasan ini.

Pemerintah pusat menilai Indeks Pembangunan Kebudayaan di Indonesia dari aspek pelestarian hak berkebudayaan, pengembangan jatidiri dan karakter bangsa, penguatan multikulturalisme, pelestarian sejarah dan warisan budaya, pengembangan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan SDM kebudayaan, pengembangan sarana dan prasarana budaya, ditemukan bahwa Indeks Pembangunan Kebudayaan di DIY pada tahun 2016 menempati posisi 1, dengan nilai 80.



sumber : Kemendikbud

Gambar 2-26 Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2016

2.1.2.3.2 Olah Raga

Olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas fisik (kesehatan) dan karakter bangsa, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, meningkatkan roda ekonomi. Olahraga adalah alat untuk melaksanakan tiga tujuan revolusi Indonesia, yaitu: Negara Kesatuan RI yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan ampera (amanat penderitaan rakyat). Olahraga akan menjadi lokomotif ekonomi baru.

Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan. Dikatakan demikian karena di dalam aktifitas olahraga terkandung banyak nilai, disamping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerjasama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas, dan lain-lain.

Pembangunan olahraga daerah sebagai bagian dalam sistem keolahragaan nasional yang saling mengait antar subsistem secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Majunya perkembangan daerah dapat dilihat dari majunya perkembangan olah raga di daerah. Kalau olah raga maju, tentunya daerah tersebut pasti maju dengan baik.

2.1.2.3.2.1 Sumber Daya Manusia Olah Raga

Tabel 2-23 SDM Olahraga DIY Tahun 2017

No	Kabupaten /Kota	Pelatih	Wasit	Pembina	Klub Olahraga	Atlet
1	Kota Yogyakarta	109	56	80	120	621
2	Kab Bantul	150	100	1	45	805

No	Kabupaten /Kota	Pelatih	Wasit	Pembina	Klub Olahraga	Atlet
3	Kabupaten Gunungkidul	106	95	76	78	589
4	Kab Kulon Progo	218	136	42	134	515
5	Kab Sleman	210	141	120	130	765
	DIY	793	528	319	507	3295

Sumber : https://www.bpo-diy.or.id/sport/crclub.php

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mampu menembus posisi 10 besar PON ke XIX di Jabar dengan perolehan total medali sebanyak 56 medali. Rinciannya yakni 16 medali emas, 15 medali perak dan 25 medali perunggu. Prestasi atlet DIY diajang PON ke XIX memang dapat dikatakan mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah medali emas yang diperoleh pada PON ke XIX mampu melampaui jumlah medali emas yang ditargetkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY sebanyak 15 medali emas. DIY mendapat rangking 9, dengan prestasi 7 emas, 6 perak, 18 perunggu.

2.1.2.3.2.2 Sarana dan Prasarana Olahraga

Prasarana dan sarana olahraga memiliki arti penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Belum semua desa memiliki prasarana dan sarana olahraga. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga perlu memperhatikan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Prasarana dan sarana keolahragaan belum sepenuhnya memadai, lengkap dan terstandardisasi.

Sarana olahraga berjumlah 285 buah. Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Selain itu DIY memiliki GOR UNY, Stadion Maguwoharjo, Kridosono, Stadion Tridadi yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga dan budaya. Stadion Maguwoharjo termasuk stadion olahraga yang besar tingkat nasional dengan kapasitas penonton 30.000 orang.

Tabel 2-24 Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga di DIY, Tahun 2014-2017

Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	15,42	15,42	15,42	17,37	17,87
Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,30	0.33	0,41	0,91	0,30
Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	0,019	0,019	0,48	0,48	2,28
Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	0,0008	0,0008	0, 91	0, 91	2,78

Sumber: www.jogjabudaya.com; Dataku Bappeda, diolah

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan

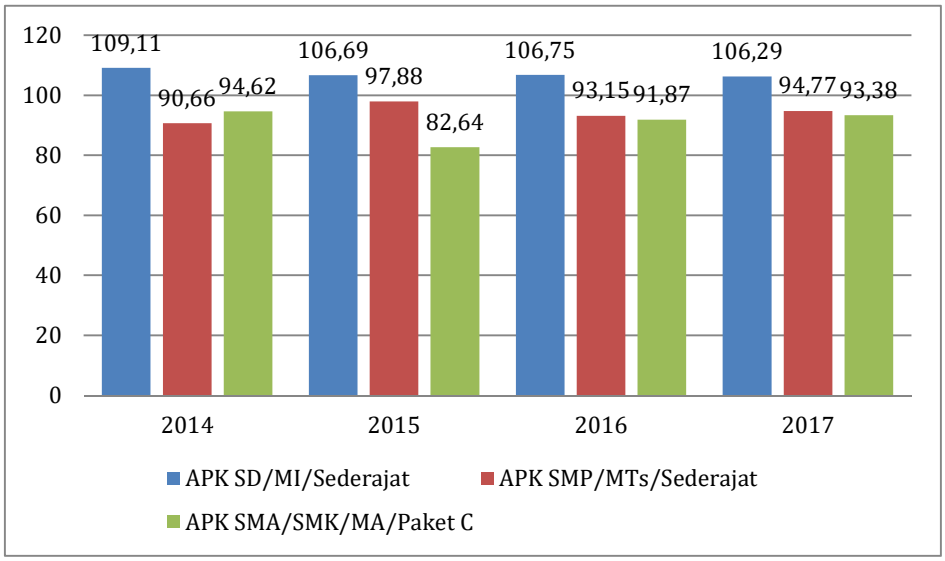
Filosofi yang mendasari pemerintah DIY dalam melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia terangkum dalam "Hamemayu Hayuning Bawana". Filosofi itu merupakan basis untuk mewujudkan cita-cita luhur tentang tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berbasiskan nilai budaya. Salah satu hal utama yg perlu di prioritaskan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu melalui pendidikan.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada tercapainya peradaban baru unggul yang menghasilkan 'manusia yang utama' (jalmâ kang utâmâ), yang berasaskan 'rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan'. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat renaisance di DIY.

2.1.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Sejak tahun 2007

Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) pun turut diperhitungkan dalam penghitungan APK. Capaian APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Capaian APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Capaian APK DIY tahun 2014 hingga 2017 dapat dilihat dari gambar berikut :



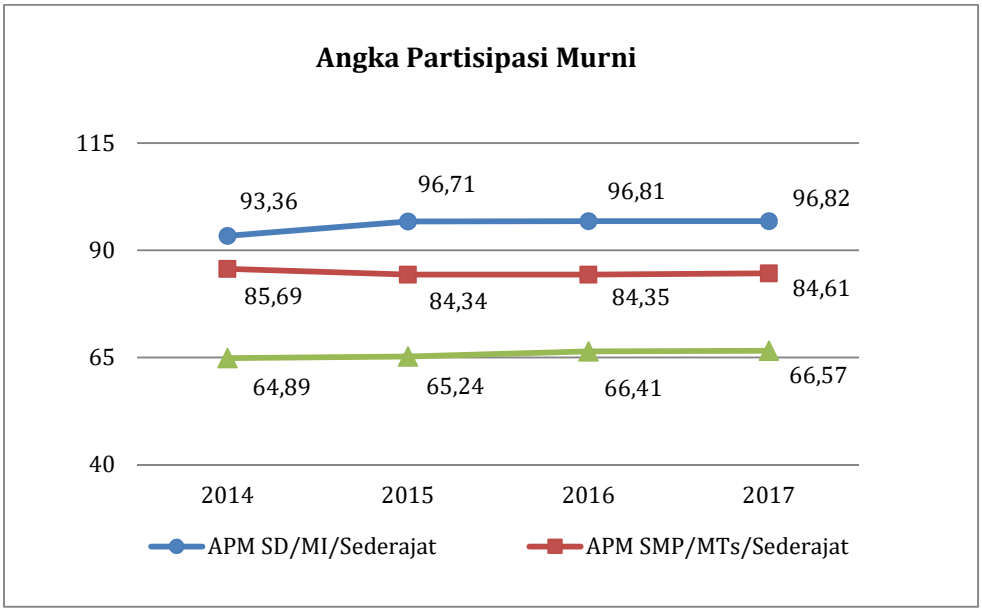
Sumber : BPS, 2018

Gambar 2-27 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2014 - 2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama periode 2014 sampai dengan periode 2017, capaian APK seluruh jenjang pendidikan di DIY mendekati 100. Bahkan, capaian APK SD DIY/sederajat menunjukkan capaian diatas 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk DIY memiliki kesadaran yang tinggi untuk bersekolah sesuai usianya, dan Pemerintah Daerah berhasil mempermudah akses masyarakat terhadap pendidikan dan membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadikan pendidikan sebagai prioritas hidup pada rentang usia sekolah.

2.1.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berbeda dengan APK, APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Oleh karena itu, nilai APM umumnya lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.
Capaian APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Secara rinci, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY tingkat SD, SLTP, dan SLTA periode 2014 sampai dengan periode 2017 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, 2017

Gambar 2-28 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2017

Secara umum capaian APM DIY Tahun 2017 untuk semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian APM tingkat SD Tahun

2017 meningkat sebesar 0,01 poin dari capaian tahun sebelumnya. Untuk tingkat SMP, capaian APM tahun 2017 mengalami peningkaran tertinggi dengan angka sebesar 0,26 poin dari tahun sebelumnya, meskipun capaian 84,61 ini lebih rendah bila dibandingkan capaian tahun 2014 yang menunjukkan angka 85,69. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin dari tahun 2016.

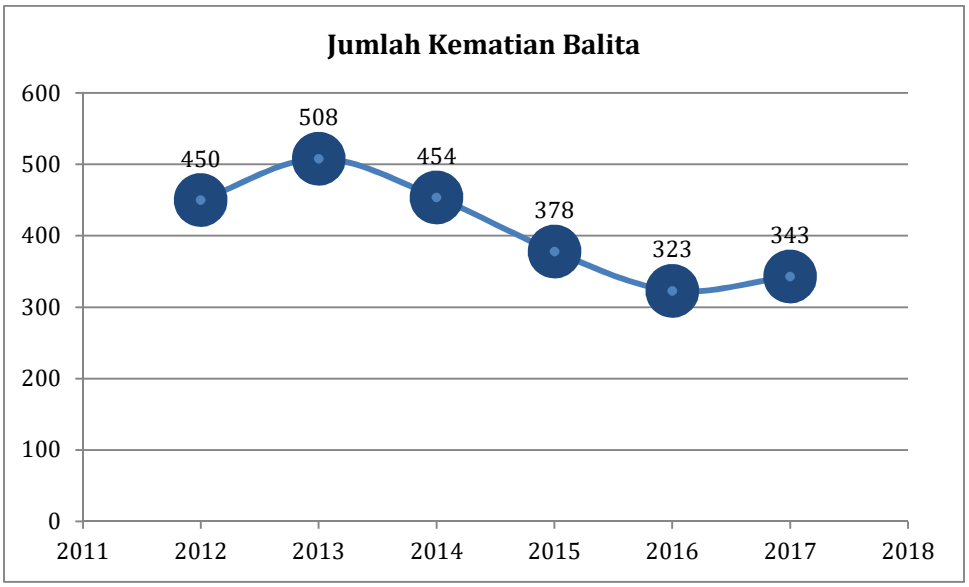
Selain itu, data capaian APM ini pun menunjukkan bahwa semakin besar selisih capaian APM dengan angka ideal pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Ini berarti, semakin tinggi jenjang pendidikan maka proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah semakin besar. Penyelenggaraan program akselerasi pada beberapa sekolah menjadi salah satu penyebab dari selisih ini. Program ini yang memungkinkan siswa berprestasi untuk mempercepat proses pendidikannya sehingga dapat lulus masing-masing jenjang tersebut satu tahun lebih awal. Akibatnya, jumlah siswa yang terlalu cepat bersekolah pada jenjang pendidikan selanjutnya semakin tinggi.

2.1.3.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

2.1.3.1.2.1 Jumlah Kematian Balita

Dilihat dari jumlah kasus kematian balita di DIY, Kasus kematian Balita di DIY juga fluktuatif dari tahun 2012-2017, tetapi pada kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu 454 pada tahun 2014, turun menjadi 378 pada tahun 2015 dan turun lagi menjadi 323 pada tahun 2016. Sedangkan tahun 2017 naik menjadi 343 kasus.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY

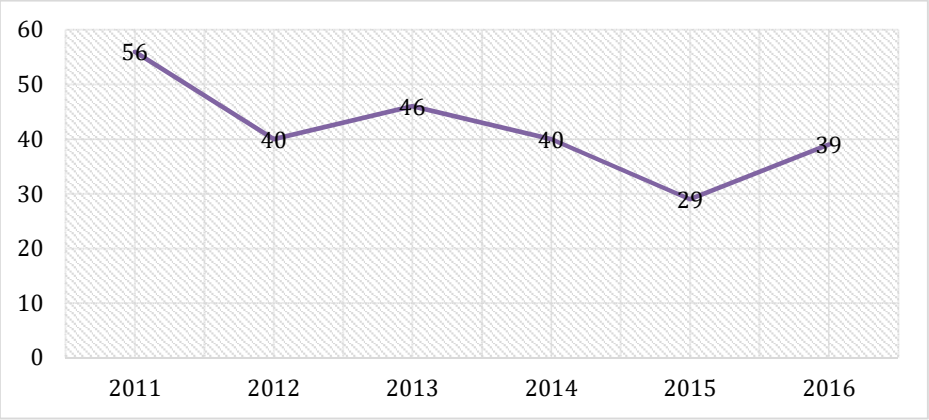
Gambar 2-29 Jumlah Kematian Balita Tahun 2012 - 2017

2.1.3.1.2.2 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Kematian ibu atau *maternal* adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.
Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga masih fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kependudukan (SDKI) Tahun 2012, AKI di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. Di DIY sendiri perkembangan AKI dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian ibu. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun 2011sampai dengan tahun 2016 meskipun fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan dengan kisaran 29 – 56 kasus kematian ibu. Tahun 2013 kasus kematian ibu

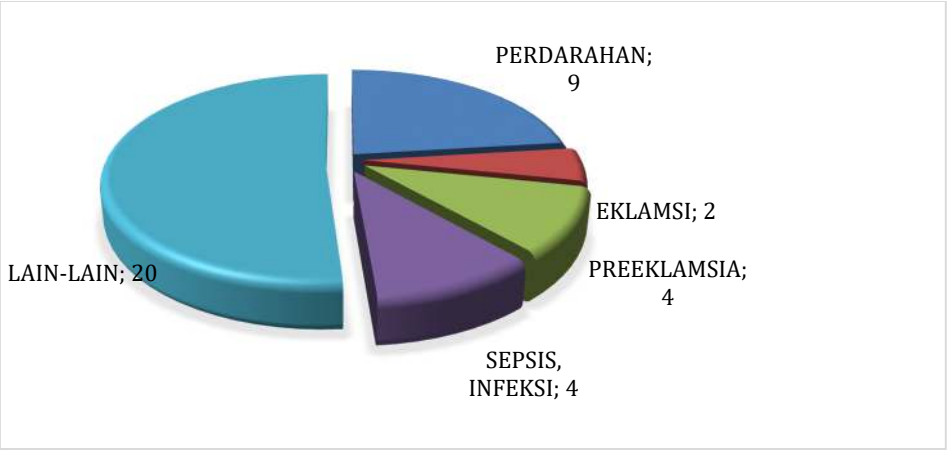
sebanyak 46 kasus, menurun di tahun 2014 menjadi sebanyak 40 kasus dan kembali menurun di tahun 2015 menjadi 29 kasus. Namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah kematian ibu sebanyak 39 kasus.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY

Gambar 2-30 Perkembangan Jumlah Kematian Ibu di DIY Tahun 2011-2016

Pada tahun 2016, penyebab kematian ibu yang paling banyak ditemukan di DIY adalah faktor yang masuk kategori lain-lain, yaitu karena masalah jantung (8), Emboli (1), syok (3), Tb (1), HIV (1), Pneumoni (1), DBD (1), MODS (1), Anemia hemolitik autoimun (1), Hiperemesis gravidarum (1), belum diketahui (1).



Sumber: Dinas Kesehatan DIY

Gambar 2-31 Penyebab Kematian Ibu di DIY Tahun 2016

Tanggung jawab bersama untuk menjamin semua ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas mulai dari saat hamil, persalinan sampai dengan perawatan pasca perkawinan serta akses dan informasi terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Intervensi mulai dilakukan pada saat remaja melalui edukasi tentang kesehatan reproduksi dalam penurunan AKI.

2.1.3.1.2.3 Rasio Posyandu per Satuan Balita

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

Penguatan partisipasi masyarakat di lini bawah melalui posyandu sangat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran pelayanan KIA, imunisasi, pemeliharaan gizi masyarakat, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Trend Proporsi posyandu aktif dari tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Data 2017 menunjukkan proporsi posyandu aktif sebesar 83,53. Meskipun demikian, masih perlu upaya mendorong posyandu agar menjadi aktif.

Tabel 2-25 Perkembangan Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2014-2017

Kab /Kota	2014			2015			2016			2017		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Kota Yogyakarta	625	450	72,00	625	450	72,00	625	615	98,40	623	623	100
Kab Bantul	1.132	747	65,99	1.132	747	65,99	1.137	747	65,70	1.141	913	80,02
Kab. Kulon Progo	961	866	90,11	960	863	89,90	960	830	86,46	960	776	80,83
Kab. Gunung kidul	1.465	1.306	89,15	1.465	1.261	86,08	1.467	1.258	85,75	1.467	1.259	86,50
Kab. Sleman	1.519	1.284	84,53	1.520	1.293	85,07	1.528	1.292	84,55	1.529	1.197	78,29
DIY	5.702	4.653	81,60	5.702	4.614	80,92	5.717	4.742	82,95	5.720	4.778	83,53

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

2.1.3.1.2.4 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1000 Penduduk

Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2016 sebanyak 442 unit dengan rasio sebesar 0,119.

Tabel 2-26 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk	3.594.854	3.637.116	3.679.176	3.720.912	3.762.200
Jumlah Puskesmas	121	121	121	121	121
Jumlah Puskesmas Pembantu	320	316	316	321	321
Jumlah Puskesmas dan Jumlah Puskesmas Pembantu	441	437	437	442	442
Rasio Puskesmas dan Jumlah Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk	0,123	0,120	0,119	0,119	0,117

Sumber: BPS DIY 2018, Dataku 2018, diolah

Dibandingkan dengan standar nasional, jumlah puskesmas yang harus tersedia dalam suatu wilayah berdasarkan SNI 03-1733-2004 yaitu setiap 120.000 penduduk harus terdapat minimal satu puskesmas. Jumlah penduduk DIY tahun 2017 sebanyak 3.762.200 jiwa maka kebutuhan puskesmas minimal yang harus dipenuhi sebanyak 30 unit, sedangkan total puskesmas di DIY tahun 2017 sebesar 121 unit yang tersebar merata pada setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2022 BPS memproyeksikan jumlah penduduk DIY adalah 3.958.400 jiwa, maka kebutuhan puskesmas yang harus tersedia adalah hanya 33 unit. Oleh karena itu, pemerintah DIY dirasa belum perlu untuk menambah jumlah puskesmas karena jumlah saat ini sudah lebih dari cukup untuk melayani semua penduduk.

Sedangkan standar nasional untuk penyediaan puskesmas pembantu (Pustu), jumlah yang harus ada di suatu wilayah berdasarkan SNI 03-1733-2004, yaitu setiap 30.000 penduduk minimal harus terdapat satu puskesmas pembantu. Total penduduk DIY tahun 2017 sebanyak 3.762.200 jiwa sehingga kebutuhan

pustu minimal sebanyak 125 unit. Namun demikian jumlah pustu yang ada di DIY sampai tahun 2017 sebanyak 321 unit yang berarti bahwa DIY saat ini hingga tahun 2022 mendatang (dengan perkiraan jumalh penduduk sebesar 3.958.400 jiwa) telah memenuhi standar pelayanan kesehatan terutama dalam penyediaan puskesmas maupun puskesmas pembantu.

2.1.3.1.2.5 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Dilihat dari rasio rumah sakit rumah sakit per satuan penduduk ketersediaan RS menurut standar yang ditetapkan Kementrian Kesehatan sebesar 1 Tempat Tidur (TT) untuk 1000 penduduk, DIY sudah memenuhi standar. Secara sebaran hanya kabupaten Gunung Kidul yang belum memenuhi standar

Tabel 2-27 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY

No.	Kab/Kota	Jumlah penduduk	Jumlah RS	Jumlah TT	Ratio
1	Kota Yogyakarta	411.700	20	1862	1 : 221
2	Bantul	919.716	15	1141	1 : 806
3	Kulon Progo	437.441	8	493	1 : 887
4	Gunung Kidul	756.024	5	359	1 : 2.105
5	Sleman	1.079.053	28	2980	1 : 362
	Total	3.603.934	76	6835	1 : 527

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

2.1.3.1.2.6 Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.

Pada tahun 2017, jumlah dokter umum yang ada di DIY sebanyak 931 orang dengan rasio dokter umum per 100.000 penduduk di tahun 2017 sebesar 24,75. Dengan kata lain 1 orang dokter umum di DIY melayani 4.04 penduduk. Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di DIY tahun 2017 adalah sebanyak 1.142 orang. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di DIY tahun 2017 adalah sebesar 30,35. Hal ini berarti 1 orang dokter spesialis di DIY melayani 3.294 penduduk. Jumlah dokter gigi DIY tahun 2016 sebanyak 482 orang. Rasio dokter gigi DIY tahun 2017 per 100.000 penduduk sebesar 7,81

atau dapat diartikan bahwa 1 orang dokter gigi di DIY melayani 13.418 penduduk.

Tabel 2-28 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk	3.594.854	3.637.116	3.679.176	3.720.912	3.762.200
Dokter Umum	1.354	1.352	943	847	931
Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	37,66	37,17	25,63	22,76	24,75
Dokter Spesialis	1.262	1.154	1.004	1.107	1.142
Rasio Spesialis Umum per 100.000 Penduduk	35,11	31,72	27,29	29,75	30,35
Dokter Gigi	453	453	459	283	482
Rasio Dokter Gigi Umum per 100.000 Penduduk	12,60	12,45	12,48	7,61	12,81

Sumber: BPS DIY 2018, Dataku 2018, diolah

Pada tahun 2017, jumlah tenaga medis (dokter) di DIY adalah sebanyak 2.555 orang yang terdiri dari 931 dokter umum, 482 dokter gigi, dan 1.142 dokter spesialis. saat ini DIY dinilai masih kekurangan tenaga medis.

Aspek yang tidak kalah penting dan mendasar dalam pembangunan sektor kesehatan ini adalah peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan bagi warga yang meliputi ibu, anak, remaja, penduduk usia produktif, dan lanjut usia. Meksipun pemenuhan akses dan layanan kesehatan relatif baik, namun pemerintah DIY perlu mengoptimalkan agar mendapatkan tataran kualitasnya yang prima. Sehingga pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan transisi demografi dapat berjalan secara maksimal.

2.1.3.1.2.7 Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Rasio perawat di DIY tahun 2017 sebesar 217,13 per 100.000 penduduk, angka ini di atas angka standar nasional yang sebesar 117 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di DIY tahun 2017 sebesar 56,03 per 100.000 penduduk, angka ini masih di bawah standar nasional yang sebesar 100 per 100.000

penduduk. Tabel berikut menyajikan jumlah perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga gizi di DIY tahun 2015–2017.

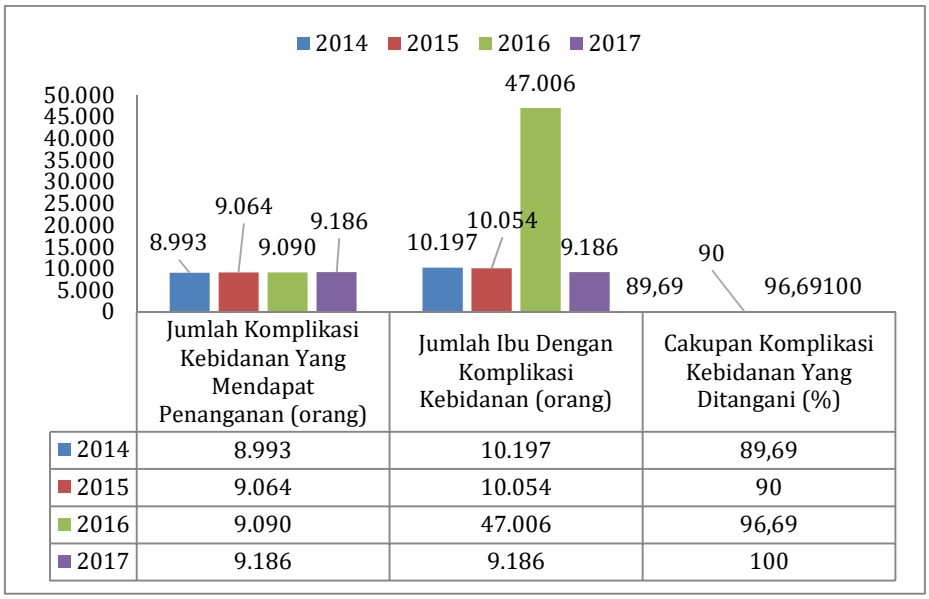
Tabel 2-29 Jumlah dan Rasio Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, dan Tenaga Gizi Per 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2015 - 2017

Tenaga Kesehatan	2015		2016		2017	
	Jumlah	Rasio per 100.000 penduduk	Jumlah	Rasio per 100.000 penduduk	Jumlah	Rasio per 100.000 penduduk
Perawat	5.688	154,59	6.353	170,74	8.169	217,13
Bidan	2.212	60,12	1.508	40,53	2.108	56,03
Tenaga Farmasi	1.784	48,48	1.078	28,97	1.603	42,61
Tenaga Gizi	430	11,68	373	10,02	392	10,42

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2018.

2.1.3.1.2.8 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari tahun 2014 sampai dengan 2017 menunjukkan tren kenaikan, dari 89,69% di tahun 2014 naik menjadi 90,00% di tahun 2015, naik kembali menjadi 96,69% di tahun 2016 dan 100% di tahun 2017. Untuk cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani terdiri dari 2 unsur yaitu (1) Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan dan (2) Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan.



	Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan (orang)	Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan (orang)	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%)
2014	8.993	10.197	89,69
2015	9.064	10.054	90
2016	9.090	47.006	96,69
2017	9.186	9.186	100

Sumber : Dataku Bappeda 2018, diolah

Gambar 2-32 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani di DIY Tahun 2014-2017

2.1.3.1.2.9 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di DIY mencapai 98,33% jauh di atas rata–rata nasional yang mencapai 82,2%. Secara nasional, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan berada pada posisi tertinggi. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompentensi kebidanan mengalami penurunan dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2014, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 99,96% menurun pada tahun 2017 menjadi 98,33%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di DIY ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Tabel berikut menunjukkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2-30 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan di DIY Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah Ibu Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan	45.556	45.560	43.012	42.105	Orang
2	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	45.575	45.575	43.034	42.822	Orang
3	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	99,96	99,95	99,95	98,33	%

Sumber : Dataku Bappeda 2018

2.1.3.1.2.10 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Walaupun angka capaian gizi di DIY sudah jauh melampaui target nasional, tetapi penderita gizi buruk masih terdapat di DIY. Pada tahun 2016, jumlah kasus balita gizi buruk di DIY sebanyak 1.001 balita. Pada tahun 2017 turun menjadi 968 balita. Upaya Pemerintah DIY dalam penanganan balita gizi buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan, penyediaan rumah pemulihan gizi dan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk.

2.1.3.1.2.11 Penyakit Menular dan Tidak Menular

Masalah kesehatan terkait penyakit yang kembali mengalami trend peningkatan adalah *Multiple Burden of Disease*. Multiple Burden of Disease adalah penyakit infeksi, penyakit degeneratif, penyakit oleh karena gaya hidup, new emerging disease, seperti SARS, Flu Burung, dan penyakit lama yang muncul kembali (reemerging disease), seperti ZIKA. HIV/AIDS, Tuberkulosis, Demam Berdarah menjadi masalah prioritas penyakit infeksi. DIY sebagai kota wisata dan pendidikan beresiko untuk penularan HIV. Didukung dengan peredaran narkoba yang kian marak. Penemuan HIV pada tahun 2017 ada 324 kasus dan AIDS ada 27 kasus.

Penyakit TB masih menjadi masalah karena masih banyak penderita TB yang belum ditemukan, sehingga resiko penularan di masyarakat masih tinggi. Penemuan TB masih stagnan dari tahun 2005-2016 dengan kisaran 50%-58%.

Belum lagi dengan masalah TB kebal obat (TB Multi Drug Resistance) yang angkanya terus meningkat. Permasalahan lain kolaborasi TB dengan penyakit lain, TB HIV, TB Diabetes Mellitus.

Pertumbuhan kasus baru demam berdarah masih fluktuatif selama 5 tahun terakhir, dengan kasus yang tinggi pada tahun 2015 (3420 kasus) , Tahun 2016 ada 6318 dan tahun 2017 ada 1642 kasus.

Kejadian penyakit menular dan tidak menular sangat terkait dengan pola hidup yang belum menerapkan pola hidup yang sehat.

2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakaryaan, serta Sub Urusan Jasa Konstruksi.

2.1.3.1.3.1 Sub Urusan Sumber Daya Air

Pembangunan sumber daya air tidak secara khusus diprogramkan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pendukung pengembangan suatu wilayah, ini berarti pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk mendukung berlangsungnya hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat, mendukung kegiatan sosial ekonomi dan budaya. Arah kebijakan pembangunan sektor sumber daya air adalah mengikuti pengembangan wilayah, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun lokal DIY.

Sektor sumber daya air dalam lingkup kegiatan pemda DIY adalah melaksanakan ketugasan di dalam peningkatan kinerja sistem irigasi, peningkatan kondisi jaringan irigasi, peningkatan penanganan titik genangan, dan penambahan kapasitas air baku.

Jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur dalam mencapai ketahanan pangan yaitu untuk melayani ketersediaan air di lahan basah/sawah. Layanan penyediaan air irigasi di DIY tidak hanya dilakukan oleh pemerintah DIY, namun dilakukan juga oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan pemerintah Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan dalam layanan penyediaan irigasi berdasarkan luasan daerah irigasi. Daerah irigasi di DIY Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2-31 Daerah Irigasi di DIY Tahun 2015

No	Kewenangan	DI Permukaan	DI Air Tanah	DI Pompa	Jumlah DI	Luas(Ha)
1.	BBWSO	3	-	-	3	12.460
2.	DIY	41	-	-	41	13.987
3.	Bantul	100	18	-	118	9.368
4.	GunungKidul	182	55	-	237	7.722
5	Sleman	853	-	75	928	25.814
6	Kulon Progo	90	-	3	93	1.583
7	Kota	10	-	-	10	49
		1.279	73	78	1.430	70.983

Sumber : Permen PI dan PR Nomor 14/PRT/M/2015

Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY sebesar 13.987 Ha yang terbagi menjadi satuan Daerah Irigasi (DI) sejumlah 41 DI yang merupakan DI permukaan. DI kewenangan Pemda DIY terdiri dari daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota sejumlah 35 DI dengan luas 4.909 Ha dan daerah irigasi utuh di Kabupaten sejumlah 6 DI dengan luas 9.078 Ha.

Terkait dengan penyediaan air baku, Pemda DIY telah membangun embung-embung sebagai penampung air dan mempertahankan stabilitas muka air tanah. Pembangunan embung telah dimulai pada tahun 2005 yaitu pembangunan embung di Banaran Gunungkidul. Pada tahun 2016 pembangunan embung dilakukan melalui belanja hibah, yaitu pada pembangunan Embung Batur di Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan pada tahun 2017 dibangun embung Krapyak di Kabupaten Kulon Progo, sehingga sampai dengan tahun 2017 sudah ada 22 embung. Di dalam pencapaian target RPJMD pada penyediaan air baku sebesar 2.100 Liter/detik juga didukung dari pembangunan bendung Kamijoro, SPAM Regional Kebon Agung, SPAM Regional Karangtalun dan sumur bor dari bidang ESDM. Capaian pada akhir tahun 2017 adalah debit air baku sebesar 2.168,73 liter/detik.

Dalam memenuhi tanggungjawab terkait bidang sumber daya air tergantung pada perencanaan suplai air baku, baik untuk irigasi maupun rumah tangga komersial dan industri. Perencanaan suplai air baku dipengaruhi oleh arah pengembangan wilayah. Kebutuhan air untuk irigasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi antara lain karena adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, diversikasi tanaman dari padi ke non padi, peningkatan efisiensi yang menyebabkan penghematan penggunaan air. Kebutuhan air untuk Domestik (Rumah tangga) mengalami peningkatan sebesar 72% (dari 5,152 m^3/dt menjadi 8,88 m^3/dt) selama kurun waktu dari tahun 2015-2035. Hal ini terjadi karena pertumbuhan populasi penduduk , juga adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memicu peningkatan standar kuantitas dan kualitas pemakaian air bersih per kapita. Adanya rencana pengembangan kawasan industri di beberapa lokasi di DIY, diprediksikan adanya peningkatan permintaan air untuk kegiatan ini. Demikian juga dengan perkembangan wilayah perkotaan dengan berbagai prasarananya akan menyebabkan peningkatan permintaan air untuk sektor komersial.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat dan pembangunan tempat tinggal penduduk yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) seperti di daerah yang seharusnya jadi resapan/tempat parkir air (*Retarding Pond*) dan daerah bantaran sungai mengakibatkan peningkatan volume air yang masuk ke saluran drainase dan sungai sehingga melampaui kapasitas penyediaan prasarana dan sarana drainase perkotaan dan daya tampung sungai.

Akibat dari permasalahan tersebut terjadi banjir atau genangan. Mengacu pada dokumen Masterplan Penanganan Drainase KPY teridentifikasi sebanyak 51 titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Penanganan hingga tahun 2014 telah mencapai 49,20 % yang ditargetkan hanya 39,90 % dan 45,90 % pada tahun 2015. Penanganan infrastruktur dasar yang terkait dengan drainase dilakukan melalui kegiatan Perencanaan dan pembangunan pada Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di tahun 2014 dan 2015, sedangkan di tahun 2016 dan 2017 pemda DIY melaksanakan kegiatan Review Masterplan Penanganan Drainase KPY serta penyepakatan penanganan genangan bersama pemerintah Pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota.

2.1.3.1.3.2 Sub Urusan Keciptakaryaan

Bidang keciptakaryaan dalam lingkup kegiatan pemda DIY adalah melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) yang meliputi: (1) Permukiman, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Persampahan, (5) Drainase, dan (6) Penataan Bangunan dan Lingkungan. Penyediaan infrastruktur permukiman seperti air minum dan sanitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas penduduk sehingga dapat keluar dari jurang kemiskinan. Pembangunan infrastruktur permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) *strategic goals* yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja; c) meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman.

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum. Pencapaian indikator persentase penduduk *berakses* air minum dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total penduduk DIY.

Sampai dengan tahun 2017, persentase penduduk berakses air minum sudah mencapai 90,93%. Dalam pencapaian target tersebut intervensi yang menjadi prioritas SPAM MBR, SPAM IKK dan SPAM Perdesaan yang penekanannya pada keberfungsian (kapasitasproduksi, SR/HU, jumlah jiwa terlayani *serta* distribusi air mengalir). Untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta membutuhkan pengembangan SPAM Regional. Panjang jaringan distribusi SPAM Regional hingga tahun 2017 adalah 17.250 meter. Sistem perpipaan terdiri dari perpipaan PDAM dan Non PDAM (SPAM Perdesaan), perpipaan Non PDAM dikelola oleh kelompok masyarakat pengelola air minum yang bernama PAMASKARTA DIY.

Penyediaan sanitasi DIY disediakan oleh sistem terpusat melalui IPAL Sewon, sistem komunal dan sistem setempat. Sistem terpusat IPAL Sewon berlokasi di Sewon, Bantul melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang terdiri wilayah

Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Bantul dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah merupakan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY dengan fokus penanganan pada wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui pelayanan sistem terpusat oleh IPAL Sewon.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka potensi jumlah air limbah domestik akan semakin bertambah. Penanganan air limbah domestik dimaksudkan agar tidak mencemari sumber air dan lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat terutama dari penyakit yang disebabkan oleh air limbah. Pengelolaan limbah cair domestik di DIY dapat dibagi menurut teknologi pengelolaan yang dilakukan yaitu teknologi *off site system* dan *on site system* berupa individual atau komunal.

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan.

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui TPST 3R dan pelayanan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan menuju TPA. Terdapat 3 TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kartamantul : Yogyakarta, Sleman dan Bantul), TPA *Sanitary Landfill* Kulon Progo dan TPA *Sanitary Landfill* Gunungkidul.

Sub sektor *Sanitasi* meliputi Persampahan, Air limbah dan Drainase. Pencapaian target-target di dalam RPJMD pada periode keempat ini melalui dukungan program-program pengembangan pengelolaan air limbah, program pengelolaan persampahan dan program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

Fokus penanganan drainase adalah permasalahan genangan di Kawasan *Perkotaan* Yogyakarta. Penyelesaian permasalahan genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta bersifat lintas subbidang dan lintas wilayah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan agar hasilnya optimal.

2.1.3.1.3.3 Sub Urusan Jalan

Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas *Jalan* Provinsi terjadi perubahan panjang total ruas jalan provinsi menjadi sepanjang 760,45 Km. Ruas jalan tersebut bertambah dari kondisi sebelumnya karena ada ruas-ruas jalan yang beralih status dari jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi dan ada pula ruas jalan provinsi yang menjadi jalan nasional. Berikut disajikan daftar ruas jalan Provinsi.

Tabel 2-32 Daftar Ruas Jalan Provinsi

No	Lokasi Ruas Jalan Provinsi	Panjang Ruas (Km)
1	Kota Yogyakarta	-
2	Kabupaten Bantu;	162,150
3	Kabupaten Kulon Progo	175,140
4	Kabupaten Gunungkidul	306,840
5	Kabupaten Sleman	116,320
	Total Panjang Ruas Jalan	760,450

Sumber: Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016

Di DIY telah terbangun jaringan Jalan Provinsi sepanjang 760,45 Km dan jembatan sejumlah 249 buah sepanjang 5.752 m. Sampai dengan tahun 2017 persentase jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) telah mencapai 72,26% atau sepanjang 549,51 km. Pencapaian jalan dalam *kondisi* mantap 72,26% dilakukan melalui kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan dan jembatan, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dan peningkatan jalan yang didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan.

Berikut disajikan data Kondisi Jalan Provinsi hingga akhir tahun 2017 berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan.

Tabel 2-33 Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2017

Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
	Km	%		Km	%
Mantap	549,50	72,26	Baik	304,40	40,03
			Sedang	245,10	32,23
Tidak Mantap	210,95	27,74	Rusak Ringan	148,23	19,49
			Rusak Berat	62,72	8,25
Jumlah	760,45	100		760,45	100,00

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2017

Dalam rangka mendukung aksesibilitas di wilayah DIY maka perlu mengembangkan fungsi jalan dan mempertahankan jalan status provinsi dalam kondisi mantap. Fungsi jalan yang dikembangkan antara lain Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Pengembangan Jalur Selokan Mataram, *Jogjakarta Outer Ringroad (JORR)*, jalan akses Borobudur, dan jalan akses Prambanan-Ngalang-Nguwot-Gading. Pengembangan fungsi jalan dapat meningkatkan aksesibilitas baik dari aspek kewilayahan maupun aspek sektoral.

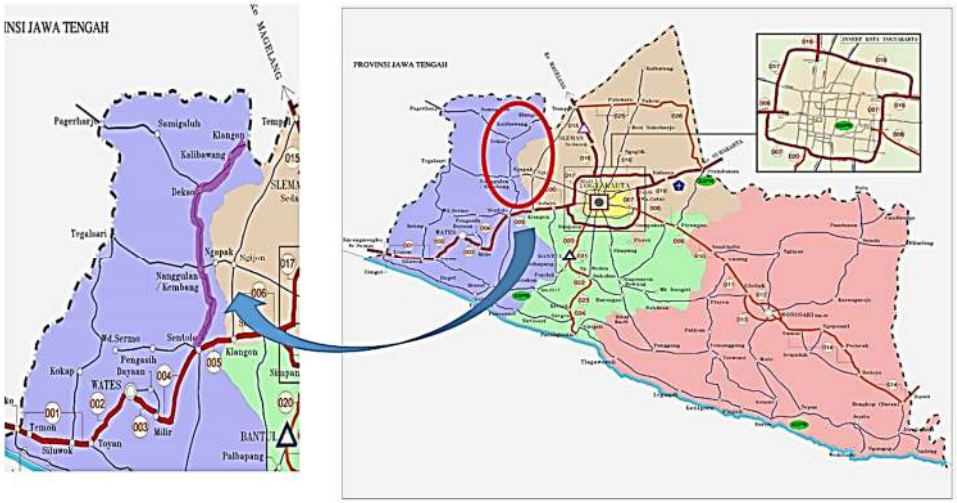
Pembangunan JJLS bermanfaat untuk membuka seluruh potensi daerah selatan di DIY seperti potensi wisata, industri kelautan dan pertanian yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat untuk penyeimbang pertumbuhan wilayah DIY yang selama ini cenderung berkembang ke arah Utara – Timur Laut. Selain itu, JJLS merupakan satu kesatuan jaringan jalan di pulau Jawa yang akan memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik bagi pengguna jalan. Berdasarkan data pekerjaan konstruksi sampai dengan tahun 2017 terdapat 66,02 Km dari total panjang JJLS sebesar 121,69 Km yang terbagi dalam 3 segmen jalan belum terhubung karena merupakan trase baru. Segmen tersebut yaitu Segmen Ngremang - Srandakan 3 – Pandansimo (4,48 Km); Segmen Samas – Parangtritis (5 Km); dan Segmen Parangtritis – Girijati (5Km). Dalam upaya untuk mengatasi kesenjangan wilayah antara timur dan barat , Pemda DIY telah melakukan pembebasan lahan untuk Jalan Selokan Mataram seluas 3.918 m^2 dari 3.200 m^2. Jalan yang dibangun berada pada sisi utara dan selatan selokan Mataram untuk menghubungkan jalan arteri utara barat sampai dengan jalan arteri utara timur.

JORR direncanakan sebagai jaringan lintas utama barang sehingga kendaraan dengan tonase besar tidak masuk ke perkotaan Yogyakarta. Keberadaan

terminal/stasiun angkutan barang menjadi satu bagian dalam sistem distribusi logistik di DIY dengan *inland port* sebagai pusat distribusi dan kawasan industri sebagai bangkitan. Rute JORR sebelumnya direncanakan sepanjang 110 Km terbagi dalam 2 wilayah yaitu Kabupaten Sleman dengan panjang 69,19 Km dan Kabupaten Bantul dengan panjang 41,81 Km. JORR di wilayah Kabupaten Sleman terdiri dari 4 ruas yaitu Klangon – Tempel; Tempel – Pakem; Pakem – Prambanan; Prambanan – Piyungan. Sedangkan JORR di wilayah Bantul yaitu ruas Sedayu – Pandak; Pandak – Palbapang; Palbapang – Barongan; Barongan – Singosaren; Singosaren – Sampakan. Pada tahun 2017 ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat merevisi rute JORR di wilayah Kabupaten Sleman dengan panjang 65,933 Km, terdiri dari ruas Sentolo – Minggir, Minggir – Tempel, dan Tempel Kalasan, sedangkan di kawasan Kabupaten Bantul sepanjang 47,48 Km terdiri dari ruas Sentolo – Imogiri, Imogiri – Piyungan, dan Piyungan – Kalasan.

Jalan akses Borobudur direncanakan untuk dikembangkan dalam rangka mendorong sektor pariwisata di mana Candi Borobudur merupakan salah satu ikon Yogyakarta dan Jawa Tengah bertaraf internasional yang juga termasuk dalam layanan Bandara Baru Yogyakarta. Jalur ini merupakan pengembangan jalan eksisting yang terdiri dari 2 ruas utama, yakni:

1. Ruas Bedah Menoreh
   Ruas ini melalui Siluwok - Klepu - Tegalsari
2. Ruas Sentolo – Nanggulan – Dekso – Klangon
   Ruas ini menghubungkan wilayah Sentolo di Kulonprogo dengan wilayah Magelang.



Gambar 2-33 Rencana jalur akses ke Borobudur melalui ruas Sentolo-Nanggulan-Dekso-Klangon

Pembangunan jalan akses Prambanan-Ngalang-Nguwot-Gading diawali dengan pembangunan jembatan Lemah Abang pada tahun 2017. Jembatan Gantung Lemah Abang ini mempunyai konstruksi dengan rangka utama terbuat dari besi di cat kuning, untuk jalan terbuat dari kayu. Saat ini beberapa papan kayu tersebut sudah ada yang lapuk sehingga harus berhati hati meniti jembatan tersebut. Pembangunan jembatan direncanakan didanai oleh pemerintah daerah DIY dengan anggaran sebesar Rp 67,5 milyar dan Kabupaten Sleman sebesar Rp.1,02 milyar untuk penyediaan lahan. Pembangunan Jembatan Lemah Abang terdiri dari keluaran :

- Jalan Pendekat Gayamharjo - Lemah Abang sepanjang 1,00 Km;
- Pembangunan Jembatan Lemah Abang sepanjang 90,00 M;
- Jalan Pendekat Lemah Abang - Ngoro-oro sepanjang 2,00 Km.



Gambar 2-34 Jalan Pendekat Gayamharjo - Lemah Abang dan Jembatan Lemah Abang

Keberadaan pembangunan Jembatan Lemah Abang dapat membawa dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat antara lain:

a) Peningkatan kelancaran lalu lintas manusia karena dapat dilalui kendaraan roda empat
b) Peningkatan mobilitas barang ke daerah lain (Kabupaten Sleman dan sekitarnya)
c) Munculnya peluang usaha baru, seperti warung makan dan lain lain
d) Mempermudah akses ke obyek wisata, seperti ke Jurug Gede, Gunung Purba.

2.1.3.1.3.4 Sub Urusan Jasa Konstruksi

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan selalu dituntut untuk tetap meningkatkan kontribusinya. Walaupun mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, sektor konstruksi berada pada kondisi yang kurang menggembirakan. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penghambat investasi konstruksi di Indonesia, di samping kualitas birokrasi pemerintahan dan pengaturan tenaga kerja untuk mendorong pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu daya saing sektor konstruksi baik produktivitas dan efisiensi maupun kreativitas dan inovasi masih terbatas. Melihat strategisnya peran sektor konstruksi bagi perekonomian dan tantangan ke depan yang harus dihadapi, pembinaan menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi nasional agar mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar dalam dan luar negeri melalui berbagai upaya

pembinaan, mulai dari aspek pengaturan, pemberdayaan, sampai dengan pengawasan.

Pencapaian kinerja jasa konstruksi diukur dari kinerja penyelenggaraan konstruksi yang terdiri dari Pelayanan dan Pengembangan Jasa Pengujian, Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum, serta Pembinaan Jasa Konstruksi. Sampai dengan tahun 2017 pencapaian target penyelenggaraan jasa konstruksi adalah mencapai 90,83%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Dari program Pelayanan dan Pengembangan Jasa Pengujian (memiliki bobot 30%), telah diterbitkan laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian sebanyak 1700 LHU dan capaian jumlah parameter terakreditasi sebanyak 40 parameter.
2) Dari program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum (memiliki bobot 30%), telah dilaksanakan 28 kegiatan keandalan bangunan dan jumlah orang yang terlayani di dalam peningkatan kapasitas sebanyak 368.000 orang.
3) Dari program Pembinaan Jasa Konstruksi (memiliki bobot 40%), telah dicapai target layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Jasa Konstruksi sebanyak 5 layanan, telah disosialisasikan 6 peraturan, serta telah dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi kumulatif sebanyak 3.800 orang tenaga kerja konstruksi.

2.1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota melakukan pelayanan dasar meliputi:

1. Rumah layak huni dan terjangkau;
2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Adapun kondisi backlog perumahan di DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 2-34 Jumlah Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal

No	Status Kepemilikan Tempat Tinggal (BPS 2016)	Jumlah (Unit)
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	Milik sendiri	865.657
2.	Kontrak/Sewa	157.371
3.	Bebas sewa	88.568
4.	Dinas	5.009
5.	Lainnya	1.805
	TOTAL A (2+3+4+5)	**252.753**
	TOTAL B (1+2+4)	**1.028.037**

Sumber : Basis Data Perumahan dan Kawasan Pemukiman DIY 2017, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi DIY, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kemntrian PU dan Perumahan

Dari data Susenas BPS tahun 2016 tersebut, dapat diketahui kondisi backlog sebagai berikut :

- Backlog kepemilikan = (Total A) = 252.753 unit
- Backlog penghunian = (Bebas sewa) = 88.568 unit

Di Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, lokasi Permukiman Kumuh Perkotaan telah ditetapkan dengan SK Bupati/ Walikota yang juga telah dilengkapi dengan profil kawasan kumuh. SK Bupati tersebut yaitu:

a. SK Bupati Kabupaten Sleman No.83/Kep.KDH/A/2014 tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan.
b. SK Bupati Kabupaten Gunungkidul No.287/KPTS/2014 tentang Kawasan Permukiman Kumuh dan Tahapan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019.
c. SK Bupati Kabupaten Kulon Progo No.421/2014 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019.
d. SK Bupati Kabupaten Bantul No. 364/2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bantul.

e. Keputusan Walikota Yogyakarta No.393/2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Tidak Layak Huni Di Kota Yogyakarta.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 - 15 hektar merupakan tanggung jawab dari pemerintah provinsi.

Penanganan kumuh sesuai dengan "Gerakan Nasional 100-0-100" yaitu tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, dilakukan melalui identifikasi sampai dengan penanganan kawasan kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota di DIY. Telah dipilah penanganan kawasan kumuh tersebut berdasar regulasi yang ada sebagai berikut.

Tabel 2-35 Penanganan Kawasan Kumuh Berdasarkan Kewenangan

No.	Kewenangan	Luasan (Ha)	Keterangan
1	Kewenangan Pusat	730,67	Luasan > 15 ha
2	Kewenangan Provinsi	96,89	Luasan 10 - 15 ha
3	Kewenangan Kab/Kota	165,90	Luasan < 10 ha
	Total	993,46	

Sumber: Dinas PUP ESDM, 2016

Pada tahun 2017 Pemda DIY telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan Pengaturan Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan keluaran : penyusunan NSPM Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Skala Menengah, penyusunan NA Road map Penanganan RP3KP, Inventarisasi rumah tanpa alas hak di koridor sungai Perkotaan Yogyakarta, penyusunan Kajian lahan untuk perumahan MBR, serta koordinasi Pokja PKP dan Pusat bersama Pemda Kabupaten.
2) Verifikasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dengan keluaran : terlaksananya verifikasi RTLH untuk Usulan BSPS, DAK, dan BKK.
3) Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh dengan keluaran : penyusunan DED Penanganan Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan provinsi, penanganan PSU Kawasan Kumuh (1 Kawasan), perencanaan PSU kawasan Kumuh, Peningkatan kualitas Prasarana, Sarana (PSU) Kawasan Kumuh di Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta.

Kebutuhan rumah bagi penduduk dari waktu ke waktu bertambah sesuai dengan peningkatan jumlah KK, karena rumah merupakan kebutuhan pokok penduduk disamping kebutuhan pangan dan sandang. Derajat kesehatan penghuni rumah dapat ditentukan dari tingkat kualitas rumah. Rumah yang sehat dan baik maka akan dapat memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dan sekaligus membentuk rumah tangga yang sehat dan sejahtera. untuk mewujudkan rumah layak huni harus dipenuhi dengan beberapa syarat. Syarat tersebut antara lain seperti luas lantai, jenis atap rumah, dinding dan atap yang digunakan, serta kelengkapan lainnya seperti sumber penerangan, sumber air minum dan fasilitas air minum, serta fasilitas sanitasi.

Pemda DIY memiliki target untuk melakukan penanganan rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2022 sebesar 53,78%. Data rumah tidak layak huni di DIY yang dihimpun melalui Forum Pendataan Sejuta Rumah Daerah Istimewa Yogyakarta pada awal tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-36 Data Rumah Tidak Layak Huni di DIY, Tahun 2017

Kabupaten / Kota	No	Kecamatan	Jumlah KK/RT	JumlahRTLH		Sumber Data
				Versi BDT (unit)	Verifikasi Pemda (unit)	
Kabupaten Gunungkidul	1	Wonosari	24.635	129	2.002	1. Pendataan BKKBN Tahun 2015; 2. TNP2K; 3. SK Bupati Gunungkidul No. 133/KPTS/2016 tentang Lokasi RTLH Tahun 2016
	2	Nglipar	8.389	162	1.708	
	3	Playen	16.359	503	3.062	
	4	Patuk	10.062	107	896	
	5	Paliyan	9.383	236	1.410	
	6	Panggang	8.574	57	530	
	7	Tepus	12.028	431	1.170	
	8	Semanu	17.623	91	1.005	
	9	Karangmojo	16.816	113	1.956	
	10	Ponjong	17.411	126	1.871	
	11	Rongkop	9.763	82	1.359	
	12	Semin	16.027	190	1.709	
	13	Ngawen	10.794	300	1.614	
	14	Gedangsari	12.211	529	2.219	
	15	Saptosari	12.147	328	1.108	
	16	Girisubo	7.921	105	1.264	
	17	Tanjungsari	8.806	221	602	
	18	Purwosari	6.067	29	355	
		Jumlah	**225.016**	**3.739**	**25.840**	
Kabupaten Sleman	1	Gamping	19.340	109	340	1. Pendataan BKKBN Tahun 2015; 2. TNP2K; 3. Hasil verifikasi Pemda Sleman 2016
	2	Godean	16.617	113	778	
	3	Moyudan	9.630	122	617	
	4	Minggir	9.533	94	1.570	
	5	Seyegan	14.292	237	1.004	
	6	Mlati	22.879	140	1.088	
	7	Depok	25.810	42	684	
	8	Berbah	10.818	51	514	
	9	Prambanan	14.392	169	528	
	10	Kalasan	13.198	64	1.015	
	11	Ngemplak	12.221	55	218	
	12	Ngaglik	18.253	55	1.783	
	13	Sleman	16.077	279	1.821	
	14	Tempel	15.778	229	2.449	
	15	Turi	10.621	140	996	
	16	Pakem	10.983	38	669	
	17	Cangkringan	9.678	89	273	
		Jumlah	**250.120**	**2.026**	**16.347**	
Kabupaten Kulon Progo	1	Temon	8.370	44	468	1. Pendataan BKKBN Tahun 2015;
	2	Wates	13.408	36	656	

Kabupaten / Kota	No	Kecamatan	Jumlah KK/RT	JumlahRTLH		Sumber Data
				Versi BDT (unit)	Verifikasi Pemda (unit)	
	3	Panjatan	10.192	135	879	2. TNP2K; 3. Hasil pendataan Bappeda Kabupaten Kulon Progo 2016
	4	Galur	9.378	103	501	
	5	Lendah	12.121	191	1.162	
	6	Sentolo	14.193	442	1.923	
	7	Pengasih	14.814	185	1.741	
	8	Kokap	10.418	309	2.748	
	9	Girimulyo	7.530	229	1.468	
	10	Nanggulan	9.051	115	848	
	11	Samigaluh	8.392	157	1.513	
	12	Kalibawang	9.098	112	984	
		Jumlah	**126.965**	**2.058**	**14.891**	
Kabupaten Bantul	1	Srandakan	9.310	46	222	1. Pendataan BKKBN Tahun 2015; 2. TNP2K; 3. Hasil Rekapitulasi laporan kegiatan DED RTLH paket I dan II tahun 2016
	2	Sanden	10.315	113	233	
	3	Kretek	9.697	26	81	
	4	Pundong	11.007	65	146	
	5	Bambanglipuro	12.842	73	122	
	6	Pandak	15.859	144	230	
	7	Pajangan	9.918	369	578	
	8	Bantul	18.284	84	83	
	9	Jetis	16.964	81	277	
	10	Imogiri	19.376	305	1.484	
	11	Dlingo	12.200	117	717	
	12	Banguntapan	31.470	142	213	
	13	Pleret	14.366	156	254	
	14	Piyungan	15.838	218	354	
	15	Sewon	28.818	134	151	
	16	Kasihan	28.580	202	261	
	17	Sedayu	14.807	88	297	
		Jumlah	**279.651**	**2.363**	**5.703**	
Kota Yogyakarta	1	Tegalrejo	7.624	42	438	1. Pendataan BKKBN Tahun 2015; 2. TNP2K; 3. Hasil verifikasi Pemda Kota Yogyakarta 2016
	2	Jetis	5.775	32	184	
	3	Gondokusuman	8.290	34	97	
	4	Danurejan	4.683	15	302	
	5	Gedongtengen	4.107	109	34	
	6	Ngampilan	3.929	38	62	
	7	Wirobrajan	6.039	34	128	
	8	Mantrijeron	8.285	33	167	
	9	Kraton	4.839	11	199	
	10	Gondomanan	3.040	17	18	
	11	Pakualaman	2.233	21	136	
	12	Mergangsan	7.049	31	580	
	13	Umbulharjo	13.762	54	237	
	14	Kotagede	8.335	71	215	
		Jumlah	**87.990**	**542**	**2.797**	
		Total DIY	**969.742**	**10.728**	**65.578**	

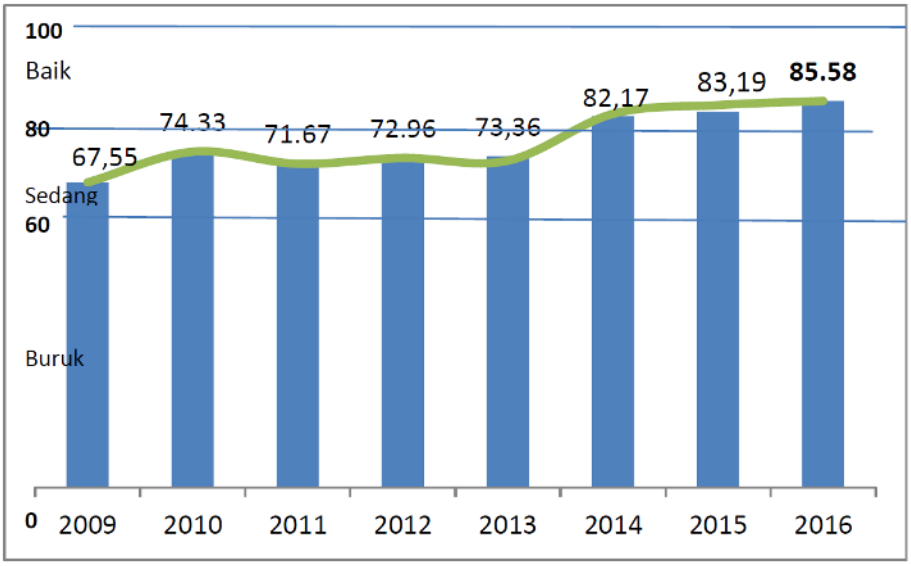
Sumber : Forum Pendataan Sejuta Rumah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017

Secara spesifik, salah satu rencana pengembangan kawasan yang akan mempengaruhi perkembangan perumahan secara masif dan dinamis adalah adanya rencana pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo yang direncanakan akan beroperasi paling lambat pada tahun 2021. Pembangunan bandara tersebut direncanakan pada koridor Temon - Prambanan yang menjadi salah satu kawasan strategis provinsi sektor ekonomi. Meskipun pembangunan bandara belum secara eksplisit masuk dalam RTRW DIY 2009-2029, namun secara politis rencana tersebut sudah menjadi keputusan danakan dilakukan penyesuaian dalam review RTRW berikutnya. Dengan adanya rencana tersebut, akan terjadi perkembangan perumahan yang cukup signifikan baik di kawasan sekitar bandara, maupun koridor bandara menuju kota Yogyakarta. Selain itu, rencana pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo juga membuka wacana untuk melakukan pengembangan kawasan yang berorientasi pada *Transit Oriented Development* (TOD), dimana perumahan menjadi bagian penting dalam pengembangan tersebut.

2.1.3.1.5 Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

DIY selama ini menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua orang. Kondisi yang demikian semakin mengukuhkan atribut DIY perwujudan dari Indonesia Mini, tempat orang dari berbagai suku dan etnis dapat tinggal bersama dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan
dan kesatuan sebagai satu bangsa.

Berdasarkan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 mencapai 85,58 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI DIY tahun 2015 yang capaiannya sebesar 83,19. Meskipun sedikit mengalami peningkatan, tingkat demokrasi tersebut tetap berada dalam kategori “baik”. Capaian IDI DIY dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 67,55. Kemudian naik pada 2010 menjadi sebesar 74,33 selanjutnya berfluktuasi dan pada tahun 2014 naik cukup signifikan menjadi sebesar 82,17 lalu terus meningkat hingga 2016 mencapai sebesar 85,58.

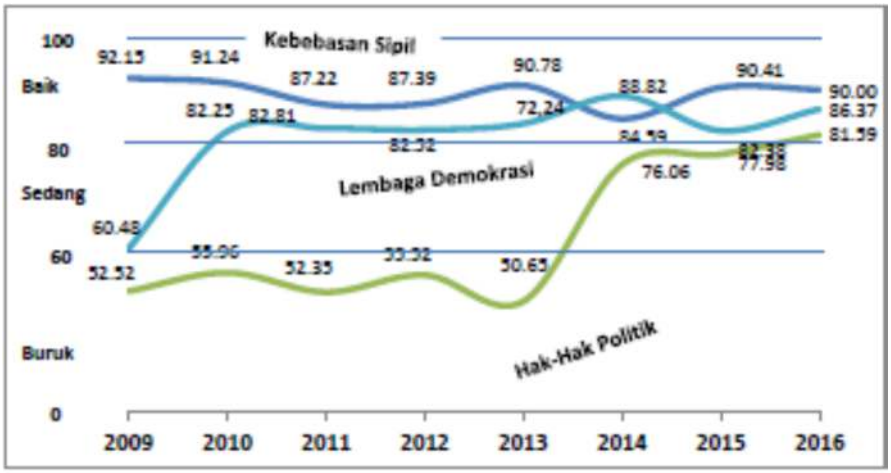


Sumber: BPS DIY, 2017

Gambar 2-35 Perkembangan IDI DIY 2009-2016

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi yang ada di DIY. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 90,00; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 81,59; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 86,37. *(Sebagaimana digambarkan dalam Grafik 2.)*



Sumber : BPS DIY, 2017

Gambar 2-36 Perkembangan Indeks Aspek IDI DIY, 2009-2016

Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 90,00; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 81,59; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 86,37. Pada tahun 2016, aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, sedang aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan. Meskipun capaiannya masih menjadi yang tertinggi di antara aspek lainnya, aspek Kebebasan Sipil menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang semakin menurun. Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2016, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 0,41 poin dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,61 dan 3,99 poin. Apabila dimaknai secara kategori "baik", "sedang", dan "buruk", pada 2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori "sedang". Indeks aspek Kebebasan Sipil sejak pengukuran 2009 sudah mencapai kategori "baik" dan hingga tahun 2016 aspek ini tetap bertahan pada kategori "baik". Sementara pada aspek Lembaga Demokrasi tahun 2009 masih pada kategori "sedang". Perubahan signifikan terjadi pada 2010, aspek ini menembus kategori "baik". Meskipun pada 2015 aspek ini mengalami penurunan, namun aspek Lembaga Demokrasi tetap pada kategori "baik". Indeks aspek Hak-hak Politik merupakan aspek yang nilainya paling rendah. Pada tahun 2009 sampai tahun 2013 aspek ini pada kategori "buruk". Perubahan signifikan terjadi pada 2014,

aspek ini menembus kategori “sedang” dan pada 2016 aspek ini menembus kategori “baik”.

Untuk Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkembang dan telah terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) mengalami perubahan jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2013 terdapat 34 organisasi, tahun 2014 terdapat 154 organisasi, tahun 2015 terdapat 197 ormas, tahun 2016 sebanyak 159 ormas dan tahun 2017 sebanyak 149 ormas. Sementara itu sampai dengan akhir tahun 2017, total jumlah Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan terdapat 545 organisasi kemasyarakatan. Dari data yang dicatat oleh badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY ini bisa diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan yang sudah resmi terdaftar memiliki keragaman sifat baik dalam kekhususan organisasi ataupun kesamaan latar belakang baik dari kesamaan profesi, agama, lingkup budaya, sosial dan kemasyarakatan lainnya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan sosial kemasyarakatan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat DIY.

Unjuk rasa yang terjadi di DIY ditangani dengan cara-cara yang persuasif dan sinergis antar petugas yang terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat. Dengan cara penanganan yang persuasif dan sinergis, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum
dapat diminimalisir.

Proses penegakan Perda ini tentunya juga berkaitan dengan kapasitas sumber daya aparatur dari penegak Perda itu sendiri dimana dalam tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja memegang peranan penting. Sementara ini jumlah personil yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja masih belum maksimal. Pada tahun 2017 tercatat terdapat 132 orang, Ke depan perlu dimaksimalkan lagi kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja baik melalui penguatan kapasitas anggota dan bila memungkinkan adanya penambahan personil yang menggantikan personil yang memasuki masa purna tugas.

2.1.3.1.6 Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosisial (PMKS) dan advokasi dan sinergi.

2.1.3.1.6.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 2-37 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY Tahun 2013 - 2017

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Anak Balita Terlantar	2.443	2.273	1.978	1.826	1.309
2	Anak Terlantar	26.149	23.396	20.089	14.450	13.960
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	119	321	98	184	219
4	Anak Jalanan	212	220	219	327	348
5	Anak dengan Kedisabilitasan	3.858	4.116	3.708	3.095	2.983
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	796	653	411	18	11
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	73	68	41	18	101
8	Lanjut Usia Terlantar	36.728	38.448	33.752	46.242	45.765
9	Penyandang Disabilitas	28.196	26.947	25.05	26.177	26.547
10	Tuna Susila	158	144	47	385	406
11	Gelandangan	129	112	82	171	236
12	Pengemis	221	199	170	150	170
13	Pemulung	126	171	256	450	511
14	Kelompok Minoritas	216	1.541	1.541	1.541	1.168
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakakatan	4.168	4.495	4.744	209	170

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
16	Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	1.797	2.045	3.491	2.834	3.104
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1.471	1.323	1.451	468	500
18	Korban Trafficking	5	2	2	1	2
19	Korban Tindak Kekerasan	4.07	3.514	3.153	735	829
20	Pekerja Migran Bermasalah	292	598	939	329	361
21	Korban Bencana Alam	1.655 keluarga	1.658 keluarga	71 keluarga	1.050 keluarga	433 keluarga
22	Korban Bencana Sosial	158 keluarga	157 keluarga	376 keluarga	115 keluarga	29 keluarga
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.086	13.166	12.689	12.840	12.405
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4.401	3.318	3.212	4.932	4.943
25	Keluarga Fakir Miskin	288.391 (PPLS 2011)	288.391 (PPLS 2011)	367.540 (PBDT 2015)	367.540 (PBDT 2015)	367.540 (PBDT 2015)

Sumber: Dinas Sosial DIY, Tahun 2018 dan PBDT 2015

Data PMKS di DIY dari tahun ke tahun secara jumlah terbesar adalah Anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi dan fakir miskin. Pemberian jaminan sosial rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut tanpa mengesampingkan intervensi untuk PMKS lainnya.

2.1.3.1.6.2 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tabel 2-38 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2013-2017

No	Jenis PSKS	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pekerja Sosial Profesional / Pekerja sosial fungsional	37	37	35	35	35
2	Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat / PSM	4.572	4.534	4.534	4.767	4.960
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	505	505	837	1.034	1.058
4	LKS / Orsos	354	395	403	370	372
5	Karang Taruna Desa / Kelurahan	438	438	438	438	438
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	15	15	14	12	11
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	87	124	138	163	193
8	Penyuluh Sosial	7	5	5	5	59
9	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),	78	78	78	78	78
10	Dunia usaha Yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	45	26	42	42	42

Sumber : Dinas Sosial DIY, 2018

Keberadaan PSKS penting sebagai mitra pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PMKS. Pembinaan terhadap PSKS penting terutama untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan dan kerawanan sosial.

2.1.3.1.6.3 Panti Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial apabila dilihat dari aspek lokus nya, lazim dikelompokkan dalam dua kategori yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di dalam panti dan di luar panti. Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS melalui panti, Pemda DIY mempunyai UPT yang berada di bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas melaksanakan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial/ rehabilitasi medis yang terdiri dari: (a) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD); (b) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW); (c) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan

Laras (BRSBKL); (d) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR); (e) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA); (f) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW).

Tabel 2-39 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya di DIY Tahun 2013 - 2017

No	Nama Balai / Panti	Daya Tampung				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	BRPTD	185	185	185	185	185
2	BRSBKL					
	a. Gepeng	50	50	50	50	50
	b. Eks psikotik	50	50	100	100	100
3	BPRSW	50	50	50	60	60
4	BPSTW	214	214	214	214	214
5	BRSPA	140	140	140	120	120
6	BPRSR	75	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial DIY 2017, diolah.

Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lain nya.

KUBE adalah salah satu program strategis yang dilakukan Dinas Sosial D.l. Yogyakarta untuk upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin di DlY. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pendekatan spesifik melalui tahapan membangun kesadaran berkelompok untuk kemandirian masyarakat miskin, kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, ekonomi produktif dengan mengembangkan usaha yang mampu memberi nilai tambah ekonomis dan kemandirian melalui infrastruktur ekonomi-sosial yang berkelanjutan.

Pengembangan KUBE sebagai program penanggulangan kemiskinan mempunyai strategi mendorong PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) supaya mampu berdaya secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Indikator keberdayaan sosial adalah PMKS mampu dan bisa bersosialisasi dengan masyarakat melalui forum KUBE. Selain itu para PMKS dapat mengembangkan

kesejahteraan sosial dengan memupuk modal sosial berupa IKS (Iuran Kesejahteraan Sosial) dan UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial).

Tabel 2-40 Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya di DIY Tahun 2015 - 2017

No	Indikator	Rumus Indikator	Capaian		
			2015	2016	2017
1	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan sosial kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya / Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan sosial kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya x 100%	0,07	0,03	0,03

Sumber : Dinas Sosial DIY 2018

Dari capaian tabel diatas dapat dilihat tiap tahunnya capaian panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mengalami penurunan. Diharapkan dengan pengembangan KUBE-KUBE fakir miskin ini secara perlahan akan berdampak terhadap pengurangan angka kemiskinan di DIY.

2.1.3.1.6.4 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan

Jumlah PMKS yang diberikan bantuan cenderung lebih sedikit dari pada Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan, berikut penghitungan persentase PMKS yang memperoleh bantuan.

$$\text{Persentase PMKS yang memperoleh bantuan} = \frac{\text{Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$$

Tabel 2-41 Presentase PMKS yang Memperoleh Bantuan di DIY tahun 2014 - 2017

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah PMKS Yang Diberikan Bantuan	27.137	27.332	22.624	13.278	Orang
2	Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	489.129	477.683	486.087	484.050	Orang
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	5.55	5.72	4.65	2.74	persen

Sumber : Dinas Sosial 2018, diolah

Berdasarkan penghitungan rumus, dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2014 sebesar 5,55 % menjadi 5,72 % di tahun 2015, dan terdapat trend penurunan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Persentase tersebut masih sangat kecil untuk PMKS yang memperoleh bantuan di DIY. Bantuan dari pemerintah tersebut berupa bantuan dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), permakanan, Bantuan Sosial (Bansos) dan Jaminan Hidup (Jadup).

Data Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan di DIY tahun 2014-2017 yang dimaksud adalah PMKS yang memperoleh bantuan dari APBD dan APBN dari tahun 2014-2017.

2.1.3.1.6.5 Persentase PMKS yang Tertangani

Tabel 2-42 Persentase PMKS yang Tertangani di DIY Tahun 2014 - 2017

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah PMKS	489.129	477.683	486.087	484.05	Orang
2	Persentase PMKS yang tertangani	-	6.01	4.41	3.13	Persen

Sumber : Dinas Sosial 2018

Permasalahan PMKS di DIY yang ditangani dari tahun 2014 sampai dengan 2017 berjumlah 25 jenis.

Potensi yang hingga kini menjadi alternatif strategi penanganan para penyandang PMKS yaitu dengan memaksimalkan 2 (dua) potensi dasar yaitu melalui keterlibatan sejumlah pekerja sosial dan menyalurkan para penyandang PMKS ke beberapa unit-unit rehabilitasi (UPT dan Balai/Panti Sosial) di DIY.

2.1.3.1.6.6 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tabel data dibawah ini menunjukkan persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dan persentase tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 12,56 %. Hal tersebut dikarenakan tiap tahun nya jumlah PMKS pada aspek tertentu menurun dan pemberian bantuan sosial pada PMKS tersebut ikut menurun.

Tabel 2-43 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di DIY Tahun 2015 - 2017

No	Sub Elemen	Tahun			Satuan
		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	12.56	10.18	7.03	persen

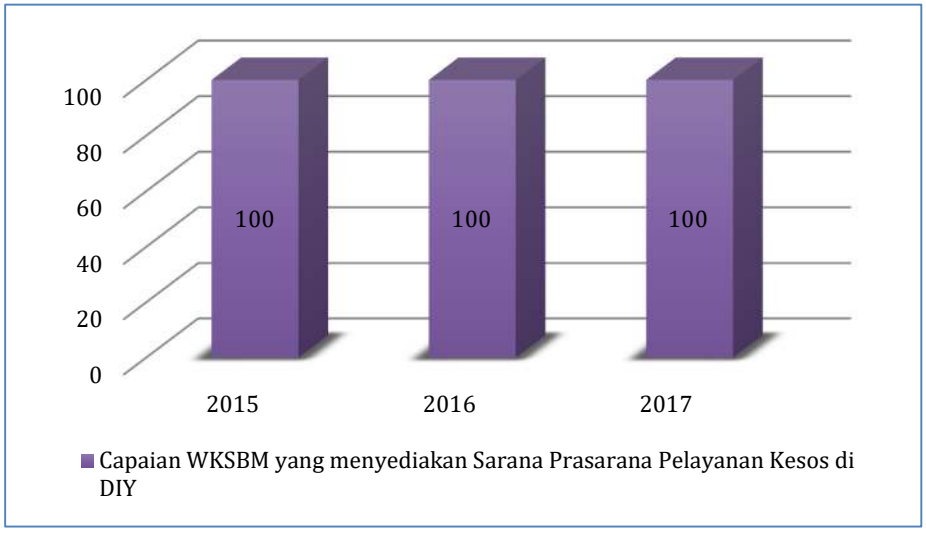
Sumber : Dinas Sosial DIY 2018

2.1.3.1.6.7 Persentase WKSBM yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos

Kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat antara lain berbagai perkumpulan, kelompok, Iembaga maupun pranata sosial di tingkat lokal. Disadari sepenuhnya, bahwa upaya yang telah dilakukan oleh perkumpulan, kelompok, Iembaga maupun pranata sosial yang berbasiskan masyarakat pada akar rumput tersebut masih memiliki kelemahan, baik sarana, prasarana, maupun kegiatannya.

Menyadari hal yang demikian, maka perlu adanya suatu media atau wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang dapat mempertemukan atau menjembatani jalinan kerja sama sinergis untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dibidang kesejahteraan sosial antar kelompok masyarakat pada akar rumput.

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah alat, wadah, saran maupun media yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan usaha kesejahteraan social secara berkelanjut. Wahana ini berupa jaringan kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun Iembaga yang sengaja dibentuk untuk mensinergikan pelaksanaan tugas dibidang usaha kesejahteraan sosiai seperti kelompok arisan, kelompok usaha bersama, lumbung desa dan nilai budaya lokal. Tujuan dari WKSBM yaitu : (1) Meningkatnya kepekaan, kepedulian dan kesetiakawanan social, (2) Meningkatnya peran aktif masyarakat dibidang kesejahteraan social, dan (3) Terciptanya pelembagaan kesejahteraan sosial oleh kelompok masyarakat secara berkelanjutan di tingkat lokal.



Sumber: Dinas Sosial 2018

Gambar 2-37 Grafik Persentase WKSBM yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos di DIY Tahun 2015 - 2017

Model pelayanan sosial berbasiskan masyarakat melalui WKSBM sebagai salah satu program pemerintah daerah DIY, dalam rangka untuk mengatasi meningkatnya PMKS di tingkat lokal wilayah. Model pelayanan ini dengan cara menghimpun potensi daya dan dana masyarakat untuk, oleh, dan dari masyarakat sendiri. WKSBM ini cenderung adaptif dengan kemampuan lokal, dengan mempertahankan dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya lokal, tradisi dan kebiasaan, serta sumber daya lokal. Di DIY WKBSM aktif berperan

dalam membantu kemajuan masyarakatnya dan aktif menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun mencapai 100 %.

2.1.3.1.6.8 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Penanggulangan Bencana di DIY mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah DIY No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Pemda DIY untuk penanggulangan bencana di bantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, sedangkan untuk bantuan sosial kepada korban bencana di ambil alih oleh Dinas Sosial DIY. Berikut data Jumlah dan Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat.

Tabel 2-44 Tabel Jumlah dan Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di DIY Tahun 2015 - 2017

Indikator	Tahun			Satuan
	2015	2016	2017	
Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	71	1.050	433	KK
Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	71	1.050	433	KK
Persentase (%) korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	Persen

Sumber : Dinas Sosial 2018

Jumlah Korban Bencana tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 1.050 KK dan sudah tertangani. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di DIY dari tahun 2015 sampai dengan 2017 sudah tertangani sebesar 100 %.

2.1.3.1.6.9 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Bantuan Sosial

Capaian persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-45 Capaian Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Bantuan Sosial di DIY Tahun 2015 - 2017

No	Indikator	Rumus Indikator		Capaian		
				2015	2016	2017
1	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial dalam 1 tahun / Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima bantuan sosial dalam 1 tahun	x 100%	12,51	6,21	4,83

Sumber : Dinas Sosial DIY 2018

Dari data tabel diatas persentase tertinggi untuk penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan terdapat pada tahun 2015 sebesar 12,51, dan dari tahun ke tahun mengalami trend penurunan angka menjadi 6,21 pada tahun 2016 dan 4,83 pada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan pendataan yang lebih akurat dari tahun ke tahun agar pemberian bantuan tepat sasaran kepada yang potensial menerima bantuan.

2.1.3.1.7 Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek *human capital* dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu

daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.
Berikut ini akan diuraikan kondisi umum terkini pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di DIY.

2.1.3.1.7.1 Penduduk Usia Kerja (PUK)

Konsep ketenagakerjaan menurut ILO (*International Labor Organization*) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka).

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja karena ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY selama periode 2013−2017, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sakernas, PUK DIY pada tahun 2013 adalah sebesar 2,813 juta orang dan pada akhir tahun (Februari 2017) diperkirakan mencapai 2,939 juta orang.

Data Sakernas pada tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja mempunyai proporsi mencapai lebih dari 70% setiap tahunnya dimana dari jumlah angkatan kerja ini lebih dari 90% merupakan angkatan kerja yang bekerja sehingga menghasilkan penganggur terbuka yang jumlahnya relatif kecil. Sedangkan kelompok penduduk bukan usia kerja memberikan proporsi berkisar 30% dari penduduk usia kerja. Hal ini mengindikasikan cukup banyak penduduk usia kerja yang memilih untuk tidak bekerja. Kelompok ini didominasi oleh kelompok yang memilih untuk mengalokasikan sebagian besar waktunya demi mengurus rumah tangganya (umumnya ibu rumah tangga) dan bersekolah. Sebagian besar anggota kelompok bukan angkatan kerja ini memang cenderung tidak menghasilkan pendapatan nominal dan mungkin dianggap sebagai kelompok yang tidak produktif. Meskipun demikian, mereka melakukan aktivitas investasi pendidikan bagi keluarganya (dengan menjadi ibu rumah tangga) dan bagi

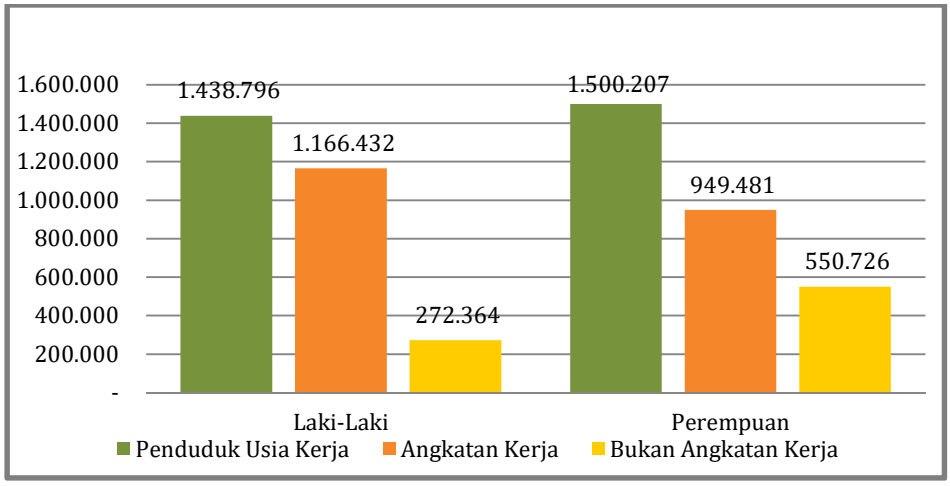
dirinya sendiri (dengan menjadi siswa sekolah formal pada jenjang SD hingga Universitas).

Tabel 2-46 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (dalam ribu orang), Tahun 2013 – 2017 (Agustus)

JENIS KEGIATAN	2013	2014	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	**1.949,243**	**2.023,461**	**2.882,98**	**2.099,44**	**2.117,19**
- Bekerja	1.886,071	1.956,043	1.891,22	2.042,40	2.005,19
- Penganggur	63,172	67,418	80,25	57,04	64,02
Bukan Angkatan Kerja	**863,845**	**824,293**	**911,517**	**807,436**	**843,017**
- Sekolah	201,760	270,545	297,972	264,858	266,870
- Rumah Tangga	479,109	439,522	475,397	400,382	472,108
- Lainnya	182,976	114,226	138.148	142,196	104,039
PENDUDUK USIA KERJA	**2.813,088**	**2.847,754**	**2.882,980**	**2.904,301**	**2.960,204**
TPAK (Persen)	**69,29**	**71,05**	**68,38**	**71,96**	**71,52**
TPT(Persen)	**3,24**	**3,33**	**4,07**	**2,72**	**3,02**

Sumber: BPS, Statistik DIY 2017

Ditinjau dari aspek gender, data jumlah penduduk usia kerja laki-laki tercatat sebanyak 1,438 juta (48,96%) lebih rendah dari PUK perempuan yaitu 1,500 juta atau 51,04% dari keseluruhan penduduk usia kerja.



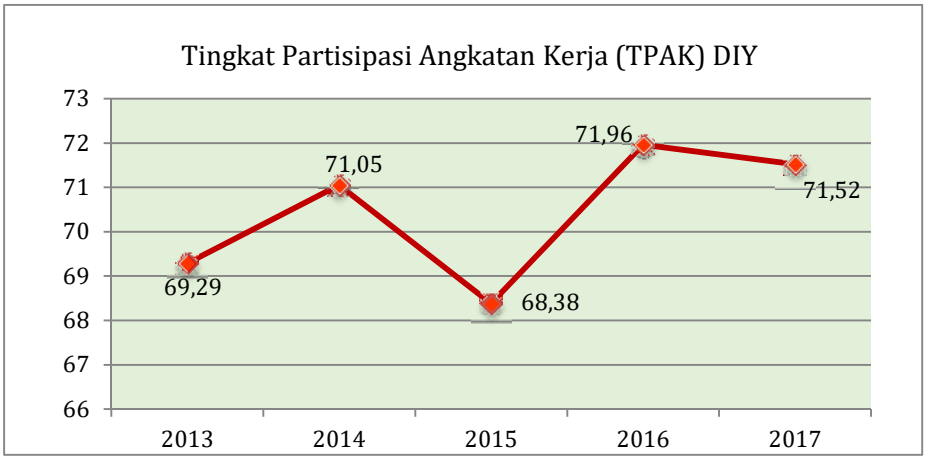
Sumber: BPS, 2017

Gambar 2-38 Penduduk Usia Kerja DIY Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan, Bulan Februari 2017

2.1.3.1.7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja *(labor supply)* untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

TPAK DIY pada periode 2013 hingga 2017 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2013, TPAK DIY adalah sebesar 69,29%, dab kemudian mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2017 (Agustus) mencapai angka sebesar 71,52%. Angka TPAK sebesar 71,52% mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) 72 orang adalah angkatan kerja. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan angka sebelumnya (tahun 2016) yaitu 71,96%.

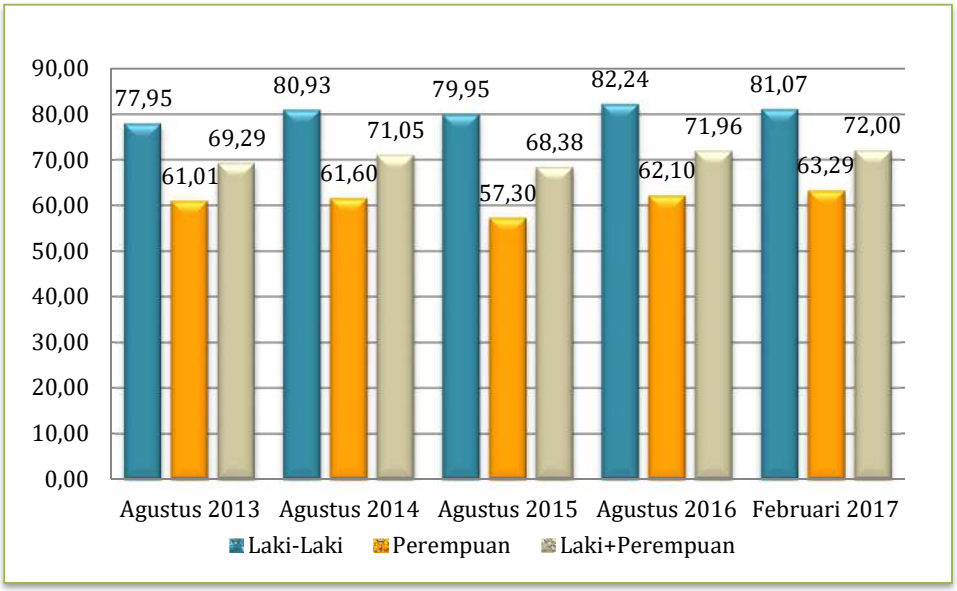


Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik November 2013 s.d November 2017

Gambar 2-39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2013-2017

Sementara bila TPAK dibedakan menurut jenis kelamin terdapat kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Pola perkembangan TPAK menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa TPAK laki-laki lebih dominan (berfluktuasi pada kisaran 77-82%) dibandingkan TPAK perempuan (berada pada kisaran 57-63%). Fenomena ini menunjukkan keterlibatan penduduk laki-

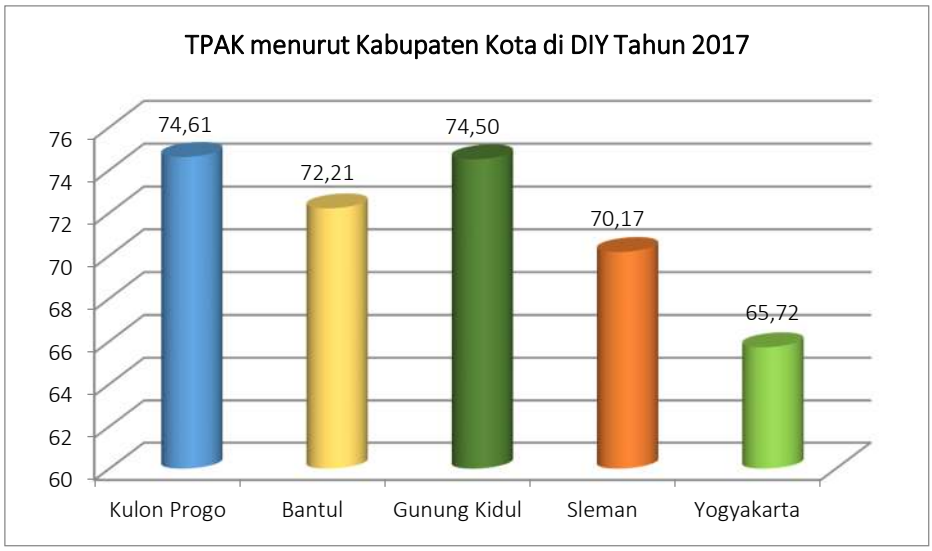
laki dalam aktivitas perekonomian di DIY lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar aktivitas mengurus rumah tangga di DIY dilakukan oleh perempuan dan adanya pandangan bahwa kewajiban mencari nafkah adalah tanggungjawab laki-laki. TPAK laki-laki pada Februari 2017 mencapai sekitar 81,07%, sementara TPAK perempuan sebesar 63,29%.



Sumber: Statistik Ketenagakerjaan DIY 2016-2017, BPS Provinsi DIY

Gambar 2-40 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013-2017

Sedangkan jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, TPAK tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo (74,61 persen) diikuti masing-masing oleh Gunungkidul (74,50 persen), Kabupaten Bantul (72,21 persen), Sleman (70,17 persen) dan terendah di Kota Yogyakarta (65,72 persen).

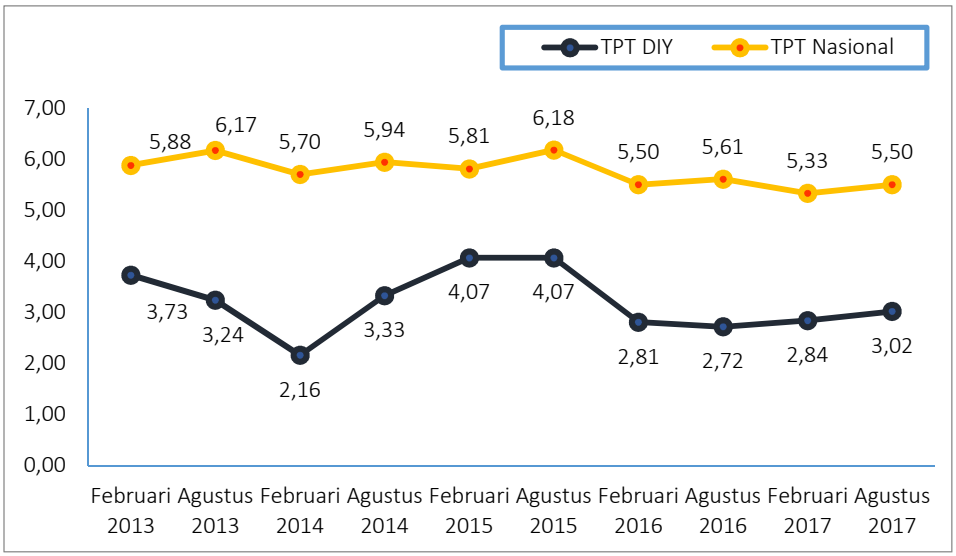


Sumber: BRS November 2017, BPS Provinsi DIY

Gambar 2-41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Kabupaten Kota Agustus 2017

2.1.3.1.7.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Perkembangan angka pengangguran terbuka di DIY pada Februari tahun 2013 hingga Februari 2014 menunjukkan trend menurun, namun kemudian mengalami peningkatan pada Agustus 2014 menjadi 3,33% dan mencapai 4,07% pada Agustus 2015. Pada tahun 2016 TPT mengalami penurunan cukup drastis yaitu menjadi 2,72 % dan cenderung meningkat pada periode berikutnya hingga mencapai 3,02 pada Agustus 2017. Angka ini mengandung pengertian bahwa terdapat sekitar 3 orang pengangur dari 100 angkatan kerja DIY pada Agustus 2017. Angka TPT DIY ini selalu lebih rendah dibandingkan TPT Nasional dimana pada Agustus 2017 mencapai 5,50% naik 0,17 point dibandingkan TPT Februari 2017.



Sumber :BRS November 2013 - 2017, BPS Provinsi DIY

Gambar 2-42 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY dan Nasional, Tahun 2013-2017 (%)

Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, cenderung mengalami tren penurunan, angka pengangguran terbuka di DIY masih dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa potensi wilayah yang tersedia di Yogyakarta ternyata belum semua mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerjanya.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi dari TPT perempuan. Pada Agustus 2017, TPT masing-masing sebesar 3,46% untuk laki-laki dan 2,48 % untuk perempuan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka secara keseluruhan mencapai 3,02%.

Berdasarkan kelompok umur, Tingkat Pengangguran Terbuka sangat menonjol pada kelompok usia muda, antara 15-24 tahun. TPT usia muda pada Februari 2017 sekitar4-16%, atau jauh lebih tinggi dibanding TPT semua umur (DIY). Pada kelompok umur 20-24 tahun, TPT perempuan lebih tinggi daripada TPT laki-laki, sedangkan pada kelompok umur 30-34 dan 50+ TPT laki-laki lebih tinggi dari TPT perempuan.

Tabel 2-47 Tingkat Penangguran Terbuka di DIY Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2014 - 2017

Gol. Umur	Agustus 2014			Agustus 2015			Agustus 2016			Februari 2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
15-19	27,14	13,27	21,59	27,14	13,27	21,59	31,79	0,00	20,53	5,29	4,83	5,10
20-24	9,34	11,22	10,19	9,34	11,22	10,19	12,35	8,37	10,41	6,67	15,81	10,86
25-29	8,30	5,07	6,91	8,30	5,07	6,91	5,39	0,00	3,27	3,93	4,95	4,35
30-34	1,80	2,56	2,11	1,80	2,56	2,11	5,03	1,83	3,64	3,08	0,00	1,82
35-39	1,43	1,17	1,33	1,43	1,17	1,33	3,86	0,00	2,19	1,41	0,00	0,81
40-44	1,06	0,73	0,90	1,06	0,73	0,90	0,00	2,06	0,84	2,69	0,00	1,45
45-49	2,74	0,50	1,75	2,74	0,50	1,75	0,00	1,84	0,82	1,47	1,56	1,51
50+	1,28	0,47	0,90	1,16	0,74	0,98	0,00	0,49	0,23	2,09	1,46	1,80
DIY	3,88	2,65	3,33	3,72	4,54	4,07	3,68	1,50	2,72	2,86	2,81	2,84

Sumber: Sakernas DIY 2014-2017

Jika dilihat dari status pendidikan terakhir yang ditempuh, sebagian besar pengangguran terbuka di DIY merupakan pengangguran terdidik karena didominasi oleh lulusan SMA, SMK dan universitas, dengan TPT tertinggi pada Agustus 2017 terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan universitas (4,9 persen) dan diikuti SMA dan SMK masing-masing sebesar 4,39 persen dan 4,38 persen. Pengangguran terdidik akan berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah ataupun keahlian yang mereka miliki dengan harapan gaji yang akan diterima juga sesuai. Sedangkan TPT terendah terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tertingginya SD ke bawah (1,08 persen) diikuti tingkat pendidikan SMP sebesar 1,83 persen.

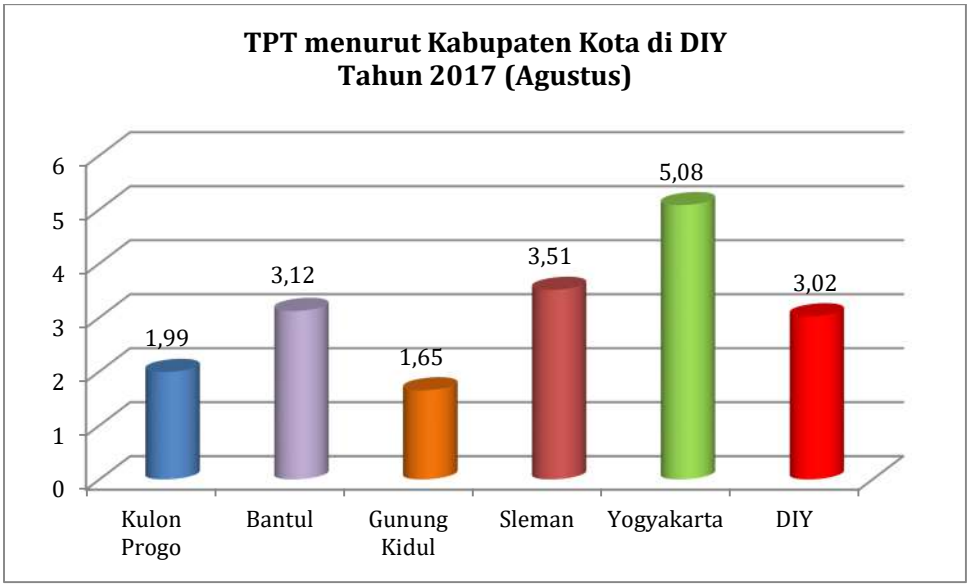
Tabel 2-48 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Menurut Pendidikan Agustus Tahun 2016 – Agustus 2017

Tingkat Pendidikan		Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017
1	≤ SD	1,1	3,74	1,08
2	SMP	3,07	2,05	1,83

Tingkat Pendidikan		Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017
3	SMA	1,05	9,71	4,39
4	SMK	5,76	3,57	4,38
5	Universitas	2,83	4,81	4,9

Sumber: BPS DIY, BRS November 2017 dan Sakernas 2017

Dilihat menurut kabupaten kota di DIY, TPT tertinggi pada Agustus 2017 terjadi di Kota Yogyakarta (5,08 persen) diikuti Kabupaten Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 3,51 persen dan 3,12 persen. Dan TPT terendah ada di Gunung Kidul dengan angka sebesar 1,65 persen



Gambar 2-43 TPT menurut Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 (Agustus)

2.1.3.1.7.4 Hubungan Industral

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadian di perusahaan.

Di dalam hubungan kerja seringkali terdapat potensi timbulnya perbedaan pendapat atau bahkan konflik. Untuk mencegah timbulnya akibat yang lebih

buruk,maka perlu adanya pengaturan didalam hubungan industrial ini. Sarana Hubungan industrial dilksanakan melalui Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Serikat Pekerja, Lembaga Tripartit, Bipartit, Organisasi Pengusaha, Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan Peraturan Ketenagakerjaan. Kesemua itu untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan di dalam hubungan kerja, sehingga dapat tercipta ketenangan kerja dan berusaha.

Di DIY, pemahaman dan pelaksanaan hubungan industrial yang mantap dan dinamis dalam rangka mensejahterakan karyawan di perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun karyawan sehingga masih sering dijumpai adanya masalah perselisihan hubungan industrial. Belum optimalnya fungsi sarana hubungan industrial di DIY dapat diamati dari masih sedikitnya perangkat hubungan industrial dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang sudah melapor di Disnakertrans DIY sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2-49 Jumlah Perusahaan dan Perangkat Hubungan Industrial di DIY Tahun 2017

Kab/Kota	Jumlah Pershn	Jumlah Tenaga Kerja		Kategori Perusahaan			Perangkat Hubungan Industrial			
		WNI	WNA	Kecil < 25 org	Sedang (26-99 org)	Besar (>100 org)	PP	PKB	SP	Lbg. Tripartit
DIY	-	-	-	-			-	-	-	1
Kota YK	1584	63616	33	1053	351	180	433	139	234	1
Sleman	1512	100208	141	884	420	208	462	164	48	1
Bantul	649	42581	124	384	200	65	18	2	2	1
Kulon Progo	301	8635	3	239	50	12	30	15	0	-
Gunungkidul	291	5685	1	226	57	8	2	1	1	1
Jumlah	4337	220725	302	2786	1078	473	945	321	285	5

Keterangan:
PP = Peraturan Perusahaan
PKB = Perjanjian Kerja Bersama
SP = Serikat Pekerja
Sumber: Disnakertrans DIY, 2017

Dari total 4.337 perusahaan yang lapor di Disnakertrans, baru kurang lebih 21,79 persen yang mempunyai peraturan perusahaan dan hanya 7,40 persen yang melaksanakan Perjanjian kerja Bersama.

Sehubungan dengan hal itu perlu adanya pembinaan rutin dan berkelanjutan baik terhadap karyawan dan pengusaha serta peningkatan kinerja pengawas ketenagakerjaan baik di tingkat Pemda maupun kabupaten/kota, apalagi dengan UU 23 tahun 2014 tugas pengawas ketenagakerjaan telah dialihkan menjadi kewenangan Provinsi.

2.1.3.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Istilah pemberdayaan perempuan muncul sebagai upaya mendapatkan solusi terhadap permasalahan sub ordinasi perempuan. Secara yuridis formal, Indonesia menempatkan warga perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang sejajar tanpa pembedaan. Namun, dalam kenyataannya budaya patriarki yang menempatkan kaum laki-laki sebagai sosok otoritas pertama masih terlaksana dan menghalangi terwujudnya kesetaraan gender di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, upaya penguatan peran perempuan melalui pendekatan pemberdayaan menjadi krusial untuk diselenggarakan.

Pendekatan ini memandang kaum perempuan sebagai sumber daya manusia yang juga harus dikembangkan potensinya dan diberikan kontrol terhadap berbagai sumber daya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini dipandang strategis untuk mendukung pembangunan di negeri ini seiring dengan fakta bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki dan telah terbukti dalam sejarah bagaimana beberapa tokoh perempuan berperan besar dalam perjuangan meraih dan mengisi kemerdekaan. Tak terkecuali di DIY. Terlaksananya Kongres Perempuan I pada 22 Desember 1928 di DIY memperlihatkan bagaimana pemberdayaan kaum perempuan di daerah ini telah diupayakan jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Oleh karena itu, wajar kiranya pembangunan bidang pemberdayaan perempuan di DIY hingga saat ini telah menunjukkan hasil yang lebih baik daripada rata-rata nasional.

Pembahasan mengenai pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan anak. Terlebih, kedua hal ini menjadi agenda pembangunan yang perlu mendapat perhatian besar karena merupakan bentuk pengejawantahan dari Nawacita, khususnya sub agenda prioritas 8 dari agenda prioritas keempat yang berbunyi “melindungi anak, perempuan, dan kelompok masyarakat

marjinal".

Lebih lanjut, pengkajian mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DIY perlu memperhatikan beberapa indikator utama yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan dalam bidang ini, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, proporsi kursi perempuan dalam lembaga perwakilan yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, dan angka kekerasan terhadap perempuan di DIY

2.1.3.1.8.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kondisi adil yang ingin diwujudkan dalam visi pembangunan nasional ditandai dengan adanya persamaan peranan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia berbasis gender. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan.

Pada tahun 2014, dilakukan penyempurnaan metodologi penghitungan IPM yang selanjutnya mempengaruhi metodologi penghitungan IPG. Perubahan ini membawa konsekuensi perubahan interpretasi angka IPG. Dengan adanya metodologi penghitungan baru, pembandingan angka IPG dengan IPM untuk melihat indikasi tentang adanya kesenjangan gender tidak lagi diperlukan. Hal ini dikarenakan kondisi ideal kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dinilai dengan angka 100. Dengan demikian, kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari jarak antara angka IPG dengan nilai 100.

Pada tahun 2015 IPG DIY berada pada angka 94,41. Ini berarti IPG DIY mengalami kenaikan sebesar 0,10 bila dibandingkan dengan IPG DIY tahun 2014 yang tercatat berada pada angka 94,31. Dengan angka ini, IPG DIY berada pada urutan tertinggi keempat nasional dan secara konsisten selama kurun waktu 2010-2015 terus berada di atas rata-rata nasional. Hal ini berarti bahwa kapabilitas pembangunan perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun standar hidup layak selama kurun waktu

tersebut lebih baik dari capaian nasional. Meskipun demikian, dapat dinyatakan bahwa DIY masih belum dapat mewujudkan tujuannya untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender secara paripurna. Oleh sebab itu, Pemerintah DIY perlu melakukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kemampuan dasar pembangunan manusia berbasis gender di wilayah ini. Namun demikian, disadari bahwa upaya tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat di DIY perlu dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis dan berkesinambungan.

Tabel 2-50 Tabel Indeks Pembangunan Gender DIY

Lokasi	IPG		
	2013	2014	2015
DIY	94,15	94,31	94,41
Kulon Progo	94,23	94,65	94,73
Bantul	94,33	94,41	94,42
Gunungkidul	81,76	82,27	83,10
Sleman	95,50	96,09	96,08
Kota Yogyakarta	98,48	99,27	98,78

Sumber : Kementerian PP & PA, 2016

2.1.3.1.8.2 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, IDG DIY pada kurun waktu 2011-2015 memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tabel di bawah diperlihatkan bagaimana capaian IDG DIY mengalami penurunan pada tahun 2012, kembali menguat pada tahun 2013 sehingga meraih capaian IDG tertinggi ketiga nasional, namun kembali menurun drastis pada tahun 2014 dan kembali mulai menguat pada tahun 2015. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya berkesinambungan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di DIY masih diperlukan.

Tabel 2-51 Tabel Capaian IDG DIY Tahun 2011-2015

Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2011	2012	2013	2014	2015
D I YOGYAKARTA	77.84	75.57	76.36	66.90	68,75
Kulon Progo	61.15	59.23	59.26	63.68	67,26
Bantul	68.46	68.52	68.88	61.18	61,77
Gunung Kidul	62.22	64.58	66.01	68.27	64,48
Sleman	70.52	69.66	72.30	79.37	77,61
Kota Yogyakarta	70.00	70.70	71.75	79.44	79,33

Sumber : Kementerian PP & PA. 2016 diolah

Hingga saat ini Pemda DIY telah menyelenggarakan banyak program yang mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, Pemda DIY menginisiasi 70 kelompok pemberdayaan ekonomi perempuan dengan nama Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) yang dilakukan pada tahun 2008-2017. Pengembangan Desa PRIMA merupakan alternatif upaya peningkatan taraf hidup perempuan dengan mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari berbagai instansi terkait, LSM, Organisasi Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan. Melalui cara ini diharapkan perempuan dari keluarga miskin di DIY dapat menjadi sosok yang lebih mandiri sehingga dapat mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikannya dalam keluarga. Selain itu, demi mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, Pemda DIY dan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pun telah menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Perempuan di seluruh kecamatan di DIY. Dalam acara tersebut, para peserta pelatihan diberikan materi yang berkaitan dengan strategi pencalonan, strategi kampanye, strategi meraih dan mengawal suara, serta teknik menyusun kebijakan pembangunan yang berkeadilan.

2.1.3.1.8.3 Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah

Keterwakilan perempuan di lingkungan birokrasi diperlukan untuk mengawal pembangunan sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY lebih responsif gender. Keterwakilan ini idealnya bukan hanya pada aparatur di garda terdepan, namun juga pada level pengambilan

keputusan. Keberadaan perempuan pada posisi strategis ini diperlukan agar kaum perempuan dapat menyuarakan aspirasi kaumnya sehingga kebijakan pembangunan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah DIY dapat mengatasi berbagai permasalahan spesifik gender yang dihadapi oleh warga perempuan dan kelompok minoritas lainnya.

2.1.3.1.8.4 Proporsi Kursi Perempuan Dalam Lembaga Perwakilan

Data anggota legislatif perempuan di DIY maupun Kabupaten/Kota memperlihatkan bahwa wilayah ini belum berhasil mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) yang mewajibkan terselenggaranya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dengan kuota sebesar 30%. Pada Pemilu 2014, proporsi tertinggi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif terdapat di DPRD Kabupaten Sleman yakni sebesar 26%, disusul DPRD Kota Yogyakarta dengan proporsi keterwakilan perempuan sebesar 25%, DPRD Kabupaten Kulon Progo sebesar 17,50%, DPRD Kabupaten Gunung Kidul dengan proporsi keterwakilan perempuan sebesar 15,5%, dan DPRD Kabupaten Bantul dengan proporsi keterwakilan perempuan sebesar 6,67%. Sementara, rata-rata proporsi keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di DIY hanya berada pada angka 12,73%.

Proporsi tersebut cenderung tetap pada tahun-tahun selanjutnya. Perubahan hanya terjadi di Kabupaten Kulon Progo dengan kenaikan proporsi sehingga mencapai angka 18,42% pada tahun 2016, dan penurunan pada Kabupaten Gunungkidul sehingga capaian proporsi keterwakilan perempuan berada pada angka 13,33% pada tahun 2015 dan menjadi 13,64 % pada tahun 2016.

Tabel 2-52 Tabel Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	DPRD	TAHUN	JUMLAH		%P
			L	P	
1.	DPRD Kulonprogo	2014	33	7	17,50
		2015	33	7	17,50
		2016	31	7	18,42
2.	DPRD Bantul	2014	42	3	6,67
		2015	42	3	6,67
		2016	42	3	6,67

No.	DPRD	TAHUN	JUMLAH		%P
			L	P	
3.	DPRD Gunungkidul	2014	38	7	15,5
		2015	39	6	13,33
		2016	38	6	13,64
4.	DPRD Sleman	2014	37	13	26,00
		2015	37	13	26,00
		2016	37	13	26,00
5.	DPRD Yogyakarta	2014	30	10	25,00
		2015	30	10	25,00
		2016	30	10	25,00
6	DPRD DIY	2014	48	7	12,73
		2015	48	7	12,73
		2016	48	7	12,73

Sumber: BPPM, 2015 dan 2017

Selain tingkat elektabilitas yang rendah, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah masih adanya keengganan perempuan untuk tampil dalam bidang politik dan kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi lebih dalam ranah politik. Hal ini dikarenakan masih adanya stigma bahwa ranah politik adalah ranah laki-laki. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa strategi untuk menumbuhkan kesadaran dan strategi pembelajaran politik bagi warga perempuan di DIY masih diperlukan sehingga selanjutnya mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan di DIY dalam politik baik secara kuantitas maupun kualitas.

2.1.3.1.8.5 Partisipasi Perempuan dalam Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja di DIY semakin memperlihatkan perkembangan positif dari waktu ke waktu. Beberapa sektor ekonomi yang strategis pun kini banyak bertumpu pada sumbangsih perempuan. Namun sayangnya, persoalan gender masih acap kali dijumpai. *Gender stereotype* bahwa laki-laki adalah pencari nafkah yang utama dan bahwa beberapa pekerjaan hanya patut dilakukan oleh laki-laki menyebabkan banyak perempuan bekerja tanpa mendapatkan bayaran dan lebih terbatasnya akses perempuan terhadap kesempatan kerja.

Partisipasi perempuan sebagai karyawan dan wirausaha telah menunjukkan geliat yang positif. Bahkan, jumlah perempuan pelaku wirausaha sudah melebihi jumlah wirausaha laki-laki. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa mayoritas pekerja tidak dibayar di DIY adalah perempuan. Kondisi ini berarti Pemerintah Daerah DIY perlu berupaya lebih serius dalam melindungi hak-hak pekerja perempuan, disamping terus berikhtiar mendorong peningkatan partipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.

2.1.3.1.8.6 Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Hal yang paling mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar gender adalah tindak kekerasan berbasis gender. Meskipun tindakan ini sering kali dipakai dengan alasan tindakan pendisiplinan, namun nalar di balik tindakan kekerasan ini sering kali menggambarkan ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan relasi antara perempuan dan laki-laki.

Perempuan di DIY masih rentan menjadi korban kekerasan. Kondisi ini terekam dari data tahunan Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY yang mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi selama 2016. Hasilnya, terdapat 1.268 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 484 kasus kekerasan terhadap anak selama tahun 2016. Jika dibandingkan dengan data tahun 2015, data ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan angka kekerasan pada perempuan di DIY pada tahun 2016 namun telah terjadi pula peningkatan angka kasus kekerasan pada anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain terus melakukan berbagai upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif demi melindungi kaum perempuan berbagai tindak kekerasan, dan Pemda DIY pun perlu meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak agar upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan korban kekerasan dapat berjalan secara komprehensif.

Tabel 2-53 Tabel Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Usia dan Lokasi Lembaga Layanan 2015-2016

No.	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	TAHUN 2015				TAHUN 2016			
			Kelompok Umur			Total	Kelompok Umur			Total
			0-17 Th	18-25 Th	25 Th ke atas		0-17 Th	18-25 Th	25 Thn ke atas	
1.	Kulon progo	Laki-laki	7	0	2	9	23	2	4	29
		Perempuan	19	5	20	44	22	19	64	105
2.	Bantul	Laki-laki	6	1	1	8	35	1	1	37
		Perempuan	41	12	37	90	35	11	48	94
3.	Gunungkidul	Laki-laki	7	1	0	8	2	1	3	6
		Perempuan	9	2	18	29	67	11	34	112
4.	Sleman	Laki-laki	34	1	24	59	34	4	14	52
		Perempuan	106	66	215	387	60	46	126	232
5.	Yogyakarta	Laki-laki	18	4	11	33	24	5	7	36
		Perempuan	58	130	364	552	46	119	332	497
6	Provinsi	Laki-laki	33	2	17	52	65	1	15	81
		Perempuan	66	39	121	226	71	68	89	228
Jumlah		Laki-laki	105	9	55	169	183	14	44	241
		Perempuan	299	254	775	1.328	301	274	693	1.268
		Total	404	263	830	1.497	484	288	737	1.509

Sumber Data: Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY, 2017

Data merupakan data laporan penanganan korban kekerasan di lembaga layanan yang ada di DIY

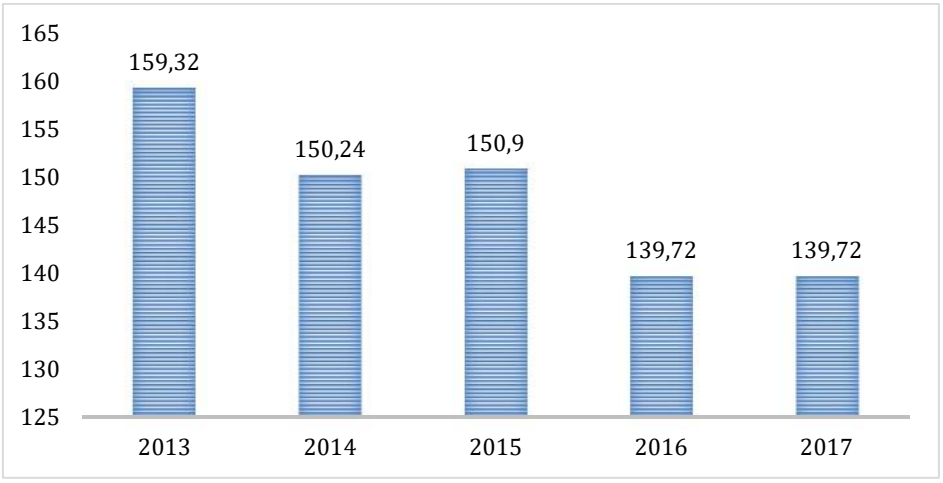
2.1.3.1.9 Urusan Pangan

A. Kondisi Umum

Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk mewujudkan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan terdiri dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

2.1.3.1.9.1 Ketersediaan Pangan

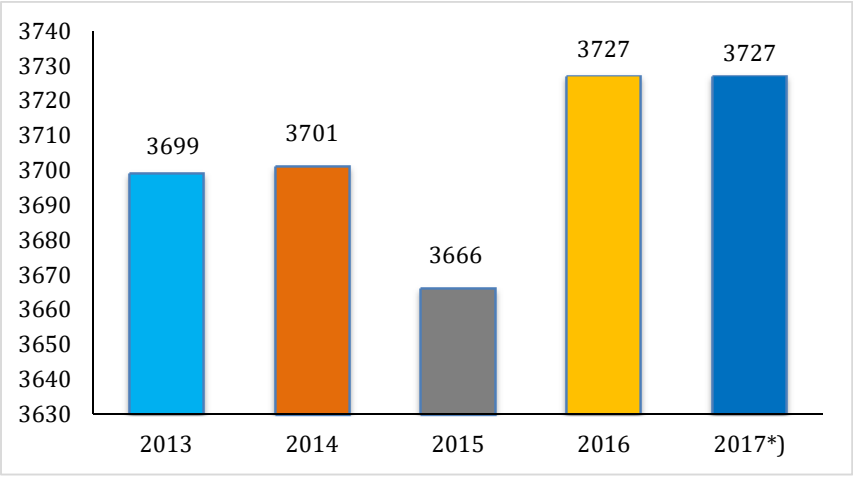
Ketersediaan pangan per kapita diperoleh dari ketersediaan bahan makanan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Berdasarkan pada Neraca Bahan Makanan yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY Ketersediaan pangan perkapita tahun 2017 (angka sementara) sebesar 139,7 kal/kap/hari, sama dengan pada tahun 2016. Sementara rata-rata pertumbuhan dalam periode lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan sebesar 3,17%.



Sumber : Dataku Bappeda DIY 2018
**) data sementara*

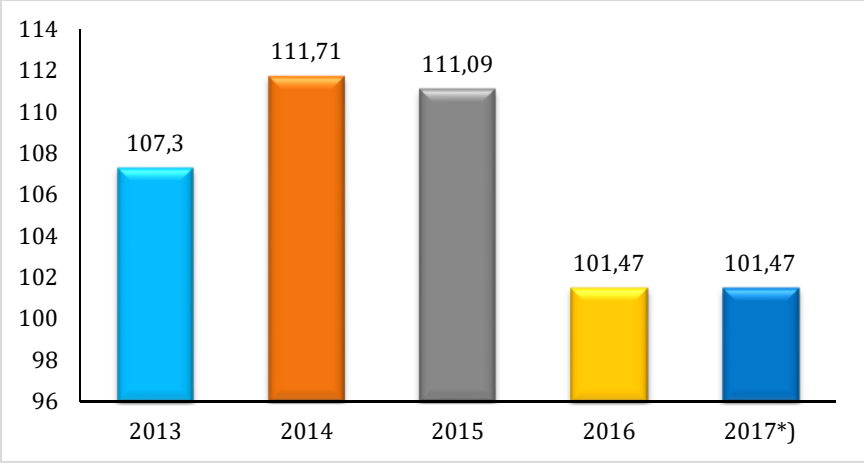
Gambar 2-44 Diagram Jumlah Ketersediaan Pangan Perkapita di DIY Tahun 2013-2017

Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan FAO, bahwa ketersediaan pangan dalam energi minimal 2400 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 63 gram/kapita/hari, maka posisi DIY jauh melebihi standar tersebut. Ketersediaan pangan dalam ukuran energi DIY tahun 2017 sebesar 3.727 KKal/kapita/hari. Sedangkan untuk protein ketersediannnya sudah mencapai 101,41 gram/kapita/hari., namun lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2013 hingga 2015. Hal ini perlu menjadi perhatian karena terkait dengan penyediaan penghasil protein, diantaranya ternak.



Sumber : Dataku Bappeda DIY 2018
*) data sementara

Gambar 2-45 Grafik Jumlah Ketersediaan Energi di DIY Tahun 2013-2017

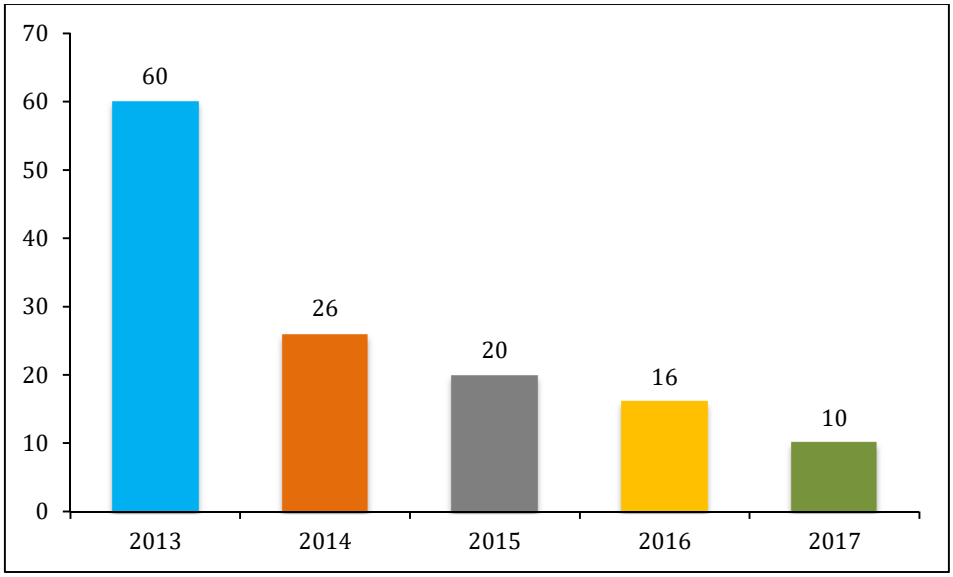


Sumber : Dataku Bappeda DIY 2017
**) data sementara*

Gambar 2-46 Grafik ketersediaan Protein di DIY Tahun 2012-2017

Tingkat kerawanan pangan di tingkat desa dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, serta aspek pemanfaatan pangan. Jumlah desa rawan pangan di DIY terus menurun dari 103 desa pada tahun 2010 menjadi 10 desa rawan pangan pada tahun 2017. Desa rawan pangan tersebut tersebar di Kabupaten Bantul 3 desa, Kabupaten Kulon Progo 4 desa, dan

Kabupaten Gunungkidul 3 desa. Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penurunan jumlah desa rawan pangan diantaranya peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan keuangan desa, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di desa tersebut.



Sumber : BKPP DIY 2017

Gambar 2-47 Grafik Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2013-2017

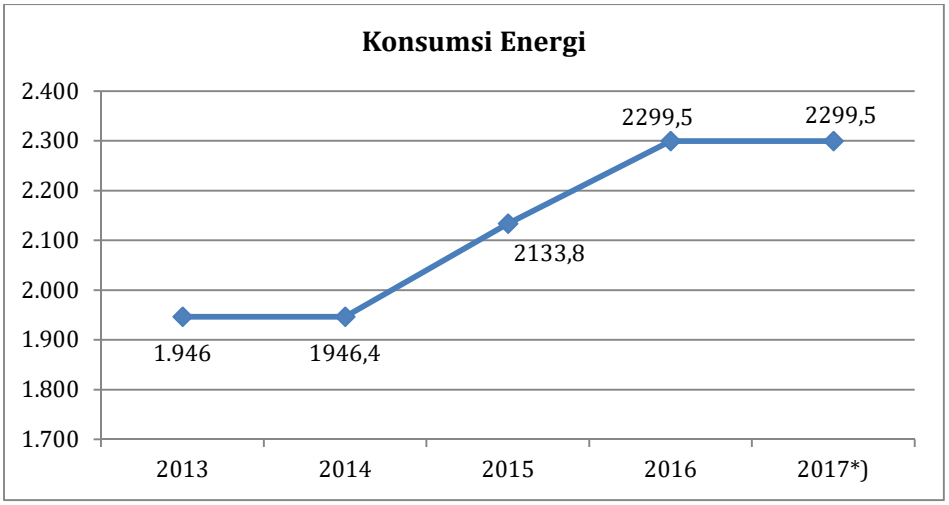
2.1.3.1.9.2 Distribusi Pangan

Distribusi antar waktu dan antar wilayah dari produksi setempat sudah dilaksanakan secara baik di DIY. Selain itu, pasokan bahan pangan juga terselenggara dengan lancar sebagai dampak tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Upaya pengendalian harga bahan pangan strategis dilaksanakan melalui fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat untuk wilayah yang surplus bahan pangan serta Lembaga Akses Pangan Masyarakat untuk daerah rawan pangan. Selain itu, pelaksanaan operasi pasar dilakukan melalui koordinasi dengan OPD terkait bersama BULOG. Sampai dengan saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 104 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komooditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31

Gapoktan dari taget 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga. Meskipun pengendalian harga ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, tetapi upaya-upaya yang sudah dilaksanakan ini dapat mendukung stabilisasi harga yang terjadi baik di tingkat petani selaku produsen sekaligus di tingkat konsumen.

2.1.3.1.9.3 Konsumsi dan Pengawasan Pangan

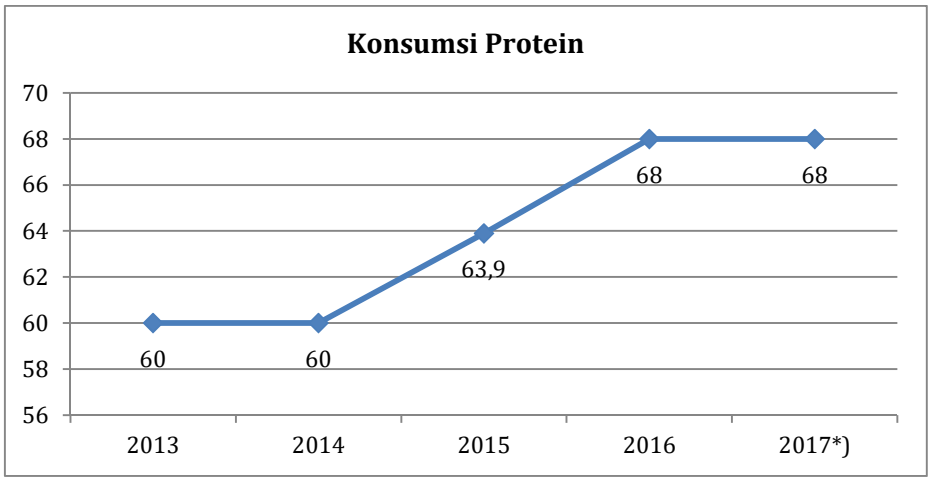
Jumlah konsumsi energi penduduk DIY mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 2299,5 Kkal/kapita/hari, sudah berada diatas Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2018 (diolah)
**) data sementara*

Gambar 2-48 Grafik Perkembangan Pangan dan Penyuluhan DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2013-2017

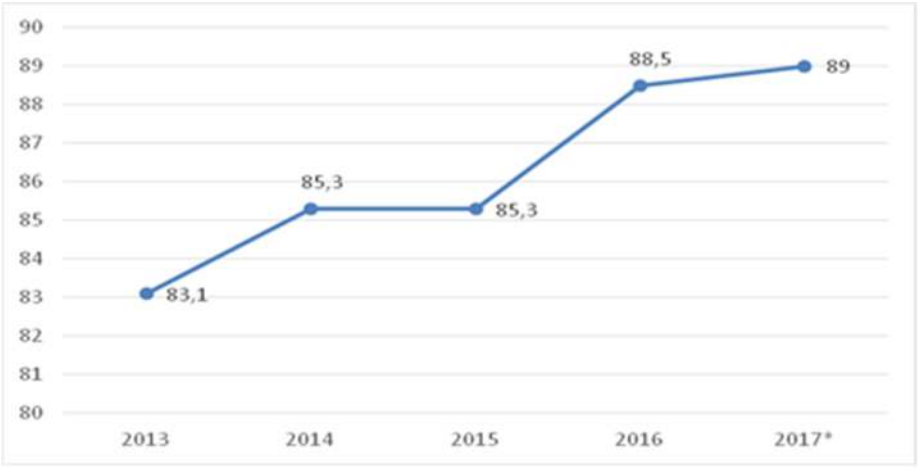
Konsumsi protein penduduk DIY juga terus meningkat mulai tahun 2013 hingga 2017. Bahkan pada tahun 2017 angka konsumsi protein menjadi 68 gram/kapita/hari. yang berarti sudah berada diatas angka kecukupan protein yang dianjurkan 52 gr/kapita/hari.



*Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2018 (diolah), *) data sementara*

Gambar 2-49 Grafik Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2013-2017

Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2017 adalah 88,5. Meskipun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat, namun masih terdapat asupan gizi dari beberapa kelompok bahan makanan berada dibawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004.



*Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanDIY, 2018 (diolah), *) data sementara*

Gambar 2-50 Grafik Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2013-2017

Tingkat asupan konsumsi pangan masyarakat DIY masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian terutama beras. Di sisi lain konsumsi pangan lainnya diantaranya umbi-umbian, pangan hewani, serta buah dan sayuran kurang dari yang dianjurkan. Hal ini merupakan tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya percepatan penganekaragaman pangan di DIY.

Kondisi keamanan pangan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh lapisan. Berbagai permasalahan keamanan pangan merupakan akibat dari banyaknya produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari tahun ke tahun yang mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba melebihi batas, serta menggunakan bahan tambahan pangan melebihi batas yang diijinkan. Oleh karena itu, upaya pengawasan keamanan pangan terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Berbagai upaya tersebut diantaranya adalah pengawasan di pasar dan sekolah serta pembinaan produsen pangan dalam rangka sertifikasi keamanan pangan.

2.1.3.1.10 Urusan Pertanahan

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaanya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan.

Sebagai daerah bekas Swapraja, urusan pertanahan di DIY memang bersifat khusus. Pada masa Swapraja, Kasultanan Nyagogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya disebut Kadipaten) memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kelurahan (penyebutan Desa pada waktu itu) dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti magersari, ngindhung, hanganggo turun-temurun, dan hanggadhuh (atau anggadhuh) melalui serat kekancingan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan istimewa bidang pertanahan. Kewenangan istimewa adalah kewenangan tambahan tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY mengundangkan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dirubah melalui Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 50 mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan :

1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Urusan pertanahan dalam UU No 13/2012 dan Perdais DIY No 1/2013 ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Seluruh bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten pada dasarnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundangan. Dalam Pasal 3 Perdais DIY No. 1/2017 tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan/atau untuk kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan berupa pelindungan, penggunaan dan pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Sampai dengan tahun 2017, jumlah total bidang SG, PAG dan Tanah Desa yang telah didaftarkan agar memiliki kepastian hukum sebanyak 13.750 bidang dari total jumlah bidang tanah sejumlah 14.436 bidang. Pendataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten telah dilakukan terhadap ±13.877 bidang dengan keluasan ±79.331.371 m^2. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah didaftarkan sebanyak 5.369 bidang dan telah terbit sebanyak 3.196 sertifikat. Sedangkan Tanah Desa sampai tahun 2014 telah terbit sebanyak 8.381 sertifikat. Sedangkan untuk proses pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2-54 Tabel Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Inventarisasi			Pendaftaran														
		SG	PAG	Jml Bid	2013			2014			2015			2016			2017		
					SG	PAG	Jml	SG	PAG	Jml	SG	PAG	Jml	SG	PAG	Jml	SG	PAG	Jml
1	Yogyakarta	438	68	506	32	13	45	166	0	166	75	0	75	50	0	50	70	0	70
2	Bantul	3432	0	3432	0	0	0	171	0	171	1367	0	1367 (967+400)	300	0	300	350	0	350
3	Kulon Progo	1286	288	1574	0	0	0	112	104	216	174	2	176	240	0	240	350	0	350
4	Gunung Kidul	4046	0	4046	0	0	0	54	0	54	300	0	300	300	0	300	250	0	250
5	Sleman	4486	0	4486	0	0	0	137	0	137	252	0	252	250	0	250	250	0	250
Jumlah		**13688**	**356**		**32**	**13**		**640**	**104**		**2167**	**2**		**1140**	**0**		**1270**	**0**	
Jumlah Per Tahun					**45**			**744**			**2170**			**1140**			**1270**		

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2017

2.1.3.1.11 Urusan Lingkungan Hidup

A. Kondisi Kualitas Air

2.1.3.1.11.1 Kondisi Kualitas Air Sungai

Pemantauan kualitas air sungai meliputi empat parameter fisik (suhu, TDS, TSS, dan DHL), 21 Parameter kimia (pH,DO, BOD, COD, Klorin bebas, Sulfida, Fluorida, Fosfat, Nitrat, Nitrit, Kadmium, Krom,Timbal, Tembaga, Boron, Sianida, Minyak dan Lemak, Seng,Fenol, Amoniak, Permanganat dan Deterjen), serta 2 parameter biologi (Bakteri Koli Tinja dan Total Coli) sesuai amanat PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, serta Pergub DIY Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di DIY.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 10 Sungai yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajah Wong, Sungai Bedog, Sungai Tambakbayan, Sungai Oyo, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Belik dan Sungai Bulus dalam tiga periode, yaitu bulan Februari, Juni, dan September. Dari hasil pemantauan, diperoleh data kualitas air sungai yang kemudian dianalisa dengan Metode Indeks Pencemaran dan Metode Storet. Hasil analisis Storet dari tahun 2013 sampai 2017, secara umum sungai-sungai di DIY masuk kategori cemar berat akan tetapi pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan kualitas sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-55 Status Mutu Air Sungai DIY dengan Metode Storet

No.	Nama Sungai	Baku Mutu	Status Kualitas Air Sungai					Kriteria	Kinerja 2017
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	Winongo	≤ -31	-96 hingga -120	-75 hingga - 106	-73 hingga - 110	-84 hingga -114	-80 hingga -106	Cemar Berat	Meningkat
2	Code	≤ -31	-86 hingga -112	-89 hingga -120	-94 hingga -118	-90 hingga -106	-73 hingga -98	Cemar Berat	Meningkat
3	Gajahwong	≤ -31	-74 hingga -120	-78 hingga -108	-88 hingga -102	-80 hingga -100	-80 hingga -110	Cemar Berat	Menurun
4	Bedog	≤ -31	-84 hingga -108	-94 hingga -111	-90 hingga -143	-89 hingga -104	-70 hingga -115	Cemar Berat	Meningkat

No.	Nama Sungai	Baku Mutu	Status Kualitas Air Sungai					Kriteria	Kinerja 2017
			2013	2014	2015	2016	2017		
5	Belik	≤ -31	-100 hingga -126	-104 hingga -120	-120 hingga -149	-113 hingga -140	-94 hingga -112	Cemar Berat	Meningkat
6	Konteng	≤ -31	-86 hingga -106	-94 hingga -116	-90 hingga -114	-84 hingga -102	-93 hingga -99	Cemar Berat	Meningkat
7	Kuning	≤ -31	-83 hingga -90	-85 hingga -102	-95 hingga -101	-95 hingga -101	-76 hingga -105	Cemar Berat	Meningkat
8	Oyo	≤ -31	-92 hingga -98	-92 hingga -111	-118 hingga-132	-98 hingga -128	-77 hingga -95	Cemar Berat	Meningkat
9	Tambakbayan	≤ -31	-98 hingga -106	-84 hingga -107	-84 hingga -105	-76 hingga - 101	-78 hingga -86	Cemar Berat	Meningkat
10	Bulus	≤ -31	-70 hingga -76	- 93 hingga - 98	-100 hingga - 116	-92 hingga -102	-72 hingga -82	Cemar Berat	Meningkat

Sumber: SLHD DIY tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017

Dari hasil pemantauan 10 sungai di DIY dari tahun 2013 sampai 2017, dapat dilihat bahwa kinerja peningkatan kualitas air sungai pada tahun 2017 sebanyak 9 sungai mengalami peningkatan kualitas, dan 1 sungai mengalami penurunan kualitas yaitu Sungai Gajahwong. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BLH untuk meningkatkan kualitas air sungai yaitu gerakan bersih sungai dan sosialisasi serta pemberdayaan warga masyarakat sekitar sungai dan komunitas peduli sungai untuk menjaga kebersihan sungai. Komunitas peduli sungai di DIY telah ikut berperan aktif dalam kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sungai baik secara fisik, biotik maupun sosiokultural.

2.1.3.1.11.2 Kondisi Kualitas Air Tanah

Pada tahun 2017 dilakukan pemeriksaan kualitas air tanah sebanyak 14 sampel air sumur di 14 lokasi di perkotaan DIY berdasarkan baku mutu dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990. Pengujian dilakukan pada tanggal 8 Juni 2018. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh 14 sampel air sumur tidak memenuhi baku mutu untuk parameter bakteri koli tinja dan total koli.

Keberadaan bakteri koli menunjukkan adanya kontaminasi mikroorganisme yang bersifat patogenik bagi kesehatan. Bakteri koli dapat digolongkan menjadi bakteri koli tinja dan non tinja. Contoh bakteri koli tinja adalah *Escherecia coli* yang berasal dari kotoran hewan dan manusia. Tingginya jumlah bakteri koli termasuk koli tinja dalam air sumur yang diperiksa dikhawatirkan membawa dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat pengguna sumber air tersebut. Salah satu penyakit yang disebabkan *E. coli* adalah diare. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tingginya bakteri koli dalam air sumur, antara lain dengan menaburkan *chlor diffuser.*

Untuk parameter kekeruhan, hanya ada 1 sampel yang tidak memenuhi baku mutu (1,47%) yaitu sumur di SMAN 1 Temon, Kulon Progo. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan penyebab tingginya angka kekeruhan pada air sumur. Tingginya angka kekeruhan antara lain disebabkan oleh adanya zat koloid, partikel zat padat, zat organik, dan mikro organisme dalam air. Untuk unsur mangan, dari 68 sampel yang diuji terdapat 5 sampel (7.35 %) dengan kandungan mangan yang melebihi baku mutu. Berdasarkan keterangan PDAM Tirta Marta kandungan mangan di DIY cukup tinggi karena secara alami cukup tinggi, namun demikian dapat juga disebabkan adanya limbah domestik dan pelarutan mineral. (Laporan SLHD DIY Tahun 2017).

2.1.3.1.11.3 Kualitas Air Laut

Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengujian terhadap kualitas air laut sebanyak dua periode dengan tiga kategori parameter yaitu fisika, kimia, dan biologi. Pemantauan periode I dilakukan pada 7 lokasi yaitu Pantai Bugel, Pantai Glagah, Pantai Depok, Pantai Goa Cemara, Pantai Sanglen, Pantai Sarangan, dan Pantai Baron dan periode II pada Pantai Glagah, Pantai Sruni, Pantai Depok, Pantai Porok, Pantai Parangtritis, Pantai Trisik dan Pantai Baron. Periode I dilakukan pada Bulan Maret dan periode II dilakukan pada Bulan Agustus.

Hasil pemantauan kualitas air periode I

Berikut merupakan hasil pengujian pada periode I dengan masing-masing parameter.

Tabel 2-56 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut Periode I dengan Parameter Fisika

Parameter	Satuan	Lokasi							Baku Mutu
		Bugel	Glagah	Depok	Goa Cemara	Sanglen	Sarangan	Baron	
FISIKA									
Kekeruhan	NTU	8,77	5,66	80	10,26	5,14	2,78	6,88	5
Temperatur	°C	27,4	26,8	28,3	27,4	27,4	27,5	27,2	alami
Warna	Pt-Co	0,993	0,812	1,76	1,543	0,187	0,406	2,662	20
Bau		Tak berbau	Tak berbau	Tak berbau	Tak berbau	Tak berbau	Tak berbau	Tak berbau	Tidak berbau
TSS	mg/L	87,9	7,6	28,4	85	32,8	61,1	38,5	20

Pada tabel hasil pengujian parameter fisika di atas menunjukan bahwa terdapat dua parameter yang melebihi baku mutu di beberapa titik lokasi yaitu parameter Kekeruhan dan parameter TSS. Dari ketujuh lokasi pemantauan terdapat enam lokasi yang memiliki kekeruhan lebih dari baku mutu. Hanya pantai Sarangan yang memiliki tingkat kekeruhan di bawah baku mutu yang ditetapkan. Kekeruhan yang terjadi hampir disemua titik pengujian diperkirakan karena aliran sungai yang bermuara di pantai-pantai DIY membawa materi lumpur akibat hujan dan luapan sungai. Sedangkan parameter TSS yang melebihi baku mutu terdapat pada lima lokasi. Hanya Pantai Glagah dan Pantai Goa Cemara yang tidak melebihi baku mutu pada parameter TSS. Kandungan TSS yang melebihi baku mutu terukur hampir di semua lokasi. Kadungan TSS yang tinggi kemungkinan berasal dari sungai-sungai yang banyak membawa material terlarut dari daerah hulu dan buangan limbah industri yang dialirkan ke sungai. Tahun 2017 tidak jauh berbeda dengan tahun 2016, dimana kandungan TSS masih tergolong tinggi.

Tabel 2-57 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut Periode I dengan Parameter Kimia

Parameter	Satuan	**Lokasi**							Baku Mutu
		Bugel	Glagah	Depok	Goa Cemara	Sanglen	Sarangan	Baron	
KIMIA									
pH	-	7,79	7,82	7,84	7,74	7,96	7,56	8,11	7 – 8,5
Salinitas	‰	5,5	5,8	5,6	5,55	5,5	5,55	5,3	alami

Parameter	Satuan	Lokasi							Baku Mutu
		Bugel	Glagah	Depok	Goa Cemara	Sanglen	Sarangan	Baron	
Nitrat	mg/L	≤0,066	≤0,066	≤0,066	≤0,066	≤0,066	≤0,066	≤0,066	0,008
Kadmium	mg/L	0,0537	0,0537	0,0527	0,0473	0,0503	0,0515	0,0161	0,002
Tembaga	mg/L	0,0694	0,0025	0,0551	0,0349	0,0357	0,0302	0,0307	0,05
Krom Heksavalen	mg/L	0,0054	0,0043	0,0113	0,0016	<<0,0001	<<0,0001	0,0005	0,002
Sulfida	mg/L	0,012	0,012	0,001	<0,001	0,002	0,005	0,001	0
Timbal	mg/L	0,3422	0,2894	0,2766	0,1643	0,1747	0,288	0,1992	0,005
Nikel	mg/L	0,3482	0,3589	0,2464	0,2256	0,3021	0,3287	0,1315	0,01
BOD	mg/L	0,03	0,38	0,62	0,26	0,5	0,5	0,08	10
DO	mg/L	6,28	6,44	6,94	6,32	6,24	6,29	7,56	>5
Phosphat	mg/L	≤0,02	≤0,02	≤0,02	≤0,02	≤0,02	0,144	≤0,02	0,015
Fenol	mg/L	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0
Minyak Lemak	mg/L	56	41	38	42	29	87	50	1
Seng	mg/L	0,052	0,0022	0,0335	0,0132	0,0115	0,0273	0,0004	0,095
Detergen sebagai MBAS	mg/L	0,2191	0,2419	0,1419	0,1069	0,1681	0,6218	0,6953	0,001
Amoniak	mg/L	≤0,0094	≤0,0094	≤0,0094	≤0,0094	≤0,0094	≤0,0094	≤0,0094	0
Raksa	µg/L	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	0,0006

Hasil pengambilan sampel pengujian parameter kimia menunjukan 9 dari 18 parameter yang ada memiliki nilai lebih dari baku mutu. Parameter yang melebihi baku mutu diseluruh titik pengambilan sampel adalah parameter Kadmium, Sulfida, Timbal, Nikel, Minyak Lemak dan Detergen. Sedangkan Tembaga, Krom Heksavalen, dan Phosphat yang melebihi baku mutu tidak pada seluruh titik lokasi.

Kadar fosfat air laut yang tinggi akan menyebabkan ledakan fitoplankton dan berkurangnya oksigen, yang akhirnya menyebabkan kematian ikan secara massal. Pencemaran air oleh minyak merugikan bagi kelangsungan hidup biota perairan. Berat jenisnya yang lebih rendah daripada air akan membuat minyak terapung membentuk lapisan film di permukaan. Hal ini akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut: berkurangnya penetrasi sinar ke dalam air, menurunnya

konsentrasi oksigen terlarut, terganggunya aktivitas burung air terutama ketika menyelam maka bulu-bulunya akan ditutupi minyak sehingga sulit mengembang, serta terganggunya kehidupan tanaman laut seperti ganggang dalam melakukan fotosintesis.

Lokasi pantai yang kandungan detergennya melebihi baku mutu dikarenakan mempunyai aktivitas restoran dan kamar mandi yang banyak sehingga limbah domestiknya cukup tinggi.

Tabel 2-58 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut Periode I dengan Parameter Biologi

Parameter	Satuan	Lokasi							Baku Mutu
		Bugel	Glagah	Depok	Goa Cemara	Sanglen	Sarangan	Baron	
BAKTERIOLOGI									
Coliform Total	MPN/100 ml	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	700
Colliform	MPN/100 ml	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	200

Hasil pengujian pada parameter Biologi/Bakteriologi menunjukan bahwa seluruh titik lokasi pengambilan sampel memiliki nilai yang melebihi baku mutu. Kandungan Colliform pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sarana pengolahan limbah domestik pada seluruh pantai masih belum baik. Hal tersebut juga dikarenakan jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai-pantai di DIY semakin banyak. Selain itu Colliform dan Coliform Total terdeteksi melebihi baku mutu di diseluruh titik lokasi pengujian dikarenakan air yang berasal dari sungai masuk ke laut lebih banyak yang kemungkinan membawa bakteri Koli.

Hasil pemantauan kualitas air periode II

Tabel 2-59 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut Periode II dengan Parameter Fisika

Parameter	Satuan	Lokasi							Baku Mutu
		Glagah	Sruni	Depok	Porok	Parangtritis	Trisik	Baron	
FISIKA									
Kekeruhan	NTU	12,9	19,2	72,3	30,3	46,4	5,6	169	5
Temperatur	°C	26,8	26,9	27,1	27	26,8	26,8	26,9	alami

Parameter	Satuan	Lokasi							Baku Mutu
		Glagah	Sruni	Depok	Porok	Parangtritis	Trisik	Baron	
Warna	Pt-Co	1,4441	4,7806	8,3661	10,159	19,023	8,2467	20,218	20
Bau		Tak berbau	Tak berbau	Tak berbau	Tak berbau	Tak berbau	Tak berbau	Tak berbau	Tidak berbau
TSS	mg/L	126	134	308	112	228	24	542	20

Pada tabel hasil pengujian parameter fisika periode II di atas menunjukan bahwa terdapat dua parameter yang melebihi baku mutu di seluruh titik lokasi pengujian yaitu parameter Kekeruhan dan parameter TSS. Kekurahan yang terjadi disemua titik pengujian diperkirakan karena aliran sungai yang bermuara di pantai-pantai DIY membawa materi lumpur akibat hujan dan luapan sungai. Kandungan TSS yang melebihi baku mutu terukur di semua lokasi. Kadungan TSS yang tinggi kemungkinan berasal dari sungai-sungai yang banyak membawa material terlarut dari daerah hulu dan buangan limbah industri yang dialirkan ke sungai.

Tabel 2-60 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut Periode II dengan Parameter Kimia

Parameter	Satuan	**Lokasi**							Baku Mutu
		Glagah	Sruni	Depok	Porok	Parangtritis	Trisik	Baron	
KIMIA									
pH	-	7,69	7,74	7,8	7,87	7,75	7,93	7,73	7 – 8,5
Salinitas	‰	32,4356	29,132	33,637	30,934	30,9333	27,0297	29,4323	alami
Nitrat	mg/L	1,3807	1,3387	0,9955	2,4076	3,4497	2,3059	1,7409	0,008
Kadmium	mg/L	0,0076	0,0069	0,0061	0,0056	0,0019	0,0059	0,0034	0,002
Tembaga	mg/L	0,0044	0,0016	0,0059	0,0062	0,0022	0,0071	0,0044	0,05
Krom Heksavalen	mg/L	0,0138	0,0032	0,0085	<0,0001	0,011	0,0223	0,0166	0,002
Sulfida	mg/L	0,006	0,003	0,007	0,008	0,008	0,011	0,006	0
Timbal	mg/L	0,0445	0,0515	0,0416	0,0325	0,0227	0,001	0,0115	0,005
Nikel	mg/L	0,0473	0,0273	0,0017	0,0084	0,0407	0,0325	0,543	0,01
BOD	mg/L	0,87	0,59	0,98	0,24	0,69	0,4	0,44	10
DO	mg/L	6,92	7,28	6,16	7,32	5,66	8,38	6	>5
Phosphat	mg/L	0,0445	0,0162	0,1113	0,0154	0,068	0,0354	0,0854	0,015

Parameter	Satuan	Lokasi							Baku Mutu
		Glagah	Sruni	Depok	Porok	Parangtritis	Trisik	Baron	
Fenol	mg/L	0,0226	0,0228	0,0181	0,0281	0,0243	0,0186	0,0279	0
Minyak Lemak	mg/L	5	3	1	1	1	4	3	1
Seng	mg/L	0,0019	0,1082	0,0038	0,0124	0,004	0,0194	0,0162	0,095
Detergen sebagai MBAS	mg/L	0,0632	0,0278	0,0248	0,0128	0,098	0,066	0,0486	0,001
Amoniak	mg/L	5	0,1	11	1	0,1	0,03	3,5	0
Raksa	µg/L	<0,06	<0,06	0,07	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	0,0006

Hasil pengambilan sampel pengujian periode II pada parameter kimia menunjukan 11 dari 18 parameter yang ada memiliki nilai lebih dari baku mutu. Parameter yang melebihi baku mutu dibeberapa titik pengambilan sampel adalah parameter Kadmium, Krom, Timbal, Nikel, Minyak Lemak, dan Seng. Sedangkan Nitrat, Sulfida, Phosphat, Fenol dan Amoniak merupakan parameter yang melebihi baku mutu pada seluruh titik lokasi.

Tabel 2-61 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut Periode II dengan Parameter Biologi

Parameter	Satuan	Lokasi							Baku Mutu
		Glagah	Sruni	Depok	Porok	Parangtritis	Trisik	Baron	
BAKTERIOLOGI									
Coliform Total	MPN/100 ml	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	700
Coliform	MPN/100 ml	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	200

Hasil pengujian pada parameter Biologi/Bakteriologi pada periode II menunjukan bahwa seluruh titik lokasi pengambilan sampel memiliki nilai yang melebihi baku mutu. Kandungan Colliform pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sarana pengolahan limbah domestik pada seluruh pantai masih belum baik. Hal tersebut juga dikarenakan jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai-pantai di DIY semakin banyak. Selain itu Colliform dan Coliform Total

terdeteksi melebihi baku mutu di diseluruh titik lokasi pengujian dikarenakan air yang berasal dari sungai masuk ke laut lebih banyak yang kemungkinan membawa bakteri Koli.

2.1.3.1.11.4 Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara pada tahun 2017 dilakukan untuk mengetahui kualitas udara ambien. Periode I dilakukan di 30 lokasi pada bulan Mei-Juni dan Periode II di 25 lokasi pada bulan November yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di tempat-tempat yang padat lalu lintas dan juga di wilayah permukiman serta wilayah sekitar industri. Parameter yang dipantau adalah parameter fisika meliputi, suhu udara, kelembaban, kebisingan, arah angin, cuaca, dan kecepatan angina, serta parameter kimia meliputi: NO2, SO2, Karbon Monoksida (CO), Oxidant (Ox), Timah hitam (Pb), Hidrokarbon (HC) dan PM.10.

Standar Baku Mutu Udara Ambien Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153 Tahun 2002, serta Baku Mutu Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan Daerah Provinsi DIY No. 176 tahun 2003 menjadi dasar perbandingan hasil pemantauan kualitas udara pada setiap titik lokasi berdasarkan hasil analisis parameter-parameter di atas.

Kualitas Udara Metode Aktif Periode I

Analisa mutu udara ambien untuk road side 30 titik dilakukan dengan cara dibandingkan hasil uji dengan Baku Mutu Kualitas Udara Ambien, hasil uji ternyata masih banyak parameter yang melebihi baku mutu. Untuk mengetahui lebih jauh hasil pemantauan dari masing-masing parameter perlu dilihat situasi dan kondisi pada saat pemantauan. Parameter suhu udara, kelembaban, kecepatan angin dan cuaca di semua lokasi pemantauan dalam kondisi normal. Pada saat pemantauan cuaca dalam keadaan cerah, sehingga tidak terlalu mengganggu jalannya pemantauan.

Tabel 2-62 Lokasi Pemantauan Periode I Tahun 2017

No	Kode	Lokasi
1	A	Simpang empat Ngeplang, Sentolo,Kulon Progo
2	B	Simpang tiga Toyan Wates, kulon Progo
3	C	Terminal Wates, Kulon Progo
4	D	Pertigaan Teteg/Simpang Tiga Kulon Progo

No	Kode	Lokasi
5	E	Depan GKBI Medari, Jl.Magelang Sleman Yk
6	F	Perempatan Denggung,Beran, Jl.Magelang Yk
7	G	Depan TVRI, Rogoyudan, Jl. Magelang KM 4,6 Sinduadi,Mlati Sleman.
8	H	Depan Kampus UPN Veteran Ring Road Utara Yk
9	I	Depan Ruko Janti, Jl. Laksda Adisutjipto Yk.
10	J	Depan Kampus STTL, Jl. Gedongkuning Yk.
11	K	Depan Pasar Sepeda Jl. Menteri Supeno Yk
12	L	Depan Hotel Matahari, Jl. Parangtritis Yk
13	M	Depan RS. PKU Muhammadiyah Yk
14	N	Depan Pasar Beringharjo Jl. Jend A. Yani 16 Yk
15	O	Depan Ruko Bayeman jl. Wates Yk
16	P	Depan bekas Kantor Merapi Golf, Jl. Kaliurang Km 6,4 Yk.
17	Q	Depan Mirota Kampus, Jl. C Simanjuntrak Yk.
18	R	Depan Hotel Shapir, Jl. Solo Yk.
19	S	Depan Hotel Tentrem, Jl. Jend. Sudirman Yk.
20	T	Depan Kantor Kec. Jetis, Jl. P. Diponegoro Yk.
21	U	Depan Mirota Godean, Jl. Godean Yk.
22	V	Perempatan Wojo, Jl.Imogiri Barat, Bantul
23	W	Simpang empat Druwo,Jl.Parangtritis, Yk
24	X	Depan Toko Besi Dongkelan, Selatan Ring Road, Jl.Bantul Yk
25	Y	Perempatan Gose, Jl. Bantul, Yogyakarta.
26	Z	Depan Kecamatan Pathuk, Wonosari, Gunungkidul
27	AA	Perempatan Gading Wonosari Gunungkidul
28	AB	Simpang Empat, Siyono, Wonosari, Gunungkidul
29	AC	Terminal Wonosari, Gunungkidul
30	AD	Depan RSUD Wonosari, Gunungkidul

Sumber : Hasil Analisa, 2017

Berikut hasil pemantauan fisik udara pada saat pengukuran uji kualitas udara ambien yang dilaksanakan :

Tabel 2-63 Hasil Pemantauan Fisik Udara Periode I Tahun 2017

No	Kode	Pengamatan Fisika Udara					
		Suhu (^{0}C)	Kelembapan (%)	Tekanan (mmHg)	Kec.Angin (m/detik)	Arah Angin	Cuaca
1	A	35,5	42,0	748,9	1,7	Barat Daya	Cerah
2	B	29,5	54,0	753,9	1,1	Barat	Cerah
3	C	31,3	51,5	753,1	1,7	Barat Daya	Cerah Berawan
4	D	35,5	41,0	752,3	1,5	Barat Daya	Cerah
5	E	31	48,5	731,3	1,4	Barat	Cerah
6	F	30,5	54,0	738,1	1,7	Utara	Cerah
7	G	31,5	50,0	743,2	2,7	Timur	Cerah
8	H	35,5	50,0	741,9	3,4	Barat	Cerah
9	I	33,5	46,0	744,0	1,2	Timur	Cerah
10	J	31,5	45,0	745,5	1,4	Utara	Cerah
11	K	32,5	43,0	745,5	1,5	Utara	Cerah
12	L	28,5	53,0	747,0	0,9	Utara	Cerah
13	M	31	42,0	745,5	1,3	Barat	Cerah
14	N	28,5	53,0	745,5	0,8	Utara	Cerah
15	O	35	38,0	746,3	1,6	Barat	Cerah
16	P	35	36,0	738,9	1,3	Utara	Cerah
17	Q	36,5	37,0	741,2	1,3	Utara	Cerah
18	R	34,3	38,0	744,0	2,8	Barat	Cerah
19	S	35	39,0	744,0	1,4	Barat	Cerah
20	T	34,7	41,0	744,0	1,2	Barat	Cerah
21	U	32,7	42,5	743,2	1,5	Barat	Cerah
22	V	32,3	42,0	746,3	1,3	Utara	Cerah
23	W	30,5	60,0	747,8	1,3	Timur	Cerah
24	X	32,5	47,0	747,0	1,4	Utara	Cerah
25	Y	33,8	44,0	750,1	1,0	Utara	Cerah
26	Z	30,5	47,0	729,7	0,6	Timur	Cerah
27	AA	32,5	44,0	736,6	1,4	Barat	Cerah
28	AB	31,7	44,5	738,1	2,3	Utara	Cerah
29	AC	34,7	38,0	738,9	1,5	Utara	Cerah

No	Kode	Pengamatan Fisika Udara					
		Suhu (^{0}C)	Kelembapan (%)	Tekanan (mmHg)	Kec.Angin (m/detik)	Arah Angin	Cuaca
30	AD	32,7	43,0	738,9	1,2	Barat	Cerah

Sumber : Hasil Analisa, 2017

1. Kebisingan

Parameter yang melebihi baku mutu udara ambien dalam pengambilan sampel pada tahun 2017 adalah parameter Kebisingan. Kondisi tingkat kebisingan dari 30 lokasi pemantauan (A-Z dan AA-AD) menunjukkan bahwa, di lokasi pemantauan pada bulan Mei-Juni berkisar 66,2-78,8 dB (A) dengan Baku Mutu sebesar 70 dB (A). Kebisingan tertinggi berada di Perempatan Wojo Jl. Imogiri Barat, Bantul dan terendah di depan kec. Pathuk, Wonosari, Gunungkidul. Hasil pemantauan bulan November rerata kesbisingan sebesar 73,0 dB(A) dengan intensitas kebisingan paling tinggi berada di depan Hotel Saphir, Jl. Solo Yogyakarta (H) dan untuk angka terendahnya di Simpang Tiga Toyan, Wates Kulon Progo (S).

Rata-rata tingkat kebisingan di jalan raya di D.I. Yogyakarta yang diukur pada bulan Agustus-September adalah sebesar 73 dB(A) yang berarti telah melebihi syarat baku mutu yang seharusnya sebesar 70 dB(A). Keadaan Parameter Kebisingan ini sangat memprihatinkan, dilihan dengan naiknya rata-rata parameter kebisingan dibandingkan dengan tahun 2016 dan makin banyak lokasi pemantauan yang melebihi baku tingkat kebisingan, hal ini dibuktikan dengan hasil pemabtauan yang 90 % atau jumlah 27 dari 30 sampel yang diambil menunjukkan bahwa parameter kebisingan melebihi baku mutu.

Tingginya tingkat Kebisingan di Yogyakarta menimbulkan dampak antara lain dapat mengganggu ketenangan pikiran, mengarah kepada peningkatan emosional, serta tidak adanya kenyamanan lingkungan. Apabila dibandingkan dengan tingkat kebisingan tertinggi tahun 2017, 2016 dan 2015 yaitu bulan Agustus-September tahun 2016 sebesar 71,6 dB(A) dengan kondisi Bulan Agustus tahun 2015 sebesar 75,1 dB(A).

2. PM.10

Kadar PM10 di D.I.Yogyakarta secara rata-rata masih berada di bawah baku mutu PM10 menurut Kep. Gub. No. 153 Tahun 2002 sebesar 230 µg/m3

dengan waktu pengukuran selama 24 jam yaitu rerata sebesar 194,05 µg/m3 untuk bulan Mei - Juni. Dari 30 titik sampel road side yang diambil pada bulan Agustus-September di D.I.Yogyakarta semuanya masih memenuhi baku mutu. Untuk konsentrasi tertinggi dan bahkan melebihi baku mutu sebesar 714,61 µg/m3 berada di Pertigaan Teteg/Simpang Tiga Kulon Progo dan Kandungan terendah berada di Depan RSUD Wonosari, Gunungkidul dengan kandungan 55,27 µg/m3.

3. Karbon Monoksida (CO)

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara di 30 lokasi ternyata kandungan Karbon monoksida (CO) di semua titik pengukuran masih di bawah Baku Mutu Udara Ambien yang dipersyaratkan yaitu 30000 ug/m3 dengan waktu pengukuran 1 jam. Kandungan CO dari hasil pemantauan berkisar antara 609,69 – 1371,23 ug/m3, dimana kandungan CO terendah berada di Depan Kampus STTL, Jl. Gedongkuning Yk, sedangkan konsentrasi CO tertinggi terdapat di Terminal Wonosari, Gunungkidul. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan di daerah-daerah tersebut sering terjadi kemacetan lalulintas yang berimbas pada konsentrasi CO yang tinggi sebagai akibat dari asap knalpot sisa pembakaran mesin kendaraan bermotor yang tidak sempurna.

4. Ozon (O3)

Dari hasil pemantauan di 30 lokasi pemantauan titik tersebut ternyata kandungan Ozon (O_3) masih dibawah Baku Mutu yang dipersyaratkan (235 ug/m^3), karena secara umum konsentrasi O_3 di wilayah pengamatan berkisar antara 13,08 – 32,42 ug/m^3. Kondisi ini secara umum menunjukkan konsentrasi yang berfluktuatif. Konsentrasi tertinggi di titik Pertigaan Teteg/Simpang Tiga Kulon Progo sedangkan konsentrasi terendah terdapat pada lokasi Depan Hotel Matahari, Jl. Parangtritis Yk. Dengan demikian dari hasil pemantauan Ozon (O_3) dapat dikatakan bahwa di 30 lokasi pemantauan masih relatif cukup baik dari pengaruh Ozon (O_3).

5. Hidrokarbon (HC)

Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan di 30 lokasi pemantauan, konsentrasi tertinggi terdapat pada titik Depan Kantor Kec. Jetis, Jl. P. Diponegoro Yk. sebesar 331,34 µg/m3. Sedangkan konsentrasi hidrokarbon terendah terdapat pada titik Depan bekas Kantor Merapi Golf, Jl. Kaliurang Km 6,4 Yk sebesar 5,93 µg/m3.

6. Timbal (pb)

Dari hasil pemantauan ternyata kandungan Pb di 30 lokasi pemantauan masih memenuhi baku mutu udara yang dipersyaratkan (2 μg/m3). Kandungan Pb di semua lokasi pemantauan pada Bulan Februari- Maret berkisar antara 0,09-0,62 μg/m3 dengan waktu pengukuran selama 1 jam. Kandungan Pb tertinggi pada Bulan Februari-Maret terjadi di Depan Mirota, Jl. Godean Yk. (F) dan terendah di Perempatan RSUD Wonosari, Gunungkidul (AD) sedangkan pada Bulan Agustus-September angka konsentrasi Pb berkisar 0,18-1,53 g/m3 dimana tertinggi di titik W (Simpang Empat Druwo, jl. Parangtritis, Bantul) dan terendah di titik B (Depan Kantor Kec. Jetis, Jl. P. Diponegoro YK).

7. Sulfur Dioksida (SO2)

Dari hasil pemantauan kualitas udara dengan 30 sampel road side di Daerah D.I.Yogyakarta dapat diketahui bahwa konsentrasi SO2 yang ada berkisar antara 27,54 ug/m3 – 52,93 ug/m3. Semua lokasi sampel menunjukkan bahwa konsentrasi SO2 yang ada di road side Daerah D.I.Yogyakarta semuanya berada di bawah baku mutu yang ditetapkan yaitu 900 ug/m. Konsentrasi tertinggi berada Depan Pasar Beringharjo Jl. Jend A. Yani 16 Yk dan konsentrasi terendah berada di titik Depan Kantor Kec. Jetis, Jl. P. Diponegoro Yk.

8. Nitrogen Dioksida (NO2)

Dari hasil pemantauan di 25 lokasi pemantauan road side di Daerah D.I. Yogyakarta ternyata kandungan NOx berkisar antara 20,46 – 50,80 ug/m3 dan ternyata semuanya masih dibawah Baku Mutu Udara yang dipersyaratkan yakni 400 ug/m3 dengan waktu pengukuran 1 jam. Kandungan NO2 dengan konsentrasi tertinggi di titik Simpang empat Ngeplang, Sentolo,Kulon Progo. Sedangkan pada bulan yang sama terdapat konsentrasi NO2 terendah di titik Pertigaan Teteg/Simpang Tiga Kulon Progo.

2.1.3.1.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 berimplikasi pada kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan terutama dalam hal pendanaan.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang yang baru tersebut, pendanaan untuk administrasi kependudukan baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBN dimulai dari APBN-P 2014. Namun demikian sebelum APBN-P tersedia, pendanaannya tetap menggunakan APBD.

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut dalam proses selanjutnya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di DIY adalah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan ini merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan sebelumnya yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem administrasi kependudukan yang dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Di tahun 2017, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 2.754.232 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 3.606.111 orang. Sementara itu jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.695.705

orang atau dengan kata lain prosentase angka perekaman KTP el- sebesar 97,88%

Tabel 2-64 Angka DIY yang telah melakukan perekaman KTP El Penduduk

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH WAJIB KTP TELAH PEREKAMAN	ANGKA PEREKAMAN
2013	3.561.448	2.543.894	2.426.195	95,37%
2014	3.551.679	2.598.163	2.464.342	94,85%
2015	3.595.256	2.785.718	2.569.245	92,23 %
2016	3.587.758	2.717.385	2.640.612	97,17 %
2017	3.606.111	2.754.232	2.695.705	97,88%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY

Sementara itu untuk dokumen administrasi kependudukan yang lain, kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin, masih rendah. Berdasarkan data SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) tahun 2017, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di DIY sebesar 89,19%. Bisa juga diartikan bahwa dari jumlah anak total di DIY (penduduk berusia di bawah 18 tahun) sebesar 929.047 orang, ada sekitar 828.629 anak yang sudah memiliki akta kelahiran. Penyebab dari masalah ini antara lain ketiadaan biaya pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

Tabel 2-65 Kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak usia 0 tahun s/d 18 tahun di DIY Tahun 2017

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH ANAK (USIA DI BAWAH 18 TAHUN)	MEMILIKI AKTA S.D. BULAN INI		BELUM MEMILIKI AKTA S.D. BULAN INI	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8 (3-6)*	*9*
1	KULON PROGO	110.094	104.901	95,28	5.193	4,72
2	BANTUL	242.033	225.012	92,97	17.021	7,03
3	GUNUNGKIDUL	179.706	153.667	85,51	26.039	14,49
4	SLEMAN	280.722	237.703	84,68	43.019	15,32
5	YOGYAKARTA	116.492	107.346	92,15	9.146	7,85
	TOTAL	**929.047**	**828.629**	**89,19**	**100.418**	**10,81**

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY

2.1.3.1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah paradigma baru dalam pembangunan yang mengedepankan sifat "*people centered, participatory, empowering, and subtainable*" (Chambers, 1995). Meskipun pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, perspektif pemberdayaan masyarakat lebih luas dari sekedar upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan upaya pencegahan kemiskinan. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai kekuatan yang harus dikembangkan potensinya dan diberikan kontrol terhadap berbagai sumber daya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini dipandang strategis untuk mendukung pembangunan karena karakteristiknya yang demokratis. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat, setiap warga turut berperan aktif dalam upaya peningkatan kapasitas yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan.

Pemberdayaan masyarakat di DIY dihadapkan pada beberapa masalah. Masalah pertama adalah masih tingginya angka kemiskinan di DIY, yang bahkan berada di atas rata-rata nasional selama tiga belas tahun terakhir. Angka kemiskinan DIY sejak September 2011 hingga Maret 2017 memang cenderung mengalami penurunan (dari 16,14% menjadi 13,02%). Namun, ini bukanlah hal yang membanggakan terutama dengan mengingat bahwa angka ini masih di atas rata-rata nasional yang hanya berada pada poin 10,64 persen. Terlebih, data menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di DIY berjalan relatif lambat. Selama lebih dari enam tahun, persentase penduduk miskin di DIY hanya mengalami penurunan sebesar 3,12 persen. Oleh karena itu, tepat kiranya Pemerintah Daerah DIY menjadikan Penanggulangan Kemiskinan sebagai salah satu program tematik pembangunan yang diprioritaskan di wilayah ini.
Masalah selanjutnya yang harus dihadapi adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pemberdayaan masyarakat. Padahal, pemberdayaan masyarakat bergerak dengan prinsip demokrasi. Konsep pemberdayaan masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program karena pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga.

2.1.3.1.13.1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Jumlah LPM aktif menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah.

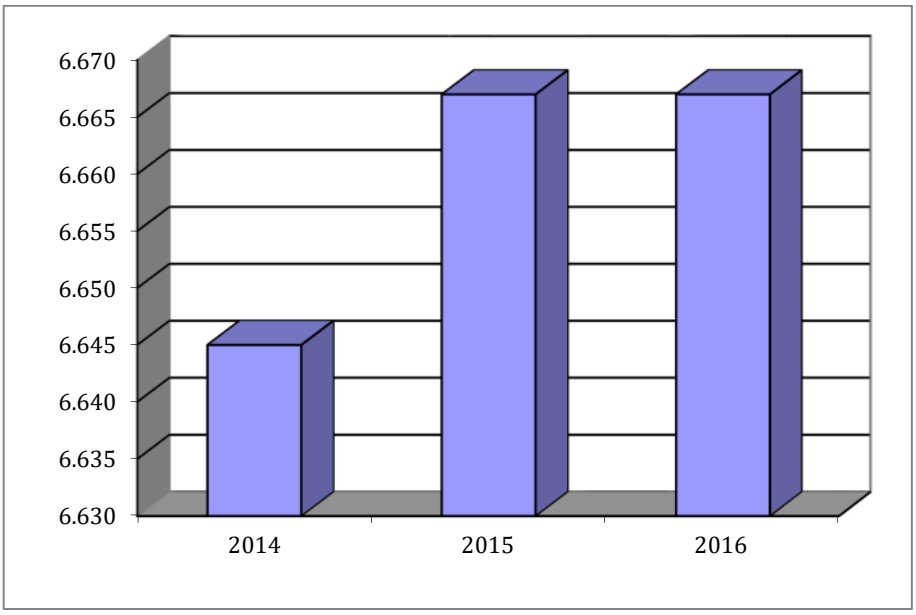
Tabel berikut menunjukkan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan aktif di wilayah DIY menurut kabupaten/kota di DIY tahun 2017.

Tabel 2-66 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) Aktif di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Total LPMD/LPMK Aktif
1	Kota Yogyakarta	45
2	Kabupaten Bantul	75
3	Kabupaten Sleman	86
4	Kabupaten Kulon Progo	88
5	Kabupaten Gunungkidul	144

Sumber: BPPM DIY, 2018

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak prakarsa; partisipasi; serta swadaya gotong royong masyarakat, berbagai LPM tersebut memiliki kelompok binaan. Perkembangan jumlah kelompok binaan seluruh LPM di DIY tahun 2014-2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Pada tahun 2014 jumlah kelompok binaan LPM di DIY adalah 6.645 kelompok. Angka tersebut meningkat pada 2015 sehingga terbina 6.667 kelompok dan tetap pada 2016.



Sumber: BPPM pada Dataku, 2017

Gambar 2-51 Kelompok Binaan IPM di DIY Tahun 2014 s.d 2016

2.1.3.1.13.2 Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) masuk dalam ranah pemberdayaan masyarakat karena berbagai kegiatan yang dilaksanakan diprakarsai oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Penyelenggaraan Posyandu berkonsep demokrasi, dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini. Tabel berikut menunjukkan persentase posyandu aktif di DIY.

Tabel 2-67 Posyandu Aktif di DIY Tahun 2015-2017

Kab/Kota	2015			2016			2017		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Kota Yogyakarta	625	450	72,00	625	615	98,4	625	623	99,68
Bantul	1132	747	65,99	1137	1137	100	1141	1141	100

Kab/Kota	2015			2016			2017		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Kulon Progo	960	863	89,90	961	830	86,37	961	960	99,89
Gunungkidul	1465	1261	86,08	1465	1465	100	1467	1467	100
Sleman	1520	1293	85,07	1519	1284	84,52	1528	1528	100
DIY	5702	4614	80,92	5717	5331	93,25	5722	5719	99,95

Sumber: BPPM DIY, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Posyandu yang aktif di DIY semakin meningkat dari 4.614 Posyandu pada tahun 2015 menjadi 5331 Posyandu pada tahun 2016, terakhir menjadi 5719 Posyandu pada tahun 2017. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa secara keseluruhan per 2017, hamper seluruh Posyandu di DIY telah berfungsi secara aktif. Dari 5 kabupaten dan 1 kota yang ada di DIY, Bantul bersama Gunung Kidul dan Sleman adalah wilayah yang paling berhasil mendorong Posyandu untuk menjalankan perannya secara aktif sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa 100 persen Posyandu di wilayah tersebut secara aktif memberikan pelayanan kesehatan. Sementara, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo dinilai perlu sedikit meningkatkan komitmennya dalam mendorong peran aktif Posyandu untuk meraih capaian 100 persen.

2.1.3.1.13.3 PKK Aktif

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui Gerakan PKK. Gerakan ini, merupakan sebuah gerakan yang memberdayakan perempuan sebagai kekuatan penggerak keluarga. Dalam praktiknya, gerakan ini dikelola dan digerakkan oleh Tim Penggerak PKK (TP PKK) yang berada di tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan. Pada level daerah, TP PKK yang diketuai oleh isteri Pimpinan Daerah.

Cakupan PKK aktif di DIY sejak tahun 2016 menunjukkan angka yang menggembirakan dimana dari 522 kelompok PKK seluruhnya tergolong aktif (100%) seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-68 Jumlah PKK Aktif di DIY Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%
Kota Yogyakarta	60	60	100
Kab Bantul	93	93	100
Kab Kulon Progo	101	101	100
Kab Gunungkidul	163	163	100
Kab Sleman	104	104	100
DIY	1	1	100
Jumlah DIY	522	522	100

Sumber: BPPM, 2017

Gerakan PKK menjangkau keluarga melalui "Kelompok Dasawisma", yaitu kelompok 10 – 20 KK yang berdekatan. Ketua Kelompok Dasawisma dipilih dari dan oleh anggota kelompok. Ketua Kelompok Dasawisma membina sepuluh rumah dan mempunyai tugas menyuluh, menggerakkan dan mencatat kondisi keluarga yang ada dalam kelompoknya, seperti adanya ibu hamil, ibu menyusui, balita, orang sakit, orang yang buta huruf dan sebagainya. Informasi dari semuanya ini selanjutnya disampaikan kepada kelompok PKK setingkat diatasnya, yang akhirnya sampai di Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.

2.1.3.1.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan harus meletakkan penduduk sebagai target dan juga sebagai pelaku pembangunan. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengatur agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip "Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan" dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Kebijakan kependudukan dibagi menjadi 5 (lima) klaster, yaitu :

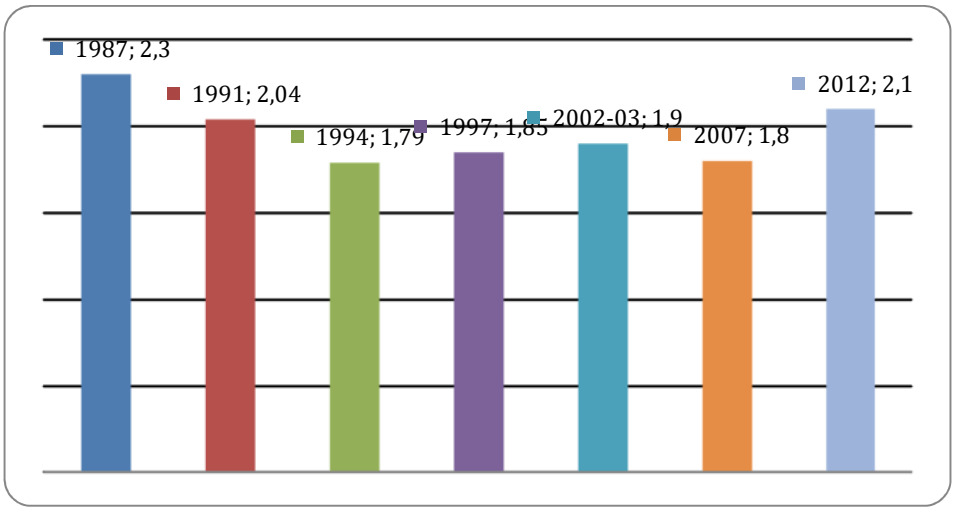
a. pengendalian kuantitas penduduk;
b. peningkatan kualitas penduduk;
c. pembangunan keluarga;
d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
e. penataan administrasi kependudukan.

Dalam kaitannya dengan pembahasan di dalam tulisan ini, dengan melihat dari sudut pandang tersebut bahasan mengenai pengendalian penduduk di DIY perlu memperhatikan beberapa indikator utama yang dapat menggambarkan pengendalian kuantitas penduduk, yaitu angka fertilitas dan perubahan

komposisi penduduk yang menyebabkan perubahan angka ketergantungan penduduk. Sementara itu, pembahasaan mengenai keluarga berencana perlu meliputi beberapa pencapaian utama dan isu strategis dalam pembangunan bidang ini, yakni akseptor KB dan *unmet need*.

2.1.3.1.14.1 Angka Fertilitas atau Total Fertility Rate

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah dengan pencapaian angka kelahiran yang sangat rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), setelah mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 1987 hingga tahun 1994, *Total Fertility Rate* (TFR) DIY kembali mengalami kenaikan perlahan mulai tahun 1997 hingga tahun 2012. Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY. Namun, peningkatan ini masih dalam taraf yang positif. Angka TFR 2,1 sebagaimana ditunjukkan pada tahun 2012 sesuai dengan misi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 yang ditandai dengan TFR 2,1 dan *Net Reproduction Rate* (NRR) sebesar 1.



Sumber : SPI, 1986; SDKI 1991, 1994, 1997, 2002/2003, dan 2012

Gambar 2-52 Perubahan TFR di DIY Berdasarkan SDKI

2.1.3.1.14.2 Akseptor KB

Dalam Kamus Kependudukan & Keluarga Berencana (BKKBN, 2015), dijelaskan bahwa akseptor merupakan Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang

menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi. Sementara, rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama di suatu wilayah. Besarnya angka rasio akseptor memproyeksikan seberapa besar upaya pengendalian jumlah penduduk di sebuah wilayah. Di DIY, rasio akseptor KB DIY sejak tahun 2011 hingga 2016 tercatat fluktuatif namun tetap berada pada kisaran 78-80.

Tabel 2-69 Tabel Rasio Akseptor KB Tahun 2010-2016

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Peserta KB	432.989	438.788	441.981	441.858	431.418	431.813
Jumlah Pasangan Usia Subur	549.894	552.422	553.395	552.008	543.115	549.542
Rasio	78,74	79,43	79,87	80,05	79,43	78,58

Sumber : BKKBN Perwakilan DIY Tahun 2017

2.1.3.1.14.3 Unmet Need.

Unmet need adalah perempuan berstatus menikah yang kebutuhan pelayanan KBnya tidak terpenuhi. Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa 11% perempuan berstatus menikah di Indonesia mempunyai kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi. Di antara mereka, 4% sesungguhnya ingin menunda kelahiran berikutnya untuk jangka waktu 2 tahun atau lebih, dan 7% sebenarnya tidak ingin mempunyai anak lagi. Namun, mereka memiliki beberapa alasan yang menyebabkan tidak melakukan KB, yang antara lain meliputi kekhawatiran terhadap kegagalan kontrasepsi dan kesulitan dalam mengakses pelayanan kontrasepsi.

Secara keseluruhan, *unmet need* DIY tahun 2016 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil SDKI 2012. Berdasarkan hasil SDKI 2012, DIY memiliki *unmet need* di atas rata-rata nasional yaitu 11,5 persen. Kemudian pada tahun 2016 unmet need DIY tercatat 8,01 persen. Capaian *Unmet Need* DIY yang semakin turun menandakan semakin tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan semakin mudahnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi. Namun penurunan ini belum mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015 yang menargetkan capaian *Unmet Need* sebesar 5%. Dengan demikian, masih dibutuhkan upaya ekstra keras untuk mencapainya, terlebih karena *unmet need* ini berkorelasi dengan Kehamilan

yang Tidak Diinginkan (KTD) yang pada level tertentu dapat mendorong peningkatan angka kematian ibu khususnya yang disebabkan oleh praktik aborsi yang tidak aman.

Tabel 2-70 *Unmet Need* KB di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016

Lokasi	*Unmet Need*		
	2014	2015	2016
DIY	7,39	7,73	8,01
Kulon Progo	6,45	7,16	6,84
Bantul	6,17	5,72	5,87
Gunungkidul	7,10	8,27	7,93
Sleman	8,67	8,68	9,73
Kota Yogyakarta	9,25	10,39	11,40

Sumber : BKKBN Perwakilan DIY Tahun 2017

2.1.3.1.15 Urusan Perhubungan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah harus didukung oleh sistem transportasi yang baik, dengan kata lain sektor transportasi harus direncanakan untuk menjawab tujuan pembangunan wilayah. Dalam konteks pembangunan di wilayah DI Yogyakarta, transportasi direncanakan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di DI Yogyakarta tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di DI Yogyakarta, yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya, artinya transportasi harus menjadi bagian dari pendidikan, wisata dan budaya.

Tujuan pembangunan urusan perhubungan tersebut memiliki 4 (empat) indikator besar yakni :

a. Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum;
b. Penerapan manajemen lalulintas perkotaan pada kawasan prioritas;
c. Keselamatan Transportasi;
d. Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran.

Penyediaan layanan angkutan umum merupakan upaya pemerintah untuk memfasilitasi mobilitas orang maupun barang. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menekan tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di jalan yang menyebabkan kemacetan lalulintas

Pelayanan angkutan umum dalam trayek diselenggarakan untuk melayani perkotaan dan kota-kota sekitarnya. Pemerintah Daerah DIY melalui layanan

Trans Jogja dengan *konsep buy the service*-nya diselenggarakan untuk melayani kawasan perkotaan Yogyakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sampai dengan tahun 2018 cakupan layananan Trans Jogja telah menjangkau 22 kecamatan dari keseluruhan 25 kecamatan di area Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan operasionalisasi 128 armada pada 17 jalur.

Sampai dengan tahun 2017, penumpang yang terlayani oleh Trans Jogja adalah sebagai berikut.

Tabel 2-71 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2008-2017

No.	TAHUN	PENUMPANG TERANGKUT	
		Trans Jogja	
		penumpang/hari	penumpang/tahun
1.	2008	5.172	3.785.964
2.	2009	7.007	5.114.809
3.	2010	7.993	5.834.976
4.	2011	8.239	6.014.334
5.	2012	8.720	6.382.802
6.	2013	8.365	6.106.162
7.	2014	8.913	6.506.290
8.	2015	9.335	6.468.678
9.	2016	8.824	6.409.205
10.	2017	7.321	5.317.484

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, Tahun 2017

Data untuk angkutan reguler perkotaan tidak tersedia karena operasional dari penyedia layanannya tidak beroperasi secara reguler.

Untuk mendukung integrasi pelayanan angkutan umum di DIY, sampai dengan tahun 2018 terbangun Transfer Point/Park and Ride sebagai simpul integrasi antar moda angkutan umum perkotaan dan AKDP dan telah direncanakan penambahan 2 Transfer Point/Park and Ride baru sebagai langkah mencapai pelayanan ke semua kecamatan di kawasan perkotaan Yogyakarta.

Tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor dan tidak adanya kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor di jalan, menyebabkan masyarakat masih leluasa untuk menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan aktifitas dan mobilitas mereka. Dengan kata lain, penyediaan sarana angkutan umum yang baik, tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung oleh adanya pengaturan dan penataan manajemen rekayasa lalulintas yang ber-sinergi pada layanan angkutan umum, termasuk didalamnya adalah mengurangi

pergerakan kendaraan bermotor pribadi di jalan.

Untuk mempermudah pergerakan angkutan umum dan mengatur pergerakan lalulintas di persimpangan, telah dilakukan penanganan pada kawasan-kawasan prioritas melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas. Mulai tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan dengan konsep ATCS (area traffic control systems) dimana dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan Tahun 2017 telah terpasang 73 unit ATCS atau 63 % dari 116 simpang di wilayah Perkotaaan DIY yang direncanakan. Sedangkan penanganan simpang yang menggunakan dana APBD adalah 30 Simpang, dan yang telah ditangani dengan pemasangan ATCS adalah sebanyak 15 simpang atau 50% dari jumlah kebutuhan. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini, didukung dengan sinyal *bus priority*, sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung sinyal *bus priority*. Integrasi sistem pengaturan lampu lalulintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di Dinas Perhubungan DIY.

Berdasarkan table perbandingan nilai V/C Ratio dibawah, dapat diketahui bahwa secara umum terjadi kenaikan nilai V/C Ratio pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2015. Sekitar separuh dari ruas jalan yang di lakukan pendataan, nilai V/C Rationya pada tahun 2017 berada pada kisaran angka 0,85 – 1, angka tersebut menggambarkan tingkat pelayanan dengan arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti, permintaan sudah mendekati kapasitas. Hal ini diakibatkan karena semakin bertambahnya volume (jumlah kendaraan) pada tiap tahunnya namun tidak diiringi dengan penambahan kapasitas jalan.

Tabel 2-72 Perbandingan Nilai V/C Ratio Tahun 2015 - 2017

No	Nama Jalan	Arah Ke	V/C Ratio 2015	V/C Ratio 2016	V/C Ratio 2017	Selisih V/C	Keterangan
1	Jalan Solo depan Kecamatan Kalasan	Timur	0.49	0.47	0.93	0.46	Naik
		Barat	0.63	1.41	0.98	-0.43	Turun
2	Jalan Solo depan Transmart	Timur	0.69	0.57	0.82	0.25	Naik
		Barat	0.92	0.96	0.87	-0.09	Turun
3	Jalan Adisucipto depan Amplaz	Timur	0.79	1.6	0.87	-0.73	Turun
		Barat	0.58	0.64	1.03	0.39	Naik
4	Jalan Magelang depan Lap Wahidin	Selatan	0.46	0.54	1.00	0.46	Naik
		Utara	0.63	0.76	0.79	0.03	Naik
5	Jalan Magelang depan TVRI	Selatan	0.52	0.56	0.62	0.06	Naik
		Utara					
6	Jalan Wates depan Delingmas	Timur	0.36	0.48	0.97	0.49	Naik
		Barat	0.71	0.76	0.88	0.12	Naik
7	Jalan Wates depan Bayeman	Timur	0.38	0.48	0.85	0.37	Naik
		Barat	0.92	0.56	0.77	0.21	Naik
8	Jalan Wonosari depan Garasi PO Maju Lancar	Timur	0.7	0.84	0.79	-0.05	Turun
		Barat					
9	Jalan Wonosari depan Pasar Piyungan	Timur	0.7	0.43	0.69	0.26	Naik
		Barat					
10	Jalan Rejowinangun Barat Simpang Ketandan	Timur	0.85	0.37	0.46	0.09	Naik
		Barat					
11	Jalan Kaliurang depan PLN	Selatan	0.78	0.73	0.75	0.02	Naik
		Utara					
12	Jalan Kaliurang depan RM Sederhana	Selatan	0.47	0.48	0.97	0.50	Naik
		Utara					
13	Jalan Gejayan depan Bebek Slamet	Selatan			0.86		
		Utara			0.53		
14	Jalan Monjali depan Hyatt	Selatan	0.34	0.35	0.89	0.55	Naik
		Utara					
15	Jalan AM Sangaji depan MUHI	Selatan	0.34	0.24	0.97	0.74	Naik
		Utara					
16	Jalan Imogiri Timur depan Brimob	Selatan	0.48	0.60	0.61	0.02	Naik
		Utara			0.61	0.02	Naik
17	Jalan Imogiri Timur Utara Terminal Giwangan	Selatan	0.36	0.33	0.41	0.09	Naik
		Utara					
18	Jalan Godean depan Giant Swalayan	Timur	0.45	0.46	0.92	0.46	Naik
		Barat					
19	Jalan Godean depan Ruko Bantulan	Timur	0.44	0.50	0.85	0.35	Naik
		Barat					
20	Jalan Seturan depan STIE YKPN	Selatan		0.52	0.70	0.18	Naik
		Utara					
21	Jalan Menteri Supeno	Timur			0.51		
		Barat			0.46		
22	Jalan Raya Tajem	Selatan		0.29	0.45	0.16	Naik
		Utara					
23	Jalan Kusumanegara	Timur		0.355	0.98	0.63	Naik
		Barat					
24	Jalan Selokan Mataram depan OB	Timur		0.37	1.01	0.64	Naik
		Barat					
25	Jalan Bantul depan Pasar Niten	Selatan	0.25	0.47	0.91	0.44	Naik
		Utara					
26	Jalan Bantul depan SPBU Dukuh	Selatan	0.475	0.38	0.94	0.56	Naik
		Utara					
27	Jalan Paris depan ISI	Selatan	0.38	0.66	0.90	0.24	Naik
		Utara					
28	Jalan Paris depan Eks Stiekers	Selatan	0.31	0.275	0.81	0.53	Naik
		Utara					
29	Jalan Imogiri Barat Utara Simpang Wojo	Selatan	0.39	0.41	0.95	0.54	Naik
		Utara					

No	Nama Jalan	Arah Ke	V/C Ratio 2015	V/C Ratio 2016	V/C Ratio 2017	Selisih V/C	Keterangan
30	Jalan Imogiri Barat Selatan Simpang Wojo	Selatan	0,38	0,485	0,84	0,35	Naik
		Utara					
31	Jalan Prambanan - Piyungan	Selatan	0,21	0,2	0,34	0,14	Naik
		Utara					
32	Jalan Berbah - Kalasan depan PT MAK	Selatan			0,66		
		Utara					
33	Jalan Colombo depan GOR UNY	Timur			0,66		
		Barat					
34	Jalan Jambon depan SKE	Timur			0,33		
		Barat					
35	Jalan Babarsari depan Ruko Babarsari	Timur			0,93		
		Barat					
36	Jalan Kabupaten depan Mansion	Selatan			0,80		
		Utara					
37	Jalan Kebon Agung depan Youth Center	Timur			0,75		
		Barat					
38	Jalan Raya Cangkringan depan Bapelkes	Selatan			0,41		
		Utara					
39	Jalan Pleret depan Balong Waterpark	Selatan		0,78	0,84	0,06	Naik
		Utara					
40	Jalan Dr Sutomo	Selatan			1,01		
		Utara					
41	Jalan Mataram	Selatan			0,89		
		Utara					
42	Jalan HOS Cokroaminoto	Selatan			0,37		
		Utara					
43	Jalan Gedong Kuning depan Dagadu	Selatan			0,23		
		Utara					
44	Jalan Timoho depan APMD	Selatan			0,90		
		Utara					
45	Jalan Ci Di Tiro depan YAP	Selatan			0,58		
		Utara			1,04		
46	Jalan Veteran	Selatan			0,49		
		Utara					
47	Jalan Tamansiswa depan LP	Selatan			0,57		
		Utara					
48	Jalan Kapten P Tendean depan Sakola	Selatan			0,74		
		Utara			0,60		
49	Jalan Malioboro depan Kepatihan	Selatan			0,93		
50	Jalan Pasar Kembang depan Hotel Neo	Timur			0,85		
		Barat					

2.1.3.1.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang perlu disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan dan kinerja Badan

Publik terkait, serta laporan keuangan. Penyebarluasan informasi publik selanjutnya ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan PPID DIY dalam penyebarluasan informasi publik dapat di akses melalui portal ppid.jogjaprov.go.id. Informasi yang tersedia di dalam portal PPID dikategorikan ke dalam 3 jenis, yaitu :

1. Informasi berkala, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang disusun secara berkala seperti laporan keuangan, renstra, laporan tahunan OPD, serta regulasi-regulasi baru terkait tugas dan fungsi OPD
2. Informasi serta merta, yang terdiri dari informasi terkait kejadian bencana serta informasi seperti pengumuman lomba yang diadakan oleh OPD atau pengumuman seleksi terbuka jabatan tinggi ASN
3. Informasi setiap saat, yang terdiri dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY dalam bentuk regulasi yang masih berlaku

Di samping itu, penyebarluasan informasi publik juga dilakukan melalui fungsi Humas (Hubungan Masyarakat) yang ada di Pemda DIY. Selain menyebarluaskan informasi melalui portal resmi Pemda DIY yang dapat diakses di jogjaprov.go.id, Pemda DIY juga memanfaatkan media sosial seperti twitter dan instagram untuk mempublikasikan berita-berita terkait kegiatan pemda.

Pada tahun 2017, Pemda DIY melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengembangkan informasi pembangunan terintegrasi melalui *Integrated Development Management Center (IDMC)* (idmc.jogjaprov.go.id). Portal IDMC menyediakan informasi pembangunan pada fase perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, portal ini juga mengintegrasikan e-Lapor yang merupakan aplikasi pengaduan pelayanan publik dan informasi *surveillance* yang terkoneksi ke beberapa titik CCTV yang ada di wilayah DIY.

Informasi *surveillance* mengintegrasikan ATCS (*Area Traffic Control System*), CCTV Kominfo dan UPT Malioboro. Beberapa lokasi yang dapat dipantau melalui informasi *surveillance* adalah sebagai berikut :

1. Babarsari
2. Badran
3. Condong Catur
4. Janti
5. Kentungan
6. Maguwo
7. Monjali
8. Serangan
9. Alun-alun Selatan

10. Alun-alun Utara
11. Candi Prambanan
12. Gunung Merapi
13. Malioboro
14. Pantai Parangtritis
15. Tugu

Tabel 2-73 Data terkait Urusan Komunikasi dan Informatika

Data	Tahun 2017
Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	75%
Persentase penyediaan jaringan IT di Pemda DIY	90%
Persentase pengakses aktivitas pemda melalui web, media elektronik dan media cetak	90%

Sumber : bappeda.jogjaprov.go.id/dataku, 2018

Salah satu konsep pembangunan yang cukup penting untuk dilaksanakan pada urusan komunikasi dan informatika adalah konsep "Jogja Smart Province", yang meliputi penetrasi layanan internet, penyediaan data pemerintahan dan layanan publik di kabupaten/kota, serta pembangunan akses wifi di tempat publik.

Jogja Smart Province memiliki 3 tujuan utama, yaitu peningkatan kualitas hidup, peningkatan keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Beberapa standart dan pendekatan dalam konsep smart province meliputi *open data, system connectivity, open standard, information governance, data management, data analytic* dan *sensor network and control*. Nilai utama dari konsep ini adalah keterbukaan data, peningkatan pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan, serta konektivitas antar sistem yang sudah ada. Keberadaan sistem informasi di berbagai sektor pelayanan publik di DIY pada saat ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-74 Pengembangan Sistem Informasi di DIY

Kode	Dinas	SI Support		SI Operasional		SI Strategic	
		Persentase	Qty	Persentase	Qty	Persentase	Qty
DIKPORA	Pendidikan, Pemuda & Olahraga	0	0	72	14	75	4
PN	Pertanian	0	4	80	10	33	12

Kode	Dinas	SI Support		SI Operasional		SI Strategic	
		Persentase	Qty	Persentase	Qty	Persentase	Qty
KESHTN	Kesehatan	40	5	100	13	66	3
HUB	Perhubungan	0	5	70	10	0	5
PARWI	Pariwisata	100	4	100	10	25	4
INDAG	Perindustrian & Perdagangan	50	4	80	10	0	3
KUMKM	Koperasi & UMKM	0	0	0	0	0	0
PERIKN	Perikanan & Kelautan	0	6	90	10	0	4
KPM	Kerjasama & Penanaman Modal	80	5	91	11	50	4
BUD	Kebudayaan	0	5	35	6	50	6
NAKER	Ketenagakerjaan & Transamigrasi	25	4	85	12	50	4
P-UPES	P-UP & ESDM	25	9	35	21	85	6
HUTBUN	Kehutanan & Perkebunan	0	8	0	8	0	7
SOS	Sosial	0	2	95	19	80	5
LH	Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2018

Keberadaan sistem informasi di berbagai sektor pelayanan publik di DIY dapat menjadi cikal bakal penerapan *Jogja Smart Province*, dan karenanya integrasi berbagai sistem informasi tersebut menjadi hal yang penting.

2.1.3.1.17 Urusan Koperasi,Usaha kecil,dan Menengah

Jumlah Koperasi aktif di DIY memiliki trend positif dalam kurun waktu 2013 – 2016. Namun demikian, pada tahun 2017 jumlah Koperasi aktif di DIY mengalami penurunan sebesar 645 unit (26,58%) dibandingkan dengan tahun 2016 dengan jumlah koperasi aktif mencapai 2.427 unit. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembubaran Koperasi sebanyak 414 koperasi pada tahun 2017 . Jumlah koperasi aktif di DIY mencapai rasio 75% dari total jumlah Koperasi di DIY.

Jumlah koperasi pasif di DIY juga mengalami kenaikan dari semula 311 unit pada tahun 2016 menjadi 598 unit pada tahun 2017 disebabkan oleh banyaknya koperasi aktif yang kinerjanya menurun menjadi pasif. Sementara itu, kinerja

koperasi berdasarkan volume usaha pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 794.458 juta rupiah (18%) dibanding dengan volume usaha pada tahun 2016 sebesar 4.473.800 juta rupiah. Hal tersebut merupakan imbas dari adanya penurunan koperasi aktif yang terjadi selama kurun waktu satu tahun.

Tabel 2-75 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Koperasi Aktif	2.176	2.269	2.369	2.427	1.782
Koperasi Pasif	499	341	316	311	598
Koperasi Beku	58	-	-	-	-
Modal Sendiri (Rp Juta)	1.440.948	594.124	1.318.800	1.139.942	1.200.158
Modal Luar (Rp Juta)	572.159	830.210	2.320.866	1.835.173	2.085.166
Volume Usaha (Rp Juta)	2.320.617	2.586.506	3.599.547	4.473.800	3.679.342

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2018

Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY mengalami pertumbuhan positif rata-rata 5% dalam lima tahun terakhir. Tercatat jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 2.206 unit usaha (4,02%) dari semula 238.619 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 248.217 unit usaha pada tahun 2017. Apabia dinilai dari aspek jenis usaha, sebaran terbanyak Usaha Kecil Menengah (UKM) berasal dari sektor perdagangan sebesar 28,52% dari total UKM di DIY dengan jumlah usaha sebanyak 70.794 unit usaha, diikuti oleh diikuti oleh sektor Industri Pertanian (27,20%), sektor Industri non Pertanian (22,61%), serta sektor aneka usaha sebesar (21,67%)

Tabel 2-76 Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2013-2017

No	Jenis Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Aneka Usaha	44.452	47.810	49.923	51.780	54.649
2	Perdagangan	58.601	63.025	65.610	68.054	69.486
3	Industri Pertanian	55.767	59.976	62.519	64.857	64.523
4	Industri Non Pertanian	46.390	49.892	51.995	53.928	59.559
	Jumlah	205.210	220.703	230.047	238.619	248.217

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2018

Sementara apabila diukur dari aspek skala usaha, kelompok usaha mikro mendominasi jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan jumlah 135.799 unit usaha (54,71%) dari total jumlah UKM di DIY. Diikuti oleh kelompok usaha kecil (24,99%), kelompok usaha menengah (15,10%), dan yang terkecil berasal dari sektor usaha besar dengan persentase sebesar (5,20%). Hal tersebut

menunjukkan peran strategis usaha mikro dan kecil dalam struktur perekonomian DIY di mana sekitar 79,80% unit bisnis di DIY merupakan usaha mikro dan kecil. Keberadaan UMKM dirasa mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan menghidupkan usaha-usaha lokal pendukung lainnya. Selain itu, UMKM dipercaya memiliki ketahanan ekonomi atau resiliensi yang tinggi, sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

Meskipun memiliki jumlah unit usaha yang cukup besar, jika dilihat dari nilai omsetnya, total onset Usaha Kecil masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan usaha menengah dan besar. Hal ini perlu menjadi perhatian, bahwa selain menumbuhkan kuantitas usaha kecil, perlu adanya upaya peningkatan kelas dari UKM. Berdasarkan data dari dinas Koperasi dan UKM, total omset usaha mikro di DIY mencapai 8,1 Milyar dan usaha kecil mencapai 29,5 milyar. Sementara itu, untuk usaha kelas menengah mencapai 109 milyar dan usaha besar mencapai 683,5 milyar

Tabel 2-77 Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2013-2017

No	Skala Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Usaha Mikro	111.912	120.725	125.863	130.525	135.799
2	Usaha Kecil	51.459	55.176	57.412	59.655	62.042
3	Usaha Menengah	31.121	33.326	34.737	36.031	37.472
4	Usaha Besar	10.718	11.476	11.962	12.408	12.904
	Jumlah	205.210	220.703	230.047	238.619	248.217

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2018

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Penumbuhan dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah perlu didorong dan diarahkan agar segera membentuk atau tergabung dalam sebuah wadah koperasi karena kedepannya peran koperasi akan dioptimalkan sebagai wadah untuk menampung dan mengembangkan hasil produksi sektor UKM termasuk dalam hal pengadaan bahan baku.

2.1.3.1.18 Urusan Penanaman Modal

Salah satu keberhasilan pembangunan suatu negara (daerah) adalah aspek pembangunan ekonomi, yang diukur dengan kinerja ekonomi makro. Secara teori, kinerja ekonomi makro ditentukan oleh empat indikator utama, yaitu:

a. Pertumbuhan ekonomi, mengukur perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan indikator tingkat ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat.
b. Pengangguran (kesempatan kerja), mengukur seberapa jauh kemampuan perekonomian wilayah menyerap perkembangan angkatan kerja sehingga tingkat pengangguran menurun.
c. Inflasi, mengukur tingkat stabilitas harga untuk mengukur stabilitas ekonomi dan nilai riil dariPDB maupun pertumbuhan riilnya.
d. Perdagangan internasional, mengukur kapasitas ekonomi relatif dibanding dengan wilayah partner dagangnya.

Dari keempat indikator tersebut, investasi merupakan variabel penopang untuk mencapainya. Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkam modalnya disuatu daerah berikut serapan tenaga kerja local dan asing. Tentu saja untuk tingkat daerah semakin banyak PMDN dan serapan Tenaga kerja lokal lebih diutamakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyrakat lokal dan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun demikian peran PMA dan tenaga kerja asing tetap diperlukan untuk lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi karena seringnya pemodal asing nilai investasinya bisa lebih besar dan dengan tenaga kerja asing yang masuk ada percepatan pertukaran ilmu dan pemahaman akan tekonogi baru

Investasi DIY diutamakan untuk industri-industri berbasiskan keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif serta industri yang ramah lingkungan. Sehingga dalam perkembangannya, investasi yang tumbuh di DIY sesuai dengan daya dukung lingkungan.

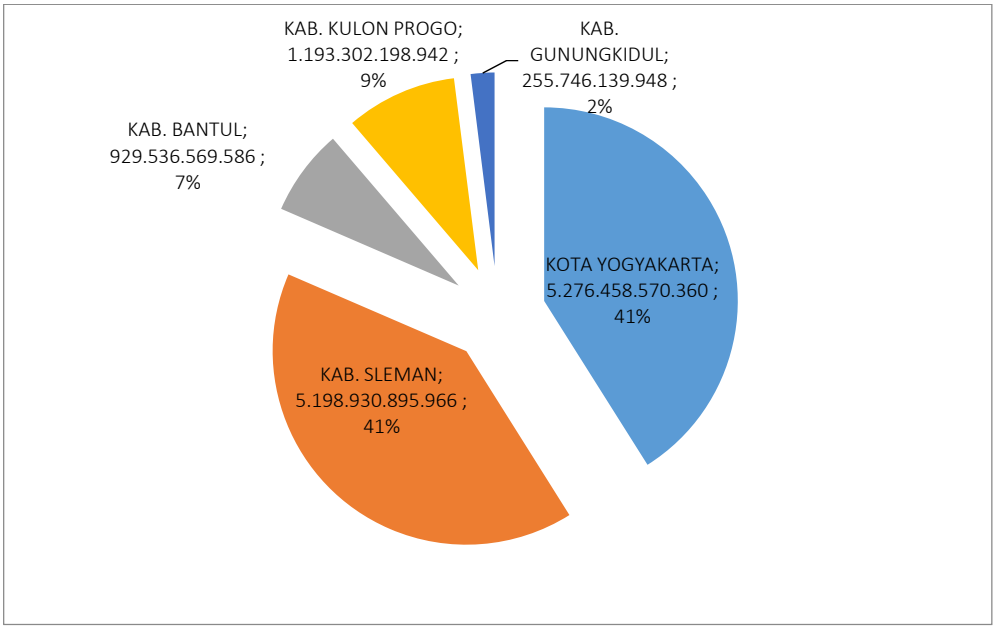
Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima terakhir menunjukan pertumbuhan yang positif walapun baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti yang ditunjukan dalam tabel di bawah ini. Tahun 2017 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 6,43%. Total investasi di DIY tahun sampai dengan tahun 2017 adalah Rp. 12,853 trilyun Adapun jumlah Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 345 perusahaan, yang terdiri dari 183 PMA dan 162 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 54.247 TKI dan 222 TKA.

Tabel 2-78 Perkembangan Investasi di DIY Tahun 2013-2017

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	*Growth* (Rp000)	*Investation Growth* (%)
s.d 2013	2.864.654.491	5.203.115.642	8.067.770.134	1.011.703.992	14,34
s.d 2014	3.568.546.291	5.955.853.842	9.524.400.134	1.456.630.000	18,05
s.d 2015	3.951.662.458	7.271.740.783	11.223.403.242	1.699.003.107	17,83
s.d 2016	4.522.819.693	7.554.841.971	12.077.661.664	854.258.422	7.61
s.d 2017	4.817.449.093	8.036.525.361	12.853.974.454	776.312.790	6,43

Sumber: BKPM DIY, Tahun 2018

Meskipun secara keseluruhan investasi di DIY mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari komposisi presentasi di kabupaten/kota masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk lebih meratakan sebaran ivestasi di wilayah DIY agar gap kesejahteraan masyarakat di kab/kota semakin kecil.



Gambar 2-53 Persentase Realisasi Investasi Hingga Tahun 2017 Per Kabupaten/Kota

2.1.3.1.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan sektor olahraga dan pemuda diyakini mampu membangun kualitas sumber daya manusia. Sektor olahraga dan pemuda mengajarkan nilai-nilai positif seperti kreatif, disiplin, tanggung jawab, kritis, sportif, kompetitif dan mendukung pembentukan karakter manusia. Keolahragaan dan kepemudaan yang dikelola dan dibina dengan baik akan mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, ekonomi dan psikologis yang merupakan landasan yang kuat untuk menyatakan bahwa sektor tersebut merupakan instrumen yang ampuh untuk melaksanakan pembangunan yang seimbang antara material dan spiritual.

Dari sisi sosial diakui bahwa sektor kekeolahragaan merupakan sebuah aktivitas dinilai potensial untuk memperkuat integrasi daerah. Keolahragaan mengajarkan dari sebuah kelompok kecil seperti misalnya sebuah tim sepakbola, sebuah komitmen bersama pada satu tujuan bersama yang dapat ditingkatkan ke tingkat kerjasama dalam cakupan yang lebih besar seperti kehidupan bermasyarakat sebuah daerah. Itulah sebabnya keolahragaan, seperti yang sering kita alami dalam olah raga kompetitif, dipandang ampuh untuk membangun persatuan dan kesatuan nasional.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Upaya pemerintah ini sangat penting dalam memajukan kegiatan dibidang olahraga, selain merupakan sarana peningkatan prestasi baik untuk lokal, regional, nasional maupun internasional. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Olahraga dalam konteks pembinaan keolahragaan di DIY. Daerah Istimewa Ygyakarta memiliki potensi keolahragaan yang cukup menjanjikan dengan sumber daya manusia khususnya untuk mencetak atlit-atlit yang berbakat. Hal ini terbukti dengan naiknya peringkat DIY pada kompetisi POPNAS dari peringkat 11 pada tahun 2016 menjadi peringkat 9 tahun 2017. Pencapaian ini merupakan hasil dari pembinaan dan pengelolaan atlet yang dimiliki oleh DIY. Pada tahun 2017, DIY melakukan pembinaan sebanyak 210 atlet adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-79 Jumlah Atlet di DIY Tahun 2017

Cabang Olahraga	Jumlah Atlet
Atlet Angkat Besi	2
Atlet Atletik	12
Atlet Bola Basket Putra	12
Atlet Bola Basket Putri	12
Atlet Bola Voli Putra	12
Atlet Bola Voli Putri	12
Atlet Bulutangkis	8
Atlet Dayung	4
Atlet Gulat	4
Atlet Judo	9
Atlet Karate	6
Atlet Panahan	18
Atlet Pencak Silat	17
Atlet Renang	8
Atlet Senam	4
Atlet Sepak Bola	18
Atlet Sepak Takraw	17
Atlet Tae Kwon Do	12
Atlet Tarung Drajat	7
Atlet Tenis	8
Atlet Tinju	4
Atlet Voli Pasir Putra	2
Atlet Voli Pasir Putri	2
Grand Total	210

Sumber: Disdikpora DIY, 2017

Pengelolaan sektor pemuda tidak kalah penting dalam pengelolaan Ssumber daya manusia. Pembangunan Kepemudaan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan karena diyakini bahwa produksi sumber daya manusia dihasilkan pada tahap usia produktif antara 16-30 tahun (pemuda). Beberapa ahli telah menyampaikan bahwa pengelolaan kepemudaan merupakan modal SDM (*human capital*) sebuah bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengelola *human capital* dengan baik. Upaya pengelolaan kepemudaan dilakukan dengan pembinaan kelompok pemuda yang

meliputi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

Tabel 2-80 Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga dan Sarana Olah Raga di DIY

Uraian	Tahun						Satuan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Organisasi Kepemudaan	35	37	39	40	40	40	Buah
Jumlah Karang Taruna	440	440	440	440	440	440	Buah
Jumlah Organisasi Olah Raga	50	50	50	50	50	50	Buah
Sarana Olah Raga							
1) Standar Internasional	0	0	0	0	0	0	Unit
2)Standar Nasional	3	3	3	3	3	3	Unit

Sumber : Disdikpora DIY, 2017

2.1.3.1.20 Urusan Statisik

Ketersediaan data dan informasi yang andal dan terpercaya adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah perencanaan. Data dan informasi yang berkualitas menjadi sumber informasi tentang kondisi berbagai hal yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait dalam memahami permasalahan dan tantangan. Hal itu memberikan andil penting dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pamantauan dan evaluasi agar sasaran untuk memperbaiki keadaan maupun mengatasi masalah yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pengumpulan sampai dengan penyediaan data dan informasi merupakan aspek penting dalam pembangunan pada urusan Statistik.

Jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS.

Bappeda DIY merupakan instansi Pemerintah Daerah DIY yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral, Bappeda melakukan koordinasi dengan BPS, instansi vertikal lain dan SKPD provinsi/kabupaten/kota di DIY. Penyelenggaraan kegiatan statistik ini

dituangkan dalam program Pengembangan Statistik Daerah serta Pengelolaan Data dan Statistik Daerah yang dilaksanakan secara teknis oleh Balai Statistik Daerah yang merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari Bappeda DIY.

Salah satu isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah adalah belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel. Untuk itu diperlukan program yang mendukung optimalnya ketersediaan data. Upaya peningkatan kualitas data DIY dalam rangka mensasar isu strategis tersebut menghadapi beberapa permasalahan baik permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang menonjol adalah terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Lebih lanjut lagi, permasalahan terkait urusan statistik dalam mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan data statistik yang tidak tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan baik untuk perencanaan maupun pengendalian pembangunan. Data yang dibutuhkan dalam perencanaan adalah data n-5 hingga n+2 sementara itu data yang tersedia baru sampai n-1. Sementara itu, beberapa data capaian indikator yang menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah ketersediaannya bergantung pada pihak di luar kewenangan Pemerintah;
2. Urusan statistik di daerah ditangani secara bersama antara BPS, SKPD di daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sehingga dalam rangka pertanggungjawaban produk data, sering terjadi perbedaan angka atau data. Hal tersebut disebabkan antara lain karena perbedaan definisi data.

Sebagai solusi atas permasalahan di atas, ada beberapa hal yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi data perencanaan dilaksanakan penyusunan analisis untuk menyediakan analisis lebih lanjut terhadap data termasuk penyediaan data proyeksi;
2. Perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antar berbagai pemangku TUPOKSI penyedia data, agar terjadi komunikasi yang jelas dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik;
3. Telah dibentuk UPT yang secara khusus menangani kegiatan teknis terkait statistik daerah di SKPD Bappeda DIY, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Pewujudan satu data pembangunan untuk mewujudkan satu *data base* pembangunan yang dapat diacu oleh berbagai pihak yang membutuhkan

data dengan menyediakan data seragam untuk menghindari duplikasi data dan sesuai dengan kebutuhan.

Secara teknis, upaya menerapkan solusi tersebut dimandatkan kepada UPT Balai Statistik Daerah melalui dua program yang dilaksanakannya. Program-program tersebut di antaranya menghasilkan produk beberapa kajian yang menganalisis lebih lanjut data berupa antara lain Analisis ICOR dan Analisis Makroekonomi DIY, serta pengelolaan sistem aplikasi Jogja Dataku dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang diamanatkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2.1.3.1.21 Urusan Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

Tabel 2-81 Realisasi Kinerja Urusan Persandian di DIY Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017	Target Akhir RPJMD 2017
Sandiman yang memiliki kompetensi persandian profesi dari sandi negara	20%	50%	60%	n.a.*	100%	100%

Sumber:http://monevapbd.jogjaprov.go.id/

*Ket.: n.a. karena terjadi perubahan indikator sasaran SKPD akibat *review* RPJMD 2012-2017

2.1.3.1.22 Urusan Kebudayaan

Konsep pembangunan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dirangkum dalam Perdais 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan kebudayaan. DIY sebagai pelopor dalam penyusunan kebijakan kebudayaan dapat dibuktikan dengan keberhasilannya menerjemahkan Revolusi Mental dalam Nawacita ke dalam kebijakan pembangunan segala bidang di DIY yang berpayung hukum pada kebudayaan.

2.1.3.1.22.1 Budaya Benda

Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan pelestarian cagar budaya dapat dilihat dari telah dijabarkannya UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ke

dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Upaya pelestarian cagar budaya di DIY diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Pergub DIY No. 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Pergub DIY No. 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pelestarian kawasan cagar budaya ini juga diperkuat oleh UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Perdais No 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perdais No 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, SK Gubernur DIY No 108/Kep/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Sepanjang Sumbu Filosofi sebagai Struktur Cagar Budaya.

Upaya pelindungan cagar budaya dilakukan dengan Kepala Dinas Kebudayaan DIY membuat surat ketetapan tentang cagar budaya, yaitu SK Kepala Dinas Kebudayaan DIY Nomor 188/38.A./2014, pendataan cagar budaya ke dalam www.jogjabudaya.com, aplikasi Jogja Cagar SIT. Pendataan bertujuan untuk memastikan semua objek benda yang bernilai sejarah dan kebudayaan dapat terpelihara, dan tidak diakuisisi pihak yang tidak bertanggungjawab. Masih dimungkinkan penemuan-penemuan kembali cagar budaya, namun ancaman terhadap keberadaan cagar budaya tersebut tentu juga besar. Kemunculan kelompok radikal, kapitalisme, laju demografi, belum lagi kekuatan alam yang sangat ekstrem tidak diragukan akan menggerus aset-aset budaya bendawi tersebut dan kekuatan ketahanan budaya masyarakat DIY.

Tabel 2-82 Budaya Benda di DIY

Aset Budaya	2013	2014	2015	2016	2017
Struktur				0	34
Situs	176	184	343	339	343
Benda Cagar Budaya	762	763	764	807	808
Bangunan Cagar Budaya	947	877	881	1042	1041
Kawasan cagar budaya	13	13	15	17	17
Jumlah Budaya Benda	1898	1837	2003	2205	2243

Sumber: www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan), 2018

Tabel 2-83 Persebaran Benda, Bangunan, dan Situs Cagar Budaya Tahun 2017

NO	Kabupaten/Kota	Bangunan Cagar Budaya	Benda Cagar Budaya	Situs	Kawasan Cagar Budaya	Total
1	Kota Yogyakarta	674	50	9	10	743
2	Kabupaten Bantul	108	275	65	3	451
3	Kabupaten Gunungkidul	99	93	127	1	320
4	Kabupaten Kulon Progo	53	84	49	0	186
5	Kabupaten Sleman	108	290	89	3	490
	Belum diidentifikasi		15			
	DIY	1042	807	339	17	2205

Sumber : www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan), 2018

Tabel 2-84 Penanganan Cagar Budaya Tahun 2012-2017

Aspek	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	536	1015	1011	1014	1165	1331
Total benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dimilki	1.410	1.446	1.824	1845	2205	2243

Sumber: www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan)

Satuan geografis potensial kawasan cagar budaya di DIY terdapat sekitar 21-an kawasan, namun belum semuanya diintervensi secara intensif. Pada tahun 2011 Pemda DIY melalui SK Gubernur No 186/Kep/2011 menetapkan Kawasan Cagar Budaya yang masuk kewenangan provinsi yaitu antara lain : Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Imogiri, Kotagede, Kotabaru yang mewakili masa peradaban klasik Islam, tradisional Jawa, kolonialisme, Pecinan. Pada tahun 2014 melalui SK Kepala Dinas Kebudayaan No 188/38.A telah menetapkan warisan budaya sebagai pelindungan pertama terhadap aset-aset budaya DIY. Tahapan untuk menjadi cagar budaya harus melalui kajian dan registrasi yang prosedural, sedangkan DIY sangat kaya akan aset budaya bendawi, sehingga perlu dibuat penetapan warisan budaya.

Tabel 2-85 Daftar Kawasan Cagar Budaya di DIY

No	Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten/Kota	SK Penetapan
1	Kawasan Kraton	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
2	Kawasan Malioboro	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
3	Kawasan Pakualaman	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
4	Kawasan Kotagede	Yogyakarta dan Bantul	SK Kadis. No. 188/ 38.A
5	Kawasan Kotabaru	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
6	Kawasan Imogiri	Bantul	SK Kadis. No. 188/ 38.A
7	Kawasan Parangtritis	Bantul	SK Kadis. No. 188/ 38.A
8	Kawasan Pleret	Bantul	SK Kadis. No. 188/ 38.A
9	Kawasan Jetis	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
10	Kawasan Pengok	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
11	Kawasan Baciro	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
12	Kawasan Prambanan	Sleman	SK Kadis. No. 188/ 38.A
13	Kawasan Ratu Boko	Sleman	SK Kadis. No. 188/ 38.A
14	Kawasan Sokoliman	Gunungkidul	SK Kadis. No. 188/ 38.A
15	Kawasan Ambarbinangun	Yogyakarta	
16	Kawasan Bintaran	Yogyakarta	
17	Kawasan Ambarketawang	Sleman	

Sumber: www.jogjabudaya.com; Dinas Kebudayaan DIY

Budaya benda ini merupakan bukti nyata perjalanan bersejarah masyarakat DIY sejak zaman prasejarah hingga sekarang, yang akan menjadi jatidiri bangsa. Tahun 2017 ini ruas jalan antara Tugu – Kraton – Panggung Krapyak yang dikenal dengan Sumbu Filosofi telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional dan masuk tentatif list Warisan Budaya Dunia UNESCO. Penyiapan teknis dan masyarakat dalam menghadapi Jogja sebagai Kota Warisan Budaya Dunia dengan Sumbu Filosofinya telah dilakukan. Keberadaan filosofi kehidupan yang terkandung dalam Sumbu Filosofi ini sangat langka di dunia. Apabila DIY berhasil masuk dalam Daftar Tetap Kota Warisan Budaya Dunia melalui Kawasan Sumbu Filosofi antara Tugu-Kraton-Panggung Krapyak, dimungkinkan komitmen pihak internasional untuk turut menjaga kelestarian kawasan ini.

2.1.3.1.22.2 Budaya Tak Benda

Nilai Kesejarahan

Berbagai peristiwa sejarah pun baik yang sifatnya nasional maupun kedaerahan telah terjadi di DIY. Setiap catatan peristiwa bersejarah tertuang dalam naskah-

naskah baik yang berbahasa Jawa Kuno maupun bahasa Belanda tersimpan di berbagai perpustakaan di DIY seperti Perpustakaan Keraton, Puro Pakualaman, Museum Sonobudoyo, Perpustakaan Daerah, Kantor Arsip, dan lainnya. Saksi-saksi sejarah atas berbagai tema kesejarahan belum semuanya terekam cerita-ceritanya.

Tabel 2-86 Jenis Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Tahun 2012-2017

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Monumen Sejarah Perjuangan	44	52	65	70	70	70
Museum	42	42	43	47	47	44
Pelaku sejarah	16	22	22	21	21	21
Peristiwa Sejarah	94	95	95	130	130	144
Naskah Kuno	n/a	509	509	509	509	509

Sumber : www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan), Barahmus

Permuseuman

DIY berkontribusi pada perkembangan permuseuman nasional, 14 % museum di Indonesia berada di Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo merupakan museum tertua kedua setelah Museum Radya Pustaka Surakarta dan terbanyak koleksinya kedua setelah museum nasional. Museum Negeri Sonobudoyo direncanakan menjadi museum internasional. Revitalisasi museum negeri Sonobudoyo dilakukan secara multiyears. Museum di DIY cenderung bertambah walaupun banyak menemui permasalahan dalam aspek kelembagaan pengelola dan SDM. Sampai tahun 2017 tercatat ada 44 museum yang tersebar sebagian besar di wilayah Sleman, Kota dan Bantul. Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo masih jarang ditemukan museum. Asosiasi yang beranggotakan museum-museum di DIY disebut BARAHMUS, sebagai paguyuban museum tertua di Indonesia. Saat ini sejumlah 36 museum telah menjadi anggota BARAHMUS, dan 2 museum calon anggota BARAHMUS.

Museum negeri yang berada di bawah Pemda DIY: Sonobudoyo, Purbakala Pleret; yang di bawah Kemendikbud: Benteng Vredeburg, Perjuangan; yang di bawah TNI adalah Museum TNI AD, Museum Sudirman. Museum Diponegoro, Museum TNI AU, Museum Sandi, Museum Istana Negara Gedung Agung, Museum MMTC, Museum Gedung Bank Indonesia. Pemerintah kabupaten Sleman

memiliki Museum Gunung Merapi. Museum milik Pemerintah Kulon Progo masih dalam proses studi. Pemerintah Kabupaten Bantul sedang mengupayakan pendirian Museum Sumber Karahayon. Pemerintah Kota telah mengembangkan Museum Taman Pintar.

Tabel 2-87 Persebaran Museum di DIY, Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Museum	Rincian Museum
1	Kota Yogyakarta	21	1) Museum Biologi UGM 2) Museum Anak Kolong Tangga 3) Museum Bahari Yogyakarta 4) Museum Batik Dan Sulaman Yogyakarta 5) Museum Batik Kraton Yogyakarta 6) Museum Benteng Vredeburg 7) Museum BI 8) Museum Dewantara Kirti Griya 9) Museum Dr. YAP 10) Museum Gembira Loka 11) Museum Kereta 12) Museum Kristal Kraton Yogyakarta 13) Museum Perjuangan 14) Museum Puro Pakualaman 15) Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama 16) Museum Sandi Negara 17) Museum Sasana Wiratama 18) Museum Sasmita Loka Pangsar Jenderal Sudirman 19) Museum Sonobudoyo Unit I 20) Museum Sonobudoyo Unit II 21) Museum Sultan Hamengku Buwono IX
2	Kabupaten Bantul	9	1) Museum Batik Joglo Cipto Wening 2) Museum Gumuk Pasir 3) Museum Memorial HM Soeharto 4) Museum Purbakala Pleret 5) Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta 6) Museum Rumah Garuda 7) Museum Tani Jawa Indonesia 8) Museum Tembi 9) Museum Wayang Kekayon Yogyakarta
3	Kabupaten Gunungkidul	1	Museum Kayu Wanagama
4	Kabupaten Kulon Progo	-	-

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Museum	Rincian Museum
5	Kabupaten Sleman	13	1) Museum Affandi, 2) Museum Gempa 'Prof Sarwidi', 3) Museum Geoteknologi Mineral, 4) Museum Gunung Merapi 5) Museum Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia 6) Museum Monumen Yogya Kembali 7) Museum Pahlawan Pancasila 8) Museum Paleoantropologi UGM 9) Museum Pendidikan Indonesia 10) Museum Purbakala Tamanwisata Prambanan 11) Museum Sisa Hartaku 12) Museum UGM 13) Museum Ullen Sentalu
	DIY	44	

Sumber : jogjabudaya.com

Lembaga-lembaga pendidikan juga mengembangkan museum. UGM yang memiliki museum UGM, Biologi, Peta, Geospasial, Paleoantropologi, Wanagama. UII yang diuntungkan dengan ditemukannya candi kimpulan. UPN Veteran telah mengembangkan Geoteknologi Mineral dan mereka juga mengadakan penelitian tentang geoheritage. UNY memiliki museum pendidikan Indonesia. Museum di lembaga pendidikan belum memiliki lembaga yang mengurusi museum, belum memiliki pengelola khusus, kepala museum, tetapi yang ada hanya tenaga administratif dan hanya dititipkan di Fakultas.

Tiga lokasi sebenarnya belum dapat dikatakan sebagai museum, karena museum harus memiliki koleksi, pengelola, pameran secara rutin, sedangkan lokasi tersebut lebih pada hiburan dan galeri tanpa koleksi tetap, namun diidentikkan sebagai museum, yaitu Jogja National Museum, Museum De Mata Trick Eye, Museum De Arca.

Hal-hal yang dilakukan untuk menggiatkan kunjungan ke museum antara lain : Festival Museum: Karnaval & Pameran (2007), Karnaval Museum (2009), Festival Museum: Opera Karnaval (2010), Museum Goes To Mall (2011, 2016), Museum Goes To Istana (2012), Museum Goes To Campus (2013), Museum Goes To School (2014), Pameran dan Pertemuan Museum di JCM (2017). Promosi museum juga dilakukan dengan pemilihan duta museum. Setiap sekolah juga

diwajibkan untuk kunjung museum dengan fasilitas bus museum. Partisipasi Museum DIY dalam event nasional juga secara gencar dilakukan, salah satunya dalam Pameran Kain Tradisional Nusantara di Museum Nasional. Museum Negeri Yogyakarta telah melakukan penataan diri baik di Museum Unit I maupun Unit II. Bimbingan bagi Edukator museum dilakukan secara intensif bagi SDM-SDM museum yang disebarkan ke seluruh museum di DIY. Program wajib kunjung museum bagi siswa sekolah ini diberlakukan sejak 2013. Ada empat fasilitas bus yang disediakannya, satu diantaranya digunakan sebagai cadangan setiap beroperasi.

Kunjungan museum pada tahun 2017 mencapai 5.075.579 pengunjung. Museum yang menjadi favorit dikunjungi masyarakat adalah Museum Kraton, Museum TNI AU, Museum Jogja Kembali, Museum Vredeburg, Museum Merapi, sedangkan museum-museum yang lainnya cenderung sepi. Ironisnya hanya 0,91 % atau kurang dari 1 % dari kunjungan tersebut yang mengunjungi Museum Sonobudoyo yang dikelola pemerintah daerah, dan besarnya jumlah pengunjung dapat merepresentasikan tingkat apresiasi masyarakat di DIY, karena berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Tabel 2-88 Jumlah Pengunjung Museum 2015 - 2017

Tahun	2015	2016	2017
Jumlah Pengunjung Museum	2.078.672	2.927.862	5.075.579

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY

Perjuangan pengembangan museum masih memerlukan strategi yang tepat karena diindikasikannya berbagai persoalan yang mengurangi daya tarik dan daya saing museum sebagai tempat tujuan kunjungan yang favorit bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sebagai berikut: citra Museum yang masih rendah, museum masih dianggap sekedar memelihara barang tidak terpakai atau sekedar menjadi gudang penyimpan, museum disejajarkan obyek wisata alam atau wisata lainnya, banyak museum kekurangan anggaran operasional, belum adanya standar pelayanan, kurangnya informasi keberadaan museum, belum terpadunya aspek pembelajaran museum dengan kurikulum di sekolah, belum adanya kebijakan terpadu antar instansi terkait, perlu adanya Grand Desain Permuseuman DIY yang melibatkan seluruh stakeholder.

Adat Istiadat, Tradisi dan Sistem Nilai Budaya Lainnya

Nilai-nilai tersebut telah diwujudkan dalam adat istiadat, tradisi, dan sistem nilai budaya lainnya. Nilai-nilai ketradisionalan telah mendarah daging dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di DIY. Masyarakat DIY masih mempertahankan 475 upacara adat, 35 tradisi, 58 permainan tradisional, 180 makanan tradisional, walaupun dilaksanakan tidak secara merata. Daerah-daerah tertentu mengupayakan dapat mengaplikasikan beberapa jenis adat dan tradisi. Upacara adat yang sangat menarik masyarakat antara lain tradisi nguras enceh atau mengganti air gentong di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, saparan bekakak, upacara Grebeg, tradisi cupu panjala, jamasan kereta pusaka.

Tabel 2-89 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY tahun 2012-2017

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Upacara Adat	447	447	459	473	475	479
Upacara Tradisi	35	35	35	35	35	35
Jenis Permainan Tradisional	34	34	34	34	58	58
Cerita rakyat	33	33	33	33	33	80

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY (www.jogjabudaya.com)

Desa Budaya

Desa/Kelurahan Budaya adalah desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dlimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya (Sesuai Pergub 36/2014 Pasal 1 tentang Desa / Kelurahan Budaya)

Desa/Kelurahan Budaya atau sebutan lain adalah desa/kelurahan yang memelihara dan mengembangkan Objek Kebudayaan yang dimilikinya meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni (Perdais No 3 Tahun 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan)
Berdasarkan SK Gub No 262/KEP/2016 terdapat 56 desa dan kelurahan budaya di DIY, dan telah dilaunching Gubernur pada April 2017. Desa budaya yang sudah berpredikat maju pada tahun 2017 ada 24 desa budaya, bertambah 7 desa

dibandingkan tahun 2016, yang lainnya masih dalam tahap tumbuh dan berkembang.

Tabel 2-90 Perkembangan Desa / Kelurahan Budaya di DIY hingga 2017

No	Kabupaten/ Kota	Sk Gub 325/Kpts/1995	Draft Sk Gub 2010	SK Gub 262/Kep/2016
1	Bantul	6	9	12
2	Kulon Progo	10	12	15
3	Kota Yogyakarta	0	0	2
4	Gunungkidul	10	12	15
5	Sleman	6	10	12
	DIY	32	43	56

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY

Kesenian

Kegiatan berkesenian di DIY telah dieksplorasi dengan berbagai cara dan media, diujudkan dalam berbagai bentuk dan ragam, entah berupa seni rupa, seni sastra, seni pertunjukan, seni perfilman, bahkan terkadang campuran berbagai bentuk dan ragam, atau apa pun namanya. Semua itu berakar pada rasa, dan diujudkan untuk melayani rasa pula, yakni rasa keindahan. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks. Dalam pengkategorian cabang seni sampai saat ini belum ada pembakuan yang pasti. Untuk kepentingan penyusunan sistem informasi budaya, data yang akan dilihat adalah organisasi seni, usaha kerajinan, permainan tradisional, tokoh seniman dan budayawan, penghargaan seniman dan budayawan, dan gallery seni rupa.

Tabel 2-91 Organisasi Seni dan Budaya di DIY

Aset Budaya	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Organisasi Seni Rupa	8	16	17	17	17	17
Organisasi Seni Pertunjukan	4231	5226	5241	5434	5543	6361
Organisasi Perfilman	12	42	42	42	42	42
Lembaga Budaya	105	105	82	98	180	181

Aset Budaya	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lembaga Pendidikan Bdy	31	32	43	49	49	49
Desa Budaya	32	32	32	43	43	56
Organisasi Kepercayaan	90	94	94	112	120	137
Lembaga Adat Besar	2	2	2	2	2	2
Jumlah	4511	5549	5553	5797	5996	6845

Tabel 2-92 Pelaku Seni dan Budaya di DIY Tahun 2012-2017

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tokoh Seniman Budayawan	486	486	487	489	496	507
Penghargaan pelestari budaya benda	79	84	89	94	99	104
Penghargaan pelestari budaya tak benda	223	233	243	252	262	267

Sumber: www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan)

Tabel 2-93 Jumlah Sarana dan Prasrana di DIY Tahun 2012-2017

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	980	1.025	1.200	1.275	1.350	1410
Prasarana Budaya	107	107	107	107	107	107
Lembaga Budaya	105	82	82	98	78	181
Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan	31	31	43	49	49	49

Sumber: www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan)

Penyebarluasan dilakukan antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, festival, serta penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri. Event-event internasional yang selalu diikuti oleh DIY antara lain melalui Bienalle, Sister Province, Europhalia, MSO.

2.1.3.1.23 Urusan Perpustakaan

Menurut penilaian dari *World'S Most Literate Nations*, minat baca di Indonesia menempati rangking ke-60 dari 61 negara. Bahkan menurut data statistik UNESCO tahun 2012, presentase minat baca Indonesia hanya sebesar 0,001 persen. Artinya, dari 1.000 penduduk hanya satu orang saja yang memiliki minat baca.

Jika dilihat dari minat baca nasional, DIY memiliki minat baca 91,00 % atau rangking 4 setelah Riau (94,01%), DKI (93,10%) dan Bali (92,44%). Upaya-upaya untuk meningkatkan budaya baca di Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus dilakukan. Kampanye sedekah buku, gerakan membaca, inovasi pelayanan, kerjasama dengan lembaga lain dan peningkatan penyediaan sarana prasarana terus diusahakan agar masyarakat DIY memiliki budaya baca. Dalam mendukung gerakan literasi ini perpustakaan memegang peran yang sangat penting. Data jumlah perpustakaan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-94 Data Perpustakaan per Jenis Perpustakaan Tahun 2017

No	Jenis	Jumlah Perpustakaan
1	Umum	26
2	Desa	455
3	SMP/MTs	569
4	SMA/SMK/MA	446
5	Perguruan Tinggi	1
6	Komunitas	3
7	Lembaga Kearsipan	6
8	SD/MI	1725
Total		3231

Sumber: BPAD DIY 2018

Tabel 2-95 Data Perpustakaan per Kabupaten/KotaTahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan
1	Bantul	730
2	Gunungkidul	627
3	Kota	463
4	Kulon Progo	503
5	Sleman	908
Total		3231

Sumber: BPAD DIY 2018

Upaya-upaya telah dilakukan untuk meningkatkan budaya baca di DIY, sejumlah inovasi layanan untuk menikmati pustaka ditingkatkan, antara lain dengan tersedianya layanan perpustakaan dengan fasilitas gedung yang memadai di

Grhatama Pustaka, rumah belajar modern, *Centre Of Excellence* Budaya Yogyakata, layanan Pojok Baca, layanan pustaka digital dan *Jogja Library For All* dll. Jogja Library for All merupakan jaringan berbagai perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyediakan akses informasi koleksi perpustakaan secara online bagi masyarakat, beranggotakan 40 perpustakaan pemerintah dan Lembaga Pendidikan yang memungkinkan saling silang layan pustaka, antara lain : BPAD DIY, Perpustakaan Bantul. Perpustakaan Daerah Kulon Progo, Perpusda Sleman, Perpustakaan UAJY, Perpustakaan UGM, MAN 3 Yogyakarta dan lain-lain.

2.1.3.1.24 Urusan Kearsipan

Yogyakarta sebagai daerah yang kaya dan sarat dengan aktifitas sejarah serta penuh dengan dinamika perubahan, memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dalam melestarikan arsip. Sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui dan memahami bahwa arsip memiliki arti penting yang dapat digunakan sebagai bukti keberadaan atau sebagai jati diri. Tindakan penyelamatan arsip penting dapat menjadi penguat keistimewaan Yogyakarta.
Arsip terdiri dari arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis dibedakan antara arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya tinggi atau digunakan terus menerus untuk operasional PD, sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya untuk pelaksanaan kegiatan PD telah menurun. Arsip aktif dikelola oleh unit pengolah PD, sedangkan arsip inaktif dikelola oleh unit kearsipan PD.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Nasional dan/atau lembaga kearsipan. Oleh karena itu arsip statis tidak dikelola oleh pencipta melainkan oleh lembaga kearsipan.

Tabel 2-96 Data Kearsipan di DIY 2013-2017

Elemen	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pengelolaan arsip secara baku	Unit	19	20	295	336	219
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	4	7	2	5	3
Jumlah arsiparis	Orang	15	15	80	87	89
a) Kulon Progo	Orang	4	3	3	3	3
b) Bantul	Orang	19	18	17	16	16
c) Gunungkidul	Orang	10	10	7	16	16
d) Sleman	Orang	21	21	22	22	22
e) Kota Yogyakarta	Orang	23	21	20	20	20
Jumlah Arsip yang dimanfaatkan	Berkas	11.015	685	1.297	1.713	1.114
Jumlah pengunjung layanan arsip statis	Orang	130	1.357	1.217	33.412	21.720

Sumber: Dataku BAPPEDA DIY, 2017

Khasanah arsip yang dikelola DIY melalui BPAD DIY adalah arsip tekstual, arsip foto, rekaman suara, audio visual dan Kartografi. Khasanah arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Arsip dikelompokkan berdasarkan kurun waktu. Disamping kurun waktu, untuk arsip Kasultanan Nagyokarta Hadiningrat berdasarkan masa pemerintahan HB, misal : arsip masa HB VII, VIII dst, begitu pula untuk arsip Kadipaten Pakualaman. Pengelompokan kurun waktu tersebut, yaitu :

a. Arsip masa Kolonial Belanda
b. Arsip masa Balatentara Dai Nippon
c. Arsip masa Revolusi
d. Arsip masa Republik Indonesia Serikat
e. Arsip masa Orde Lama
f. Arsip masa Orde Baru
g. Arsip masa Otonomi Daerah
h. Arsip Perorangan

Pengelolaan arsip statis meliputi: Pengolahan, Alih media, tulisan, dan bahasa. Arsip yang diolah dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu arsip tekstual, arsip foto, arsip rekaman, arsip audiovisual.

Tabel 2-97 Data Pengolahan Arsip Statis Tahun 2012-2017

No	Pengolahan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Arsip Inaktif Tekstual	45.739	50.800	57.800	77.800	97.441	98.876
2	Arsip Inaktif Kartografi	2.153	2.691	4.691	4.691	5.952	5.952
3	Arsip Inaktif Foto	15.587	39.308	40.308	40.808	41.933	41.933

Sumber : BPAD DIY, 2018

Hingga akhir tahun 2017, Pemda DIY telah mengupayakan akuisisi terhadap arsip-arsip yang sangat bernilai dalam menggambarkan peradaban masyarakat DIY sejak awal berdirinya. Kegiatan akuisisi dilakukan dengan dua cara yaitu penarikan arsip statis dan reproduksi dengan cara mengkopi/scanning arsip tersebut. Beberapa akuisisi tersebut, antara lain menyangkut arsip lembaga pengairan jaman Hindia Belanda, arsip seniman, arsip pemilu 2004 dan 2009, arsip museum di DIY, arsip-arsip gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006, arsip sejarah keistimewaan DIY, arsip pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Rafles serta arsip yang berada di Belanda dan Inggris.

Arsip Inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun. Penanganan arsip dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) meliputi penanganan arsip tekstual, arsip kartografi, serta arsip foto. Arsip inaktif tekstual adalah informasi yang direkam/dicatat di atas lembaran kertas, seperti surat hasil korespondensi, laporan mingguan, berkas–berkas, arsip inaktif kartografi adalah informasi yang berupa peta. Dalam hal ini tidak termasuk gambar-gambar yang berkait dengan kearsitekturan.

Tabel 2-98 Data Arsip Inaktif Tahun 2012-2017

No	Pengolahan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Arsip Inaktif Tekstual	45.739	50.800	57.800	77.800	97.441	98.876
2	Arsip Inaktif Kartografi	2.153	2.691	4.691	4.691	5.952	5.952
3	Arsip Inaktif Foto	15.587	39.308	40.308	40.808	41.933	41.933

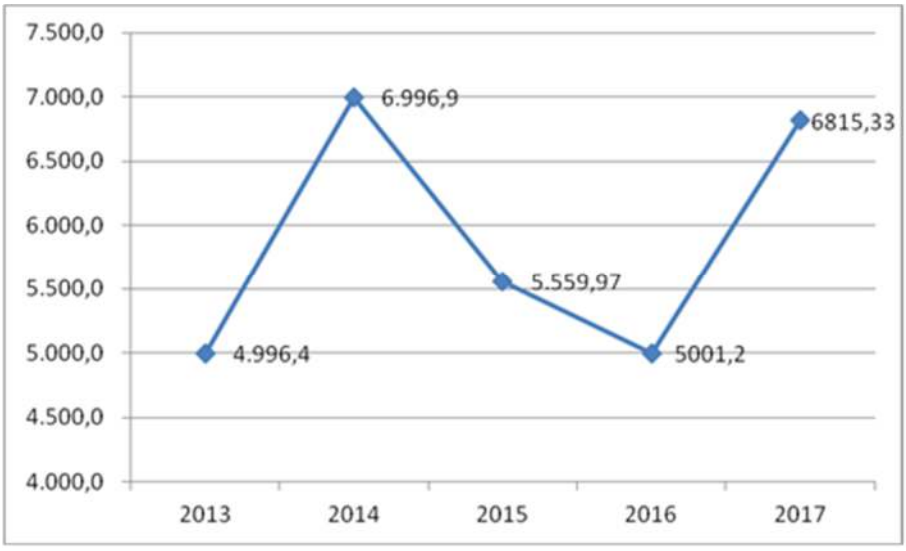
Sumber : BPAD DIY,2018

2.1.3.2 Fokus Layanan Pilihan

2.1.3.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Kondisi alam DIY yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia sangat berpengaruh terhadap ketersediaan ikan di DIY serta usaha di bidang perikanan. Panjang pantai di DIY sepanjang 113 Km membentang dari ujung barat yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dan di ujung timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Pantai di DIY dibagi di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul.

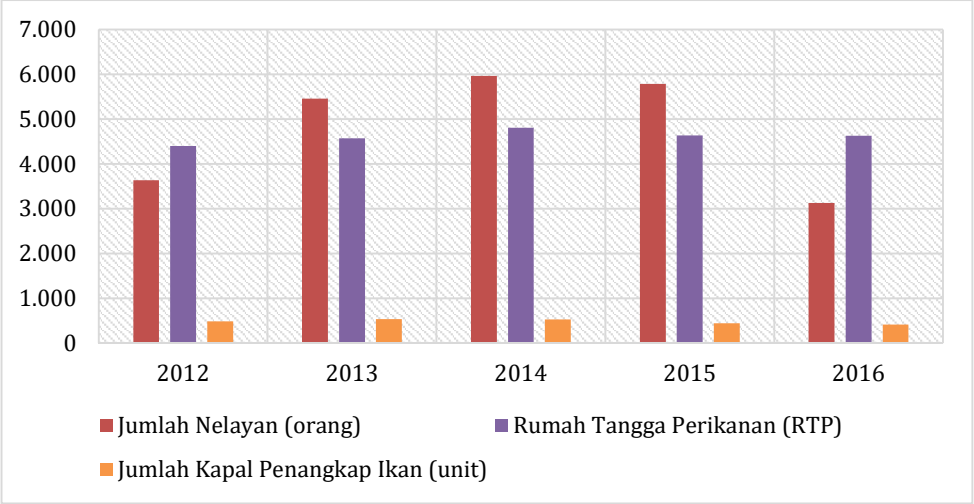
Perikanan tangkap di DIY didukung dengan adanya Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng di Kabupaten Gunungkidul dan 19 lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan. Produksi hasil perikanan tangkap yang terdiri dari perikanan tangkap laut dan perairan umum (sungai, waduk dan telaga) dari tahun 2013–2017 mengalami fluktuasi dikarenakan kondisi cuaca dan perairan laut yang berubah-ubah setiap tahunnya, serta adanya fenomena badai lanina dan elnino berpengaruh pada produksi perikanan tangkap. Selain itu, belum beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto yang diproyeksikan sebagai sentra perikanan tangkap juga berpengaruh pada belum optimalnya produksi perikanan tangkap DIY. Perkembangan produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan 2018

Gambar 2-54 Produksi Perikanan Tangkap DIY Tahun 2013 - 2017

Nelayan di DIY terdiri atas nelayan penuh, nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan, selain itu masih terdapat nelayan andon yang datang dari luar DIY. Jumlah kapal penangkap ikan inkamina yang berkapasitas 30 GT (Gross Ton) tahun 2017 sebanyak sembilan kapal yang beroperasi. Selain kapal inkamina, nelayan DIY juga menggunakan perahu motor tempel, perahu tanpa motor, dan kapal motor. Rumah tangga perikanan terdiri atas RTP perairan laut dan RTP perairan umum. Berikut ini grafik data jumlah nelayan, jumlah kapal penangap ikan dan Rumah Tangga Perikanan dari tahun 2012 – 2016.



Sumber: Jogja dataku

Gambar 2-55 Jumlah Nelayan, Kapal Penangkap Ikan dan Rumah Tangga Perikanan dari tahun 2012-2016

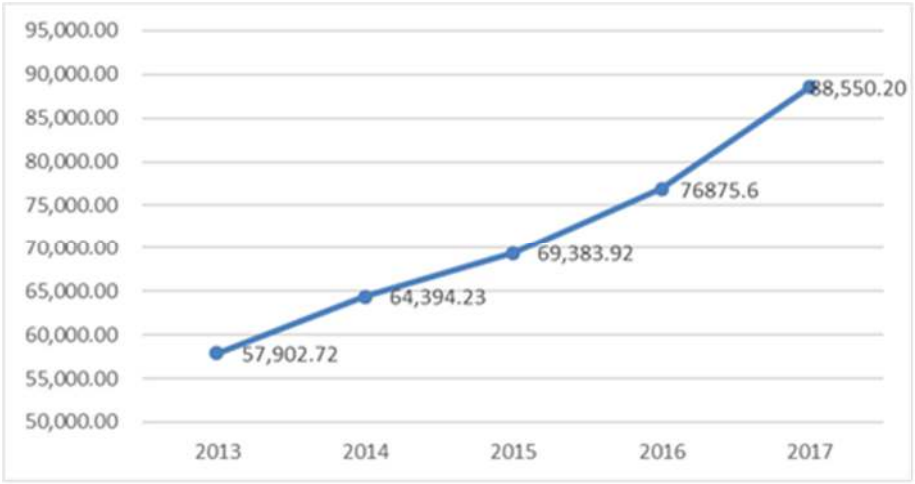
Bila diperinci lebih lanjut, dapat diketahui bahwa penggunaan perahu motor tempel oleh nelayan mengalami kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2016 tidak ada lagi nelayan yang menggunakan perahu tidak bermotor. Hal ini dikarenakan nelayan beralih ke penggunaan kapal motor berkapasitas lebih dari 5 GT yang memungkinkan mereka untuk memperluas daerah tangkapan ikan mereka. Namun, kegiatan perikanan tangkap laut dengan memanfaatkan kapal berkapasitas di atas 5 GT masih belum optimal dikarenakan masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan.

Selain memiliki perairan laut dan umum yang cukup potensial, DIY juga memiliki luas daratan yang dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan perikanan darat

(air tawar) karena memiliki sumber air yang memadai. Budidaya perikanan air tawar memanfaatkan sistem kolam, baik kolam permanen atau kolam terpal. Selain di kolam, budidaya perikanan air tawar juga memanfaatkan sawah dengan system tumpangsari atau dikenal dengan minapadi. Keramba jaring apung juga menjadi metode budidaya yang populer di DIY dengan memanfaatkan perairan umum seperti embung, telaga dan muara sungai. Selain budidaya perikanan darat di air tawar, DIY juga memiliki budidaya perikanan air payau di tambak yang juga cukup potensial, terutama diwilayah pesisir selatan DIY yaitu di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Sedangkan untuk budidaya perikanan air laut meskipun ada namun jumlahnya tidak terlalu signifikan.

Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) untuk komoditas perikanan konsumsi di DIY dari tahun 2012 sampai dengan 2017 sebanyak 19 unit BBI yang tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan untuk wilayah Kota Yogyakarta hanya ada BBI untuk komoditas ikan hias yang Dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Untuk mengetahui pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap di DIY dapat dilihat pada gambar berikut ini.



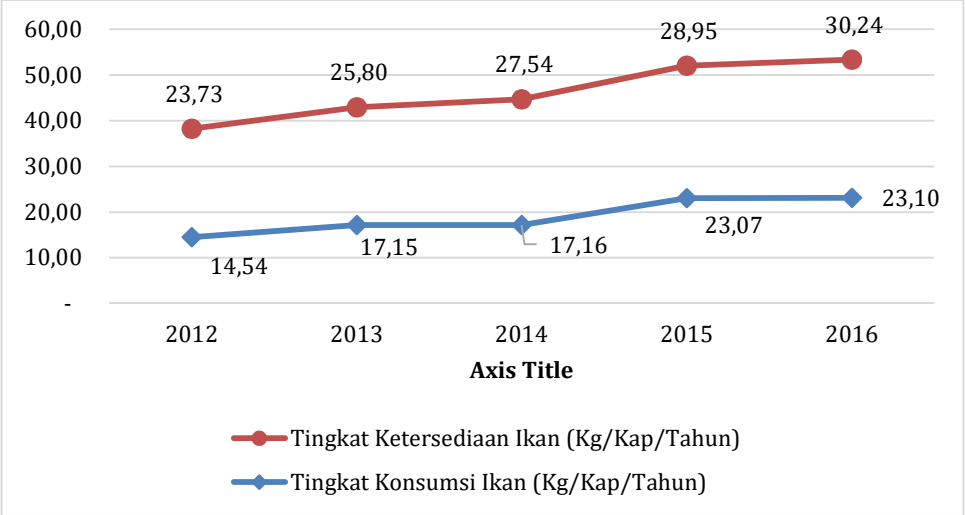
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan 2018

Gambar 2-56 Produksi Perikanan Budidaya DIY Tahun 2013-2017

Ketersediaan ikan per kapita DIY mengalami kecenderungan meningkat dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh produksi ikan di DIY yang terus tumbuh terutama pada budidaya perikanan. Jumlah produksi perikanan DIY selama periode 2012-2016 rata-rata tumbuh sebesar 10,58%.

Walaupun demikian, ketersediaan ikan di DIY masih disertai dengan adanya pasokan ikan dari luar daerah.

Tingkat konsumsi ikan perkapita juga cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir seiring dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan kebutuhan protein dari ikan. Penggiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diinisiasi Pemda DIY melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memegang peranan penting dalam upaya peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Meskipun konsumsi ikan mengalami peningkatan, namun masih jauh berada di bawah tingkat konsumsi ikan nasional.



Sumber : Jogja Dataku BAPPEDA DIY

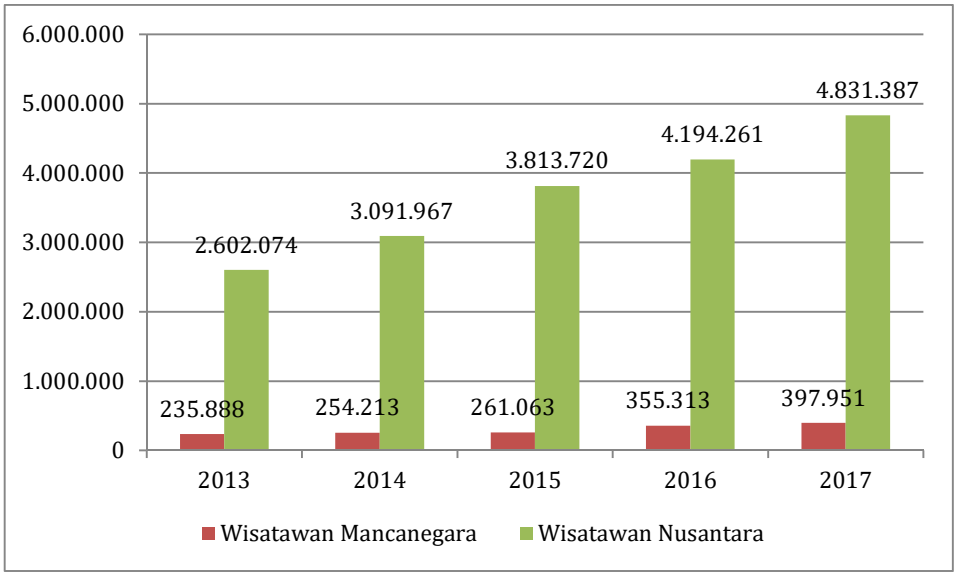
Gambar 2-57 Tingkat Konsumsi dan Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2012-2016

2.1.3.2.2 Urusan Pariwisata

Sesuai dengan visi Pembangunan DIY, tujuan yang ingin dicapai dalam sektor Pariwisata DIY adalah mewujudkan pariwisata yang kreatif dan inovatif. Salah satu indikator perhitungan perkembangan pariwisata DIY yang digunakan adalah dengan peningkatan jumlah wisawatan di DIY.

Dalam 5 tahun terakhir, perkembangan jumlah wisatawan di DIY mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada jumlah wisawatan nusantara.

Pada tahun 2017, jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY sebanyak 5.229.338 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 4.831.387 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 397.951 orang. Secara keseluruhan jumlah tersebut meningkat sebesar 14,94% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lima besar wisatawan mancanegara yang mengunjungi DIY adalah wisatawan yang berasal dari Negara Belanda, Jepang, Malaysia, Perancis, dan Singapura.



Gambar 2-58 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY

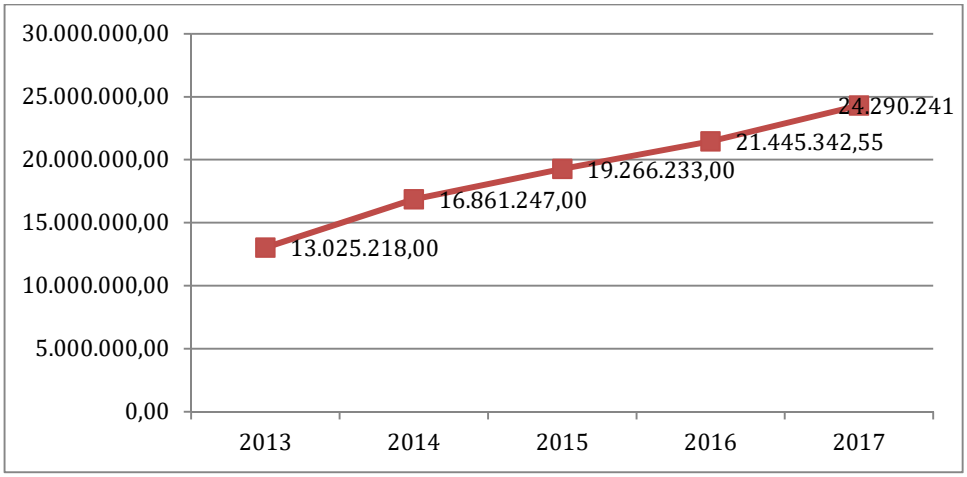
Sementara indikator lama tinggal wisatawan di DIY pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, lama tinggal wisatawan masih cenderung rendah. Wisatawan terutama Wisnus cenderung wisatawan yang memanfaatkan libur pendek akhir pekan *(weekend).* Selain itu belum adanya pilihan destinasi wisata yang menarik dan tersebar merata di Kabupaten/Kota menjadi faktor ketidakmampuan DIY untuk menahan wisatawan lebih lama tinggal di DIY serta ketergantungan yang kuat dengan destinasi lainnya, dalam hal ini DIY masih menjadi daerah wisata alternatif setelah Bali bagi wisatawan mancanegara.

Tabel 2-99 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	1,90	1.95	2.07	2	2,13
Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1,59	1.58	1.85	1,95	1,98

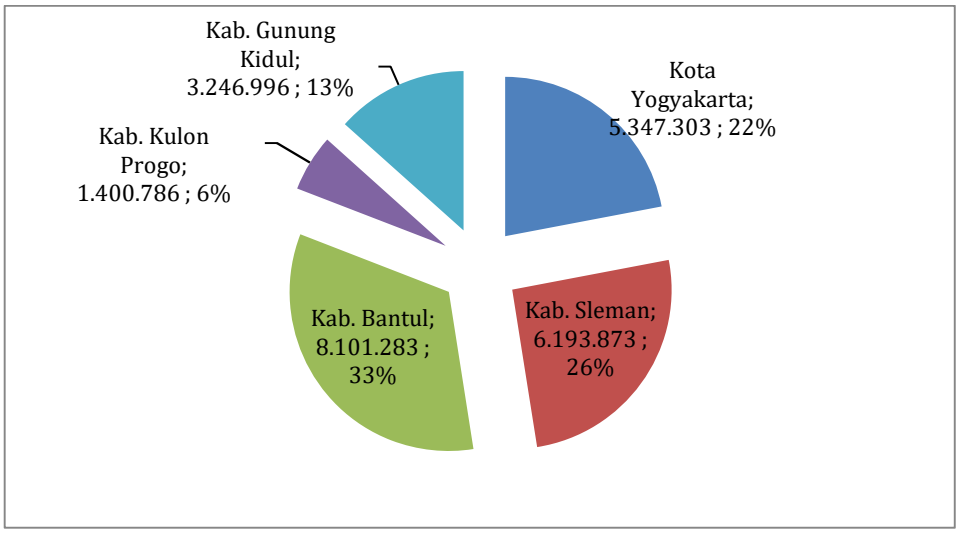
Sumber : Dinas Pariwisata DIY Tahun 2018

Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan di DTW Kabupaten/Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah kunjungan wisatawan di DTW mengalami kenaikan dari 21.445.343 orang pada tahun 2016 menjadi 24.290.241 orang pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 13,27%. Pencapaian ini tidak lepas dari peningkatan daya tarik wisata baik berupa destinasi maupun event pariwisata. Dalam Anugerah Pesona Indonesia 2017, beberapa destinasi wisata di DIY memenangkan dalam berbagai kategori seperti Wanawisata Budaya Mataram (juara dua kategori surga tersembunyi terpopuler), Pantai Wediombo (juara dua tempat berselancar terpopuler), Kalibiru (juara tiga kategori dataran tinggi terpopuler), Tebing Breksi (juara satu tujuan wisata baru terpopuler), Kampung Wisata Mangunan (juara tiga kampung adat terpopuler), Gua Jomblang (juara satu obyek wisata unik terpopuler). Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mempertahankan pertumbuhan jumlah wisatawan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan event yang potensial diangkat ke level internasional seperti event Jogja Air Show, Jogja International Street Performance dan Jogja International Heritage Walk.



Gambar 2-59 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan DTW di DIY

Dilihat dari sebarannya, Daya Tarik Wisata di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul masih mampu menyerap pengunjung tertinggi di DIY. Kemudahan akses serta layanan amenitas di tiga daerah tersebut mendukung tingginya kunjungan wisatawan di obyek wisata.



Gambar 2-60 Sebaran Pengunjung ODTW di Kabupaten/Kota Tahun 2017

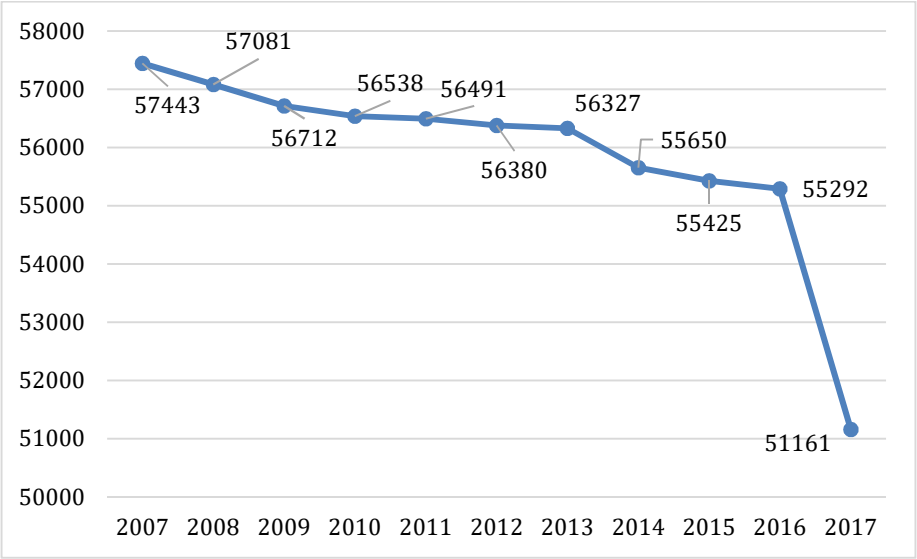
Kedepannya, pengembangan kepariwisataan di DIY harus dikembangkan dan dikelola pada pemasaran yang lebih tersegmentasi *(mass tourist, special interest tourist)* baik pada daya tarik wisata alam, budaya, maupun minat khusus. Pengembangan kepariwisataan di DIY sudah seyogyanya dikembangkan secara *sustainable tourism development*, dimana dalam pengembangan destinasi baru harus menjaga kelangsungan destinasi yang ada dan membentuk reputasi destinasi untuk menciptakan keunikan dan keunggulan. Untuk mencapai hal tersebut perlu disiapkan manajemen SDM dan kelembagaan yang memadai melalui pelatihan-pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pelaku pariwisata.

Selain itu penataan sistem aksesibilitas dan manajemen transportasi ke lokasi-lokasi daya tarik wisata (jaringan jalan, area parkir, penataan rute jalur/ rute wisata dan angkutan umum) perlu dilakukan untuk mengurangi kemacetan akibat menumpuknya wisatawan yang berkunjung di satu lokasi daya tarik wisata.

2.1.3.2.3 Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan kontributor PDRB DIY terbesar kedua dengan sumbangan 10,41% pada tahun 2016. Namun kontribusi sektor pertanian DIY cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2007 - 2017. Hal ini disebabkan adanya kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air serta terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian rata-rata sebesar 1,13% per tahun selama kurun waktu 2007-2017. Alih fungsi lahan lebih banyak terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam

dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Perkembangan lahan sawah di DIY dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber BPS 2017

Gambar 2-61 Perkembangan Luas Lahan Sawah di DIY

Penurunan luas sawah yang signifikan terjadi pada tahun 2017 dikarenakan alih fungsi lahan yang diperuntukkan pembangunan bandara baru di Kulon Progo dan pengembangan kawasan di sekitarnya. Bila diperinci, dapat diketahui bahwa lahan sawah beririgasi turun sebesar 0,21% serta lahan tadah hujan turun sebesar 0,39% pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Data luas lahan sawah irigasi dan non irigasi/tadah hujan dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-100 Luas Lahan Sawah Beririgasi dan Non Irigasi di DIY

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017*	Rata-rata Pertumbuhan
Sawah Beririgasi	47.133	46.300	45.976	45.880	41.712	-2,94
Sawah Non Irigasi	9.406	9.350	9.449	9.412	9.449	0,12

*Sumber : Jogja Dataku Tahun 2018 * Angka sementara*

Produksi tanaman pangan DIY mengalami trend peningkatan pada komoditas jagung, kacang tanah, dan ubi kayu. Sementara produksi padi pada kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi dan memiliki kecenderungan menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya fenomena perubahan iklim secara global, sehingga mempengaruhi pola budidaya. Pada tahun 2017 secara keseluruhan jumlah produksi padi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2.042 ton. Bila dilihat lebih rinci, produksi padi sawah mengalami penurunan sebesar 34.201 ton, sedangkan padi ladang mengalami peningkatan sebesar 32.159 ton bila dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan terjadinya banjir besar akibat badai Cempaka di bulan November 2017 di kawasan Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo yang menggenangi kawasan lahan pertanian yang ditanami padi sehingga menyebabkan lahan mengalami puso dan produktivitas menurun. Sementara produksi ubi kayu dan jagung mengalami peningkatan pada tahun 2017 dikarenakan curah hujan yang cukup. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian serta peralihan komoditas tanaman ke usaha perkebunan dan kehutanan juga dapat menurunkan produksi tanaman pangan secara keseluruhan.

Produksi tanaman pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-101 Produksi Tanaman Pangan di DIY (dalam ton), Tahun 2013-2017

No	Jenis Tanaman	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017*)	
1	Padi Sawah	721.674	719.194	746.810	712.282	678.081	-1,48
2	Padi Ladang	200.150	200.379	198.326	170.417	202.576	0,97
	Total Padi	921.824	919.573	945.136	882.699	880.657	-1,08
3	Jagung	289.580	312.236	299.084	310.257	311.764	1,96
4	Kedelai	31.677	19.579	18.822	16.677	8.656	-25,39
5	Kacang Tanah	70.834	71.582	83.300	75.816	79.907	3,46
6	Kacang Hijau	318	261	230	289	301	0,001
7	Ubi Kayu	1.013.565	884.931	873.362	915.667	1.025.779	0,72
8	Ubi Jalar	4.951	5.237	6.070	3.256	5.289	9,44
9	Cantel/ Sorghum	135	145	51	56	31	-23,06

*Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018, *)Angka Sementara*

Produksi tanaman hortikultura di DIY juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 392.421 ton menjadi menjadi 397.300 ton pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun terakhir sebesar 0,67%. Produksi hortikultura selengkapnya dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2-102 Produksi Hortikultura di DIY (dalam ton), Tahun 2015-2017

Kelompok	2015	2016	2017*	Rata-rata Pertumbuhan
Buah dan Sayur Semusim	98600	100177	100630	1,03
Buah dan Sayur Tahunan	273239	272763	276259	0,55
Tanaman Biofarmaka	17734	19481	17911	0,90

**)Angka Sementara*

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Bila diperinci lebih lanjut, dapat diketahui bahwa komoditas melon merupakan kontributor terbesar kelompok buah dan sayur semusim dengan sumbangan sebesar 26,04%. Komoditas tersebut banyak dikembangkan di lahan pesisir. Sementara itu, kontributor terbesar kelompok buah dan sayur tahunan adalah komoditas Salak (26,63%) yang banyak dikembangkan di daerah Sleman bagian Utara (Turi, Cangkringan, Pakem). Sedangkan Jahe (27,45%) merupakan kontributor terbesar kelompok tanaman biofarmaka. Hal ini dikarenakan komoditas tersebut mudah dikembangkan serta permintaan pasarnya sebagai bahan farmasi herbal cukup tinggi.

Sedangkan untuk sub sektor perternakan jumlah populasi ternak tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,28% dibanding tahun 2016, atau sejumlah 208.861 ekor. Ternak Unggas merupakan komoditas yang pertumbuhannya cukup tinggi dikarenakan kebutuhan unggas untuk diolah sebagai bahan pangan cukup tinggi di DIY, terutama dalam rangka mendukung DIY sebagai daerah tujuan wisata. Rata-rata pertumbuhan selama periode 2013 hingga 2017 sebesar 6,43%. Lebih rinci pertumbuhan populasi ternak disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-103 Populasi Ternak di DIY (dalam ekor), Tahun 2013-2017

Kelompok	2013	2014	2015	2016	2017*	Rata-rata Pertumbuhan
Ternak Besar	279.877	309.037	307.418	311.766	307.920	2,52
Ternak Kecil	514.030	565.786	576.697	585.622	569.597	2,70
Ternak Unggas	11.937.631	13.535.473	15.047.604	15.465.288	15.694.020	7,20

*sumber : Dinas Pertanian DIY, 2018, *) Angka Sementara*

Populasi ternak besar DIY didominasi oleh Sapi Potong yang berkontribusi sebesar 97,36%. Sedangkan Kambing merupakan kontributor terbesar kelompok ternak kecil dengan sumbangan sebesar 70,53%. Gunungkidul merupakan sentra penghasil ternak besar dan kecil dengan sumbangan 51,79% populasi sapi potong DIY dan 45,54% populasi kambing DIY. Sementara ayam ras pedaging merupakan kontributor terbesar kelompok ternak unggas dengan peranan sebesar 44,56%. Kabupaten Sleman adalah produsen dari ayam ras pedaging terbesar dengan kontribusi sebesar 34,94%.

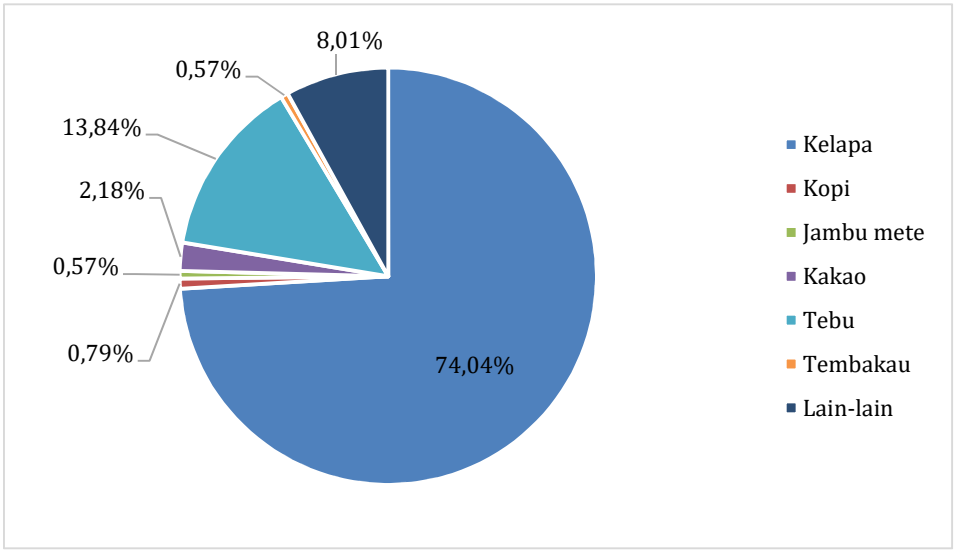
Wilayah DIY yang memiliki lahan kering dengan topografi bergelombang (berbukit/bergunung) menyebabkan konsentrasi komoditas perkebunan yang cukup beragam dari sisi luasan, diantaranya: kelapa, kakao, kopi, tembakau, dan tebu. Sentra produksi kelapa, kakao, dan jambu mete berada di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di Kabupaten Sleman. Komoditas perkebunan tersebut memiliki cakupan luas yang cukup besar, prospek pasar yang potensial, nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dan berperan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan (tebu).

Tabel 2-104 Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Strategis di DIY 2013-2017

Komoditas Perkebunan Strategis (Ha)	2013	2014	2015	2016	2017*
Kelapa	43.815,39	43.453,02	43.016,86	42.835,26	35.522,44
Kakao	5.012,15	5.117,13	5.155,75	5.065,97	5.048,04
Kopi	1.725,92	1.746,50	1.737,59	1.703,43	1.719.87
Tembakau	2.310,90	2.396,14	2.058,80	1.036,63	1.010,40
Tebu	3.602,66	3.400,54	3.357,00	3.228,21	3.195,18

*sumber : Dishutbun DIY, 2018 , *) Angka Sementara*

Sementara bila dilihat lebih rinci, dapat diketahui bahwa komoditas kelapa merupakan kontributor utama yang mendominasi produksi perkebunan di DIY pada tahun 2016 dengan peranan sebesar 74,04%. Sedangkan komoditas strategis tebu merupakan penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 13,84%. Selengkapnya mengenai kontribusi produksi perkebunan DIY disajikan dalam grafik berikut :



sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2018 (diolah)

Gambar 2-62 Grafik Proporsi Produksi Perkebunan DIY Tahun 2017

Peningkatan produksi perkebunan harus diiringi dengan peningkatan nilai tambah melalui penerapan agribisnis berkelanjutan. Penerapan agribisnis dilakukan melalui intensifikasi usaha tani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna dan penguatan tingkat kemampuan petani serta kelembagaan petani dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis yang memadai. Langkah strategis yang harus diupayakan adalah mendorong tercapainya peningkatan produktivitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk mampu memenuhi permintaan dan selera pasar.

Walaupun sektor pertanian merupakan salah satu sektor dominan pendukung PDRB DIY dan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar, namun pengembangan sektor pertanian masih menghadapi kendala dalam hal sumberdaya manusia. Sensus Pertanian 2013 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rumah tangga pertanian sebesar 13,75% dibandingkan data pada Sensus Pertanian

2003. Selain itu, proporsi sebesar 47,91% merupakan rumah tangga petani dengan kelompok umur di atas 55 tahun yang tingkat pendidikannya relatif rendah. Tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian juga merupakan yang terendah bila dibandingkan dengan sektor lainnya (Rp. 24 juta/orang/tahun).

2.1.3.2.4 Urusan Kehutanan

Menurut analisis data Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, wilayah dengan fungsi hutan di DIY pada tahun 2017 seluas 97.534,22 Ha. Dari luas tersebut, luas hutan rakyat sangat dominan dengan luasan 78.400,27 Ha dan sisanya 19.133,95 Ha merupakan hutan negara. Wilayah hutan (baik hutan rakyat dan hutan negara) pada wilayah DIY, sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki peran sebagai wilayah hulu dari DAS Opak (sub DAS Oya).

Luasan hutan di Kabupaten Gunungkidul sangat strategis karena memiliki proporsi dominan sebesar 60,61% dari luas hutan total di DIY yang didominasi oleh hutan rakyat seluas 45,23% dari luas hutan total DIY. Luas hutan rakyat di Gunungkidul meningkat pada tahun 2017 seluas 1.540,91 dibandingkan tahun sebelumnya, demikian juga kontribusinya terhadap luas total hutan DIY. Sementara di sisi lain, kontribusi hutan di kabupaten Bantul dan Kulon Progo terhadap total luas hutan DIY justru menurun dibanding tahun 2016. Kontribusi luas hutan di Bantul menurun dari 10,11% menjadi 9,87% dan kontribusi hutan di Kulon Progo menurun dari 22,85% menjadi 22,39%.

Tabel 2-105 Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2017

Kabupaten	Hutan Negara (ha)	Hutan Rakyat (ha)	Total Hutan (ha)	% Total Hutan
Gunungkidul	15.001,15	44.110,87	59.112,02	60,61
Bantul	1.035,18	8.595,50	9.630,68	9,87
Sleman	2.051,13	4.898,30	6.949,43	7,13
Kulon Progo	1.046,49	20.795,60	21.842,09	22,39
Hutan di DIY	19.133,95	78.400,27	97.534,22	100,00

sumber : analisis data Dishutbun DIY & BPS DIY, 2017

Berdasarkan wilayah administrasi kehutanan, kawasan hutan negara tersebar pada 4 wilayah kabupaten. Kabupaten Gunungkidul memiliki luasan terbesar,

yaitu 78,40% dari luas hutan negara DIY (termasuk 1.773 ha yang merupakan hutan AB). Sementara Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo memiliki kontribusi terhadap luas hutan negara DIY masing-masing sebesar 5,41%, 10,72%, dan 5,47%.

Sedangkan berdasarkan tata guna hutan negara, kawasan hutan negara terbagi atas: hutan produksi 13.411,70 Ha, Hutan lindung 2.312,80 Ha, Hutan konservasi 2.990,56 Ha (TNGM 1.728,906 Ha, Tahura Bunder 634,10 Ha, Cagar alam 11,4375 Ha, Taman wisata alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa 615,60 Ha). Mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 197/Kpts-II/2000 tertanggal 12 Juli 2000, hutan AB dikelompokkan menjadi hutan produksi.

Pengelolaan hutan produksi di DIY memiliki kekhususan dibandingkan wilayah lain karena dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta (UPTD Dishutbun DIY). Potensi hutan produksi (13.411,70 ha) di DIY didominasi oleh tanaman jati (50,79%) dan tanaman kayu putih (34,32%). Saat ini, hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Problem pengembangan tanaman kayu putih di DIY adalah produktivitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat setempat dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan.

Kerusakan hutan terjadi akibat adanya kebakaran hutan, bencana alam dan pencurian kayu. Jumlah kerusakan hutan di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul dari tahun 2012–2016 mengalami fluktuasi dengan Kabupaten Gunungkidul memiliki kasus terbanyak. Kasus pencurian kayu tertinggi dalam kurun waktu 2012-2016 terjadi pada tahun 2014, yaitu sebanyak 81 kasus dengan volume kayu yang dicuri sebanyak 353 meter kubik. Luas areal hutan yang terbakar terbesar selama kurun waktu 2012 – 2016 terjadi pada tahun 2015 yaitu seluas 128,5 hektar, sedangkan pada tahun 2016 tidak terjadi kebakaran hutan. Jumlah titik lokasi kebakaran hutan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 19 titik. Di sisi lain, deforestasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 40,49 hektar, sedangkan pada tahun 2016 hanya sebesar 0,42 hektar. Penurunan kerusakan hutan diwujudkan melalui peningkatan upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Selain itu, didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui skema tumpangsari maupun pola kerjasama lain.

Selain pencurian kayu, hutan di DIY masih menghadapi persoalan tekanan sosial masyarakat. Masalah mendasar di kawasan hutan disebabkan ketidakjelasan batas kawasan, sehingga kepastian wilayah kelola juga belum bisa terpenuhi. Di sisi lain, pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitar kawasan untuk keperluan pertanian, permukiman maupun sektor lain di luar kepentingan sektor kehutanan juga menimbulkan tekanan terhadap hutan.

Sementara itu, DIY masih memiliki lahan kritis di kawasan hutan yang tersebar di empat kabupaten dengan luasan paling besar berada di Gunungkidul (±18.000 ha). Lahan kritis antara lain disebabkan faktor alam, seperti yang terjadi di Gunungkidul, terutama bagian Selatan yang strukturnya didominasi bebatuan kapur.

2.1.3.2.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi sumberdaya mineral (ESDM) merupakan urusan pilihan dan terbagi menjadi 5 sub urusan, yaitu ; geologi, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan. Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam sub urusan geologi, pemerintah daerah provinsi mempunyai ketugasan :

1. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
2. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.
3. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, terdapat 3 cekungan air tanah (CAT) yang berada di DIY yakni ; CAT Yogyakarta-Sleman, CAT Wates, dan CAT Wonosari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengelolaan pemerintah daerah DIY adalah terhadap cekungan air tanah yang berada dalam provinsi saja, meliputi CAT Yogyakarta-Sleman yang mempunyai luasan 916 km2 dan liputannya meliputi Kab. Sleman, Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, dan Kab. Kulon Progo serta CAT Wates dengan luasan 150 km2 yang berlokasi di Kab. Kulon Progo.

2.1.3.2.5.1 Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan energi listrik adalah salah satu parameter yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan energi

listrik yang benar dan terarah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu.

Berdasarkan data rata-rata rasio elektrifikasi PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta tahun 2015 wilayah DIY adalah untuk kota Yogyakarta 68,52%, Kabupaten Bantul 97,17%, Kulon Progo 88,91%, Sleman 87,78%, Gunungkidul 80,10% dan total rasio elektrifikasi DIY sebesar 86,27%, dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi terkecil pada wilayah Kota Yogyakarta. Pemda DIY pada tahun 2016 melakukan updating data dan sinkronisasi pemenuhan rasio elektrifikasi untuk mengkaji potensi peningkatan rasio elektrifikasi yang meliputi Pemetaan terhadap jumlah rumah tangga berlistrik sebagai pelanggan PLN, Pemetaan terhadap jumlah rumah tangga (KK) yang listriknya masih menyalur, pemetaan terhadap jumlah rumah tangga (KK) yang belum berlistrik.

Hasil pemetaan tersebut diperoleh data rumah tangga belum berlistrik sekitar 333 rumah tangga. Jumlah rumah tangga belum berlistrik tersebut nilainya cukup kecil. Apabila diinputkan di dalam perhitungan rasio elektrifikasi seharusnya rasio elektrifikasi di DIY bisa mencapai 96,31% dengan rincian untuk kota Yogyakarta 99,86%, Kabupaten Bantul 99,22%, Kulon Progo 94,08%, Sleman 99,995%, Gunungkidul 84,69%.

Rasio elektrifikasi nasional berdasarkan data sampai dengan bulan Juni 2017 telah mencapai 92,80%. Angka ini jika diperbandingkan dengan capaian DIY akan menyisakan isu signifikan bahwa rasio elektrifikasi di DIY pada waktu yang sama baru mencapai angka 89,63%. Angka ini juga merupakan angka yang terendah untuk Pulau Jawa. Distribusi rasio elektrifikasi per kabupaten/kota juga memperlihatkan pola yang khusus.

Sesuai perhitungan dari bidang ESDM bahwa capaian rasio elektrifikasi pada akhir tahun 2017 adalah 91,20%, dengan perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik pelanggan PLN dan Non PLN sebanyak 1.039.719 rumah tangga dan jumlah rumah tangga total sebanya 1.140.061 rumah tangga.

2.1.3.2.5.2 Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Kebijakan diversifikasi energi atau penganekaragaman energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan di DIY antara lain dengan pemanfaatan tenaga air, tenaga angin, tenaga surya dan biogas. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di tahun 2015 dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan mikro hidro untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi kelistrikan yang kurang baik, mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk wilayah perkotaan dan pemanfaatan bio energi khususnya biogas rumah tangga sebagai pengganti bahan bakar minyak atau LPG tabung 3 Kg bagi lokasi yang mempunyai potensi biogas yang cukup besar.

Pada tahun 2015 pencapaian Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di DIY sebesar 118.153,28 SBM dari target sebesar 117.950 SBM. Realisasi pencapaian target di tahun 2015 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM sebesar 13.600 watt peak di Kabupaten Gunungkidul atau setara 187,27 SBM;
2) Pemasangan 200 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari APBD DIY di 10 unit gedung Pemda DIY atau setara 206,54 SBM;
3) Pembangunan Digester Biogas sebanyak 50 unit dari APBD DIY di Kabupaten Sleman, 150 unit dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kabupaten Gunungkidul dan 50 unit dari Yayasan Rumah Energi (YRE) dengan lokasi tersebar di DIY atau total setara 693,03 SBM;
4) Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro sebesar 30 kW di Kabupaten Kulon Progo dan 8 kW di Kabupaten Sleman atau setara 523,24 SBM.

Pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan langkah menuju keamanan energi berdasarkan produksi energi setempat. Berikut data jenis energi baru terbarukan di DIY yang terpasang pada tahun 2015.

Tabel 2-106 Data Jenis Energi Baru Terbarukan

JENIS EBT	POTENSI		TERPASANG 2015	
	Kapasitas	TOE	Kapasitas	TOE
PLTS	10MWp	301	200 kWp	0.32
PLTMH	2MW	817	882 kW	358
PLT Bayu	100MW	165.920	131 kW	24,6
PLT Bagasse	3.6 MVA / 2.5 MW	929	3.6 MVA / 2.5 MW	873

JENIS EBT	POTENSI		TERPASANG 2015	
	Kapasitas	TOE	Kapasitas	TOE
PLT Sampah	30 MW	9,040	5 kW	2
Bioethanol	36 Juta Liter	18.060	5 juta	2.508
Biogas Ternak Sapi	15,000 unit	2.768	1.500 Unit	328
Biogas Sanitasi	500 unit	92	100 Unit	11
Biogas Ampas Tahu	500 Unit	91	10 Unit	2
Biomassa Pellet	1,500 Ton	548	600 Ton	219
DME	20 Lokasi		1 Lokasi	
Total Energi (TOE)	98.567		4.388	

sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2017

Pada tahun 2016 pencapaian target Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di DIY sebesar 123.590 SBM ditempuh melalui kegiatan pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga sebanyak 120 unit di Kabupaten Sleman, 230 unit di Kabupaten Gunungkidul, 130 unit di Kabupaten Bantul, 120 unit di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga pembangunan PLTS tersebar di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 100 unit dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 100 unit. Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro off grid sebanyak 3 unit juga dilakukan untuk mendukung pencapaian target tersebut. Di tahun 2017 capaian EBT di DIY adalah 143.573,26 SBM yang dicapai melalui PLT Bagasse, PLTS, PLT Hybrid, dan biogas. Berikut data jenis energi baru terbarukan di DIY yang mendukung capaian target di tahun 2017.

Tabel 2-107 Data Jenis Energi Baru Terbarukan yang mendukung capaian target di tahun 2017

Jenis	Daya		SBM	
PLT Bayu Pantai Baru	54	kW	743,56	SBM
PLTMH	0	kW	0	SBM
PLTS DAK	5000	Wp	68,85	SBM
PLTS Pantai Baru	29000	Wp	399,32	SBM
PLTS APBD	0	Wp	0	SBM
Bagasse Madukismo	2500	kW	17.211,96	SBM
Biogas	25	Unit	50,82	SBM
Biogas Hivos	450	Unit	914,76	SBM
Biogas Poantai Baru	384.65	m3	130,32	SBM
Biogas Tuksono	24	m3	8,13	SBM
Biogas 4 m3	300	Unit	406,56	SBM
Jumlah			19.934,27	SBM

sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2017

2.1.3.2.5.3 Rerata Penurunan Muka Air Tanah

Pelaksanaan sub urusan air tanah guna mempertahankan rerata penurunan muka air tanah di DIY Tahun 2015, diprioritaskan dengan upaya peningkatan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan, pemantauan muka air tanah melalui pembuatan sumur pantau dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan air tanah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan muka air tanah di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta-Sleman tetap dalam kondisi aman yaitu penurunan muka air tanah <20% terhadap tebal rata–rata akuifer yaitu sebesar 100 meter.

Kondisi muka air tanah pada musim hujan terbasah di CAT Yogyakarta-Sleman pada tahun 2014 adalah sebesar 7,28 meter atau 7,28% terhadap rata-rata tebal akuifer dan pada musim kemarau terkering sebesar 9,35 meter atau 9,35% terhadap rata-rata tebal akuifer. Sedangkan pada tahun 2015 adalah sebesar 6,81 meter(6,81% terhadap rata-rata tebal akuifer) atau terjadi tingkat kenaikan sebesar6,46% pada musim hujan terbasah dansebesar 9,22 meter (9,22% terhadap rata-rata tebal akuifer) atau terjadi tingkat kenaikan sebesar 1,39% pada musimkamarau terkering. Dengan melihat kondisi muka air tanah pada musim kemarau dan musim hujan di tersebut di atas, rerata muka air tanah di CAT Yogyakarta – Sleman tahun 2015 masih <20% terhadap tebal rata–rata akuifer sesuai target tahun 2015. Kondisi ini juga dapat dipertahankan hingga tahun 2017, di mana penurunan muka air tanah <20% terhadap tebal rata–rata akuifer.

Pada tahun 2017 dilakukan peningkatan upaya konservasi dan pemantauan muka air tanah untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah tetap pada kondisi <20%, melalui kegiatan :

a) Pembangunan 200 unit sumur resapan untuk imbuhan air tanah;
b) Pembangunan 5 unit sarana pemantauan air tanah dalam;
c) Pemeliharaan/perbaikan 3 unit sumur pemantauan air tanah dalam.

2.1.3.2.5.4 Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi

Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Konservasi energi di DIY khususnya energi listrik belum dilakukan dilakukan secara optimal. Belum optimalnya konservasi

energi dapat terlihat dari konsumsi energi listrik di DIY, di mana sektor rumah tangga menjadi konsumen terbesar.

Tabel 2-108 Konsumsi Listrik di DIY (GWH)

Sektor	Tahun		
	2014	2015	2016
a. Rumah Tangga	1338,38	1377,49	1466.53
b. Bisnis	527.55	570.22	660.35
c. Publik	282.38	299.7	332.82
d. Industri	222.38	237.84	239.62
TOTAL	2369.6	2484.16	2698.23

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2017

Hal ini berdampak pada tingginya elastisitas energi. Elastisitas energi adalah perbandingan antara laju pertumbuhan konsumsi energi dengan laju pertumbuhan ekonomi. Semakin kecil angka elastisitas, maka semakin efisien penggunaan energi. Angka elastisitas energi di bawah 1,0 dicapai apabila energi yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal.

Elastisitas energi di DIY masih di atas 1. Bahkan di tahun 2016 nilai elastisitas energi di DIY sangat tinggi yaitu 1,7. Artinya konsumsi energi lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi atau boros energi.

Tabel 2-109 Elastisitas Energi

Uraian	Satuan	Tahun		
ASUMSI & TARGET		2014	2015	2016
Pertumbuhan Ekonomi *)	%	5,2	5,0	5,0
HASIL PROYEKSI				
Kebutuhan Tenaga Listrik	GWh	2.369,6	2.484,2	2.698,2
Pertumbuhan Kebutuhan Tenaga Listrik	%	7,4	4,8	8,6
Elastisitas		1,4	1,0	1,7

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2017

Dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Daerah (RUED), pelaksanaan konservasi energi di DIY diarahkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 12,5 % di tahun 2025 dan 24 % di tahun 2050. Sebagai upaya mencapai target tersebut, dilakukan pendekatan konservasi energi di berbagai sektor. Pelaksanaan konservasi energi melalui APBD DIY mulai Tahun 2014

diprioritaskan untuk sektor publik yaitu gedung pemerintah, yang dilakukan melalui pelaksanaan audit energi gedung pemerintahan khususnya milik pemerintah daerah. Pelaksanaan audit energi tersebut menghasilkan rekomendasi yang berisi arahan untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik. Sampai dengan tahun 2017, pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan melalui kegiatan audit energi sebesar 28% (42 gedung pemerintah terhadap 150 gedung pemerintah).

2.1.3.2.5.5 Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan

Peningkatan kinerja pengelolaan usaha pertambangan dilakukan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah mineral dan batuan dengan mewajibkan melakukan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, khususnya bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan maupun dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan. Hal ini diharapkan akan berdampak kepada peningkatan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB DIY. Tertib ijin dan pelaksanaan ijin pertambangan merupakan salah satu hal yang dilakukan Pemda DIY untuk mengeliminir persoalan lingkungan dan tata ruang sebagai dampak dari aktivitas pertambangan.

Wilayah DIY secara potensi alam tidak banyak memiliki potensi tambang yang besar, sebagian besar potensi yang dimanfaatkan adalah mineral bukan logam dan batuan seperti pasir, batu, kerikil dll. Dalam pelaksanaan tertib perijinan, dapat terlihat bahwa sebanyak 215 dari 621 pemohon WIUP sudah mendapatkan ijin, sedangkan sisanya belum dapat memenuhi persyaratan perijinan yang dibutuhkan.

Tabel 2-110 Jumlah Pemohon WIUP

NO	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH PERMOHONAN	WIUP
			SK PERSETUJUAN WIUP
1	Kabupaten Kulon Progo	350	113
2	Kabupaten Gunungkidul	67	25
3	Kabupaten Sleman	134	39
4	Kabupaten Bantul	60	20
5	Lintas Kabupaten	10	18
TOTAL		621	215

Sumber : BKPRD DIY, 2017

Berdasarkan data yang ada sampai dengan November 2017, terdapat 161 Ijin Usaha Pertambangan eksplorasi yang telah diterbitkan oleh Pemda DIY, sedangkan untuk Ijin Usaha Pertambangan operasi produksi telah dikeluarkan sebanyak 48 ijin.

Tabel 2-111 IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi

IUP EKSPLORASI (Prov)		IUP OPERASI PRODUKSI (Prov &Kab) Kab=11 Prov = 37	
DARAT	SUNGAI	DARAT	SUNGAI
85	76	28	20
161		48	

Sumber : BKPRD DIY, 2017

2.1.3.2.6 Urusan Pedagangan

Kinerja sektor perdagangan dapat terlihat dari aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri. Aktivitas ekspor dapat menjadi cerminan perkembangan perdagangan luar negeri di DIY. Secara umum, perkembangan ekspor di DIY selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Dalam tiga tahun terakhir, kinerja sektor perdagangan mulai membaik dan tercatat surplus karena terpengaruh oleh pulihnya kondisi perekonomian global. Tercatat, Nilai Ekspor DIY pada tahun 2017 sebesar 296,61 Juta US$. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 44,43 Juta US$ (17,62%) jika dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sebesar 252,18 Juta US$. Peningkatan ekspor DIY didukung oleh 5 (lima) komoditas utama ekspor yaitu pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, atsiri daun cengkeh, dan produk tekstil lainnya. Sementara tujuan utama ekspor komoditas DIY adalah Jerman, diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda.

Tabel 2-112 Perkembangan Ekspor di DIY, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Volume (Juta kg)	34,03	57,51	56,9	57,01	59,24
Nilai (Juta US $)	211,76	233,25	242,47	252,18	296,61
Komoditi	127	166	110	88	78
Negara	111	114	115	112	112
Eksportir	286	310	325	286	314

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2018

Perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tercatat pada tahun 2013 - 2017 jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdaftar di DIY mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Realisasi jumlah kumulatif penerbitan SIUP pada tahun 2017 tercatat sebanyak 52.044 SIUP, meningkat sebesar 7,27% dibandingkan dengan realisasi SIUP pada tahun sebelumnya sebesar 48.517 SIUP. Dilihat dari golongan usahanya, usaha perdagangan di DIY didominasi oleh golongan pengusaha kecil sebesar 86,01%, sementara persentase terkecil dimiliki oleh golongan pengusaha besar dengan persentase sebesar 2,14%..

Tabel 2-113 Perkembangan Jumlah SIUP di DIY Berdasarkan Golongan Usaha, Tahun 2013 - 2017

No	Golongan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengusaha Besar	1.057	1.067	1.076	1.094	1.116
2	Pengusaha Menengah	2.629	2.717	2.684	2.872	3.070
3	Pengusaha Kecil	40.132	40.710	40.861	42.217	44.763
4	Pengusaha Mikro	1.644	1.821	1.986	2.334	3.095
Jumlah		42.817	45.462	46.855	46.607	48.517

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2018

Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata 4,73% tiap tahunnya. Realisasi jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) DIY Per Kabupaten / Kota pada tahun 2017 sebanyak 54.848 unit, tumbuh sebesar 5,19% dari tahun sebelumnya. Mayoritas TDP pada tahun 2017 dimiliki oleh pengusaha di Kota Yogyakarta sebesar 28,97%, diikuti oleh pengusaha di Kab. Sleman (27,79%), dan pengusaha di Kab. Bantul (22,12%).

Tabel 2-114 Perkembangan Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di DIY Per Kabupaten Kota, Tahun 2013-2017

No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bantul	9.571	10.152	10.627	11.163	12.130
2	Sleman	13.308	13.815	14.294	14.737	15.243
3	Kulonprogo	3.875	3.880	4.598	5.316	5.796
4	Gunungkidul	5.144	5.430	5.578	5.676	5.791
5	Yogyakarta	13.689	14.448	14.879	15.250	15.888
Jumlah		45.587	47.725	49.976	52.142	54.848

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2018

Perkembangan sektor perdagangan DIY juga didukung dengan tersedianya pasar sebagai sarana perdagangan. Keberadaan pasar baik toko modern maupun

tradisional mempunyai tiga fungsi utama dalam perdagangan yaitu sebagai sarana distribusi, pembentuk harga, dan sarana promosi. Jumlah sarana perdagangan di DIY mengalami pertumbuhan pesat di DIY selama tiga tahun terakhir. Tercatat jumlah toko modern yang berdiri hingga tahun 2017 sejumlah 818 unit, tumbuh sebesar 5,28% dibanding tahun sebelumnya. Namun untuk pasar tradisional tidak ada kenaikan dari tahun 2016, tetap sejumlah 349 unit. Oleh karena itu, kedepannya upaya revitalisasi pasar harus terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat atau pasar tradisional yang dinilai memiliki fungsi strategis sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat. Program revitalisasi pasar dapat dilakukan menggunakan dua pendekatan yakni fisik dan nonfisik. Secara fisik, pengelolaan pasar perlu didorong dalam hal kebersihan, kenyamanan, penataan los hingga keamanan. Sementara itu, secara nonfisik perlu didorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini pedagang. Pedagang diharapkan memahami cara pengelolaan keuangan untuk meningkatkan transaksi hingga mendapatkan permodalan dari perbankan

Tabel 2-115 Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2013-2017

Jenis Toko	2013	2014	2015	2016	2017
Toko Modern	644	661	710	777	818
Pasar Tradisional	532	361	361	349	349
Jumlah	1.176	1.022	1.071	1.126	1.167

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2018

2.1.3.2.7 Urusan Perindustrian

Kontribusi sektor industri pengolahan berada di urutan pertama pada struktur PDRB DIY menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan III-2017 mencapai 12,57%. Industri di DIY didominasi oleh sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan jumlah sebesar 91.127 unit usaha. Jumlah IKM di DIY dalam kurun waktu 2013-2017selalu mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah IKM di DIY mengalami pertumbuhan sebesar 308 unit usaha (0,34%) jika dibandingkan tahun 2016. Namun peningkatan jumlah IKM di DIY belum diikuti oleh peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Jumlah nilai investasi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 4,83% dibandingkan nilai investasi pada tahun 2016 sebesar Rp.1.269.897 Milyar. Realisasi penyerapan tenaga kerja pun lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar (1,04%) dari semula 333.980 orang

menjadi 330.508 orang di tahun 2017. Pertumbuhan IKM di DIY namun tidak diikuti dengan kenaikan nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa selama tahun 2017 industri yang tumbuh merupakan industri kecil yang berasal dari sektor informal dan tidak membutuhkan banyak investasi maupun tenaga kerja.

Tabel 2-116 Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Unit Usaha	84.234	86.087	88.637	90.906	91.214
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	310.173	318.858	326.669	333.980	330.508
Nilai Investasi (Rp Milyar)	1.064.180	1.151.443	1.187.754	1.269.897	1.208.563
Nilai Produksi (Rp Milyar)	3.294.485	3.399.909	3.489.769	3.643.222	12.463.257
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp Milyar)	1.449.435	1.524.806	1.550.832	1.593.631	8.620.133

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2018

Untuk dapat bersaing dengan industri luar, produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih dari pesaingnya. Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi (output) dengan nilai bahan baku dan penolong lainnya (input). Pada tahun 2017 total Nilai Bahan Baku dan Penolong IKM adalah sebesar Rp. 8.620.133 Milyar. Sementara itu, untuk Nilai Produksi ditaksir berjumlah sebesar Rp. 12.463.257 Milyar. Dengan demikian nilai tambah produk IKM di DIY bernilai sebesar Rp. 3.843.124 Milyar pada tahun 2017. Nilai tambah tersebut meningkat cukup pesat sebesar 44,58% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun ada peningkatan daya saing pada produk DIY dibanding pesaingnya. Kedepannya untuk mempertahankan daya saing tersebut, perlu dilakukan berbagai strategi antara lain melalui penguatan dan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual serta peningkatan inovasi teknologi terapan yang dapat diaplikasikan secara komersial.

Industri-industri berkelompok pada suatu wilayah dan membentuk sentra. Tercatat ada sebanyak 313 sentra IKM yang tersebar di kabupaten/kota wilayah DIY dengan jumlah unit usaha sebanyak 17.866 unit dan serapan tenaga kerja sebanyak 55.891 orang. Jum;ah sentra terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo dengan persentase sebesar 30,67%, diikuti oleh Kabupaten Bantul (24,92%), Kabupaten Gunungkidul (21,41%), Kabupaten Sleman (16,61%), dan persentase terkecil dimiliki oleh Kota Yogyakarta (6,39%). Sementara itu, apabila ditilik dari kapasitas produksinya, Kabupaten Sleman memiliki

persentase tertinggi sebesar 205.587.035 unit (55,54%) dengan nilai investasi sebesar 146.999.860 ribu rupiah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah DIY. Hal tersebut menandakan sentra IKM di Kabupaten Sleman lebih maju apabila dibandingkan dengan 4 Kabupaten/Kota lain. Kedepannya Kabupaten/Kota lainnya agar dapat mengikuti jejak Kabupaten Sleman dengan peningkatan investasinya akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru

Tabel 2-117 Data Sentra IKM di DIY per Kabupaten/Kota Tahun 2017

No	KABUPATEN/KOTA	SENTRA	UNIT USAHA (Unit)	TENAGA KERJA (Orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Kapasitas Produksi (Unit)
1	Kota Yogyakarta	20	340	1,884	22,367,922	3,924,900
2	Sleman	52	4,026	11,966	146,999,860	205,587,035
3	Bantul	78	5,745	15,658	27,333,455	11,404,687
4	Kulon Progo	96	5,696	18,199	139,942,718	127,160,237
5	Gunung Kidul	67	2,059	8,184	43,771,951	22,055,571
	JUMLAH	313	17,866	55,891	380,415,906	370,132,430

Industri pengolahan di DIY didominasi oleh industri makanan dan kerajinan. Namun demikian, setiap kabupaten/kota memiliki karakter potensi industri masing-masing. Berdasarkan Sensus Ekonomi tahun 2016 golongan usaha industri yang cukup dominan di Bantul adalah industri makanan, industri barang dari kayu, industri pakaian jadi, industri gerabah, dan industri tekstil. Pada umumnya, industri yang berkembang di Bantul merupakan industri kerajinan lokal yang menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat, tapi memiliki daya saing yang cukup tinggi.Sementara itu, untuk Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh industri berbasis pertanian (agroindustri) dan industri makanan. Usaha industri yang cukup strategis bagi Gunungkidul adalah pengolahan barang dari kayu, anyaman bambu, dan lainnya.

Jenis usaha industri yang paling banyak di Kabupaten Kulon Progo adalah industri gula kelapa/gula jawa/gula merah/gula semut. Usaha industri ini menggunakan bahan baku utama dari nira/aren kelapa lokal yang banyak diusahakan di wilayah Kulon Progo. Sentra jenis usaha ini banyak dijumpai di

wilayah kecamatan Kokap dan kecamatan lain seperti Girimulyo, Lendah, dan Kalibawang. Meskipun seringnya adalah usaha sampingan, permintaan ekspor komoditas ini cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan. Jenis industri makanan. Selanjutnya, untuk wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman, perekonomian sudah didominasi oleh sektor jasa seperti penyediaan jasa akomodasi, transportasi dan perdagangan. Namun demikian, beberapa industri makanan masih cukup banyak ditemui di kawasan perkotaan seperti industri bakpia di kawasan Pathuk

2.1.3.2.8 Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi.

Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana, sedangkan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering),* maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan demand side, yaitu pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat yang melibatkan Pemerintah Provinsi dengan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran juga telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi melalui mekanisme KSAD (Kerjasama Antar Daerah). Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Hingga saat ini, animo masyarakat DIY untuk bertransmigrasi masih cukup tinggi melebihi kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat namun dengan kecenderungan yang semakin menurun.

Tabel 2-118 Jumlah Animo Masyarakat dan Pendaftar Transmigrasi di DIY Tahun 2013-2017

KAB/KOTA	2013		2014		2015		2016		2017	
	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar
	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)		
Yogyakarta	74	48	59	39	71	47	55	41	64	42
Sleman	465	465	468	468	281	281	286	286	50	28
Bantul	260	130	334	167	210	105	172	81	76	4
Kulon Progo	312	122	338	133	343	137	270	117	165	91
Gunungkidul	104	50	155	98	40	30	70	44	29	7
Jumlah	1.215	815	1.354	905	945	600	853	569	384	172

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Menurunnya animo juga sejalan dengan menurunnya kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Selama kurun 2013-2017, Pemerintah DIY memberangkatkan transmigran sebanyak 464 KK terdiri dari 1.469 jiwa. Jika dilihat dari daerah asal transmigran, selama kurun waktu 2013 hingga 2017 mayoritas transmigran berasal dari Kabupaten Bantul dengan jumlah 153 KK atau 481 jiwa, sedangkan terendah dari Kota Yogyakarta dengan jumlah 49 KK (154 jiwa). Angka ini jika dilihat per tahun cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena penurunan kuota yang didapatkan oleh Pemda DIY dari tahun ke tahun. Tahun 2016 kuota transmigran untuk Pemda DIY sebanyak 80 KK, sedangkan pada 2017 hanya mendapatkan kuota sebanyak 48 KK

Tabel 2-119 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2013-2017

Kabupaten/ Kota	Tahun										Total	
	2013		2014		2015		2016		2017			
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Yogyakarta	15	46	5	15	12	39	10	33	7	21	49	154
Sleman	10	31	11	36	22	82	9	27	7	22	59	198
Bantul	53	168	23	73	40	128	25	75	12	37	153	481
Kulon Progo	47	138	19	65	27	85	16	48	16	43	125	379
Gunungkidul	25	75	12	41	15	56	20	64	6	21	78	257
JUMLAH	150	458	70	230	116	390	80	247	48	144	464	1469

Sumber: BPS, DIY dalam Angka, beberapa tahun terbitan dan Disnakertrans DIY

Berdasarkan lokasi penempatan transmigran, Provinsi Sumatera Selatan tercatat menjadi tujuan utama transmigran asal DIY selama tahun 2013 hingga 2015. Jumlah transmigran yang ditempatkan di Sumatera selatan mencapai 135 KK dengan proporsi 40,2%. Meskipun demikian, realisasi jumlah transmigran ke Sumatera Selatan dalam dua tahun terakhir cenderung menurun karena ada beberapa lokasi tujuan transmigrasi alternatif yang lain yang disediakan oleh pemerintah pusat dan pada tahun 2016 hanya ada 3 lokasi tujuan alternatif transmigran asal DIY yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dengan proporsi terbanyak di Kalimantan Utara (62,5%) dengan jumlah keluarga sebanyak 50 KK.

Tabel 2-120 Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2013-2016

Daerah Tujuan	Tahun							
	2013		2014		2015		2016	
	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
Sumatera Selatan	90	(60,00)	20	(28,6)	25	(21,6)	-	-
Kalimantan Barat	10	(6,7)	15	(21,4)	-	-	10	(12,5)
Kalimantan Tengah	25	(16,7)	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	50	(43,1)	50	(62,5)
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	20	(25,0)
Sulawesi Selatan	15	(10,0)	-	-	25	(21,6)	-	-
Sulawesi Tenggara	10	(6,7)	25	(35,7)	16	(13,8)	-	-
Bangka Belitung	-	-	10	(14,3)	-	-	-	-
Jumlah	150	(100)	70	(100)	116	(100)	80	(100)

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Sedangkan untuk tahun 2017, lokasi transmigrasi ada di Sulawesi Tengah (9 KK), Sulawesi Tenggara (12 KK), Gorontalo (9 KK) dan Sumatera Selatan (18KK) dengan rincian alokasi penempatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2-121 Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2017

DAERAH TUJUAN	KABUPATEN/KOTA										JUMLAH REALISASI	
	KOTA		SLEMAN		BANTUL		KULON PROGO		GUNUNGKIDUL			
	Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi			
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Kabera, Kab. Morowali, Sulteng	0	0	2	7	2	6	3	7	2	6	9	26
Parudongka, Kab. Konawe, Sultra	2	8	0	0	5	17	5	17	0	0	12	42
Bukit Aren, Kab. Gorontalo, Gorontalo	2	5	3	9	2	3	2	3	0	0	9	20
Kaban Agung, Kab. Lahat, Sumsel	3	8	0	0	0	0	3	9	4	15	10	32
Simpang Tiga SPS, Ogan Komering Ilir, Sumsel	0	0	2	6	3	11	3	7	0	0	8	24
JUMLAH	7	21	7	22	12	37	16	43	6	21	48	144

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Besarnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi dan jumlah pendaftar calon transmigrasi belum sebanding dengan kuota/alokasi penempatan transmigrasi oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan pendaftar transmigrasi perlu dilakukan penambahan alokasi program penempatan dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, penjajakan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi dan melakukan penjajakan pelaksanaan transmigrasi lokal.

2.1.3.3 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.3.1 Urusan Sekretariat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas; dan
e. badan.

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada gubernur.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Daerah,Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan program lingkup Sekretariat Daerah;
b. penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur pemerintah daerah;
f. pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
g. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Pimpinan : Sekretaris Daerah;

b. Pembantu Pimpinan : Asisten Sekretariat Daerah;
c. Pelaksana : Biro-Biro yang terdiri dari Bagian-bagian dan Bagian-bagian terdiri dari Subbagian-subbagian; dan
d. kelompok jabatan fungsional.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terlambat atau belum keluarnya Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi semangat untuk lahirnya beberapa regulasi baru. Salah satu poin penting dari undang-undang tersebut adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berimplikasi pada pengalihan beberapa urusan dari dan atau antar tingkat pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur sipil negara.

Penyelenggaraan urusan tersebut tentunya berdampak pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan sesuai bidangnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya ManusiaAparatur Sipil Negara yang diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan serta peningkatan skor Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, pada tahun 2017, Pemerintah DaerahDaerah Istimewa Yogyakartamendukung gerakan *one agency one innovation* dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 065/12017 tentang Inovasi Pelayanan Publik. Hal tersebut juga diikuti dengan penyusunan regulasi pedoman teknis penyusunan inovasi pelayanan publik yang diharapkan menjadi panduan bagi unit layanan dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan dan replikatif. Peningkatan pelayanan publik pada tahun 2017 secara nyata dibuktikan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakatyang melebihi target serta keberhasilan Pemerintah DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik sebagai salah satu 25 Top Inovator se-Indonesia.

Dalam hal kelembagaan daerah pada tahun 2017, indikator sasaranPersentase Kelembagan Perangkat Daerah yang Proporsional tercapai sebesar 101,63%, dari target sebesar 84% tercapai sebesar 85,37%. Capaian ini terdapat kenaikan sebesar 7,69% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Angka capaian tahun 2017 ini berkontribusi sebesar 97,43% terhadap target akhir RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017. Capaian indikator ini diantaranya didukung oleh dukungan anggaran, komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan serta meningkatnya kapasitas SDM aparatur pelaksana.

Untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Minimal Baik, capaian sebesar 111,29%. Target di tahun 2017 sebesar 84% tercapai sebesar 93,48% dan berkontribusi sebesar 97,22% terhadap target akhir RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017. Faktor pendukung pencapaian target indikator tersebut di tahun 2017 diantaranya adanya ekspose hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 dari 63 unit layanan dan RS Grhasia yang mampu mendorong masing-masing unit layanan untuk berupaya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk indikator sasaran Persentase SKPD yang Menerapkan SOP tercapai sebesar 106,71%. Hal ini dikarenakan realisasi di tahun 2017 adalah sebesar 85,37% dari targer 80%.

2.1.3.3.2 Urusan Sekretariat DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerjalembaga perwakilan rakyat Daerah, denganmemperhatikan pedoman penyusunan organisasi PerangkatDaerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyediakan sarana, anggaran,dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksisesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikankemampuan APBD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pegawai sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berasal dari pegawai negeri sipil.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yangdiperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsinyasesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya secarateknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepadakepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiriatas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraanPemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdan kepala daerah.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakanUrusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengandemikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitrasejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsipembentukan Perda,

anggaran dan pengawasan, sedangkan kepaladaerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakanDaerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah dibantuoleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak,kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diatur dalambeberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secaraterintegrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berbeda dengan provinsi lainnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung, namun melalui proses penetapan Sultan Yogyakarta yang bertahta menjadi Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahta menjadi Wakil Gubernur sebagai salah satu wujud keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja;
b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
c. penyelenggaraan administrasi keuangan;
d. penyelenggaraan rapat-rapat;
e. penyiapan serta pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

g. penyiapan pertimbangan teknis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
h. fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, pengawasan dan pengkajian informasi;
i. fasilitasi pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan;
j. fasilitasi pelantikan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
k. fasilitasi penetapan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur;
l. pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
m. pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan aspirasi masyarakat;
n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
o. pengaturan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tabel 2-122 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat DPRDdi DIY Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017	Target Akhir RPJMD 2017
Prosentase prolegda yangterselesaikan	99%	88,9%	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
Persentase perda, perdais,pembahasan anggaran danLKPJ Gubernur yangterselesaikan tepat waktu	n.a.*	n.a.*	95,66%	n.a.*	n.a.*	n.a.*
Persentase Penyelesaian agendaDPRD tepat waktu.	n.a.*	n.a.*	n.a.*	94,21%	100%	100%

Sumber:http://monevapbd.jogjaprov.go.id/
**Ket.: n.a. karena terjadi perubahan indikator sasaran SKPD akibat review RPJMD 2012-2017*

2.1.3.3.3 Urusan Inspektorat

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di jajaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa :

1. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upayayang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah
2. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proseskegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerahberjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisah daripelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan / kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilanpelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukanpembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akandicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Inspektorat sampai dengan bulan Desember 2017telah melakukanpemeriksaan reguler sebanyak 160 obyek pemeriksaan, danmelakukan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2016 terhadap 42 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY. Hasil dari pemeriksaan tahun 2017 terdapat 212 temuan dengan 529 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti sejumlah 472 (89.2 %). Adapun 57(10,8) rekomendasi baru dalam proses tindak lanjut, hal ini dikarenakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nopemberdandesemberbaru diselesaikan di awaltahun 2018.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat DIY Tahun 2017 telah melakukan :

a. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu
b. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan
c. Kegiatan pengusutan
d. Melakukan Evaluasi LAKIP
e. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)
f. Review Atas Laporan Keuangan SKPD dan Pemda DIY
g. Evaluasi AKIP Kabupaten/Kota
h. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :

a. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD
b. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan

c. Pencermatan RKA SKPD
d. *Consulting* dan *Quality Assurance*
e. Melakukan Kas Opname dan Stok Opname
f. Pendampingan pengelolaan dana keistimewaan SKPD

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 akan terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan *input* menjadi tercapainya keseimbangan antara *output*dengan *outcome*.

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat DIY pada 2018 akan melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal.

2.1.3.3.4 Urusan Perencanaan

Tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Pada tahun kedua ini, dokumen RPJMD telah bersifat definitif dan menjadi acuan keseluruhan perencanaan pembangunan di DIY. Keberadaan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah merupakan suatu pedoman dalam perencanaan pembangunan di DIY sampai dengan tahun 2022.

Perencanaan tahun 2019 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan di DIY dengan menggunakan peraturan terbaru mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, seiring dengan

sudah tidak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010.

Perencanaan pembangunan, harus berorientasi pada proses dan substansi. Perencanaan yang berorientasi pada proses, dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksankan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Keseluruhan pendekatan perencanaan tersebut secara kontinyu telah dilaksanakan oleh Pemerintah DIY.

Di samping perencanaan yang berorientasi pada proses, mengacu Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tersebut, perencanaan pembangunan juga harus berorientasi pada substansi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif, dan spasial. Dengan pendekatan ini, perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.Pelaksanaan perencanaan pembangunan harus menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan pendekatan spasial yaitu dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Pendekatan ini mulai digunakan oleh pemerintah pusat dalam penyusunan RKP Tahun 2017. Pemerintah DIY mulai melaksanakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial pada tahun 2017 yaitu pada saat penyusunan background study RPJMD.

2.1.3.3.5 Urusan Keuangan

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak 2012 sampai tahun 2016. Kinerja pengelolaan

keuangan daerah di DIY secara administrasi sudah sangat baik, baik untuk kinerja pendapatan, belanja maupun pembiayaan semua indikator dalam kriteria baik. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah, namun perlu memperhatikan sektor belanja daerah, karena belanja daerah yang tepat dan lebih baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perbaikan kualitas dan efisiensi belanja menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Pengelolaan belanja tidak hanya memperhatikan *magnitude* keterserapan anggaran namun juga ketepatan, kecepatan keterserapan, dan juga pemerataan *disbursement* anggaran belanja. Penghematan dilakukan secara selektif, diupayakan semaksimal mungkin tidak mengganggu belanja belanja prioritas yang mempunyai leverage tinggi bagi pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan pendapatan tidak lagi hanya dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi yang telah *given* ditetapkan dalam UU 28 Tahun 2009. Perkembangan dan dinamika pengelolaaan keuangan daerah telah memunculkan dan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah untuk mengawal, mengelola dan mengoptimalkan "aset keuangan" yang dimiliki. Pemerintah daerah memiliki motivasi yang tinggi untuk memperoleh penghargaan dalam bidang manajemen aset dan berperan aktif sebagai "pelaku usaha/investor" sebagai wujud inovasi dan kreasi dalam mencari sumber pendanaan untuk meningkatkan perekonomian daerah (Zhang, 2016). Daerah diberi ruang lebih sesuai dengan semangat desentralisasi daerah untuk mengembangkan investasi daerah, melakukan kerjasama antar daerah, dan melakukan pinjaman daerah. Penguatan kesadaran dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan aset daerah dapat meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah melalui alokasi sumber daya secara efektif, efisien, ekonomis dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan meningkat. Namun tentu saja hal ini tidak boleh meninggalkan fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas (*public service delivery)* dan peran pemerintah untuk mewakili kepentingan masyarakat (*government representing public interests).*

Dari berbagai komponen pendapatan dapat kami sajikan perkembangan Pendapatan DIY dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 2-123 Realisasi Pendapatan Daerah DIY Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017 (unaudited)
1.	Pendapatan Daerah	3.139.871.880.417,26	3.400.014.811.776,00	3.899.192.985.313,51	5.038.623.999.805,17
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.464.604.954.200,26	1.593.110.769.594,00	1.673.749.196.521,51	1.827.622.200.982,17
1.2	Dana Perimbangan	1.013.811.389.590,00	1.021.886.268.197,00	1.697.108.535.480,00	2.243.153.873.440,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	661.455.536.627,00	785.017.773.985,00	528.335.253.312,00	967.847.925.383,00

Pendapatan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 (unaudited) sebesar Rp.5.038.623.999.805,17. Terjadi peningkatan pendapatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 ke 2017 karena adanya Proses Pengalihan Personel, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (*P3D*) dari kabupaten/kota ke Provinsi sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 sehingga terjadi penambahan pendapatan khususnya dari DAU, DAK non Fisik, Tamsil, Tunjangan Profesi Guru (TPG). Meskipun Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh sebesar 5,06 % (2015-2016) dan menjadi 9,19 % (2016-2017) namun, jika dilihat dari proporsi rata-rata realisasi PAD dibandingkan dengan Realisasi Total Pendapatan Daerah (PD) hanya sebesar 44% (2012-2017). Tahun 2017 proporsi PAD dengan Total PD turun sebesar 6% dari tahun 2016 (42% menjadi 36%). Konsekuensi peningkatan PAD berpengaruh pada penurunan penerimaan Dana Perimbangan karena salah satu penyebabnya adalah rumus penghitungan DAU, PAD sebagai variabel pengurang dalam penghitungan Celah Fiskal (CF). Kinerja penerimaan Pendapatan Daerah DIY selain didukung oleh peningkatan PAD juga peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang tumbuh pesat mencapai 83,19% pada tahun 2016-2017. Hasil retribusi daerah DIY relatif rendah terhadap PAD hanya berkisar 2-3% meskipun jika dilihat dari persentasi pertumbuhannya mengalami perbaikan/peningkatan yang signifikan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh pesat dari tahun 2016-2017 mencapai 22% lebih artinya ada perbaikan atas kinerja Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang lebih banyak dikontribusikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai lembaga keuangan Bank yang modalnya 90% lebih dari Pemda DIY.

Masalah pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi permasalahan yang serius karena dari 7,15 Triliun aset Pemerintah Daerah DIY terdiri dari 6,91 Triliun Aset Tupoksi/ ada di pengguna barang dan masih ada sekitar 240 Milyar Aset Pemda yang Non-Tupoksi ada di pengelola barang yang dapat dioptimalkan melalui investasi. Dari total Aset Pemda 7,15 Triliun sekitar 28 Milyar yang kondisinya rusak berat dan yang dapat dimanfaatkan hanya sekitar 249 Milyar. Identifikasi permasalahan pengelolaan BMD yang telah dilakukan oleh Pemda DIY menjadi modal untuk mencari solusi terbaik dalam pemanfaatan BMD, karena jenis dan lokasi BMD yang sangat beragam beserta status kepemilikannya yang relatif rumit menjadi fokus bagi Pemda DIY untuk mentreatment tiap-tiap jenis BMD agar dapat dikelola dengan baik.

Komponen lain dalam keuangan daerah adalah pengeluaran atau belanja daerah. Belanja daerah diharuskan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat, aspek layanan dasar, dukungan terhadap tematik pembangunan yang terdiri dari ; ketimpangan wilayah, kemiskinan, pembangunan *New Yogyakarta International Airport* dan pembiayaan pembangunan.

Tabel 2-124 Kemampuan Keuangan Daerah DIY

No	Uraian	2016	2017	Tambah /(kurang)	
1	Pendapatan Asli Daerah	1.553.180.369.527,-	1.657.147.882.128,-	103.967.512.601,-	6,69%
2.	APBD	4.189.992.196.186,-	5.200.386.011.001,-	1.010.393.814.814,-	24,11%
3.	Belanja Tidak Langsung	2.070.916.316.654,-	2.779.012.765.965,-	708.096.449.311	34,19%
4.	Belanja Gaji Dan Tunjangan	632.402.208.576,-	1.316.547.064.995,-	684.144.856.419	108,18%
5.	Belanja Tidak Langsung Di Luar Gaji dan Tunjangan	1.438.514.108.078,-	1.462.465.700.970,-	23.951.592.891	1,67%
6.	Belanja Langsung	2.119.075.879.532,-	2.421.373.245.035,-	302.297.365.503	14,27%

Kontribusi PAD terhadap APBD DIY 2016-2017 mengalami penurunan sebesar 5,2% sejalan dengan penurunan perbandingan PAD dengan Belanja Langsung yang turun sebesar 4,86%. Jika dilihat dari kemampuan PAD untuk membiayai

Belanja Tidak Langsung dengan asumsi seluruh PAD digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung hanya dapat membiayai 65% dari total Belanja Tidak Langsung. Dilihat secara detail komponen dari Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Gaji dan Tunjangan cukup besar, hampir 73% PAD digunakan untuk membiayai Belanja Gaji dan Tunjangan artinya ruang kapasitas PAD untuk membiayai Belanja Tidak Langsung di luar Belanja Gaji dan Pegawai sangat kecil hanya 27%. Meninjau kondisi perbandingan dan rasio antara PAD dengan Belanja baik langsung maupun tidak langsung, tahun 2019 ini perlu menjadi pemikiran bersama agar peningkatan belanja terutama Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) dan penurunan Belanja Tidak Langsung diimbangi dengan peningkatan PAD yang signifikan sehingga PAD paling tidak sama dengan Belanja Langsung ditambah Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung naik terutama pada Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa mengingat RKPD 2018, disebutkan bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat (RPJMN 2015-2019) yang fokus pada pembangunan infrastruktur membutuhkan pendanaan cukup besar.

Komponen terakhir dalam keuangan daerah adalah pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah jika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan, transfer ke dana cadangan. Arah kebijakan pembiayaan pembangunan mengacu pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi lebih terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Penguatan kesadaran dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan aset daerah (optimalisasi aset daerah), fokus pembangunan pemerintah di bidang infrastruktur yang memerlukan pendanaan yang cukup besar, investasi daerah dan masalah kemiskinan-ketimpangan di DIY menjadikan isu keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi penting. Perencanaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2019, perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan

keuangan (*financial sustainability).* Fokus keberlanjutan keuangan mencakup keberlanjutan modal infrastruktur (*infrastructure capital sustainability)* dan Keberlanjutan modal keuangan (*financial capital sustainability).*

2.1.3.3.6 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai merupakan unsur utama dalam organisasi dan memegang peranan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Pegawai dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Profesionalisme PNS dibentuk sejak perekrutan pegawai, penempatan hingga tataran selanjutnya dalam jenjang karir. Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan yang tepat akan menempatkan seseorang pada jabatan yang tepat. Pola karir PNS akan memandu karir PNS sejak CPNS hingga pensiun.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem *reward and punishment*. *Reward* diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai dan instansi. Penilaian kinerja mempertimbangkan kinerja instansi dan kinerja individu. Formulasi penilaian kinerja PNS dikembangkan secara proporsional dari tahun ke tahun. *Punishment* diterapkan kepada PNS berupa penegakan peraturan perundangan sesuai peraturan yang berlaku.

Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan salah satu hal utama yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan dengan mengirim PNS dalam tugas belajar, pendidikan formal secara mandiri serta pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.

Peran pegawai dalam hal ini sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pegawai ASN Berfungsi Sebagai:

a. pelaksana kebijakan publik;
b. pelayan publik; dan
c. perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), penempatan Pegawai memperhatikan:

1. Kualifikasi Pendidikan,
2. Kompetensi, dan
3. Kinerja.

Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, rencana pengisian jabatan setelah perubahan kelembagaan memperhatikan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 tanggal 20 September 2016.

Tabel 2-125 Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Pejabat Struktural

No	Jumlah PNS	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan**	**7.742**	**11.841**	**6.707**	**12.232**
2	Golongan I	270	144	146	162
3	Golongan II	1.273	1.536	1.049	1.218
4	Golongan III	3.523	5.178	4.274	6.762
5	Golongan IV	2.676	4.983	1.238	4.090
6	**Jumlah Pejabat Struktural**	**885**	**823**	**871**	**970**
7	Eselon I	0	0	0	1
8	Eselon II	26	30	46	41
9	Eselon III	136	151	223	222
10	Eselon IV	696	580	596	640
11	Eselon V	27	62	6	66

sumber data : DATAKU BSD BAPPEDA DIY

Sampai dengan akhir Tahun 2017, Jumlah PNS berdasarkan keseluruhan golongan berjumlah 12.232 orang dengan keseluruhan jumlah pejabat eselon dari eselon V sampai dengan eselon I sejumlah 970 orang.

Sementara itu dari unsur pendidikan dan pelatihan yang selama ini berada di Badan Pendidikan dan Pelatihan, hasil Nilai Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara Ripada tahun 2017 adalah A, sehingga ke depan peningkatan kualitas kediklatan di DIY harus semakin menghasilkan PNS yang berkualitas pula.

2.1.3.3.7 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Program/kegiatan Litbang yang lebih efektif menunjang pembangunan daerah, membutuhkan upaya peningkatan jumlah dan kualitas program/kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih berbobot pula, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat bagi upaya pemecahan masalah-masalah dalam pencapaian tujuan. Hal ini perlu disadari bersama, bahwa program/kegiatan pembangunan pada hakekatnya diselenggarakan untuk tujuan memecahkan

masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi dalam lingkungan masyarakat bangsa.

Dalam kerangka mewujudkan fungsi dan tugas bidang kelitbangan, peranan Unit Litbang Pemerintah Daerah antara lain adalah sebagai dapur kebijakan (*think tank*) penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memfasilitasi berbagai langkah kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan pada umumnya maupun secara khusus dalam kerangka peningkatan kinerja kelitbangan di daerah. Dalam hal ini, upaya pengelolaan kegiatan penelitian dan pengembangan seharusnya dilakukan dalam sistem dan prosedur pengelolaan litbang satu pintu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, disadari bahwa masih terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi berkaitan masalah bidang kelitbangan, termasuk diantaranya adalah persoalan klasik berkenaan eksistensi dan peran litbang. Dalam hal ini, eksistensi dan peran unit kelembagaan Litbang di daerah pada umumnya dirasakan masih belum berdaya memenuhi ketentuan kebijakan bidang kelitbangan dan ristek, antara lain Permendagri 20 Tahun 2011, Permendagri 36 Tahun 2012, Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri tentang Penguatan SIDa.

Dengan terbitnya Perpres No 32 Tahun 2011 tentang MP3EI, maka berimplikasi bahwa Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia berkewajiban melakukan pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIDa). Bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Pemda, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan MP3EI 2011-2025 diperlukan penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) secara terarah dan berkesinambungan. Dengan adanya penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa), maka daerah-daerah diharapkan dapat mewujudkan interaksi kemitraan yang strategis diantara pelaku-pelaku inovasi (pemerintah, pebisnis, akademisi, dan masyarakat) dalam membangun sistem inovasi.

Sementara itu, kebijakan-kebijakan regulatif dan perangkat instrumen pendukung kebijakan di bidang Litbang dan Ristek secara umum belum kondusif dapat dimplementasikan secara efektif di daerah-daerah. Hal tersebut kiranya tidak dapat dipisahkan pula dengan persoalan komitmen dan persepsi yang muncul di kalangan aparatur daerah yang masih belum sesuai kehendak melakukan pemberdayaan unit kelembagaan Litbang di daerah-daerah. Dalam kondisi demikian sesungguhnya pula berhubungan erat dengan persoalan masih kurangnya informasi karena terbatasnya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kelitbangan dan ristek.

Pada sisi yang lain, di wilayah DIY terdapat banyak potensi kelitbangan baik berupa kelembagaan litbang, lemlit dan sumberdaya manusia tenaga ahli/peneliti dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dengan beragam gagasan inovasi yang sangat kreatif. Kita juga telah banyak mendengar, mengetahui dan menyaksikan fenomena bermunculannya beragam hasil-hasil kajian teknologi tepat guna, produk inovasi baru dan industri kreatif yang dapat dikembangkan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat bangsa.

Dengan dasar pertimbangan pemikiran tersebut di atas, kegiatan berkaitan Sistem Informasi Daerah (SIDa) ini pada tahun anggaran 2019 menjadi perlu segera dilakukan secara bertahap dengan melibatkan unit instansi/SKPD dan komponen stakeholder kelitbangan terkait pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIDa) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Selanjutnya, diharapkan dapat terwujud upaya peningkatan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat dalam kerangka merealisasikan kehendak penguatan sistem inovasi di DIY melalui pembentukan tim koordinasi yang mampu mengawal program/kegiatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan litbang sebagai fasilitator dan koordinator pelaksanaan program Sistem Informasi Daerah (SIDa) di wilayah DIY.

Pada tahun 2017 telah tersusun dokumen Roadmap Pengauatan SIDa DIY yang didalamnya berisi arahan kebijakan strategis, program dan kegiatan prioritas, serta saran dan rekomendasi yang akan digunakan sebagai bahan untuk merusmuskan kebijakan pembangunan penguatan SIDa, sesuai kerangka sistematika yang telah dituangkan dalam Panduan Penguatan SIDa sebagai lampiran keputusan Menristek No. 41/M/Kp/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, sebagai berikut :

1. Kondisi SIDa saat ini
2. Tantangan dan peluang SIDa
3. Kondisi SIDa yang akan dicapai
4. Arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa
5. Program dan Kegiatan Prioritas
6. Rencana Aksi Penguatan SIDa

Para pemangku kepentingan utama dalam penelitian dan pengembangan di DIY sangat kaya dan beragam. Mensinergikan sumberdaya kelitbangan yang kaya tidak mudah, sekalipun ini tetap menjadi kebutuhan bagi pembangunan daerah. Sinergisitas mungkin dijalankan dalam relasi yang saling mengenal (*tepung)*, memahami (*dunung*), berjejaring kerja dan melaksanakan (*srawung*).

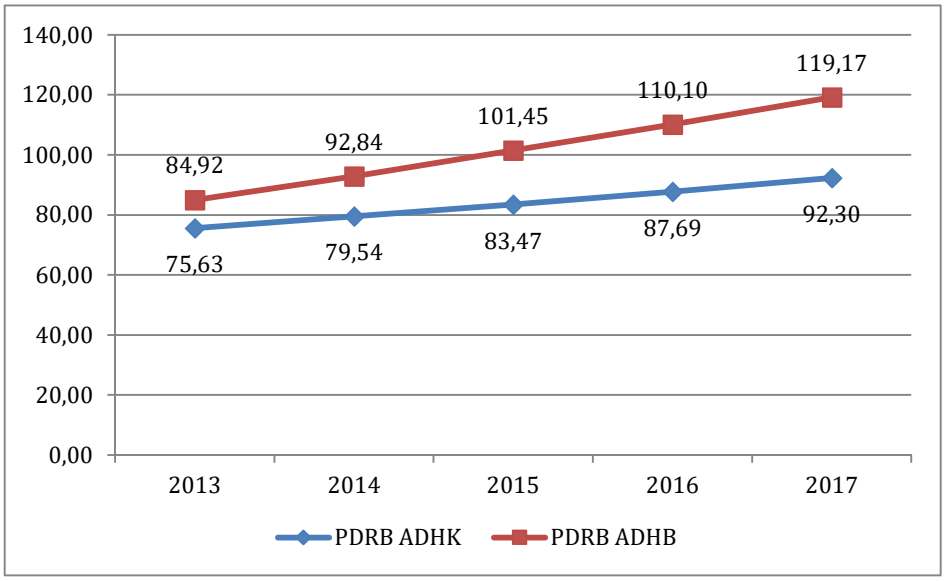
Sumberdaya kelitbangan di DIY dapat kembali disebutkan: IPT, Pemda, Instansi Vertikal, Dunia Usaha (PMA, PMDN, dan UMKM), Desa, Komunitas, dan sebagainya), Konsultan, dan Agensi Pengetahuan dan Teknologi. Oleh karena itu, sinergisitas R&D dapat ditempuh dengan membangun jejaring yang kuat terhadap pemangku kepentingan tersebut

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Aspek Kemampuan Ekonomian Daerah

Kondisi perekonomian DIY selama periode 2013-2017 menunjukkan perkembangan yang positif ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2013 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 84,92 triliun rupiah meningkat sebesar 34,25 triliun rupiah menjadi 119,17 triliun rupiah pada tahun 2017. Selama periode lima tahun tersebut tercatat peningkatan nilai PDRB tertinggi terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2017, yaitu sebesar 9,07 triliun rupiah. Perkembangan yang sama juga ditunjukkan oleh PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2-63 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Triliun Rupiah), 2013-2017

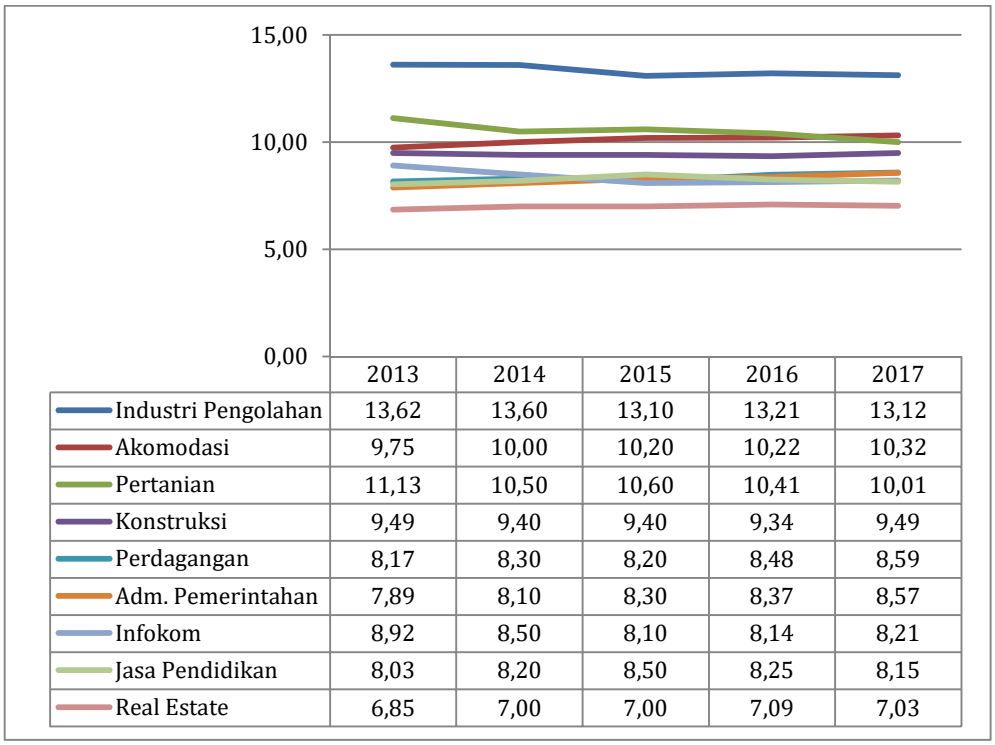
Menurut lapangan usaha, empat sektor penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB DIY adalah sektor industri pengolahan; pertanian,

kehutanan, dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makan minum; dan konstruksi. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi tertinggi dimana pada tahun 2017 tercatat sebesar 13,12%. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi memberikan kontribusi sebesar 10,32%, sektor pertanian dan sektor konstruksi berturut-turut penyumbang sebesar 10,01% dan 9,49%.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB terutama berasal dari industri pengolahan makanan dan minuman. Industri berskala besar yang memberikan sumbangan terhadap perekonomian daerah diantaranya adalah PT Sarihusada dan PT Madukismo. Sementara itu, pada skala mikro, industri kecil dan rumah tangga mempunyai kontribusi penting dalam perekonomian karena merupakan mata pencaharian utama penduduk DIY disamping pertanian.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebagai sektor penting dalam perekonomian seiring berkembangnya pariwisata DIY dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB mengalami kenaikkan dari tahun ke tahun. Lebih lanjut, meskipun kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan tiap tahunnya, sektor ini masih memberikan sumbangan cukup besar dalam pembentukan PDRB. Subsektor yang memiliki kontribusi signifikan pada sektor ini adalah pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian.

Sektor konstruksi merupakan penyumbang terbesar keempat pembentukan PDRB dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun sebesar 9,42%. Tiga sektor berikutnya adalah sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, sektor jasa pendidikan, dan sektor informasi dan komunikasi yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sekitar lebih dari 8% tiap tahunnya.

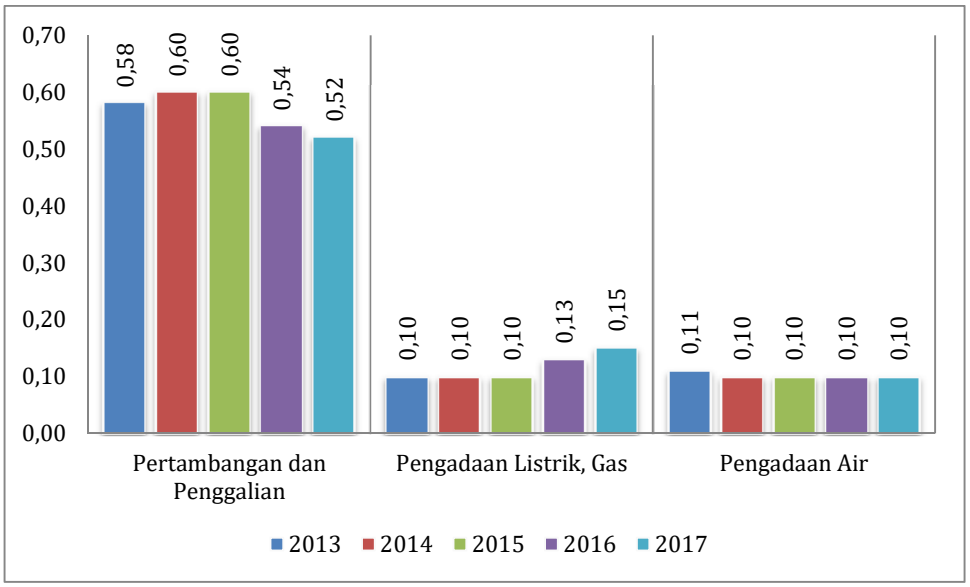


	2013	2014	2015	2016	2017
Industri Pengolahan	13,62	13,60	13,10	13,21	13,12
Akomodasi	9,75	10,00	10,20	10,22	10,32
Pertanian	11,13	10,50	10,60	10,41	10,01
Konstruksi	9,49	9,40	9,40	9,34	9,49
Perdagangan	8,17	8,30	8,20	8,48	8,59
Adm. Pemerintahan	7,89	8,10	8,30	8,37	8,57
Infokom	8,92	8,50	8,10	8,14	8,21
Jasa Pendidikan	8,03	8,20	8,50	8,25	8,15
Real Estate	6,85	7,00	7,00	7,09	7,03

sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 2-64 Kontribusi Terbesar terhadap PDRB ADHB DIY menurut Sektor (%), 2013-2017

Tiga sektor yang memiliki kontribusi terendah dalam pembentukan PDRB adalah sektor pengadaan air; sektor pengadaan listrik dan gas; serta sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi ketiga sektor tersebut tercatat kurang dari 1%.



sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 2-65 Kontribusi Terendah terhadap PDRB ADHB DIY menurut Sektor (%), Tahun 2013-2017

2.1.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Kemampuan ekonomi salah satunya diukur dengan tingkat pengeluaran rumah tangga. Indikator tersebut mencerminkan seberapa besar rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemampuan ekonomi rumah tangga di DIY cenderung mengalami penguatan jika dilihat dari perkembangan pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mempunyai kecenderungan peningkatan. Pengeluaran Konsumsi per Kapita pada tahun 2016 meningkat sebesar 52,93% dibandingkan tahun 2012. Peningkatan tersebut karena terjadi kenaikan baik dari pengeluaran komoditas makanan maupun non makanan. Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita pada tahun 2016 tercatat naik sebesar Rp 142.362 per kapita per bulan (15,33%) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 928.601 per kapita per bulan.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga untuk komoditas non makanan selalu lebih besar dari komoditas makanan. Proporsi rata-rata pengeluaran non makanan selama kurun waktu lima tahun sebesar 56,30% dan sisanya sebesar 43,70% untuk komoditas makanan. Sementara pada tahun 2016 proporsi rata-

rata pengeluaran non makanan naik menjadi Rp 636.958 per kapita per bulan (13,02%) dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 563.590 per kapita per bulan. Untuk proporsi rata-rata pengeluaran makanan naik menjadi Rp 434.005 per kapita per bulan (18,90%) dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 365.011 per kapita per bulan.

Tabel 2-126 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY, Tahun 2012-2016

Tahun	Makanan	Non Makanan	Jumlah
2012	327.242	373.055	700.297
2013	359.522	406.192	765.714
2014	355.504	392.800	748.304
2015	365.011	563.590	928.601
2016	434.005	636.958	1.070.963

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

Jika diukur dari kelompok komoditas non makanan, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan pada kurun waktu lima tahun terakhir lebih didominasi oleh Kelompok Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air dengan rata-rata proporsi selama 5 tahun (2012–2016) sebesar 40,05%. Kemudian diikuti oleh Kelompok Barang-Barang & Jasa dengan rata-rata proporsi sebesar 31,12%. Proporsi ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi non makanan sebagian besar diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Disisi lain, pada tahun 2016 terdapat penambahan jumlah klasifikasi kelompok yakni kelompok biaya pendidikan dan kelompok biaya kesehatan. Dengan adanya penambahan dua kelompok tersebut, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan pada tahun 2016 meningkat sebesar 13,02% dari semula Rp 563.590 per kapita per bulan pada tahun 2015.

Tabel 2-127 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, Tahun 2012-2016

Kelompok	Nilai (Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
1. Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air	135.795	147.181	146.720	247.836	290.937

Kelompok	Nilai (Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
2. Barang-Barang & Jasa	170.509	170.005	166.528	165.253	80.181
3. Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	20.967	20.665	19.987	26.368	30.884
4. Barang Tahan Lama	64.473	37.403	29.126	75.981	69.848
5. Pajak Pemakaian & Premi Asuransi	14.191	13.577	12.604	29.583	32.976
6. Keperluan pesta dan upacara	12.580	17.361	17.835	18.569	25.573
7. Biaya pendidikan	-	-	-	-	68.885
8. Biaya kesehatan	-	-	-	-	37.674
	418.515	406.192	392.800	563.590	636.958

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2013-2017

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat.Infrastruktur berperan penting sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan.

Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam mendukung daya saing daerah.

Pengelompokan sistem insfrastruktur dapat dibedakan menjadi:

a. Kelompok keairan

b. Kelompok distribusi dan produksi energi
c. Kelompok komunikasi
d. Kelompok transportasi (jalan, rel)

Perbaikan infrastruktur pada umumnya dapat meningkatkan mobilitas penduduk, mempercepat laju pengangkutan barang, memperbaiki kualitas dari jasa pengangkutan tersebut, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pembangunan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana pembangunan. Perbaikan infrastruktur akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini serta banyaknya investasi yang masuk akan menyerap tenaga kerja. Infrastruktur yang baik juga akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakat, karena aktifitas ekonomi yang semakin meningkat sebagai akibat mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan yang semakin tinggi.

2.1.4.2.1 Penyediaan Air Minum

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum. Peningkatan kebutuhan air minum akibat pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan aspek lainnya di DIY diproyeksikan kebutuhan air baku untuk air minum sebesar 6.998 L/det hingga tahun 2030. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berakses air minum dengan total penduduk DIY. Bila asumsi laju pertumbuhan penduduk 1% per tahun dan jumlah penduduk DIY pada tahun 2015 sebesar 3.604.176 jiwa, maka estimasi penduduk DIY pada tahun 2018 sebesar 3.676.620 jiwa.

Sampai dengan tahun 2017, persentase penduduk berakses air minum sudah mencapai 90,93%. Dalam mencapai target tersebut intervensi yang menjadi prioritas SPAM MBR, SPAM IKK dan SPAM Perdesaan yang penekanannya pada keberfungsian (kapasitasproduksi, SR/HU, jumlah jiwa terlayani serta distribusi air mengalir).

Data sampai dengan tahun 2016 persentase rumah tangga menurut sumber air utama yang digunakan untuk minum di Daerah Istimewa Yogyakarta dari sumber air sumur Bor/Pompa adalah sebesar 11,37%, dari sumur terlindung sebesar 41, 75 % dan dari perpipaan adalah sebesar 10,23%.

Pada daerah maju tapi tertekan *(retarted region)* seperti pada kawasan perkotaan Yogyakarta merupakan daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini

merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar. Pada daerah ini perlu dipikirkan langkah-langkah untuk menyediakan air minum layak dengan substitusi dari air tanah dangkal menjadi sistem perpipaan. Untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta membutuhkan pengembangan SPAM Regional. Pada tahun 2015 telah disusun Rencana Induk SPAM DIY melalui kegiatan perencanaan pengelolaan SPAM pada Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum. Pada program yang sama melalui kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum telah dilaksanakan pemasangan pipa jaringan distribusi Kartamantul sepanjang 15 Km untuk melayani 160.000 jiwa. Untuk mendukung pengembangan SPAM Regional Kartamantul telah dibuat DED SPAM Regional Kartamantul Sistem Kebonagung dan dokumen AMDAL SPAM regional Kartamantul.

Daerah maju dan cepat tumbuh *(rapid growth region)* adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan dalam hal ini meliputi Kawasan Bandara Baru NYIA dan sekitarnya. Penyediaan air minum dipenuhi dengan pembangunan SPAM regional kapet kulonprogo(bandara; pelabuhan; pasirbesi) , kawasan industri Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan kapasitas 500 l/dt.

2.1.4.2.2 Penyediaan Komunikasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai akselerator pembangunan akan bisa terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai tempat berjalannya lalu lintas data, tersedia dengan baik. Saat ini ada lebih dari 2.700 komputer yang terhubung dengan Jaringan Pemda DIY di 123 titik/lokasi dari 267 titik yang rencana terkoneksi (termasuk 118 titik baru SMU/SMK Negeri). Adapun rincian jalur koneksi di 123 titik yang terhubung dengan jaringan Pemda DIY adalah sebagai berikut:

a. 80 titik menggunakan jalur Fiber Optik (FO)
b. 42 titik menggunakan jalur Wireless, termasuk 12 BTS
c. 1 titik menggunakan VPN (Kaperda Jakarta)

Sesuai rencana awal, pemasangan jaringan Fiber Optik hanya dilaksanakan pada instansi yang berada di dalam kota tetapi seiring kebutuhan jaringan, instansi di

pinggiran kota juga dipasang koneksi Fiber Optik. Sampai pada tahun 2017 sudah terpasang sejumlah 80 titik dan akan terus ditambah setiap tahunnya. Untuk tahun mendatang diharapkan masih akan dapat membangun Fiber Optik di Kantor Samsat Sleman dan Balai Respira Bantul. Adapun pertimbangannya adalah kedua instansi tersebut nantinya akan dijadikan sebagai BTS jaringan wireless untuk instansi sekitar. BTS Respira Bantul untuk mengampu jaringan wireless sampai sampai Samsat Kulonprogo dan BTS Samsat Sleman untuk mengampu jaringan *wireless* di Panti Sosial Bina Remaja dan beberapa instansi di Kulonprogo dan Cangkingan Sleman.

Tabel 2-128 Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)			Anggaran (Rp)
	Kabel Tanah	Kabel Udara	Total	
2013	12.227	-	12.227	3.993.879.251
2014	21.876	12.007	33.883	6.189.000.000
2015	3.140	13.154	16,294	2.365.000.000
2016	-	1.000	1.000	350.350.000
2017		702		
Total	37.243	26.863	64.106	12.898.229.251

Sedangkan untuk *bandwidth* internet, besarannya selalu bertambah dari tahun ke tahun. Sebelum tahun 2015, Pemda DIY hanya menggunakan 1 ISP saja untuk mensuplai kebutuhan *bandwidth*, tetapi sejak tahun 2015 menggunakan 2 ISP. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar jika terjadi putus bandwidth pada 1 ISP masih bisa dibackup ISP yang lainnya sehingga ketersediaan bandwidth internet terutama untuk Data Center Pemda DIY tidak akan pernah terputus selama 1 x 24 jam. Alokasi *bandwidth* internet diatur oleh Dinas Kominfo Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informatika ke instansi Pemda DIY disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perangkat komputer yang ada.

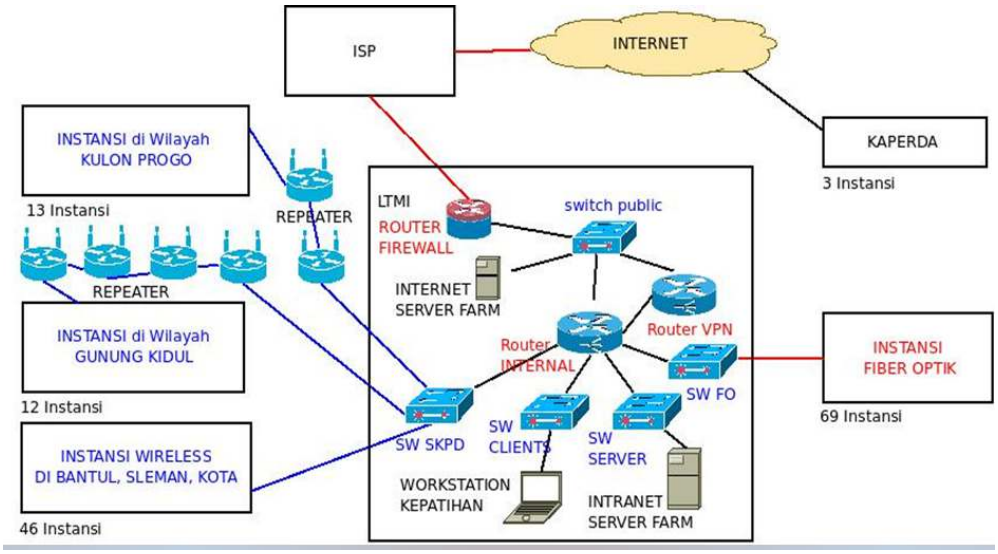
Tabel 2-129 Langganan Bandwidth Pemda DIY

Tahun	Besaran Bandwidth (Mbps)			Anggaran (Rp)
	JMN	G Media	Total	
2013	40	-		1.695.550.000
2014	-	132	132	1.697.203.200
2015	155	190	345	3.116.208.260
2016	190	220	410	3.195.931.200

Tahun	Besaran Bandwidth (Mbps)			Anggaran (Rp)
	JMN	G Media	Total	
2017	300	350	650	3.486.470.400
2018	400	400	800	3.526.798.000

Rencana kegiatan jaringan tahun 2018 pada 3 bulan ke depan:

1. Melaksanakan pemeliharaan jaringan Fiber Optik OPD pemda DIY
2. Melaksanakan pemeliharaan jaringan Wireless OPD pemda DIY
3. Melaksanakan pemeliharaan jaringan intranet OPD di Kompleks Kepatihan
4. Pengadaan Interkoneksi OPD Pemda:
   - Pemasangan jaringan baru di 4 OPD dan 21 SMU/SMK Negeri
     Sebanyak 3 titik menggunakan jaringan wireless dan 22 titik menggunakan jaringan *fiber optic.* Disamping itu juga akan melakukan interkoneksi jaringan Fiber Optik dengan kabupaten dan kota lewat Diskominfo Bantul, Diskominfo Sleman dan Diskominfo Kota Yogyakarta.
   - Revitalisasi peralatan jaringan di NOC Pemda DIY
     Peralatan jaringan saat ini hanya bisa mengampu *bandwidth* internet di bawah 1 Gbps, sedangkan pada tahun 2019 bandwidth Pemda DIY diperkirakan lebih dari 1 Gbps untuk itu perlu dilakukan revitalisasi peralatan jaringan. Pada tahun 2019 Pemda DIY akan mensuplai bandwidth desa di kabupaten bantul, kabupaten sleman dan kota Yogyakarta. Nantinya setiap desa akan mendapat alokasi bandwidth 10 Mbps lewat Dinas Kominfo masing-masing kab/kota.
   - Sentralisasi WIFI terpadu di kompleks kepatihan (50 titik)
     Untuk mempermudah layanan koneksi internet dan keamanan informasi.
   - Pemasangan CCTV di kompleks kepatihan (30 titik)
     Untuk pencegahan dan pengawasan keamanan di kompleks kepatihan



Gambar 2-66 Skema Jaringan Fiber Optik Mandiri Pemerintah DIY

2.1.4.2.3 Layanan Transportasi

Aksesibilitas memegang peranan penting dalam upaya perkembangan suatu daerah. Untuk menningkatkatkan ksesibilitas maka perlu dilakukan pengembangan baik jaringan jalan maupun sarana transportasi yang melayani suatu wilayah.

2.1.4.2.3.1 Pengembangan Jaringan Jalan.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi terjadi perubahan panjang total ruas jalan provinsi menjadi sepanjang 760,45 Km. Ruas jalan tersebut bertambah dari kondisi sebelumnya karena ada ruas-ruas jalan yang beralih status dari jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi dan ada pula ruas jalan provinsi yang menjadi jalan nasional.

Pemerintah DIY telah mendesain Rencana Pengembangan Jaringan Jalan di DIY. Rencana pengembangan ini meliputi penyelesaian JJLS untuk mendukung Kawasan Selatan DIY dan Bandara Baru NYIA. Untuk mendukung pengembangan wilayah Kulon Progo bagian utara sebagai penyangga KSPN Borobudur dan sebagai jalur konektivitas Bandra NYIA – KSPN Borobudur akan dilakukan kajian aksesibilitas jalur Bedah Menoreh yang terdiri dari Jalan Provinsi dan kabupaten. Pengembangan Ruas Jalan Prambanan-Gading untuk

mengembangkan jalur konektivitas antar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) : KSPN Prambanan – Kawasan Gunung Api Purba – KSPN Karst Gunungkidul, disamping untuk membuka akses perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul serta dalam rangka mendukung pertumbuhan dan bangkitan ekonomi di area yang dilalui.



Sumber : Bappeda DIY, 2017

Gambar 2-67 Rencana sistem jaringan jalan

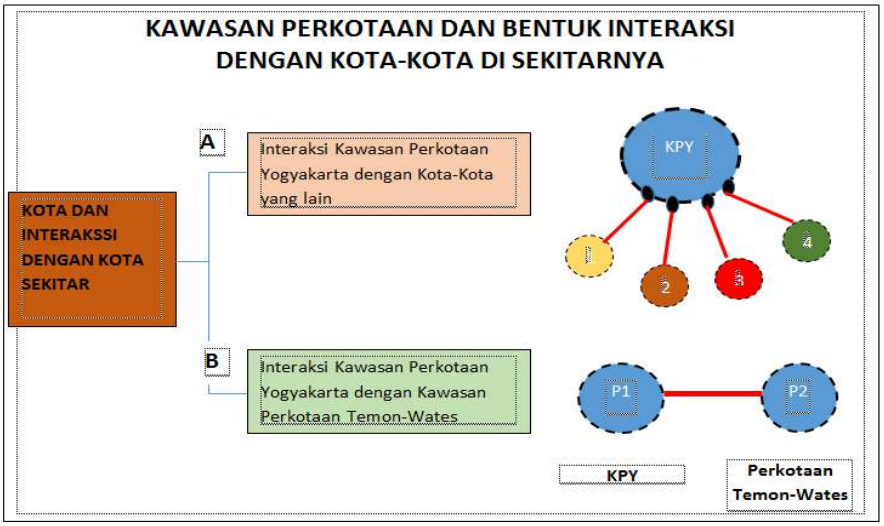


No.	Lokasi	Panjang Jalan (km)	Kebutuhan Lahan (m²)
1.	Kabupaten Sleman	68,19	373.735
2.	Kabupaten Bantul	41,81	153.480
	Jumlah	110,00	527.215

Sumber : Bappeda DIY, 2017

Gambar 2-68 Rencana sistem jaringan jalan Rencana JORR

2.1.4.2.3.2 Pengembangan Sarana Transportasi.



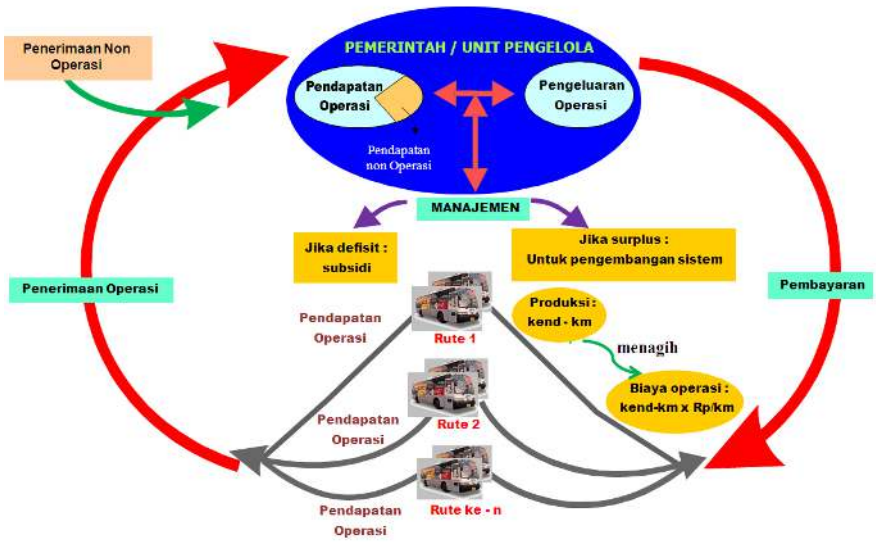
Gambar 2-69 Kawasan Perkotaan dan Bentuk Interaksi dengan Kota-kota di Sekitarnya

Memperhatikan gambar di atas, dan rencana pembangunan kedepan, hubungan perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta direncanakan dengan pengembangan

interaksi kawasan perkotaan dengan kota-kota lain (model A), yaitu: 1) Perkotaan Yogyakarta sebagai pusatnya dan perkotaan Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Gunung Kidul sebagai kota satelitnya. Atau 2) tidak menutup kemungkinan ada dua kutub yang masa kuat yaitu Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Perkotaan Temon-Wates sebagai kawasan pendukung Bandara Baru.

Untuk pemenuhan kebutuhan transpotrasi perkotaan di kawasan Perkotaan Yogyakarta Pemda DIY telah menyelenggarakan angkutan dengan konsep dasar layanan "*buy the service*'. Konsep layanan *"buy the service"* ini dimaksudkan bahwa pemerintah yang akan menanggung segala kerugian yang timbul karena adanya pengoperasian angkutan umum. Pihak operator dibayar oleh pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang telah disepakati dan mereka akan dikenakan denda jika melanggar kesepakatan tersebut.

Operasionalisasi Bus Trans Jogja oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melewati tahun ketujuh. Sejak dioperasikan pada 18 Februari 2008, Bus Trans Jogja telah melalui babak baru sistem dan manajemen angkutan umum di wilayah perkotaan Yogyakarta dengan menggunakan sistem baru yang disebut *Buy the Service* atau sistem pembelian pelayanan menggantikan sistem angkutan umum lama yang berbasis setoran.



Gambar 2-70 Sistem Operasional Bus Trans Jogja

Pada awal beroperasinya Trans Jogja, Februari 2008, Trans Jogja beroperasi dengan 6 (enam) trayek sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 132/KEP/2007 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 54 bus disediakan untuk dapat melayani 6 (enam) jalur tersebut dengan kepemilikan armada sejumlah 34 bus milik PT. Jogja Tugu Trans selaku operator dan 20 bus milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang berasal dari hibah APBN. Sampai dengan tahun 2017 Trans Jogja sudah memiliki 128 armada dan melayani 17 jalur.

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi umum Trans Jogja mengalami fluktuasi. Demikian juga halnya dengan jumlah pendapatan yang fluktuasinya tegantung pada jumlah penumpang terangkut.

Tabel 2-130 Jumlah Penumpang dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional Trans Jogja 2011-2017

No.	TAHUN	Jumlah penumpang/hari	PENDAPATAN
1.	2011	6.014.334	Rp. 18.043.004.000,00
2.	2012	6.382.802	Rp. 17.407.646.993,80
3.	2013	6.106.162	Rp. 18.359.146.684,23
4.	2014	6.506.290	Rp. 20.177.264.827,00
5.	2015	6.468.678	Rp. 22.852.181.651,91
6.	2016	6.409.205	Rp. 21.397.770.707,76
7.	2017	5.317.484	Rp. 18.922.631.238,81

Sumber : UPT Trans Jogja, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY

Transportasi perkotaan dikembangkan bukan berdasarkan moda tetapi sistem jaringan layanan transportasi secara menyeluruh, artinya pengembangan angkutan umum massal tidak hanya fokus pada moda utamanya saja tetapi juga dengan layanan feeder. Pada interaksi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan kota-kota lain maupun dengan kawasan perkotaan Temon-Wates, pengembangan angkutan *feeder* salah satunya adalah dengan perkuatan perencanaan penyelenggaraan AKDP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda DIY. Dalam integrasi angkutan umum secara menyeluruh maka peran pemerintah Kabupaten untuk dapat menyelenggarakan angkutan pedesaan harus secara simultan dilakukan agar kinerja angkutan AKDP dapat berjalan optimal.

2.1.4.2.4 Distribusi dan Produksi Energi

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menjabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Umum Energi Daerah yang akan digunakan sebagai acuan untuk penyelenggaraan energi di tingkat daerah. Pemda DIY pada tahun 2018 menargetkan dapat menyelesaikan penyusunan sekaligus penetapan Rencana Umum Energi Daerah DIY.

Kebutuhan tenaga listrik di DIY dipasok dari Perusahaan Listrik Negara Sistem Jawa Madura Bali. Kebutuhan tenaga listrik di DIY diperkirakan mencapai 5,722 GWh pada tahun 2025 dan untuk melayani kebutuhan tersebut, PLN telah merencanakan pengembangan 2 (dua) Gardu Induk baru dengan kapasitas 240 MVA dalam rangka memenuhi target penyediaan sebesar 660 MVA.

Rasio elektrifikasi di DIY pada tahun 2016 tercatat sebesar 88,66%. Dalam rangka mencapai target KEN dan RUEN yakni rasio elektrifikasi sebesar 100% pada tahun 2020 maka perlu upaya penyediaan listrik berupa pembangunan jaringan listrik perdesaan dan bantuan sambungan rumah bagi masyarakat kurang mampu.

Potensi energi baru terbarukan yang ada di DIY cukup terbatas dan beberapa sudah terbangun untuk menghasilkan tenaga listrik dalam skala kecil. Mempertimbangkan kondisi tersebut Pemda DIY akan mengoptimalkan pengembangan energi skala kecil dari potensi yang tersedia untuk meningkatkan target bauran energi bersumber dari EBT.

Elastisitas energi di DIY masih di atas 1. Bahkan di tahun 2016 nilai elastisitas energi di DIY sangat tinggi yaitu 1,7. Artinya konsumsi energi lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi atau boros energi. Dalam upaya mencapai target KEN dan RUEN yakni elastisitas energi di bawah 1 pada tahun 2025, penghematan energi harus dilakukan dan dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Konservasi energi di DIY khususnya energi listrik belum dilakukan dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari konsumsi energi listrik di DIY, di mana sektor rumah tangga menjadi konsumen terbesar, yaitu 1.466,53 GWH di tahun 2016. Hal ini berdampak pada tingginya elastisitas energi.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam keputusan untuk berinvestasi. Selain faktor-faktor ekonomi, faktor non ekonomi seperti kondisi politik, stabilitas keamanan dan penegakan hukum menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menarik minat investasi. Dalam bagian ini akan dijelaskan perkembangan situasi kemanan dan aspek lain yang berpengaruh terhadap iklim investasi di DIY.

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Kriminalitas merupakan salah satu indikator yang menggambarkan rasa aman bagi masyarakat. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarkat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas usaha ekonomi produktif. Tindak kejahatan yang dilaporkan dalam kurun lima tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2012-2014, jumlah kejahatan yang dilaporkan kembali meningkat pada tahun 2015 dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2016. Meskipun jumlah kejahatan yang berhasil diselesaikan mengalami peningkatan pada tahun 2016, akan tetapi mengalami penurunan lagi pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa laju kejahatan yang terjadi belum diimbangi dengan jumlah penyelesaian kasus kejahatan.

Tabel 2-131 Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Kulon Progo	629	332	347	453	449
Bantul	580	744	858	955	977
Gunungkidul	408	344	303	362	353
Sleman	2.009	2.001	1.843	2.259	2.161
Yogyakarta	1.893	1.911	1.883	1.947	1.802
Mapolda DIY	1.194	1.181	1.054	1.219	1.024
D.I Yogyakarta	6.713	6.513	6.288	7.195	6.766

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY 2016

Tabel 2-132 Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Kulon Progo	475	175	161	215	206
Bantul	314	416	486	587	580
Gunungkidul	241	233	171	204	147

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Sleman	820	648	771	950	915
Yogyakarta	547	644	936	848	807
Mapolda DIY	857	664	538	696	646
D.I Yogyakarta	3.254	2.780	3.063	3.500	3.301

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY 2016

Tabel 2-133 Persentase Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Kulon Progo	75,52	52,71	46,40	47,46	45,88
Bantul	54,14	55,91	56,64	61,47	59,37
Gunungkidul	59,07	67,73	56,44	56,35	41,64
Sleman	40,82	32,38	41,83	42,05	42,34
Yogyakarta	28,90	33,70	49,71	43,55	44,78
Mapolda DIY	71,78	56,22	51,04	57,10	63,09
D.I Yogyakarta	48,47	42,68	48,71	48,64	48,79

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY 2016

Indikator lain yang menunjukan kriminalitas di DIY masih perlu menjadi perhatian adalah resiko penduduk terkena tindak kejahatan. Pada tahun 2016 jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 188 orang, walaupun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari seluruh wilayah di DIY, penduduk Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki resiko paling tinggi terkena tindak kejahatan. Sementara itu, catatan lain yang perlu diperhatikan adalah DIY masuk dalam 10 tertinggi dalam tingkat resiko terkena kejahatan (Statistik Kriminal BPS RI 2016). Seiring mudahnya pemberitaan tersebar melalui sarana informasi, peningkatan keamanan lingkungan perlu ditingkatkan agar citra DIY tidak terganggu oleh kejadian kejahatan yang terjadi.

Tabel 2-134 Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 Penduduk DIY

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Kulon Progo	161	74	79	104	103
Bantul	70	68	93	104	106
Gunungkidul	41	47	40	48	47
Sleman	56	56	171	209	200

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Yogyakarta	86	96	457	473	438
D.I Yogyakarta	185	187	174	200	188

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY 2016

2.1.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Jumlah unjuk rasa atau demonstrasi yang berjalan dengan damai dapat menjadi indikator stabilitas kemanan wilayah. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di DIY relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar lain di Indonesia.Penanganan aksi unjuk rasa di DIY (dalam kasus di Kota Yogyakarta) memiliki dampak positif terhada stabilitas wilayah, yaitu tetap terselenggaranya aktivitas berbagai macam aspek kehidupan masyarakat. Dari data yang ada unjuk rasa di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar berlangsung damai.

Tabel 2-135 Jumlah Demonstrasi di DIY Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Unjuk Rasa
2013	244
2014	283
2015	204
2016	106

Sumber: Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah, DIY dalam Aplikasi Dataku, 2018

2.1.4.3.3 Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Pemerintah Daerah dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi yang mendukung kemudahaan dan kepastian usaha. Regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mencakup regulasi terkait kelembagaan perijinan terapadu satu pintu dan terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Peraturan Gubernur 36/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 36 Tahun 2010 tentang Penyelengagraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada prinsipnya memberikan jaminan layanan kepada pelaku usaha bahwa kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampaike tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Sementara itu, Perda 4/2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bertujuan menarik minat investasi dengan memberikan

insentif pajak atau retribusi daerah serta pemberian fasilitas kemudahan lainnya. Insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan pajak daerah. Sementara bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan dapat berupa penyediaan informasi lahan atau lokasi, percepatan pemberian perizinan, pemberian fasilitasi promosi investasi, dan fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fikal.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan demikian menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan baik nasional maupun daerah. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia juga dapat meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

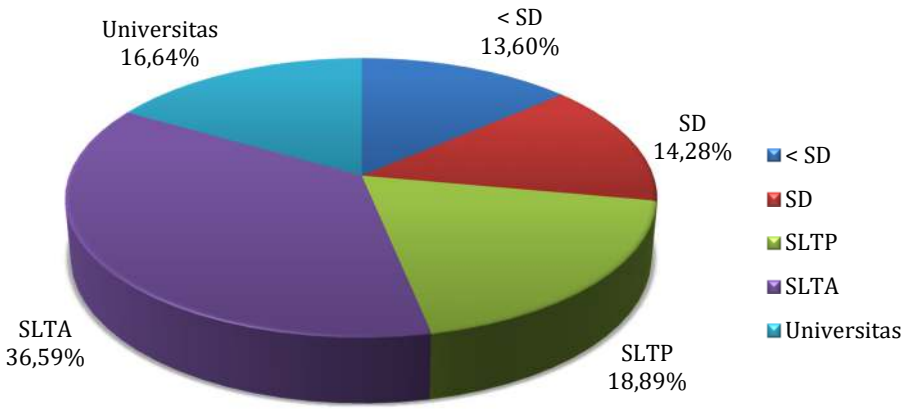
Indikator kualitas SDM dalam rangka daya saing daerah dapat dianalisis dengan melihat kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas sumber daya manusia (SDM) berhubungan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik.

Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Kondisi angkatan kerja di DIY berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Statistik Ketenagakerjaan DIY 2016-2017, Februari 2017, BPS DIY, 2017

Gambar 2-71 Presentase Angkatan Kerja DIY Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

Gambar di atas menunjukkan bahwa struktur angkatan kerja di DIY didominasi oleh lulusan SMTA dan jenjang SD kebawah. Sedangkan lulusan universitas baru mencapai sekitar 16,64% di tahun 2017.

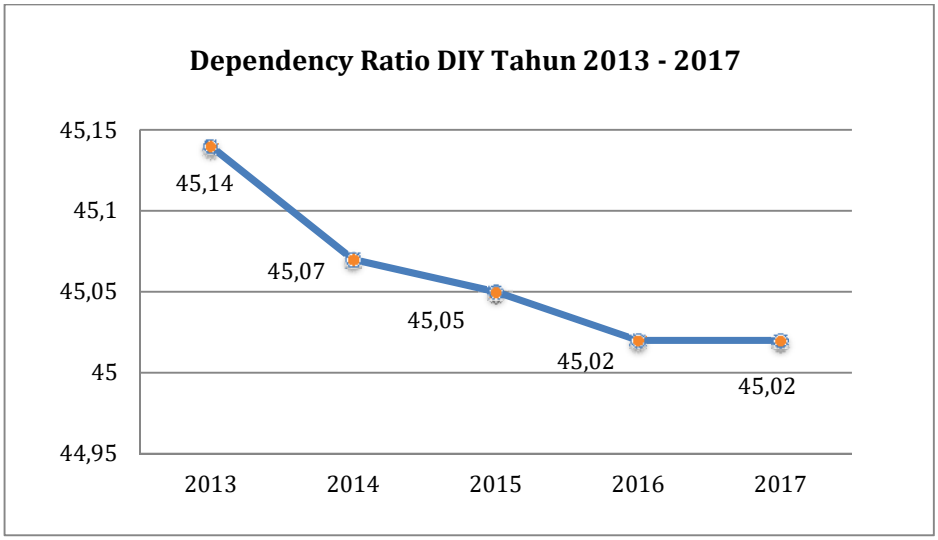
Sehingga program-program peningkatan kompetensi tenaga kerja seperti pelatihan kerja dan kewirausahaan mutlak diperlukan agar angkatan kerja di DIY mampu bersaing di dunia kerja.

2.1.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Sedangkan penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap produktif. Atas dasar konsep ini maka dapat digambarkan berapa jumlah penduduk yang memiliki ketergantungan pada penduduk usia produktif/usia kerja.

Konsep ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan menjelaskan bahwa semakin tinggi angka *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian sebaliknya. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41

Selama periode lima tahun terakhir, yaitu 2013 sampai dengan 2017, angka beban tanggungan penduduk DIY belum mengalami perubahan yang nyata dengan kisaran angka 45,02 sd 45,14 persen, dengan kecenderungan menurun. Angka ketergantungan DIY ini masuk dalam kelompok tinggi, karena lebih dari 41. Rasio beban tanggungan penduduk DIY yang cukup tinggi merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi daerah, karena sebagian pendapatan yang diperoleh oleh golongan yang produktif harus dibagikan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum/tidak produktif.



Sumber: BPS DIY dalam Dataku Bappeda DIY

Gambar 2-72 Angka Beban Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2013-2017

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Salah satu tahapan dalam proses perencanaan Pemerintah Daerah adalah pembuatan dokumen RKPD.Dokumen RKPD ini mempunyai nilai sangat strategis dan penting, karena dokumen ini merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD. Selain itu dokumen RKPD merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD. Dokumen RKPD ini juga dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD.Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu di arahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian diarahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah merupakan bagian dari siklus manajemen pembangunan yang memiliki posisi strategis.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Berikut dapat dilihat hasil capaian target pembangunan (Indikator Kinerja Utama) Gubernur dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017.

Tabel 2-136 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017dan PK Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2017			2017	
				Target 2017	Capaian 2017	Tingkat Capaian (%)	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	Persen	70	85,24	121,78	70	70
2	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.	Persen	95	95,01	100,01	95	95
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.	Persen	12	9,62	80,15	12	12
4	Daya Saing Pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Persen	40	45,86	114,64	40	40
5	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup.	Tahun	74,18	74,74	100,75	74,18	74,18
6	Pendapatan masyarakat meningkat. (ADHK)	Pendapatan perkapita pertahun.	Juta	8,5	24,57	-	8,5	8,5
7	Ketimpangan Antar Wilayah menurun.	Indek Ketimpangan Wilayah.	Indeks Williamson	0,4445	0,4510	98,61	0,4445	0,4445
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	Indeks Gini	0,2878	0,3565	76,12	0,2878	0,2878

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2017			2017	
				Target 2017	Capaian 2017	Tingkat Capaian (%)	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Jumlah wisatawan nusantara.	Orang	4.561.646	4.933.529	108,15	4.561.646	4,561,646
		Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	272.162	312.830	114,94	272,162	-
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Lama tinggal wisatawan nusantara.	Hari	2.60	2,39	91,88	2.60	2.60
		Lama tinggal wisatawan mancanegara.	Hari	2.69	2,42	90,09	2.69	2.69
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai (Kementerian PAN)	A	A	100	A	A
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini pemeriksaan BPK.	Opini pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan system transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	*Load factor* angkutan perkotaan meningkat.	Persen	42,57	42,71	100,33	42,57	42,57
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Persen	15,72	15,61	99,31	15,72	15,72

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2017			2017	
				Target 2017	Capaian 2017	Tingkat Capaian (%)	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Pemanfaatan Ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	Persen	64,75	68,19	105,32	64,75	64,75

Tabel 2-137 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1			**Urusan Wajib**																	
				Terkait Pelayanan Dasar																	
		1		**Pendidikan**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	71,384,610,283	99.99	414,629,244	100	11,992,280,000	21.59	524,680,989	21.59	4.38	21.59	524,680,989	21.59	4.38	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	59,095,396,053	100	2,616,360,855	100	9,679,677,000	0.26	15,000,000	0.26	0.15	0.26	15,000,000	0.26	0.15	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sstem laporan capaian kinerja dan keuangan	100	11,707,707,779	100	1,167,341,510	100	2,070,119,000	29.56	387,611,850	29.56	18.72	29.56	387,611,850	29.56	18.72	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	Program Pendidikan Menengah	Prosentase Sekolah menengah dengan Akreditasi A	83%	5,490,763,907,359	N/A		77.6	991,919,799,000	0		0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah (medali)	45		N/A		35		0		0.00		0		0.00			
					Angka Putus Sekolah	0.17 %		N/A		0.24		0		0.00		0		0.00			
			5	Program Layanan Pendidikan Khusus	Persentase Jumlah SLB dengan	65.38	143,678,212,902	N/A		39.74	20,861,489,500	0	885,911,920	0.00	4.25	0	885,911,920	0.00	4.25	Dinas Pendidikan, Pemuda	Data realisasi 2018 sampai dengan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					akreditasi A															dan Olahraga	bulan Maret
					Persentase Jumlah medali pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan khusus (medali)	13		N/A		5		0		0.00		0	-	0.00	0.00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			6	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB (%)	99.62	143,678,212,902	N/A		99.5	20,861,489,500	0	415,315,975	0.00	1.99	0	415,315,975	0.00	1.99	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional (satuan medali)	65 medali		N/A		48		0		0.00		0		0.00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				7	Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten (%)	87.68 %	190,807,800,269	N/A		87.39 %	31,253,837,000	0	7,361,667,250	0.00	23.55	0	7,361,667,250	0.00	23.55	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			8	Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK (%)	95%	24,571,611,117	N/A		67%	4,024,768,000	0	398,354,495	0.00	9.90	0	398,354,495	0.00	9.90	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			9	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar (siswa)	2148 siswa	42,735,700,000	N/A		2012	7,000,000,000	0	816,287,016	0.00	11.66	0	816,287,016	0.00	11.66	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			10	Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta	91.03 %	8,675,176,157	N/A		82.76 %	1,420,972,000	0		0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			11	Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Bantul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Bantul	84.97 %	9,612,174,695	N/A		76.67 %	1,574,450,000	0		0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				12	Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Gunungkidul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di kab. Gunungkidul	87.41 %	10,371,020,310	N/A		79.02 %	1,698,747,000	0		0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				13	Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Kulon Progo	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Kulon Progo	81.67 %	7,662,040,917	N/A		69.67	1,255,023,000	0		0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			14	Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Sleman	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Sleman	88.33 %	10,370,965,364	N/A		81.67 %	1,698,738,000	0		0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	1	2		**Kesehatan**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	14,007,665,994	100	1,578,661,136	100	1,882,346,000	19.36	281,884,380	19.36	14.98	19.36	281,884,380	19.36	14.98	Dinas Kesehatan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	ersentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	6,311,950,237	100	657,868,466	100	848,198,000	19.84	189,820,000	19.84	22.38	19.84	189,820,000	19.84	22.38	Dinas Kesehatan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	231,374,227	100	80,526,450	100	31,092,000	5.2	1,456,000	5.20	4.68	5.2	1,456,000	5.20	4.68	Dinas Kesehatan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100	3,267,592,421	100	429,558,800	100	439,098,100	10.64	45,284,875	10.64	10.31	10.64	45,284,875	10.64	10.31	Dinas Kesehatan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			5	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita Sehat	41.22 %	21,229,671,819	N/A	N/A	38.94	2,852,837,000	6.63	0	17.03	0.00	6.63	0	17.03	0.00	Dinas Kesehatan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Persentase Desa Sehat Mandiri	58.21 %		N/A		25.91		0				0		0.00			
			6	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular	62.84 %	24,812,452,464	N/A	N/A	53.58	3,334,290,000	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				7	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan	54.85	933,960,807,295	N/A	N/A	38.37	73,201,226,400	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			8	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Fasyankes kesehatan memenuhi standar sarpras perijinan SDMK dan Pembiayaan	80.19	6,198,075,897	N/A	N/A	40.58	832,895,600	40.09	0	98.79	0.00	40.09	0	98.79	0.00	Dinas Kesehatan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar	86.48		N/A		66.92		61.53		91.95		61.53	0	91.95	0.00		Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			9	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Balabkes	Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat	15 layanan	26,045,600,000	N/A	N/A	9	3,500,000,000	8	0	88.89	0.00	8	0	88.89	0.00	Dinas Kesehatan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			10	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Kesehatan pada BLUD Bapelkes	Persentase Mantan linatih yang meningkat kompetensinya	0.68	29,766,400,000	N/A	N/A	0.6	4,000,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			11	Program Pelayanan Pada BLUD Bapel Jamkessos	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan	100 %	241,851,359,921	N/A	N/A	100	56,498,988,000	100	12,294,148,116	100.00	21.76	100	12,294,148,116	100.00	21.76	Dinas Kesehatan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	27 jenis		N/A		20		18		90.00		18	-	90.00	0.00		
			12	Program Pelayanan kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia	Persentase pasien yang mampu ADL (activity daily living)	90%	154,345,630,272	N/A	N/A	86	20,740,920,000	89.16	9,643,906,842	103.67	46.50	89.16	9,643,906,842	103.67	46.50	RSJ Ghrasia	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
						Angka Pasien Cidera karena Fiksasi (%)	1%		N / A		7		0		0.00		0	-	0.00	0.00		
						Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit	90%		N / A		82		0		0.00		0	-	0.00	0.00		
						Rata Rata Jam Pelatihan Karyawan per tahun	80%		N / A		70		0		0.00		0	-	0.00	0.00		
						Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Jiwa ≤ 60 menit	75%		N / A		63		0		0.00		0	-	0.00	0.00		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Tingkat Penggunaan Tem pat Tidur / Bed Occupancy 8Rate (BOR)	65%		N / A		58		0		0.00		0	-	0.00	0.00		
						Penyelesaian berkas pengajuan klaim pasien jaminan kesehatan	80%		N / A		76		0		0.00		0	-	0.00	0.00		
						Penyusunan laporan tahunan Rumah Sakit	85%		N / A		81		0		0.00		0	-	0.00	0.00		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
					Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai analisis beban kerja	90%		N/A		86		0		0.00		0	-	0.00	0.00		
					Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit	100 %		N/A		70		0		0.00		0	-	0.00	0.00		
			13	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RS Paru Respira	1. Angka keberhasilan pengobatan (sucsess rate) TB	86%	94,810,940,106	N/A		82	13,564,292,000	83.3	2,091,981,496	101.59	15.42	83.3	2,091,981,496	101.59	15.42	RS Paru Respira	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						2. Angka kematian Pasien > 48 Jam	1.00 %		N / A		2.5		1.365		145.40		1.365	-	145.40	0.00		
						3. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari	80		85.01		75		94		125.33		94	-	125.33	0.00		
						4. Bed Occupancy Rate (BOR)	60%		44.44		60		61.7		102.83		61.7	-	102.83	0.00		
						5. Length of stay (LOS)	5		3.16		5		3.27		134.60		3.27	-	134.60	0.00		
	1	3			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
	1	Program Administrasi Perkantoran		100	52,080,146,500	100	3,595,053,650	100	10,322,275,000	18.19	679,535,043	18.19	6.58	18.19	679,535,043	18.19	6.58	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	19,314,923,200	100	5,121,019,911	100	2,999,838,000	15.59	102,400,473	15.59	3.41	15.59	102,400,473	15.59	3.41	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan		100	4,035,471,000	100	606,133,275	100	687,889,800	13.89	87,607,550	13.89	12.74	13.89	87,607,550	13.89	12.74	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	Program Pengelolaan Persampahan, Air Minum, Dan Air Limbah Regional	Peningkatan pengelolaan persampahan regional (ton/hari)	N/A	9,745,000,000	N/A	N/A	540	9,745,000,000	0	2,628,400,470	0.00	26.97	0	2,628,400,470	0.00	26.97	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Ketersediaan air curah yang dikelola	N/A	7,449,358,000	N/A	N/A	17000	7,449,358,000	16250		95.59		16250	-	95.59	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	
					Layanan Sistem air limbah terpusat yang dikelola (SR)	N/A	6,214,811,000	N/A	N/A	23000	6,214,811,000	0		0.00		0	-	0.00	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	
			5	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Penyediaan air minum/air curah	N/A	59,100,000,000	N/A	N/A	200	59,100,000,000	168	70,293,400	84.00	0.12	168	70,293,400	84.00	0.12	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					bulan Maret
					Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis (lokasi)	N/A	17,000,000,000	N/A	N/A	2	17,000,000,000	0		0.00		0	-	0.00	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	
					Peningkatan Kinerja Pengembangan Sistem Air Limbah Terpusat (%)	N/A	0	N/A	N/A	92.03	0	0		0.00		0	-	0.00	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			6	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Dan Drainase	Peningkatan kondisi jaringan irigasi	N/A	9,728,450,000	N/A	N/A	71.8	9,728,450,000	71.35	328,069,146	99.37	3.37	71.35	328,069,146	99.37	3.37	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Penambahan Kapasitas Air Baku (lt/dtk)	N/A	2,278,752,250	N/A	N/A	35	2,278,752,250	0		0.00		0	-	0.00	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	
					Penanganan titik genangan (lokasi)	N/A	6,650,000,000	N/A	N/A	1	6,650,000,000	0		0.00		0	-	0.00	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	
			7	Program Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Dan Drainase	Peningkatan kinerja sistem irigasi	N/A	15,974,159,280	N/A	N/A	66.48	15,974,159,280	60	4,165,780,291	90.25	26.08	60	4,165,780,291	90.25	26.08	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemenuhan Ketersediaan Air Baku	N/A	14,439,000,000	N/A	N/A	40.8	14,439,000,000	30		73.53		30	-	73.53	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	
			8	Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Penanganan sampah sistem regional	780,00 ton/hari	51,051,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Penanganan lokasi genangan	6,00 lokasi	50,288,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	
					Layanan sistem air limbah terpusat	27.400,00 SR	31,727,500,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	1.150,00 lt/dtk	38,591,600,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Panjang jaringan distribusi SPAM regional	110.074,00 m	251,000,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	
			10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku	Penyediaan Air Baku	348,00 lt/dtk	32,824,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Pengelolaan Air Baku	84,00 lt/dtk	91,205,875,200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				11	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY	77.20 %	54,402,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY	87.00 %	116,947,631,250	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	
				12	Program Penyelenggaraan Jalan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	75.26 %	468,193,745,951	N/A	N/A	72.91	52,100,650,000	60.99	14,704,220,463	83.65	28.22	60.99	14,704,220,463	83.65	28.22	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
						Penambahan Jaringan Jalan Baru	100	212,500,000,000	N/A	N/A	33.02 %	64,900,000,000	0		0.00		0	-	0.00	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	13	Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	N/A	1,620,000,000	N/A	N/A	62.84	1,620,000,000	60	377,809,075	95.48	23.32	60	377,809,075	95.48	23.32	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	99.14 %	8,630,262,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0		N/A		0	-	N/A	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	
			Peningkatan pelayanan jasa laboratorium pengujian (LHU)	N/A	2,587,097,200	N/A	N/A	800	2,587,097,200	260		32.50		260	-	32.50	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan	5544 LHU	18,916,233,823	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	-	N/A	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	
			1		Program Administrasi Perkantoran		100	7,750,000,000	100	852,258,016	100	1,350,000,000	25.94	325,482,965	25.94	24.11	25.94	325,482,965	25.94	24.11	Dinas PTR	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			2		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	9,550,000,000	100	1,233,964,901	100	1,750,000,000	17	100,036,700	17.19	5.72	17.19	100,036,700	17.19	5.72	Dinas PTR	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan		100	2,045,000,000	100	133,248,925	100	335,000,000	16.52	37,840,150	16.52	11.30	16.52	37,840,150	16.52	11.30	Dinas PTR	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pelaporan Keuangan																	
				4	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan dan pembinaan	N/A	N/A	N/A	N/A	0.619	400,000,000	0	16,378,941	0.00	4.09	0	16,378,941	0.00	4.09	Dinas PTR	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan	98.99 %	2,650,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	-	N/A	0.00	Dinas PTR	
			5			Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2785	1,600,000,000	0	169,705,624	0.00	10.61	0	169,705,624	0.00	10.61	Dinas PTR	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	89.98 %	8,930,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas PTR	
	1	4		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**																	
			1	Program Pengembangan Perumahan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	PengurangRumah Tidak Layak Huni	N/A	31,721,850,000	N/A	N/A	7.62	31,721,850,000	6.34	84,997,949	83.20	0.27	6.34	84,997,949	83.20	0.27	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Penyediaan kawasan pengembangan perumahan	N/A	800,000,000	N/A	N/A	7.19	800,000,000	6.7		93.18	0.00	6.7	-	93.18	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	
						Penanganan Kawasan kumuh	N/A	35,553,632,000	N/A	N/A	39.8	35,553,632,000	39.72		99.80	0.00	39.72	-	99.80	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	
						Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	N/A	16,000,000,000	N/A	N/A	20	16,000,000,000	14.36		71.80	0.00	14.36	-	71.80	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	
				2	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	53.78 %	229,729,500,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	-	N/A	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
						Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	20.00 %	127,627,500,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas PUP ESDM DIY	
						Cakupan penanganan kawasan kumuh	100 %	255,255,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas PUP ESDM DIY	
				3	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	212 titik	93,168,075,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	-	N/A	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	128 titik	69,000,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas PUP ESDM DIY	
	1	5		**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran		100 %	9,915,231,737	100	1,613,819,174	100	1,624,089,980	22.38	293,562,143	22.38	18.08	22.38	293,562,143	22.38	18.08	BPBD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 %	2,959,752,480	100	1,225,364,144	100	484,800,000	28.57	78,040,000	28.57	16.10	28.57	78,040,000	28.57	16.10	BPBD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100 %	693,075,372	100	185,604,000	100	113,524,000	31.95	35,001,050	31.95	30.83	31.95	35,001,050	31.95	30.83	BPBD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	301	20,914,819,000	N/A	N/A	25	2,854,819,000	0	1,259,194,399	0.00	44.11	0	1,259,194,399	0.00	44.11	BPBD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	181		N/A		10		0		0.00		0	-	0.00	0.00		
			5	Pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana	rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana	10 menit	41,008,247,000	N/A	N/A	20	7,829,597,000	0	792,246,300	0.00	10.12	0	792,246,300	0.00	10.12	BPBD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			6	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Indeks pemulihan pasca-bencana	85	22,262,000,000	N/A	N/A	65	2,821,600,000	0	140,252,200	0.00	4.97	0	140,252,200	0.00	4.97	BPBD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			7	Program Administrasi Perkantoran		100 %	6,432,638,615	N/A	N/A	100	1,053,650,000	25.92	232,692,451	25.92	22.08	25.92	232,692,451	25.92	22.08		Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			8	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 %	4,780,293,300	N/A	N/A	100	783,000,000	24.91	170,002,573	24.91	21.71	24.91	170,002,573	24.91	21.71	Bakesbangpol	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100 %	1,919,138,185	N/A	N/A	100	314,350,000	28.85	79,862,054	28.85	25.41	28.85	79,862,054	28.85	25.41	Bakesbangpol	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			10	Program Pembinaan Ideologi Dan Kewaspadaan Nasional	Skor / Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2.92	24,103,213,000	N/A	N/A	2.87	1,400,063,000	0	528,145,300	0.00	37.72	0	528,145,300	0.00	37.72	Bakesbangpol	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			11	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Skor /Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Politik	3.36	26,160,428,000	N/A	N/A	3.32	2,320,013,000	0	29,638,100	0.00	1.28	0	29,638,100	0.00	1.28	Bakesbangpol	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			12	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi	Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2.9	2,260,000,000	N/A	N/A	2.86	N/A	0	N/A	0.00	N/A	0	N/A	0.00	N/A	Bakesbangpol	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			13	Program Administrasi Perkantoran		100	8,408,864,369	100	1,024,370,447	100	1,377,350,800	25.92	232,692,451	25.92	16.89	25.92	232,692,451	25.92	16.89	Bakesbangpol	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			14	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	5,652,217,577	100	811,565,154	100	925,819,000	24.91	170,002,573	24.91	18.36	24.91	170,002,573	24.91	18.36	Bakesbangpol	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	2,806,760,200	100	342,181,700	100	459,740,250	28.85	86,622,436	28.85	18.84	28.85	86,622,436	28.85	18.84	Satpol PP	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	1 6	Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentaraman Masyarakat	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	75.00 %	9,050,000,000	N/A	N/A	35.00 %	1,650,000,000	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Satpol PP	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	1 7	Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	55.00 %	17,347,000,000	N/A	N/A	18.00 %	3,230,000,000	0	924,707,885	0.00	28.63	0	924,707,885	0.00	28.63	Satpol PP	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			18	Pembinaan Pelaksanaan Dan Penegakan Perda Dan Perkada	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani	80.00 %	4,242,236,000	N/A	N/A	65.00 %	724,986,000	0	140,435,250	0.00	19.37	0	140,435,250	0.00	19.37	Satpol PP	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	1	**6**		**Sosial**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	108,938,374,930	100	2,378,588,405	100	14,639,106,500	25.17	519,904,697	25.17	3.55	25.17	519,904,697	25.17	3.55	Dinas Sosial	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	13,086,997,195	73.34	1,438,023,831	100	1,758,626,800	13.73	112,725,300	13.73	6.41	13.73	112,725,300	13.73	6.41	Dinas Sosial	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	119,564,187	100	15,282,000	100	16,067,000	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100	993,289,513	N/A	N/A	100	133,477,950	31.01	44,489,900	31.01	33.33	31.01	44,489,900	31.01	33.33	Dinas Sosial	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

			5	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri	6.70	25,760,765,700	N/A	N/A	5.32	4,219,548,525	3.11	768,079,600	58.46	18.20	3.11	768,079,600	58.46	18.20	Dinas Sosial	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

					dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat															

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			6		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	50.85	13,152,305,454	N/A	N/A	51.15	2,154,314,500	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			7	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat	1.01 %	25,87 0,660, 452	N / A	N/A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/ A	Dinas Sosial	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			8	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi social	27.65 %	9,948,000,232	N/A	N/A	24.71	1,629,457,377	0	539,874,600	0.00	33.13	0	539,874,600	0.00	33.13	Dinas Sosial	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			9	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial	persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial	48.33 %	5,497,369,463	N/A	N/A	41.67	900,455,269	0	165,181,165	0.00	18.34	0	165,181,165	0.00	18.34	Dinas Sosial	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				10	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik	persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga / masyarakat	14.80 %	4,686,922,511	N/A	N/A	14.00 %	767,706,100	0	159,799,150	0.00	20.82	0	159,799,150	0.00	20.82	Dinas Sosial	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 1	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	85.00 %	4,626,884,042	N/A	N/A	75.00 %	757,871,950	0	301,189,550	0.00	39.74	0	301,189,550	0.00	39.74	Dinas Sosial	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 2	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak - haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga	47.33 %	7,142,271,019	N/A	N/A	27.20 %	1,169,886,000	0	411,704,450	0.00	35.19	0	411,704,450	0.00	35.19	Dinas Sosial	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 3	Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya	100 %	4,193,353,028	N/A	N/A	100	686,860,662	0	170,026,356	0.00	24.75	0	170,026,356	0.00	24.75	Dinas Sosial	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			14	Program Pengmembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai - nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	51.6	31,475,587,872	N/A	N/A	51.56	5,155,622,000	0	686,017,000	0.00	13.31	0	686,017,000	0.00	13.31	Dinas Sosial	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	1	7		**URUSAN KETENAGAKERJAAN**																	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	18,119,204,188	100	1,493,093,495	100	2,967,880,000	32.7	330,692,357	32.70	11.14	32.7	330,692,357	32.70	11.14	Disnakertrans	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	7,307,163,665	100	1,481,985,690	100	1,196,895,000	13.43	65,289,600	13.43	5.45	13.43	65,289,600	13.43	5.45	Disnakertrans	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	731,485,609	100	210,385,000	100	119,815,500	5	2,970,500	5.00	2.48	5	2,970,500	5.00	2.48	Disnakertrans	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100	3,331,255,141	100	775,410,200	100	545,651,200	18.16	86,001,798	18.16	15.76	18.16	86,001,798	18.16	15.76	Disnakertrans	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			5	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	1688 perusahaan	3,899,417,725	N/A	N/A	1288	638,714,800	1188	147,312,000	92.24	23.06	1188	147,312,000	92.24	23.06	Disnakertrans	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			6	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja	64.00 %	3,070,468,469	N/A	N/A	60.00 %	502,935,000	62.16	127,103,500	10360.00	25.27	62.16	127,103,500	10360.00	25.27	Disnakertrans	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			7	Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	533 perusahaan	4,505,563,800	N/A	N/A	353	738,000,000	318	440,610,000	90.08	59.70	318	440,610,000	90.08	59.70	Disnakertrans	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			8	Program Pembinaan Pelatihan, Standarisasi dan Pemagangan	Jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi	2000 orang	7,924,230,542	N/A	N/A	350	1,297,969,000	99	0	28.29	0.00	99	-	28.29	0.00	Disnakertrans	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Jumlah Lembaga Peltihan Kerja yang Terakreditasi	90 lembaga	-	N/A	N/A	72		72		100.00		72		100.00		Disnakertrans	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			9	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	9.52 %	36,142,192,000	N/A	N/A	1.9	5,920,000,000	0	172,712,700	0.00	2.92	0	172,712,700	0.00	2.92	Disnakertrans	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	1	**8**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**																	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	1,206,060,000	100	1,094,987,254	100	1,206,060,000	29.2	205,967,463	29.20	17.08	29.2	205,967,463	29.20	17.08	BPPM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				2	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	6,157,056,906	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPPPA& DALDUK	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	758,842,000	100	19.888.582.150	100	758,842,000	37.52	283,775,050	37.52	37.40	37.52	283,775,050	37.52	37.40	BPPM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	3,873,964,294	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPPPA& DALDUK	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100	141,263,000	100	182,927,135	100	141,263,000	17.59	20,655,909	17.59	14.62	17.59	20,655,909	17.59	14.62	BPPM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100	721,161,741	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPPPA& DALDUK	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				7	Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerassan terhadap perempuan dan anak	N/A	N/A	N/A	N/A	0.7	1,421,058,000	0	154,912,325	0.00	10.90	0	154,912,325	0.00	10.90	BPPM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				8	Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerassan terhadap perempuan dan anak	85.00 %	7,254,643,196	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPPPA& DALDUK	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			9	Progam Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	34.25 %	1,759,875,900	N/A	N/A	34.25	1,759,875,900	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	BPPM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			10	Progam Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	34.45 %	8,984,342,457	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPPPA& DALDUK	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	1	**9**		**Pangan**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran		100	820,818,050	100	805,236,501	100	820,818,050	25.78	172,825,524	25.78	21.06	25.78	172,825,524	25.78	21.06	BKPP	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	214,228,750	100	615,446,847	100	214,228,750	35.72	66,754,890	35.72	31.16	35.72	66,754,890	35.72	31.16	BKPP	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100	86,313,200	100	228,807,574	100	86,313,200	17.26	9,898,000	17.26	11.47	17.26	9,898,000	17.26	11.47	BKPP	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			4	Program Peningkatan Ketersediaan dan akses pangan	cadangan pangan (ton)	537	1,321,953,750	N/A	N/A	537	1,321,953,750	385.119	328,119,949	71.72	24.82	385.119	328,119,949	71.72	24.82	BKPP	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			5	Program Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Konsumsi umbi meningkat (kg/kapita / tahun)	32	685,999,500	N/A	N/A	32	685,999,500	39	85,821,000	121.88	12.51	39	85,821,000	121.88	12.51	BKPP	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Konsumsi sayur meningkat (kg/kapita / tahun)	234		N/A	N/A	234		227		97.01		227	-	97.01	0.00	BKPP	
			6	Program Peningkatan Ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.4	10,710,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			7	Program Pemberdayaan daerah rawan pangan	jumlah desa rawan pangan (desa)	0	5,050,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	1	**10**		**Pertanahan**																	
			1	Program Tertib Administrasi Pertanahan	Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	100	2,700,000,000	N/A	N/A	100	200,000,000	0	23,979,500	0.00	11.99	0	23,979,500	0.00	11.99	Dinas PTR	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	1	**11**		**Lingkungan Hidup**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran		100	1,177,987,000	100	1,253,184,353	100	1,177,987,000	18.46	175,888,076	18.46	14.93	18.46	175,888,076	18.46	14.93	BLH	Data realisasi 2018 sampai

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					dengan bulan Maret
			2	Program Administrasi Perkantoran		N/A	N/A			100	25,643,141,450	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	795,000,000	100	1,052,746,098	100	795,000,000	8.19	46,842,279	8.19	5.89	8.19	46,842,279	8.19	5.89	BLH	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Data realisasi 2018 sampai dengan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					bulan Maret
			5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	1,054,990,000	100	153,478,302	100	1,054,990,000	27	38,007,050	27.00	3.60	27	38,007,050	27.00	3.60	BLH	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	3,074,608,325			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
			7	Program Pengkajian dan Penaatan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	41.25	2,223,807,000	5	0	12.12	0.00	5	-	12.12	0.00	BLH	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota (%)	100		N/A		N/A		10				10		0.00			

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			8	Program Pengkajian dan Penaatan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY (%)	56.25		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota (%)	100		N/A		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				9	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Kadar 7 parameter pencemar air (TSS, BOD, COD, Fosfat, DO, Koli Tinja, Total Koli) dan Kadar 2 parameter pencemar udara SO2 dan NO2	N/A	N/A	N/A	N/A	TSS = 34,09; BOD = 10,66; COD = 21,14; Fosfat = 0,15; DO = 5,14; Koli TInja =	3,202,539,100	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	BLH	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											47286,46; Total Koli = 355370,24; SO2 =9,13 NO2 =11,40											

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
				10	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Jumlah sumber pencemar air sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai (usaha/kegiatan)	237	21,202,539,100	N/A	N/A	N/A	3,202,539,100	N/A		N/A	0.00	N/A	-	N/A	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
						Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai (lokasi)	120		N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A	-	N/A			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota (usaha/kegiatan)	80		N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A	-	N/A				
				11	Program pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (penghargaan)	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3,919,103,000	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	BLH	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 2	Program pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (penghargaan)	3	15,469,103,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	1 3	Program peningkatan tutupan hutan dan vegetasi	Persentase tutupan lahan (%)	N/A	12,221,200,000	N/A	N/A	33.58	12,221,200,000		0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	BLH	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			14	Program pengelolaan tutupan vegetasi dan konservasi sumberdaya alam	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	175	44,897,944,440	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Persentase penurunan kerusakan hutan (%)	0.5	N/A	N/A		N/A	N/A	12	0		0.00	12	-	0.00	0.00		
			15	Pengelolaan Persampahan Regional	Pengelolaan sampah di TPA Piyungan (ton/hari)	780	51,051,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	1	**12**		**Administrasi Kependudukan dan**																	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pencatatan Sipil																	
			1	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	87.97	5,020,000,000	N/A	N/A	80	920,000,000	0	140,805,897	0.00	15.30	0	140,805,897	0.00	15.30	Biro Tata Pemerintahan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	1	**13**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**																	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	4 lembaga	1,822,371,000	N/A	N/A	4	1,822,371,000	1	96,577,950	25.00	5.30	1	96,577,950	25.00	5.30	BPPM	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**
			2	Program Keberdayaan Masyarakat	Desa/kelurahan model gerakan gotong royong(desa/kelurahan)	8	899,737,300	N/A	N/A	8	899,737,300	0	39,943,400	0.00	4.44	0	39,943,400	0.00	4.44	BPPM	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**
	1	**14**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**																	
			1	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17	250,210,000	N/A	N/A	1.17	250,210,000	0	21,867,000	0.00	8.74	0	21,867,000	0.00	8.74	BPPM	**Data realisasi 2018 sampai dengan**

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					bulan Maret
			2	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17	1,277,347,071	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPPPA& DALDUK	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**
			3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013	1,182,486,000	N/A	N/A	0.0013	1,182,486,000	0	383,130,150	0.00	32.40	0	383,130,150	0.00	32.40	BPPM	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013	6.036.709.278.60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPPPA& DALDUK	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**
	1	**15**		**Perhubungan**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran		100	27,221,532,225	100	2,962,169,137	100	4,621,532,225	28.69	961,509,487	28.69	20.80	28.69	961,509,487	28.69	20.80	Dinas Perhubungan	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**
			2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	7,244,648,900	100	1,194,267,900	100	1,181,976,950	23.9	69,402,900	23.90	5.87	23.9	69,402,900	23.90	5.87	Dinas Perhubungan	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan		100	2,239,132,500	100	332,187,333	100	529,132,500	24.08	88,721,367	24.08	16.77	24.08	88,721,367	24.08	16.77	Dinas Perhubungan	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**
			4	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Penurunan rasio jumlah kecelakaan	N/A	N/A	N/A	N/A	0.95	8,116,497,575	1	125,748,000	105.26	1.55	1	125,748,000	105.26	1.55	Dinas Perhubungan	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**
						0.9	46,491,497,575	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan Penyediaan Layanan Angkutan Umum dalam Trayek	N/A	N/A	926	4,102,807,625	76.76	115,977,202,618	70.47	21,473,448,934	91.81	18.52	70.47	21,473,448,934	91.81	18.52	Dinas Perhubungan	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**
			Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek	N/A	N/A	N/A	N/A	68	2,431,150,000	60		88.24		60		88.24		Dinas Perhubungan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
						Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretapian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas Perhubungan	
						Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	82.41 %	722,453,624,618	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas Perhubungan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek	100	4,131,150,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas Perhubungan	
						Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretapian	70%	122,500,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas Perhubungan	
				6	Program Pengembangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Prioritas	N/A	N/A	N/A	N/A	41	1,640,346,000	39	91,410,000	95.12	5.57	39	91,410,000	95.12	5.57	Dinas Perhubungan	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
			Peningkatan Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	N/A	N/A	N/A	N/A	62.71	2,966,665,000	50		79.73		50		79.73		Dinas Perhubungan	
			Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	67.00 %	8,100,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas Perhubungan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	80.00 %	18,450,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas Perhubungan	
				7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi	Penumpang yang Terlayani Angkutan Umum (orang/hari)	N/A	N/A	N/A	N/A	4,500	1,597,515,000.00	4,450	150,452,000	98.89	9.42	4450	150,452,000	98.89	9.42	Dinas Perhubungan	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**
				8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	4.700 orang/hari	9,997,515,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Perhubungan	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kendaraan yang Terlayani pada Tempat Khusus Parkir	830 SRP	3,800,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Perhubungan	
	1	**16**		**Komunikasi dan Informatika**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran		100	10,859,865,001	100	1,319,949,034	100	1,778,818,529	24.05	336,879,280	24.05	18.94	24.05	336,879,280	24.05	18.94	Dinas Kominfo	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**
			2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	3,948,559,202	100	937,287,530	100	646,764,050	10.97	56,043,170	10.97	8.67	10.97	56,043,170	10.97	8.67	Dinas Kominfo	**Data realisasi 2018 sampai denga**

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					n bulan Maret
			3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	1,375,007,411	100	32,910,323	100	225,222,750	19.17	45,085,950	19.17	20.02	19.17	45,085,950	19.17	20.02	Dinas Kominfo	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**
			4	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	80%	15,605,000,000	N/A	N/A	60	2,895,000,000	8.15	477,082,240	13.58	16.48	8.15	477,082,240	13.58	16.48	Dinas Kominfo	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
			5	Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Persandian	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	62.50 %	13,768,500,000	N/A	N/A	12.5	1,286,000,000	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Dinas Kominfo	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			6	Program Layanan Teknologi Informasi	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkup Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	90.50 %	63,934,900,000	N/A	N/A	63.1	13,150,000,000	5.31	605,792,400	8.42	4.61	5.31	605,792,400	8.42	4.61	Dinas Kominfo	**Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret**
		17		**Koperasi dan UKM**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran		100	6,318,188,420	100	799,915,439	100	1,383,847,000	25.97	137,057,337	25.97	9.90	25.97	137,057,337	25.97	9.90	Dinas Koperasi dan UKM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			2	Program Peningkatan Sarana dan		100	10,085,048,000	100	552,125,049	100	7,124,310,000	18.21	52,980,000	18.21	0.74	18.21	52,980,000	18.21	0.74	Dinas Koperasi dan UKM	Data realisasi 2018 sampai

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Prasarana Aparatur																	dengan bulan Maret
			3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100	1,242,533,000	100	209,318,350	100	99,359,500	24.72	22,274,456	24.72	22.42	24.72	22,274,456	24.72	22.42	Dinas Koperasi dan UKM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			4	Pengembangan UKM	Nilai omzet UKM Tahun n (Rp Ribu)	96,487	610,510,000	N/A	N/A	79,380	100,000,000	10,120	N/A	12.75	#VALUE!	10120	N/A	12.75	#VALUE!	Dinas Koperasi dan UKM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			7	Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi	nilai omzet koperasi produksi tahun n (Rp Ribu)	NA	2,148,327,500	N/A	N/A	2,026,018	2,148,327,500	0	N/A	0.00	#VALUE!	0	N/A	0.00	#VALUE!	Dinas Koperasi dan UKM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			9	Peningkatan Akses Pembiayaan	Rasio Omzet Koperasi dan UKM terhadap Jumlah Pembiayaan	18.82	282,124,500	N/A	N/A	18.82	282,124,500	0	N/A	0.00	#VALUE!	0	N/A	0.00	#VALUE!	Dinas Koperasi dan UKM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			10	Pengawasan Koperasi dan UKM	Persentase Jumlah Koperasi Sehat dan UKM yang Memiliki Ijin Formal	22.16	249,993,000	N/A	N/A	22.16	249,993,000	0	N/A	0.00	#VALUE!	0	N/A	0.00	#VALUE!	Dinas Koperasi dan UKM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
		18		**Penanaman Modal**																	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2		Program Administrasi Perkantoran		100	846,250,600	100	700,637,290	100	846,250,600	25.97	123,023,137	25.97	14.54	25.97	123,023,137	25.97	14.54	BKPM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			4		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	117,000,000	100	1,141,894,875	100	117,000,000	22.17	18,675,000	22.17	15.96	22.17	18,675,000	22.17	15.96	BKPM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100	128,000,000	100	247,026,572	100	128,000,000	10.66	13,758,000	10.66	10.75	10.66	13,758,000	10.66	10.75	BKPM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			8	Program Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	719,692	747,250,000	N/A	N/A	719,692	747,250,000	335,688	562,500	46.64	0.08	335688	562,500	46.64	0.08	BKPM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			10	Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Investasi	nilai realisasi investasi PMA & PMDN (Rp Juta)	758,857	1,627,843,000	N/A	N/A	758,857	1,627,843,000	117,389	136,243,285	15.47	8.37	117389	136,243,285	15.47	8.37	BKPM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			11	Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Persentase permasalahan investasi yang diselesaikan	55	100,000,000	N/A	N/A	55	100,000,000	25	35,693,000	45.45	35.69	25	35,693,000	45.45	35.69	BKPM	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
		19		**Kepemudaan dan Olahraga**																	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				1	Program Pembinaan Kepemudaan	persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	30	42,989,427,956	N/A	N/A	22	7,041,560,000	0	179,579,500	0.00	2.55	0	179,579,500	0.00	2.55	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				2	Program Pembinaan Olahraga	Jumlah medali dalam kompetisi POPWIL (eSAKIP 2018: Peningkatan prestasi olahraga)	7 medali	288,502,927,974	N/A	N/A	5	51,724,280,000	0	172,637,900	0.00	0.33	0	172,637,900	0.00	0.33	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	13 medali		N/A	N/A	11		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		20			**Urusan Statistik**																	
			1		Program pengembangan statistik Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah	100	7,703,131,293	N/A	N/A	100	1,261,753,500	9.15	26,459,634	9.15	2.10	9.15	26,459,634	9.15	2.10	Bappeda	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Tingkat kepuasan pelanggan	72	-	N/A	N/A	68		80		117.65		80		117.65			
		21		**Persandian**																	
			1	Program Peningkatan Layanan Informasi Dan Persandian	Kecepatan Informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	100	3,525,000,000	N/A	N/A	100	625,000,000	100	79,753,700	100.00	12.76	100	79,753,700	100.00	12.76	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
		22		**Kebudayaan**												0	-	0.00	0.00		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	34,607,593,224	100	1,611,596,990	100	4,650,558,109	23.06	290,718,141	23.06	6.25	23.06	290,718,141	23.06	6.25	Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	7,318,425,893	100.27	565,741,331	100	983,447,900	41.11	86,318,873	41.11	8.78	41.11	86,318,873	41.11	8.78	Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100	2,958,705,186	100	246,716,790	100	397,589,925	35.11	78,495,525	35.11	19.74	35.11	78,495,525	35.11	19.74	Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
		23		**Urusan Perpustakaan**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	33,490,877,414	100	5,248,845,772	100	5,485,721,350	22.8	897,770,442	22.80	16.37	22.8	897,770,442	22.80	16.37	BPAD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	243,544,628,443	100	3,435,893,750	100	39,891,996,600	4.12	218,157,900	4.12	0.55	4.12	218,157,900	4.12	0.55	BPAD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	633,532,332	100	167,339,375	100	103,771,000	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	BPAD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100	3,706,633,930	100	1,374,601,975	100	607,137,300	20.58	115,838,800	20.58	19.08	20.58	115,838,800	20.58	19.08	BPAD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			5	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	jumlah perpustakaan yang terstandar	69 unit	10,258,436,161	N/A	N/A	29 unit	1,680,306,000	19	230,719,100	65.52	13.73	19	230,719,100	65.52	13.73	BPAD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			6	Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi	Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	50.870 exp.	14,723,104,948	N/A	N/A	10.174 exp.	2,411,607,500	1,500	91,506,210	14.74	3.79	1500	91,506,210	14.74	3.79	BPAD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			7	Program Layanan Perpustakaan	jumlah anggota baru Perpustakaan (eSAKIP 2018: Jumlah anggota baru perpustakaan umum DIY pada tahun n)	30.000 orang	28,977,684,376	N/A	N/A	6.000 orang	4,746,471,700	1,550	668,789,795	25.83	14.09	1550	668,789,795	25.83	14.09	BPAD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Meningkatnya kualitas layanan JLA	8 perpust		N/A	N/A	4 perpust		N/A		N/A		N/A	-	N/A	0.00		
		24		**Urusan Kearsipan**																	
			1	Program Perlindungan dan Konservasi Arsip	Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	4.000 berkas	978,728,000	N/A	N/A	4.000 berkas	978,728,000	0	112,917,900	0.00	11.54	0	112,917,900	0.00	11.54	BPAD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			3		Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Peningkatan jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	130 OPD/ UPTD	6,985,000,590	N/A	N/A	50 OPD/ UPTD	1,144,125,500	30	157,602,800	60.00	13.77	30	157,602,800	60.00	13.77	BPAD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	2				**Urusan Pilihan**																	
		1			**Kelautan dan Perikanan**																	
			1		Program Administrasi Perkantoran		100	22,794,648,800	100	1,282,192,786	100	3,669,648,800	29.21	303,768,545	29.21	8.28	29.21	303,768,545	29.21	8.28	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	37,650,000,000	100	3,920,097,130	100	750,000,000	26.27	82,475,549	26.27	11.00	26.27	82,475,549	26.27	11.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data realisasi 2018 sampai dengan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					bulan Maret
			3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100	3,121,223,200	100	517,551,175	100	411,223,200	20.22	81,234,825	20.22	19.75	20.22	81,234,825	20.22	19.75	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			4	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	produksi perikanan budidaya (ton)	89,700	13,520,000,000	N/A	N/A	89,336	2,220,000,000	27,438	260,371,200	30.71	11.73	27438	260,371,200	30.71	11.73	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			5	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	produksi perikanan tangkap (ton)	7,063	12,856,317,400	N/A	N/A	5,817	1,106,317,400	1,186	157,602,800	20.39	14.25	1186	157,602,800	20.39	14.25	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			6	Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	produksi produk perikanan olahan (ton)	8,201	1,906,751,100	N/A	N/A	8,201	1,906,751,100	1,782	173,650,875	21.73	9.11	1782	173,650,875	21.73	9.11	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			7	Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita /tahun)	26.05	2,800,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			8	Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Produksi benih ikan yang bersertifikat (juta ekor)	31.3	2,729,742,600	N/A	N/A	31.3	2,729,742,600	5,851,000	654,595,750	18693290.73	23.98	5851000	654,595,750	18693290.73	23.98	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			9	Pengembangan perbenihan perikanan budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	90	3,600,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	10	Konservasi Ekosistem dan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (eSAKIP 2018: PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan(%) (eSAKIP 2018: Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan)	70	4,710,000,000	N/A	N/A	14	870,000,000	0	120,553,250	0.00	13.86	0	120,553,250	0.00	13.86	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan(%)	50		N/A	N/A	10		-				-	-	0.00	0.00		
				11	Pengelolaan Pelabuhan	nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	36.73	476,029,646,360	N/A	N/A	32.84	169,646,360	5,485,075,000	26,999,900	167024208 28.26	15.92	548507500 0	26,999,900	1670 2420 828.26	15.92	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2			**Pariwisata**																	
			1		Program Administrasi Perkantoran		100	7,694,994,900	100	1,054,895,965	100	1,302,657,492	18.57	226,742,631	18.57	17.41	18.57	226,742,631	18.57	17.41	Dinas pariwisata	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	6,334,990,000	100	916,595,430	100	481,300,000	13.95	57,862,500	13.95	12.02	13.95	57,862,500	13.95	12.02	Dinas pariwisata	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100	1,477,858,000	100	238,640,802	100	115,000,000	24.36	24,330,000	24.36	21.16	24.36	24,330,000	24.36	21.16	Dinas pariwisata	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	8,377,099	17,924,066,500	N/A	N/A	5,405,594	3,374,531,500	813,758	195,653,000	15.05	5.80	813758	195,653,000	15.05	5.80	Dinas pariwisata	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			5	Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	250	4,917,324,500	N/A	N/A	75	731,142,500	64	0	85.33	0.00	64	-	85.33	0.00	Dinas pariwisata	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			6	Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	23.04	72,029,475,675	N/A	N/A	13.69	2,863,612,675	10.68	153,631,500	78.01	5.36	10.68	153,631,500	78.01	5.36	Dinas pariwisata	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			7	Pengembangan Destinasi Pariwisata	LOS wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	2.45	107,144,505,000	N/A	N/A	2.06	24,097,342,500	1.56	842,455,000	75.73	3.50	1.56	842,455,000	75.73	3.50	Dinas pariwisata	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
		3		**Pertanian**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran		N/A	N/A	100	1,938,352,183	100	2,510,000,000	29.25	290,104,327	29.25	11.56	29.25	290,104,327	29.25	11.56	Dinas Pertanian	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			2	Program Administrasi Perkantoran		100 %	5,650,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		N/A	N/A	100	5,152,744,119	100	1,017,000,000	6.31	88,194,318	6.31	8.67	6.31	88,194,318	6.31	8.67	Dinas Pertanian	Data realisasi 2018 sampai dengan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					bulan Maret
			4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	11,090,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		N/A	N/A	100	330,968,665	100	195,000,000	11.56	14,166,000	11.56	7.26	11.56	14,166,000	11.56	7.26	Dinas Pertanian	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100 %	980,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			7	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	produksi tanaman pangan (ton)	2,209,769	50,853,760,800	N/A	N/A	2,209,769	50,853,760,800	681,092	452,715,272	30.82	0.89	681092	452,715,272	30.82	0.89	Dinas Pertanian	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			8	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	produksi tanaman pangan (ton)	2,313,500	6,850,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			9	Peningkatan Produksi Hortikultura	produksi hortikultura (ton)	396,375	3,240,902,200	N/A	N/A	396,375	3,240,902,200	971,252	154,575,150	245.03	4.77	971252	154,575,150	245.03	4.77	Dinas Pertanian	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			10	Peningkatan Produksi Hortikultura	produksi hortikultura (ton)	403	4,750,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			11	Peningkatan Populasi Peternakan	populasi ternak (Animal Unit)	620,869	450,000,000	N/A	N/A	620,869	450,000,000	605,696	43,583,000	97.56	9.69	605696	43,583,000	97.56	9.69	Dinas Pertanian	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 2	Peningkatan Populasi Peternakan	populasi ternak (Animal Unit)	629	660,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	1 3	Peningkatan Produksi Perkebunan	produksi perkebunan (ton)	68,740	2,605,490,000	N/A	N/A	68,740	2,605,490,000	9,800	329,606,875	14.26	12.65	9800	329,606,875	14.26	12.65	Dinas Pertanian	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	1 4	Peningkatan Produksi Perkebunan	produksi perkebunan (ton)	69,290	3,820,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				15	Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Pertanian (orang)	-	450,000,000	N/A	N/A	300	450,000,000		63,507,700	0.00	14.11	0	63,507,700	0.00	14.11	Dinas Pertanian	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				16	Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian (%)	76	2,300,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				17	Pengembangan perbenihan	Jumlah perbanyakan benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat	81,440	1,420,991,240	N/A	N/A	81,440	1,420,991,240	0	445,438,122	0.00	31.35	0	445,438,122	0.00	31.35	Dinas Pertanian	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				18	Pengembangan perbenihan pertanian	Persentase benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi(%)	91	2,170,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				19	Pengawasan dan sertifikasi benih	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (hektar)	500	200,000,000	N/A	N/A	500	200,000,000	75	25,905,100	15.00	12.95	75	25,905,100	15.00	12.95	Dinas Pertanian	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				20	Pengawasan dan sertifikasi benih pertanian	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (hektar)	900	4,000,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	21	Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95	1,635,000,000	N/A	N/A	95	265,000,000	95	31,601,200	100.00	11.92	95	31,601,200	100.00	11.92	Dinas Pertanian	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	22	Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95	1,630,000,000	N/A	N/A	95	265,000,000	95	31,601,200	100.00	11.92	95	31,601,200	100.00	11.92	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	23	Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	Produksi biibit ternak (ekor)	50	3,776,455,000	N/A	N/A	50	3,776,455,000		591,373,750	0.00	15.66	0	591,373,750	0.00	15.66	Dinas Pertanian	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			24	Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi(%)	98	19,285,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
		4		**Kehutanan**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran		100	3,643,374,000	100	1,772,510,361	100	3,643,374,000	22.50	301,393,350	22.50	8.27	22.5	301,393,350	22.50	8.27	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	1,571,408,900	99.09	2,594,009,651	100	1,571,408,900	18.90	167,706,000	18.90	10.67	18.9	167,706,000	18.90	10.67	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Data realisasi 2018 sampai dengan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																						bulan Maret
				3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100	210,350,000	100	333,737,626	100	210,350,000	52.98	64,439,450	52.98	30.63	52.98	64,439,450	52.98	30.63	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				4	Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	persentase kawasan hutan tertata(%)	92.32	42,480,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
					Persentase Peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat(%)	8		N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			5	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.6	658,485,000	N/A	N/A	86.6	658,485,000	86.57	72,816,000	99.97	11.06	86.57	72,816,000	99.97	11.06	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			6	Peningkatan Produksi Hasil Hutan	persentase peningkatan produksi hasil hutan (%)	0.1	5,668,670,000	N/A	N/A	0.1	5,668,670,000	0	207,981,124	0.00	3.67	0	207,981,124	0.00	3.67	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			7	Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung	rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.66	27,830,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			8	Konservasi Dan Perlindungan Hutan (eSAKIP 2018: PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN PERLINDUNGAN)	Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1	2,336,241,100	N/A	N/A	0.1	2,336,241,100	0	224,398,625	0.00	9.61	0	224,398,625	0.00	9.61	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			9	Pengelolaan Hutan Konservasi	persentase hutan konservasi terkelola(%)	77.09	5,330,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			10	Pengembangan Pembibitan Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	1,665,000	28,855,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
		5		**Energi dan Sumber Daya Mineral**																	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	Program Pengaturan Dan Pengembangan Energi, Air Tanah, Geologi dan Pertambangan	Penduduk Berakses Energi	N/A	2,052,545,000	N/A	N/A	96.51	2,052,545,000	95.6	212,018,065	99.06	10.33	95.6	212,018,065	99.06	10.33	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Penyediaan air bersih di daerah sulit air	N/A	4,710,000,000	N/A	N/A	70 dusun	4,710,000,000	67		95.71	0.00	67	-	95.71	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Rerata penurunan muka air tanah	N/A	3,070,000,000	N/A	N/A	< 20	3,070,000,000	20		100.00	0.00	20	-	100.00	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
						Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral	N/A	2,395,000,000	N/A	N/A	8 izin	2,395,000,000	1		12.50	0.00	1	-	12.50	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
						Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	N/A	19,905,370,000	N/A	N/A	5.000 RT	19,905,370,000	3,848		76.96	0.00	3848	-	76.96	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2		Program Penyelenggaraan Energi dan Ketenagalistrikan	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	13.848,00 RT	13,310,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
						Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	92,00 unit	650,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
						Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	75,00 izin	1,827,196,800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			3	Program Pengelolaan Air Tanah dan Geologi	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	82,00 dusun	6,895,911,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	< 20%	4,494,787,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	75,00 izin	1,830,125,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				4	Program Pengelolaan Pertambangan	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	40,00 izin	2,049,740,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
						Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7.80 %	1,300,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			5	Program Pengawasan Dan Pengendalian Energi, Geologi, Air Tanah Dan Pertambangan	Tertib ijin usaha pertambangan (eSAKIP 2018: Penambahan jumlah izin penambangan yang baik dan benar)	N/A	N/A	N/A	N/A	12 izin	1,400,000,000		260,944,150	0.00	18.64	0	260,944,150	0.00	18.64	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Tertib ijin pengusahaan air tanah (eSAKIP 2018: Penambahan jumlah izin air tanah sesuai dengan ketentuan)	N/A	N/A	N/A	N/A	15 izin	1,250,000,000			0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Tertib ijin ketenagalistrikan (eSAKIP 2018: Peningkatan jumlah izin ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan)	N/A	N/A	N/A	N/A	15 izin	1,248,000,000			0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Dinas PUP ESDM DIY	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
		6			**Perdagangan**																	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n (Ribu US$)	327.48	6,105,100,000	N/A	N/A	302.54	1,000,000,000	0	147,115,375	0.00	14.71	0	147,115,375	0.00	14.71	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			2	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina (Rp Milyar)	2.5	14,408,036,000	N/A	N/A	1.55	2,360,000,000	0	67,715,500	0.00	2.87	0	67,715,500	0.00	2.87	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			3	Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	Persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar	5.46	3,357,275,000	N/A	N/A	5.69	550,000,000	0	81,386,312	0.00	14.80	0	81,386,312	0.00	14.80	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
		7		**Perindustrian**																	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	Program Administrasi Perkantoran		100	12,030,769,600	100	1,377,911,337	100	1,924,310,600	21.63	213,967,382	21.63	11.12	21.63	213,967,382	21.63	11.12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	8,098,371,000	100	822,731,600	100	497,600,000	24.28	53,058,200	24.28	10.66	24.28	53,058,200	24.28	10.66	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100	1,708,886,000	100	259,758,628	100	240,000,000	39.62	82,002,500	39.62	34.17	39.62	82,002,500	39.62	34.17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	PeningkatanTeknologi Industri	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	30	1,317,690,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			5	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	18	900,000,000	N/A	N/A	18	900,000,000	0	356,730,530	0.00	39.64	0	356,730,530	0.00	39.64	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			6	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	13,773,585	5,160,952,500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			7	Pembinaan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	2,632,754	299,750,000	N/A	N/A	2,632,754	299,750,000	0	2,382,500	0.00	0.79	0	2,382,500	0.00	0.79	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			8	Pembinaan Industri Agro, Tekstil, Kimia dan Aneka	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	10,091,909	3,218,312,725	N/A	N/A	10,091,909	3,218,312,725	0	29,659,000	0.00	0.92	0	29,659,000	0.00	0.92	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			9	Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual	umlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra yang dibina	180	600,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		8		**Urusan Transmigrasi**																	
			1	Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	53.950 orang	33,627,130,730	N/A	N/A	10.540 orang	5,508,039,300	0	323,692,600	0.00	5.88	0	323,692,600	0.00	5.88	Disnakertrans	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	3			**Urusan Keistimewaan**																	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1		Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	Terselesaikannya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya	100	1,500,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	0	-	N/A	N/A	Sekretariat Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2			**Kelembagaan Pemerintah Daerah**																	
			1		Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	88	18,742,000,000	N/A	N/A	86	3,832,000,000			0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sekretariat Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			6	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan	75	16,821,412,000	N/A	N/A	65	3,171,412,000			0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sekretariat Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			7	Program Penyusunan Kebijakan Urusan Keistimewaan	Presentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	60	2,603,588,000	N/A	N/A	60	2,603,588,000			0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sekretariat Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Kebutuhan Sarpras Keistimewaan terpenuhi	60	1,878,000,000	N/A	N/A	60	1,878,000,000			0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sekretariat Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			10	Program Peningkatan Pelayanan Paramparapraja	Indeks kepuasan layanan kepada Parampara praja	78	11,200,000,000	N/A	N/A	70	1,700,000,000			0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sekretariat Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			11	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Tingkat pemahaman ASN tentang keistimewaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100	660,000,000			0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sekretariat Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
		3		**Kebudayaan**																	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				1	Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan permuseuman	Jumlahsumber sejarah yang direvitalisasi	15	206,243,944,000	N/A	N/A	11	27,715,000,000		844,466,452	0.00	3.05	0	844,466,452	0.00	3.05	Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
						Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	15		N/A	N/A	3				0.00		0		0.00			Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
						Rasio kunjungan museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0.7		N/A	N/A	0.5				0.00		0		0.00			Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2	Program Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah arsip kraton dan kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	2,000	14,883,200,000	N/A	N/A	2,000	2,000,000,000			0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			3	Program Penguatan Museum Sonobudoyo	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	0.9	61,765,280,000	N/A	N/A	0.5	8,300,000,000		430,415,442	0.00	5.19	0	430,415,442	0.00	5.19	Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang dinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh koleksi	91.27		N/A	N/A	46.83				0.00		0		0.00		Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				4	Program Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	15.17	450,337,309,681	N/A	N/A	11.22	57,500,000,000		199,064,050	0.00	0.35	0	199,064,050	0.00	0.35	Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
			5	Program Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya	12.79	762,000,000,000	N/A	N/A	5.29	80,000,000,000		574,039,000	0.00	0.72	0	574,039,000	0.00	0.72	Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					jumlah Taman Budaya di Kab/Kota	2		N/A	N/A	1				0.00		0		0.00		Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			6	Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana disbanding jumlah seluruh program dan kegiatan	100	40,184,640,000	N/A	N/A	99.08	5,400,000,000		107,444,000	0.00	1.99	0	107,444,000	0.00	1.99	Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Jumlah kerjasama yang direalisasikan dalam tahun n	35		N/A	N/A	15				0.00		0		0.00		Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			7	Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	30	75,160,160,000	N/A	N/A	10	10,100,000,000		25,400,000	0.00	0.25	0	25,400,000	0.00	0.25	Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			8	Program Pengembangan Kearifan lokal dan potensi Budaya	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.15	166,170,928,000	N/A	N/A	0.06	22,330,000,000			0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			9	Program Pendidikan Berbasis Budaya	persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter	48.42	173,389,280,000	N/A	N/A	42	23,300,000,000			0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			10	Program Pembinaan Dan Pengembangan Adat Dan Seni	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	NA	NA	N/A	N/A	26.21	100,188,000,000		1,590,381,575	0.00	1.59	0	1,590,381,575	0.00	1.59	Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			11	Program Pelestarian Tradisi Dan Lembaga Budaya	Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	NA	NA	N/A	N/A	1.81	69,800,000,000		98,214,000	0.00	0.14	0	98,214,000	0.00	0.14	Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	NA		N/A	N/A	310				0.00		0		0.00		Dinas Kebudayaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4		**Pertanahan**																	
			1	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	N/A	N/A	N/A	N/A	7.898 bidang	17,067,866,000		2,226,494,600	0.00	13.04	0	2,226,494,600	0.00	13.04	Dinas PTR	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			2	Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Peningkatan pemanfaatan tanah desa	N/A	N/A	N/A	N/A	5.1	4,405,270,000		62,807,550	0.00	1.43	0	62,807,550	0.00	1.43	Dinas PTR	Data realisasi 2018 sampai dengan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																						bulan Maret
				3	Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan	persentase realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan pertanahan	100	1,367,252,000	N/A	N/A	100	1,367,252,000		63,904,400	0.00	4.67	0	63,904,400	0.00	4.67	Dinas PTR	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
			4	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Pertanahan	persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	100	2,200,000,000	N/A	N/A	100	200,000,000		0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Dinas PTR	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5		**Tata Ruang**																	
			1	Program Perencanaan Tata Ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	N/A	N/A	N/A	N/A	17.78	6,650,000,000		89,589,553	0.00	1.35	0	89,589,553	0.00	1.35	Dinas PTR	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2	Program Pemanfaatan Ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	N/A	N/A	N/A	N/A	29.44	548,031,612,000		119,033,950	0.00	0.02	0	119,033,950	0.00	0.02	Dinas PTR	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang satuan ruang strategis	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	N/A	N/A	N/A	N/A	7.78	300,000,000		7,620,500	0.00	2.54	0	7,620,500	0.00	2.54	Dinas PTR	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			4	Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Tata Ruang	Persentase Realisasi Pelaksanaan Program kegiatan Urusan Tata Ruang	100	700,000,000	N/A	N/A	100	700,000,000		63,525,000	0.00	9.08	0	63,525,000	0.00	9.08	Dinas PTR	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			5	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang	100	2,800,000,000	N/A	N/A	100	800,000,000		600,879,500	0.00	75.11	0	600,879,500	0.00	75.11	Dinas PTR	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	4			**Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**																	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1			**Sekretariat Daerah**																	
				1	Program Administrasi Perkantoran		100	6,828,755,818	95.05	822,269,000	100	1,118,533,000	19.14	62,366,000	19.14	5.58	19.14	62,366,000	19.14	5.58	Sekretariat Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	277,629,423	100	14,946,425	100	45,475,000	34.64	3,197,000	34.64	7.03	34.64	3,197,000	34.64	7.03	Sekretariat Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				3	Program Administrasi Perkantoran		100	4,422,137,609	100	531,478,310	100	724,335,000	25.18	167,443,050	25.18	23.12	25.18	167,443,050	25.18	23.12	Biro Tapem	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	2,541,195,982	100	1,082,557,654	100	416,241,500	30.49	128,675,024	30.49	30.91	30.49	128,675,024	30.49	30.91	Biro Tapem	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	699,797,088	100	106,902,700	100	114,625,000	16.79	15,870,800	16.79	13.85	16.79	15,870,800	16.79	13.85	Biro Tapem	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			9	Program Administrasi Perkantoran		100	3,446,206,848	100	420,263,567	100	564,480,000	36.81	131,225,395	36.81	23.25	36.81	131,225,395	36.81	23.25	Biro Hukum	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	10	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	2,478,267,663	100	320,184,728	100	405,934,000	68.34	258,104,500	68.34	63.58	68.34	258,104,500	68.34	63.58	Biro Hukum	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	348,320,375	100	43,111,400	100	57,054,000	38.09	7,935,000	38.09	13.91	38.09	7,935,000	38.09	13.91	Biro Hukum	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	12	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100	7,389,165,000	N/A	N/A	100	1,212,000,000	26.47	276,520,058	26.47	22.82	26.47	276,520,058	26.47	22.82	Biro Hukum	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
				13	Program Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kabupaten /Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100	3,018,851,600	N/A	N/A	100	501,151,600	25	131,780,969	25.00	26.30	25	131,780,969	25.00	26.30	Biro Hukum	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	14	Program Dokumentasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100	3,615,850,000	N/A	N/A	100	610,500,000	15.14	44,760,211	15.14	7.33	15.14	44,760,211	15.14	7.33	Biro Hukum	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	15	Program Bantuan dan layanan Hukum	Persentase bantuan dan Layanan hukum	100	12,370,000,000	N/A	N/A	100	2,385,000,000	33.01	503,415,503	33.01	21.11	33.01	503,415,503	33.01	21.11	Biro Hukum	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	16	Program Administrasi Perkantoran		100	4,300,652,224	100	555,972,292	100	704,436,000	27.42	179,964,325	27.42	25.55	27.42	179,964,325	27.42	25.55	Biro Organisasi	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	17	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	871,411,449	100	197,245,050	100	142,735,000	25.25	22,875,000	25.25	16.03	25.25	22,875,000	25.25	16.03	Biro Organisasi	Data realisasi 2018 sampai dengan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					bulan Maret
			18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	763,717,485	100	103,609,650	100	125,095,000	44.78	32,478,600	44.78	25.96	44.78	32,478,600	44.78	25.96	Biro Organisasi	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			21	Program Administrasi Perkantoran		100	5,420,929,000	98.75	4,830,133,600	100	5,420,929,000	28.87	955,015,841	28.87	17.62	28.87	955,015,841	28.87	17.62	Biro Umum dan Protokol	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	22	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	3,219,419,000	100	5,049,004,509	100	3,219,419,000	34.8	755,549,328	34.80	23.47	34.8	755,549,328	34.80	23.47	Biro Umum dan Protokol	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	23	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	82,860,000	100	143,599,000	100	82,860,000	33.59	21,360,000	33.59	25.78	33.59	21,360,000	33.59	25.78	Biro Umum dan Protokol	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	24	Program Pelayanan Kerumahtanggaan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	81	3,011,086,000	N/A	N/A	81	3,011,086,000	84.49	456,066,272	104.31	15.15	84.49	456,066,272	104.31	15.15	Biro Umum dan Protokol	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			25	Program Pelayanan Keprotokolan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	81	2,575,000,000	N/A	N/A	81	2,575,000,000	82.56	189,794,583	101.93	7.37	82.56	189,794,583	101.93	7.37	Biro Umum dan Protokol	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			26	Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat	peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	270,710	2,242,988,000	N/A	N/A	270,710	2,242,988,000	265,402	162,816,900	98.04	7.26	265,402	162,816,900	98.04	7.26	Biro Umum dan Protokol	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			27	Program Administrasi Perkantoran		100	1,849,731,000	100	1,889,053,966	100	1,849,731,000	28.17	537,488,827	28.17	29.06	28.17	537,488,827	28.17	29.06	Kantor Perwakilan Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			28	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	1,326,730,000	100	882,159,466	100	1,326,730,000	15.12	116,508,677	15.12	8.78	15.12	116,508,677	15.12	8.78	Kantor Perwakilan Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			29	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	200,880,000	100	115,470,108	100	200,880,000	13.78	13,641,559	13.78	6.79	13.78	13,641,559	13.78	6.79	Kantor Perwakilan Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
			30	Program Peningkatan Fasilitas Layanan Kantor Perwakilan daerah	Keinginan untuk mendapatkan pelayanan kembali di Kaperda	84	578,932,840	N/A	N/A	84	578,932,840	100	0	119.05	0.00	100	-	119.05	0.00	Kantor Perwakilan Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			32	Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah dan Seni Budaya Daerah	Presentase peningkatan kualitas pelaksanaan promosi potensi dan budaya daerah	70	850,000,000	N/A	N/A	70	850,000,000	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Kantor Perwakilan Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
						78	50,000,000	N/A	N/A	78	50,000,000	0		0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Kantor Perwakilan Daerah	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			34	Program Administrasi Perkantoran		100	933,700,000	100	677,274,315	100	933,700,000	23.48	195,482,200	23.48	20.94	23.48	195,482,200	23.48	20.94	Kantor PPTSP	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			35	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	823,710,000	98.466	930,265,917	100	823,710,000	55.38	227,219,248	55.38	27.58	55.38	227,219,248	55.38	27.58	Kantor PPTSP	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			36	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	97,500,000	94.777	43,615,450	100	97,500,000	71.2	3,775,000	71.20	3.87	71.2	3,775,000	71.20	3.87	Kantor PPTSP	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			37	Pelayanan Perijinan	Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	94	2,723,000,000	N/A	N/A	94	2,723,000,000			0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Kantor PPTSP	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			38	Program Administrasi Perkantoran		100	1,873,669,000	100	311,982,500	100	248,669,000	26.22	61,600,273	26.22	24.77	26.22	61,600,273	26.22	24.77	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	39	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	2,796,670,000	100	459,198,684	100	96,670,000	21.81	21,050,000	21.81	21.78	21.81	21,050,000	21.81	21.78	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	40	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100	225,500,000	100	35,154,000	100	37,500,000	48.64	11,792,000	48.64	31.45	48.64	11,792,000	48.64	31.45	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				41	Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah	Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	40	2,150,000,000	N/A	N/A	25	350,000,000	0	16,867,650	0.00	4.82	0	16,867,650	0.00	4.82	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4 2	Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian berkeadilan	Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	30	8,255,000,000	N/A	N/A	25	1,350,000,000	0	317,613,133	0.00	23.53	0	317,613,133	0.00	23.53	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
				43	Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian	Rumusan kebijakan perlindungan sumberdaya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	30	1,230,000,000	N/A	N/A	25	200,000,000	0	47,472,000	0.00	23.74	0	47,472,000	0.00	23.74	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			44	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	222,687,000	100	289,764,014	100	222,687,000	21.01	36,066,200	21.01	16.20	21.01	36,066,200	21.01	16.20	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			45	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	166,634,000	100	108,636,998	100	166,634,000	50.94	80,060,000	50.94	48.05	50.94	80,060,000	50.94	48.05	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			46	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100	52,795,000	100	138,940,000	100	52,795,000	30.66	13,264,050	30.66	25.12	30.66	13,264,050	30.66	25.12	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			47	Program Pengelolaan Kebijakan Sumberdaya Manusia	Rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia	1 dok	518,595,600	N/A	N/A	1 dok	518,595,600	0	27,789,850	0.00	5.36	0	27,789,850	0.00	5.36	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	48	Program Pengelolaan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Sumberdaya Manusia	Rumusan Bahan Kebijakan Penguatan kelembagaan Sumber Daya Manusia	1 dok	129,936,500	N/A	N/A	1 dok	129,936,500	0	29,837,600	0.00	22.96	0	29,837,600	0.00	22.96	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				49	Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Daerah	Terlayaninya Lembaga Keagamaan 5 agama	4 layanan	7,598,364,000	N/A	N/A	4 layanan	7,598,364,000	1	236,014,000	25.00	3.11	1	236,014,000	25.00	3.11	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			50	Program Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	1 dok	150,467,000	N/A	N/A	1 dok	150,467,000	0	9,947,500	0.00	6.61	0	9,947,500	0.00	6.61	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			51	Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Sosial Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Rekayasa Sosial Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	1 dok	448,757,500	N/A	N/A	1 dok	448,757,500	0	34,519,800	0.00	7.69	0	34,519,800	0.00	7.69	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

			55	Program Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan	Terlayaninya lembaga keagamaan 5 agama	4 lembaga	39,104,783,000	N/A	N/A	4 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Biro Bina Mental Spiritual	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			7	Program Administrasi Perkantoran		100	535,916,100	100	392,414,291	100	535,916,100	28.29	85,839,728	28.29	16.02	28.29	85,839,728	28.29	16.02	Biro Adpem	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			8	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	230,000,000	100	379,761,481	100	230,000,000	42.19	56,939,791	42.19	24.76	42.19	56,939,791	42.19	24.76	Biro Adpem	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	128,000,000	100	120,020,700	100	128,000,000	52.02	37,352,750	52.02	29.18	52.02	37,352,750	52.02	29.18	Biro Adpem	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				10	Program Pengelolaan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah	Persentase rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti	50	200,000,000	N/A	N/A	50	200,000,000	0	23,398,750	0.00	11.70	0	23,398,750	0.00	11.70	Biro Adpem	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	11	Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti	50	205,907,000	N/A	N/A	50	205,907,000	0	27,035,500	0.00	13.13	0	27,035,500	0.00	13.13	Biro Adpem	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
200,000,000	12	Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti	50	2,650,000,000	N/A	N/A	50	200,000,000	0	24,819,300	0.00	12.41	0	24,819,300	0.00	12.41	Biro Adpem	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			13	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	50	200,000,000	N/A	N/A	50	200,000,000	0	58,354,500	0.00	29.18	0	58,354,500	0.00	29.18	Biro Adpem	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			14	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	100	2,525,890,000	N/A	N/A	100	2,525,890,000	0	721,971,793	0.00	28.58	0	721,971,793	0.00	28.58	Biro Adpem	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	15	Program Administrasi Perkantoran		100	425,000,000	100	180,376,000	100	425,000,000	25.28	29,767,846	25.28	7.00	25.28	29,767,846	25.28	7.00	Sekretariat Parampara Praja	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	16	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	179,400,000	100	134,729,269	100	179,400,000	22.38	17,811,500	22.38	9.93	22.38	17,811,500	22.38	9.93	Sekretariat Parampara Praja	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	79,800,000	100	27,848,325	100	79,800,000	26.41	9,441,300	26.41	11.83	26.41	9,441,300	26.41	11.83	Sekretariat Parampara Praja	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			18	Program Administrasi Perkantoran		100	215,270,000	N/A	N/A	100	215,270,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asisten Keistimewaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			19	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	51,050,000	N/A	N/A	100	51,050,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asisten Keistimewaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	40,800,000	N/A	N/A	100	40,800,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asisten Keistimewaan	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	2		**Sekretariat DPRD**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran		100	24,090,733,000	100	3,319,172,212	100	3,986,983,000	21	565,283,186	21.30	14.18	21.3	565,283,186	21.30	14.18	Sekretariat DPRD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	74,402,237,000	100	5,469,097,080	100	2,621,487,000	14.67	151,264,000	14.67	5.77	14.67	151,264,000	14.67	5.77	Sekretariat DPRD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100	20,471,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sekretariat DPRD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
				4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	1,585,837,000	100	228,895,498	100	259,756,000	20.2	48,935,700	20.20	18.84	20.2	48,935,700	20.20	18.84	Sekretariat DPRD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				5	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD DIY	95	217,916,628,000	N/A	N/A	95	44,299,693,000	26.41	6,429,670,746	27.80	14.51	26.41	6,429,670,746	27.80	14.51	Sekretariat DPRD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			6	Program Pengembangan Regulasi Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang diselesaikan Tepat Waktu	98	64,456,668,000	N/A	N/A	96	8,425,043,000	12	0	12.21	0.00	11.72	-	12.21	0.00	Sekretariat DPRD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			7	Program Pelayanan Kerumahtanggan	Indeks Hasil Survey Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan	96	3,402,115,000	N/A	N/A	96	3,402,115,000	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sekretariat DPRD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			8	Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan	Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokoleran.	90	108,337,042,000	N/A	N/A	75	17,745,335,000	0	3,025,402,008	0.00	17.05	0	3,025,402,008	0.00	17.05	Sekretariat DPRD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	4	3		**Inspektorat**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran		100	9,207,290,568	100	1,313,149,661	100	1,508,131,000	16.57	217,316,990	16.57	14.41	16.57	217,316,990	16.57	14.41	Inspektorat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	6,393,840,705	100	562,130,965	100	1,047,295,000	3.61	28,610,400	3.61	2.73	3.61	28,610,400	3.61	2.73	Inspektorat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100	558,647,176	100	207,121,503	100	91,505,000	64.91	11,635,000	64.91	12.72	64.91	11,635,000	64.91	12.72	Inspektorat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	558,647,176	100	39,488,700	100	91,505,000	36.69	13,431,500	36.69	14.68	36.69	13,431,500	36.69	14.68	Inspektorat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	90	29,532,979,900	N/A	N/A	80	5,789,627,000	0	1,738,210,438	0.00	30.02	0	1,738,210,438	0.00	30.02	Inspektorat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	90	29,532,979,900	N/A	N/A	80	5,789,627,000	0		0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Inspektorat	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	90	29,532,979,900	N/A	N/A	80	5,789,627,000	0		0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Inspektorat	
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	90	29,532,979,900	N/A	N/A	80	5,789,627,000	0		0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Inspektorat	
	4	4		**Perencanaan**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran		100	12,290,817,840	100	1,413,888,434	100	2,038,913,500	24.98	300,892,266	24.98	14.76	24.98	300,892,266	24.98	14.76	Bappeda	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	4,985,581,850	100	679,798,632	100	1,011,092,350	38.26	246,220,300	38.26	24.35	38.26	246,220,300	38.26	24.35	Bappeda	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	3,157,269,353	100	384,674,255	100	527,418,245	27.02	47,462,300	27.02	9.00	27.02	47,462,300	27.02	9.00	Bappeda	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan yang berkualitas	100	154274060000	N/A	N/A	100	3,747,406,000	0	67217842 5	0.00	17.94	0	672,178,425	0.00	17.94	Bappeda	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100		N/A		100		0		0.00		0		0.00			
				5	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sosial Budaya	93	9,749,452,500	N/A	N/A	89.74	1,693,452,500	0	130,778,855	0.00	7.72	0	130,778,855	0.00	7.72	Bappeda	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			6	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian	91.3	5,219,642,816	N/A	N/A	83.72	825,964,000	0	42,741,500	0.00	5.17	0	42,741,500	0.00	5.17	Bappeda	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			7	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Pemerintahan	92.96	5,727,224,836	N/A	N/A	90	938,105,000	0	82,635,140	0.00	8.81	0	82,635,140	0.00	8.81	Bappeda	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			8	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	88.57	8,880,680,292	N/A	N/A	77.14	1,405,493,725	0		0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Bappeda	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			9	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan SKPD	92	11,923,708,000	N/A	N/A	88	2,167,708,000	0	719,077,400	0.00	33.17	0	719,077,400	0.00	33.17	Bappeda	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	100		N/A		100		0		0.00		0		0.00			

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	5		**Keuangan**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran		100	9,155,572,800	100	2,183,303,341	100	9,155,572,800	**32.99**	530,361,519	32.99	5.79	32.99	530,361,519	32.99	5.79	DPPKA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
						100	46,740,114,701	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	21,022,463,000	100	1,252,067,000	100	21,022,463,000	14.72	102,045,671	14.72	0.49	14.72	102,045,671	14.72	0.49	DPPKA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							100	107,321,775,861	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
				3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	359,000,000	100	358,338,289	100	359,000,000	**13.63**	37,644,500	13.63	10.49	13.63	37,644,500	13.63	10.49	DPPKA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
							100	1,832,730,900	N/A	N/A	n/a	n/a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
				4	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi,	51.38	3,135,563,000	100	4,025,174,613	51.38	3,135,563,000	11.61	467,137,000	22.60	14.90	11.61	467,137,000	22.60	14.90	DPPKA	Data realisasi 2018 sampai dengan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan.																	bulan Maret
							60.06	19,111,500,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			5	Program Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100	3,301,283,000	N/A	N/A	100	3,301,283,000	6.17	693,102,450	6.17	20.99	6.17	693,102,450	6.17	20.99	DPPKA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
					2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD.	100		N/A	N/A	100		6.18		6.18		6.18		6.18			
			6	Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100	16,853,378.00	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD.	100		N/A	N/A	100	N/A	0		0.00		0		0.00			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				7	Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta raperda pertanggungjawaban APBD	100	2,119,050,000	N/A	N/A	100	2,119,050,000	31.77	336,753,500	31.77	15.89	31.77	336,753,500	31.77	15.89	DPPKA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
							100	10,817,961,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
			8	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Keakuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah	100	812,000,000	N/A	N/A	100	812,000,000	33.31	475,483,475	33.31	58.56	33.31	475,483,475	33.31	58.56	DPPKA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
						100	4,145,341,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			9	Progam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100	1,417,656,000	N/A	N/A	100	1,417,656,000	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	DPPKA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							100	7,237,278,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
				10	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	3.75	1,793,200,000	N/A	N/A	3.75	1,793,200,000	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	DPPKA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				11	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Bantul	1.29	2,104,038,000	N/A	N/A	1.29	2,104,038,000	0		0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	DPPKA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp		
				12	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	0.86	1,190,994,000	N/A	N/A	0.86	1,190,994,000	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	DPPKA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				13	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Gunungkidul	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3.8	1,190,994,000	N/A	N/A	3.8	1,190,994,000	0		0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	DPPKA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
				14	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Sleman	3.29	2,462,642,000	N/A	N/A	3.92	2,462,642,000	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	DPPKA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	15	Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	37,158,446,429	9,903,596,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Bantul	38,506,977,121	11,620,311,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Kulon Progo	12,537,252,508	6,577,695,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Gunungkidul	12,381,553,649	6,483,386,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Sleman	78,538,848,031	13,600,832,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
				16	Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Aset Daerah	Persentase pengelolan asset yang dikelola sesuai dengan prosedur.	100	4,497,000,000	N/A	N/A	100	4,497,000,000	22	359,092,845	22.00	7.99	22	359,092,845	22.00	7.99	DPPKA	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			17	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100	11,621,377,280	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			18	Program Pendayagunaan Barang Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	100	3,967,611,700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	4	**6**		**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**																	
			1	Program Administrasi Perkantoran		100	13,892,362,868	100	1,840,273,841	100	2,275,534,040	20.17	363,968,856	20.17	15.99	20.17	363,968,856	20.17	15.99	BKD	Data realisasi 2018 sampai dengan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					bulan Maret
			2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	6,460,083,482	100	1,018,695,300	100	1,058,145,400	30.03	293,738,000	30.03	27.76	30.03	293,738,000	30.03	27.76	BKD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	1,327,863,829	100	176,656,300	100	217,500,750	21.78	43,155,650	21.78	19.84	21.78	43,155,650	21.78	19.84	BKD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				4	Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian	1)Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	85	17,719,310,000	N/A	N/A	77	3,543,862,000	0	174,132,900	0.00	4.91	0	174,132,900	0.00	4.91	BKD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
						2)Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	92.2	17,719,310,000	N/A	N/A	61.6		0		0.00		0		0.00			

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			5	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karier Pegawai	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	85	26,681,145,000	N/A	N/A	79	5,336,229,000	0	857,680,236	0.00	16.07	0	857,680,236	0.00	16.07	BKD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			6	Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	93	13,405,738,000	N/A	N/A	87	2,113,223,000	0	283,440,600	0.00	13.41	0	283,440,600	0.00	13.41	BKD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			7	Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	A(81,26)	680,000,000	N/A	N/A	B(75)	125,000,000	N/A	0	N/A	0.00	N/A	-	N/A	0.00	BKD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	Program Pengelolaan Pengukuran kompetensi pegawai	Persentase kompetensi individu yang terpetakan	49.76	14,324,985,850	N/A	N/A	48.48	2,246,937,000	6.6		13.61	0.00	6.6	-	13.61	0.00	BKD	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	9	Program Administrasi Perkantoran		100	12,336,589,306	100	1,677,248,508	100	2,020,702,250	24.75	412,255,062	24.75	20.40	24.75	412,255,062	24.75	20.40	Badan Diklat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	10	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100	17,571,282,147	100	1,944,038,729	100	2,878,131,750	25.8	583,768,860	25.80	20.28	25.8	583,768,860	25.80	20.28	Badan Diklat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
	11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		100	1,898,429,686	100	258,376,250	100	310,958,000	12.18	38,788,175	12.18	12.47	12.18	38,788,175	12.18	12.47	Badan Diklat	Data realisasi 2018 sampai dengan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
							K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Capaian Kinerja Dan Keuangan																		bulan Maret
				12	Program Pendidikan Penjenjangan	Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	20	41,881,390,000	N/A	N/A	5	6,860,000,000	0	221,513,686	0.00	3.23	0	221,513,686	0.00	3.23	Badan Diklat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			13	Program Pendidikan Teknis Fungsional	Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	20	16,968,190,000	N/A	N/A	6.7	2,779,350,000	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Badan Diklat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			14	Program Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Kediklatan	Presentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	90	1,208,809,000	N/A	N/A	78	198,000,000	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Badan Diklat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret
			15	Program Peningkatan Standarisasi dan Penjaminan Mutu	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	82	5,769,319,000	N/A	N/A	77	945,000,000	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Badan Diklat	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2018)*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.*)
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	7		**Penelitian dan Pengembangan**																	
			1	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah	100	4,289,706,285	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bappeda	Data realisasi 2018 sampai dengan bulan Maret

Catatan:

Nilai NA pada realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 disebabkan oleh perbedaan indicator kinerja pada tahun 2017 yang masih mengacu pada RPJMD periode 2012-2017 dengan RPJMD 2017-2022.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan di DIY dan sebagai dasar pijakan dalam perencanaan ke depan meliputi:

2.3.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Belum Optimalnya Derajat Kualitas Sumberdaya Manusia yang disebabkan oleh :
   a) Disparitas IPM antar wilayah;
   b) Partipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan masih rendah;
   c) Kualitas pendidikan belum merata;
   d) Kualitas pelayanan kesehatan belum merata.
2. Derajat Ekonomi Masyarakat masih rendah yang disebabkan oleh :
   a) Rendahnya pendapatan per kapita;
   b) Tingginya angka kemiskinan;
   c) Ketimpangan pendapatan masih tinggi;
   d) Pertumbuhan ekonomi yang belum berkelanjutan.
3. Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah masih tinggi yang disebabkan oleh :
   a) Investasi yang belum merata;
   b) Ketersediaan infrastruktur yang belum merata.
4. Layanan Publik Belum Optimal, yang disebabkan oleh :
   Masih rendahnya kapasitas tata kelola pemerintahan.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Urusan Pendidikan
   - Pemenuhan terhadap standar nasional pendidikan belum optimal;
   - Adanya disparitas tingkat pendidikan penduduk di masing-masing Kabupaten/kota.
2. Urusan Kesehatan
   - Rasio pelayanan Rumah Sakit yang belum merata;
   - Ketersediaan tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar nasional;
   - Prevalensi Penyakit Tidak Menular yang terus meningkat;

- Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Sehat.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Konektivitas di daerah tertinggal dan antar kawasan masih terbatas;
   - Akses penduduk terhadap layanan dasar belum mencapai 100%;
   - Belum optimalnya penataan ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan wilayah;
   - Konversi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
   - Masih terdapat penduduk yang bertempat tinggal di hunian tidak layak;
   - Masih terjadi Backlog Perumahan.
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
   - Angka kriminalitas yang cukup tinggi;
   - Jumlah demontrasi yang anarkis cukup tinggi;
   - Angka penyalahgunaan narkoba yang cukup besar;
   - Maraknya kasus intoleransi.
6. Urusan Sosial
   - Belum optimalnya Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
7. Urusan Ketenagakerjaan
   - Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka
   - Masih tingginya angka pengangguran terdidik;
   - Masih rendahnya kualitas tenaga kerja;
   - Belum optimalnya fungsi sarana hubungan industrial.
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   - Capaian IPG dan IDG yang belum optimal;
   - Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang belum optimal.
9. Urusan Pangan
   - Belum optimalnya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen dan *paceklik*;
   - Belum optimalnya nilai PPH (Pola Pangan Harapan) masyarakat DIY;
   - Masih terdapat desa rawan pangan di DIY;
   - Rendahnya pengawasan pangan yang beredar;

- Minimnya jumlah penyuluh pertanian.

10. Urusan Pertanahan
    - Belum semua bidang tanah memiliki kepastian hukum;
    - Masih terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

11. Urusan Lingkungan Hidup
    - Tingginya pencemaran air, udara dan tanah;
    - Tingginya frekuensi terjadinya bencana alam khususnya Hidrometeorologi;
    - Maraknya aktifitas penambangan liar.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    - Kepemilikan dokumen kependudukan (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin, masih rendah.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pemberdayaan masyarakat;
    - Kapasitas dan peran kelembagaan pemberdayaan masyarakat masih relatif rendah.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    - Ketahanan Keluarga. Rapuhnya ketahanan penyebab berbagai permasalahan keluarga seperti kasus perceraian dan KDRT;
    - Distribusi Penduduk yang Tidak Merata;
    - Tingginya Jumlah Pasangan Usia Subur yang Tidak Ber-KB (Kelompok *Unmet Need)*.

15. Urusan Perhubungan
    - Meningkatnya kepadatan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan khususnya daerah perkotaan.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika
    - Kurangnya integrasi berbagai interface pelayanan publik, diantaranya layanan transportasi publik, parkir, pengurai macet, integrasi informasi layanan inter-moda, informasi kuliner, serta layanan keamanan dengan CCTV.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
    - Rendahnya daya saing koperasi dibanding pelaku usaha non koperasi;
    - Rendahnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia;
    - Masih adanya koperasi yang tidak aktif;
    - Masih belum optimalnya kontribusi UKM dalam perekenomian daerah.
18. Urusan Penanaman modal
    - Rendahnya Investasi baik PMA maupun PMDN;
    - Penyebaran Investasi Antar Kabupaten/Kota yang tidak merata.
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
    - Minimnya sarana olahraga;
    - Belum optimalnya layanan pendidikan keolahragaan;
    - Belum optimalnya pembudayaan olahraga;
    - Belum optimalnya pengembangan kapasitas/pemberdayaan kaum muda yang berkontribusi pada pembangunan.
20. Urusan Statistik
    - Ketersediaan Data Statistik yang tidak tepat waktu;
    - Perbedaan Data Statistik pada masing – masing instansi;
21. Urusan Kebudayaan
    - Masih banyaknya cagar budaya dan warisan budaya yang belum tertangani secara optimal;
    - Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya;
    - Minat masyarakat untuk berkunjung ke Museum masih rendah karena daya tarik dan promosi yang kurang serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Museum;
    - Belum optimalnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur;
22. Urusan Perpustakaan
    - Rendahnya minat baca masyarakat;
    - Belum optimalnya pinjam silang antar perpustakaan.
23. Urusan Kearsipan
    - Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum optimal.

24. Urusan Persandian
    - Jumlah sandiman yang belum optimal (ketersediaan SDM sandi yang berkualifikasi terbatas).

25. Urusan Kelautan dan Perikanan
    - Masih rendahnya budaya bahari pada masyarakat DIY;
    - Belum dapat dioperasionalkannya Pelabuhan Tanjung Adikarto;
    - Belum optimalnya kapasitas SDM dan kelembagaan perikanan;
    - Penyediaan kebutuhan ikan DIY masih banyak dipasok dari luar daerah;
    - Konsumsi ikan masyarakat DIY relatif rendah dibanding tingkat nasional.

26. Urusan Pariwisata
    - Kurangnya Produk Wisata Berkelas Dunia;
    - Pengeluaran wisatawan masih rendah;
    - Lama tinggal wisatawan yang masih rendah.

27. Urusan Pertanian
    - Keterbatasan Kapasitas SDM Pertanian;
    - Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) belum optimal;
    - Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

28. Urusan Kehutanan
    - Masih terdapat lahan kritis di kawasan hutan
    - Hasil hutan produksi yang dikelola KPH Yogyakarta masih belum optimal
    - Masih terjadi kerusakan hutan
    - Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain yang tidak berizin

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
    - Belum optimalnya penyediaan listrik di pedesaan;
    - Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
    - Belum optimalnya konservasi energi.

30. Urusan Perdagangan
    - Persaingan usaha sektor perdagangan sangat kompetitif, dan memarginalisasi pelaku skala kecil;
    - Masih rendahnya nilai ekspor.

31. Urusan Perindustrian
    - Kurangnya daya saing produk hasil industri;
    - Keterbatasan kemampuan SDM dan teknologi produksi;
    - Belum optimalnya perlindungan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual;
32. Urusan Ketransmigrasian
    -
33. Urusan Administrasi Penunjang Pemerintahan
    a. Sekretariat Daerah
        - Belum seluruh bahan kebijakan yang menjadi kebijakan.
    b. Sekretariat DPRD
        -
    c. Pengawasan
        - Pergeseran dari paradigma *watchdog* ke paradigma *consulting* dan *quality assurance* belum optimal.
    d. Perencanaan
        - Kesenjangan capaian sasaran pembangunan dengan rencana.
    a. Keuangan
        - Menurunnya kapasitas keuangan daerah (PAD terhadap total pendapatan daerah);
        - Kurangnya efektivitas dan efisiensi pengalokasian belanja daerah.
    b. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
        - Belum konsistennya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.
    c. Penelitian dan Pengembangan
        - Peran unit kelembagaan Litbang di daerah pada umumnya masih belum berdaya memenuhi ketentuan kebijakan bidang kelitbangan dan ristek, antara lain Permendagri 20 Tahun 2011, Permendagri 36 Tahun 2012, Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri tentang Penguatan SIDa;
        - komitmen kalangan aparatur daerah yang masih belum optimal dalam melakukan pemberdayaan unit kelembagaan Litbang di daerah-daerah;

- Kurang sinergi sumberdaya penelitian dengan pengembangan. Pemangku kepentingan dalam penelitian dan pengembangan di DIY sangat banyak, namun sinergi diantara para pemangku kelitbangan tidak mudah.

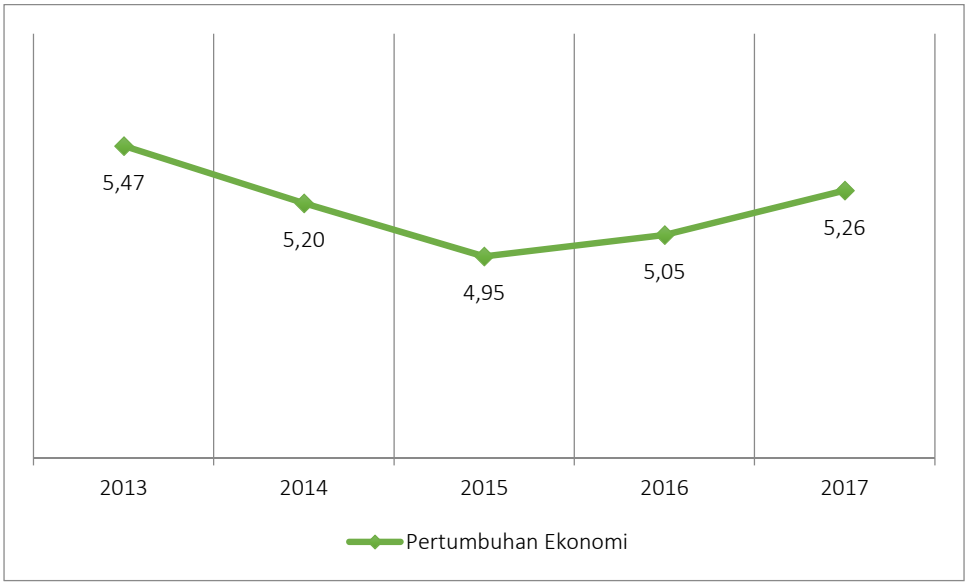
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam dokumen Rancangan awal RKP tahun 2019 disebutkan bahwa di tengah tahun politik pada tahun 2019, perekonomian Indonesia diperkirakan akan mampu melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi. Konsumsi masyarakat akan meningkat didorong oleh penguatan daya beli dan pelaksanaan pemilihan umum nasional. Perekonomian diperkirakan akan melanjutkan penguatan investasi terutama sebagai hasil perbaikan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur. Ekspor akan ditingkatkan melalui perbaikan daya saing, sehingga dapat bergerak dari ekspor yang berbasis komoditas menuju yang berbasis industri. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,4 – 5,8 persen di tahun 2019 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Adapun arah kebijakan ekonomi DIY pada tahun 2019 meliputi:

3.1.1 Struktur Sektor Ekonomi

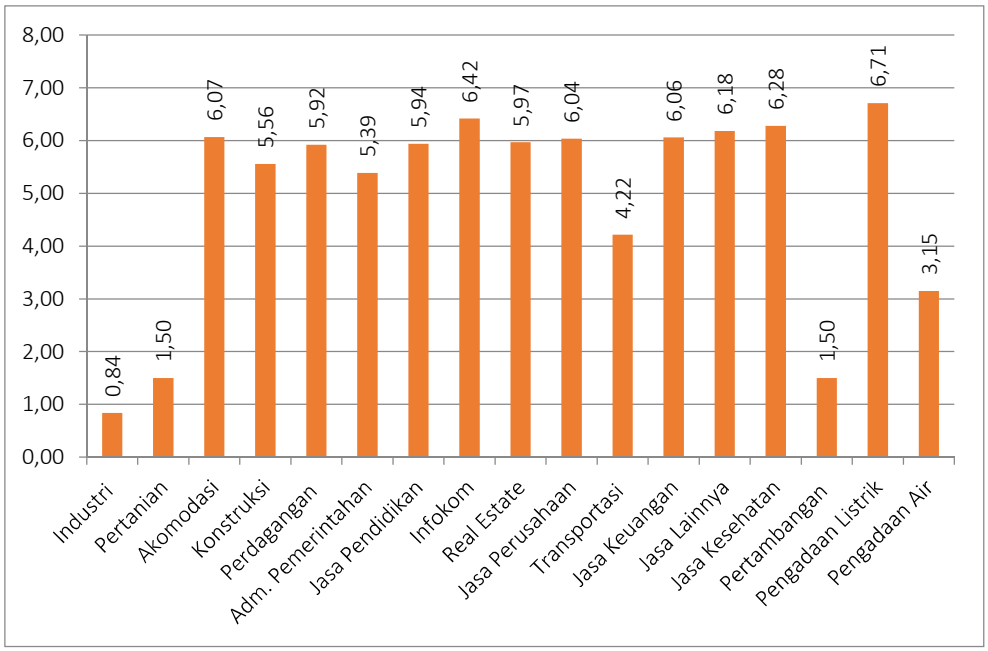
Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2013-2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,47% kemudian mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut hingga mencapai 4,95% pada tahun 2015. Perekonomian membaik yang ditandai dengan kenaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,05% pada tahun 2016 dan 5,26% pada tahun 2017. Kenaikkan ini didorong oleh naiknya pertumbuhan di setiap sektor.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 3-1 Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2013-2017

Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa semua sektor dalam perekonomian tumbuh positif. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengadaan listrik (6,71%) diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi (6,42%) dan sektor jasa kesehatan (6,28%). Sementara itu, sektor pertanian dan industri mengalami pertumbuhan yang relatif rendah yaitu sebesar 1,50% dan 0,84%.

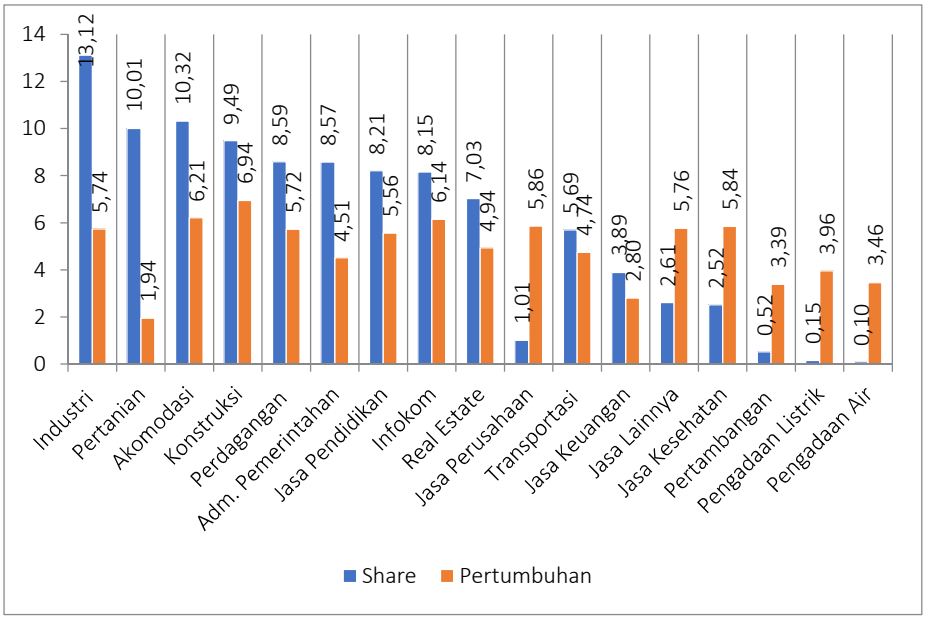


Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 3-2 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi per Tahun 2013-2017 menurut Sektor (%)

Perbandingan kontribusi dan pertumbuhan tiap sektor pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB relatif mengalami pertumbuhan yang rendah, seperti sektor industri pengolahan dan pertanian. Sementara itu, sektor pengadaan listrik, pengadaan air, dan pertambangan yang pertumbuhannya tinggi cenderung memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap pembentukan PDRB.

Sektor pengadaan listrik meskipun memiliki pertumbuhan tinggi tidak potensial untuk dikembangkan karena kontribusinya relatif kecil. Sementara itu, sektor yang memiliki kontribusi besar seperti industri pengolahan dan pertanian juga memiliki keterbatasan untuk dikembangkan. Pengembangan industri pengolahan memiliki keterbatasan karena industri yang berkembang adalah industri berskala kecil menengah dengan kemampuan produksi yang terbatas, sedangkan pengembangan sektor pertanian terkendala oleh masalah alih fungsi lahan dan keterbatasan luas area pertanian. Alternatif sektor yang potensial untuk dikembangkan adalah sektor informasi dan komunikasi yang memiliki pertumbuhan tinggi dan kontribusi yang relatif besar.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 3-3 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor terhadap PDRB DIY (%), 2017

Hasil proyeksi laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,51% meningkat hingga tahun 2022 menjadi sebesar 5,77%.

Tabel 3-1 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (%), 2019-2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Proyeksi	5,51	5,60	5,69	5,77

Sumber: Bappeda DIY, 2017

Pada tahun 2019 diperkirakan PDRB riil mencapai 101,505 triliun rupiah. Perkiraan nilai tersebut akan terus meningkat hingga tahun 2022.

Tabel 3-2 Proyeksi Nilai PDRB Riil (Juta Rupiah), 2019-2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Proyeksi	101.342.120	106.242.232	111.407.744	116.631.151

Sumber: Bappeda DIY, 2017

3.1.2 Struktur Pengeluaran Dalam PDRB

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2013-2017, nilai konsumsi rumah tangga mengalami kenaikkan dari sebesar 57,101 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi sebesar 81,688 triliun rupiah pada tahun 2017. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total nilai PDRB mengalami kenaikkan dari sebesar 67,66% pada tahun 2016 menjadi 68,55% pada tahun 2017. Secara rinci konsumsi rumah tangga dikelompokkan menjadi konsumsi makanan dan non-makanan. Selama tahun 2013-2017, kontribusi konsumsi non-makanan lebih besar dibandingkan konsumsi makanan. Pada tahun 2017, kontribusi konsumsi makanan dan non-makanan tercatat masing-masing sebesar 28,68% dan 39,87%.

Nilai PMTB yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB mengalami kenaikkan setiap tahunnya. Kenaikkan nilai PMTB pada tahun 2014 sebesar 3,494 triliun rupiah, tahun 2015 sebesar 3,054 triliun rupiah, tahun 2016 sebesar 2,630 triliun rupiah, dan tahun 2017 sebesar 3,718 triliun rupiah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDRB pada tahun 2013 sebesar 13,629 triliun rupiah (16,05%) meningkat menjadi sebesar 20,063 triliun rupiah (16,84%) pada tahun 2017. Selama periode lima tahun tersebut, kontribusi konsumsi pemerintah mengalami peningkatan dengan kecenderungan yang relatif datar.

Nilai ekspor luar negeri DIY tahun 2017 mencapai 7,436 triliun rupiah. Pada periode 2013-2017, surplus perdagangan luar negeri tertinggi dicapai pada tahun 2013, yaitu sebesar 1,709 triliun rupiah. Pada tahun 2017, surplus perdagangan tersebut hanya sebesar 896 milyar rupiah.

Tabel 3-3 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
Konsumsi RT	57.101.887	62.875.141	68.730.528	74.429.796	81.688.214
a. Makanan & Minuman	24.497.671	26.694.388	28.969.375	31.378.592	34.174.255
b. Bukan Makanan	32.604.216	36.180.753	39.761.153	43.051.204	47.513.959
Konsumsi LNPRT	2.457.182	2.948.427	3.171.193	3.220.070	3.756.395
Konsumsi pemerintah	13.629.834	15.347.428	17.214.154	18.441.762	20.063.072

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
PMTB	24.250.704	27.744.794	30.798.881	33.428.978	37.147.936
Perubahan Inventori	967.15	980.197	1.151.797	1.295.788	1.368.184
Ekspor LN	4.224.512	5.465.423	6.266.265	6.495.282	7.436.959
Impor LN	2.514.540	4.085.245	5.066.145	5.922.732	6.540.719
Net Ekspor Antar daerah	- 15.192.186	- 18.433.682	- 20.819.021	- 21.290.602	-25.747.135
PDRB	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341	119.172.906

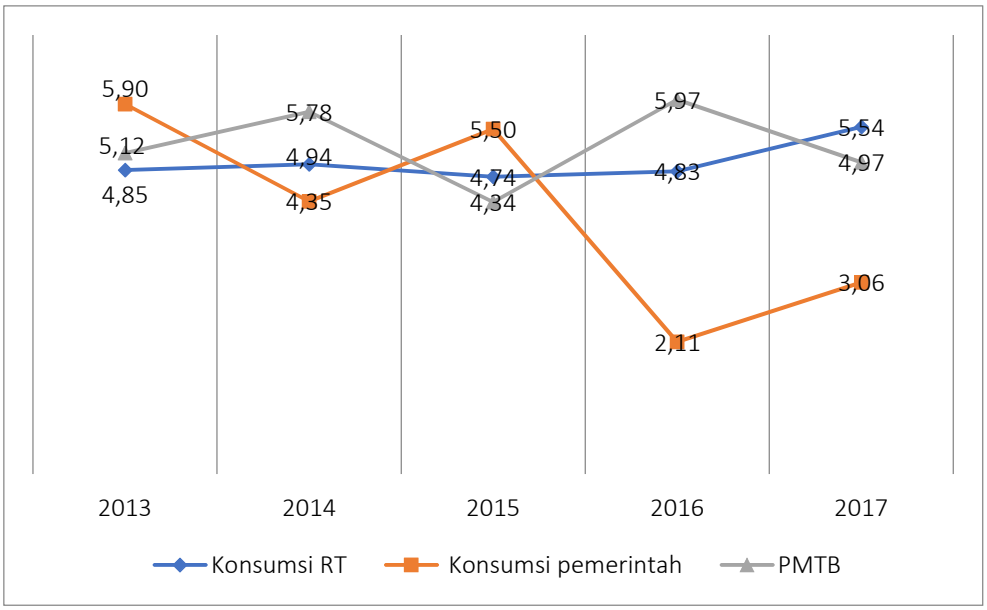
Sumber: BPS Provinsi DIY

Tabel 3-4 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran, 2013-2017 (%)

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
Konsumsi RT	67,24	67,72	67,75	67,60	68.55
a. Makanan & Minuman	28,85	28,75	28,56	28,50	28.68
b. Bukan Makanan	38,39	38,97	39,19	39,10	39.87
Konsumsi LNPRT	2,89	3,18	3,13	2,92	3.15
Konsumsi pemerintah	16,05	16,53	16,97	16,75	16.84
PMTB	28,56	29,88	30,36	30,36	31.17
Perubahan Inventori	1,14	1,06	1,14	1,18	1.15
Ekspor LN	4,97	5,89	6,18	5,9	6.24
Impor LN	2,96	4,4	4,99	5,38	5.49
Net Ekspor Antar daerah	-17,89	-19,85	-20,52	-19,34	-21.60
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi DIY

Selama periode 2013-2017, pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan PMTB mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2017, pertumbuhan konsumsi rumah tangga (5,54%) dan konsumsi pemerintah (3,06%) mengalami kenaikkan dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan PMTB pada tahun yang sama mengalami penurunan dari 5,97% tahun 2016 menjadi 4,97% tahun 2017.

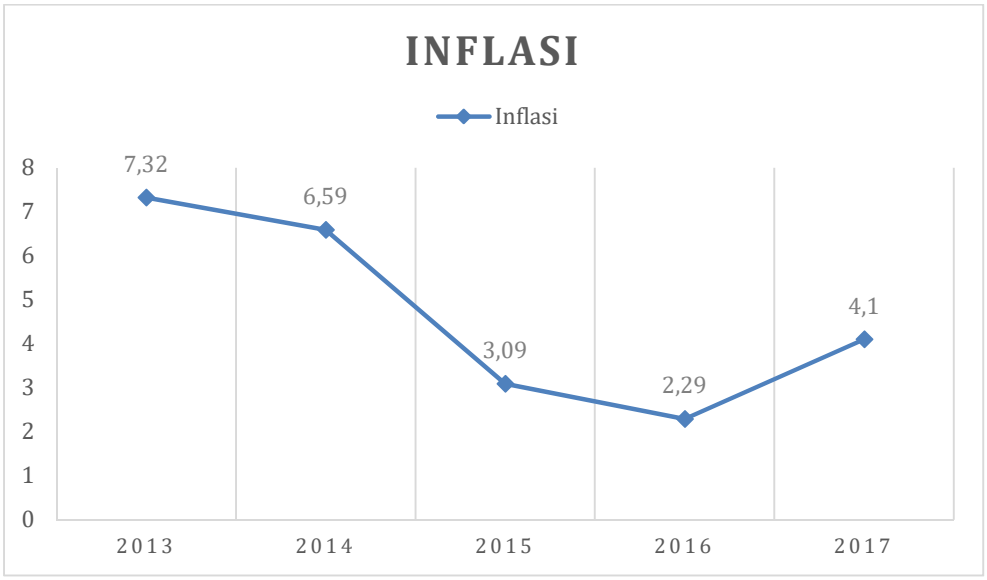


Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 3-4 Pertumbuhan 3 Komponen Penggunaan dalam Pembentukan PDRB DIY (%), Tahun 2013-2017

3.1.3 Inflasi

Laju inflasi DIY selama kurun waktu lima tahun, 2013-2017, cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,32% kemudian menurun hingga tahun 2016 mencapai 2,29% kemudian meningkat menjadi 4,20% pada tahun 2017.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 3-5 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2013-2017

Proyeksi nilai inflasi tahun 2019-2022 menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2019, inflasi diperkirakan mencapai 2,57% kemudian turun menjadi 2,13% tahun 2020. Penurunan inflasi tersebut diperkirakan mencapai 1,24% pada tahun 2022.

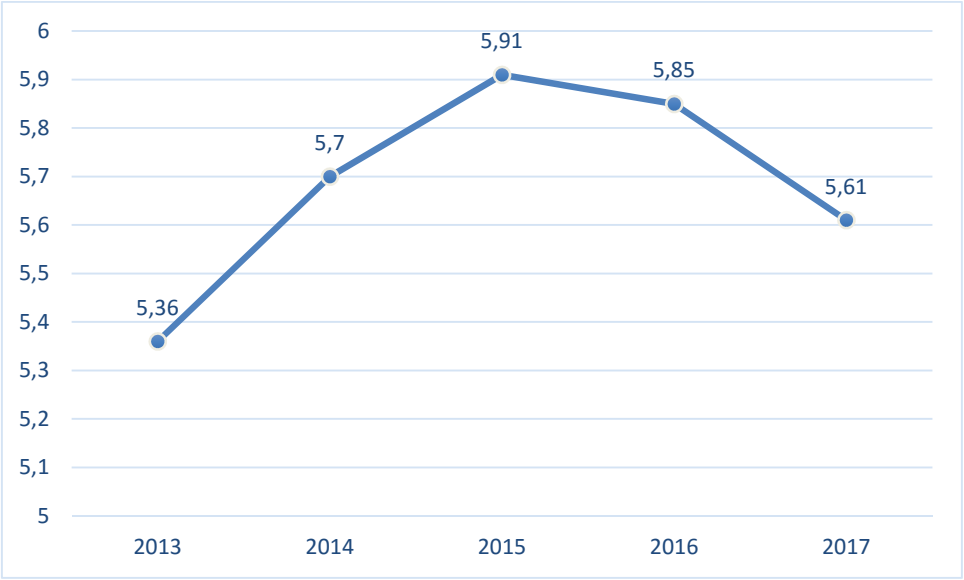
Tabel 3-5 Proyeksi Nilai Inflasi (%), 2019-2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Proyeksi	2,57	2,13	1,68	1,24

Sumber: Bappeda DIY, 2017

3.1.4 ICOR

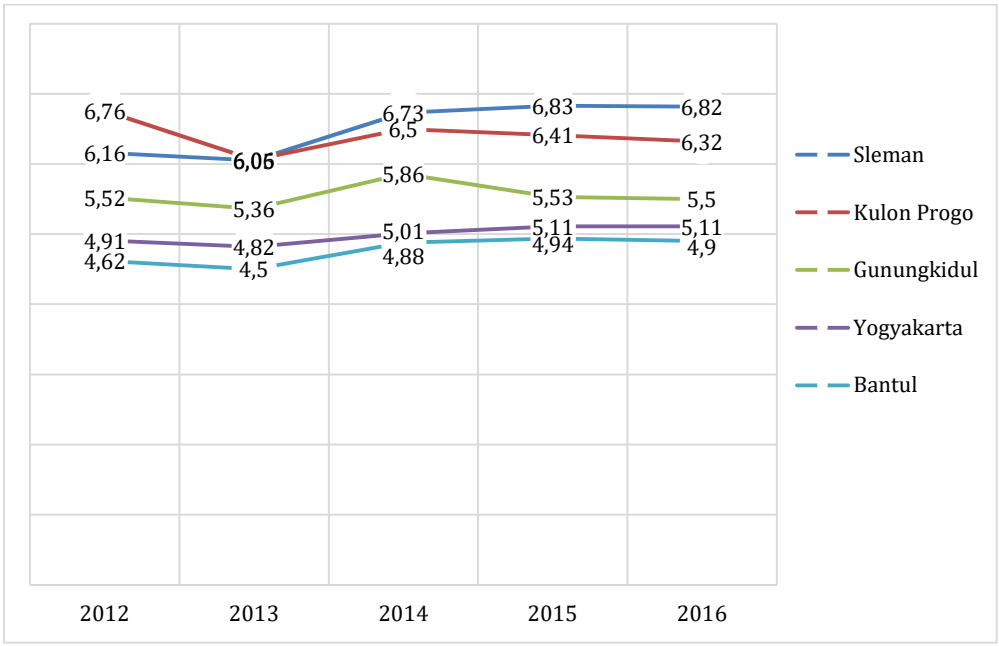
Pada periode 2013-2017, nilai ICOR DIY relatif tinggi dan menunjukan perkembangan dengan trend yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan relatif kurang efisien. Pada tahun 2013 nilai ICOR sebesar 5,36 kemudian mengalami kenaikkan pada 2 tahun berikutnya. Nilai ICOR kembali turun menjadi 5,85 tahun 2016 dan 5,61 tahun 2017. Nilai ICOR sebesar 5,61 berarti bahwa untuk menaikkan output sebesar 1 unit diperlukan tambahan investasi sebesar 5,61 unit.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 3-6 Perkembangan ICOR DIY (PMTB + Perubahan Inventori), 2013-2017

Menurut kabupaten/kota di DIY, pada tahun 2016 nilai ICOR tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Sleman diikuti Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, Kota Yogyakarta, dan terendah Kabupaten Bantul. Kabupaten Sleman memiliki nilai ICOR relatif tinggi dari kabupaten/kota lainnya karena jenis investasi yang ada bersifat padat modal dan lapangan usaha yang dominan adalah industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan minum. Sementara itu, Kabupaten Bantul memiliki nilai ICOR yang relatif rendah karena lebih didominasi oleh sektor pertanian, industri kecil/rumah tangga, dan jasa akomodasi non-bintang.



sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 3-7 Perkembangan ICOR (PMTB + Perubahan Inventori) Kabupaten/Kota di DIY, 2012-2016

Hasil proyeksi nilai ICOR tahun 2019-2022 menunjukkan tren yang menurun. Tahun 2019 nilai ICOR diperkirakan sebesar 5,34 kemudian turun hingga mencapai 4,92 pada tahun 2022. Hasil peramalan tersebut menunjukkan adanya efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan output.

Tabel 3-6 Proyeksi Nilai ICOR, 2019-2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Proyeksi	5,34	5,20	5,06	4,92

Sumber: Bappeda DIY, 2017

3.1.5 Ketenagakerjaan

Secara eksisting kondisi penduduk usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta tingkat pengangguran terbuka telah diuraikan pada bab sebelumnya,

sedangkan dalam kaitannya dengan substansi pada sub bab berikut lebih pada proyeksi kondisi ketenagakerjaan di DIY.

Proyeksi ketenagakerjaan DIY tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang lebih baik yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah orang yang bekerja, jumlah angkatan kerja dan diiringi dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka. Proyeksi ketenagakerjaan DIY tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3-7 Proyeksi Angkatan Kerja dan Penduduk yang Bekerja di DIY Tahun 2018-2022

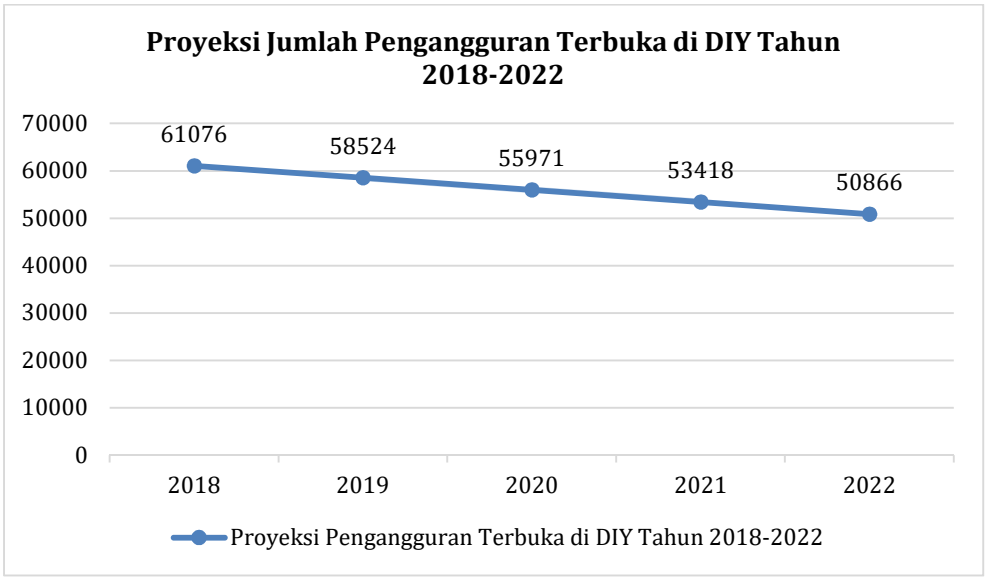
Tahun	Angkatan Kerja	Penduduk Bekerja
2018	2.107.286	2.043.286
2019	2.128.926	2.067.182
2020	2.150.566	2.091.077
2021	2.172.206	2.114.972
2022	2.193.845	2.138.867

Sumber: Bappeda DIY, 2017

Proyeksi ketenagakerjaan DIY tahun 2018 – 2022 jika dilihat dari faktor angkatan kerja menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan angkatan kerja tersebut diimbangi dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja dan diiringi dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka.

Angkatan kerja di tahun 2018 diperkirakan berjumlah 2.107.286 orang meningkat menjadi 2.193.845 orang di tahun 2022. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan peningkatan perkiraan jumlah penduduk yang bekerja dari 2.043.286 orang pada tahun 2018 menjadi 2.138867 pada tahun 2022. Meningkatnya jumlah orang bekerja merupakan konsekuensi dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi DIY yang membutuhkan sumber daya manusia dalam meningkatkan produksi. Seiring dengan proyeksi jumlah penduduk bekerja yang meningkat, proyeksi jumlah pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Proyeksi jumlah pengangguran terbuka turun dari 61.076 orang di tahun 2018 menjadi 50.866 orang di tahun 2022.

Prediksi jumlah pengangguran terbuka di DIY dapat digambarkan dalam grafik berikut.



Sumber: Bappeda DIY, 2017

Gambar 3-8 Proyeksi Jumlah Pengangguran Terbuka DIY Tahun 2018- 2022 (orang)

Jumlah angkatan kerja terdiri dari orang yang bekerja dan pengangguran terbuka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketenagakerjaan di DIY di antaranya adalah tingkat upah, jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pendidikan, dan elastisitas penyerapan tenaga kerja. Tersedianya jumlah penduduk yang besar pada usia kerja dengan tingkat pendidikan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta upah yang cukup dan didukung pertumbuhan ekonomi yang baik maka akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja DIY, sehingga akan dapat membantu menurunkan tekanan permasalahan dari pengangguran di DIY.

Proyeksi tahun 2018 – 2022 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja dan orang yang bekerja sama-sama mengalami kenaikan, dengan pengangguran terbuka yang diproyeksi mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan adanya optimisme yang kuat pada kualitas laju pertumbuhan ekonomi DIY, khususnya dalam menyerap tenaga kerja.

Proyeksi dalam Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) DIY 2017 – 2022

Proyeksi yang disajikan dalam Analisis Makro DIY tersebut sejalan dengan proyeksi yang ada dalam Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja (PTKD) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY khususnya untuk perkiraan angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan jumlah pengangguran.

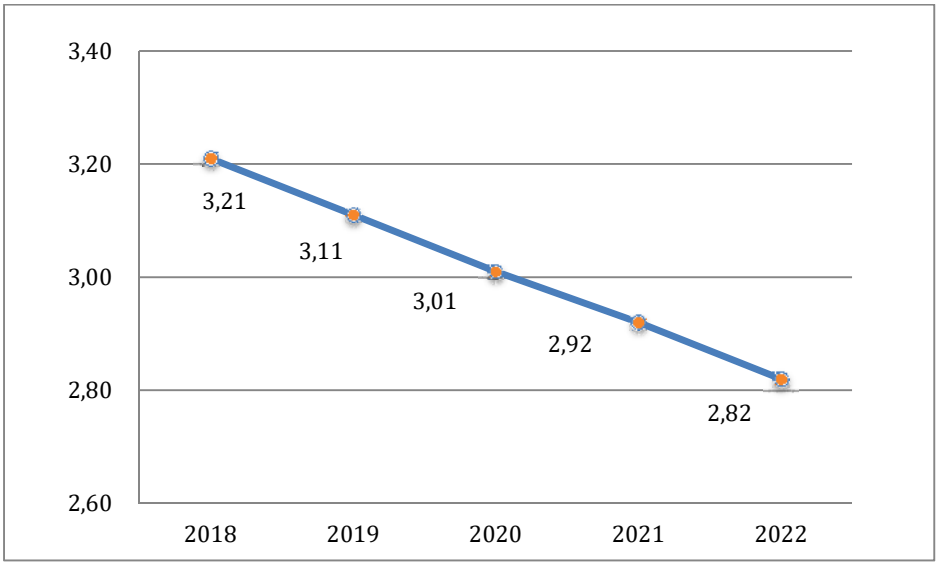
Berdasarkan hasil perkiraan Perencanaan Tenaga Kerja DIY tahun 2017 - 2022, penduduk usia kerja di DIY diperkirakan akan bertambah sebanyak 214.666 orang yaitu dari 2.958.762 orang pada tahun 2014 menjadi 3.173.428 orang pada tahun 2022. Angkatan kerja diperkirakan juga akan mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja, yaitu dari 2.132.815 orang menjadi 2.308.432 orang pada tahun 2022. Perkiraan angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka perkiraan dalam Analisis Makro DIY. Dari angka perkiraan penduduk usia kerja dan angkatan kerja ini maka dapat diprediksi angka TPAK DIY dalam kurun waktu yang sama.

Selama kurun waktu 2017-2022 TPAK diperkirakan mengalami pertumbuhnan sebesar 0,18 persen (Dokumen PTKD) yaitu dari 72,08 persen (tahun 2017), 72,22 persen (tahun 2018) dan menjadi 72,74 persen pada tahun 2022.

Sejalan dengan perkiranaan pertumbuhan ekonomi yang positif, maka akan mendorong penciptaan kesempatan kerja, sehingga jumlah kesempatan kerja pada tahun 2017-2022 diperkirakan juga akan mengalami kenaikan. Kesempatan kerja pada tahun 2017-2022 dalam dokumen PTKD diperkirakan akan meningkat dengan pertumbuhan per tahun sebesar 1,70 persen. Secara keseluruhan selama periode tersebut, kesempatan kerja akan bertambah sebanyak 180.934 orang menjadi 2.243.260 orang pada tahun 2022.

Perkiraan kesempatan kerja yang meningkat diikuti dengan penurunan jumlah penganggur terbuka di DIY yaitu dari 70.489 orang pada tahun 2017 turun menjadi 69.532 orang pada tahun 2018 dan terus menurun hingga menjadi 65.172 orang pada tahun 2022. Demikian hal nya dengan Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) yang diharapkan turun dari 3,30 persen pada tahun 2017 menjadi 2,82 persen pada tahun 2022.

Perkiraan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY dapat digambarkan dalam gambar berikut.

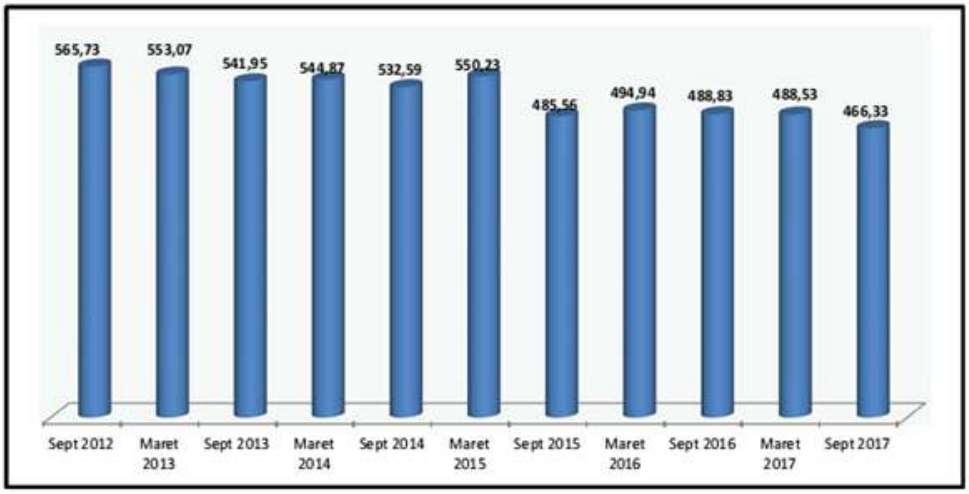


sumber : Disnakertrans DIY

Gambar 3-9 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 - 2022 (%)

3.1.6 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di D.I. Yogyakarta pada September 2017 sebesar 12,36 persen. Turun sebesar 0,66 poin selama setengah tahun selama setengah tahun Turun sebesar 0,66 poin selama setengah tahun selama setengah tahun. Garis kemiskinan di Daerah IstimewaYogyakarta pada September 2017 sebesar Rp 396.271 per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada September 2016 sebesar Rp 360.169,- per kapita per bulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 10,02%. Bila dibandingkan kondisi Maret 2017 yang sebesar Rp 374.009 per kapita per bulan maka dalam kurun waktu satu semester terjadi kenaikan sebesar 5,95 %. Peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komodi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2017, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 71,32%. Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada September 2017 di Daerah IstimewaYogyakarta terdapat 466,33 ribu orang. Bila dibandingkan dengan keadaan September 2016 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 488,83 ribu orang, maka selama satu tahun terjadi penurunan sebesar 22,5ribu jiwa.



sumber : BPS Provinsi DIY, 2017

Gambar 3-10 Jumlah Penduduk Miskin September 2012 – September 2017 (ribuan orang)

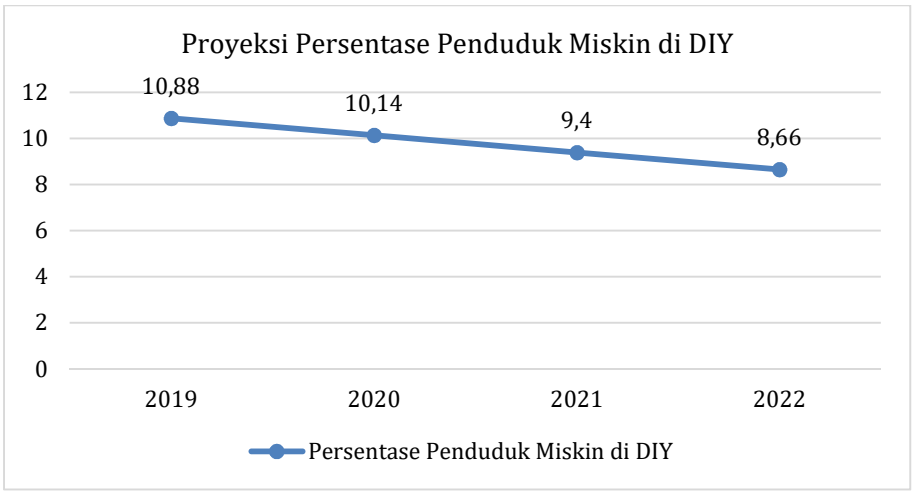
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin tertnggi di D.I. Yogyakarta tercatat pada September 2012. Pada waktu itu, persentase penduduk miskin mencapai 15,88% dari total penduduk di D.I. Yogyakarta. Selanjutnya, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan sampai dengan September 2014. Pada Maret 2015, persentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta bertambah menjadi 14,91%. Kemudian, pada September 2015, persentase penduduk miskin turun secara signifikan menjadi 13,16%. Selanjutnya persentase penduduk miskin sedikit mengalami peningkatan menjadi 13,34%. Pada periode berikutnya, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Pada September 2017, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di D.I. Yogyakarta sebanyak 12,36%.



sumber : BPS Provinsi DIY, 2017

Gambar 3-11 Persentase Penduduk Miskin September 2012 September 2017

Proyeksi persentase penduduk miskin pada tahun 2019-2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di DIY diproyeksikan sebesar 10,88% pada tahun 2019 dan terus mengalami penurunan menjadi 8,66% pada tahun 2022. Proyeksi persentase penduduk miskin di DIY tahun 2019-2022 dapa dilihat pada gambar berikut ini.

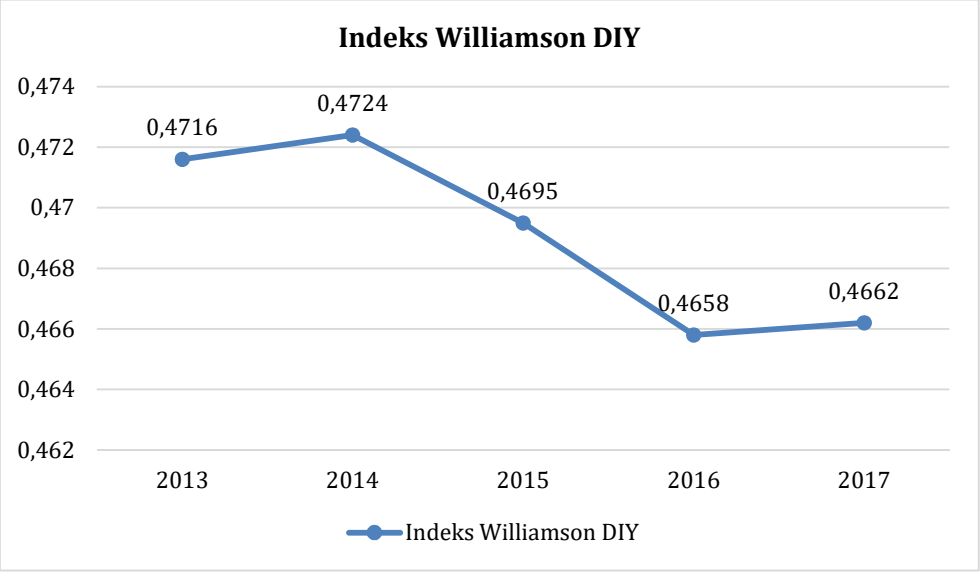


Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, BSD Bappeda DIY, Tahun 2018

Gambar 3-12 Proyeksi Persentase Penduduk Miskin di DIY Tahun 2019-2022

3.1.7 Ketimpangan Regional

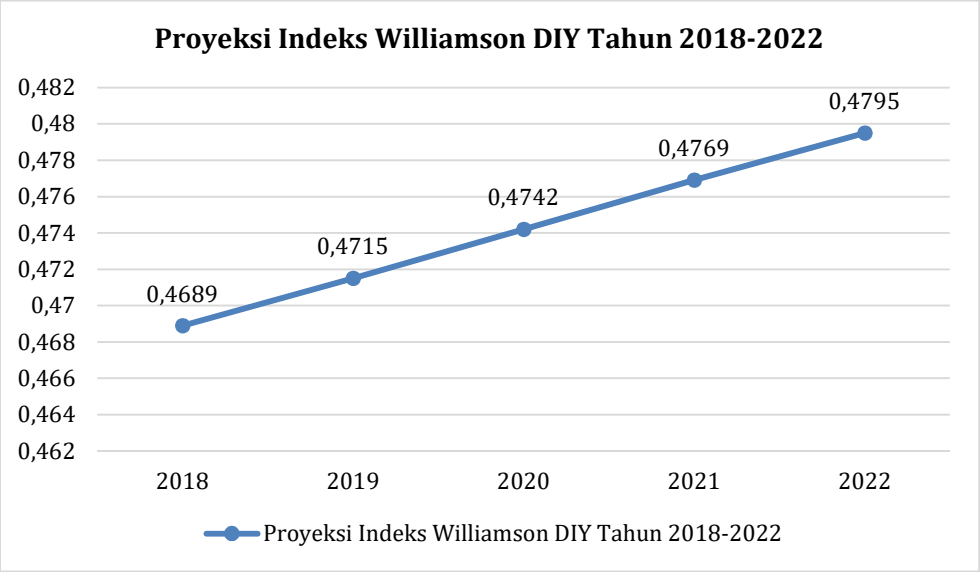
Dalam mengukur kesenjangan antar wilayah, digunakan *Indeks Williamson* (IW) sebagai salah satu indikator. Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Dari nilai IW DIY untuk tahun 2008-2016 mengalami fluktuasi, meskipun angka IW-nya masih di bawah 0,5. Pada tahun 2008, nilai IW adalah 880,4435 sedangkan nilainya pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,4658. Tingginya nilai IW mengindikasikan bahwa di DIY kesenjangan antar wilayahnya semakin tinggi jika dibandingkan pada tahun 2008, tetapi cenderung menurun jika dibandingkan pada tahun 2011. Dengan adanya kegiatan ekonomi yang semakin maju dan pemerataan pembangunan maka diupayakan angka kesenjangan tersebut dapat diturunkan, meskipun untuk saat inipun kesenjangan tersebut masih tergolong rendah.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

Gambar 3-13 Indeks Williamson DIY, Tahun 2013-2017

Proyeksi Indeks Williamson DIY pada tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Indeks Williamson diproyeksikan sebesar 0,4689 dan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun menjadi sebesar 0,4795 pada tahun 2022. Proyeksi Indeks Williamson DIY tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: Analisis makro ekonomi DIY, BSD Bappeda DIY, 2018

Gambar 3-14 Proyeksi Indeks Williamson DIY, Tahun 2018-2022

Kenaikan proyeksi Indeks Williamson ini salah satunya diindikasikan dengan pertumbuhan di sektor dan sub-sektor perekonomian yang berkembang tidak dalam tingkatan yang setara. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya ketimpangan antar wilayah. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan naiknya Indeks Williamson diantaranya adalah pertumbuhan penduduk kabupaten/kota yang tidak sama sehingga PDRB perkapita di kabupaten/kota relatif belum setara. Faktor lain yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah ini juga terkait dengan kapasitas ekonomi atau PDRB yang cukup berbeda karena perbedaan topografi dan lahan produktif. Angka Partisipasi Kerja (APK) dimasing-masing wilayah juga turut mempengaruhi angka ketimpangan antar wilayah tersebut.

Ketimpangan regional juga dapat digambarkan melalui Indeks Sentralitas sehingga akan diketahui kaitan antara aktivitas pelayanan fasilitas dengan luasan wilayah. Dari indeks sentralitas, maka dapat dikatakan bahwa Kota Yogyakarta mempunyai peranan yang sangat besar di D.I. Yogyakarta dalam penyedia pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Hal ini terbukti dengan analisis sentralitas yang menunjukkan bahwa nilai sentralitas Kota Yogyakarta merupakan nilai yang tertinggi yaitu 87,50 dengan nilai tertinggi adalah 100. Angka ini jauh di atas kabupaten lain di D.I. Yogyakarta yang hanya berkisar

antara 2,15 hingga 6,21 saja. Kabupaten Bantul mempunyai indeks sentralitas terbaik kedua yaitu 6,21 dengan jumlah fasilitas mencapai 16.397 unit serta luas area 16,10 persen. Luas wilayah yang besar seperti yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul yaitu 46,57 persen menyumbang indeks sentralitas 2,15 atau nilai yang paling rendah. Hal ini menujukkan bahwa semakin besar wilayah, maka daya layan fasilitas semakin kecil dan tidak merata di semua wilayah dapat dilayani secara baik. Kondisi ini menyebabkan di beberapa desa yang jauh dari pusat kabupaten menjadi terisolir dan rentan terhadap resiko kematian apabila dikaitkan dengan aspek kesehatan serta ketertinggalan dari segi pendidikan karena jumlah fasilitas pendidikan hanya tersedia fasilitas pendidikan dasar saja sehingga sumberdaya manusia yang ada di wilayah yang terisolir tersebut rendah.

Tabel 3-8 Nilai Indeks sentralitas D.I. Yogyakarta 2016

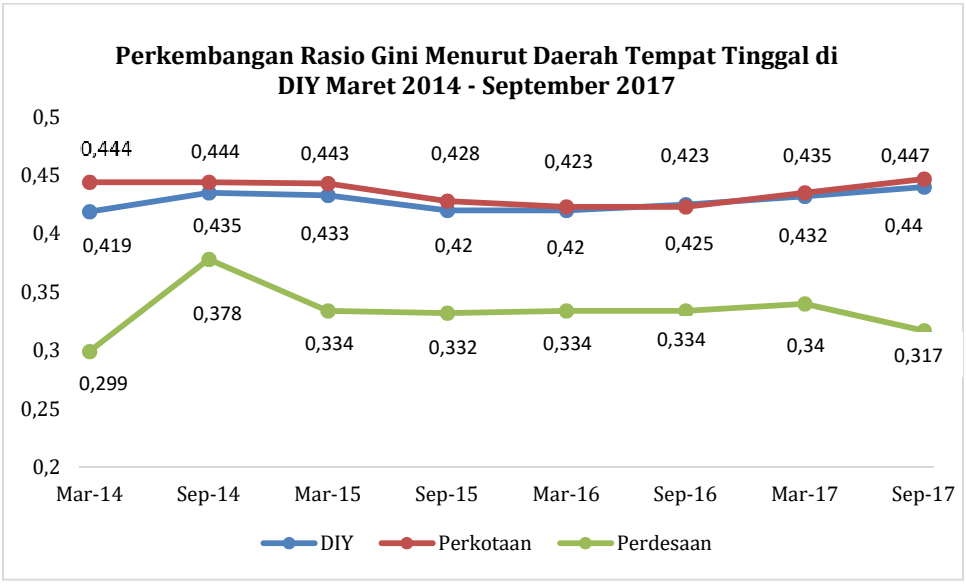
No	Kabupaten	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km2)	% Luas	Jumlah Jenis	Total Fasilitas	% Jumlah Aktivitas	Fungsi Pelayanan	Indeks Sentralitas
1	BANTUL	971,511	511,741,650.39	16.10	26	16397	100.00	0.0000051	6.21
2	GUNUNG KIDUL	704,026	1,479,828,369.94	46.57	26	12589	100.00	0.0000018	2.15
3	KULON PROGO	412,611	576,425,361.23	18.14	26	7156	100.00	0.0000045	5.51
4	SLEMAN	1,167,481	576,137,123.17	18.13	26	19730	100.00	0.0000045	5.52
5	YOGYAKARTA	412,704	33,524,400.41	1.06	24	11467	92.31	0.0000716	87.50

sumber: Podes 2014 (diolah)

3.1.8 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjukkan dengan Rasio Gini cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017, meskipun peningkatan relatif kecil. Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh BPS pada September 2017, Rasio Gini bulan September 2017 tercatat sebesar 0,440. Indeks ini mengalami peningkatan dibandingkan Maret 2017 yang tercatat sebesar 0,432.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik, ketimpangan pendapatan di DIY dari waktu ke waktu yang ditunjukkan oleh Rasio Gini dapat terlihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Berita Resmi Statistik BPS, September 2017

Gambar 3-15 Perkembangan Rasio Gini Menurut Daerah Tempat Tinggal

Secara umum, Rasio Gini di DIY mengalami peningkatan khususnya dari bulan September 2015 hingga bulan September 2017. Penurunan Rasio Gini sempat terjadi pada periode September 2014 hingga September 2015. Rasio Gini di perdesaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan Rasio Gini di perkotaan. Meskipun demikian, Rasio Gini di perdesaan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun dari bulan Maret 2014 hingga bulan September 2017, yaitu dari 0,299 menjadi 0,317.

Jika dilihat dari distribusi pengeluaran per kelompok penduduk, maka distribusi per kelompok dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3-9 Distribusi Pengeluaran di DIY Per Kelompok Penduduk September 2016 – September 2017

Daerah	Periode	Kelompok Penduduk		
		40% Berpengeluaran Rendah	40% Berpengeluaran Menengah	20% Berpengeluaran Tinggi
Perkotaan	September 2016	15,09	36,74	48,18
	Maret 2017	14,23	36,87	48,90
	September 2017	14,14	35,29	50,57
Perdesaan	September 2016	19,78	37,71	42,51
	Maret 2017	19,96	38,09	41,95
	September 2017	19,12	42,23	38,64
Perkotaan dan Perdesaan	September 2016	15,33	35,67	49,00
	Maret 2017	14,96	34,92	50,12
	September 2017	14,85	34,19	50,96

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS, September 2017

Dari tabel distribusi pengeluaran per kelompok penduduk di atas, sekitar separuh dari total pengeluaran penduduk di DIY berasal dari kelompok 20% penduduk berpengeluaran tertinggi. Kondisi ini terlihat baik di perkotaan maupun perdesaan, meskipun di perdesaan proporsinya relatif lebih rendah. Dalam kurun waktu 1 tahun dapat terlihat bahwa proporsi pendapatan kelompok penduduk 40% berpengeluaran rendah menurun. Di perkotaan, proporsi pengeluaran penduduk kelompok tersebut pada September 2016 adalah sebesar 15,09%, kemudian turun menjadi 14,23% pada Maret 2017, dan turun lagi menjadi 14,14% pada September 2017. Hal ini juga terlihat di wilayah perdesaan di mana proporsi pengeluaran pada September 2016 adalah sebesar 19,78%, dan kemudian turun menjadi 19,12% pada September 2017. Secara umum di DIY, proporsi pengeluaran kelompok penduduk 40% berpengeluaran rendah menurun dari 15,33% pada September 2016 menjadi 14,85% pada September 2017. Data tersebut dapat menjelaskan bahwa kemampuan perekonomian penduduk pada kelompok tersebut cenderung menurun dari waktu ke waktu. Di sisi lain, pada kelompok penduduk 20% berpengeluaran

tinggi, proporsi pengeluaran cenderung menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.

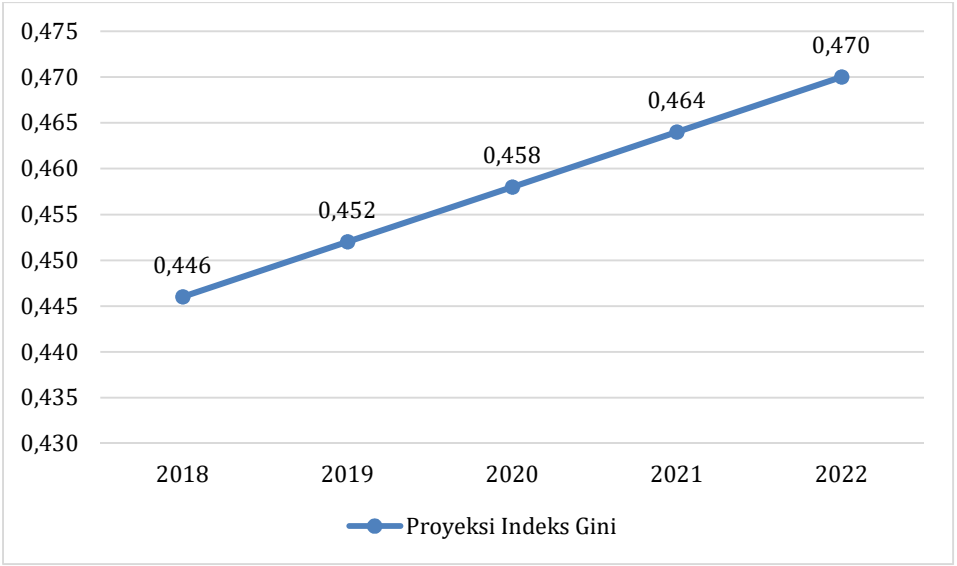
Distribusi pengeluaran berdasarkan kelompok pengeluaran di tiap kabupaten/kota tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3-10 Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk per Kelompok Pengeluaran Tahun 2014-2016 di Kabupaten/Kota di DIY

Kabupaten/ kota	2014			2015			2016		
	40% rendah	40% menengah	20% tinggi	40% rendah	40% menengah	20% tinggi	40% rendah	40% menengah	20% tinggi
Kulon Progo	18,92	34,29	46,78	18,03	36,00	45,98	17,87	37,43	44,69
Bantul	21,34	37,55	41,11	16,76	36,12	47,12	16,22	38,06	45,72
Gunungkidul	22,71	37,29	40,00	20,01	36,11	43,88	19,76	39,16	41,07
Sleman	16,53	35,30	48,17	14,21	34,31	51,48	15,51	39,80	44,69
Yogyakarta	17,01	36,10	46,90	14,60	37,56	47,84	12,94	39,90	47,16

Sumber : Analisis Ketimpangan DIY 2016

Nilai indeks gini di DIY diproyeksikan mengalami kenaikan hingga tahun 2022. Proyeksi nilai indeks gini dari tahun 2017 hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut.



Sumber : Analisis Makroekonomi DIY, BSD Bappeda DIY 2018

Gambar 3-16 Proyeksi Indeks Gini Tahun 2017 - 2022

Proyeksi nilai indeks gini pada tahun 2017 adalah sebesar 0,4435. Nilai ini mendekati nilai Rasio Gini yang riil di DIY pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,44, sehingga dapat diasumsikan bahwa proyeksi nilai indeks gini pada tahun-tahun berikutnya tidak akan jauh berbeda dengan nilai riil nya.

Jika dilihat dari proyeksi indeks gini yang masih akan mengalami peningkatan selama 5 tahun ke depan, maka kebijakan makroekonomi di DIY harus diarahkan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Permasalahan ketimpangan pendapatan dapat bersumber dari perbedaan tingkat pendidikan pada kelompok masyarakat, yang mengakibatkan pendapatan pasca pendidikan juga mengalami perbedaan.

Pada tabel berikut, dapat dilihat persentase penduduk yang bekerja di masing-masing lapangan usaha berdasarkan desil pengeluaran di tahun 2016.

Tabel 3-11 Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha dan Desil Kelompok Pengeluaran DIY Tahun 2016

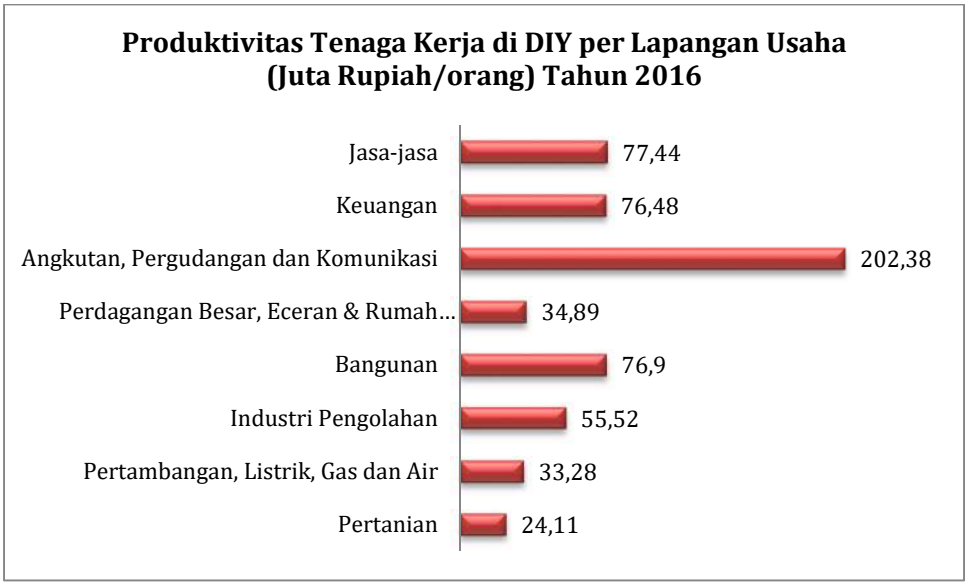
Lapangan Usaha	Kelompok Pengeluaran									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertanian	51,80	40,68	28,41	33,48	21,50	30,83	25,19	12,72	10,89	5,85
Pertambangan dan penggalian	1,27	1,45	1,51	0,73	0,64	0,58	0,67	1,41	0,93	1,49
Industri pengolahan	10,06	15,26	12,30	10,08	15,51	12,98	13,27	10,90	7,63	5,66
Listrik dan gas	0,19	0,18	0,90	0,00	1,14	0,34	0,52	0,19	0,90	0,30
Konstruksi/ bangunan	9,60	9,22	9,20	9,75	9,20	4,55	8,92	4,66	4,42	3,81
Perdagangan, hotel dan rumah makan	17,27	17,18	25,03	27,98	25,84	25,86	25,70	33,03	28,19	28,26
Transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi	0,34	2,29	2,59	2,10	5,04	3,93	3,07	4,54	3,87	4,08
Keuangan dan asuransi	0,42	0,17	0,64	0,65	0,42	1,29	0,76	1,03	2,68	4,45
Jasa lainnya	9,05	13,57	19,42	15,23	20,72	19,64	21,91	31,52	40,49	46,11

Sumber : Analisis Ketimpangan DIY 2016

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa penduduk pada desil kelompok pengeluaran bawah lebih banyak bekerja pada lapangan usaha pertanian, sedangkan kelompok penduduk pada desil atas lebih banyak bekerja pada sektor jasa. Pada desil 1, 2, 3, 4 dan 6, proporsi penduduk paling banyak terkonsentrasi di sektor pertanian dengan persentase 30,83% hingga 51,80%. Pada desil 5, 7,

dan 8, proporsi terbesar adalah pada sektor perdagangan, hotel dan rumah makan dengan persentase sebesar 25,84%; 25,70%; dan 33,03%. Pada desil 9 dan 10, persentase terbesar adalah pada sektor jasa lainnya yaitu sebesar 40,49% dan 46,11%.

Jika persentase penduduk yang bekerja pada masing-masing sektor lapangan usaha dihubungkan dengan PDRB yang dihasilkan oleh sektor tersebut, maka dapat terlihat produktivitas per tenaga kerja pada masing-masing lapangan usaha. Produktivitas tenaga kerja per lapangan usaha dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : Analisis Ketimpangan DIY 2016

Gambar 3-17 Produktivitas Tenaga Kerja per Lapangan Usaha (Juta Rupiah/Orang) Tahun 2016

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sektor pertanian memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang paling rendah yaitu sebesar 24,11 juta rupiah per orang, sedangkan produktivitas tenaga kerja yang paling tinggi ada pada sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi yaitu sebesar 202,38 juta per orang. Rendahnya produktivitas sektor pertanian disebabkan karena tingginya konsentrasi tenaga kerja pada sektor ini, sementara PDRB yang dihasilkan masih relatif rendah. Dengan kondisi ini, maka pemerintah dapat melakukan intervensi kebijakan melalui peningkatan produktivitas sektor

pertanian atau pengalihan tenaga kerja dari sektor ini menuju sektor lain yang lebih produktif, seperti komunikasi, jasa dan keuangan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Prediksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3-12 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2017-2019

URAIAN	TAHUN		
	2017	2018	2019
PENDAPATAN	**4.988.379.317.714,63**	**5.182.969.634.011,63**	**6.282.431.150.970,28**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.657.147.882.128,63**	**1.734.005.738.164,63**	**1.921.526.631.490,28**
Pendapatan Pajak Daerah	1.437.942.970.424,00	1.525.970.677.535,00	1.693.249.366.202,43
Pendapatan Retribusi Daerah	38.797.469.715,00	37.471.040.290,00	36.693.669.375,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	59.711.579.867,44	75.639.486.244,44	85.874.687.657,66
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	120.695.862.122,19	94.924.534.095,19	105.708.908.255,19
DANA PERIMBANGAN	**2.461.741.043.739,00**	**2.396.221.853.000,00**	**2.280.283.780.480,00**
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	132.300.017.047,00	135.665.957.000,00	103.244.089.600,00
Dana Alokasi Umum	1.380.356.647.692,00	1.314.372.147.000,00	1.314.372.147.000,00
Dana Alokasi Khusus	949.084.379.000,00	946.183.749.000,00	862.667.543.880,00
- DAK Fisik	-	-	-
- DAK Non Fisik	949.084.379.000.00	946.183.749.000,00	862.667.543.880,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	**869.490.391.847.00**	**1.052.742.042.847,00**	**2.080.620.739.000,00**
Pendapatan Hibah	14.827.192.847.00	14.827.192.847,00	8.515.100.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	853.998.349.000.00	1.037.250.000.000,00	2.071.440.789.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	664.850.000.00	664.850.000,00	664.850.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	**4.988.379.317.714,63**	**5.182.969.634.011,63**	**6.282.431.150.970,28**
BELANJA	**5.200.386.011.001,43**	**5.544.331.777.406,00**	**6.434.667.657.880,00**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**2.779.012.765.965,93**	**2.714.312.157.554,00**	**2.127.348.409.880,00**
Belanja Pegawai	1.316.547.064.995,93	1.335.096.081.593,00	1.393.767.194.747,00
Belanja Bunga	-		-
Belanja Subsidi	-		-

U R A I A N	TAHUN		
	2017	2018	2019
Belanja Hibah	719.522.034.000,00	641.512.530.000,00	25.700.000.000,00
Belanja Bansos	2.091.000.000,00	850.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	601.307.079.296,80	634.100.706.274,50	696.881.215.133,00
Bantuan Keuangan	114.625.862.931,00	83.017.072.931,00	-
Belanja Tidak Terduga	24.919.724.742,20	19.735.766.755,50	10.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	**2.421.373.245.035,50**	**2.830.019.619.852,00**	**4.307.319.248.000,00**
Belanja Pegawai	185.780.385.232,00	243.860.678.985,00	
Belanja Barang dan Jasa	1.195.029.682.728,00	1.400.423.089.110,00	
Belanja Modal	1.040.563.177.075,50	1.185.735.851.757,00	
JUMLAH BELANJA	**5.200.386.011.001,43**	**5.544.331.777.406,00**	**6.434.667.657.880,00**
SURPLUS/(DEFISIT)	**(212.006.693.286,80)**	**(361.362.143.394,37)**	**(152.236.506.909,72)**
PEMBIAYAAN	**212.006.693.286,80**	**361.362.143.394,37**	**152.236.506.909,72**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**216.006.693.286,80**	**383.362.143.394,37**	366.676.506.909,72
SILPA	216.006.693.286,80	383.362.143.394,37	366.676.506.909,72
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Hasil Penjualan	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana	-	-	-
Penerimaan dari Penyusutan	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**216.006.693.286,80**	**383.362.143.394,37**	**366.676.506.909,72**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**4.000.000.000,00**	**22.000.000.000,00**	**214.440.000.000,00**

URAIAN	TAHUN		
	2017	2018	2019
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
Penyertaan Modal	4.000.000.000,00	22.000.000.000,00	210.440.000.000,00
Pembayaran Hutang	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	4.000.000.000,00
DPAL	-	-	-
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**4.000.000.000,00**	**22.000.000.000,00**	**214.440.000.000,00**
PEMBIAYAAN NETTO	**212.006.693.286,80**	**361.362.143.394,37**	**152.236.506.909,72**
SILPA TAHUN BERKENAAN	**-**	**-**	**-**

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah DIY, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi

daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD DIY.

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD DIY, penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok merupakan sumber pendapatan primadona bagi DIY. Mengingat dampak pajak yang signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain:

(1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
(2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi
(3) Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
(4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
(5) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
(6) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
(7) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
(8) Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
(9) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
    a) meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
    b) meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: Peningkatan kapasitas *sistem on line* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat

keliling, peningkatanefektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak.

c) meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah.
e) membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment* (*e-payment*) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face* dengan fiscus.
f) Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

   a. Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

      1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah *(Budgetary)*

      2) Sebagai alat pengatur *(Regulatory)*

      Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

      Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

   b. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa

dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut.

Jenis retribusi dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa–jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokan sebagai berikut:

1) Retribusi yang dikenakan jasa umum
2) Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
3) Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu

Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri menjadi kewenangan propinsi/kabupaten kota. Retribusi yang menjadi kewenangan propinsi yaitu:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

2. Dana Perimbangan, terdiri dari:

a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah

Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.

b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

   a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.

   b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 56% hingga 58% pada tahun 2017-2019. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2019 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

3.2.2.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
2) Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah

3) Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.
4) Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti bus samsat kelililng dan sistem *online* kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi STS *online* berbasis *accrual* pada SIPKD untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah
5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak
6) Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan *reward* and *punishment*
7) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat
8) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah
9) Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak

3.2.2.2 Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pada tahun 2016 terjadi perubahan postur transfer ke daerah dan dana desa. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3-13 Perubahan Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa

2015	2016
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
I. TRANSFER KE DAERAH	I. TRANSFER KE DAERAH
A. Dana Perimbangan	A. Dana Perimbangan
1. Dana Bagi Hasil	1. Dana Transfer Umum (*General Purpose Grand*)
2. Dana Alokasi Umum	a. Dana Bagi Hasil
3. Dana Alokasi Khusus	b. Dana Alokasi Umum
B. Dana Otonomi Khusus	2. Dana Alokasi Khusus (*Specific Purpose Grand*)
C. Dana Keistimewaan Yogyakarta	a. Dana Otonomi Khusus Fisik
D. Dana Transfer lainnya	b. Dana Alokasi Khusus Non-Fisik
	B. Dana Insentif Daerah
	C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan
II. DANA DESA	II. DANA DESA

Sumber: Kemenkeu. 2016

Adapun yang menjadi dasar adanya perubahan kebijakan peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa adalah beberapa hal di bawah ini:

1. Perlunya memperkuat ciri Indonesia sebagai negara Desentralisasi Fiskal.
2. Adanya kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah diserahkan dari Pusat ke Daerah (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Perlunya peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung implementasi Nawacita. Yaitu cita:
   a. Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI;
   b. Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
   c. Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
   d. Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik.
4. Adanya UU Desa yang telah memberikan kewenangan dan sumber keuangan kepada desa antara lain berupa Dana Desa dari APBN.

Pemerintah pusat juga melakukan reformulasi kebijakan DTU untuk Dana Alokasi Umum. Baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

1. Jangka Pendek
   a. Perbaikan Formula khususnya perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan di Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
   b. Perbaikan transparansi perhitungan DAU dengan mempertimbangkan bobot variabel dalam jangka menengah (tidak berubah tiap tahun).
   c. Masa transisi penerapan revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. (dengan menghilangkan AD) → bobot atau peranan AD secara bertahap terus dikurangi sehingga jika perubahan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disepakati untuk menghilangkan AD maka formula baru akan lebih mudah dirancang tanpa AD.
2. Jangka Menengah
   Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa formulasi DAU diubah dengan menghilangkan AD dan menerapkan konsep Celah Fiskal.
3. Jangka Panjang
   a. Formula DAU berdasarkan *cluster*. Misalnya berdasarkan kepadatan penduduk untuk Kab./Kota atau luas wilayah untuk Kabupaten dan jumlah penduduk untuk Kota.
   b. Kebutuhan daerah diukur dari kebutuhan riil daerah yang dikaitkan dengan kinerjanya dari estimasi menurut fungsi dan cakupan pelayanan.
   c. Pengukuran Kapasitas Fiskal menggunakan varibel potensi berdasarkan rasio agregat (PAD + DBH Pajak) dan DBH SDA dengan basis terkait (*averageeffective taxes/revenue rate*)

Selain itu juga dilakukan reformulasi kebijakan DTU yang mencakup Dana Bagi Hasil. Adapun reformulasi yang dilakukan adalah:

1. Memperbaiki cakupan DBH melalui: (a). menghapus DBH PBB P2 karena telah menjadi pajak daerah dan DBH SDA Perikanan karena akan dijadikan sebagai pungutan daerah (retribusi daerah). Dan (b). Menambah cakupan DBH PBB termasuk PBB sektor lainnya diluar sektor pertambangan. Perkebunan. Dan perhutanan.
2. Memperbaiki porsi pembagian DBH kepada daerah penghasil berdasarkan prinsip *by origin*.

3. Memperbaiki pola penyaluran DBH untuk memberi kepastian bagi penerimaan kas daerah.

Dana Alokasi Khusus juga mengalami reformulasi. Dimana ini ditujukan untuk:
1. Memperbaiki ruang lingkup DAK hingga mencakup DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
2. Meningkatkan anggaran DAK. Termasuk dari pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK.
3. Mempertajam fokus DAK Fisik untuk mendanai bidang/sub bidang infrastruktur publik dan sarana/prasarana pelayanan dasar berdasarkan prioritas nasional dan kewilayahan (daerah perbatasan. Tertinggal. Dan kepulauan).
4. Melakukan revolusi sistem pengalokasian DAK dari semula bersifat top down menjadi bottom up untuk mengakomodasi kebutuhan daerah guna memenuhi pencapaian standar pelayanan nasional. Serta
5. Tidak ada kewajiban menyediakan dana pendamping DAK.

Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan dana yang dialokasikan kepada Provinsi. Kabupaten. Dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja juga mengalami reformulasi. Tujuan dari DID adalah memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam beberapa bidang. Yaitu (i) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan daerah (termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). (ii) Pelayanan Dasar Publik. Serta (iii) Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). Reformulasi yang dilakukan meliputi anggaran. Dimana pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah. Kinerja pelayanan dasar. Dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah. Selain itu. Reformulasi juga dilakukan terhadap penggunaan dana yang tidak terikat pada fungsi pendidikan saja.

Perubahan mendasar yang lain adalah adanya peningkatan Anggaran Dana Desa. Adapun dasar kebijakan tersebut adalah:
1. Mempercepat perwujudan kesejahteraan umum masyarakat desa melalui peningkatkan pelayanan publik desa dan peningkatan

perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 72 ayat (2) dan Penjelasannya: Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Pasal 30 A ayat (1): Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap. Yang dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah;
   b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah; dan
   c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam jangka waktu 2011 – 2015 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 166.7 persen per tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya Dana Keistimewaan yang berlaku sejak tahun 2013 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Dana Keistimewaan untuk dialokasikan pada empat urusan keistimewaan yakni Kelembagaan. Kebudayaan. Pertanahan dan Tata Ruang. Selama tiga tahun pelaksanaan. Dana Keistimewaan mengalami kenaikan signifikan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 86 persen per tahun.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Hibah. Dana Darurat. DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya. Dana Penyesuaian dan Otsus. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya. Serta Lain-Lain. Untuk DIY selama 2009-2016 hanya ada 2 sumber yang termasuk dalam kelompok ini. Yaitu Hibah dan Dana Penyesuaian dan Otsus. Persentase Dana Penyesuaian dan Otsus terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2009 hanya sebesar 40 persen. Namun sejak tahun 2012 secara signifikan. Rata-rata menjadi sekitar 98 persen.

Tabel 3-14 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY 2012-2017 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Hibah	Dana Darurat	DHB Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	Dana Penyesuaian dan Otsus	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	Lain-lain
2012	284,778	5,496	-	-	279,282	-	-
2013	311,575	8,815	-	-	302,759	-	-
2014	827,838	9,177	-	-	818,662	-	-
2015	924,194	9,015	-	-	915,178	-	-
2016	599,117	10,956	-	-	588,161	-	-
2017	869,490	14,827	-	-	853,998	664,850	-

Sumber: DPPKA DIY. 2017

Dana keistimewaan DIY digunakan supaya Pemerintah Daerah DIY menyediakan lebih banyak jasa publik yang terkait dengan tata ruang, pertanahan, kebudayaan, dan kelembagaan, seperti yang disyaratkan oleh efisiensi. Dana ini bersifat *lumpsum* yang besarannya tidak berubah ketika pengeluaran maupun penerimaan pajak daerah berubah.

Survei media menunjukkan bahwa publik beropini agar peruntukan terbesar dari dana tersebut dialokasikan untuk sektor kebudayaan. Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan sekitar 90 persen dari dana keistimewaan ini untuk sektor kebudayaan. SKPD-SKPD terlibat dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi penggunaan dana keistimewaan.

Dana keistimewaan DIY berbeda dengan dana otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dana otsus untuk Provinsi Papua dan NAD merupakan tanggapan Pemerintah Pusat atas tekanan yang terjadi seputar pembagian penerimaan dari sumber daya alam. Otsus memberikan 70 persen penerimaan sumber daya alam kepada masing-masing Provinsi Papua dan NAD. Tambahan penerimaan dari migas diterima langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua dan NAD yang bertanggungjawab akan alokasi dana kepada seluruh Kabupatan dan Kota dengan menggunakan formulanya sendiri. *Revenue sharing* ini digunakan

sebagai piranti untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal dan untuk mengatasi isu politik. Dana keistimewaan DIY sama sekali tidak berkaitan dengan *revenue sharing* dari sumber daya alam dan tidak bernuansa asertif secara politis sehingga besarannya juga tidak sebesar dana otsus untuk Provinsi Papua dan NAD. Dana ini juga berbeda dari dana transfer khusus seperti DAK. Dana Alokasi Khusus merupakan piranti Pemerintah Pusat agar pemerintah daerah dapat melangsungkan pengeluaran pemerintah yang menjadi prioritas nasional seperti pengeluaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Dana keistimewaan DIY bersifat historis dan lebih mencerminkan preferensi masyarakat lokal serta lebih bersifat *bottom-up*. Selain itu, dana keistimewaan DIY tidak berpagu dan tidak berjangka waktu. Pemerintah Daerah DIY juga diberi kewenangan untuk mendefinisikan sendiri penggunaan dana keistimewaannya dan menuangkannya dalam Perdais.

Dana keistimewaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah DIY termasuk dalam kategori *non-matching grants*. Pemerintah Pusat memberikan sejumlah Rupiah tertentu dengan persyaratan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk mendukung keistimewaan DIY. Sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2012 pasal 42 ayat 1 dan 2, Pemerintah menyediakan pendanaan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan Kemampuan Keuangan Negara. Dengan demikian Pemerintah Daerah DIY memiliki daya beli yang lebih tinggi untuk mengonsumsi sektor pariwisata, budaya, pertanahan, tata ruang, dan kelembagaan sebesar besarnya dana keistimewaan tersebut. Namun, diduga peningkatan konsumsi di bidang-bidang tersebut tidak akan sebesar jumlah dana keistimewaan yang diberikan karena Pemerintah Daerah DIY, sesuai dengan stipulasi dana keistimewaan, mengalokasikan seluruh dana keistimewaan di bidang-bidang yang telah ditentukan, tetapi, Pemerintah Daerah DIY dapat mengurangi alokasi anggarannya sendiri (yang berasal dari PAD) untuk bidang-bidang yang telah disokong pendanaannya oleh dana keistimewaan. Apabila Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah Daerah DIY untuk meningkatkan konsumsinya di bidang-bidang yang mendukung keistimewaan DIY sebesar jumlah dana keistimewaan yang diberikan, Pemerintah Daerah DIY dapat bereaksi dengan tidak memenuhi sepenuhnya harapan tersebut dengan jalan menurunkan alokasi anggarannya sendiri. Supaya implementasi danais lebih efisien, perlu dilakukan dialog lebih intensif antara masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi supaya lebih

menjamin tercapainya preferensi masyarakat DIY, khususnya dialog mengenai prioritas pembangunan di bidang pariwisata dan budaya. Dialog ini akan mengisi *gap* perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DIY tentang alokasi belanja di bidang pariwisata dan budaya. Alokasi anggaran di bidang pariwisata dan budaya dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi *overlap* antara dana dekon dengan dana keistimewaan.

Selama 2012 – 2016, Pendapatan Hibah memiliki kecenderungan untuk meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 16,76 persen per tahun. Pendapatan Hibah berasal dari hibah badan/lembaga/organisasi/swasta dalam negeri dan hibah dari luar negeri.

Permasalahan dalam Pendapatan Daerah yang diidentifikasi dari Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi; Dana Perimbangan yang lebih bersifat *given* (terberikan) dari Pemerintah Pusat; Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat; Kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam mengelola objek pendapatan daerah; Monitoring dan pengawasan pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah yang kurang intensif; Banyaknya aset/barang milik daerah kewenangan SKPD berpendapatan dalam kondisi kurang terawat; Kurangnya apresiasi SKPD berpendapatan tentang upaya mencari strategi dalam memberdayakan barang milik daerah atau kewenangan yang dimilikinya, sehingga kecenderungan dalam penetapan tarif dan target pendapatan terlalu rendah.

Di masa mendatang, arah kebijakan penggunaan Dana Keistimewaan DIY adalah untuk: (i) Meningkatkan kualitas perencanaan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta; (ii) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (iii) Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah; dan (iv) Mewujudkan ketepatan penggunaan dana keistimewaan DI Yogyakarta dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.

Adapun kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang dimiliki DIY adalah dalam hal;(i) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan; (iii) Kebudayaan; (iv) Pertanahan; dan (v) Tata Ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan

Keistimewaan diatur dengan Perda Istimewa (Perdais) yang dibentuk oleh Gubernur dan DPRD DIY.

Penyelesaian Perdais untuk masing-masing urusan Keistimewaan perlu diprioritaskan karena akan menjadi acuan dalam menyusun kegiatan urusan Keistimewaan, selain RKPD dan RPJMD.

Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY didasarkan pada PMK 173/PMK.07/2017, dimana pengalokasian DK DIY diajukan oleh Pemerintah Daerah DIY, dibahas dengan kementerian/lembaga terkait, dan kemudian dianggarkan dan ditetapkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

Ke depan Pemerintah Daerah DIY harus mempertimbangkan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Seperti diketahui bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah maka pemerintah pusat melalukan perubahan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa. Perubahan tersebut mencakup:

- Perubahan struktur dan cakupan transfer ke daerah dan dana desa.
- Peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa.
- Reformulasi kebijakan transfer ke daerah, meliputi Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), dan Dana Insentif Daerah (DID).
- Kebijakan Dana Desa.
- Kebijakan Dana Keistimewaan DIY

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi. Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Tidak langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.

3) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan

urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

4) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

5) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.

6) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

7) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

1) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuik digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

   Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Tematik pembangunan tahun 2019 terdiri dari penanggulangan kemiskinan, ketimpangan wilayah, pembiayaan pembangunan dan pembangunan bandara NYIA.

c. Tolok ukur dan target kinerja

   Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

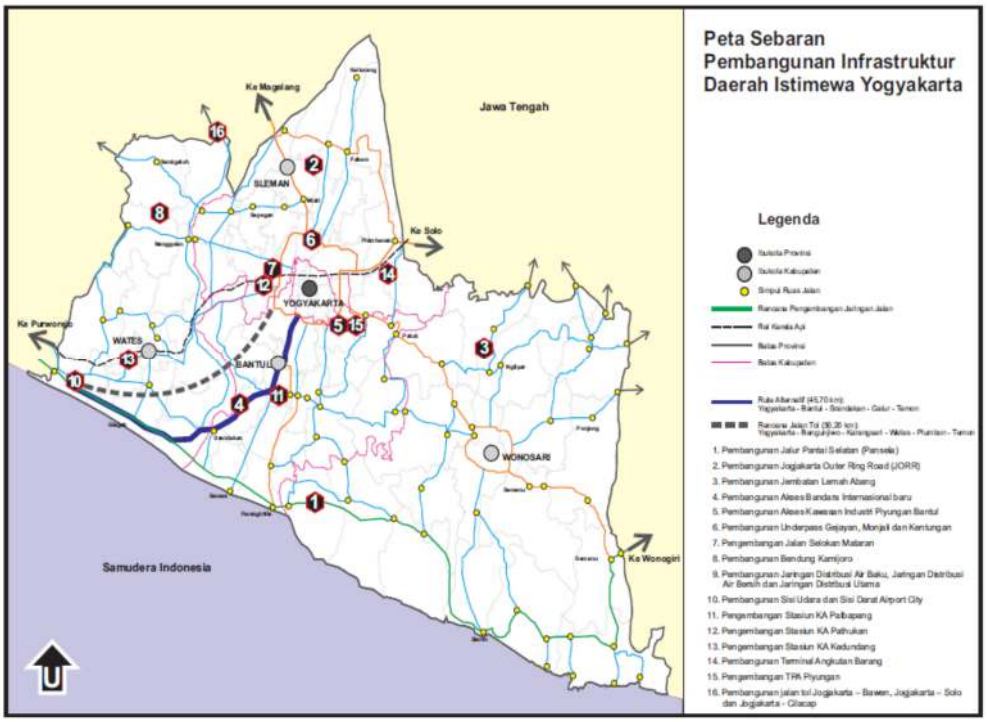
Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada

masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

3.2.5 Strategi Keuangan Daerah

Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019, maka perlu diperhatikan fokus pembangunan yang mengarah pada aspek infrastruktur sebagai bagian fokus pembangunan yang membutuhkan pendanaan cukup besar. Hal tersebut menjadi penting mengingat terdapat beberapa mega proyek infrastruktur yang akan dibangun dan dikembangkan pada Tahun 2017-2022 sebagai keberlanjutan implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah pada Tahun 2012-2017. Pada tahun 2019 prioritas pembangunan infrastruktur antara lain: Pembangunan Bandar Udara NYIA, Tindaklanjut Pembangunan Tanjung Adikarto, Penyelesaian Jalur PANSELA, Pengembangan Transportasi Umum Massal (Kereta Api Pendukung Bandara DED dilaksanakan di tahun 2019 dan fisik pada tahun 2020), Pengembangan *Bus Rapid Transit*, dan lain sebagainya.



Sumber: Dokumen Kajian Penyusunan Analisis Dampak Pembangunan Insfrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi DIY, BSD Bappeda DIY

Gambar 3-18 Peta Sebaran Pembangunan Infrastruktur DIY

Dalam rangka pembiayaan pembangunan terdapat dua strategi, yaitu:(1) PPP Konvensional dan (2) Aliansi Strategis. Sementara itu proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembiayaan sektor swasta (*Private Financing Initiatives*, PFI), termasuk proyek-proyek khusus yang bersifat *unsolicited* dan tidak memerlukan lelang kompetitif. Namun pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan SDM kita masih langka dalam mempersiapkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proses dan prosedur PPP yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Pembangunan proyek-proyek PPP hampir selalu berkaitan dengan pembiayaan proyek modern (*Modern Project Financing*). Proyek skala besar membutuhkan *Equity Financing*, *Debt Financing* yang canggih, dan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, *investment fund*, *bond*, dan rekayasa finansial lainnya).

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi yang dapat digunakan di DIY adalah sebagai berikut:

1. **Investasi Pemerintah**. Pemerintah dalam melakukan investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD; DAU, DAK, dan Dana Daerah; Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor.
2. **Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)**. Skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan transportasi. Skema KPS difokuskan untuk pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur transportasi yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marjinal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk *government support*. Skema KPS juga dapat digabung dengan optimasi penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk mendanai prasarana dasar.
3. Investasi Swasta. Pihak swasta dapat terlibat secara langsung berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, yaitu dapat melalui proyek KPS dengan skema *unsolicited, special purpose* ataupun *melalui* pemanfaatan hak kompensasi. Tentunya, proyek-proyek yang diminati oleh

pihak swasta adalah sektor-sektor transportasi yang sudah bersifat komersial yang memiliki nilai kelayakan secara finansial.

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Gubernur DIY) dalam paparan visi dan misi pada tanggal 2 Agustus 2017 sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 menyampaikan visi ***"Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja,"*** dan misi ***Panca Mulia*** yakni:

a. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
b. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
c. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
d. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
e. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017–2022 yakni memanfaatkan momentum

Abad Samudera Hindia untuk meningkatkan pemanfaatan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Tema visi ***Abad Samudera Hindia*** tersebut dilandasi dengan aspek kesejarahan, fenomena-fenomena *Indian Ocean Rim Association* (IORA), *Kra-Canal/ Thai Canal Project* serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan. Angka kemiskinan menunjukkan Kabupaten di Selatan DIY memiliki angka kemiskinan Gunungkidul (20,83 %), Kulon Progo(20,64 %) dan Bantul (15,89 %) yang relatif tinggi dibanding wilayah utara seperti Sleman (9,50 %) dan Yogyakarta (8,67 %); dimana angka kemiskinan DIY 12,36% (2017) lebih tinggi dari Nasional (10,96%) atau sekitar 488 ribu jiwa (BPS DIY, 2017). Selain itu terdapat ketimpangan antar wilayah dimana PDRB Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menguasai 60% total PDRB DIY, sementara itu Kulon Progo dan Gunungkidul yang mencakup 65 persen dari luas wilayah DIY, hanya memiliki pangsa distribusi ekonomi sekitar 21%. Dua wilayah ini letaknya jauh dari pusat kota Yogyakarta dan belum adanya pusat kegiatan ekonomi yang besar di wilayah tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih lambat. Berkenaan dengan potensi kelautan kawasan selatan sebagai pengungkit kesejahteraan dapat dideskripsikan pontnsi sebagai berikut

a. Perikanan tangkap laut, dimana terdapat nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun.
b. Ekosistem terumbu karang pada 7 lokasi di Kabupaten Gunungkidul
c. Ekosistem Mangrove seluas 61 Ha (2012) yang menjadi habitat berbagai satwa dan biota perairan.
d. Ekosistem Gumuk Pasir tipe Barkhan di pesisir Parangtritis
e. Pariwisata di pesisir dan pulau-pulau kecil di DIY sejumlah 70 wisata pantai di DIY. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wediombo-Sadeng dan sekitarnya.
f. Potensi energi baru terbarukan di kawasan pesisir antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) mencapai 763,6 Kw, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 4,5kWh/m2, serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar 4-5 m/s.

Adapun tema misi ***"Panca Mulia"*** tersebut di atas, manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan subtansi penting dari visi Gubernur DIY 2017-2022 yang mengambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di wilayah Yogyakarta dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di wilayah Yogyakarta yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja meniscayakan perlunya kemantapan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai *"Trilogi SDM-DIY"*. *Etos* menyandang pesan perubahan persepsi (*mind set)* dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban". Karya Peradaban yang dimaksudkan adalah bahwa birokrasi tidak hanya menjalankan fungsinya sebagaimana adanya, namun mempunyai rasa memiliki atas apa yang dilaksanakan. Menjalankan fungsinya merupakan bagian dari pengembangan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Merubah mind set dari *business as usual* menjadi sebuah karya yang mempunyai dampak pada peningkatan layanan kepada masyarakat, penciptaan inovasi yang berguna untuk birokrasi dan pembangunan serta pengembangan kemampuan diri atas potensi yang dimiliki.

Etika, menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. *Kualitas*, menyandang pesan adanya pergeseran *mind set,* bahwa karya birokrasi

bukanlah dipersepsikan hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain diluar DIY (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi".

Berangkat dari uraian diatas Tema Visi "*Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"* kemudian dirumuskan Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya dengan visi **"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"**

Visi politis tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang tergambarkan dalam misi untuk memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. memajukan daerah;
c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
d. menyelesaikan persoalan daerah;
e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan
f. provinsi dengan nasional; dan
g. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Sehingga *Panca Mulia* dari Visi Gubernur DIY telah diejawantahkan dalam dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut :

a. ***Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban.*** Rumusan ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek :
    1. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan
3. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson).
4. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

b. ***Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;*** *Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja* yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan,
   1. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
   2. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS.

Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan akan mempresentasikan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukanuntuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis

daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran akan menjabarkan tujuan dalam bentuk hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional (*specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continously improve* (SMART-C)),

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2017-2022 yang telah dirancang beserta target sebagai berikut :

Tabel 4-1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2017	2022
1.	**Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban**	1. Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka IGI (5,59) (2016) menjadi 6,2 (2022)	1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,73	81,68
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,8	70,32
				1.2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini	0.3988	0.3635
					Persentase Angka Kemiskinan	12,36	7.36
				1.3. Terpeliharа dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	10,98	12,04
				1.4. Meningkatnya aktivitas	Pertumbuhan Ekonomi.	5.21	5.34

Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2017	2022
				perekonomian yang berkelanjutan	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	56.65	66.15
					Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75	82.5
					Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	11.11	54.44
				1.5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson	0.4577	0.4489
2.	**Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;**	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance	Indikator Reformasi Birokrasi dari 73,07 (bb) (2016) menjadi 76 (a) (2022)	1.1 Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP
					Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	A	A
				2.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.	N/A	91,30
				2.3. Meningkatnya Pengelolaa	bidang tanah kasultanan, kadipaten	5.369	21.877

Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"							
No.	**Misi**	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**2017**	**2022**
				n dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan		

4.1.1 Dasar Perumusan Tema RKPD 2019

Didalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini tema pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal tersebut, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD DIY) Tahun 2017-2022. Dokumen RPJMD DIY Tahun 2017-2022 pada saat penyusunan dokumen RKPD 2019 berada dalam proses penyusunan dan tersedia dalam Rancangan RPJMD DIY 2017-2022.

1. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2019

   Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) dan Lima Tahun IV (2020-2025) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah "*pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah*." Sedangkan tahapan Lima Tahun IV (2020-2025) memiliki penekanan untuk "*penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta*

*ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energ*i." RPJPD DIY Tahun 2005-2025 menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode kedua dari RPJMD DIY 2017-2022 yang memasuki masa transisional pada tahun 2017 dan tahun pertama tahun 2018. Dokumen RPJMD DIY 2017-2022 sendiri memiliki peran kritikal dan penting karena berada menjelang berakhirnya tahapan RPJPD DIY 2005-2025 yang hendak mewujudkan Visi Pembangunan berupa "*Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*".

Didalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD DIY 2017-2022.

2. Internalisasi Paradigma Abad Samudra Hindia dalam Visi-Misi Gubernur DIY dengan Tema RKPD Tahun 2019: Kawasan Selatan Sebagai Basis Kewilayahan yang diperhatikan.

   Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 disusun sebagai penjabaran dan pewujudan visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 yaitu *Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja* (RPJMD DIY 2017-2022). Visi tersebut berangkat dari tema pidato Visi Misi Gubernur DIY 2017-2022 "*Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"* dengan misi Panca Mulia[1] untuk mewujudkan kemuliaan martabat

1 Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam "Lima Kemuliaan" atau "Panca Mulia" yakni:
1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3) terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi

tersebut. Dari aspek kewilayahan, tema *Menyongsong Abad Samudera Hindia* tersebut mengindikasikan upaya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih memperhatikan pengembangan wilayah selatan dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.. Harapannya potensi-potensi tersebut dapat menjawab tantangan untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat DIY pada umumnya dan kawasan selatan khususnya.

3. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tema RKPD Tahun 2019.

   Periode RPJMD 2017-2022 berkesinambungan dengan periode RPJMD 2012-2017 dalam upaya untuk mengimplementasikan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lima kewenangan Keistimewaan DIY dalam UU 13 Tahun 2012 tersebut[2], beraras pada tujuan keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU 13 Tahun 2012 yakni: (1) mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Aras keistimewaan merupakan bagian inklusif dari perencanaan pembangunan daerah DIY yang termuat dalam RPJMD DIY 2017-2022 dan akan dijabarkan dalam RKPD Tahun 2019.

4. Internalisasi Tema Rencana Kerja Pemerintah 2019 dengan Tema RKPD DIY tahun 2019

   Rencana Kerja Pemerintah 2019 (RKP 2019) memiliki tema "*Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas.*" Tema Rencana Kerja Pemerintah 2019 tersebut memiliki *mainstreaming/* pengarusutamaan pada isu-isu terkait Revolusi Mental, Kesetaraan gender, lingkungan,

kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2 hal (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; (5) tata ruang. Urusan Keistimewaan tersebut

governance. Adapun prioritas nasional yang mengikuti tema tersebut antara lain:

1) Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar. Prioritas ini memiliki sasaran untuk mencapai Tingkat kemiskinan pada kisaran 7–8 persen; IPM menjadi 71,98 dan gini rasio menjadi 0,36 pada tahun 2019
2) Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif.
4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Kelima prioritas nasional tersebut selaras dengan penjabaran visi RPJMD DIY 2017-2022 "*Terwujudnya Peningkatkan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"* pada tahun pembangunan 2019 antara lain,

a. Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja difokuskan pada Pemberdayaan SDM baik kualitas maupun derajat ekonomi masyarakatnya (*Prioritas Nasional ke-1, dan 3)*.
b. Peningkatan Infrastruktur difokuskan pada infrastruktur layanan dasar yang pendukung pertumbuhan ekonomi (*Prioritas Nasional ke-1, ke-2)*
c. Pertumbuhan ekonomi dicapai melalui sektor-sektor unggulan dan potensial : jasa, dagang, wisata, pertanian dan industri kreatif yang merata (*Prioritas Nasional ke-3)*
d. Pembangunan yang Merata dimaksudkan selaras dan lestari untuk mengurangi ketimpangan wilayah (*Prioritas Nasional ke-2, dan ke-4)*

Penjabaran tersebut kemudian dirumuskan dalam pendekatan tematik yang digunakan oleh Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2019 mendatang ialah sebagai berikut,

a. Mengatasi Ketimpangan Wilayah
b. Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
c. Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan *New Yogyakarta International Airport*

d. Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta

Keempat indikasi tematik perencanaan pembangunan tersebut akan diimplementasikan secara integratif, holistik (lintas sektor) dan sesuai kebutuhan lokasi/ spasial-nya.

Berkenaan dengan tema pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan didalam RPJPD DIY 2005-2025 dan tema indikatif pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sebagai pilihan tema indikatif. Pilihan tema pembangunan yang ada memperhatikan aspek keistimewaan, tema pembangunan nasional dan fokus tematik, sehingga sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut Tema RKPD DIY Tahun 2019 dapat dirumuskan sebagai berikut,

"Pemerataan Pembangunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan"

Tema RKPD DIY 2019 tersebut memiliki pengarusutamaan pada isu-isu sebagai berikut: kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, disparitas dan optimalisasi kawasan selatan (lokus kewilayahan),

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan

   Isu pemerataan pembangunan di DIY terkait dengan adanya kesenjangan antar wilayah (antar kabupaten/kota) maupun antar kelompok pendapatan di provinsi ini. Berangkat dari data yang ada, kabupaten-kabupaten yang berada di selatan DIY memiliki kesenjangan relatif tinggi dibanding wilayah utara dengan melihat dari angka kemiskinan. Angka kemiskinan menunjukkan Kabupaten di Selatan DIY memiliki angka kemiskinan Gunungkidul (20,83 %), Kulon Progo(20,64 %) dan Bantul (15,89 %) yang relatif tinggi dibanding wilayah utara seperti Sleman (9,50 %) dan Yogyakarta (8,67 %). Secara umum angka kemiskinan DIY 13,02% (Maret 2017) lebih tinggi dari Nasional (10,96%) atau sekitar 488 ribu jiwa (BPS DIY, 2017). Sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah perdesaan (16.11 %) daripada jumlah warga miskin di wilayah perkotaan (11.72 %). Sebagian besar Warga miskin di wilayah perdesaan masih terjerat pada persoalan penyediaan pangan berupa pengeluaran untuk pembelian beras (sebesar 33,08 %), sedangkan di

wilayah perkotaan hanya menunjukkan angka sebesar 27,31 %. Selanjutnya dapat digambarkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Index Gini) di DIY tertinggi di Indonesia (0,432; tahun 2016), dimana kesenjangan di perkotaan lebih tinggi (0,435) dibanding perdesaan (0,340).

Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY ini memberikan latar belakang penting lima tahun ke depan (periode RPJMD DIY 2017-2022) untuk memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta. Hal ini selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya."

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan

Pernyataan kunci tentang kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan tersebut dapat ditera dari upaya mewujudkan Panca Mulia sebagaimana diungkap dari Pidato Visi Misi Gubernur DIY. Esensi Panca Mulia mendukung pernyataan kunci ini antara lain dalam mewujudkan (1) peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing, (2)peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan (3) peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan perlu ditunjang dengan terwujudnya aspek ke-4 dan ke-5 Panca Mulia sebagai bukti adanya tata kelola yang baik (*good governance*) dari sektor publik (Pemerintah Daerah). Panca Mulia ke-4 dan ke-5 tersebut dapat dibuktikan menjamin tersedianya (4) tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan (5) perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu,

nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keadilan kesejahteraan masyarakat dapat berpangkal dari kepastian, kualitas, dan integritas dari pelayanan publik yang disediakan segenap unsur pemerintah/ pemerintah daerah. Rasa adil dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat perlu dibuktikan dengan bagaimana sektor publik dalam hal ini pemerintah/pemerintah daerah menyediakan pelayanan dasar, peluang berusaha/ berkegiatan ekonomi yang tumbuh sesuai potensi lokal dan memperhatkan kelestarian alam, jaminan harmoni/ stabilitas sosial politik, serta menjamin tersedianya pelayanan publik yang proporsional dan bebas diskriminasi (Ras, Suku, Agama, kondisi Fisik (Disabilitas, dll)).

4.1.2 RKPD DIY 2019 Menjadi Bagian Integral dari RPJMN 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dimana visi pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019 adalah : *Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royon*g. Lebih lanjut untuk mencapai visi pembangunan nasional disusun pula misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara prinsip antara agenda prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok pembangunan nasional merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 5 (lima) tahunan (2015-2019). Dalam hal ini tentunya prinsip perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut juga menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam konteks perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan maupun perencanaan pembangunan tahunan pada wilayah provinsi yang dalam hal ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada proses penyusunan RKPD DIY 2019, Daerah Istimewa Yogyakarta menginternalisasikan tema pembangunan berikut sasaran prioritas pembangunan dengan sasaran pembangunan nasional, serta agenda pembangunan nasional maupun agenda pembangunan bidang sektoral.

Didalam konteks keselarasan antara Tema RKPD DIY 2019 dengan visi dan misi jangka menengah nasional Tahun 2015-2019. Tema RKPD Tahun 2019 dalam "*Pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan*" berupaya sejalan dengan visi dan misi dan misi jangka menengah nasional 2015-2019. Sedangkan hubungan tema tahunan didalam RKPD Tahun 2019 dengan misi jangka menengah nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4-2 Matrik Tema RKPD DIY 2019 dan Misi RPJMN 2015-2019

No.	Tema RKPD DIY 2019: Pernyataan Kunci	Misi RPJMN 2015-2019
1.	Pemerataan pembangunan	Terkait dengan misi: • Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; a. Karena pemerataan pembangunan akan menjadi upaya mitigasi untuk mencegah gangguan keamanan di DIY dan nasional pada umumnya. Dalam hal ini terutama dalam upaya DIY menurunkan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah • Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; b. Pemerataan pembangunan DIY akan turut memajukan masyarakat RI pada umumnya. Dalam hal ini terutama dalam menjamin peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (yang

No.	Tema RKPD DIY 2019: Pernyataan Kunci	Misi RPJMN 2015-2019
		dibuktikan dengan peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi) • Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; dan • Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; c. Pemerataan pembangunan dengan lokus kawasan selatan di DIY yang memiliki pantai/ pesisir akan memperkuat misi nasional dalam memperkuat diri sebagai negara maritim.
2.	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan	Terkait dengan misi: • Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; d. Pembangunan DIY yang menyejahterakan masyarakatnya akan mewujudkan peningkatan Derajat Kualitas SDM (dengan peningkatan capaian IPM), Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat (penurunan Indeks Gini dan angka kemiskinan) dan peningkatan Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat • Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; e. Misi tersebut akan terkait dengan bagaimana Pembangunan DIY dapat meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan, dimana ekonomi tumbuh (Pertumbuhan ekonomi) dan Kualitas lingkungan hidup tetap terjaga. • Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. f. Pembangunan DIY memperhatikan kewenangan keistimewaan DIY dengan mewujudkan Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan, g. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan dan meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa dalam memperkuat lembaga adat/ kasultanan-kadipaten sesuai ketentuan perundangan.

4.1.3 Penyelarasan Tema Pembangunan RKPD DIY 2019 dengan RKP 2019

Tema Pembangunan RKPD DIY 2019 berupaya selaras dan mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (RKP 2019). Tema RKP 2019 ialah *"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas."* Tema

pembangunan tersebut menyuratkan pemerataan pembangunan nasional dimaksudkan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat (sebesar 5,6% pada *range* 5,4-5,8%) agar berkualitas perlu didukung dengan stabilitas sosial-ekonomi-politik yang sekurangnya dapat dilihat dari tingkat inflasi (3,5 pada *range* 2,5-4,5) dan nilai tukar mata uang yang stabil (Rp.13.600 per US$ pada *range* 13.500 – 13900 per US$). Kualitas pertumbuhan ekonomi nasional akan diuji dengan isu-isu strategis tahun 2019 sebagai berikut,

1. Pentingnya Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan untuk Dipercepat
2. Pelayanan Dasar Penduduk Belum Merata
3. Belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistic nasional dalam menunjang sektor unggulan
4. Belum optimalnya keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi
5. Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing
6. Belum optimalnya pembangunan kota-kota di Kawasan Timur Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
7. Rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan
8. Terbatasnya aksesibilitas Desa dan Kawasan Perdesaan termasuk Kawasan Transmigrasi menuju pusat layanan dasar dan pusat ekonomi
9. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia di Daerah dan Desa dalam Penyediaan Sarana Prasarana konektivitas Antar Desa dan Antar Kawasan Termasuk Kawasan Transmigrasi
10. Belum memadainya sarana dan prasarana system logistic perikanan
11. Belum memadainya kapasitas pengelolaan kawasan perikanan
12. Nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah
13. Nilai tambah dan daya saing produk industri masih rendah.
14. Penciptaan nilai tambah jasa produktif belum optimal.
15. Produktivitas tenaga kerja masih rendah.
16. Pemanfaatan Iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah masih rendah.
17. Peningkatan Kebutuhan Energi
18. Pemantapan Ketahanan Sumber Daya Air
19. Pemantapan Ketahanan Sumber Daya Air

20. Upaya Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
21. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon
22. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
23. Pertahanan Berdaya Gentar
24. Kepastian Hukum
25. Reformasi Birokrasi
26. Kesuksesan Pemilu
27. Netralitas ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilu
28. Efektivitas Diplomasi

Sementara tema dari RKPD DIY 2019 ialah "*Pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.*" Tema RKPD DIY mengambil aspek pemerataan pembangunan sebagai pernyataan pembuka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu penyusun capaian kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berangkat dari kondisi ketimpangan antar wilayah dan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan yang masih menjadi isu tematik penting di DIY dalam periode RPJMD DIY 2017-2022.
Sinergi tema antara RKPD DIY 2019 dan RKP 2019 dapat digambarkan sebagai berikut,



Gambar 4-1 Tema RKP 2019- Tema RKPD DIY 2019 – Tema RKPD Kab/Kota 2019

Tema RKPD DIY 2019 merupakan sub tema dari tema RKP 2019 dengan tautan kata kunci "Pemerataan Pembangunan." Diharapkan penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota di DIY dapat selaras dengan RKP dan RKPD DIY 2019.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

4.2.1 Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional dan DIY

Dalam konteks perencanaan pembangunan tema pembangunan Tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian integral dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 yang dalam hal ini memiliki interkoneksi dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

Cita 1	:	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
Cita 2	:	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
Cita 3	:	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
Cita 4	:	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
Cita 5	:	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
Cita 6	:	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
Cita 7	:	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
Cita 8	:	Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
Cita 9	:	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam menjabarkan Nawacita tersebut pada tahun 2019, Pemerintah memiliki 5 Rancangan Prioritas nasional sebagai berikut:

Tabel 4-3 Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2019

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
1.	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.	a. Percepatan pengurangan Kemiskinan b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat c. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas d. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak
2.	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.	a. Peningkatan Konektivitas b. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika c. Pengembangan Pusat Kegiatan di Wilayah Timur dan Pembangunan Desa d. Pembangunan Daerah Afirmasi e. Pembangunan Konektivitas untuk Mendukung Pembangunan Sektor Unggulan Hulu-Hilir Perikanan
3.	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif.	h. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian i. Percepatan peningkatan Nilai tambah Industri pengolahan j. Peningkatan nilai tambah jasa produktif k. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja l. Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas
4.	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	a. Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi b. Peningkatan produksi akses dan kualitas konsumsi pangan c. Peningkatan kualitas dan Aksesibiltas Sumber Daya Air d. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan e. Pemantapan Regulasi dan Penguatan Kelembagaan Energi, Pangan dan SD Air.
5.	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.	a. Kamtibmas dan Keamanan Siber b. Kesuksesan Pemilu c. Pertahanan Wilayah Nasional d. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi e. Efektivitas Diplomasi

Selain 5 Rancangan Prioritas Nasional tersebut terdapat mainstreaming pada isu Revolusi Mental, Kesetaraan gender, lingkungan*, governance.*

Pada RKPD DIY 2019, prioritas pembangunan daerah di DIY akan melaksanakan sasaran pemerintah daerah dan program pemerintah daerah yang telah tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 4-4 Sasaran dan Program Pemerintah Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target 2019	Program Pemerintah Daerah
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia/ IPM (%)	80,72	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Program Peningkatan Usia Harapan Hidup
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,02	Program Pembangunan Sosial Masyarakat
2	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	1. Indeks GINI	0,3846	Program penangggulangan kemiskinan
		2. Persentase Angka Kemiskinan (%)	9,95	
4	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi (%)	11,68	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda
5	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi.	5,26	1. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)
				2. Program Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah
		2. IKLH(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	60,51	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
		3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	78	Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang

No	Sasaran	Indikator	Target 2019	Program Pemerintah Daerah
		4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	30,42	Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang
6	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	0,4542	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan
7	Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan	1. Opini BPK	WTP	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
		2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	A	
8	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	73,91	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah
9	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	9.419	Program Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

Pendekatan prioritas pembangunan DIY menggunakan arahan tematik sebagai berikut:

1. Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan (Prioritas Nasional ke-1, ke-4)
2. Mengatasi Ketimpangan Wilayah (Prioritas Nasional ke-2, ke-3 dan ke-4)
3. Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan New Yogyakarta International Airport (Prioritas Nasional ke-2 dan 3)

Adapun interkoneksi Prioritas Nasional Tahun 2019 dan tematik pembangunan DIY sebagai berikut.

Tabel 4-5 Interkoneksi Prioritas Nasional dan Tematik Pembangunan DIY

No	Prioritas Nasional	Tematik Pembangunan DIY	Program Pemda
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.	a. Tematik Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan	a. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan b. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup c. Program Pembangunan Sosial Masyarakat d. Program Penanggulangan Kemiskinan
2	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.	a. Tematik Ketimpangan Wilayah b. Tindak Lanjut/ Antisipasi Pembangunan New Yogyakarta International Airport	a. Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang b. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) c. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan d. Program Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif.	a. Tematik Ketimpangan Wilayah b. Tindak Lanjut/ Antisipasi Pembangunan New Yogyakarta International Airport	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	a. Tematik Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan b. Tematik Ketimpangan Wilayah	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Usia Harapan Hidup Program
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah

4.2.2 Interkoneksi Sasaran Pembangunan Nasional dan DIY

Lebih lanjut prioritas pembangunan Tahun 2019 yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 diterjemahkan kemudian didalam sasaran pokok pembangunan. Dalam hal ini sasaran pokok tersebut juga merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yaitu :

1. Sasaran Makro, meliputi dimensi pembangunan manusia dan masyarakat antara lain indeks pembangunan manusia, indeks Gini, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta indikator-indikator terkait.;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi : kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan (melalui meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi : kedaulatan pangan (melalui produksi dalam negeri, pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi), kedaulatan energi, maritim dan kelautan (melalui memperkuat jati diri sebagai Negara maritime, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, serta pengembangan ekonomi maritime dan kelautan), pariwisata dan manufaktur (pariwisata dan industri manufaktur), ketahan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas (melalui ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan);
4. Sasaran pembangunan dimensi pemerataan, meliputi menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi, meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu (melalui perlindungan social bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan ketrampilan pekerja);
5. Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah, meliputi : pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional (peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, pembangunan kawasan perkotaan), pembangunan

perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, serta pembangunan kawasan perkotaan;

6. Sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, meliputi politik dan demokrasi, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintah desa (kinerja keuangan daerah, kinerja kelembagaan, kinerja aparatur), serta pertahanan dan keamanan.

Sasaran pokok pembangunan nasional tersebut tentunya dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian integral, dimana sasaran pembangunan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki interkoneksi dengan sasaran nasional dan sasaran pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dalam kerangka membangun ketercapaian terhadap target sasaran pokok nasional.

Sasaran Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 tersebut merupakan sasaran Pemda yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022. Interkoneksi sasaran nasional dan sasaran Pemda DIY Tahun 2019 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4-6 Interkoneksi Sasaran Nasional dan Pemda DIY Tahun 2019

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Target 2019	Sasaran Pembangunan DIY	Indikator Sasaran DIY	Target 2019
1.	**Sasaran Makro**	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,98	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM	80,72
		Pertumbuhan Ekonomi	5,4-5,8%	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5.26
		Indeks Gini	0,36-0,39	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	0,3846
		Tingkat Kemiskinan	8,5-9,5%		Persentase Angka Kemiskinan	9,90%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,8–5,2%		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,6%
2.	**Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat**			Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM (%)	80,72
a.	**Kependudukan dan Keluarga Berencana**	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	2,28	Indikator Program Pembangunan Sosial Masyarakat	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR);	2.1
b.	**Pendidikan**	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	91,63	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing,dan non diskriminatif (sasaran perangkat daerah)	Capaian APK pendidikan Menengah	96,72
		Persentase SMA/SMK/MA/Sederajat yang berakreditasi minimal B (%	84,6	Meningkatnya pelayanan dan kualitas pendidikan menengah (Sasaran Perangkat Daerah)	Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Target 2019	Sasaran Pembangunan DIY	Indikator Sasaran DIY	Target 2019
c.	**Kesehatan**	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) ***	271	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM	80,72
		Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) ***)	21	Indikator Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	75.20
		Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun (%)	5,4			
		Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	23,4	Terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit (Indikator Program Perangkat Daerah)	Persentase keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular	56,33
		Prevalensi HIV (%)	<0,5			
		Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	245			
		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	300			
e.	**Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,39 (meningkat)	Meningkatnya Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,02
	Perlindungan Anak	Jumlah kabupaten/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	420	Indikator Program Pembangunan Sosial Masyarakat	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	3
		Prevalensi kekerasan terhadap anak (%)	Anak laki-laki: 38,6; Anak perempuan: 20,4 (2013), menurun	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak (Sasaran Perangkat Daerah)	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak (*Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi jumlah penduduk perempuan dan anak dikali 1000*)	0,47
f.	**Pembangunan Masyarakat**				Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda	11,68

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Target 2019	Sasaran Pembangunan DIY	Indikator Sasaran DIY	Target 2019
	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keragaman budaya	Peserta internalisasi nilai warisan budaya (juta)	1,2	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	dan Tak benda yang diapresiasi	
		Peserta internalisasi nilai-nilai sejarah (ribu)	35,5			
	Meningkatnya Apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya	Apresiasi karya seni oleh masyarakat	30			
	Meningkatnya kualitas pengelolaan dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya	Jumlah mata budaya yang dilestarikan (unit)	95.592			
	Meningkatnya kerja sama dan pertukaran informasi budaya antardaerah, serta antara Indonesia dan Mancanegara	Negara yang menjalin hubungan kerjasama dan pertukaran informasi budaya dengan Indonesia (non kumulatif)	52			
	Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan	SDM Kesenian dan cagar budaya (orang)	1275			

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Target 2019	Sasaran Pembangunan DIY	Indikator Sasaran DIY	Target 2019
3.	**Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan**			Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	0,3846
					Persentase Angka Kemiskinan	9,90%
a.	Kedaulatan Energi	Rasio Elektrifikasi	96,6%	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik (Sasaran Perangkat Daerah)	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	95,60%
b.	Pariwisata dan Industri Manufaktur			Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan (menunjang sektor dominan seperti pariwisata)	Pertumbuhan Ekonomi.	5,26
		Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)	175,0-180,0	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian	nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY (juta rupiah)	9,855,064
		Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	5,1-5,6	Meningkatnya industri pengolahan	nilai industri pengolahan dalam PDRB DIY (juta rupiah)	12,637,626
c.	Maritim dan Kelautan			Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan (menunjang sektor dominan seperti pariwisata)	Pertumbuhan Ekonomi.	5,26
		Pertumbuhan produksi Ikan (%)	8,1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK, juta rupiah)	322,136
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	66,5 – 68,5		IKLH(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	60,51

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Target 2019	Sasaran Pembangunan DIY	Indikator Sasaran DIY	Target 2019
		Jumlah penanganan kasus pelanggaran dan tindak pidana di laut (kasus)	60	Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	10
					Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	14
d.	Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas			Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	0,3846
					Persentase Angka Kemiskinan	9,90%
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak	49,79	Penduduk dengan hunian yang layak (sasaran perangkat daerah)	persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	95,49
e.	**Kedaulatan Pangan**			Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	0,3846
					Persentase Angka Kemiskinan	9,90%
	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor pola pangan harapan (nilai)	92,5	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90.22
4.	**Sasaran pembangunan dimensi pemerataan**			Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	0,4552
a.	**Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah**	Kontribusi Wilayah Terhadap Perekonomian Nasional (Persen)	58,15	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5.26
					kontribusi sektor pertanian, industri	44

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Target 2019	Sasaran Pembangunan DIY	Indikator Sasaran DIY	Target 2019
					pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY (%)	
b.	**Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah**			Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	9.419
				Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan (menunjang sektor dominan seperti pariwisata)	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	78
					Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	30,42
	Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi	Indeks Gini	0,36-0,39	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	0,3846
	Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu	Tingkat Kemiskinan	8,5-9,5%		Persentase Angka Kemiskinan	9,90%
5.	Sasaran pembangunan politik, hukum,					

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Target 2019	Sasaran Pembangunan DIY	Indikator Sasaran DIY	Target 2019
	pertahanan, dan keamanan			Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan		
a.	Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Persentase jumlah K/L atau pemda yang memperoleh opini WTP (%)	100		Opini BPK	WTP
		Persentase jumlah K/L atau pemda yang memperoleh skor laporan kinerja "B" (%)	100		Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	A
				Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	73.91
b.	Politik dan Demokrasi; danTata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang makin kokoh		Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance; Indikator Tujuan dari Misi Ke-2)	Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 73,07 (BB) dalam kategori baik (2016) menjadi Sangat Baik dengan nilai 76 (A) (2022).	73,07
		Indeks kebebasan berpendapat	72,54			
		Indeks partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	61,30			
		Indeks peran DPRD 46,76 46,80**) 46,83	46,90			
		Jumlah regulasi/kebijakan bidang komunikasi publik (draft)	3			

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Target 2019	Sasaran Pembangunan DIY	Indikator Sasaran DIY	Target 2019
		Persentase penyelesaian sengketa informasi publik sesuai UU No.14/2008 (%)	65			
		Persentase Penyelesaian pengaduan masalah konten siaran (%)	95			
		Persentase peningkatan masyarakat yang berperan serta secara berkesinambungan dalam pencegahan terorisme (%)	20			

4.3 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Terkait dengan prioritas pembangunan kewilayahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu dilakukan suatu identifikasi permasalahan dan isu-isu terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan berbagai kajian dan penelitian, beberapa permasalahan dan isu-isu penting pembangunan di DIY yang perlu mendapat perhatian antara lain :

a. Tingginya tekanan penduduk terhadap lahan, terutama lahan pertanian. Masalah ini terus meningkat karena adanya pertumbuhan penduduk dan konversi penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian yang terus meningkat. Konversi lahan pertanian banyak terjadi di pinggiran Kota Yogyakarta terutama di wilayah Kabupaten Sleman. Konversi lahan pertanian tersebut mengakibatkan produksi pertanian mengalami penurunan dan mengancam ketahanan pangan di wilayah DIY.

b. Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di lereng tengah Gunung Merapi dan konversi lahan hutan menjadi lahan terbuka di kerucut dan lereng atas Gunung Api Merapi mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama. Penurunan imbuhan ari tanah juga disebabkan oleh tingginya lahan terbangun akibat berkembangnya berbagai fungsi kawasan di wilayah resapan air.

c. Berkembangnya lahan terbangun, seperti lahan permukiman, hotel, mal, dan apartemen, juga berpotensi mengurangi ruang terbuka hijau terutama di wilayah perkotaan. Dengan berkurangnya lahan terbuka hijau akan mengurangi kemampuan lingkungan untuk mereduksi pencemaran udara dan sekaligus mengurangi resapan air. Peningkatan lahan terbangun juga akan meningkatkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sehingga berpotensi semakin meningkatnya aliran permukaan yang akan mengakibatkan genangan dan banjir.

d. Sebagian wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di wilayah DIY telah banyak mengalami tekanan penduduk yang mengakibatkan adanya alih fungsi lahan dan pencemaran sungai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian wilayah DAS mengalami degradasi lingkungan yang ditandai oleh tingginya sedimentasi dan fluktuasi debit air pada musim penghujan dan musim kemarau cukup tinggi.

e. Kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan lindung geologi sehingga kegiatan penambangan dan pembangunan yang terus meningkat tanpa adanya pengendalian dipastikan akan mempercepat kerusakan ekosistem kawasan karst tersebut.

f. Wilayah DIY sebagian kawasan permukimannya dilewati sungai. Di wilayah sekitar sungai tersebut telah banyak dimanfaatkan untuk permukiman dan sebagian telah melanggar sempadan sungai. Permukiman di sekitar sungai, terutama di wilayah Kota Yogyakarta, terus mengalami pemadatan sehingga memunculkan kawasan kumuh (*slum areas*). Berkembangnya kawasan kumuh di sekitar sungai menyebabkan munculnya berbagai permasalahan lingkungan permukiman.

Dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan pembangunan, diperlukan beberapa arahan kebijakan sebagai dasar dalam pembangunan kewilayahan sebagai berikut :

a. Dengan melihat imbangan antara biokapasitas dengan jejak ekologi dihasilkan adanya defisit sumber daya lahan sebesar 0,085 hektar global per kapita. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa di DIY jumlah penduduk yang ada sudah melebihi daya dukungnya (*over population*). Untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang ada diperlukan tambahan sumber daya dari luar daerah (*import*). Alternatif lain adalah dengan mengendalikan laju pertumbuhan peduduk atau melalui upaya meningkatkan produktivitas serta reorientasi dan pengaturan penggunaan lahan. Instrumen kunci dalam upaya reorientasi dan pengaturan penggunaan lahan adalah dengan mengembangkan rencana tata ruang wilayah yang lebih mendasarkan pada aspek daya dukung lingkungan/wilayah. Pola ruang RTRW DIY perlu lebih diarahkan pada keseimbangan pengaturan pola ruang sesuai dengan kemampuan dan fungsi kawasan sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya dukung sumber daya lahan. Upaya pengaturan pola ruang tersebut diharapkan juga mampu meningkatkan biokapasitas wilayah dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan.

b. Dengan memperhatikan tingkat konsumsi yang ada, wilayah DIY masih mengalami defisit lahan pertanian, hutan, dan *fishing grounds*. Luasan lahan pertanian yang ada saat ini hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan penduduk. Untuk memenuhi kekuarangan luasan lahan pertanian tersebut tidak memungkinkan lagi dilakukan dengan ekstensifikasi karena

keterbatasan luasan dan di sebagian wilayah kemampuan lahannya kurang mendukung. Cara yang perlu dan mungkin dilakukan adalah dengan intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas sehingga total produksi pertanian dapat ditingkatkan. Untuk mengatasi luasan hutan yang masih kurang dapat dilakukan dengan perluasan hutan terutama pada lahan-lahan kritis. Di bidang perikanan yang masih kurang, pengembangan kawasan budi daya perikanan perlu lebih ditingkatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Secara keseluruhan DIY masih surplus sumber daya air. Meskipun demikian, terdapat beberapa bagian wilayah terutama di Kabupaten Gunungkidul yang kekurangan air sehingga berdampak pada kesehatan dan produktivitas penduduk. Untuk itu perlu dilakukan konservasi sumber daya air. Setiap kabupaten/kota perlu menetapkan perda konservasi sumber daya air sebagai bentuk pengendalian terhadap berbagai kegiatan yang dapat menurunkan daya dukung sumber daya air. Khusus untuk Kabupaten Gunungkidul perlu diupayakan pemanfaatan potensi sungai bawah tanah yang cukup berlimpah dengan memanfaatkan teknologi yang tepat.

d. Dalam upaya pengendalian dampak pencemaran udara perlu dilakukan beberapa upaya yaitu penambahan luasan kwasan hijau khususnya di wilayah perkotaan, selain itu perlu dikembangkan Program Kampung Hijau untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sehingga mampu mendukung kampung yang berkelanjutan.

e. Daya dukung pangan di wilayah DIY menunjukkan angka yang belum mencapai swasembada pangan. Kebutuhan pangan penduduk untuk hidup layak tidak dapat terpenuhi hanya dari produksi lokal karena produksi yang tersedia hanya mampu memenuhi kebutuhan sebagian penduduk. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan upaya intensifikasi dan penggunaan teknologi tepat guna.

f. Dalam upaya mencapai keberlanjutan pembangunan pariwisata di DIY diperlukan empat pilar utama, yaitu *pro-environment, pro-poor, pro-women,* dan *pro-livelihood opportunities*. Empat pilar tersebut merupakan perwujudan dari tiga aspek dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

4.3.1 Konektivitas Pembangunan Antar Wilayah

Dalam kaitannya dengan pembangunan kewilayahan di DIY, wilayah-wilayah di DIY pada prinsipnya memiliki karakteristik pengembangan yang berbeda-beda. Secara khusus untuk wilayah *hinterland* atau yang disebut dengan istilah lain, yaitu: kota satelit. Pada dasarnya dari kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu kota kecil yang berada disekitar kota besar, yang memiliki kesamaan dalam pola kinerja tetapi dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Di wilayah hinterland tetap ada kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan atau fasilitas-fasilitas lain tetapi dalam skala kecil, tidak kompleks pada kota besar atau pusat kota.

Secara ekonomi wilayah *hinterland* bisa menjalankan perekonomian secara mandiri, walaupun ada beberapa barang dan jasa yang dalam pendistribusiannya masih tergantung pada kota besar, tetapi secara garis besar kawasan *hinterland* atau kota satelit dapat memenuhi fasilitas-fasilitas kota yang pada akhirnya dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya atau penduduk sub-urban. Dengan kata lain, menurut Yunus (2005, h.285) dapat diungkapkan bahwa wilayah *hinterland* juga berfungsi sebagai penerima tenaga kerja karena didalamnya yang telah berkembang fungsi-fungsi sosio ekonomi kekotaan, namun juga berperan sebagai pemasok komoditas ketempat lain.

Berkaitan dengan hal tersebut wilayah DIY memiliki kondisi yang menarik, dimana Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan yang saat ini pertumbuhan dan perkembangannya bergerak alamiah, menyebar ke wilayah-wilayah diluar Kota Yogyakarta, yaitu sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang dalam perkembangannya wilayah dengan karakteristik hampir sama dengan Kota Yogyakarta tersebut disebut sebagai Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Perkembangan fungsi-fungsi wilayah sesuai dengan fungsi *hinterland* disekitar Kawasan Perkotaan Yogyakarta seperti Kawasan Perkotaan Wates, Bantul, Wonosari, dan Sleman pada prinsipnya menjadi bagian penting memberikan dukungan perkembangan wilayah di DIY, khususnya sebagai titik pusat distribusi barang dan komoditas untuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Hal ini memberikan makna bahwa daya dukung *hinterland* terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di DIY dapat terbentuk.

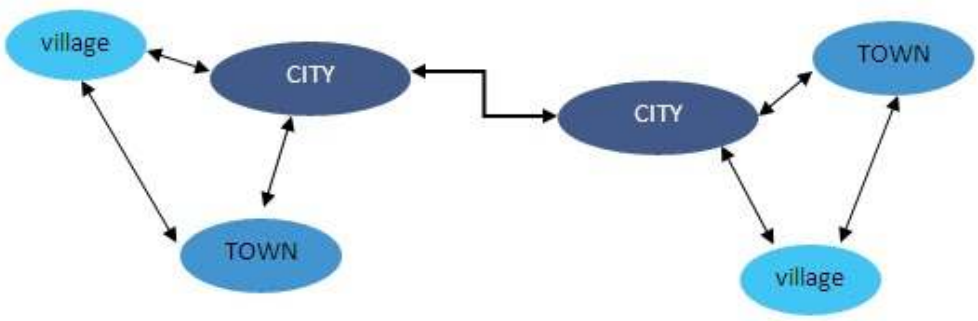
Pengembangan infrastruktur wilayah dari dan menuju *hinterland* memberikan peran penting peningkatan pemasaran komoditas baik industri kreatif,

pertanian, perikanan, hasil hutan, dan lain sebagainya. Sebaliknya untuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta tentunya harus memberikan peran penting pula dalam mendukung *hinterland* baik dalam pengembangan pelayanan pendidikan maupun penyediaan barang dan komoditas dari wilayah lain untuk mendukung kawasan-kawasan hinterland sebagai bagian dari sub pusat pertumbuhan DIY.

Pertimbangan arah kebijakan kewilayahan tersebut memberikan peran penting dalam peningkatan daya beli masyarakat karena dengan pola manajemen distribusi barang dan komoditas yang baik, serta pola pengaturan harga pasar oleh pemerintah akan meningkatkan pendapatan baik petani, nelayan, pedagang, maupun unsur masyarakat lainnya, sedangkan dari aspek pemenuhan komoditas terpenuhi dengan baik dan masyarakat memiliki daya beli yang baik terhadap barang/komoditas yang dijual di pasar. Lebih lanjut dengan pola membuat rantai distribusi komoditas beredar dan memenuhi kebutuhan penduduk terutama masyarakat lokal DIY akan berimplikasi pula pada pemenuhan penyediaan lapangan pekerjaan masyarakat.

Pola manajemen demikian akan memberikan peran barang/komoditas lokal beredar secara khusus di wilayah DIY yang akan meminimalisir jumlah komoditas yang masuk di wilayah DIY, serta memberikan nilai manfaat yang lebih tinggi terhadap masyarakat lokal yang akan berdampak secara *multiplier* terhadap penurunan angka kemiskinan.

Dukungan pembangunan infrastruktur akan memberikan pengaruh pada peningkatan akses, serta distribusi dan pemasaran komoditas lokal di DIY, serta memberikan pengaruh pula terhadap penigkatan pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten/kota di DIY. Infrastruktur pada wilayah *hinterland* dikembangkan untuk memberikan dukungan konektivitas dengan pusat pertumbuhan yang dalam hal ini adalah Kawasan Perkotaan Yogyakarta.



Sumber: bappeda, diolah

Gambar 4-2 Konektivitas Pusat dan Sub Pusat Pertumbuhan

Pengembangan pola kerjasama antar wilayah tentunya menjadi bagian penting dalam mendukung suksesi pengembangan manajemen distribusi tersebut, serta memberikan peran penting dalam mendukung pengembangan wilayah di DIY. Identifikasi sektor-sektor unggulan dan strategis di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota di DIY secara lebih spesifik sangat diperlukan. Lebih lanjut identifikasi terhadap arus barang dan komoditas, serta pola-pola perkembangan wilayah di Kabupaten/Kota menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi arah pembangunan masing-masing Kabupaten/Kota serta menjadi bahan dalam perumusan arah kebijakan strategis masing-masing Kabupaten/Kota.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul saat ini menjadi bagian penting dalam pengendalian kawasan dengan fungsi ekologis dengan mengubah *mindset* pengendalian lingkungan hidup melalui pengembangan pariwisata daerah yang memanfaatkan alam baik goa, pantai, serta peninggalan sejarah megalitikum. Kabupaten Bantul sebagai bagian dari pengembangan aktivitas wisata yang memanfaatkan potensi alam berupa pantai dan mengembangkan industry kreatif yang menjadikan Kabupaten Bantul sebagai trigger pengembangan aktivitas pariwisata khususnya dalam seni dan budaya. Sejalan dengan hal tersebut akan berbeda dengan wilayah Kabupaten Kulonprogo yang akan meningkatkan fungsi wilayahnya sebagai wilayah yang maju dan modern melalui peningkatan dan pengembangan infrasrastruktur bandara dan pelabuhan tanjung adikarto dengan harapan ke depan memberikan peran besar dalam menarik *demand* pengguna jasa transportasi udara, serta pengembangan system distribusi barang dan komoditas melalui pelabuhan dan bandara. Lain halnya dengan Kabupaten Sleman yang cenderung dapat memberikan dukungan

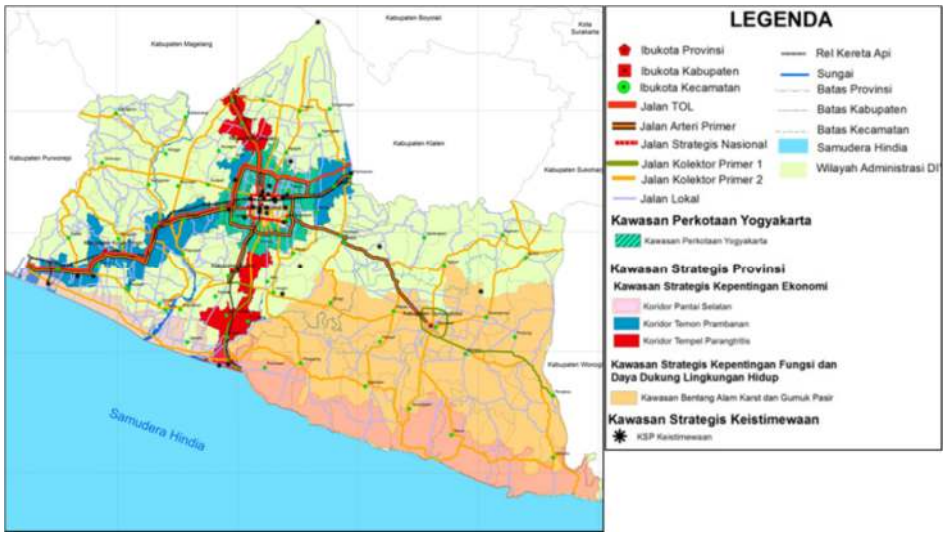
dari aspek ekologis berkaitan dengan penyediaan cadangan air karena Sleman merupakan wilayah resapan air atau daerah tangkapan air.

4.3.2 Pembangunan Koridor Ekonomi Strategis

Pengembangan koridor ekonomi strategis dilakukan pada beberapa lokasi koridor, meliputi Koridor Pantai Selatan, Koridor Temon-Prambanan, Koridor Tempel-Parangtritis. Beberapa koridor ekonomi tersebut tentunya dikembangkan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah di DIY, serta mengoptimalkan fungsi ruang yang mendukung peningkatan nilai ekonomi kawasan.

Lebih lanjut berkaitan dengan pengembangan koridor ekonomi di DIY dilakukan pula beberapa pengembangan koridor kawasan bentang alam karst dan gumuk pasir disekitar wilayah Kabupaten Gunungkidul, sebagian Bantul dan Kulonprogo. Kawasan tersebut tentunya memiliki fungsi lindung yang memerlukan upaya konservasi pada beberapa lokasi yang sudah mengalami degradasi lingkungan.

Pengembangan lebih lanjut pada koridor ekonomi strategis adalah penetapan kawasan pusaka yang mendukung keistimewaan di DIY yang menjadi fokus pembangunan keistimewaan di DIY. Peran DIY dalam mendukung Koridor Ekonomi khususnya Temon-Prambanan fokus pada perencanaan sarana dan prasarana angkutan jalan rel, yaitu melakukan kajian trase Utara-Selatan dan Timur-Barat, serta Lokasi Stasiun Kereta Api pada koridor-koridor tersebut. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4-3 Peta Pengembangan Koridor Ekonomi Strategis

4.3.3 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan menjadi permasalahan yang sampai saat ini membutuhkan perhatian serius. Hal ini terkait dengan masalah pendapatan yang diterima masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat, sanitasi dan lingkungan, penataan ruang, ketenagakerjaan, sosial, serta aspek-aspek yang memberikan permasalahan degradasi lingkungan khususnya pada kawasan DIY.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002 : 3). Dimensi Kemiskinan : Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, Kemiskinan sosial, Kemiskinan konsekwensial. Penurunan angka kemiskinan di DIY dilakukan dengan integrasi lintas sektor, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban, peningkatan kapasitas, peningkatan akses, serta pengembangan system proteksi. Dalam kaitannya dengan usaha penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya dengan pengembangan daya saing wilayah melalui pengembangan produk/komoditas lokal wilayah, peningkatan akses terhadp sumberdaya produktif, bantuan rumah layak huni, pembebasan biaya pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan, pelatihan ketrampilan, bantuan permodalan, serta peningkatan kesempatan kerja.

4.3.4 Penurunan Ketimpangan Wilayah

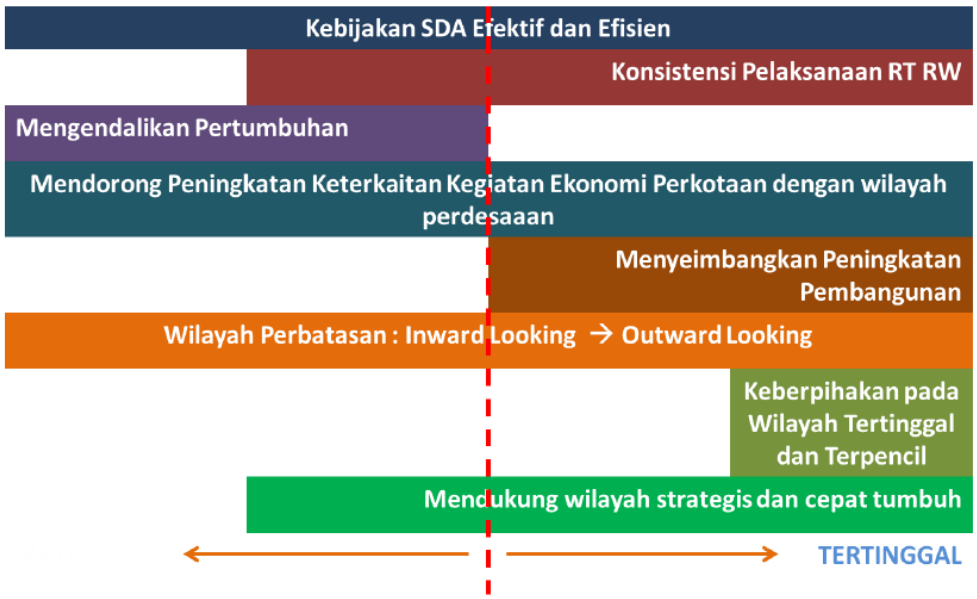
Penurunan ketimpangan wilayah di DIY menjadi permasalahan yang bersifat multidimensi. Seperti halnya masalah kemiskinan, ketimpangan wilayah bersifat unik, mengingat tidak semua wilayah dengan penyediaan infrastruktur dan sarana maupun prasarana rendah merupakan wilayah yang timpang hanya karena pertimbangan secara umum melalui perhitungan *index Williamson*. Hal ini memberikan makna bahwa aspek ketimpangan tentunya harus memperhatikan rasio penyediaan infrastruktur terhadap kebutuhan, bukan hanya memperhatikan bahwa sebuah wilayah mengalami ketimpangan karena kawasan didalamnya mengalami pertumbuhan yang tidak seimbang karena satu kawasan tertentu berkembang potensi perdagangan dan jasa cukup tinggi, sedangkan kawasan lain hanya berkembang potensi pertanian dan perkebunan.

Makna ketimpangan dalam kaitannya dengan aspek pengembangan wilayah tentunya harus memperhatikan terlebih dahulu fungsi sebuah wilayah. Tidak hanya sebatas melihat seberapa besar pelayanan yang tersedia pada masing-masing wilayah. Dalam hal ini apabila diperhatikan, wilayah DIY memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda tiap wilayah kabupaten/kotanya (melihat dari aspek administratif). Wilayah Kabupaten Bantul, dan Sleman dikembangkan aktivitas pertanian yang cukup baik yang pada prinsipnya memiliki fungsi sebagai wilayah *hinterland* yang mendukung wilayah pusat kota, dalam hal ini adalah Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Kepadatan penduduk cukup tinggi memberikan nuansa bahwa Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan, sedangkan wilayah diluar kawasan perkotaan merupakan *hinterland* dan sebagian sebagai penyangga. Kabupaten Sleman selain dikembangkan sebagai pertanian juga memiliki fungsi ekologis, yaitu kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, serta wilayah sekitar merapi yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Hal ini memberikan makna bahwa sebagian wilayah Kabupaten Sleman adalah wilayah lindung yang memberikan dukung terhadap wilayah-wilayah dibawahnya termasuk berkaitan dengan dukungan penyediaan air dari mata air merapi, serta fungsi merapi menjaga keberlangsungan ekologi. Lebih lanjut Bantul menjadi salah satu wilayah yang memberikan peran penting dalam pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan, demikian pula Kabupaten Sleman yang memberikan peran penting mendukung pangan pada wilayah perkotaan Yogyakarta.

Lebih lanjut wilayah Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul memiliki karakteristik unik sebagai wilayah yang lebih jauh dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul memiliki fungsi pengembangan ekologis karst. Kabupaten Gunungkidul tidak dapat dikembangkan seperti Kota Yogyakarta, mengingat kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki termasuk sumber air bawah tanah yang cukup besar maupun keberadaan kawasan karst yang menjaga keberlangsungan fungsi ekologi kawasan sekitarnya.

Uraian tersebut diatas memberikan penjelasan bahwa wilayah Pusat dan Sub Pusat harus dibedakan karakteristiknya, khususnya dalam upaya melihat disparitas wilayah yang tidak hanya secara umum melainkan secara khusus dengan melihat kebutuhan sarana dan prasarana dasar. Hal tersebut memberikan implikasi pula pada perumusan proses perencanaan kewilayahan termasuk dalam hal ini adalah penataan ruang.



Gambar 4-4 Dasar Pemikiran Penurunan Ketimpangan Wilayah

4.3.5 Kestabilan Daya Dukung Lingkungan

Hamemayu Hayuning Bawono merupakan filosofi sekaligus konsep yang banyak menghiasi wawasan kosmologi kehidupan masyarakat Jawa. *Hamemayu Hayuning Bawono* relevan dengan upaya untuk memberi makna bahwa

kehidupan sejatinya adalah memuliakan kehidupan termasuk memuliakan bumi dan alam semesta. Konsep ini selaras dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan dan kelestarian lingkungan hidup dijaga dengan semangat memuliakan bumi demi anak cucu sebagai penghuni berikutnya.

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan pembangunan, aspek lingkungan merupakan hal yang "istimewa" karena menyangkut bagian penting dalam pembangunan. Kondisi lingkungan merupakan faktor penentu sekaligus faktor pembatas dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai faktor penentu, aspek lingkungan dapat merupakan sumber daya yang mampu mendukung pembangunan. Berbagai sumber daya yang tersedia dari kondisi lingkungan tertentu dapat dimanfaatkan untuk menunjang berbagai aktivitas pembangunan. Dengan demikian, kondisi lingkungan pada suatu wilayah dengan berbagai sumber daya di dalamnya dapat sebagai modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*).

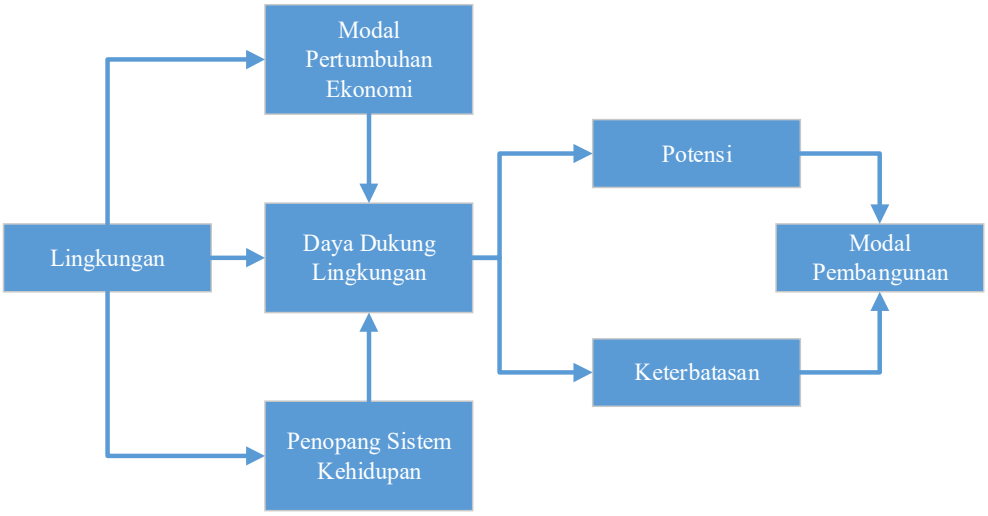
Potensi sumber daya alam di suatu wilayah yang dimanfaatkan melalui berbagai macam kegiatan sektoral dapat memberikan kontribusi yang nyata pada perekonomian wilayah. Sumbangan pendapatan sektor kegiatan yang berbasis pada sumber daya alam di berbagai daerah berpotensi meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mampu memicu perkembangan ekonomi wilayah. Dengan demikian, daya dukung sumber daya alam dapat menentukan perkembangan ekonomi wilayah. Meskipun demikian, daya dukung sumber daya alam pada suatu daerah dapat pula hanya sekedar potensi dan belum mampu menggerakkan ekonomi wilayah karena belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal.

Daya dukung sumber daya alam pada suatu wilayah berkaitan dengan perkembangan kegiatan sektoral. Kegiatan sektor tertentu akan berkembang sesuai dengan intensitas pemanfaatan dan potensi sumber daya alamnya. Berkembangnya sektor kegiatan yang secara intensif memanfaatkan potensi

sumber daya alam akan menjadikan sektor tersebut sebagai sektor unggulan. Besarnya daya dukung sumber daya alam pada suatu wilayah terkait dengan berkembangnya sektor-sektor unggulan yang memanfaatakan potensi sumber daya alam yang tersedia. Selain itu, aspek lingkungan juga sangat menentukan berkembannya suatu sistem kehidupan. Aspek lingkungan mempunyai kaitan yang erat dengan berkembangnya ekosistem tertentu. Berkembangnya sistem kehidupan ditentukan oleh dukungan ekosistem. Dengan demikian, kondisi lingkungan merupakan penopang sistem kehidupan (*life support system*).

Sesuai dengan fungsi lingkungan sebagai modal pertumbuhan ekonomi sekaligus penopang sistem kehidupan, tentunya mencerminkan adanya kemampuan suatu lingkungan dalam mendukung dan memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. Kemampuan tersebut merupakan daya dukung dari suatu lingkungan tertentu yang ada dalam suatu wilayah. Daya dukung lingkungan memberikan gambaran tentang adanya potensi yang dapat dimanfaatkan.

Meskipun demikian, daya dukung juga mencerminkan adanya keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatannya untuk pembangunan. Secara diagramatis, fungsi dan keistimewaan lingkungan dalam pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4-5 Dukungan Lingkungan dalam Pembangunan

Setiap wilayah mempunyai kapasitas yang berbeda dalam perkembangannya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh

masing-masing wilayah. Salah satu potensi sumber daya wilayah tersebut adalah menyangkut sumber daya alam. Sumber daya alam yang terdapat di suatu wilayah, baik berupa sumber daya lahan maupun sumber daya lainnya, dalam manifestasi pemanfaatannya meliputi berbagai bentuk, seperti untuk peruntukan kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Bentuk pemanfaatan sumber daya alam tersebut sangat kompleks dan potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan wilayah. Potensi sumber daya alam di suatu wilayah yang dimanfaatkan melalui berbagai macam kegiatan sektoral dapat memberikan kontribusi yang nyata pada perekonomian wilayah. Sumbangan pendapatan sektor kegiatan yang berbasis pada sumber daya alam di berbagai daerah mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mampu memicu perkembangan wilayah. Dengan demikian, daya dukung sumber daya alam menentukan terhadap perkembangan ekonomi wilayah.

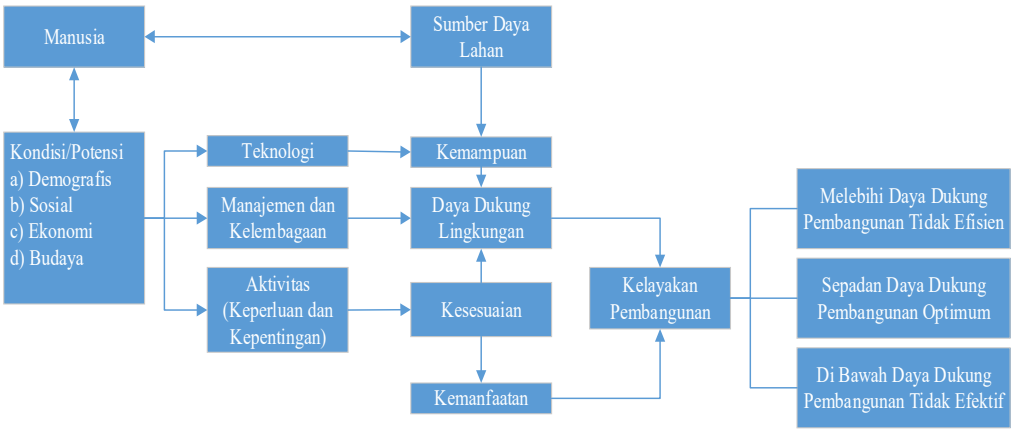
Daya dukung suatu wilayah berkaitan erat dengan kondisi dan kemampuan ekosistem. Kondisi ekosistem suatu wilayah menentukan terhadap ketersediaan sumber daya lingkungan. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya lingkungan tersebut berpengaruh terhadap variasi aktivitas ekonomi suatu wilayah. Pemanfaatan sumber daya lingkungan oleh berbagai aktivitas ekonomi pada gilirannya akan memengaruhi kapasitas menghasilkan barang produksi yang tentunya berpengaruh terhadap daya dukung wilayah. Meskipun demikian, di samping dipengaruhi oleh kapasitas ekosistem, daya dukung wilayah juga dipengaruhi oleh perubahan struktur produksi dan konsumsi, serta pemanfaatan teknologi.

Selain penopang pembangunan, aspek lingkungan pada suatu wilayah juga merupakan faktor pembatas pembangunan. Setiap wilayah mempunyai kondisi lingkungan dan sumber daya yang terbatas dalam mendukung kehidupan penduduk dalam segala aktivitasnya. Dengan demikian, suatu wilayah mempunyai daya dukung tertentu dalam menampung perkembangan yang terjadi. Namun di sisi lain, perkembangan di suatu wilayah akan terus meningkat, baik akibat pengaruh faktor eksternal maupun faktor internal wilayah. Perkembangan tersebut akan sangat berpotensi melebihi daya dukung lingkungannya sehingga berpeluang terjadinya degradasi lingkungan dan sumber daya (*negative impacts of development*) yang akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi

degradasi lingkungan dan sumber daya, sangat diperlukan upaya mengarahkan perkembangan suatu wilayah agar sesuai dengan daya dukung wilayahnya.

Agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud, dibutuhkan tiga pilar utama, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial yang harus berjalan harmonis. Sebuah sistem ekonomi berkelanjutan harus mampu memproduksi dan menyediakan basis berkelanjutan untuk mencegah adanya ketidakseimbangan, baik di sektor pertanian maupun industri. Sementara itu, sistem ekologi berkesinambungan harus mampu mempertahankan stabilitas sumber daya dan mencegah eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup, sedangkan sistem sosial berkelanjutan akan meningkatkan keadilan dalam hal distribusi dan kesempatan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam implementasinya, pendekatan pembangunan bekelanjutan merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk kemaslahatan menusia dalam batas daya dukung yang mampu disediakan sumber daya tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilihat kelayakan pembangunan sebagai dasar evaluasi. Kajian kelayakan pembangunan perlu didasarkan atas daya dukung dan kemanfaatannya. Imbangan tingkat pemanfaatan sumber daya (lahan) dan daya dukung dapat dijadikan ukuran kelayakan setiap program dan perencanaan pembangunan. Sumber daya dimanfaatkan secara layak apabila daya dukung dimanfaatkan sepenuhnya (optimum). Apabila daya dukung yang tersedia tidak dimanfaatkan secara penuh, maka pembangunan tidak efektif. Sebaliknya, apabila pemanfaatan sumber daya melampaui daya dukungnya, maka pembangunan menjadi tidak efektif dan cenderung akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan sehingga akan berpengaruh pada keberlanjutan pembangunan. Oleh sebab itu, penilaian daya dukung suatu wilayah menjadi sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan wilayah. Proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang tidak bijaksana akan membawa penurunan daya dukung wilayah dan kerberlanjutan pembangunan. Meskipun demikian, daya dukung suatu wilayah dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi dan pengembangan manajemen serta penguatan kelembagaan. Keberlanjutan pembangunan sangat ditentukan oleh proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang mampu memanfaatkan dan menjaga daya dukung wilayah. Uraian tersebut dapat disajikan dalam diagram seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 4-6 Hubungan Kemampuan Sumber Daya Lahan, Daya Dukung, Kesesuaian, Kemanfaatan dan Kelayakan Pembangunan

Secara fisik, wilayah DIY mempunyai karakteristik yang beragam. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi fisiografi yang bervariasi. Fisiografi Gunung Merapi terdiri dari Lereng Merapi Atas, Lereng Merapi Tengah, dan Lereng Merapi Bawah yang terletak di bagian utara membentang hingga bagian selatan dengan susunan material dari endapan aktivitas Gunung Api Merapi. Pada wilayah Lereng Merapi Atas yang mempunyai kemiringan lereng yang tinggi sebagian merupakan kawasan hutan lindung dan daerah resapan air. Sementara itu, wilayah Lereng Merapi Tengah banyak dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman, tetapi bersifat terbatas karena faktor kemiringan lereng dan sebagian masih merupakan daerah resapan air.

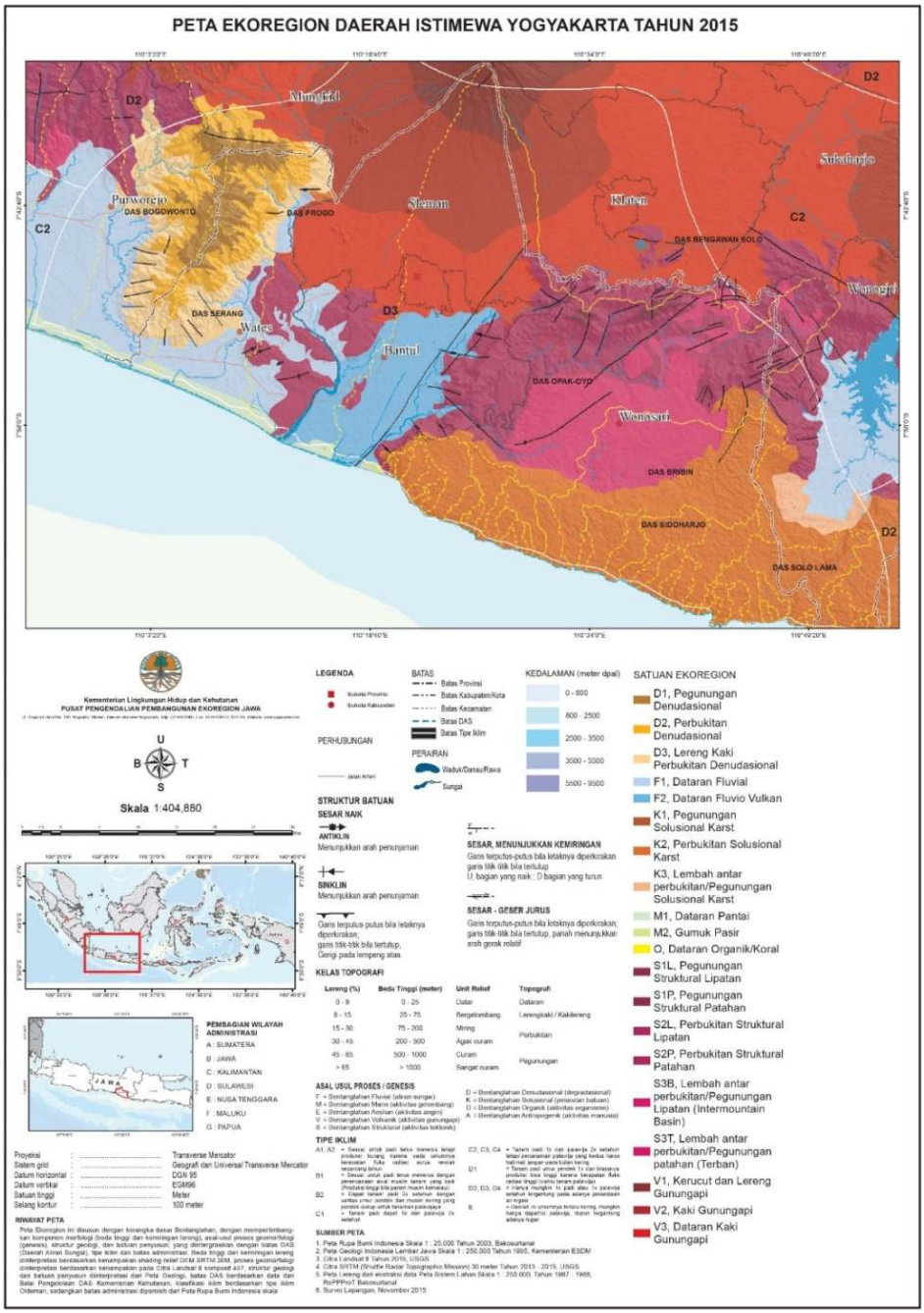
Kondisi yang berbeda terlihat pada wilayah Lereng Merapi Bawah yang topografinya relatif lebih datar. Pada wilayah ini terdapat kawasan perkotaan Yogyakarta yang meliputi wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Dominasi lahan terbangun dan berkembangnya berbagai kegiatan menjadi ciri utama kawasan perkotaan Yogyakarta. Pada bagian selatan terdapat dataran aluvial yang mempunyai topografi datar-hampir datar sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian. Satuan fisiografi lain yang terdapat di bagian barat wilayah DIY berupa Perbukitan Menoreh atau Pegunungan Kulon Progo. Satuan fisiografi ini batas bagian timurnya adalah Lambah Progo dan bagian selatan dibatasi oleh dataran aluvial pantai. Wilayah ini mempunyai lereng curam-sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah. Daerah yang berada pada

kawasan Pegunungan Kulon Progo ini umumnya digunakan sebagai kebun campuran, sawah, tegalan, dan permukiman. Di bagian sebelah timur Perbukitan Menoreh terdapat Dataran Progo yang merupakan dataran fluvial yang mempunyai karakteristik lahan yang subur dan sangat cocok untuk pengembangan kawasan pertanian lahan basah. Kawasan pertanian juga cocok dikembangkan di wilayah Dataran Aluvial Pantai. Penyebaran satuan dataran aluvial ini memanjang dari barat ke timur yang meliputi Kecamatan Panjatan, Temon, Wates, Galur, dan sebagian daerah Lendah. Daerah dataran aluvial ini relatif landai sehingga sebagian besar digunakan sebagai lahan persawahan dan permukiman penduduk. Di antara Dataran Progo dan Dataran Aluvial Pantai terdapat satuan fisiografi Perbukitan Sentolo. Formasi Sentolo terdiri atas batugamping, batupasir napalan, konglomerat, napa tufan dengan sisipan tuf gelasan pada bagian bawahnya dengan ketebalan 350 meter. Perbukitan Sentolo ini memiliki ketinggian berkisar 50-150 meter di atas permukaan laut dengan besar rerata kelerengan 15%. Dengan kondisi tersebut, penggunaan lahan tegalan mendominasi di wilayah Perbukitan Sentolo. Pada bagian selatan DIY terdapat pula satuan fisiografi Gumuk Pasir Pantai yang membentang dari wilayah Kabupaten Kulon Progo ke arah timur (Kabupaten Bantul) dan berbatasan dengan satuan fisiografi Gunung Sewu. Keberadaan Gumuk Pasir di pantai selatan tidak lepas dari pengaruh aktivitas Gunung Merapi, Sungai Opak, dan Sungai Progo. Partikel pasir yang membentuk gumuk pasir berasal dari material vulkanis Gunung Merapi yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan Sungai Progo. Keberadaan gumuk pasir merupakan fenomena yang unik sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan.

Sementara itu di bagian tenggara terdapat satuan fisiografi Dataran Tinggi Gunungkidul. Bagian utara satuan fisiografi ini dibatasi oleh Perbukitan Batur Agung dengan garis terjal dan memanjang. Bagian tengah merupakan Ledok Wonosari dengan topografi datar bergelombang dan pada bagian selatan merupakan perbukitan karst yang disebut Gunung Sewu. Satuan fisiografi ini merupakan bentang alam yang terbentuk dari hasil proses solusional (pelarutan), dengan bahan induk batu gamping dan mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup sangat jarang. Lereng perbukitan karst tersebut curam dan sebagian merupakan lahan kritis.

Gambaran variasi kondisi fisiografi tersebut mencerminkan pula keragaman potensi sumber daya alam. Keberagaman potensi sumber daya alam di DIY tentunya akan sangat menentukan terhadap kapasitas wilayah sehingga berpengaruh pula terhadap variasi daya dukung wilayah. Secara spasial, variasi

kondisi lingkungan fisik sebaran satuan ekoregion di wilayah DIY dapat dilihat pada gambar berikut.



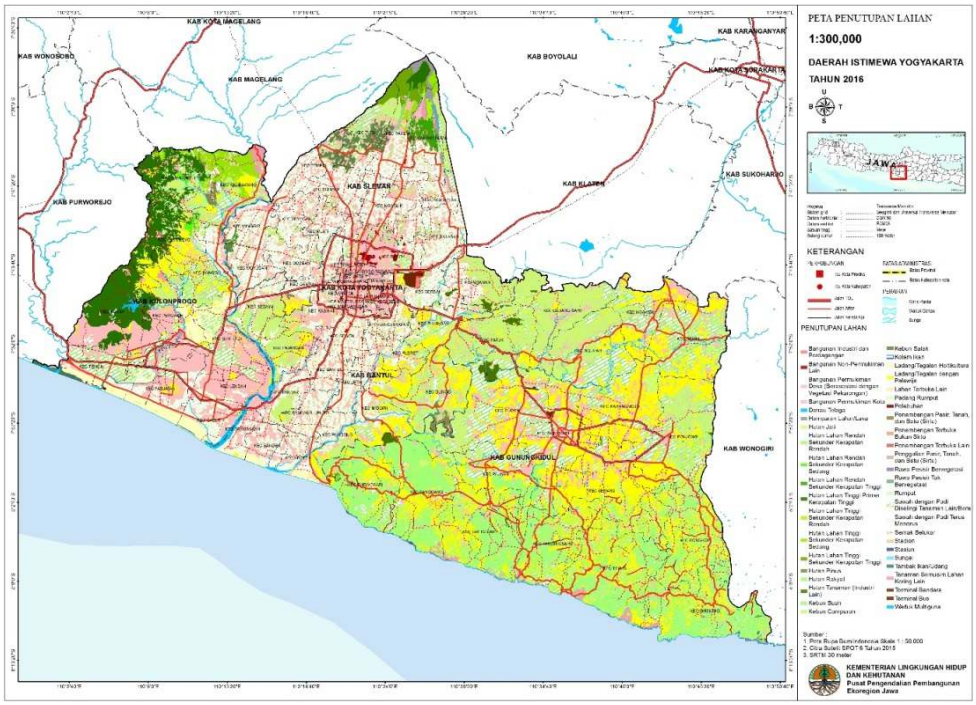
Gambar 4-7 Peta Ekoregion DIY

Wilayah DIY telah mengalami perkembangan pada berbagai aspek. Salah satu wujud perkembangan tersebut tercermin dari penggunaan lahannya. Penggunaan lahan di DIY menunjukkan adanya variasi. Variasi penggunaan lahan tersebut merupakan dampak dari berkembangnya berbagai kegiatan dan keragaman kondisi lingkungan fisik. Kondisi penggunaan lahan yang ada juga mencerminkan kapasitas suatu wilayah. Setiap bentuk penggunaan lahan mempunyai kemampuan mendukung fungsi dan memenuhi kebutuhan tertentu. Penggunaan lahan merupakan perwujudan aspek kemampuan ekologi dalam menyediakan sumber daya sesuai dengan potensi dan keterbatasan yang ada. Dengan demikian, penggunaan lahan pada suatu wilayah juga menggambarkan daya dukung wilayah yang bersangkutan.

Penggunaan lahan secara merupakan turunan penutup lahan yang sudah didefinisikan fungsinya. Distribusi penutup lahan dapat dilihat pada Peta Penutup Lahan DIY seperti yang tersaji pada gambar dibawah. Penggunaan lahan di Wilayah DIY secara umum menunjukkan adanya keragaman. Luasan yang cukup dominan terlihat pada bentuk penggunaan lahan untuk pertanian yang berupa lahan sawah beririgasi, sawah tadah hujan, dan tegalan. Sawah tadah hujan banyak ditemu di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul dan Kulon Progo terutama pada wilayah dataran aluvial, sedangkan sawah tadah hujan banyak terdapat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang didominasi satuan fisiografi perbukitan karst. Kebaradaan lahan pertanian terutama sawah sangat memberikan dukungan bagi pemenuhan kebutuhan pangan penduduk DIY.

Selain lahan pertanian, bentuk penggunaan lahan yang cukup dominan adalah lahan untuk permukiman. Lahan permukiman di wilayah DIY terutama terdapat di wilayah perkotaan dan di sekitar koridor jalan utama. Pertumbuhan penduduk yang tinggi terutama di wilayah pinggiran kota, menyebabkan kebutuhan lahan untuk permukiman juga tinggi dan terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan kebutuhan permukiman yang tinggi terutama terjadi di wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul sebagai dampak urbanisasi spasial dari kawasan perkotaan Yogyakarta. Lahan permukiman yang cukup luas dan terus mengalami perkembangan akan berdampak pada semakin menurunnya biokapasitas (daya dukung sumber daya lahan). Terlebih lagi jika dikaitkan dengan keberadaan lahan pertanian yang terus mengalami konversi oleh lahan permukiman semakin menurunkan kemampuan wilayah dalam penyediaan pangan. Dampak lain dari perkembangan lahan permukiman adalah semakin

menurunnya ketersediaan air akibat semakin luasnya lahan terbangun terutama di daerah resapan air.



Gambar 4-8 Peta Penutup Lahan DIY Tahun 2016

Penggunaan lahan yang berupa hutan di wilayah DIY luasannya semakin terbatas. Lahan hutan yang masih tersisa hanya terdapat di wilayah Kabupaten Sleman bagian utara (lereng Gunung Merapi) dan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Luasan hutan yang sudah sangat terbatas tersebut sangat berpengaruh terhadap biokapasitas dan kemampuan menyerap CO_2 serta kemampuan meresap air sehingga berakibat terhadap daya dukung bioekologi, daya dukung udara, dan daya dukung sumber daya air.

Daya dukung wilayah dan keberlanjutan pembangunan dibatasi oleh adanya bahaya alami akibat keragaman kondisi lingkungan fisik. Sebagian wilayah DIY mempunyai bahaya alami yang cukup beragam. Wilayah yang mempunyai bahaya alami tersebut antara lain pada daerah gunung api aktif, yaitu pada kerucut Gunung Api Merapi yang ditandai adanya akumulasi langsung dari material hasil aktivitas gunung api secara periodik. Selain itu, aktivitas Gunung Api Merapi juga berdampak pada bahaya alami sekunder berupa banjir lahan di

sepanjang sungai utama sebagai media aliran lahar yang melintasi lereng kaki gunung api hingga dataran gunung api, seperti di sepanjang Sungai Code dan Sungai Opak. Wilayah DIY juga mempunyai daerah bahaya longsor lahan dan erosi linier, yaitu pada sebagian besar perbukitan jalur Batur Agung dan Pegunungan Kulon Progo. Sementara itu berkaitan dengan bahaya erosi, wilayah pegunungan kapur (Gunung Sewu) di zona selatan merupakan daerah bahaya erosi berat, sedangkan pada daerah perbukitan monoklinal pada Formasi Sentolo terdapat daerah bahaya erosi sedang.Wilayah DIY juga terdapat daerah rawan banjir, yaitu di sepanjang dataran rendah bagian selatan dari Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Bahaya alami lain yang cukup berdampak dan sering terjadi adalah bencana gempa bumi. Wilayah yang paling berpotensi mengalami dampak akibat gempa bumi adalah Kabupaten Bantul. Bahaya alami juga terdapat di wilayah pesisir akibat adanya tsunami. Adanya berbagai bahaya alami tersebut tentu saja akan sangat membatasi kapasitas dan daya dukung wilayah serta akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan di wilayah DIY.

4.4 Pokok Pokok Pikiran DPRD

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Lebih lanjut didalam pasal 5 ayat (3) juga dijabarkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2019 merupakan tahun kedua perencanaan dari RPJMD DIY 2017-2022 sehingga penyusunan RKPD Tahun 2019 selain berpedoman pada RPJPD, RPJMN, dan RKP juga berpedoman pada RPJMD DIY 2017-2022. Selain itu, sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 153 bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi (pada huruf k) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, maka

dalam proses penyusunan RKPD DIY 2019 harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD DIY. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut didalam kerangka penyusunan Rancangan RKPD menjadi bahan pertimbangan perumusan permasalahan pembangunan daerah.

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD DIY Tahun 2019. berisi saran dan pendapat dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran yang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok Pikiran DPRD tidak akan memiliki fungsi yang baik dan optimal apabila penyampaiannya kepada gubernur terlambat walaupun penyusunan materinya dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen pemikiran sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan RKPD.

4.4.1 Tujuan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Dari sudut pandang DPRD dapat disampaikan bahwa tujuan dari pokok-pokok pikiran DPRD DIY dalam perencanaan pembangunan Tahun 2019 adalah, sebagai berikut :

1. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2019;
2. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran tahun 2019;
3. Mengarahkan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Menempatkan aspirasi masyarakat sebagai input kebijakan pembangunan yang bersifat strategis melalui proses akomodir yang direpresentasikan oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Mendukung terwujudnya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta secara komprehensif.

4.4.2 Permasalahan Pembangunan DIY dari Sudut Pandang DPRD

Percepatan pembangunan di D.I. Yogyakarta dalam akhir 5 tahun RPJMD sebelumnya cukup tinggi. Pesatnya pembangunan tentu saja berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dimana geliat ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir menjadi daerah yang padat secara ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan dukungan jasa pariwisata membuat D.I Yogyakarta mampu mendorong pertumbuhan hingga pelosok pedesaan. Sedangkan di kota, D.I Yogyakarta juga mampu memanfaatkan ruang-ruang ekonomi untuk menangkap perkembangan ekonomi perkotaan dengan mengedepankan sektor jasa.

Meskipun perkembangan pembangunan cukup pesat, D.I Yogyakarta masih menyisakan sejumlah permasalahan. Angka kemiskinan D.I Yogyakarta masih saja tinggi yang disebabkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi rata-rata memang tinggi, akan tetapi didominasi oleh kota dan pinggiran kota sebagai pusat pertumbuhan. Dampaknya adalah tidak ada pemerataan pertumbuhan ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat D.I Yogyakarta, khususnya di kabupaten yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ifrastruktur. Kesenjangan infrastruktur menyebabkan sulitnya aksesbilitas masyarakat perdesaan dalam semua urusan, baik andministratif maupun ekonomi. Persoalan inilah yang menyebabkan angka kemiskinan tinggi dan kesenjangan pembangunan infrastruktur wilayah.

Sisi lainnya, persoalan sosial masyarakat terus terganggu. Isu SARA, ketentraman dan ketertiban dengan istilah kenakalan remaja ‘Cah Klithih’ terus terjadi. Peristiwa tindak kekerasan tersebut menjadikan keresahan warga masyarakat D.I Yogyakarta dan belum banyak penyelesaian dilakukan. Sisi lainnya, masih banyak persoalan unjuk rasa yang menyatakan ketidak puasan atas kebijakan pemerintah daerah D.I Yogyakarta. Meskipun demikian, indeks demokrasi di D.I Yogyakarta masih tergolong baik menurut penilaian Pemerintah Pusat.

Dalam beberapa catatan, layanan publik juga menurun dengan ditunjukkan rapor merah oleh Ombusdman Nasional. Tentu saja hal ini menjadi satu kritik tersendiri mengingat D.I. Yogyakarta memperoleh WTP setiap tahunnya. Begitu pula dalam layanan dasar pendidikan dan kesehatan, masih dirasa kurang meskipun perbaikan layanan terus dilakukan. Angka putus sekolah masih saja ada meskipun menurun, dan target Wajar 12 tahun belum sepenuhnya tercapai.

Terjadinya bencana alam banjir bandang di kabupaten Bantul dan Gunungkidul beberapa saat yang lalu menyumbang kerusakan lingkungan dan infrastruktur, khususnya di kedua kabupaten tersebut. Kerusakan infrastruktur tentu membuat akses masyarakat terbatas dan mengalami kerugian ekonomi tinggi. Kembali ke posisi normal tentu membutuhkan modal dasar pembangunan cukup besar dan fokus. Pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor perlu mendapat perhatian dan alokasi anggaran secara khusus.

Persoalan layanan publik juga mendapat perhatian, diantaranya investasi daerah dalam meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung layanan publik. Keterbukaan informasi dengan memperkuat sistem layanan dan sistem *data base* menjadi mutlak jika D.I Yogyakarta tidak akan ketinggalan dari daerah lain yang terus menggunakan teknologi informasi terbaru dan akseseble terhadap *stakeholder* atau pengguna. Perubahan jaman, kemajuan teknologi informasi menuntut perubahan penggunaan program layanan masyarakat dengan kecepatan dan keakuratan tertentu. Investasi teknologi informasi mutlak dibutuhkan.

Atas dasar tersebut, Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2019 dalam melihat permasalahan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

Persoalan ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat menjadi populer. Peningkatan angka kriminalitas di Daerah Istimewa Yogyakarta menaik dengan banyaknya pelaku kejahatan. Bahkan, fenomena 'klithih' yang dilakukan oleh generasi remaja masih tetap berlangsung dan menimbulkan keresahan pada warga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Proses penanganan tindak kriminalitas terus diupayakan, meskipun demikian kejadian pelanggaran ketertiban dan ketentraman warga masyarakat terus terjadi, meskipun berbagai kasus tersebut mengalami penurunan. Di sisi lain, beberapa kasus yang bersifat SARA mulai meningkat seiring memanasnya isu politik dan menyambut pemilu 2019. Tindakan preventif perlu diupayakan dengan memperkuat pengetahuan dan kesadaran politik ke wargaan, dimana isu – isu politik tidak begitu saja mengalir deras ke masyarakat dan menjadikan konflik horisontal.

Urusan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan Masyarakat diukur berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI DIY tahun 2015 mencapai

angka 83,19 (dalam skala 0 sampai 100). Angka ini meningkat dibandingkan dengan IDI 2014 yang sebesar 82,71. Capaian kinerja demokrasi tersebut berada pada kategori "baik". Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori: yakni "baik" (indeks>80), "sedang" (indeks 60-80), dan "buruk" (indeks <60). Perubahan pada periode 2014-2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi, yakni :

(1) Kebebasan Sipil naik 5,82 poin (dari 84,59 menjadi 90,41);
(2) Hak-Hak Politik naik 1,64 poin (dari 76,06 menjadi 77,70); dan
(3) Lembaga lembaga Demokrasi turun 6,44 poin (dari 88,82 menjadi 82,38).

Berdasarkan nilai indeks variabel IDI pada tahun 2015, terdapat 6 (enam) variabel yang mengalami peningkatan dan 3 (tiga) variabel mengalami penurunan. Dari enam variabel yang mengalami kenaikan, tiga diantaranya meningkat cukup drastis. Kenaikan terbesar terjadi pada Indeks Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, yaitu dari kategori 'buruk' menjadi 'baik', atau dari 46,25 pada tahun 2014 menjadi 100,00 pada tahun 2015. Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah variabel peran DPRD, yang meningkat dari 50,96 pada 2014 menjadi 87,33 pada 2015. Selebihnya, indeks meningkat tidak cukup bermakna, nilai indeks relatif tetap. Indeks variabel peran peradilan yang independen, menurun sangat tajam dari 95,00 pada tahun 2014 menjadi 62,50 pada tahun 2015 atau menurun dari kategori "baik" menjadi "sedang". Penurunan nilai indeks LKPJ AMJ Gubernur 2012-2017 juga terjadi pada Variabel Kebebasan Berkeyakinan (dari 95,13 pada tahun 2014 menjadi 86,28 pada tahun 2015). Pada tahun 2015, masih terlihat masalah yakni terdapatnya kinerja indikator demokrasi kategori 'buruk' (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi, Perda yang merupakan inisiatif DPRD, dan penghentian penyidikan yang kontroversial oleh Jaksa atau Polisi.

Kesadaran warga masyarakat terhadap ketertiban dan ketentraman umum masih sangat kurang, meskipun sebagaian warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mulai bergerak membangun kesadaran masyarakat terhadap kasus-kasus warga melalui media sosial gencar dilakukan. Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta perlu memperhatikan sikap apatis warga masyarakat tersebut dengan cara memperkuat pengetahuan dan kesadaran warga terhadap ketertiban, keamanan dan tindakan preventif lainnya dengan program-program media kampanye dan sosialisasi mengenai ketertiban dan ketentraman pada warga masyarakat dan melalui kelompok komunitas.

Bahwa kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak pada jalur *circum* pasifik, serta pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia, dan terletak pada jalur gunung api aktif, yaitu Gunung Merapi, setidaknya terdapat beberapa ancaman bencana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, abrasi dan gelombang ekstrim, serta cuaca ekstrim. Oleh karena itu pengurangan resiko bencana disusun dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh melalui pengembangan penterpaduan perencanaan, kelembagaan, serta pendanaan.

Kejadian bencana di DIY pada tahun 2016 mengalami kenaikan bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 terdapat 255 kejadian bencana, kemudian pada tahun 2014 terdapat 122 bencana, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 65 kejadian, dan pada tahun 2016 ini terjadi bencana sebanyak 313, hal ini menunjukkan bahwa bencana dari tahun 2013 sampaitahun 2015 mengalami penurunan, namun pada tahun 2016 kejadian bencana di DIY mengalami peningkatan yang signifikan.

2. Bidang Ekonomi

Dalam Visi dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2017–2022 disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 488 ribu jiwa atau sekitar 13,02%. Angka ini cukup besar karena melebihi angka kemiskinan nasional sebesar 10,96%. Kalau dilihat dari distribusinya maka jumlah kemiskinan di perdesaan sebesar 16,11% atau lebih besar dari jumlah warga miskin di perkotaan (11,72%).

Kesenjangan ekonomi nampak jelas apabila dilihat secara kewilayahan dimana angka kemiskinan di wilayah bagian selatan DIY mencakup wilayah Gunung Kidul 20,83%, Bantul 15,89% dan Kulon Progo 20,64% lebih tinggi daripada wilayah bagian utara DIY yakni Sleman 9,50% dan Kota Jogja 8,67%. Fenomena ini memberikan latar belakang penting bagi prioritas pembangunan ke depan.

Semangat 'perjumpaan dan silang ekonomi' akan diletakkan sebagai strategi kebudayaan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan melalui interaksi antara pelaku ekonomi kuat dengan ekonmomi lemah, antara pelaku ekonomi perkotaan dengan pedesaan, antara pelaku ekonomi modern dengan ekonomi tradisional. Sehingga pembangunan ekonomi di samping didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Struktur perekonomian DIY apabila diukur dari distribusi PDRB atas dasar harga berlaku, menunjukkan tidak ada lapangan usaha yang dominan karena bervariasi dengan angka di bawah 15%. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar adalah industri pengolahan sebesar 13,21%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,41% dan penyediaan akomodasi dan makan minum 10,22%

3. Bidang Pembangunan

Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur struktur dasar, peralatanperalatan, instalasi instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Infrastruktur yang merujuk pada sistem fisik untuk menyediakan layanan bagi transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Pembangunan sektor infrastruktur merupakan sektor prioritas yang harus memperoleh perhatian dalam rangka mengatasi kemiskinan, disamping hal tersebut bagi para investor daya saing suatu negara dalam menarik investasi diukur dari daya tarik dan kinerja infrastruktur, baik infrastruktur dasar, sains maupun infrastruktur teknologi. Miskin dan rentannya infrastruktur suatu negara berdampak terhadap kehidupan suatu masyarakat.

Dalam agenda tahun 2019, menyikapi dampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan sebagian Kabupaten Kulonprogo sudah semestinya fokus perhatian untuk pemulihan pasca bencana, khususnya infrastruktur yang mengalami kerusakan. Konteks pemulihan infrastruktur pasca bencana menjadi penting dilakukan untuk segera terjadinya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

4. Bidang Kesejahteraan.

Bahwa secara umum kinerja Pemerintah Daerah DIY di bawah Gubernur periode 2012-2017 telah menunjukan hasil yang baik, terbukti dari 17 indikator kinerja utama hasilnya sebagian besar yakni 10 indikator dapat dicapai dengan baik. Kesepuluh indikator tersebut meliputi: derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya, angka melek huruf, persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya, angka harapan hidup, jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, opini pemeriksaan BPK, persentase peningkatan kualitas lingkungan, dan kesesuaian pemanfatan ruang terhadap RTRW Provinsi. Sementara ada 2 indikator yang tidak bisa dievaluasi tingkat ketercapaiannya, disebabkan adanya perubahan sistem perhitungan dari BPS mulai tahun 2015. Kedua indikator tersebut adalah; rata-rata lama sekolah dan indikator pendapatan perkapita.

Meskipun sebagian besar indikator kinerja utama dapat tercapai dengan baik, masih ada 5 indikator yang belum mencapai target seperti yang di canangkan dalam RPJMD 2012-2017. Kelima indikator tersebut adalah indek ketimpangan antar wilayah, indeks ketimpangan pendapatan (Gini Rasio), lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (wisman dan wisnus), dan terakhir adalah *load factor* angkutan perkotaan. Gini Rasio sampai tahun 2016 berada pada angka 0.425 yang menunjukkan kondisi ketimpangan yang berat. Kondisi ini selama lima tahun cenderung meningkat. Demikian juga indeks ketimpangan wilayah yang juga tidak banyak berubah selama 5 tahun. Indeks ketimpangan wilayah sampai tahun 2016 adalah 0,468. Masalah ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah sudah lama mendapatkan sorotan DPRD. Setiap tahun dalam penyampaian catatan dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban gubernur, DPRD selalu menyampaikan adanya ketimpangan pendapatan dan wilayah ini agar di tangani secara serius. Namun sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur 2012–2017 hasilnya belum banyak berubah. Kenaikan *product domestic regional bruto* atau PDRB perkapita yang tumbuh 3,9% per tahun masih belum merata jika dilihat dari kewilayahan. Pertumbuhan investasi dan kenaikan jumlah unit usaha masih terkonsentrasi pada perkotaan dan wilayah perbatasan dengan kota seperti wilayah Sleman dan Bantul yang berbatasan dengan kota. Hal ini terlihat dari pertumbuhan hotel, apartemen, pusat perbelanjaan yang berada di wilayah perkotaan.

Visi pembangunan jangka menengah 2012–2017 yang mencanangkan 'Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru' belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Misalnya dalam menjelaskan tentang arti kata 'Maju' yang dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata, yang dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antarwilayah masih jauh dari harapan. Dan pemerintah DIY juga menyadari bahwa masalah kesenjangan ini tidak bisa dimaklumi sebagai dampak perkembangan ekonomi dan tehnologi semata-mata. Dan solusinya juga tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar. Dalam hal ini peran pemerintah sangat menentukan untuk melakukan intervensi secara langsung. Dengan kewenangan yang dimiliki serta kemampuan keuangan daerah yang terus meningkat maka pemerintah dapat menyusun kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada penanganan masalah utama tersebut di atas.

Selain hal yang terkait indikator kinerja perlu juga di sampaikan disini tentang kondisi umum DIY dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan selama lima tahun menunjukan kecenderungan menurun dari angka 15,9% pada tahun 2012 terus berkurang menjadi 15,0% (2013) 14,6% (2014) 13,2% (2015) dan 13,1% di tahun 2016. Dilaporkan bahwa terdapat 488.830 penduduk miskin di tahun 2016 dari total penduduk DIY tahun 2016 diperkirakan berjumlah 3.720.191 jiwa. Jika di rata-rata angka penurunan kemiskinan selama lima tahun adalah 0,56% per tahun. Dan perlu diketahui bahwa angka kemiskinan tahun 2016 menggunakan standar garis kemiskinan acuan BPS yaitu Rp360.169 per kapita per bulan berdasar data bulan September 2016. Dan angka kemiskinan DIY tersebut masih di atas angka nasional yang sebesar 10,7%. Kondisi kemiskinan DIY perlu di sikapi secara serius disebabkan bahwa kondisi kemiskinan ini berdampak pada indikator kinerja urusan lainnya seperti kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak.

Tahun 2019 merupakan tahun kedua periode Gubernur DIY 2017–2022. Gubernur DIY telah menyampaikan komitmen untuk mengatasi berbagai masalah utama yang masih belum berhasil ditangani pada periode sebelumnya seperti masalah kemiskinan dan kesenjangan sebagaimana di sampaikan dalam pidato di hadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD pada tanggal 14 September 2017. Pidato dibacakan oleh Gubernur DIY perode 2017–2022, Hamengku Buwono X dengan judul 'Menyongsong Abad Samudra Hindia Untuk Kemulian

Martabat Manusia Jogja'. Dalam kesempatan tersebut disampaikan oleh Gubernur bahwa berdasar data BPS tahun 2015 kesenjangan nampak jelas apabila dilihat secara kewilayahan imana angka kemiskinan di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta yang mencakup Gunungkidul (20.83%), Bantul (15.89%) dan Kulonprogo (20.64%) lebih tinggi dibanding dengan Wilayah Bagian Utara yakni Sleman (9.5%) dan Kota Yogyakarta (8.67%). Fakta tersebut memberikan gambaran yang penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode jabatan Gubernur 2017–2022 harus memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan terutama wilayah Bagian Selatan Yogyakarta.

4.4.3 Rekomendasi dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY

1. Bidang Pemerintahan

a. Urusan Ketertiban, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Persoalan ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat menjadi populer. Peningkatan angka kriminalitas di Daerah Istimewa Yogyakarta menaik dengan banyaknya pelaku kejahatan. Bahkan, fenomena klithih yang dilakukan oleh generasi remaja masih tetap berlangsung dan menimbulkan keresahan pada warga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Proses penanganan tindak kriminalitas terus diupayakan, meskipun demikian kejadian pelanggaran ketertiban dan ketentraman warga masyarakat terus terjadi, meskipun berbagai kasus tersebut mengalami penurunan. Di sisi lain, beberapa kasus yang bersifat SARA mulai meningkat seiring memanasnya isu politik dan menyambut pemilu 2019. Tindakan preventif perlu diupayakan dengan memperkuat pengetahuan dan kesadaran politik ke-wargaan, dimana isu–isu politik tidak begitu saja mengalir deras ke masyarakat dan menjadikan konflik horisontal.

Urusan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan Masyarakat diukur berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI DIY tahun 2015 mencapai angka 83,19 (dalam skala 0 sampai 100). Angka ini meningkat dibandingkan dengan IDI 2014 yang sebesar 82,71. Capaian kinerja demokrasi tersebut berada pada kategori 'baik'. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori: yakni 'baik' (indeks>80), 'sedang' (indeks 60-80), dan 'buruk' (indeks <60). Perubahan pada periode 2014-2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi, yakni: (1) Kebebasan Sipil naik 5,82 poin (dari 84,59 menjadi 90,41); (2) Hak-

Hak Politik naik 1,64 poin (dari 76,06 menjadi 77,70); dan (3) Lembaga lembaga Demokrasi turun 6,44 poin (dari 88,82 menjadi 82,38).

Berdasarkan nilai indeks variabel IDI pada tahun 2015, terdapat 6 (enam) variabel yang mengalami peningkatan dan 3 (tiga) variabel mengalami penurunan. Dari enam variabel yang mengalami kenaikan, tiga diantaranya meningkat cukup drastis. Kenaikan terbesar terjadi pada Indeks Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, yaitu dari kategori 'buruk' menjadi 'baik', atau dari 46,25 pada tahun 2014 menjadi100,00 pada tahun 2015. Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah variabel peran DPRD, yang meningkat dari 50,96 pada 2014 menjadi 87,33 pada 2015. Selebihnya, indeks meningkat tidak cukup bermakna, nilai indeks relatif tetap. Indeks variabel peran peradilan yang independen, menurun sangat tajam dari 95,00 pada tahun 2014 menjadi 62,50 pada tahun 2015 atau menurun dari kategori 'baik' menjadi 'sedang'. Penurunan nilai indeks LKPJ AMJ Gubernur 2012-2017 juga terjadi pada variabel kebebasan berkeyakinan (dari 95,13 pada tahun 2014 menjadi 86,28 pada tahun 2015).Pada tahun 2015, masih terlihat masalah yakni terdapatnya kinerja indikator demokrasi kategori 'buruk' (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah: ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi, Perda yang merupakan inisiatif DPRD, dan penghentian penyidikan yang kontroversial oleh Jaksa atau Polisi.

Kesadaran warga masyarakat terhadap ketertiban dan ketentraman umum masih sangat kurang, meskipun sebagaian warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mulai bergerak membangun kesadaran masyarakat terhadap kasus-kasus warga melalui media sosial gencar dilakukan. Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memperhatikan sikap apatis warga masyarakat tersebut dengan cara memperkuat pengetahuan dan kesadaran warga terhadap ketertiban, keamanan dan tindakan preventif lainnya dengan program-program media kampanye dan sosialisasi mengenai ketertiban dan ketentraman pada warga masyarakat dan melalui kelompok komunitas.

Bahwa kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak pada jalur circum pasifik, serta pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia, dan terletak pada jalur gunung api aktif, yaitu Gunung Merapi, setidaknya terdapat

beberapa ancaman bencana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti: gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, abrasi dan gelombang ekstrim, serta cuaca ekstrim. Oleh karena itu pengurangan resiko bencana disusun dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh melalui pengembangan penterpaduan perencanaan, kelembagaan, serta pendanaan.

Kejadian bencana di DIY pada tahun 2016 mengalami kenaikan bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 terdapat 255 kejadian bencana, kemudian pada tahun 2014 terdapat 122 bencana, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 65 kejadian, dan pada tahun 2016 ini terjadi bencana sebanyak 313, hal ini menunjukkan bahwa bencana dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, namun pada tahun 2016 kejadian bencana di DIY mengalami peningkatan yang signifikan.

Rekomendasi Kebijakan

Berpijak dari berbagai kasus di atas, maka kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka arah strategis kebijakan program dan kegiatan bisa kearah penguatan pengetahuan warga masyarakat mengenai kebijakan ketentraman, ketertiban umum dan pencegahannya. Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bisa membangun program kerja tindakan preventif berupa pendidikan politik ke-wargaan bersama warga masyarakat atau kelompok komunitas yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Arah kebijakan lainnya adalah pencegahan isu-isu SARA dalam menghadapi pemilu 2019. Pendidikan politik ke-wargaan perlu diperkuat untuk meredam isu-isu SARA yang ditengarai akan muncul dalam kampanye politik Pemilu 2019 medatang dengan memperkuat pendidikan politik kebangsaan.

Rekomendasi kebijakan adalah :

1) Pencegahan dengan tindakan preventif, penanganan kasus, dan Pengurangan kasus kenakalan remaja atau disebut 'klithih' di Yogyakarta;
2) Penanganan, pengurangan isu SARA dan konflik horisontal dampak isu SARA;
3) Pendidikan politik kewargaan dengan penguatan pilar-pilar kebangsaan;
4) Pendidikan politik menghadapi pemilu 2019 dengan tujuan peningkatan pengetahuan politik dan ideologi kebangsaan;

5) Penguatan kohesivitas sosial ke-wargaan dengan kegiatan-kegiatan kesetiakawanan sosial;
6) Memperkuat keterampilan warga dalam mengahadapi bencana dengan memperbanyak desa tangguh bencana;
7) Membangun sistem informasi penanggulangan bencana yang aksesebel oleh masyarakat.

Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

b. Urusan Pertanahan

Persoalan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi cukup kompleks ketika Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 ditetapkan. Beberapa aset strategis pemerintah daerah, hingga pemerintah daerah memiliki status kepemilikan ganda, ada yang berstatus Sultan *Ground* (SG) dan Paku Alam *Ground* (PAG), ada juga yang milik pemerintah. Namun demikian, proses pemanfaatan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup jelas, dimana pemerintah daerah hingga pemerintah desa memanfaatkan tanah tanah tersebut untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum.

Konflik pertanahan berpotensi muncul jika peraturan daerah mengenai pertanahan tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan kebutuhan perkembangan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti diketahui, salah satu amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengatur tentang pertanahan dan tata ruang keistimewaan Yogyakarta. Artinya, kepentingan dalam pengaturan kebijakan pertanahan harus sesuai dengan beberapa kebijakan pemerintah pusat, seperti peruntukan pertanahan hingga rencana tata ruang dan tata kawasan.

Upaya pencapaian target dalam urusan pertanahan yakni bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penataan pemanfaatan tanah, pengawasan dan izin pengelolaan tanah kas desa, penyelesaian konflik-konflik pertanahan sampai dengan fasilitasi penetapan izin lokasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kegiatan Pendaftaran SG dan PAG sifatnya berkelanjutan, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 telah didaftarkan sebanyak 4.098 bidang dan telah terbit sebanyak 2.070 sertifikat. Sedangkan Tanah Desa sampai tahun 2014 telah terbit sebanyak 8.381 sertifikat. Prediksi capaian per Mei tahun 2017 semua proses pendaftaran masih dalam tahap verifikasi berkas yang akan diajukan pendaftaran di BPN, dan LKPJ AMJ Gubernur 2012-2017 diperkirakan akan ada penambahan bidang tanah SG dan PAG yang akan didaftarkan agar memiliki kepastian hukum sebanyak 1.050 bidang. Sisanya akan menjadi target program di tahun 2018 dan 2019 sebagai keberlanjutannya.

Persoalan lainnya adalah persolan sertifikasi pertanahan. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak yang belum mempunyai sertifikat tanah. Program pengadaan sertifikasi tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta masih cukup diperlukan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkannya. Program tersebut bisa disinergiskan dengan program sertifikasi tanah yang didukung oleh pemerintah pusat.

Rekomendasi Kebijakan

Arah kebijakan daerah mengenai pertanahan hendaknya mendorong adanya pengaturan pemanfaatan dan penggunaan tanah-tanah di Yogyakarta. Mempertahankan aset tanah pemerintah desa menjadi penting sebagai bagian dari kebijakan mendorong aset desa dan pendapatan desa untuk meneruskan agenda desa membangun dengan memanfaatkan aset tanah yang selama ini dikelolanya.

Pengelolaan tata batas kawasan juga perlu diperkuat, seperti penetapan batas kawasan desa, batas-batas daerah perbatasan, hingga sosialisasi ke warga masyarakat mengenai fungsi pentingnya tata batas desa untuk mengurangi konflik antar desa, maupun konflik pada area perbatasan.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membangun sistem informasi pertanahan, dimana sistem informasi pertanahan tersebut digunakan sebagai pijakan untuk pengelolaan tanah-tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik tanah SG, PAG maupun tanah dengan peruntukan lainnya dalam tata ruang dan tata guna lahan kesepakatan. Tujuan penting penetapan kawasan diperlukan untuk mempertahankan berbagai fungsi lahan seperti untuk konservasi maupun peruntukan lainnya.

Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya mengurangi peralihan fungsi lahan produktif pertanian untuk program ketahanan pangan.

Kebijakan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dipertegas sehingga tidak banyak lahan berpindah fungsi dari sektor ketahanan pangan ke sektor lainnya.

Secara khusus, rekomendasi kebijakan urusan pertanahan adalah sebagai berikut :

1) Dilakukan pendataan tanah dan pensertifikatan tanah;
2) Subsidi sertifikasi tanah bagi warga miskin;
3) Pembuatan sistem informasi pertanahan;
4) Perlindungan lahan produktif pertanian;
5) Penyelesaian konflik atau sengketa tanah.

c. Urusan Administrasi Kependuukan Dan Pencatatan Sipil

Layanan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk catatan sipil sudah cukup baik, dimana masyarakat mendapatkan layanan administrasi untuk kependudukan. Hanya saja layanan yang berbasis E-KTP masih menyisakan masalah, dimana banyak warga masyarakat belum terlayani dengan baik. Hingga saat ini, layanan administrasi kependudukan masih mengalami kendala, dimana warga masyarakat belum sepenuhnya mendapat layanan KTP elektronik.

Permasalahan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah penduduk migran belum terdokumentasikan secara baik dan pengendalian penduduk belum optimal. beberapa catatan dari berbagai pihak, konteks layanan KTP khususnya untuk KTP elektronik juga masih banyak keluhan. Catatan-catatan tersebut menjadi masukan dan kemudian ditransformasikan menjadi usulan program-program pembangunan untuk tahun 2019.

Capaian angka indikator dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi sesuai dengan dinamika angka penduduk. Hal tersebut mungkin terjadi karena jumlah penduduk di DIY sangatlah dinamis, baik karena adanya mobilitas penduduk (pindah-datang) maupun karena adanya peristiwa kematian. Penyediaan blangko KTP-elektronik di daerah menjadi tanggung jawab penuh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Untuk mengatasi keterbatasan blangko, Dinas Dukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-elektronik bagi penduduk yang telah perekaman biometrik namun belum memperoleh KTP-elektronik. Dinas Dukcapil kabupaten/Kota dan instansi pelaksana adminduk di provinsi melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada instansi/lembaga yang penyelenggara layanan publik, bahwa kedudukan Surat Keterangan Pengganti

KTP-elektronik adalah dokumen sah dan diakui negara sebagai kartu identitas warga hingga diterbitkannya KTP-elektronik.

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih perlu memperbaiki sistem tata kelola administrasi kependudukan, khususnya layanan E-KTP. Arah kebijakan berikutnya adalah penataan proses kepindahan penduduk yang beberapa menjadi kendala status domisili. Di sisi lain, penggunaan *data base* kependudukan dengan model kebijakan satu data menjadi penting dalam acuan penggunaan dan pemanfaatan data berbasis E- KTP.

Rekomendasi Kebijakan Urusan Administrasi dan Kependudukan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan layanan pembuatan E-KTP;
2) Penyediaan *data base* E-KTP untuk semua urusan layanan pemerintah dan kebijakan publik;
3) Pengendalian kemamanan dan ketertiban melalui pendataan E-KTP.

d. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Perkembangan desa dan tata kelola desa menjadi menarik ketika pemerintah pusat memberikan banyak program ke desa sejak ditetapkannya UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan propinsi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka dalam perumusan kebijakan harus memperhatikan pemenuhan standar minimal di desa, penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam menyusun dokumen perencanaan desa dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Permasalahan lainnya adalah di perdesaan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai banyak persoalan, mulai dari angka kemiskinan tinggi, minimnya infrastruktur pedesaan, hingga minimnya akses masyarakat desa terhadap pengembangan ekonomi. Dengan demikian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan dan perbaikan layanan publik di desa untuk memberikan kesempatan bagi desa bertumbuh.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan dengan cara membangun azas

subsidiarity kepada pembangunan pedesaan agar masyarakat desa mampu memanfaatkan infrastruktur pedesaan untuk kemandirian ekonomi lokal.

Rekomendasi dan Kebijakan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong desa untuk bisa segera tumbuh, berkembang dan mampu mandiri dalam mengelola tata pemerintahan desa. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakannya adalah memperkuat aparatur pemerintah desa dengan program pemberdayaan aparatur desa, memperkuat sistem kelembagaan desa dengan memberikan fasilitas *software* pengelolaan desa seperti Sistem Informasi Desa (SID), membuka aksesbilitas desa dan masyarakat desa dalam pengembangan ekonomi seperti perbank-kan, memperkuat pembangunan infrastruktur di desa, memperkuat produk-produk masyarakat desa dengan membuka permodalan hingga pasar, dan pemberdayaan sumberdaya manusia pedesaan.

Rekomendasi kebijakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

1) Memperkuat infrastruktur pedesaan, khususnya bagi desa-desa tertinggal dan mempunyai angka kemiskinan tinggi;
2) Melakukan pemberdayaan aparatur desa;
3) Mendorong adanya *data base* pemerintahan desa satu atap untuk tingkat kabupaten agar bisa terpantau pembangunan pedesaan;
4) Membangun aksesbilitas ekonomi masuk ke desa.

e. Komunikasi dan Informatika

Daerah Istimewa Yogyakarta sejak dulu dikenal sebagai daerah yang melakukan inovasi dalam melakukan terobosan layanan publik dan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi. Banyak daerah lainnya melakukan studi banding ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian menerapkannya. Namun dalam pengembangannya, Daerah Istimewa Yogyakarta bisa saja mengalami ketertingalan karena daerah lain banyak melakukan investasi dalam bidang komunikasi dan informatika dalam membangun kebijakan pembangunan daerah.

Penggunaan teknologi informatika seharusnya sudah menjadi bagian penting dalam pengembangan tata pemerintahan, mulai dari administratif hingga dalam konteks penggunaan informasi sebagai bentuk implementasi regulasi seperti pengadaan barang dan jasa.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta ketersediaan informasi kepada masyarakat dapat tercapai pada akhir tahun 2017. Standardisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang mengacu pada ISO SNI 27001:2013 telah berhasil diraih pada tahun 2016 dan akan dipertahankan di tahun 2017. Kualitas standar pelayanan TIK melalui sertifikasi manajemen mutu ISO 9001 saat ini juga sedang dalam proses audit internal, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2017 dapat tercapai. Pada akhirnya, dengan standardisasi sistem manajemen keamanan informasi dan standardisasi manajemen mutu, akan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2018, target tersebut bisa ditingkatkan dan 2019 menjadi meningkat lebih baik lagi.

Sisi lain penggunaan teknologi informasi adalah memperdekat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan informasi teknologi bisa seperti sistem *data base* yang terintegratif dalam semua perencanaan pembangunan, hingga pengembangan sistem informasi satu atap yang sekarang ini lebih menggunakan data spasial sebagai *basic* data informasi.

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan berbagai model penggunaan sistem informasi *data base* dan aksesebel terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan kebijakan dan informatif terhadap *stakeholders* dan masyarakat.

Pembangunan sistem informasi tersebut bisa langsung dalam bentuk pengembangan *data base* yang terpusat, dan mulai merambah ke android sistem sehingga masyarakat langsung aksesebel terhadap sistem informasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rekomendasi Kebijakan Urusan Komunikasi dan Informatika :

1) Pembaruan program-program sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah D.I. Yogyakarta ke dalam sistem informasi yang lebih baru dan terupdate untuk memenuhi perbaikan layanan publik;
2) Peningkatan layanan pemerintah daerah melalui *E-Governance*;
3) Perluasan layanan informasi hingga ke pedesaan.

f. Persandian

Pada tahun 2019, Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengikuti pemilu serentak. Pengembangan persandian menjadi penting untuk menjaga stabilisasi Pemerintah Daerah. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan maka diperlukan peningkatan kapasitas pertahanan, serta stabilitas keamanan dan ketertiban, yang antara lain dapat terwujud melalui penyelenggaraan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi, milik pemerintah atau Negara, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2015-2019, yang diarahkan pada sasaran "Terjaminnya layanan sistem keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara (*information assurance*)".

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Daerah terus mengupayakan pemberdayaan aparatur negara dalam mendorong kemampuannya dalam bidang persandian. Pemerintah Daerah perlu mendukung upaya-upaya perbaikan penggunaan teknologi dalam upayanya memperbaiki kinerja persandian.

Rekomendasi Kebijakan Urusan Persandian:

1) Memperkuat kinerja persandian daerah dengan pihak pihak terkait;
2) Memperkuat sumberdaya untuk pengamanan persandian.

g. Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan meliputi: (1) perencanaan; (2) keuangan; (3) kepegawaian; (4). pendidikan dan pelatihan; (5) penelitian dan pengembangan; dan (6) fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Beberapa persoalan muncul mengenai pelaksanaan fungsi penujang urusan pemerintahan seperti belum maksimalnya layanan publik, kebijakan daerah yang belum berpihak, hingga pada kepuasan masyarakat terhadap kebijakan dan implementasi pembangunan daerah.

Khusus mengenai pemberdayaan desa yang sedang menguat, perhatian pemerintah daerah terhadap tema menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah perlu diperkuat karena banyak persoalan di desa seperti persoalan layanan dasar, minimnya pertumbuhan ekonomi, hingga kemampuan desa untuk bertumbuh dalam era otonomi daerah.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Pengawasan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi . Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan: melalui kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin; dan pengawasan prioritas dalam pengawalan Reformasi Birokrasi; dan penegakan Integritas;

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, maka diperlukan pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang dan subbidang urusan pemerintahan. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Review Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pembentukan produk hukum daerah yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus. Guna mewujudkan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang responsif, akomodatif dan akuntabel, agar dapat memberi dampak positif terhadap kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta pelayanan secara cepat, murah dan lebih baik;

Evaluasi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mengetahui efektifitas tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah, penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah

Pembangunan desa menjadi penting karena persoalan masyarakat langsung ada di desa. Persoalan kemiskinan, kesenjangan infrastruktur, layanan publik hingga tata pemerintahan desa untuk menjadikan agenda desa membangun tercapai. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pemerintahan desa dengan memperbaiki pola administrasi pemerintahan desa satu atap dan *linkage* di setiap kabupaten bahkan bisa sampai pada tingkat D.I. Yogyakarta.

Mendorong desa sebagai ujung tombak pembangunan dengan meningkatkan azas *subsidiarity* bagi desa dan perbaikan layanan publik di desa.

Rekomendasi kebijakan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan :

1) Meningkatkan pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah;
2) Penguatan aparatur daerah;
3) Evaluasi organisasi pemerintah daerah untuk menngkatkan layanan publik.

h. Urusan Keistimewaan Yogyakarta (Otonomi Khusus)

Urusan Keistimewaan Yogyakarta menjadi penting karena menjadi amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana masih banyak regulasi yang belum terselesaikan untuk mempercepat program-program Keistimewaan Yogyakarta atau otonomi khusus sehingga masih menyisakan beberapa persoalan kebijakan yang mendukung terlaksananya program-program Keistimewaan Yogyakarta. Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam program/kegiatan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan pelaksanaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut berazas pada tujuan keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU 13 Tahun 2012 yakni: (1) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2)

Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) Menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Tujuan mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat serta mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke- bhinneka tunggal ika-an dalam kerangka NKRI merupakan agenda penting dalam pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut menjadi perhatian bersama, karena Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini menghadapi masalah publik berupa tingginya angka kemiskinan, meningkatnya kesenjangan antarkelompok pendapatan dan kesenjangan antarwilayah, serta dinamika masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang plural sebagai rumah berbagai suku bangsa di Indonesia. Oleh karenanya, Daerah Istimewa Yogyakarta ialah melting pot Indonesia Kecil dengan berbagai persoalan publiknya. Dalam implementasinya, tujuan penting dari agenda pembangunan kesejahteraan serta upaya pewujudan perbaikan tata kelola pemerintahan *(governance)* dan tatanan sosial yang mengayomi seluruh masyarakat tidak boleh terlewatkan.

Perwujudan dari ketepatan pelaksanaan program/kegiatan terhadap tujuan dan prioritas untuk menyejahterakan masyarakat menjadi suatu keharusan. Berkenaan dengan hal tersebut, program/kegiatan Urusan Keistimewaan D.I. Yogyakarta LKPJ AMJ Gubernur 2012-2017 tahun 2013- 2017 dilaksanakan lebih tepat sasaran, terukur, berorientasi hasil, berkesinambungan, integratif, tematik, dan kolektif kolegial sesuai kewenangan maupun kewilayahan. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan dari tahun ke tahun diletakkan sebagai suatu implementasi Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan kewenangan tersebut yang akuntabel. Perdais yang menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Selain memperhatikan ketentuan dalam Perdais, pelaksanaan kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggunakan pendekatan nilai dasar keistimewaan dan semangat *Renaissance* Yogyakarta. Nilai dasar Keistimewaan yang dimaksud ialah filosofi inti yakni Hamemayu Hayuning Bawana,

Sangkan Paraning Dumadi, dan *Manunggaling Kawulo Gusti, Hamemayu Hayuning Bawana* yang menggambarkan keseimbangan spiritual dan material serta keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat menuju kesejahteraan lahir maupun batin. Sementara itu, semangat *Renaissance* Yogyakarta merepresentasikan semangat kolektif untuk 'gumrégah' (bangkit kembali) terus berbenah mengikuti perkembangan zaman dalam peradaban yang unggul dengan strategi yang memperioritaskan bidang :

(1) Pendidikan; (2) Pariwisata; (3) Teknologi; (4) Ekonomi; (5) Energi; (6) Pangan; (7) Kesehatan; (8) Keterlindungan Warga; dan (9) Tata Ruang dan Lingkungan.

Beberapa persoalan dalam pelaksanaan Keistimewaan D.I. Yogyakarta atau otonomi khusus adalah mengenai regulasi daerah dalam bentuk peraturan daerah turunan dari Undang-Undang Keistimewaan D.I. Yogyakarta belum selesai semuanya hingga tahun 2017.

Rekomendasi Kebijakan

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi khusus, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 arah kebijakan adalah Penguatan regulasi pendukung urusan-urusan keistimewaan D.I. Yogyakarta.

Pembangunan keistimewaan di Daerah Istimewa disusun dengan berlandaskan semangat keistimewaan yang meliputi Sangkan Paraning Dumadi, Hamemayuning Bawana, Manunggaling Kawulo Gusti. Semangat keistimewaan tersebut memaknai beberapa aspek pembangunan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu dalam pembangunan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu berbagai usaha dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan berbasis budaya, penataan kawasan budaya pendukung keistimewaan, penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

Rekomendasi Kebijakan Urusan Keistimewaan Yogyakarta (Otonomi Khusus) :

1) Menyelesaikan regulasi yang mendukung implementasi UU Keistimewaan D.I. Yogyakarta;
2) Memperkuat nilai kebudayaan lokal Yogyakarta ke dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta;

3) Membangun pusat kebudayaan di kampung dan di dusun sebagai pusat pegembangan kebudayaan lokal Yogyakarta;
4) Meningkatkan tertib administrasi pertanahan;
5) Menyeleraskan program Keistimewaan D.I. Yogyakarta dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat

i. Penanganan Bencana

D.I. Yogyakarta termasuk katagori daerah rawan bencana. Keberadaan Gunung Merapi merupakan potensi bencana yang setiap saat bisa terjadi dan muncul. Status kebencanaan Gunung Merapi sendiri merupakan status bencana Nasional. Potensi bencana lainnya adalah bencana alam lokal seperti tanah longsor, banjir, kebakaran ataupun bentuk bencana lainnya. Kejadian bencana di DIY pada tahun 2016 mengalami kenaikan bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 terdapat 255 kejadian bencana, kemudian pada tahun 2014 terdapat 122 bencana, sedangkan pada tahun2015 terdapat 65 kejadian, dan pada tahun 2016 ini terjadi bencana sebanyak 313, hal ini menunjukkan bahwa bencana dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, namun pada tahun 2016 kejadian bencana di DIY mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2013 bencana alam yang terjadi didominasi oleh angin kencang sebanyak 186 kejadian, kemudian bencana tanah longsor dengan jumlah kejadian sebanyak 35, selanjutnya bencana banjir dengan jumlah 15 kejadian, dan kejadian gempa bumi 3 kejadian. Solusi untuk penanggulangan bencana alam pada tahun 2013 adalah menyusun peta risiko bencana juga analisis risiko bencana, mengembangkan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, melaksanakan wajib latih bagi aparat dan masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana dan mengembangkan sistem peringatan dini baik yang berisi informasi hulu sampai penjangkauan informasi tersebut sebagai aksi tindak bagi masyarakat yang diidentifikasi akan terkena dampak bencana (ancaman erupsi gunung merapi, tsunami, tanah longsor, epidemi, kekeringan, banjir).

Bencana alam yang terjadi pada tahun 2014 meliputi angin kencang sebanyak 70 kejadian, kemudian bencana tanah longsor dengan dengan total 9 kejadian, sedangkan bencana gempa bumi terjadi sebanyak 8 kejadian, dan kejadian kebakaran hutan terjadi sebanyak 8 kejadian. Melihat kejadian 168 LKPJ AMJ Gubernur 2012-2017 bencana di DIY nampak bahwa yang menjadi prioritas dan perlu koordinasi yang lebih matang adalah pada kejadian bencana tanah longsor dan angin kencang. Bencana alam di DIY pada tahun 2015 yaitu bencana angin

kencang dengan 18 kejadian, kemudian bencana banjir ada 1 kejadian, selanjutnya bencana kekeringan terjadi 3 kejadian, kebakaran hutan terjadi sebanyak 21 kerjadian, sedangkan tanah longsor terjadi sebanyak 13 kejadian, dan bencana gempa bumi terjadi sebanyak 9 kejadian di DIY. Kejadian bencana alam yang masih terjadi di DIY pada tahun 2016 adalah angin kencang dengan jumlah 130 kejadian, kemudian bencana tanah longsor ada 70 kejadian dengan 2 korban meninggal akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Kulon Progo, dan bencana kebakaran sebanyak 18 kejadian. Kejadian bencana alam di DIY sepanjang tahun 2016 akibat adanya perubahan cuaca ekstrim. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan suhu dan fenomena *La Nina* di wilayah Samudera Pasifik serta adanya pusat tekanan rendah di perairan utara Australia. Menurut perkiraan BMKG fenomena *La Nina* akan terus berlangsung hingga Maret 2017

Rekomendasi Kebijakan

Pada prinsipnya bahwa Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana/kebakaran memerlukan pertolongan, dan menerima layanan sesuai standar. Selain itu bahwa setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan).

Pemerintah daerah tetap melakukan fasilitasi kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar. Rekomendasi lainnya adalah mendorong pengetahuan dan penanggulangan resiko bencana kepada masyarakat secara luas dengan membentuk kader-kader tanggap bencana pada setiap desa/kelurahan maupun organisasi masyarakat berbasis komunitas tanggap bencana.

Rekomendasi Kebijakan Urusan Penanganan Bencana:

1) Menambah jumlah desa tangguh bencana;
2) Memperkuat komunitas masyarakat untuk terlibat dalam program kebencanaan;
3) Menambah fasilitas alat-alat pengurangan resiko bencana;
4) Membangun sistem informasi kebencanaan yang akseseble kepada masyarakat luas.

2. BIDANG EKONOMI

a. Urusan Pariwisata

Visi pariwisata DIY sebagai daerah wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025 harus diwujudkan dengan langkah–langkah strategis. Persaingan industri wisata sangat ketat, baik di tingkat global maupun regional. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara telah mengembangkan wisatanya. Thailand yang penduduk muslimnya minoritas saja menunjukkan perhatian serius terhadap industri wisata halal sehingga Thailand mendapat julukan 'dapur halal'-nya Asia Tenggara. Sementara daerah–daerah lain juga sudah mengembangkan pariwisatanya dengan kreatif. Hal ini menuntut inovasi dan kreativitas pelaku wisata DIY sehingga mempunyai daya saing yang unggul.

Sektor pariwisata memiliki peran penting perkembangan ekonomi DIY karena dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapat masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Untuk itu pengembangan sektor pariwisata perlu dilakukan secara terarah dan terpadu sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan meningkatkan jumlah belanja wisatawan.

Kesadaran masyarakat akan potensi wisata di DIY sangat besar sehingga jumlah desa wisata, destinasi wisata, atraksi wisata berkembang pesat. Masyarakat bergotong-royong untuk menggali potensi yang ada dengan segala keterbatasannya. Namun sarana dan prasarana belum memadai seperti jalan menuju tempat wisata, ketersediaan fasilitas umum, akses transportasi yang masih sulit.

Rekomendasi Kebijakan

Wisatawan adalah pangsa pasar yang besar, sementara daerah wisata merupakan aset potensial. Pemerintah mempunyai peran penting dalam menggali potensi dan mempertemukan dengan pasar yang sudah datang ke DIY, sehingga dapat menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan Urusan Pariwisata sebagai berikut:

1) Penguatan kembali visi pariwisata DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di asia tenggara pada tahun 2025 dengan merancang *roadmap*, mempertajam misi-misi nyata, menata strategi, membuat inovasi yang kreatif sehingga dapat mewujudkannya;

2) Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal sehingga berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal dan pengentasan kemiskinan terutama di daerah pesisir selatan;
3) Pembangunan sarana prasarana jalur pariwisata serta mengembangkan jaringan intermoda yang menghubungkan kawasan pariwisata.

b. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

DPRD DIY mendorong Pemerintah D.I. Yogyakarta agar pada tahun 2019 ini koperasi dan UKM mampu dikembangkan dalam berbagai aspek diantaranya permodalan, pemasaran dan pengembangan manajemen serta kapasitas sumber daya manusia. Hal ini penting mengingat ketiga hal tersebut merupakan kunci kemajuan koperasi dan UKM di D.I. Yogyakarta. Disamping itu upaya-upaya dan program perlindungan dan pengembangan usaha ke pasar internasional harus menjadi perhatian sehingga mampu bersaing pada pasar bebas. Kita ketahui bersama pemerintah pusat telah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas pada forum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan APEC.

Rekomendasi Kebijakan

Perkembangan jumlah koperasi aktif di DIY dalam 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan sebesar 84 unit per tahun, namun dari segi permodalan mengalami penurunan baik pada jumlah modal sendiri maupun modal luar. Jumlah UMKM juga mengalami peningkatan sebesar 3,73% namun demikian jumlah pelaku UMKM ini masih sangat kecil dibanding jumlah penduduk. Peran UMKM ini dalam perekonomian DIY ini sangat penting dalam menekan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Rekomendasi Kebijakan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1) Meningkatkan jumlah pelaku UMKM sehingga jumlah wirausahawan mencapai 10% dari jumlah penduduk DIY.
2) Peningkatan kualitas produk dan pendampingan fasilitasi sertifikasi produk seperti PIRT, sertifikasi halal, MD, paten dll.
3) Mengembangkan kemitraan dengan perusahaan, perbankan, BUMN atau lembaga lainnya dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan CSR di bidang koperasi dan UMKM.

c. Urusan Perindustrian

Sektor IKM memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah produk-produk DIY dan penyerapan tenaga kerja. Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan sekitar 13.21% dalam struktur PDRB DIY. Sehingga sektor IKM sebagai jantung perekonomian semestinya mendapatkan perhatian karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan perindustrian adalah kemampuan teknologi IKM yang masih tertinggal sehingga kualitas produk belum memenuhi standard. Akibatnya produk tidak mempunyai daya saing yang kuat di pasaran.

Keterbatasan bahan baku lokal mengakibatkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dan impor dari luar negeri, sehingga mengurangi produktivitas. Ketergantungan ini harus dikurangi dengan mengoptimalkan bahan baku lokal.

Rekomendasi Kebijakan

Potensi Sumber Daya Alam di DIY sangat sedikit tetapi potensi Sumber Daya Manusia sangat besar sehingga sektor industri keatif sangat cocok dikembangkan di DIY. Perhatian pemerintah daerah terhadap pertumbuhan industri kreatif sangat kurang padahal sektor ini sangat strategis dan potensial bagi DIY.

Rekomendasi kebijakan untuk urusan perindustrian sebagai berikut :

1) Pemerintah DIY menyusun potensi dan program besar pengembangan industri kreatif sehingga DIY menjadi kiblat ekonomi kreatif di Indonesia;
2) Perlu dikembangkan industry teknologi tinggi (seperti *silicon valley*) di DIY untuk menampung tenaga kerja ahli IT yang terdidik;
3) Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pengembangan industri terutama industri kreatif;
4) Melakukan inovasi terhadap produk produk khas yang menunjang keistimewaan DIY di bidang kebudayaan seperti wayang, gamelan, pakaian adat, dan lain-lain.

d. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor strategis karena mampu memberikan kontribusi sebesar 10,22% terhadap PDRB DIY. Sektor perdagangan ini sangat dipengaruhi oleh tingginya minat wiatawan datang ke DIY sehingga berdampak

positif kepada akomodasi dan konsumsi (makan minum) yang meningkat. Kinerja perdagangan juga ditunjukkan dengan pertumbuhan nilai ekspor yang mengalami kenaikan. Komoditas utama ekspor masih bertumpu pada pakaian jadi, mebel kayu, sarung tangan kulit dan minyak atsiri.

Namun demikian kesadaran masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri juga masih rendah, sehingga kalah bersaing dengan barang-barang import. Kualitas dan branding barang dalam negeri harus ditingkatkan sehingga meningkatkan nilai tambah dan menarik konsumen.

Rekomendasi Kebijakan

Seiring dengan tingginya minat wisatawan ke DIY, maka seharusnya urusan perdagangan dapat tumbuh pesat karena kebutuhan wisatawan yang meliputi akomodasi dan konsumsi sangat tinggi sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Rekomendasi kebijakan pada urusan perdagangan sebagai berikut :

1) Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan agar kebutuhan konsumsi wisatawan semaksimal mungkin dapat dipenuhi sendiri oleh para pelaku usaha DIY sehingga penduduk DIY dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri;
2) Intensifikasi dan ekstensifikasi produk ekspor. Dengan adanya program ini akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran;
3) Mewujudkan infrastruktur yang menunjang peningkatan ekspor;

Revitalisasi pasar tradisional agar lebih ditingkatkan karena dengan pasar yang bagus dan tertata, minat masyarakat untuk belanja di pasar tradisonal akan meningkat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

e. Urusan Penanaman Modal

Investasi sangat dibutuhkan agar pertumbuhan ekonomi meningkat. Di samping itu dengan adanya investasi akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi angka penganguran dan menekan angka kemiskinan.

Dalam 5 tahun terakhir ini penanaman modal mengalami pertumbuhan positif, namun pertumbuhan tersebut sangat tidak merata terbukti 72,67% dari total investasi PMDN di Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kota Jogja dan Kabupaten Sleman mencapai yang 109 unit perusahaan. Hal ini sangat

berpengaruh pada indeks ketimpangan antarwilayah. Seharusnya Pemerintah DIY dapat berkoordinasi denga pemkab/kota untuk menata investasi ini. Jenis penyumbang investasi terbesar di DIY seperti jasa rekreasi, industri pengolahan es krim, industri *furniture* dan pengolahan susu dapat diarahkan ke kabupaten di pesisir selatan.

Nilai Investasi perusahaan PMA juga sangat bagus namun besarnya investasi ini tidak signifikan dengan kenaikan angkatan kerja karena hanya mampu menyerap 56,46% dari jumlah tenaga kerja yang dijanjikan investor.

Rekomendasi Kebijakan

Seharusnya tren iklim investasi di DIY mengalami kenaikan karena situasi sosial cukup kondusif, sarana prasarana sudah memadai, infrastruktur sudah meningkat, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan perizinan mendapat nilai A (sangat baik). Namun kenyataannya justru pertumbuhan investasi pada tahun 2016 sangat rendah, untuk itu Pemerintah Daerah harus segera mengevaluasi kebijakan penanaman modal ini agar meningkat kembali pada tahun yang akan datang.

Rekomendasi kebijakan urusan Penanaman Modal sebagai berikut :

1) Membuat rencana induk penanaman modal di DIY yang berbasis pada potensi daerah di kabupaten.
2) Pemerataan investasi penanaman modal terutama di pesisir selatan yaitu di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.
3) Memprioritaskan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja.

f. Urusan Pertanian

Setiap tahun Pemerintah Daerah DIY mengeluhkan semakin berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Di sisi lain, ada keterbatasan lahan untuk membuka areal baru. Menyikapi hal tersebut, Pemda DIY diharapkan mau dan mampu mengambil langkah-langkah nyata untuk menyelamatkan sektor pertanian sebagai andalan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada periode 2013–2017, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DIY adalah sebesar 11,88%. Ini berarti bahwa sektor pertanian masih tetap menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi. Stabilitas pertumbuhan produksi pertanian tetap terjaga dengan baik. Akan tetapi, peningkatan produksi tanaman pangan belum memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani

itu sendiri. Sumbangsih besar para petani terhadap PDRB DIY sesungguhnya tidak dirasakan langsung oleh mereka. Padahal sektor pertanian adalah sumber pendapatan utama rumah tangga pedesaan. Oleh karena itu, Pemda DIY harus lebih fokus untuk turut meningkatkan pendapatan petani, terutama para petani miskin yang berpendapatan rendah. Sebab kalau tidak, petani dan keluarganya akan tetap miskin. Lebih jauh dari itu, anak-anak petani pasti tidak akan mau mengikuti jejak orang tua mereka untuk menggeluti sektor pertanian. Karena dinilai tidak menjanjikan sebagai sandaran penopang hidup mereka.

Pengembangan agro industri adalah suatu ikhtiar yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk meningkatkan pendapatan petani. Teknologi agro industri pedesaan yang sekarang sudah ada perlu dilakukan peningkatan dan penguatan untuk mengoptimalkan hasilnya. Kepada para petani harus diberikan bantuan sarana produksi yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka.

Ada sejumlah produk makanan olahan yang banyak diproduksi, bahkan menjadi icon DIY, bahan bakunya belum bisa dicukupi sendiri oleh DIY. Nangka sebagai bahan dasar utama gudeg, kacang hijau sebagai bahan dasar bakpia, singkong sebagai bahan dasar geblek, kripik, serta gatot dan thiwul, dicukupi dengan mendatangkan dari daerah lain. Secara bertahap, bahan-bahan baku seperti di atas mestinya bisa dicukupi sendiri oleh petani DIY. Selain memudahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang sangat dibutuhkan tentu saja juga akan meningkatkan kesejahteraan para petani.

Terkait dengan rendahnya peningkatan populasi ternak, Pemda DIY perlu mendorong kapasitas peternak yang ada dengan meningkatkan serta mengintensifkan peran para penyuluh. Monitoring terhadap KUBE dan Kelompok Ternak harus juga dilakukan secara intensif. Bantuan bibit ternak kepada petani miskin dan rumah-rumah tangga miskin perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mereka, dan sekaligus dapat ikut meningkatkan produksi ternak. DIY harus juga bisa memiliki sentra-sentra budidaya pakan hijau ternak, agar bisa setiap saat mencukupi kebutuhan pakan ternak. Selain itu perlu dilakukan upaya yang lebih baik lagi dalam menanggulangi penyakit A1 pada ternak unggas.

Rekomendasi Kebijakan

Terkait dengan beberapa hal di atas, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemda DIY, yaitu :

1) a. Menyikapi semakin terbatasnya lahan pertanian produktif, maka sudah saatnya Pemda DIY untuk merencanakan pembukaan areal baru, yang prioritas penggarapannya diberikan kepada keluarga tani miskin dan tenaga kerja muda yang berminat untuk menjadi petani;
   b. Untuk mencegah atau menekan peralihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemda DIY diminta untuk berani mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, maka alih fungsi lahan akan terus berlangsung dengan cepat;
2) Pemda DIY harus melakukan berbagai upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Sebab kesejahteraan akan berdampak pada peningkatan produktivitas;
3) Guna memberikan nilai tambah pada produk olahan hasil pertanian, Pemda DIY harus terus mendorong dan memfasilitasi para petani untuk berani melakukan inovasi;

Pemda DIY mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan populasi ternak, terutama untuk mencukupi kebutuhan masyarakat DIY sendiri.

g. Urusan Ketahanan Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan individu. Kondisi tersebut tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat setempat.

Pemda DIY dituntut untuk senantiasa mampu mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh warga masyarakat, terutama golongan miskin, dengan bertumpu pada pemenuhan sumber daya pangan lokal yang beragam melalui skema kearifan lokal.

Masyarakat dan para pelaku pengolahan pangan harus diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pangan yang bermutu dan aman, serta proses pengolahan pangan yang baik dan benar. Pemda DIY juga harus selalu melakukan pengawasan secara intensif terhadap peredaran makanan, terutama di lingkungan sekolah dan pemukiman, melalui kerjasama dengan Balai POM dan

instansi lain yang terkait. Ke depan, perlu dibuat perangkat hukum yang memungkinkan dilakukan penindakan terhadap pelanggar.

Wilayah (desa) rawan pangan di DIY harus dapat diselesaikan pada tahun 2019, seiring dengan pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan. Ketersediaan dan distribusi pangan harus dijamin secara merata. Selain itu tentu saja konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman). Upaya sungguh-sungguh untuk mengentaskan desa rawan pangan akan berimplikasi positif pada pengurangan jumlah penderita gizi buruk dan gizi kurang yang saat ini angkanya masih cukup tinggi.

Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang mantap dan didukung oleh SDM yang handal. Upaya pengembangan SDM perlu lebih dioptimalkan. SDM berperan sangat penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan pelaksanaan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan. Keberadaan penyuluh dan program penyuluhan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

Rekomendasi Kebijakan

Sesungguhnya DIY memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, mudah dijangkau untuk melakukan distribusi pangan sampai ke rumah-rumah tangga. Persediaan cadangan pangan pun cukup. Sehingga mestinya bisa mengatasi masalah rawan pangan.

Ada beberapa kebijakan yang direkomendasikan yaitu :

1) Pemda DIY perlu lebih bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan kasus rawan pangan, karena berdampak langsung pada derajat kesehatan masyarakat, terutama gizi buruk;
2) Pemda DIY perlu menginisiasi lahirnya Peraturan Gubernur tentang Pengawasan produksi dan peredaran makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi;
3) Pemda DIY mendorong dan memfasilitasi perkembangan industri pangan berbasis sumber daya lokal;
4) Perlu peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh.

h. Urusan Kelautan dan Perikanan

Harus diakui bahwa produksi perikanan budidaya terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi peningkatan tersebut tetap belum mampu untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi ikan untuk masyarakat DIY. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Hal lain tentu saja harus terus diupayakan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan mendorong peningkatan kemampuan petani ikan, memperluas lahan, pengadaan benih yang berkualitas, dan penyediaan pakan dengan harga yang terjangkau.

Selain memperluas lahan budidaya ikan di kolam, perlu juga dilakukan optimalisasi budidaya ikan di tambak, sawah, jaring apung dan telaga. DIY memiliki potensi yang cukup baik untuk peningkatan produksi perikanan budidaya.

Di sisi lain, produksi perikanan tangkap seringkali mengalami fluktuasi. Selain karena masalah alam (cuaca), juga dipengaruhi oleh terbatasnya kemampuan nelayan untuk mengoperasikan kapal ikan bernotase besar. Oleh karena itu, para nelayan kita harus terus ditingkatkan kapasitasnya. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng harus dioptimalkan. Dan secara bertahap perlu dilakukan penambahan kapasitas pelabuhan.

Belum semua masyarakat DIY menyadari bahwa ikan adalah salah satu sumber gizi yang baik untuk pertumbuhan. Oleh karena itu perlu sosialisasi dan promosi harus terus digalakkan pada masyarakat luas. *Output* yang diharapkan adalah bahwa masyarakat DIY semakin gemar mengkonsumsi ikan. Secara nasional, angka konsumsi ikan saat ini adalah 41 kilogram perkapita. Pada tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan angka konsumsi ikan nasional meningkat hingga 55 kilogram perkapita. DIY diharapkan juga dapat mencapai angka tersebut.

Rekomendasi Kebijakan

Kemampuan nelayan di DIY umumnya dapat dikatakan masih nelayan pantai, belum nelayan samudera. Kemampuan untuk menangkap ikan baru di sekitar wilayah pantai, belum berani menjelajahi laut lepas. Hal ini menyebabkan tidak dapat memaksimalkan hasil tangkapan. Di sisi lain, nelayan DIY belum mampu secara mandiri untuk mengoperasionalkan kapal dengan bobot 30 GT ke atas.

Potensi perikanan budidaya pun belum bisa dioptimalkan oleh para petani ikan kita, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Terhadap urusan kelautan dan perikanan terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang diusulkan, yaitu:

1) Pemda DIY harus terus mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas nelayan;
2) Potensi perikanan budidaya harus terus dioptimalkan, termasuk melakukan revitalisasi dan penambahan areal tambak udang di wilayah pesisir;
3) Mempercepat beroperasinya Pelabuhan Tanjung Adikarto, dan lebih mengoptimalkan kapasitas Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng.

i. Urusan Kehutanan

Hutan yang lestari adalah sebuah kebutuhan, karena sangat penting dalam menjaga kondisi fungsi hidrologis wilayah dan mendukung keberlangsungan hidup ekosistem yang berkelanjutan. Pengelolaan hutan harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi yang terintegrasi. Pendekatan lingkungan adalah bagaimana hutan tetap terjaga fungsi ekologisnya, dengan terus melakukan rehabilitas hutan dan lahan di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan.

Sementara pendekatan sosial budaya adalah bagaimana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan, yaitu memberikan fasilitasi untuk dapat melakukan tanaman tumpang sari di kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Masyarakat diberi tanggungjawab untuk ikut mengamankan hutan. Sedangkan pendekatan ekonomi adalah bagaimana membuat program dan kegiatan yang dapat terus meningkatkan produksi hasil hutan.

Hutan harus terus berkembang dan dinamis dengan *flora* dan *fauna* yang lebih variatif, serta fasilitas pendukung yang memadai untuk optimalisasi fungsi hutan dalam perbaikan kualitas lingkungan, kebersihan udara, kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Hutan dapat dikatakan memenuhi fungsi ekologis ideal bagi kehidupan apabila mencapai minimal seluas 30% dari keseluruhan luas suatu wilayah. Menurut data tahun 2016, luas hutan di DIY sudah mencapai 30,45% (97.018,26 ha) dari luas wilayah DIY (318.518 ha). Kalau dilihat dari persentase tersebut, maka hutan di DIY sudah cukup memenuhi fungsi ekologis ideal. Akan tetapi jumlah keluasan tersebut masih belum stabil karena masih didominasi oleh hutan rakyat seluas 78.303,20 ha. Hutan negara hanya seluas 18.715,06 ha. Dikatakan

belum stabil karena keluasan hutan rakyat bisa saja berkurang karena alih fungsi dan dilakukan penebangan oleh pemilik lahan sehingga untuk dapat terus menjaga fungsi ekologi ideal hutan, maka dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu: (1) Menunjuk kawasan hutan baru; untuk memperluas kawasan hutan, khususnya hutan dalam fungsi konservasi; (2) Memperbanyak areal hutan konservasi perkotaan dengan tujuan untuk membangun kawasan hijau perkotaan dan menciptakan udara bersih; (3) Meningkatkan pendampingan dan pembinaan kepada pemilik lahan yang sekaligus pengelola hutan rakyat.

Dengan semakin banyak dan bervariasinya kendaraan yang selama 24 jam hilir mudik di jalanan, otomatis berpengaruh pada kebersihan udara di wilayah kita. Maka hutan taman kota harus terus diperluas dalam rangka meningkatkan kualitas udara yang lebih baik dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Rekomendasi Kebijakan

Upaya peningkatan produksi hasil hutan negara dalam beberapa tahun terakhir gagal mencapai target akibat minimnya hasil sadapan getah pinus dan tidak optimalnya kapasitas giling pabrik minyak kayu putih. Bahkan tenaga ahli kehutanan merekomendasikan untuk dihentikannya penyadapan getah pinus, guna menjaga kelestarian. Yang lumayan ada peningkatan adalah produksi kayu. Itupun tidak semuanya merupakan hasil tebangan terencana, karena sebagiannya merupakan kayu hasil sitaan barang bukti dan kayu roboh akibat bencana alam.

Rekomendasi kebijakan untuk urusan kehutanan adalah :

1) Mempertahankan lahan hutan konservasi;
2) Hendaknya tetap dijaga secara proporsional antara pendekatan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi dalam pengelolaan hutan;
3) Rehabilitasi lahan kritis harus menjadi prioritas penanganan, dengan melibatkan masyarakat sekitar;
4) Guna meningkatkan produksi hasil hutan, peremajaan pohon pinus adalah suatu yang harus dilakukan. Demikian juga dengan penambahan tegakan kayu putih di lahan kosong antara tegakan yang sudah ada pada area lahan yang telah ditentukan;
5) Membangun dan memperluas area konservasi.

3. BIDANG PEMBANGUNAN

a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Infrastruktur yang merujuk pada sistem fisik untuk menyediakan layanan bagi transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Pembangunan sektor infrastruktur merupakan sektor prioritas yang harus memperoleh perhatian dalam rangka mengatasi kemiskinan, disamping hal tersebut, bagi para investor daya saing suatu negara dalam menarik investasi diukur dari daya tarik dan kinerja infrastruktur, baik infrastruktur dasar, sains maupun infrastruktur teknologi. Miskin dan rentannya infrastruktur suatu negara berdampak terhadap kehidupan suatu masyarakat.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian untuk tahun 2019 :

1) Adanya ketidakseimbangan aksesibilitas wilayah-wilayah perbatasan terutama perbatasan antara DIY Dengan Jawa Tengah di Kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten serta Kabupaten Sukoharjo yang pada umumnya kondisi jalan dalam keadaan rusak sedang sampai berat, oleh sebab itu perlu perhatian khusus akan kondisi tersebut walaupun status jalan kebanyakan merupakan jalan kabupaten;
2) Aksesibilitas penduduk terhadap ketersediaan air minum yang cukup dirasa masih jauh dari ideal seperti yang digambarkan dalam capaian kinerja tersebut diatas. fakta menunjukkan bahwa banyak daerah-daerah yang masih saja mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air bersih sebagai sarana kehidupan dasar, untuk itu validitas akan pengukuran capaian indikator kinerja tersebut di atas perlu dipertanyakan;
3) Banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang harus digunakan sebagai pedoman atau landasan yuridis, jelas akan menimbulkan ketidak seimbangan baik itu lingkungan sosial, ekonomi maupun nilai-nilai kultur dan lain-lain. Proses alih fungsi

lahan untuk kepentingan hunian atau industri yang terjadi secara masif perlu segera di hentikan kalau tidak ingin terjadi gradasi terhadap kualitas lingkungan;

4) Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agro ekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani, sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya. Hal ini akan menyebabkan rawan pangan bagi daerah, cepat atau lambat, akibat semakin terkikisnya lahan pertanian;

b. Urusan Perumahan

Urusan perumahan rakyat sepertinya agak terpinggirkan di antara agenda-agenda pembangunan lainnya. Padahal, pembangunan perumahan mendominasi proses pengkotaan (urbanisation) yang secara terus menerus mengkonversi lingkungan alam dan berbagai sumber daya alam dan sumber daya lain menjadi lingkungan binaan (built environment). Pembangunan perumahan yang parsial hanya menghasilkan mosaik lingkungan binaan yang semrawut dan justru menjadi sumber bencana (terutama pada perkotaan maupun pemukiman di daerah rawan bencana). Pembangunan perumahan merupakan instrumen strategis bukan hanya untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, namun sekaligus untuk mewujudkan lingkungan yang dapat menjadi aset sekaligus mesin pembangunan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

Sesuai Perda DIY Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017, sasaran pembangunan urusan bidang perumahan adalah menurunnya perumahan dan lingkungan yang tidak layak huni yang kinerjanya diukur menggunakan indikator persentase rumah tidak layak huni. Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dilakukan melalui fasilitasi perbaikan kualitas rumah yang diwujudkan dengan bantuan stimulan bahan bangunan kepada masyarakat. Hasil identifikasi awal pada tahun 2012 jumlah rumah yang tergolong rumah tidak layak huni (RTLH) sejumlah 91.200 unit. Hingga tahun 2015 jumlah RTLH

yang tersebar di DIY sejumlah 74.491 unit atau setara dengan 7,17%. Dan target sampai dengan 2017 sebesar 6,75%.

c. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

Sektor ketenagalistrikan merupakan salah satu leading sector dalam menunjang perekonomian dan pembangunan nasional. Listrik sudah menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, hampir semua peralatan rumah tangga membutuhkan listrik dalam penggunaannya seperti pesawat televisi, kulkas, *air conditioner* (AC), mesin cuci, laptop, komputer, *handphone* dan lain-lain. Selain itu, listrik juga berperan penting bagi dunia industri dan jasa dalam proses produksi untuk dapat menggerakkan perekonomian. Tidak heran, *demand* terhadap listrik meningkat setiap tahunnya sementara pasokan listrik sendiri sangat terbatas. Hal ini menyebabkan berbagai wilayah di tanah air sering sekali mengalami pemadaman listrik bergilir terutama di daerah-daerah pinggiran dan pedalaman. Lebih jauh, saat ini kondisi yang sangat memprihatinkan adalah masih banyak daerah di tanah air yang sama sekali belum teraliri listrik.

Berdasarkan Perda DIY Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017, sasaran pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral adalah meningkatnya akses energi dengan indikator kinerja penduduk berakses energi. Peningkatan akses energi ditempuh melalui ketersediaan ketenagalistrikan dan bahan bakar minyak dan gas. Upaya pemenuhan ketenagalistrikan dilakukan melalui program pembinaan, pengawasan dan pengembangan ketenagalistrikan.

Dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah DIY urusan bidang Energi dan sumber daya mineral yang indikator kinerjanya adalah Penduduk DIY yang berakses energi capaian kinerjanya mencapai diatas target yang telah ditetapkan dalam RPJMD DIY 2012-2017, namun demikian fakta dilapangan masih banyak penduduk DIY yang belum bisa menikmati listrik .

Oleh sebab itu untuk tahun 2019 perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam kebijakan daerah agar masyarakat yang belum bisa mengakses listrik menjadi prioritas sasaran. Apalagi pada daerah-daerah perbatasan.

d. Urusan Perhubungan.

Permasalahan transportasi khususnya transportasi darat di Indonesia cukuplah kompleks, karena transportasi merupakan suatu sistem yang saling berkaitan, maka satu masalah yang timbul di satu unit ataupun satu jaringan akan mempengaruhi sistem tersebut. Namun permasalahan transportasi yang terjadi di Indonesia terjadi hampir di setiap jaringan atau unit-unit hingga unit terkecil dari sistem tersebutpun memiliki masalah. Masalah yang terjadi bisa masalah yang terjadi dari unit tersebut maupun masalah akibat pengaruh dari sistem.

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah-masalah pada transportasi darat di Indonesia sangat beragam, antara lain ledakan penduduk, tingginya kendaraan bermotor, kurangnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya birokrasi dari pemegang kekuasaan sistem birokrasi.

Kemacetan merupakan salah satu masalah yang dinilai paling mengganggu kenyamanan pengguna transportasi darat, kemacetan dapat mengurangi efektifitas kerja maupun kegiatan masyarakat, memperlambat manusia untuk melakukan aktifitas, meningkatkan polusi udara, polusi suara serta merupakan pemborosan bahan bakar yang semakin hari semakin menipis.

Kemacetan lalu lintas di jalan raya disebabkan ruas-ruas jalan sudah tidak mampu menampung luapan arus kendaraan yang datang serta luasan dari jalan tersebut tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang melintas. Hal ini terjadi, juga karena pengaruh hambatan samping yang tinggi, sehingga mengakibatkan penyempitan ruas jalan, seperti: parkir di badan jalan, berjualan di trotoar dan badan jalan, pangkalan becak dan angkutan umum, kegiatan sosial yang menggunakan badan jalan, serta adanya masyarakat yang berjalan di badan jalan. Selain itu, kemacetan juga sering terjadi akibat manajemen transportasi yang kurang baik, ditambah lagi tingginya aksesibilitas kegunaan lahan di sekitar sisi jalan tersebut.

Kemacetan lalu lintas juga seringkali disebabkan rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan, misalnya parkir di badan jalan, angkutan umum yang sering berhenti di sembarang tempat, kendaraan-kendaraan yang enggan rapat kiri ataupun kendaraan-kendaraan yang membelok di sembarang tempat. Ledakan jumlah kendaraan bermotor juga merupakan faktor kuat terjadinya kemacetan jogjakarta.

Sasaran urusan perhubungan pada RPJMD 2012-2017 adalah meningkatkan pelayanan publik pada bidang penataan sistem transportasi dan akses

masyarakat di perdesaan melalui strategi penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi.

Arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan sitem transportasi di DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui management dan rekayasa lalu lintas guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan sebesar 32,57% pada tahun 2012 menjadi 42,57% pada tahun 2017.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan yang terus meningkat di segala bidang khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkatkan pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan dan bahaya terhadap kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya, limbah bahan berbahaya dan beracun harus dikelola secara khusus agar dapat dihilangkan atau dikurangi sifat bahayanya.

Masalah-masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan merusak lingkungan hidup. Pembangunan kawasan pemukiman, industri atau perkebunan seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata. Sebagai akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan yang memicu terjadinya bencana seperti contoh di atas. Lebih lanjut, kesalahan pengelolaan lingkungan paling tidak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, masalah ekonomi, pola hidup, kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan

f. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan penting dan kritis dalam proses pembangunan sehingga pada proses ini harus dilakukan secara komprehensif dengan didukung oleh data-data statistik yang memadai. Karena perencanaan pembangunan akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu ke depan. Selain perencanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD melalui

mekanisme Musrenbang, masih terdapat perencanaan pembangunan yang dibiayai oleh non-APBD, seperti perusahaan swasta atau BUMN melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Mekanisme perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dari masyarakat tingkat bawah (desa/kelurahan) ini dilakukan dengan mensinergikan perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD sehingga tidak terjadi *overlapping* atau pembiayaan ganda terhadap suatu proyek pembangunan di daerah. Sinergisitas perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai dari berbagai sumber menjadi mutlak dilakukan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai bisa terwujud, baik antarsektor maupun antarwaktu. Sinergisitas pembangunan antarsektor merupakan kesesuaian program pembangunan antarsektor sehingga tidak ada tumpang tindih dalam program pembangunan, tetapi justru saling mendukung. Sedangkan sinergisitas pembangunan antarwaktu merupakan keberlangsungan program pembangunan (*sustainable development*) dari waktu ke waktu yang berkelanjutan hingga tujuan dan sasaran pembangunan tersebut tercapai.

4. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Urusan Pendidikan

Dengan melihat data-data capaian indikator urusan pendidikan sampai dengan tahun 2016 sebagaimana di sampaikan dalam dokumen LKPJ Tahun 2016 maupun dalam LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur DIY periode 2012–2017 terlihat bahwa secara keseluruhan kondisi pendidikan di DIY telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Namun jika dikaitkan dengan permasalahan utama yakni jumlah penduduk miskin dan juga ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kewilayahan ada hal yang menarik untuk di perhatikan. Yakni paparan dari Balai Statistik Daerah Bapeda DIY yang menyampaikan bahwa sebagian besar warga miskin yang di tandai dengan rendahnya pengeluaran di dominasi oleh mereka yang tidak tamat SD atau tamatan SD/Sederajat yakni sebesar 62,6%. Sebaliknya untuk warga kelompok mampu (kelompok pengeluaran 10) rata-rata adalah tamatan SLTA/Sederajat dan Universitas yang sebesar 74,2%. Hal ini menunjukan bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan warga. Semakin tinggi pendidikan kondisinya secara ekonomi semakin baik dan sejahtera.

Oleh sebab itu DPRD perlu mendorong agar strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi siswa didik untuk

dapat menempuh pendidikan minimal sampai jenjang SLTA/SMK/Sederajat. Terlebih baik lagi jika di usahakan untuk bisa sampai menempuk perguruan tinggi. Kendala untuk menuju kesana adalah masalah tingginya biaya pendidikaan masih banyak warga DIY yang kesulitan untuk dapat menempuh pendidikan tinggi. Bantuan bea siswa bagi warga kurang mampu yang menempuh pendidikan tinggi perlu di naikkan anggarannya agar lebih banyak lagi warga kita yang dapat terbantu untuk menamatkan sekolah sampai perguruan tinggi.

Hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah banyaknya jumlah penganggur lulusan pendidikan kejuruan. Berdasar data BPS Agustus 2017, secara nasional dari 7,04 juta penganggur, sekitar 11,4% berpendidikan SMK, menunjukan praksis pendidikan kejuruan yang belum tepat sasaran. Hal ini dikuatkan dengan adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan kompetensi lulusan SMK. Tahun 2016, bidang kelautan butuh tenaga lulusan SMK sebanyak 3.364.297 orang, namun yang tersedia hanya 52.219 orang. Bidang pariwisata membutuhkan tenaga sebanyak 707.600 namun hanya tersedia lulusan SMK pariwisata sebanyak 82.171 orang. Adapun bidang bisnis dan managemen hanya memerlukan 139.255 orang namun jumlah lulusan SMK jurusan tersebut sebanyak 348.954 orang. Data tersebut merupakan angka nasional. Bagaimana kondisi lulusan SMK di DIY masih perlu penelitian lebih lanjut. Namun sebagai kota pendidikan DPRD DIY berharap bahwa kompetensi lulusan SMK dari sekolah-sekolah kejuruan di DIY memiliki kompetensi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Sehingga lulusan SMK di DIY akan cepat mendapatkan pekerjaan dan akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga DIY. Keberadaan sekolah kejuruan sangat strategis untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Rekomendasi Kebijakan:

1) Meningkatkan jumlah siswa yang menamatkan sekolah sampai tingkat SLTA/SMK/MA sederajat sesuai dengan target wajar 12 tahun D.I Yogyakarta;
2) Menetapkan angka partisipasi kasar (APK) untuk Perguruan Tinggi (PT) bagi warga DIY;
3) Memberikan bantuan bea siswa untuk siswa/mahasiswa kurang mampu atau berprestasi;

4) Meningkatkan pemerataan kualitas sekolah sehingga mengurangi kesenjangan antar sekolah satu dengan sekolah lainnya maupun antar kabupaten/kota;
5) Meningkatkan kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan dengan mendapatkan pelatihan tehnik terstandar dan/atau kompetensi standar lainnya sehingga akan mudah diterima di dunia kerja;
6) Meningkatkan kesejahteraan GTT dan PTT

b. Urusan Pemuda dan Olahraga

Kemajuan suatu daerah tidak dapat dipisahkan dengan keberhasilan generasi muda sebab di tangan dan pundak pemudalah masa depan suatu daerah akan ditentukan. Sejarah telah membuktikan peran penting pemuda dalam perjalanan perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Kini peran pemuda tetap penting untuk mengisi dan memajukan bangsa menuju cita–cita kemerdekaan. Pemuda kini berada di abad informasi dengan ditandai kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan pesat. Era digital atau era internet telah menempatkan pemuda pada situasi penting dan strategis. Penting karena pemuda lah yang saat ini paling banyak menggunakan media informasi digital dan mewarnai kehidupan sosial kita. Strategis karena saat ini dunia internet atau digital telah merubah semua aspek kehidupan kita sehari- hari. Dengan teknologi informasi tidak ada lagi jarak antarsatu warga satu dengan lainnya. Tidak ada batasan antar negara dan waktu begitu cepat karena semua informasi dapat dengan mudah diakses melalui internet. Dan kemajuan tehnologi informasi telah membawa peluang yang sangat besar dalam menciptakan peluang bisnis baru berbasis IT. Dan saat ini banyak pengusaha muda yang sukses dengan membangun bisnis berbasis IT seperti banyak kita jumpai dalam apa yang disebut start up. Dan DIY memiliki potensi anak-anak muda yang menguasai TI dan telah memanfaatkannya untuk membangun dan mengembangan bisnis berbasis IT. Sudah saatnya pemerintah memberikan fasilitasi dan dorongan bagi pengembangan dan kemandirian pemuda untuk menentukan kemajuan wilayah dengan memanfaatkan kemajuan TI. Contoh fasilitas yang bisa di berikan oleh pemerintah adalah memberikan akses yang mudah dan murah bagi penyediaan akses ke jaringan internet dengan membangun smart city. Selain itu dilakukan pelatihan-pelatihan bagi pemuda agar melek dalam memanfatkan TI untuk hal-hal yang produktif.

Olahraga juga merupakan hal yang penting. Selama ini olahraga lebih banyak dipahami sebatas olah raga prestasi. Dan hasilnya kita melihat bahwa DIY dalam

hal ukuran prestasi di bidang olahraga kurang berhasil dibandingkan provinsi lain. Sebab olahraga prestasi membutuhkan biaya yang mahal baik untuk pengadaan sarana prasarana maupun untuk membiayai atlet, pelatih dan pendukung di seputar olahraga prestasi tersebut. Oleh sebab itu olahraga sebaiknya tidak hanya diukur dengan perolehan jumlah medali saja tetapi juga dengan ukuran lain seperti derajad kesehatan masyarakat atau dengan misalnya *sport development index*. Olah raga juga mencakup olahraga rekreatif atau olahraga masyarakat. Semboyan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat perlu dihidupkan kembali.

Rekomendasi :

1) Fasilitasi pemuda dalam meningkatkan akses teknologi informasi;
2) Pelatihan pemuda untuk dapat memanfaatkan TI bagi kegiatan ekonomi dan kewirausahaan;
3) Peningkatan literasi dan praktek TI bagi pemuda desa dan daerah tertinggal;
4) Fasilitasi kewirausaan pemuda;
5) Peningkatan kegiatan olahraga berbasis rekreatif dan kemasyarakatan

c. Urusan Kesehatan

Beberapa masalah dalam urusan kesehatan yang sampai dengan tahun 2016 belum memberikan hasil yang diharapkan seperti : masih adanya balita mengalami kurang gizi (prevalensi balita KEP) sebesar 8,8%, angka kematian ibu melahirkan sudah menunjukkan tren menurun namun masih cukup tinggi yakni 29 kejadian di tahun 2015, angka kematian bayi juga sudah berhasil di tekan dari tahun ke tahun namun sampai tahun 2016 masih ada di angka 278 bayi, angka kematian balita pada angka 323, bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) masih pada kisaran 5,20%. Selain hal itu masalah pemerataan sarana pelayanan kesehatan juga perlu mendapatkan perhatian. Sebagian besar rumah sakit ada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kabupaten lain seperti Gunugkidul dan Kulonprogro perlu mendapatkan perhatian. Dan yang tidak kalah penting adalah membudayakan hidup sehat. Sebab masalah kesehatan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan secara kuratif namun juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam bentuk preventif dan promotif. Gaya hidup masyarakat modern telah meningkat resiko kejadian penyakit seperti stroke, jantung, diabetes dan degeneratif lainnya.

Rekomendasi:

1) Menurunkan angka prevalensi KEP;
2) Menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI), angka kematian bayi, angka kematian balita;
3) Pemberian bantuan gizi bagi Bumil dan Balita;
4) Pemerataan sarana prasarana kesehatan terutama bagi daerah tertinggal;
5) Meningkatkan cakupan bagi warga untuk jaminan pembiayaan kesehatan selain yang sudah mendapatkan bantuan JKN;
6) Meningkatkan kampanye tentang budaya hidup sehat .

d. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan harapan untuk terus menurunkan angka kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu terus didukung. Berbagai upaya telah di tempuh baik dari sisi penegakan hukum, sosialisasi, edukasi dan kerjasama dengan berbagai pihak telah di lakukan untuk mencapai hasil sesuai yang di harapkan. Angka partisipasi perempuan baik dalam ranah politik, pemerintahan maupun dalam dunia swasta telah menunjukkan hasil yang baik dan perlu terus ditingkatkan. Berdasarkan data serta laporan yang ada tentang masih tingginya angka kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak maka perlu upaya-upaya yang lebih baik lagi, lebih progresif lagi agar sekecil mungkin adanya kejadian kekerasan di tengah masyarakat kita. Adanya upaya seperti desa prima, kawasan ramah anak, dan sebagainya perlu terus didukung.

Rekomendasi :

1) Meningkatkan upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2) Meningkatkan Desa Prima, Kawasan Ramah Anak (Kampung, Desa, Kota, Kabupaten);
3) Menguatkan kerjasama jejaring dengan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
4) Meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberdayaan baik terhadap korban maupun terhadap masyarakat rentan.

e. Urusan Sosial

Permasalahan sosial yang prioritas di DIY adalah masih adanya penyandang PMKS, yakni gelandangan pengemis (gepeng) dan anjal sekalipun sudah ada peraturan daerah (perda) nya untuk hal itu. Selain itu upaya peningkatan

kesejahteraan PMKS melalui berbagai program seperti PKH, Kube dan sebagainya perlu terus didukung dan dikuatkan. Kita tahu bahwa banyak masalah sosial yang di alami PMKS berakar pada kondisi kerentanan dalam keluarga dan masyarakat kita. Karena DIY adalah daerah Istimewa dan merupakan daerah tujuan wisata terkemuka, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh agar perlindungan dan penanganan masalah PMKS dapat berhasil dengan baik sesuai harapan. Selain itu masalah dukungan terhadap disabiltas masih perlu ditingkatkan. Masih banyak masukan yang menunjukan bahwa belum ada perlakuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap saudara-saudara kita disabilitas.

Rekomendasi :

1) Perlu kesungguhan dan ketegasan dalam mengatasi penanganan masalah PMKS agar DIY yang merupakan daerah istimewa bebas dari penyandang PMKS terutama gepeng dan anjal;
2) Pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkoba;
3) Meningkatkan upaya pemberdayaan bagi keluarga miskin dan PKH melalui berbagai upaya yang baik agar semakin sejahtera;
4) Meningkatkan upaya dan dukungan terhadap disabilitas dalam memenuhi hak-hak sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan;
5) Meningkatkan pelayanan terhadap lansia.

f. Urusan Tenaga Kerja

Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia kerja sebanyak 2.917. 652 orang, naik sebesar 34.672 di bandingkan dengan tahun 2015. Jumlah angkatan kerja sebesar 2.099.436 orang. Adapun jumlah penganggur yang dilaporkan sebanyak 57.036 atau mengalami penurunan sebanyak 23.209 dibandingkan dengan penganggur di tahun 2015 yakni sebesar 80.245 orang. Tiga sector unggulan penyerap tenaga kerja adalah sector perdagangan hotel dan restoran (28,89%) kemudian sektor pertanian sebesar 23,27% dan yang ketiga adalah sektor jasa-jasa yang menyerap tenaga kerja sebanyak 20.75%. Di DIY dalam lima tahun terakhir mengalami *booming* pembangunan hotel. Selain itu naiknya jumlah wisatawan ke DIY juga menyerap tenaga kerja terutama sektor-sektor yang terkait langsung dengan pariwisata. DIY sebagai kota pendidikan memiliki potensi SDM yang unggul di bidang teknologi informasi. Dengan kemajuan yang pesat di digital marketing serta media sosial/internet potensial untuk menyerap tenaga kerja. Lulusan sekolah terutama kejuruan perlu dibekali dengan kompetensi dan ketrampilan yang cukup dalam menghadapi dunia kerja yang

terus berkembang sesuai dengan perkembangan. Daya saing tenaga kerja DIY perlu terus ditingkatkan dengan dukungan serta pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Untuk mendukung visi Gubernur 2017–2022 yakni 'Menyongsong Abad Samudra Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja', maka tenaga kerja DIY perlu disiapkan kompetensinya baik *skills* maupun kemampuan pendukung lainnya.

Selain itu untuk memajukan DIY dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja DIY perlu dilindungi dengan peraturan daerah tentang investasi daerah. Dengan tujuan agar setiap investasi yang masuk ke DIY sekaligus memiliki prioritas menyerap tenaga kerja DIY maupun menggunakan sumber daya lokal sebagai bagian dari mendorong daya saing produk hasil daerah.

Rekomendasi :

1) Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja DIY dengan membekali dengan pelatihan-pelatihan terstandar maupun kemampuan penting lainnya yang sesuai kebutuhan pasar;
2) Fasilitasi kesempatan kerja bagi tenaga kerja;
3) Perlunya ada peraturan daerah (perda) tentang perlindungan investasi daerah dengan tujuan melindungi tenaga kerja daerah (lokal) dan sumber daya lokal lainnya
4) Perlu dukungan dan fasilitasi tenaga kerja di bidang teknologi informasi dan media sosial untuk menangkap peluang *E-commerce*.

g. Urusan Kebudayaan

Dalam rangka menuju masyarakat DIY yang mandiri dan berkarakter, sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi DIY 2025, maka salah satu kuncinya adalah mendorong kemandirian dan kreativitas warga DIY yang senantiasa memiliki etos kerja, pantang menyerah, ulet, motivasi dan semangat kerja tinggi, agar kedepan masyarakat DIY mampu berbuat lebih dan dapat berdiri sejajar dengan masyarakat daerah provinsi lain. Kesemua itu, harus berakar pada budaya yang kuat dan teruji, seperti peradaban yang terbangun pada negara-negara Maju.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, memberikan keistimewaan kepada DIY salah satunya adalah tentang Kebudayaan, kewenangan kebudayaan tersebut, meliputi kewenangan mengatur dan mengurus pelestarian, pembaharuan aset dan nilai-nilai budaya Jawa, Yogyakarta khususnya. Kewenangan urusan kebudayaan tersebut didasarkan bahwa Yogyakarta –

Kesultanan dan Pakualaman – memiliki budaya yang khas, merupakan pilar dari kebudayaan Jawa pada umumnya. Dalam konteks ini Kebudayaan, dimanifestasikan dalam wujud nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat-istiadat, benda, seni dan tradisi luhur memiliki akar kuat dalam masyarakat Yogyakarta yang telah dibentuk melalui proses wacana yang intens dan panjang. Budaya Yogyakarta, dalam wujudnya sebagai nilai telah memainkan peranan strategis dan penting khususnya dalam proses pembentukan masyarakat Indonesia menjadi komunitas bangsa, dimana saat ini bangsa Indoensia sudah eksis sebagaimana bangsa dan negara yang berdaulat.

Keistimewaan Bidang Kebudayaan ini, menjadi focus dan otoritas Pemerintah Daerah DIY, oleh karena itu dalam pelaksanaannya secara otomatis akan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta Pemerintah Desa. Maka, kebijakan di bidang Kebudayaan, yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota wajib merujuk pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY. Maka sehubungan hal itu, Pemerintah Daerah DIY harus menjadikan Kebudayaan sebagai roh dari seluruh dinamika, napas, aktifitas dan gerak pemerintahan, pembangunan serta kehidupan, kreatifitas kemasyarakatan pada umumnya.

Berpijak pada esensi Undang-Undang Keistimewaan DIY, bahwa budaya sebagai roh atau spirit bagi seluruh dinamika kehidupan di DIY, dalam konteks keistimewaan DIY, maka perlu adanya langkah-langkah taktis-strategis untuk penguatan nilai budaya ke dalam praktek aktifitas - hidup keseharian masyarakat, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun didalam dinamika sosial kemasyarakatan umumnya. Usaha untuk penguatan tatanan kehidupan dengan berbasis pada budaya sebagai roh, diharapkan kedepan hal tersebut menjadi pendongkrak bagi muncul kreatifitas dan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus memantapkan DIY sebagai pusat kebudayaan yang tergambar dalam gerak kehidupan masyarakat di DIY khususnya. Dengan kata lain, budaya khas Yogya menjadi icon DIY kedepan.

Rekomendasi :

1) Peningkatan, Percepatan implementasi dan sosialisasi UU Nomor 13 tahun 2012, khususnya di bidang Kebudayaan, mengingat arti penting nilai-nilai budaya, sebagai basis Undang-Undang Keistimewaan;
2) Penggalian nilai-nilai orsinalitas budaya, sebagai basis budaya DIY;

3) Penguatan nilai-nilai budaya utama, sebagai rujukan bagi pengembangan nilai-nilai budaya terbarukan, sesuai hakekat tumbuh-kembangnya budaya yang berakar pada budaya DIY;
4) Peningkatan fasilitasi, untuk Perekayasaan budaya asli dalam menghadapi pengaruh budaya luar, yang masuk kedalam tatanan budaya *adihulung* Yogyakarta;
5) Peningkatan fasilitasi *maintenance* dan riset budaya dalam aspek pelestarian dan pengembangan budaya, sebagai artefak budaya *adiluhung*;
6) Memperkuat dukungan teknologi informasi untuk mendukung pengembangan budaya.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam hal pengendalian Penduduk, khususnya pada program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat kabupaten/kota telah menjadi kewenangan daerah, bahkan menjadi urusan wajib sesuai dengan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh sebab itu, daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangan program KKBPK. Program KKBPK, dapat berhasil bila memenuhi beberapa aspek antara lain : pertama, pengendalian kuantitas penduduk. Kedua, peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan, ketiga peningkatan kesejahteraan keluarga. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari indikator yang merupakan cerminan dari pelaksanaan Delapan fungsi uatama keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, meliputi : (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Sejalan dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi sentral dalam proses pembangunan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan terencana disegala bidang, termasuk dalam bidang kependudukan, salah satunya adalah menciptakan kondisi ideal antara pertumbuhan kependudukan dengan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dengan tanpa harus mengurangi untuk menyiapkan kebutuhan generasi

mendatang. Khususnya dalam hubungan bagi kelanjutan (suistanable) kehidupan bangsa baik secara lokal maupun Nasional.

Dalam konteks Pengendalian kependudukan dan KB paling tidak ada dua hal utama yang perlu mendapat perhatian, khususnya tentang integrasi penduduk dalam pembangunan, antara: 1) penduduk tidak hanya diposisikan sebagai obyek, akan tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan usaha pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Maka 'pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas', mutlak menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan penduduk muda (*youth dependency ratio*) di Indonesia, akan membentuk keadaan ideal, akan mengkondisikan potensi bonus demografi. Penduduk usia kerja, hampir dua kali lipat komposisinya bila dibanding dengan jumlah penduduk dibawah usia 15 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia tersebut, telah menurun dari 54/100 pada tahun 2000 menjadi 51/100 pada tahun 2011 dan turun menjadi 50/100 tahun 2012. Mapping kependudukan ini, akan terus turun mencapai angka terendah, endingnya diharapkan pada tahun 2020-2030, besaran angkanya sekitar 44 per 100**,** dengan catatan bila pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Maka Bonus demografi tersebut akan menjadi nyata, bila momentum dan kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan kemajuan dan memicu pertumbuhan ekonomi, termasuk didalamnya membangun ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa kedepan.

Maka bersamaan dengan momentum bonus demografi itu pula, akan menghasilkan kualitas penduduk usia produktif yang berkualitas tinggi, sehingga menjadi modal pembangunan daerah dan nasional dengan spirit tinggi, yang ditopang dengan *skill* dan keterampilan handal, sebagai unsur dan prasyarat utama bagi terwujudnya SDM yang berkualitas.

Berpijak dari paparan diatas, maka diperlukan kebijakan, strategi, dan upaya khusus dalam pemanfaatan peluang bonus demografi tersebut, melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui pencapaian sasararan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, untuk menurunkan laju pertumbuhan

penduduk (LPP), angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB (*unmet need*), menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15–19 tahun), serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

Rekomendasi :

1) Peningkatan dan fasilitasi implementasi UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam rangka pengendalian Pertumbuhan Pendudukan dan KB;
2) Peningkatan skill dan ketrampilan tenaga lapangan Kependudukan dan KB;
3) Penegendalian dan Penurunan Lajunya pertumbuhan Penduduk (LPP);
4) Penurunan angka kelahiran total (TFR);
5) Mendorong Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi (CPR);
6) Mendorong Peningkatan Jumlah Peserta KB;
7) Menurunkan Jumlah Kehamilan yang tidak diinginkan (WUS);
8) Menurunkan Jumlah Kelahiran pada remaja (ASFR, 15-19).

i. Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan Transmigrasi sudah didukung dengan regulasi yang cukup baik, yaitu diatur dalam Perubahan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, tentang pelaksanaan Undang-undang Ketransmigrasian. Secara umum pengembangan dan pelaksanaan transmigrasi dilakukan melalui beberapa pendekatan diantaranya yakni pembentukan/pembangunan Satuan Pemukiman (SP) namun untuk Wilayah Kalimantan akan menerapkan pendekatan Satuan Pemukiman Pemugaran (SP-Pugar). Melalui pendekatan ini diharapkan nantinya, para transmigrasi langsung diintegrasikan dengan masyarakat setempat. Pemukiman yang dibangun, termasuk didalamnya untuk masyarakat setempat, akan mencapai jumlah sebesar 300-500 Kepala Keluarga dan akan menjadi kelompok pemukiman baru. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah ini, diharapkan akan mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan Program Transmigrasi, baik dari daerah asal maupun di daerah tujuan Transmigrasi.

Sebagaimana kita pahami bahwa Tujuan transmigrasi secara luas adalah untuk kepentingan pembangunan nasional, tujuan transmigrasi, antara lain :

1) Membuka daerah yang kurang penduduknya, memanfaatkan lahan luas yang tersedia, untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah setempat;
2) Meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian;
3) Secara sosial, budaya dan Politik memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
4) Memeratakan persebaran penduduk ke seluruh pelosok NKRI;
5) Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional;
6) Meningkatkan taraf hidup rakyat (Transmigran).

Perlu dipahami dan diketahui oleh para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pemerintah Daerah, khususnya OPD terkait, bahwa masih ada kendala yang cukup besar dan serius dalam pengelolaan Program Transmigrasi baik secara nasional maupun lokal, khususnya yang ada di daerah tujuan transmigrasi antara lain :

1) Masih ada anggapan pada sebagian masyarakat dilokasi transmigrasi, bahwa para transmigran diperlakukan istimewa oleh pemerintah dengan berbagai fasilitas yang mereka dapatkan. Sementara penduduk setempat masih dalam kondisi yang memprihatinkan sebagai tuan rumah, bahkan kondisi mereka ada yang lebih buruk ketimbang orang luar yang datang wilayah mereka. Pada sisi lain, pihak pendatang datang dengan fasilitas Pemerintah. Ada kesan ketidakseimbangan.
2) Tradisi dan budaya, sering menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan antara penduduk asli dengan pendatang. Disamping itu, Penduduk setempat beranggapan bahwa lahan yang di berikan kepada para trasmigrasi, adalah lahan mereka, yang dapat dimaksimal untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Tapi kemudian, Lahan ini menjadi milik pendatang dan bersertifikat, sementara lahan penduduk setempat hanya berdasarkan pengakuan dan saling percaya diantara mereka sendiri.
3) Para transmigrasi yang ada di daerah tujuan, bisa dipastikan tidak banyak mengerti adat dan kebiasaan masyarakat setempat, perbedaan ini kemudian dapat menimbulkan sikap antipati, karena pendatang dianggap tidak menghargai penduduk setempat.
4) Arogansi Budaya, tidak bisa kita pungkiri, penduduk dari jawa sedikit yang mau belajar bahasa dan budaya setempat, sekalipun mereka menikah dengan penduduk setempat, pasangannya 'diminta' belajar dan menggunakan bahasa jawa. Hal Ini kemudian memantik rasa ego

dikalangan pendatang (transmigrasi), yang berujung para pendatang dianggap (diklaim) angkuh dan tidak mau menyatu dengan masyarakat setempat.

Hal-hal tersebut, harus dicarikan jalan keluar atau solusi yang tepat guna oleh Pemerintah bersama dengan Pemerintah Daerah setempat. Disamping itu, peserta transmigrasi tidak cukup hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga harus diberi mutan tentang pemahaman adat istiadat dan budaya setempat agar setelah mereka sampai dilokasi, tidak ada lagi sikap gagap budaya.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan Public Hearing mendengar keluhan penduduk, para pemuka agama dan tokoh adat setempat dan bila perlu masyarakat sekitar, juga mendapatkan perlakuan dan apresiasi yang sama dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka menjaga stabilitas daerah dan kesuksesan program transmigrasi.

Berdasarkan sensus 2010, semenjak 12 Desember 1950, Jumlah transmigrasi telah tersebar di seluruh Indonesia diperkirakan sudah mencapai 20 Juta Jiwa. Terfokus di pulau-pulau besar, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka-Belitung dan Papua. Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu daerah asal dan pemasok transmigrasi yang cukup signifikan dan tersebar di seluruh nusantara.

Rekomendasi :

1) Melakukan reaktualisasi dan rekonseptualisasi, terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan transmigrasi;
2) Penyiapan dan pengayakan calon peserta transmigrasi secara prima, baik kemampuan teknis maupun kecerdasan sosial, agar percepatan akulturasi budaya antara pendatang dan penduduk setempat dapat terbentuk secara harmonis;
3) Memberikan sosialisasi secara transparan dan akuntabel tentang pengelolaan program transmigrasi baik dari daerah asal maupun di daerah tujuan;
4) Melakukan public hearing yang terpetakan, dengan masyarakat didaerah tujuan, agar ditemukann rumusan yang tepat, serta pemahaman yang sama, baik dari sisi pendatang maupun dari pihak tuan rumah;
5) Mendorong dan memotivasi agar pada sebagian masyarakat tergerak untuk melakukan tindakan bertransmigrasi, spontan, mandiri-swadaya

atau melalui program resmi pemerintah. sebagai implementasi dari tujuan umum transmigrasi.

6) Meminimalisir kesenjangan antara warga pendatang dan warga setempat, agar tercipta harmoni didalam masyarakat baru yang terbentuk.

4.4.4 Tanggapan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY

4.4.4.1 Bidang Pemerintahan

4.4.4.1.1 Urusan Ketertiban, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		Memungkinkan	tidak memungkinkan				
1	meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat	√		Badan Kesbangpol	Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Jaga Warga	
2	peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara	√		Badan Kesbangpol	Program Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
3	peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tempat tinggal masing-maisng	√		Badan Kesbangpol	Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Jaga Warga	
4	penegakan peraturan daerah dalam mendukung kegiatan ketentraman dna ketertiban masyarakat	√		Sat Pol PP	Program Pembinaan Pelaksanaan dan Penegakan Perda dan Perkada	1.Operasi Yustisi dan Non Yustisi bagi Pelanggar Perda/Perkada	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		Memungkinkan	tidak memungkinkan				
						2. Pengembangan Budaya Sadar Perda dan/ Perkada	
5	pendidikan mental pada generasi muda untuk pengurangan tindak kejahatan	√		Badan Kesbangpol	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pengelolaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	
6	pemanfaatan teknologi dalam meminimalisir tindak kejahatan	√		Sat Pol PP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Pelaporan Keuangan	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	sistem informasi Praja Wibawa yang mengolah dan menyediakan informasi gangguan trantibum dan penanganannya di DIY

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		Memungkinkan	tidak memungkinkan				
7	pengembangan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini	√		Badan Kesbangpol	Program Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
8	Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunna politik, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu	√		Badan Kesbangpol	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	
9	menurunnya indeks resiko bencana serta meningkatnya ketanguhan pemerintah daerah dan masyarakat terhdap ancaman bencana	√		BPBD	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1. Pengelolaan Pencegahan Bencana 2. Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	
10	membangun sistem informasi kebencanaan yang aksesabel	√		BPBD	Program Pengelolaan Kedaruratan dan	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggu	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		Memungkinkan	tidak memungkinkan				
	oleh masyarakat				Logistik Bencana	langan Bencana	
11	menambah desa tangguh bencana masyarakat	√		BPBD	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pengelolaan Pencegahan Bencana	

4.4.4.1.2 Urusan Pertanahan

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		Memungkin kan	tidak memungkinkan				
12	intensifikasi fungsi tanah sebagai aset publik	√		Dinas PTR	Program PemanfaatanTanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	
13	pengembangan sistem informasi pertanahan	√		Dinas PTR	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		Memungkin kan	tidak memungkinkan				
14	peralihan fungsi lahan produktif pertanian untuk program ketahanan pangan	√		Dinas PTR	Program Pelaksanaan Dan Pengawasan Tata Ruang	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	
						Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
15	Mengintensifkan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara melalui mediasi dengan mendasarkan pada kajian akar permasalahan	√		Biro Hukum	Program Bantuan dan Layanan Hukum	Layanan Hukum Masyarakat	
				Dinas PTR	Program Pemanfaatan Tanah Kasulatanan Dan Tanah Kadipaten	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		Memungkin kan	tidak memungkinkan				
16	membangun sistem basis data dan sistem informasi kasus pertanahan yang valid guna mendukung percepatan penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan secara sistematis	√		Dinas PTR	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	

4.4.4.1.3 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		Memungkinkan	tidak memungkinkan				
17	peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	√		Biro Tata Pemerintahan	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
18	pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	√		Biro Tata Pemerintahan	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		Memungkinkan	tidak memungkinkan				
					Catatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

4.4.4.1.4 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		Memungkinkan	tidak memungkinkan				
19	peningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan	√		Biro Tata Pemerintahan	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	
20	penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa	√		Biro Tata Pemerintahan	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		Memungkinkan	tidak memungkinkan				
21	peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa	√		Biro Tata Pemerintahan	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	

4.4.4.1.5 Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
22	peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) e-government	√		Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Layanan Teknologi Informasi	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	
23	Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	√		Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
	(TIK) Egovernment						
24	membangun jejaring komunikai dan informasi	√		Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat	Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	
25	penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui media komunikasi, informasi, dan media massa	√		Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	

4.4.4.1.6 Urusan Persandian

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		Memungkinkan	tidak memungkinkan				
26	menganalisa kebutuhan penyelenggaraan persandian guna menjamin keamanan informasi di pemerintah daerah	√		Biro Umum dan Protokol	Program Pengembangan Aplikasi Informatika Dan Persandian	Penyelenggaraan Tata Kelola Persandian	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		Memungkinkan	tidak memungkinkan				
27	penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	√		Biro Umum dan Protokol	Program Pengembangan Aplikasi Informatika Dan Persandian	Penyelenggaraan Tata Kelola Persandian	

4.4.4.1.7 Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
28	meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	√		Biro Tata Pemerintahan	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Dan Penataan Wilayah	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
29	meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	√		Badan Kepegawaian Daerah	Program Peningkatan Kualitas Sdm Dan Pengembangan Karir Pegawai	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
30	review peraturan kepala daerah terhadap penyelenggranaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	√		Biro Tata Pemerintahan	Program Pembinaan Otonomi Daerah Dan Kerjasama	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	
31	evaluasi organisasi perangkat daerah	√		Biro Organisasi	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	

4.4.4.1.8 Urusan Keistimewaan Yogyakarta (Otonomi Khusus)

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
32	percepatan pembentukan regulasi untuk mempercepat program-program keistimewaan D.I.Yogyakarta	√		Biro Organisasi	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	
33	Penguatan regulasi pendukung urusanurusan keistimewaan D.I. Yogyakarta	√		Asisten Keistimewaan	Program Penyusunan Kebijakan Urusan Keistimewaan	Penyusunan kebijakan urusan kebudayaan, kelembagaan, tata	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
						ruang dan pertanahan	
34	pengelolaan lingkungan berbasis budaya	√		BKPP	Program Pengembangan Kearifan lokal dan potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman	
35	penataan kawasan budaya pendukung keistimewaan	√		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Program Pemanfaatan Ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Pada 18 Satuan Ruang Strategis
36	peningkatan tertib administrasi pertanahan	√		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
37	pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	√		Dinas Kebudayaan	Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Membangun Kemitraan Dengan Lembaga Pelestari Budaya	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
38	memperkuat kesejahteraan melalui program keistimewaan Yogyakarta	√		Dinas Kebudayaan	Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penghargaan Seniman dan Budayawan	
				Dinas Kesehatan	Program Pengembangan Kearifan lokal dan potensi Budaya	Peningkatan pelayanan kesehatan tradisional (pengembangan layanan kesehatan tradisional di Fasyankes)	
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pengembangan industri kreatif	
				BPPM		Pengembangan Ekonomi Perempuan	
				BPPM		Pengembangan Kewirausahaan Desa	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
				Dinas Pariwisata		Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	

4.4.4.1.9 Urusan Penanganan Bencana

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
39	menjadikan masyarakat tangguh bencana	√		BPBD	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Pengelolaan Pencegahan Bencana	
40	meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat desa	√		BPBD	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	
41	fasilitasi kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM Damkar	√		BPBD	Program Pengelolaan Kedaruratan Dan Logistik Bencana	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
42	mendorong pengetahuan dan penanggulangan resiko bencana kepada masyarakat secara luas	√		BPBD	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	
43	peningkatan kerjasana semua pemangku kepentingan dan integrasi kegiatan	√		BPBD	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	

4.4.4.2 Bidang Ekonomi

4.4.4.2.1 Urusan Pariwisata

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
1	Pemerintah DIY perlu menyusun roadmap visi pariwisata DIY 2025 dan merancang ulang strategi pemasaran pariwisata.		√	Dinas Pariwisata			Sudah dilakukan review terhadap Perda RIPPARDA dan SK Gub 193/2017 tentang Pembangunan dan Pengem

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
							bangan Destinasi Wisata
2	Pembangunan sarana prasarana transportasi intermoda yang menghubungkan kawasan wisata	√		Dinas Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata	
3	Meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi antarpelaku wisata	√		Dinas Pariwisata	Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	
4	Pengembangan pariwisata berbasis potensi dan budaya lokal	√		Dinas Pariwisata	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	

4.4.4.2.2 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
5	Penguatan koperasi dalam bentuk kelembagaan, peningkatan kualiatas SDM	√		Dinas Koperasi	Pengembangan Perkoperasian	Pembinaan Perkoperasian	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
	dan penguatan modal;						
6	Menambah jumlah wirausahawan baru sehingga mencapai angka 10%;	√		Dinas Koperasi	Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru	Penumbuhan dan Pembinaan Kewirausahaan	
7	Meningkatkan daya saing dan mensinergikan dengan konsep kemitraan dengan perusahaan besar;	√		Dinas Koperasi	Pengembangan UKM	Pembinaan UKM	
8	Memperkuat pemasaran produk UMKM melalui promosi pasar dan Informasi Teknologi.	√		Dinas Koperasi	Pengembangan UKM	Pembinaan UKM	

4.4.4.2.3 Urusan Perindustrian

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
9	Perlu program percepatan jumlah IKM serta peningkatan kualitas produk agar mempunyai daya saing tinggi dan diminati wisatawan	√		Disperindag	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Agro, Tekstil, Kimia,	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
						dan Aneka	
10	Pengembangan inovasi produk penunjang keistimewaan DIY di bidang kebudayaan	√		Disperindag	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Industri Kreatif	

4.4.4.2.4 Urusan Perdagangan

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
11	Membuat kebijakan kepada pengelola hotel dan restoran di DIY agar semua kebutuhan wisatawan termasuk bahan baku dapat dipenuhi oleh pelaku usaha di DIY	√		Biro APSDA	Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian berkeadilan	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	
12	meningkatkan kualitas dan kuantitas pedagang DIY serta memberikan perlindungan kepada konsumen berupa pengawasan barang yang beredar.	√		Disperindag	Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	

4.4.4.2.5 Urusan Penanaman Modal

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
13	Membuat strategi baru untuk menarik investor;	√		DPPM	Promosi Investasi	Promosi Investasi	
14	Membuat rencana induk penanaman modal di DIY;	√		DPPM	Program Peningkatan Iklim Investasi	Percepatan Realisasi Investasi	
15	Pemberian insentif atau kemudahan dalam perizinan di pesisir selatan.		√	DPPM			Sudah ada Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

4.4.4.2.6 Urusan Pertanian

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
16	Memberikan insentif pada pemilik hewan;	√		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Populasi Peternakan	Budidaya Peternakan	
17	Meningkatkan jiwa kewirausahaan petani dalam merespon	√		Dinas Pertanian dan	Peningkatan Produksi	Budidaya Hortikultura	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
	permintaan dan peluang pasar;			Ketahanan Pangan	Hortikultura		
18	Membuat sentra-sentra pengembangan komoditas pendukung industri pangan khas DIY (nangka, singkong, kacang hijau dan kedelai);	√		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Budidaya Tanaman Pangan	
19	Memberikan bantuan ternak kepada rumah tangga miskin dan membuat sentra-sentra budidaya pakan hijau ternak;	√		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Populasi Peternakan	Budidaya Peternakan	
20	Mendidik petani muda untuk akseseble terhadap teknologi informasi pemasaran dan mendorong penggunaan teknologi start up untuk petani lokal D.I Yogyakarta;	√		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi Hortikultura	Budidaya Hortikultura	
21	Membuat sistem data base lahan pertanian produktif dan hasilnya untuk perlindungan		√	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			sudah dilakukan pada Tahun 2016 dengan Anggar

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
	terhadap lahan pertanian.						an 1 M. Outputnya dipakai sebagai dasar dalam penentuan Review RTRW

4.4.4.2.7 Urusan Ketahanan Pangan

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
22	Masyarakat, terutama keluarga miskin, difasilitasi untuk dapat menghasilkan sendiri bahan pangan non beras dan/atau terigu.	√		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman	
23	Meningkatkan pengadaan bahan pangan dan memperlancar distribusi pangan sampai ke seluruh rumah tangga.	√		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan	Distribusi Pangan Masyarakat	
24	Perlu secara terus menerus dilakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha,	√		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketersediaan, akses, dan	Peningkatan Penanganan Daerah	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
	dengan melibatkan lembagalembaga lain yang memiliki akses langsung ke masyarakat.				konsumsi pangan	Rawan Pangan	
25	Tingkatkan pengawasan terhadap peredaran pangan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan terutama di lingkungan pendidikan anak.	√		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan	Penanganan Keamanan Pangan	

4.4.4.2.8 Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
26	Untuk meningkatkan produksi ikan budidaya, maka harus diperluas arealnya. Potensi sawah, tambak, jaring apung, dan tenaga harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai tempat pembudidayaan ikan.	√		Dislautkan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Teknis Perikanan Budidaya	Minapadi, ugadi, mina kebun rakyat, minapolitan

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
27	Lahan tambak udang puluhan hektar yang tergusur oleh area bandara di Kulonprogo harus segera dicarikan alternatif tempat yang lebih luas dan strategis.	√		Dislautkan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Teknis Perikanan Budidaya	Perlu penyesuaian dengan RTRW
28	Sosialisasi Gemar Makan Ikan harus terus digalakkan di tengahtengah masyarakat. Jalur pendidikan harus dapat dimanfaatkan dengan baik, dengan jalan sosialisasi kepada para siswa di sekolahsekolah. Bagi sekolah yang memiliki halaman yang cukup, dapat djuga dimanfaatkan untuk pembuatan kolam ikan	√		Dislautkan	Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Permasaran Hasil Perikanan	Gerakan Memasyaraktkan Makan Ikan (Gemarikan)

4.4.4.2.9 Urusan Kehutanan

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
29	Untuk menjaga peran produk minyak kayu putih sebagai penyumbang PAD yang signifikan, maka harus terus dilakukan pengkayaan tegakan/populasi dan perluasan areal tanaman kayu putih produktif.	√		Dinas LHK	Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	
30	Selain pinus, jati, dan kayu putih yang saat ini mendominasi populasi hutan negara, Pemda DIY perlu mempertimbangkan untuk menanam komoditas tanaman hutan lainnya, yang cepat tumbuh dan berproduksi, dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan keseimbangan lingkungan.		V	Dinas LHK			Fokus pada penataan tanaman hutan yang sudah ada

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
31	Masyarakat sekitar hutan yang masih berpendapatan rendah, diberi akses untuk memanfaatkan hutan guna memperbaiki taraf hidup mereka. Mereka diperbolehkan untuk bercocok tanam dengan tetap menjaga kelestarian hutan, sekaligus menjamin keamanan hutan dari tindakan pengrusakan maupun pencurian.	√		Dinas LHK	Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	
32	Mempertahankan dan menambah luasan hutan konservasi	√		Dinas LHK	Pengelolaan Hutan Konservasi	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	

4.4.4.3 Bidang Pembangunan

4.4.4.3.1 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
1	peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas jangkauan pelayanan sarana dan prasarana di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan	√		Dinas PU-P dan ESDM	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan /Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	
						Pembangunan Jalan dan Jembatan	
					Program Penyelenggaraan PSU Kawasan	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	
						Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	
					Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Penyedia	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
					an Air Minum		
2	pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah diarahkan untuk mendukung langkah-langkah stimulasi terhadap perekonomian dari sisi fiskal (progrowth), memperluas penciptaan lapangan kerja produktif (projob), dan mengentaskan kemiskinan (pro-poor)	√		Dinas PU-P dan ESDM	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan dan Jembatan	
					Program Penyelenggaraan PSU Kawasan	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	
					Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
3	Upaya untuk Peningkatan jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi maupun pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan hal yang prioritas untuk memberikan akses yang seluas luasnya pada masyarakat sehingga berakibat dapat meningkatkan segi sosial ekonomi. Terutama terfokus pada peningkatan jalan dan jembatan pedesaan	√		Dinas PU-P dan ESDM	Program Penyelenggaraan PSU Kawasan	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	
					Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
					Program Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana,	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
					PSU Kawasan	Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	
4	pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, telaga, embung serta sumberdaya air lainya, maupun pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan irigasi lainya serta upaya untuk pengendalian banjir	√		Dinas PU-P dan ESDM	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Baku	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	
					Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Pengembangan Jaringan Irigasi	
5	Pengembangan Sistem Pengelolaan air minum Pedesaan (SPAMDES) terutama bagi daerah daerah yang sering dilanda	√		Dinas PU-P dan ESDM	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
	kekeringan dalam rangka memperluas penyediaan air baku.						
6	Pengelolaan persampahan serta pengelolaan air limbah, terutama untuk limbah rumah tangga	√		Dinas PU-P dan ESDM	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah	
						Pengelolaan Sistem Jaringan Air Limbah	
						Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat	
						Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
						DIY dan Pemkab/ Kota)	
7	Perencanaa tata ruang dalam rangka untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah RTRW untuk menghindari konversi lahan produktif dalam rangka mencegah gradasi ekosistem dan lain-lain.	√		Dinas PTR	Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	

4.4.4.3.2 Urusan Perumahan

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
8	Ditingkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten dan kota serta dengan pemerintah pusat untuk	√		Dinas PU-P dan ESDM	Program Penyelenggaraan Perumahan	Pengembangan Perumahan	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
	bersama-sama dalam perumusan arah kebijakan strategis dan pembuatan kesepakatanke sepakatan, rencana dan program bersama dalam mengatasi permasalahan perumahan kumuh dan rumah yang tidak layak huni.						
9	Rehabilitasi perumahan kumuh dan rumah tidak layak huni.	√		Dinas PU-P dan ESDM	Program Penyelenggaraan Perumahan	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	
10	Ditargetkan tahun 2019 jumlah rumah tidak layak huni dibawah 6%.	√		Dinas PU-P dan ESDM	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	

4.4.4.3.3 Urusan Energi Sumber Daya Mineral

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
11	Pengembangan jaringan listrik bagi derah daerah yang belum ada jaringan induknya	√		Dinas PU-P dan ESDM	Program Penyelenggaraan Energi Dan Ketenagalistrikan	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	
12	Pengembangan Mikro Hidro bagi wilayah yang mempunyai akses sumber daya air.	√		Dinas PU-P dan ESDM	Program Penyelenggaraan Energi Dan Ketenagalistrikan	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	
13	Adanya kepastian dan jaminan bagi pemenuhan kebutuhan akan Elpigi.		√				Sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014, Penyelenggaraan sub urusan minyak dan gas bumi merupakan kewenangan pemerintah pusat

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
14	Bantuan untuk pemasangan instalasi listrik bagi rumah tangga yang secara ekonomi tidak mampu untuk mengakses sambungan listrik bagi rumahnya	√		Dinas PU-P dan ESDM	Program Penyelenggaraan Energi Dan Ketenagalistrikan	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	

4.4.4.3.4 Urusan Perhubungan

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
15	Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan.	√		Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	
16	Pembangunan bandara internasional di kulon progo.		√	-	-	-	Pembangunan bandara NYIA dilakukan sepenuhnya oleh PT. Angkasa Pura I

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
17	Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan.	√		Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	
18	Peningkatan pelayanan angkutan .	√		Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	
19	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.	√		Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	
20	Managemen rekayasa lalu lintas.	√		Dinas Perhubungan	Pengembangan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	
						Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	
21	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas.	√		Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
22	Pembangunan lampu penerangan jalan, pagar pengaman jalan serta trafick light pada daerah-daerah persimpangan yang padat.	√		Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	
23	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian transportasi antarkota, antarpropinsi maupun antarkota dalam provinsi terkait dengan keselamatan penumpang.	√		Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	
24	Pengembangan sistem transportasi massal serta penataan transportasi perkotaaan.	√		Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretapian	
25	Penambahan armada angkutan orang di jalan (bus transportasi)	√		Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
26	Pengembangan transportasi berbasis keistimewaan.	√		Dinas Perhubungan	Program Pemanfaatan Tata Ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	
27	Penataan , pembinaan maupun pengendalian angkutan non kendaraan bermotor	√		Dinas Perhubungan	Program Pemanfaatan Tata Ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	

4.4.4.4 Bidang Kesejahteraan Rakyat

4.4.4.4.1 Urusan Pendidikan

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
1	Fasilitasi bagi warga kurang mampu untuk menempuh pendidikan menegah (SMU/SMK/Sederajat).	√		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Program Layanan Pendidikan Menengah	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
2	Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan atau mahasiswa berprestasi.	√		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa	
3	Perlu di lakukan upaya pemerataan kulitas antar sekolah dan antardaerah. Peningkatan kesejahteraan GTT/PTT.	√		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Program Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

4.4.4.4.2 Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
4	Fasilitasi bagi pemuda untuk peningkatan akses tehnologi informasi.	√		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Program Kominfo		
5	Pelatihan pemuda utamanya desa dan wilayah tertinggal untuk melek teknologi informasi dan menggunakannya bagi kegiatan produktif.	√		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Program Kominfo		

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
6	Pelatihan pemuda untuk kewirausahaan dan kemandirian.	√		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Program Pembinaan Kepemudaan	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	
7	Peningkatan wawasan kebangsaan dan kehidupan berbangsa dalam ke-bhineka	√		Badan Kesbangpol	Program Kesatuan Bangsa dan Politik		

4.4.4.4.3 Urusan Kesehatan

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
8	Fasilitasi peningkatan gizi bagi balita.	√		Dinas Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	
9	Peingkatan gizi bagi bumil.	√		Dinas Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	
10	Optimalisasi posyandu.		√	Dinas Kesehatan			Fasilitasi Posyandu merupakan kewenangan kab/kota.

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
11	Pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan bagi wilayah tertinggal.	√		Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	
						Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Keshatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	
12	Peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi warga DIY menuju total coverage.	√		Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Pada Blud Bapel Jamkesoss	Pelayanan Jaminan Kesehatan	
13	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup sehat.	√		Dinas Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
						Masyarakat	
14	Fasilitasi posyandu lansia.		√	Dinas Kesehatan			Fasilitasi Posyandu merupakan kewenangan kab/kota.

4.4.4.4.4 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
15	Pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan.		√	BPPM	Program Perlindungan Perempuan Dan Anak	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Hingga saat ini yang sudah dilakukan Pemda adalah perlindungan, bantuan hukum dan rehabilitasi

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
16	Peningkatan informasi, edukasi dan konsultasi kepada semua pihak agar menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.	√		BPPM	Program Perlindungan Perempuan Dan Anak	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	
17	Peningkatan jumlah desa prima dan desa/dusun/kawasan ramah anak.	√		BPPM	Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi	
18	Penambahan layanan perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak.	√		BPPM	Program Perlindungan Perempuan Dan Anak	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	

4.4.4.4.5 Urusan Sosial

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
19	Penegakan perda tentang penanganan Gepeng dan perda perlindungan anak jalanan.		√	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Kewenangan penegakan perda bukan kewenangan dinas sosial
20	Penambahan program pemberdayaan gepeng dan anjal.	√		Dinas Sosial	Program Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	
						rehabilitasi sosial bagi eks gelandangan pengemis di dalam panti	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
						rehabilitasi sosial bagi anak terlantar di dalam panti	
21	Pemberdayaan keluarga miskin menuju keluarga sejahtera.	√		Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan sosial	Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	
22	Pencegahan terhadap napza.	√		Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS	
23	Fasililtasi penyandang disabilitas	√		Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
					Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	

4.4.4.4.6 Urusan Tenaga Kerja

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
24	Peningkatan skill dan kompetensi calon tenag kerja.	√		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	
					Pembinaan Pelatihan Standarisasi Dan Pemagangan	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	
						Pemagangan Tenaga Kerja	
						Pembinaan Lembaga Pelatihan	

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
25	Fasilitasi bagi calon naker untuk mendapatkan kesempatan kerja (bursa tenaga kerja).	√		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja Dan Transmigrasi	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	
						Penempatan Tenaga Kerja	
						Pembentukan Kesempatan Kerja	
						Penguranggan Pengangguran Melalui Padat Karya Infrastruktur	
26	Penambahan jumlah BLK, khususnya di kawasan pedesaan atau daerah yang miskin pendidikan keterampilan.		√	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			BLK ada di Provinsi dan 4 kabupaten. Selain itu sudah ada kegiatan pelatihan MTU di desa

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Hasil Telaah		OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Keterangan
		memungkinkan	tidak memungkinkan				
27	Fasiltasi perlindungan tenaga kerja untuk melindungi hak-hak pekerja.	√		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Pemeriksaan dan Pengawasan K3	
						Pembinaan Norma Kerja	
					Program Pengujian Lingkungan Kerja Dan Kesehatan Kerja	Pengujian Lingkungan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Hiperkes dan KK	
28	Peningkatan kewirausahaan khusus bagi pencari tenaga kerja.	√		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja Dan Transmigrasi	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	
						Pembentukan Kesempatan Kerja	

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta 2019

5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan masuk kategori tinggi bila diukur berdasar skala internasional. Kebijakan pembangunan sosial, karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi serta demografi penduduk merupakan faktor yang turut menjadi penentu keberhasilan capaian pembangunan manusia.

Pada tahun 2019, nilai IPM Kota Yogyakarta ditargetkan sebesar 86,15.

5.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

PDRB riil Kota Yogyakarta ditargetkan tumbuh sebesar 5,45% yang merupakan capaian pertumbuhan terendah. Peningkatan kinerja ekonomi selama periode 2017 – 2022 antara lain didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana berupa proyek-proyek besar yaitu Pembangunan Akses Jalan Menuju NYIA, Pembangunan Jaringan Distribusi Air Baku serta Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sepanjang tahun 2017 – 2022 adalah 5,51% per tahun.

5.1.3 Kemiskinan

Data BPS tahun 2017 menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta sebesar 7.64%. Angka ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 kemiskinan di Kota Yogyakarta sebesar 7.70% dan tahun 2015 sebesar 8.61. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,06 poin. Rendahnya penurunan tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta disebabkan telah mencapai dasar (*hard core poverty*). Artinya sudah semakin sedikit penduduk miskin yang bisa dilakukan intervensi. Selain itu, penduduk miskin yang akan disasar pun sudah semakin sulit karena telah mencapai dasarnya. Penduduk miskin yang berada di level menengah masih bisa dilakukan pemberdayaan. Seperti

program-program pelatihan untuk meningkatkan produktivitas, pendidikan, kewirausahaan, dan sebagainya. Tetapi bagi penduduk miskin yang berada di level paling bawah, tidak mudah untuk membuat mereka menjadi produktif. Hal yang bisa dilakukan adalah memberikan bantuan dasar yang bersifat karikatif. Contohnya kelompok manula, penyandang penyakit kronis, dsb.

Merujuk pada RPJMD Kota, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 berada di angka 7,58%. Tahun 2019 sebesar 7,35%, tahun 2020 sebesar 7,34%, tahun 2021 sebesar 7,29%, dan tahun 2022 sebesar 7,10%. Laju penurunan setiap tahun adalah 0,12% (tahun 2018), 0,23% (tahun 2019), 0,01% (tahun 2020), 0,05% (tahun 2021), dan 0,19% (tahun 2022). Perhitungan yang telah dibuat Kota Yogyakarta sudah sangat realistis. Sebab jika menargetkan laju pertumbuhan yang terlalu tinggi, justru akan menyulitkan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul 2019

5.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Capaian nilai IPM Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir terus meningkat, tetapi belum mampu meningkatkan level capaiannya menjadi sangat tinggi (IPM ≥ 80). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bantul berada di atas IPM DIY. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, maka nilai IPM Kabupaten Bantul berada di atas Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo tetapi berada di bawah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2019, nilai IPM Kabupaten Bantul ditargetkan sebesar 80,03.

5.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Bantul tumbuh sebesar 5,8% pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Bantul didukung dengan pembangunan beberapa infrasturktur strategis berupa Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Pansela dan Outer Ringroad dan akses menuju NYIA, Pembangungan Kawasan Industri, Penyediaan Air Baku, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama , Pembangunan SPAM Regional, Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Pembangunan Stasiun *Interchange*. Proyek-proyek tersebut menjadi pendorong

utama pertumbuhan ekonomi kabupaten Bantul sehingga mencapai rata-rata 5,49% per tahun selama periode 2017 – 2022.

5.2.3 Kemiskinan

Kabupaten Bantul telah membuat perhitungan dan perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk 5 tahun mendatang. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Bantul, tingkat kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 12,91%. Tahun 2019 sebesar 12,16%, tahun 2020 sebesar 11,41%, tahun 2021 sebesar 10,66%, dan tahun 2022 sebesar 9,91%. Berdasarkan data tersebut, laju penurunan kemiskinan di Bantul setiap tahunnya masih berada di bawah 1%. Selain itu, laju penurunan kemiskinan di Kabupaten Bantul konsisten di angka 0,75% setiap tahunnya (atau setara dengan 3,75% dalam 5 tahun). Jika perhitungan RPJMD Kabupaten Bantul ini masih tetap digunakan, maka target penurunan masyarakat miskin di DIY hingga 7% pada tahun 2022 tidak akan bisa tercapai. Sebab ujung tombak penurunan kemiskinan berada di kabupaten/kota.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebesar 14.55%. Kemudian pada tahun 2017 sebesar 14.07%. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.48 poin. Hasil ini menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin di wilayah ini berada di peringkat ketiga setelah Kulon Progo dan Gunungkidul. Tingkat capaian penanggulangan kemiskinan ini masih bisa terus ditingkatkan. Peluang untuk melakukannya pun terbuka lebar sebab masih banyak masyarakat miskin yang dapat disasar dengan beragam intervensi.

Berdasarkan hal di atas, target penurunan kemiskinan di Kabupaten Bantul perlu untuk dilakukan penyesuaian. Berdasarkan perhitungan ulang, jika ingin mencapai target penduduk miskin sebesar 7% pada tahun 2022, total penurunan kemiskinan Kabupaten Bantul yang harus dicapai dalam 5 tahun sebesar 5.83%. Perincian laju penurunan kemiskinan setiap tahunnya adalah 1.13% (tahun 2018), 1.44% (tahun 2019), 1.23% (tahun 2020), 1.04% (tahun 2021), dan 0.99% (tahun 2022). Jika semua kabupaten/kota berkomitmen dengan target ini, maka penurunan tingkat kemiskinan hingga mencapai angka 7% akan dapat tercapai.

5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2019

5.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Kulon Progo senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan angka IPM Kulon Progo mampu berada di atas level IPM Nasional. Tetapi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kulon Progo yang masih relatif rendah.

Pada tahun 2019, nilai IPM di Kabupaten Kulon Progo ditargetkan sebesar 73,77.

5.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi (Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE) yang merupakan perkembangan PDRB riil di Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo tumbuh paling cepat pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 7,9%. Pertumbuhan ekonomi Kulonprogo mencapai tingkat paling tinggi dibandingkan ke empat daerah lainnya mengingat besaran nilai investasi proyek fisik terakumulasi paling tinggi di Kulonprogo yang berupa Pembangunan NYIA, Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Pansela dan akses menuju NYIA, Pembangunan SPAM Regional, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama, Pembangunan Stasiun *Interchange*, Pembangunan Terminal Barang dan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan. Proyek-proyek tersebut menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kabupaten Kulonprogo sehingga mencapai rata-rata 6,06% per tahun selama periode 2017 – 2022.

5.3.3 Kemiskinan

Sasaran makro pembangunan pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 telah menargetkan tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo sebesar 18,25% pada tahun 2018, serta 13,25% pada tahun 2022 sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022. Target kemiskinan Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi dari target yang ditetapkan DIY maupun Nasional, hal tersebut disebabkan karena tingkat kemiskinan di Kulon Progo sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan DIY maupun Nasional. Jika dicermati. tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo

per tahun sangatlah kecil walaupun telah dilakukan intervensi yang melibatkan bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY, maupun pihak swasta.

Alasan mengapa tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016 selalu berada di atas DIY antara lain disebabkan oleh kondisi alam yang tidak begitu mendukung dan kegiatan investasi yang masih relatif rendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Namun dalam rangka mendukung penurunan angka kemiskinan DIY menjadi 7% pada tahun 2022, diperlukan penyesuaian target kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota DIY, termasuk Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil perhitungan angka kemiskinan yang dapat dijadikan proyeksi dalam rangka mendukung angka kemiskinan DIY menjadi 7% pada tahun 2022, maka untuk tahun 2018-2022 target kemiskinan yang harus dicapai Kabupaten Kulon Progo adalah 17,33% pada tahun 2018, 15,02% pada tahun 2019, 13,05% pada tahun 2020, 11,39% pada tahun 2021, dan 9,82% pada tahun 2022. Berdasarkan perhitungan tersebut maka laju penurunan kemiskinan tiap tahunnya sejak tahun 2018 adalah sebesar 1,80%; 2,31%; 1,97%; 1,66%; dan 1,57%.

Target tingkat kemiskinan tersebut memang lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan Kabupaten Kulon Progo. Sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Kulon Progo harus mencapai angka 9,82%, atau 3,43% lebih rendah dengan target awal sebesar 13,25%. Selisih ini merupakan selisih yang paling besar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Namun jika melihat arah pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dimana terdapat beberapa mega proyek seperti pembangunan bandara baru internasional, Pelabuhan Tanjung Adikarta, dan pabrik pengolahan pasir besi yang masuk dalam agenda pembangunan nasional dan kini sudah mulai berjalan, target angka kemiskinan tersebut diharapkan dapat tercapai. Selain itu, perlu adanya peningkatan *skill* (ketrampilan), peningkatan kualitas pendidikan yang memenuhi kualifikasi pasar kerja, perluasan lapangan pekerjaan yang melibatkan masyarakat sekitar, serta evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan untuk melihat efektivitas program. Program penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran justru akan memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas pendapatan.

5.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul 2019

5.4.1 Indeks Pembangunan Manusia

Untuk Kabupaten Gunungkidul, dari faktor pembentuk IPM, pendidikan masih merupakan pekerjaan rumah terbesar karena berdasarkan angka IPM yang ada, diantara kabupaten/kota yang ada di DIY, pendidikan di Kabupaten Gunungkidul masih menempati urutan terbawah. Oleh karena itu, fokus peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Gunungkidul harus menjadi arah tujuan yang mesti dilakukan disamping upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan informal.

Pada tahun 2019, nilai IPM di Kabupaten Gunungkidul ditargetkan sebesar 69,88, paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY tetapi sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017.

5.4.2 Pertumbuhan Ekonomi

Sementara itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 5,5% yang merupakan daerah dengan pertumbuhan terendah kedua. Pertumbuhan ini didorong antara lain oleh pelaksanaan proyek-proyek besar infrastruktur yaitu Pembangunan Jalan dan Jembatan berupa Pembangunan Jalur Pansela, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama dan Pembangunan SPAM Regional. Pembangunan di berbagai sektor terutama infrastruktur mendorong pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul mencapai rata-rata 5,49% per tahun selama periode 2017 – 2022.

5.4.3 Kemiskinan

Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan D.I. Yogyakarta masih sebesar 12,36%. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan DIY diharuskan untuk dapat diturunkan menjadi 7%. Maka untuk mencapai keberhasilan target sasaran provinsi yang turun menjadi 7% di tahun 2022 harus disesuaikan dengan jumlah masyarakat miskin yang diintervensi pada tiap kabupaten/kota. Hal ini agar dapat besinergi dan berkesinambungan antara penurunan kabupaten /kota dan penurunan provinsi.

Untuk Kabupaten Gunungkidul telah memiliki perhitungan penurunan kemiskinan yang tertuang di RPJMD Tahun 2016-2022. Namun untuk mensinergikan perhitungan provinsi ke kabupaten/ kota maka perlu ada

perbuahan target kemiskinan di tiap-tiap kabupaten/kota, begitu juga dengan Kabupaten Gunungkidul yang harus dirubah jumlah sasaran tingkat kemiskinannya yang disesuaikan dengan perhitungan provinsi. Jumlah target kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018-2022 yang tertuang di dalam RPJMD Gunungkidul adalah sebagai berikut: 18,11% (tahun 2018), 17,11% (tahun 2019), 16,11% (tahun 2020), 15,11% (tahun 2021), dengan laju sasaran penurunan kemiskinan tiap tahunnya sebesar 1%.

Perhitungan sasaran tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul ini perlu ada penurunan tingkat kemiskinan sehingga dapat menyesuaikan dengan perhitungan provinsi dengan target penurunan sebesar 7% pada tahun 2022. Untuk target tingkat sasaran kemiskinan yang sudah disesuaikan dengan provinsi mendapat hitungan baru diantaranya sebagai berikut: 17,59% (tahun 2018), 15,62% (tahun 2019), 13,95% (tahun 2020), 12,54% (tahun 2021), 11,21% (tahun 2022). Walaupun perhitungan baru dengan sasaran tingkat kemiskinan yang menurun daripada yang lama namun laju sasaran kemiskian untuk tiap tahunnya lebih tinggi dibanding dengan jumlah sasaran yang menyesuaikan RPJMD Gunungkidul. Laju sasaran penurunan kemiskinan tiap tahunnya rata-rata sebesar 1,58% untuk perhitungan baru. Maka pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus lebih dapat mengintervensi masyarakat miskin untuk mendapatkan target sesuai perhitungan baru.

Target perhitungan jumlah sasaran masyarakat miskin Kabupaten Gunungkidul 17,59% (tahun 2018), 15,62% (tahun 2019), 13,95% (tahun 2020), 12,54% (tahun 2021), 11,21% (tahun 2022), diharapkan dapat besinergi dengan target provinsi yang menetapkan target kemiskinan DIY pada tahun 2022 sebesar 7%.

5.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sleman 2019

5.5.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dari tahun ke tahun, nilai IPM Kabupaten Sleman terus mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman menempati peringkat kedua tertinggi di DIY setelah Kota Yogyakarta. Nilai IPM Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori sangat tinggi (IPM>80).

Pada tahun 2019, nilai IPM Kabupaten Sleman ditargetkan sebesar 82,75 dengan fokus penanganan komponen pembentuk IPM pada rata-rata lama sekolah.

5.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman adalah 5,9% pada tahun 2019. Proyek-proyek fisik besar memberikan kontribusi besar pada pencapaian kinerja ekonomi tersebut. Proyek-proyek tersebut adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan berupa Pembangunan JORR, Pembangunan Underpass Gejayan, Monjali dan Kentungan dan Pengembangan Jalan Selokan Mataram, Pengembangan SPAM Regional, Pembangunan Stasiun Interchange, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama dan Pengembangan Jalan Bebas Hambatan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata selama tahun 2017 – 2022 adalah 5,75%.

5.5.3 Kemiskinan

Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di DIY sehingga hal tersebut menjadi tantangan maupun peluang tersendiri untuk menurunkan angka kemiskinan. Selama kurun waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2012-2017 angka kemiskinan Kabupaten Sleman menduduki peringkat kedua terbaik setelah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan Kabupaten Sleman sebesar 8,13 % telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD-RKPD Kabupaten Sleman yaitu sebesar 10,02%.

Cukup baiknya prestasi yang telah dilakukan Kabupaten Sleman terkait penurunan angka kemiskinan perlu ditingkatkan kembali, bahkan memerlukan daya ungkit yang lebih besar. Mengingat target angka kemiskinan yang dimuat dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022 yaitu sebesar 7% pada akhir periode RPJMD (tahun 2022) maka perlu dilakukan penyesuaian kembali atas target angka kemiskinan Kabupaten Sleman.

Angka kemiskinan yang ditargetkan Kabupaten Sleman dalam RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 adalah sebesar 8,00% pada akhir periode RPJMD dengan laju penurunan antara 0.18-0,67 dalam lima tahun atau rata-rata sebesar 0,54 setiap tahunnya ternyata belum mampu mendukung prioritas pembangungan di DIY. Sehingga untuk mendukung prioritas pembangunan DIY yaitu kemiskinan dan ketimpangan wilayah maka target angka kemiskinan yang telah ditetapkan Kabupaten Sleman perlu disesuaikan kembali.

Untuk mendukung target angka kemiskinan DIY sebesar 7,00% pada tahun 2022 maka target angka kemiskinan Sleman perlu disesuaikan menjadi 6,73% pada tahun 2021 dan 6,29% pada tahun 2022. Dengan target angka kemiskinan

Sleman yang baru diharapkan laju penurunan angka kemiskinan pun meningkat yaitu sebesar 0,24-1,33 selama lima tahun atau rata-rata sebesar 0,75 per tahun. Perubahan target angka kemiskinan tersebut berdampak pada jumlah orang miskin yang harus diintervensi melalui berbagai program/kegiatan yang mendukung penurunan kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Jika jumlah orang miskin yang harus disasar/diintervensi selama 5 (lima) tahun sebelumnya adalah sebesar 23.245 jiwa maka jumlah orang miskin yang harus diintervensi setelah penyesuaian target angka kemiskinan menjadi sebesar 40.424 jiwa atau meningkat sebesar 17.179 jiwa.

BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dengan mendasarkan pada arah kebijakan pembangunan dan prioritas sasaran pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2019 maka rencana kerja untuk masing-masing OPD berikut pendanaannya tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 6-1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Non Keistimewaan Tahun 2019

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.01	**PENDIDIKAN**													
1.01.1.01.01.00	**Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga**													
1.01.1.01.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 12.836.868.000,00**	**Rp. 21.008.818.500,00**		
1.01.1.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat perlengkapan sebanyak 5 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 66,95 % terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 8.265.141.000,00	Rp. 16.074.815.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Alat tulis kantor sebanyak 303 jenis							
							Barang cetakan sebanyak 53 jenis							
							BBM selama 1 tahun							
							Belanja perangko, materai dan benda pos sebanyak 525 buah							
							Bukti pembayaran pajak STNK roda 2 sebanyak 24 unit							
							Bukti pembayaran pajak STNK roda 3 sebanyak 4 unit							
							Bukti pembayaran pajak STNK roda 4 sebanyak 27 unit							
							Bukti pembayaran pajak STNK roda 6 sebanyak 1 unit							
							Bukti pembayaran restribusi sampah selama 12 bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Ketersediaan publikasi sebanyak 15 spanduk							
							Komponen alat-alat perlengkapan kearsipan sebanyak 8 jenis							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 86 jenis							
							Langganan surat kabar harian lokal dan nasional 12 bulan							
							Pembayaran tagihan rekening telepon, air, listrik dan internet untuk 8 unit kerja (induk, upt dan balai) 12 bulan							
							Pemilahan arsip in aktif sebanyak 20250 berkas							
							Penggandaan sebanyak 1074800 lembar (8 unit kerja)							
							Pengiriman dokumen sebanyak 112 dokumen							
							Penjilidan sebanyak 824 jilid							
							Penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 28 jenis							
							Penyusutan arsip sebanyak 5000 berkas							
							Surat keluar sebanyak 26690 lembar							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Surat masuk sebanyak 16605 lembar							
1.01.1.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kineja Petugas Kebersihan gedung kantor untuk 2 unit gedung	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 26,30 % terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.640.347.000,00	Rp. 3.734.987.600,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Kinerja 10 orang tenaga kontrak							
							Kinerja 2 orang pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja 87 orang Pengelola keuangan							
							Kinerja 9 orang Pengelola administrasi kepegawaian							
							Kinerja petugas keamanan kantor untuk 1 tahun (8 unit kerja)							
							Kinerja petugas pengadaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
1.01.1.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 6,73 % terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 931.380.000,00	Rp. 1.199.015.400,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
1.01.1.01.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 5.516.229.000,00**	**Rp. 8.758.098.800,00**		
1.01.1.01.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembangunan Pagar Gedung PLA sepanjang 183,64 M	Terbangun gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 2,86 % terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 214.023.000,00	Rp. 235.425.300,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebeleur sesuai dengan RKBMD 20 Jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100 %	Dukungan 47,828 % terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 2.423.856.000,00	Rp. 4.526.308.600,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Peralatan sesuai RKBMD 10 jenis							
							Perlengkapan sesuai RKBMD 25 jenis							
1.01.1.01.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan 1 unit Gedung kantor Induk	Terpelihara gedung 100%	Dukungan 34,35 % terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.763.000.000,00	Rp. 2.828.100.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan 1 Unit Gedung PLA							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemeliharaan 1 unit Pemeliharaan gedung BPO							
							Pemeliharaan 3 unit sarana prasarana kepemudaan (graha wana bhaktiyasa, youth center dan pondok pemuda ambarbinangun)							
							Pemeliharaan 3 unit sarana prasarana olahraga (mandala krida, amongrogo & gelanggang pemuda)							
							Pemeliharaan rutin/berkala 1 unit gedung balai dikmen bantul							
							Pemeliharaan rutin/berkala 1 unit gedung balai dikmen kota							
							Pemeliharaan rutin/berkala 1 unit gedung balai dikmen kulon progo							
							Pemeliharaan rutin/berkala 1 unit gedung BTKP							
1.01.1.01.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMD 21 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 6,79 % terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 506.695.000,00	Rp. 484.086.900,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMD 21 unit							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBMD 1 unit							
1.01.1.01.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan 10 jenis jaringan internet		Dukungan 8,15 % terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 608.655.000,00	Rp. 684.178.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan 10 unit AC	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%						
							Pemeliharaan 2 jenis alat bermesin							
							Pemeliharaan 21 jenis alat-alat rumah tangga							
							Pemeliharaan 3 jenis alat-alat berat							
							Pemeliharaan 4 jenis barang bercorak kesenian							
							Pemeliharaan 4 jenis instalasi							
							Pemeliharaan 5 jenis jaringan komputer							
							Pemeliharaan 5 jenis mebeleur							
							Pemeliharaan 5 jenis soundsystem							
							Pemeliharaan 58 jenis alat-alat kantor							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemeliharaan 70 m2 buku/bahan pustaka							
1.01.1.01.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 1.376.619.000,00**	**Rp. 2.201.500.000,00**		
1.01.1.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Rentsra dan IKU) paling lambat akhir februari 2019	Nilai LKJIP dari 75.22 menjadi 75.5	Dukungan 9,09% terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 16.500.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 16 program 53 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 9,09 % terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 55.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Penyusunan draft ROPK tahun 2019, Renja 2020, RKA 2020, DPA 2020, Kalender Pendidikan	Tersusunnya ROPK Th 2019, Renja 2020, RKA 2020, DPA 2020, Kalender Pendidikan	Dukungan 45,45 % terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	3 jenis laporan	Rp. 1.221.619.000,00	Rp. 1.950.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 16 program 53 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi	Dukungan 36,36 % terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	4 laporan	Rp. 85.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.15	**PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH**										**Rp. 903.279.924.000,00**	**Rp. 1.025.789.944.000,00**		
1.01.1.01.01.00.15.001	Penyediaan BOS/BOSDA	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95%	BOSDA swasta 2 jenjang SLB & SM	meningkatkan presentase sekolah dengan akreditasi A dari 75,56 %(2017) menjadi 78,95 % (2019)	Dukungan 87,33% terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 78,95%	100%	Rp. 651.822.323.000,00	Rp. 960.845.282.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37medali	BOSNAS 3 jenjang pendidikan: SD/SMP, SM, SLB							
					Angka Putus Sekolah	0.22%								
1.01.1.01.01.00.15.002	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95%	Beasiswa prestasi 500 siswa	menurunkan presentase angka putus sekolah dari 0,12 %(2018) menjadi 0,10 % (2019)	Dukungan 100% terhadap pencapaian jumlah angka putus sekolah 0,10%	100%	Rp. 30.995.928.000,00	Rp. 40.317.693.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37medali	Kartu cerdas jenjang dikmen 20.000 siswa							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Angka Putus Sekolah	0.22%								
1.01.1.01.01.00.15.003	Pelayanan Pendidikan SMA	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95%	Operasional 8 sekolah KKO (kelas khusus olahraga) yaitu SMAN 4 YK, SMAN 1 Sewon, SMAN 1 Lendah, SMAN 1 Tanjungsari, SMAn 1 Seyegan, SMAN 2 Ngaglik, SMAN 2 Playen, SMAN 1 Pengasih		Dukungan 23% terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 78,95%	100%	Rp. 81.605.900.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37medali	Operasional Sekolah Menengah Negeri 69 sekolah	meningkatkan presentase sekolah dengan akreditasi A dari 75,56 %(2017) menjadi 78,95 % (2019)						
					Angka Putus Sekolah	0.22%								
1.01.1.01.01.00.15.004	Pelayanan Pendidikan SMK	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95%	Operasional 3 SMK Kelautan (SMKN 1 Sanden, SMKN 1 Temon, SMKN 1 Tanjungsari)	meningkatkan presentase sekolah dengan akreditasi A dari 75,56 %(2017) menjadi 78,95 % (2019)	Dukungan 16,33% terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 78,95%	100%	Rp. 116.198.400.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37medali	Operasional Edutel di 4 SMK (SMKN 4 YK, SMKN 6 YK, SMKN 1 Sewon, SMKN 1 Kalasan)							
					Angka Putus Sekolah	0.22%	Operasional Sekolah Negeri 49 sekolah							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.15.006	Pembinaan Siswa SMA	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95%	Lomba Cerdas Cermat sekolah menengah (2 Bidang)	Mempertahankan dan meningkatkan prestasi lomba tingkat nasional dari 21 medali (2017) menjadi 25 medali (2019)	Dukungan 54,05 % terhadap capaian Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah 37 medali	100%	Rp. 6.600.564.000,00	Rp. 8.360.619.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37medali	Pembinaan karakter dan kepemimpinan siswa untuk 150 siswa							
					Angka Putus Sekolah	0.22%	Pembinaan minat bakat istimewa (3 bidang)							
							Penerbitan jurnal Sagasitas sebanyak 2 edisi							
							Penerbitan majalah BIAS sebanyak 2 edisi							
							Pengembangan penelitian sebanyak 10 karya tulis							
							Seleksi, pembinaan dan pengiriman Debat Bahasa pada 2 bidang dengan target 3 besar nasional							
							Seleksi, pembinaan dan pengiriman FLSSN pada 8 bidang dengan target 10 besar nasional							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba Cerdas Cermat UUD 1945 (1 Kontingen dengan target 10 besar nasional)							
							Seleksi, pembinaan dan pengiriman OOSN (6 bidang dengan target 10 besar nas)							
							Seleksi, pembinaan dan pengiriman OSN (9 bidang dengan target 10 besar nas)							
1.01.1.01.01.00.15.007	Pembinaan Siswa SMK	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95%	Pealsanaan PPMBI (Pusat pengembangan minat dan bakat istimewa) SMK (15 PPMBI SMK)	Mempertahankan dan meningkatkan prestasi lomba tingkat nasional dari 25 medali (2017) menjadi 27 medali (2019)	Dukungan 45,94 % terhadap capaian Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah 37 medali	100%	Rp. 13.270.875.000,00	Rp. 12.209.292.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37medali	Pelaksanaan tuan rumah LKS 2019 tingkat nasional (52 bidang lomba dengan target peringkat 3 besar Nasional)							
					Angka Putus Sekolah	0.22%	Penerbitan Jurnal teknologi tepat guna (50 karya ilmiah)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan lomba kompetensi siswa SMK tk Nasional dan mempertahankan peringkat 5 besar (51 bid lomba, 2 bid lomba online, 6 bid lomba daring) 1 kontingen							
							Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaran FLSSN dengan target peringkat 3 besar nasional 1 kontingen							
							Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaran OOSN dengan target peringkat 5 besar nasional							
1.01.1.01.01.00.15.008	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95%	Pembangunan pagar belakang SMA 1 Playen sepanjang 570 M (tinggi 3 meter), Pagar SMAN Cangkringan sepanjang 32 Meter (tinggi 3 meter), Gapura SMAN 1 Cangkiringan (panjang 13 meter dengan ukuran pintu 6 meter)	Telaksananya pelayanan pada satuan pendidikan yang aman bagi peserta didik	Dukungan 4,34% terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 78,95%	100%	Rp. 482.250.000,00	Rp. 530.475.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37medali	Pembangunan talud dan pembuangan air SMA 1 Kokap (panjang 200 meter, tinggi 2 meter) dan SMA 1 Dlingo (panjang 210 meter tinggi 2,5 meter)							
					Angka Putus Sekolah	0.22%								
1.01.1.01.01.00.15.010	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95%	Pelaporan hasil dan tindak lanjut pengawasan 159 SMA dengan target 1 dokumen kepengawasan	Optimalnya Pelayanan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK	Dukungan 42,78% terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 78,95%	100%	Rp. 937.916.000,00	Rp. 1.141.708.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37medali	Pengembangan kompetensi guru mata pelajaran dengan target 1 dokumen pembelajaran							
					Angka Putus Sekolah	0.22%	Pengembangan kurikulum 159 kurikulum SMA							
							Pengembangan silabus olimpiade sains dengan target 6 silabus							
							Penyusunan 1 dokumen road map pengembangan SMA							
1.01.1.01.01.00.15.011	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95%	Dokumen data keterserapan lulusan SMK di dunia kerja,	Optimalnya Pelayanan pendidikan jenjang SMK	Dukungan 57,21% terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 78,95%	100%	Rp. 1.365.768.000,00	Rp. 2.384.875.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37medali	Pelaksanaan MKKS dalam penyusunan soal penjajakan (UKK) dengan target 1 dokumen UKK							
					Angka Putus Sekolah	0.22%	Pengawasan sekolah terhadap 218 SMK dan 159 SMA dalam proses perijinan buka kelas baru, program keahlian baru							
							Pengembangan kurikulum SMK (5 bahan ajar, 5 bank soal, 5 modul pembelajaran)							
							Peningkatan dan pengembangan MGMP SMK dengan target 6 RPP/silabus							
							Penyusunan kajian pengembangan SMK Kelautan dan SMK Seni berstandard internasional (2 Dokumen)							
1.01.1.01.01.00.16	**PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS**										**Rp. 26.896.248.000,00**	**Rp. 33.352.435.000,00**		
1.01.1.01.01.00.16.001	Pengembangan Layanan Khusus Autis	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	46.15%	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pusat Layanan Autis (dengan kapasitas layanan 70 anak berkebutuhan khusus)	meningkatkan presentase SLB dengan akreditasi A dari 87,32 % (2018) menjadi 88% (2019)	Dukungn terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan Akreditasi A 88 %	100%	Rp. 1.581.118.000,00	Rp. 1.914.193.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	7medali								
1.01.1.01.01.00.16.002	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	46.15%	Pembinaan dan pengiriman festival dan lomba ABK berseri (3 cabang)	Mempertahankan dan meningkatkan prestasi lomba tingkat nasional dari 14 medali (2017) menjadi 16 medali (2019)	Dukungan 100% terhadap pencapaian Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus 7 medali	100%	Rp. 1.508.550.000,00	Rp. 2.352.479.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	7medali	Pembinaan dan pengiriman festival dan lomba literasi PKLK (pendidikan khusus dan layanan khusus) sebanyak 6 cabang perlombaan							
							Pembinaan dan pengiriman siswa Jambore PKPLK (1 kejuaraan)							
							Pembinaan dan pengiriman siswa lomba ketrampilan siswa PK-PLK (10 cabang)							
							Pembinaan dan pengiriman siswa lomba olahraga siswa Tuna Grahita PK-PLK (11 cabang)							
							Pembinaan dan pengiriman siswa lomba OOSN PK-PLK (10 cabang)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pembinaan dan pengiriman siswa pada FLS2N PK-PLK (10 cabang)							
1.01.1.01.01.00.16.003	Bantuan Operasional Sekolah SLB	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	46.15%	Beasiswa inklusi untuk 2426 siswa	optimalnya pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus	Dukungan terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan Akreditasi A 46,15%	100%	Rp. 10.064.651.000,00	Rp. 13.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	7medali	Beasiswa magang untuk 234 siswa							
							Biaya Asrama SLB Negeri untuk 126 Siswa (5 Sekoah)							
							BOS SLB untuk 62 Sekolah							
							Pemberian makanan tambahan bagi SLB (PMTAS) untuk 1318 siswa							
1.01.1.01.01.00.16.004	Pelayanan Pendidikan SLBN	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Depok Gondomanan Kasihan Sewon Umbulharjo Wates Wonosari	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	46.15%	Penyediaan biaya operasional pada 9 SLB Negeri	optimalnya pelayanan anak berkebutuhan khuisus	Dukungan terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan Akreditasi A 46,15%	100%	Rp. 11.740.109.000,00	Rp. 13.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	7medali								
1.01.1.01.01.00.16.005	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	46.15%	advokasi pendidikan berkebutuhan khusus di 6 kecamatan	optimalnya pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus	Dukungan terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan Akreditasi A 46,15%	100%	Rp. 2.001.820.000,00	Rp. 3.085.763.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	7medali	Pelaksanaan Pusat pengembangan minat bakat istimewa (PPMBI) 15 PPMBI							
							Pembinaan pokja inklusif SPPI di 25 sekolah							
							Pembinaan pusat keberbakatan 4 bidang (musik, tari, lukis, dan IT)							
1.01.1.01.01.00.17	**PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN**										**Rp. 13.948.771.000,00**	**Rp. 20.925.972.000,00**		
1.01.1.01.01.00.17.001	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba Dikdas	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53%	Gala Siswa SMP (Liga Sepakbola Siswa) dengan target juara 1	Mempertahankan dan meningkatkan prestasi lomba tingkat nasional dari 24 medali (2017) menjadi 32 medali (2019)	Dukungan 84,61% terhadap pencapaian Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional 52 medali	100%	Rp. 2.968.732.000,00	Rp. 4.067.065.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52medali	Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP 4 cabang							
							Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSI) SMP 3 bidang dengan tarhet 3 emas dan 2 perak							
							Penyelenggaraan Lomba dokter kecil tingkat DIY SD							
							Penyelenggaraan Lomba sekolah sehat 4 jenjang (SD, SMP, SMA, SMK)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Seleksi, pembinaan & pengiriman FLS2N SD 2 cabor dengan target 1 emas dan 1 perak							
							Seleksi, pembinaan & pengiriman FLSSN SMP 5 cabor dengan target 3 emas dan 2 perak							
							Seleksi, pembinaan & pengiriman O2SN SD 9 cabor dengan target perolehan 2 emas, 4 perak dan 3 perunggu							
							Seleksi, pembinaan & pengiriman O2SN SMP 4 cabor dengan target 2 emas dan 2 perak							
							Seleksi, pembinaan & pengiriman OSN SD 12 bidang lomba dengan target 2 emas, 8 perak dan 2 perunggu							
							Seleksi, pembinaan & pengiriman OSN SMP 2 bidang lombal dengan target 2 emas							
1.01.1.01.01.00.17.002	Pengiriman Lomba PNFI Tingkat Nasional	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53%	Pembinaan dan pengiriman lomba GTK PAUD dan Dikmas berprestasi dengan mempertahankan juara umum (17 kejuaraan)	Mempertahankan dan meningkatkan prestasi lomba tingkat nasional dari 15 medali (2017) menjadi 20 medali (2019)	Dukungan 15,38% terhadap pencapaian Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional 52 medali	100%	Rp. 1.001.985.000,00	Rp. 1.501.264.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52medali	Penyelenggaraan MTQ pelajar tk DIY (13 cabang)							
1.01.1.01.01.00.17.003	Pengembangan Model PAUD	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53%	Pelayanan PAUD percontohan pada TPA Amongputera, SPS Bina Buah Hati, dan KB Bina Buah Hati	Percontohan PAUD di DIY	Dukungan 2,72% terhadap pencapaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	100%	Rp. 391.190.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52medali								
1.01.1.01.01.00.17.004	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53%	Pengelolaan 4 sistem informasi pendidikan (Dapodik SMA, Dapodik SMK, Dapodik SLB, dan Website Dikpora DIY)	penyebaran data dan informasi kependidikan	Dukungan 16,24% terhadap pencapaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	100%	Rp. 1.830.990.000,00	Rp. 2.426.589.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52medali	PPDB online 118 SMAN dan SMKN							
1.01.1.01.01.00.17.006	Penyelenggaraan Ujian	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53%	Evaluasi pendidikan pada 5 jenjang pendidikan (SD/MI/SDLB, SMPLB, SMP, SMALB, SMA, SMK, dan madrasah)	Terlaksananya evaluasi nasional Jenjang SD/MI/SDLB	Dukungan 13,05% terhadap pencapaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	100%	Rp. 1.872.962.000,00	Rp. 2.108.542.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52medali								
1.01.1.01.01.00.17.007	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53%	pelaksanaan penjaminan mutu sekolah pada 2 jenjang pendidikan	Optimalnya lembaga pendukung bidang kependidikan	Dukungan 6,79% terhadap pencapaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	100 %	Rp. 724.620.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52medali	penyaluran lembaga calon penerima hibah bidang kependidikan pada 5 lembaga (PGRI DIY, BMPS DIY, GOPTKI DIY, LOTA DIY)							
1.01.1.01.01.00.17.008	Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53%	Gebyar pendidikan (pameran produk siswa) (3500 orang)	mempertahankam siswa, pendidik dan tenaga pendidik yang berprestasi sebanyak 435 orang	Dukungan 679% terhadap pencapaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	100%	Rp. 3.480.867.000,00	Rp. 4.268.953.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52medali	Penghargaan prestasi bidang dikpora untuk 400 orang							
1.01.1.01.01.00.17.009	Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53%	Beasiswa untuk mahasiswa baru (bantuan biaya masuk perguruan tinggi) untuk 50 mahasiswa	peningkatan APK pendidikan tinggi dari 129,16% (2017) menjadi 130%	Dukungan 28,01% terhadap pencapaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	100%	Rp. 796.417.000,00	Rp. 4.423.559.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52medali	Beasiswa untuk mahasiswa reguler untuk 50 mahasiswa							
1.01.1.01.01.00.17.010	Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53%	Pembinaan dan penyelenggaran Duta Seni Pelajar DIY mampu menampilkan kesenian khas dalam DSP se Jawa Bali dan Lampung 1 kontingen	Satuan mutu pendidikan memiliki unggulan mutu pendidikan dari 10% menuju 40%	Dukungan 6,13% terhadap pencapaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	100%	Rp. 881.008.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52medali	penyelenggaraan Forum Unggulan Mutu 500 orang							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga — **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.18	**PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**										**Rp. 49.749.350.000,00**	**Rp. 54.701.730.000,00**		
1.01.1.01.01.00.18.001	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SLB	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.46%	Pelayanan pendidikan 373 PTK SLB	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten jenjang SLB	Dukungan 6,32% terhadap pencapaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	100%	Rp. 750.000.000,00	Rp. 1.244.944.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Pembinaan & pengembangan indentifikasi & assesmen pendidikan inklusif 100 guru							
							Verifikasi dan validasi data TPG SLB							
1.01.1.01.01.00.18.002	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SMA	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.46%	Peningkatan kemampuan terkait tata naskah dinas dan arsip pengelola perpustakaan SMA dan SMK di 5 Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten jenjang SMA	Dukungan 44,02% terhadap pencapaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 881.923.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Verifikasi dan validasi data TPG SMA							
1.01.1.01.01.00.18.003	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SMK	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.46%	Verifikasi dan validasi data TPG SMK	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten jenjang SMK	Dukungan 70,3% terhadap pencapaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 3.342.701.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.18.004	Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.46%	Pemberian Insentif GTT/PTT dan GTY dan PTY di lingkungan Dinas Dikpora DIY sebanyak 4440 orang	Pelayanan jenjang karir untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dukungan 35,3% trhadap pencapaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	100%	Rp. 47.999.350.000,00	Rp. 49.232.162.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pembinaan dan pengiriman Lomba pendidik dan tenaga kependidikan tingkat nasional (4 jenis lomba)							
							Penilaian angka kredit 7000 orang guru							
							Penilaian kinerja kepala calon kepala sekolah							
							Peningkatan kapasitas para calon assesor penilaian kinerja guru, penulisan karya ilmiah dan pengelolaan data kepegawaian							
							Seleksi wawancara calon pegawai kontrak							
1.01.1.01.01.00.20	**PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)**										**Rp. 3.827.245.000,00**	**Rp. 4.845.289.000,00**		
1.01.1.01.01.00.20.001	Produksi Media Pembelajaran	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	74%	Pengembangan 100 judul konten pada "Jogja Belajar"	Pengunjung jogja belajar meningkat dari 43.190 pengunjung menjadi 110.000 pengunjung	Dukungan 48,34% terhadap pencapaian Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK 74%	100%	Rp. 1.377.936.000,00	Rp. 1.592.729.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Pengembangan media ABK (4 ketunaan)							
							Peningkatan Kompetensi 300 guru bidang TIK							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga — **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.20.002	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	74%	Inovasi dan kreasi bagi para guru dan siswa dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan gebyar anugrah Ki Hajar (3 kejuaraan) dengan target peroleh 2 emas, 1 perunggu	Layanan pendidikan dan peningaktan prestasi pembelajaran berbasis TIK.	Dukungan 31,81% terhadap pencapaian Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK 74%	100%	Rp. 2.449.309.000,00	Rp. 3.252.560.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Layanan pembelajaran dan pendampingan TIK dengan Mobil Learning Service dan Institusional di 30 sekolah							
							Pemeliharaan 65 IDC dan BTS							
1.01.1.01.01.00.21	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK**										**Rp. 7.250.000.000,00**	**Rp. 11.000.000.000,00**		
1.01.1.01.01.00.21.001	Pelayanan Pendidikan pada BLUD	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Teknik Berstandar	2045peserta	Pelayanan Pendidikan yang terstandar 1 tahun	Terlaksananya Pelayanan pendidikan teknik sesuai standar ISO 9001:2015 sistem manajemen mutu	Dukungan 100% terhadap pencapaian Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Teknik Berstandar 2045 peserta	100%	Rp. 7.250.000.000,00	Rp. 11.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.22	**PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL**										**Rp. 1.263.069.000,00**	**Rp. 1.700.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga — **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.22.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Bantul	78.67%	Seleksi lomba PTK tingkat kabupaten (3 kejuaraan)	optimalnya pelayanan pendidikan menengan di kabupaten Bantul	Dukungan 100% terhadap pencapaian Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Bantul 78,67%	100%	Rp. 1.263.069.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Seleksi lomba SMA tingkat kabupaten (8 kejuaraan)							
							Seleksi lomba SMK tingkat kabupaten (4 kejuaraan)							
1.01.1.01.01.00.23	**PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN**										**Rp. 1.218.050.000,00**	**Rp. 1.850.000.000,00**		
1.01.1.01.01.00.23.005	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Sleman	83.33%	Seleksi lomba dan workshop PTK tingkat kabupaten (3 kejuaraan)	Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Menengah di Kabupaten Sleman	Dukungan 100% terhadap pencapaian Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Slema 83,33%	100%	Rp. 1.218.050.000,00	Rp. 1.850.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Seleksi lomba SMA tingkat kabupaten (8 kejuaraan)							
							Seleksi lomba SMK tingkat kabupaten (4 kejuaraan)							
1.01.1.01.01.00.24	**PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO**										**Rp. 1.385.660.000,00**	**Rp. 1.850.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga — **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.24.003	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Kulon Progo	72.67%	Penguatan Pendidikan Karakter	Optimalisasi Pelayanan pendidikan Menengah di Kabupaten Kulon Progo	Dukungan 100% terhadap pencapaian Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Kulon Progo 72,67%	100%	Rp. 1.385.660.000,00	Rp. 1.850.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat							
							Penyusunan Soal Latian Ujian Nasional							
							Seleksi Lomba PTK Tingkat Kabupaten (3 kejuaran)							
							Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten (8 kejuaraan)							
							Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten (3 kejuaraan)							
1.01.1.01.01.00.25	**PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**										**Rp. 1.280.525.000,00**	**Rp. 1.850.000.000,00**		
1.01.1.01.01.00.25.004	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Gunungkidul	81%	Penguatan Pendidikan Karakter	Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Menengah di Kabupaten Gunung Kidul	Dukungan 100% terhadap pencapaian Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta 84,83%	100%	Rp. 1.280.525.000,00	Rp. 1.850.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Penyelenggaraan Lomba sekolah sehat							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penyusunan soal Latihan Ujian Nasional							
							Seleksi Lomba PTK tingkat Kabupaten (3 kejuaraan)							
							Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten (8 kejuaraan)							
							Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten (3 kejuaraan)							
1.01.1.01.01.00.26	**PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA**										**Rp. 1.443.234.000,00**	**Rp. 1.800.000.000,00**		
1.01.1.01.01.00.26.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta	84.83%	Peningkatan mutu pendidikan menengah (4 kegiatan)	Optimalisasi pelayanan pendidikan menengah di Kota Yogyakarta	Dukungan 100% terhadap pencapaian Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta 84,83%	100%	Rp. 1.443.234.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Penyelenggaraan Pendidikan karakter (3 kegiatan)							
							Seleksi Lomba PTK tingkat kabupaten (3 kejuaraan)							
							Seleksi Lomba SMA tingkat kabupaten (8 kejuaraan)							
							Seleksi lomba SMK tingkat kabupaten (4 kejuaraan)							
1.19	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**													

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga — **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.1.01.01.00	**Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga**													
1.19.1.01.01.00.15	**PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN**										**Rp. 6.395.716.000,00**	**Rp. 10.903.329.000,00**		
1.19.1.01.01.00.15.001	Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda	20%	Pengiriman 4 orang peserta kapal pemuda nusantara	Optimalnya peran pemuda dalam pembangunan	Dukungan 25,64% terhadap pencapaian Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda 20%	100%	Rp. 599.965.000,00	Rp. 659.504.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Pengiriman 4 orang peserta pertukaran pemuda antar negara							
							Pengiriman 5 orang pemuda pelopor tingkat nasional							
1.19.1.01.01.00.15.002	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda	20%	Pembangunan Talud Kwarda sepanjang 47 Meter	Optimalnya sarana prasarana kepemudaan	Dukungan 2,56% terhadap pencapaian Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda 20%	100%	Rp. 1.829.853.000,00	Rp. 2.524.793.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.19.1.01.01.00.15.003	Pembinaan Kepribadian Generasi Muda	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda	20%	Hibah 2 lembaga kepemudaan (Kwarda dan KNPI)	500 orang Generasi muda yang berkarakter dan berkebangsaan	Dukungan 46,15% terhadap pencapaian Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda 20%	100%	Rp. 2.965.898.000,00	Rp. 3.900.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Pameran hasil karya pemuda DIY 3 keg/lokasi							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | **Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pembinaan 500 orang generasi muda dalam jambore pemuda, LBB/tonti dan kander anti NAPZA							
							Seleksi dan pelatihan 40/40 putra/putri calon anggota paskibraka							
1.19.1.01.01.00.15.004	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda	20%	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan (IT, kuliner dan jasa perdagangan) bagi 40 kelompok (1 kelompok 5 orang) di kantong kemiskinan	peningkatan jumlah wirausaha muda dari 405 wirausaha muda (2018) menjadi 500 wirausaha muda (2019)	Dukungan 25% terhadap pencapaian Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda 20%	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 3.819.032.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.19.1.01.01.00.16	**PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA**										**Rp. 50.936.125.000,00**	**Rp. 36.328.498.000,00**		
1.19.1.01.01.00.16.001	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Medali dalam Kompetisi POPWIL	5medali	Pembangunan Stadion Mandala Krida (Pengadaan barang MEE)	Optimalnya sarana prasarana olahraga.	Dukungan 25% terhadap pencapaian jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS 12 medali	100%	Rp. 25.851.365.000,00	Rp. 25.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	12medali								
1.19.1.01.01.00.16.002	Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Medali dalam Kompetisi POPWIL	5medali	Pembinaan atlet berbakat usia 10-18th selama 8 bulan disiapkan sebagai kerangk ateam POPNAS agar terstandar sesuai dengan cabornya (16 cabor) sebanyak 360 orang	Mempertahankan dan meningkatkan prestasi lomba olahraga tingkat nasional	Dukungan 75% terhadap pencapaian jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS 12 medali	100%	Rp. 25.084.760.000,00	Rp. 11.328.498.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.088.603.633.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah Medali dalam Kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	12medali	Pembinaan dan pengiriman kontingen PEPARPENAS (di Papua) 3 cabor							
							Pembinaan dan pengiriman kontingen POPNAS (di Papua) 23 cabor							
							Pembinaan dan pengiriman kontingen POSPENAS 9 cabor							
							Pengiriman kontingen olahraga tradisional (Lomba Olahraga Tradisional) 3 nomor lomba							
							Penguatan peran lembaga olahraga 2 lembaga (KONI dan NPC)							
							Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah (POPDA, POSPEDA, PEPARPEDA, Kejurda Olahraga Pelajar, Tri Lomba Juang, Haornas, Kejuaraan Bola Voli Piala Raja, Kejuaraan Catur Piala Raja) 8 kejuaraan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan — **Jumlah Pagu : Rp. 137.289.585.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.02	**KESEHATAN**													
1.02.1.02.01.00	**Dinas Kesehatan**													
1.02.1.02.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 2.184.111.000,00**	**Rp. 3.200.000.000,00**		
1.02.1.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01) 3 jenis belanja benda pos;	Administrasi perkantoran yang sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 66,58% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.424.139.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							02) 1 paket pengiriman surat;							
							03) 12 bulan belanja telepon, air, listrik,dan fax;							
							04) 1 paket pulsa aduan masyarakat;							
							05) 1 tahun pembayaran PBB ;							
							06) 2 kali KIR R4 (mobil pick up);							
							07) 1 tahun STNK R4;							
							08) 1 tahun STNK R2;							
							09) 12 bulan retribusi sampah;							
							10) 1 paket jasa kebersihan kantor Dinkes dan Instalasi Farmasi;							
							11) 5 jenis pemeliharaan alat-alat kantor;							
							12) 57 jenis belanja ATK;							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 137.289.585.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							13) 12 jenis belanja cetakan;							
							14) 68000 lembar belanja penggandaan;							
							15)11 jenis belanja alat listrik;							
							16) 8 jenis belanja alat kebersihan;							
							17) 3 eksemplar Surat Kabar;							
							18) 1 paket pengelola arsip (non PNS);							
							19) 2 jasa non PNS;							
							20) 51 ob honor panitia penilai arsip;							
							21) 23 unit pengisian tabung pemadam kebakaran;							
							22) 1 pkt logistik coldroom							
1.02.1.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1) 12 bln honor pengelola keuangan; 2) 12 bln honorarium pengadministrasi kepeg; 3) 13 bln Honorarium PTT ; 4) 1 thn Jasa Keamanan Kantor; 5) 12 ob BPJS Kesehatan PTT;	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 19,38% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 441.683.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1) belanja makan minum rapat; 2) perjalanan dinas dalam daerah; 3) perjalanan dinas luar daerah	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 14,03% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	32 %	Rp. 318.289.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan — **Jumlah Pagu : Rp. 137.289.585.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 567.004.000,00**	**Rp. 640.000.000,00**		
1.02.1.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1) belanja pengadaan laptop 1 buah; 2) Belanja pengadaan lcd 2 buah; 3) Belanja pengadaan mimbar 1 buah	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 5,67% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.384.000,00	Rp. 40.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1) 1 paket Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung tempat Kerja; 2) 1 paket pembelian penutup kaca gedung instalasi farmasi	Terpelihara rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 1,14% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 80.500.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 sebanyak 23 unit dan roda 2 sebanyak 35 unit)	terpelihara kendaraan dinas operasional 100%	Dukungan 73,80% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 375.880.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1) 3 jenis Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor; 2) 5 jenis Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor; 3) 2 jenis Belanja pemeliharaan mebelair	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 12,06% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 85.240.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**										**Rp. 59.835.000,00**	**Rp. 65.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan — **Jumlah Pagu : Rp. 137.289.585.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.03.001	Pengembangan I S O	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1) 2 Laporan audit internal 2) 1 Dokumen surveilans audit 3) 2 Laporan survei kepuasan pelanggan 4) 1 laporan kajian manajemen	Kualitas manajemen pelayanan sesuai standar mutu 100%	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur sebesar 29,49%	100%	Rp. 32.935.000,00	Rp. 35.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1) peningkatan pemahaman tentang jabatan fungsional sebanyak 165 OB; 2) 1 dokumen angka kredit jabatan fungsional; 3) 1 kesepakatan penilaian angka kredit dan 2 dokumen rekomendasi ukom	kelancaran jenjang karir jabatan fungsional 100%	Dukungan peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur 29,49%	100%	Rp. 26.900.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 439.035.000,00**	**Rp. 560.000.000,00**		
1.02.1.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1 Dolumen Laporan Keuangan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan terselesaikannya Laporan Keuangan 100%	100%	Rp. 11.141.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan — **Jumlah Pagu : Rp. 137.289.585.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1) dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA; 2) dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022; 3) pengembangan aplikasi/software pendukung kinerja Dinas Kesehatan DIY; 4) 200 Materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini; 5) 1 rekomendasi hasil Survei kesehatan 6) Penyelenggaraan Forum OPD	tersusunnya dokumen perencanaan dinas kesehatan DIY dan informasi pendukung 100%	Dukungan 84,07 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%	Rp. 402.907.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 11 program 23 kegiatan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,83% terhadap penatausahaan keuangan dna pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	5%	Rp. 24.987.000,00	Rp. 40.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.15	**PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT**										**Rp. 3.290.946.000,00**	**Rp. 4.000.000.000,00**		
1.02.1.02.01.00.15.001	Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Balita Sehat	39.48%	1) Jumlah Petugas gizi yang memiliki kompetensi dasar (54 faskes)	optimalnya pembinaan kesehatan dan gizi masyarakat	Penurunan Persentase Balita Kurus (0,1 %)	100%	Rp. 923.719.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase Desa Sehat Mandiri	52.83%	2) Persentase kualitas surveilans gizi di kabupaten/kota (40 % =2 KABUPATEN)		Penurunan Persentase Ibu Hami; Kurang Energi Kronik (KEK) (0,25 %)	100%				

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 137.289.585.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							3) Jumlah fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas gizi yang memenuhi standar (69 faskes)		Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4) (74 %)	100%				
							4) Jumlah ibu hamil yang didampingi oleh tenaga terlatih 4,24% (2000 orang)		Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 86%	100%				
							5) Jumlah petugas kesehatan yang mendapat bimtek pendampingan bumil (80 orang)							
							6) Jumlah sarana penunjang pendampingan (39.175 eksemplar)							
							7) Jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan PWS KIA Lengkap dan tepat waktu (2 kab/kota)							
1.02.1.02.01.00.15.002	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Balita Sehat	39.48%	1) Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (60 desa)	lingkungan sehat dan pola hidup sehat	Jumlah Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM	13,7 %	Rp. 2.367.227.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase Desa Sehat Mandiri	52.83%	2) Jumlah hotel dilakukan IKL (222 sarana)		Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri	48,86 %				
							3) Jumlah Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS) (5 sarana)		Persentase Jumlah TTU yang memenuhi syarat	90 %				

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 137.289.585.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4) Jumlah pasar dilakukan IKL (60 sarana)		persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD	100 %				
							5) Jumlah Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) (48 sarana)		Persentase terbentuknya Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas (29,75 %)	100%				
							6) Jumlah RS dilakukan IKL (30 sarana)							
							7) Jumlah SD, SMP, SLTA yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) (1182 sarana)							
							8) Kab/kota yang mendapat fasilitas kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan (2 kab/kota)							
							9) Kabupaten Kota yang melaksanakan kampanye GERMAS (5 kab/kota)							
							jamban sehat untuk masyarakat miskin (5 kab/kota di DIY)							
1.02.1.02.01.00.16	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**										**Rp. 3.701.147.000,00**	**Rp. 4.000.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan — **Jumlah Pagu : Rp. 137.289.585.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.16.001	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	56.33%	1) anak < 1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap (93,5 % = 39.300 anak))	optimalnya penyelenggaraan imunisasi dan pencegahan penyakit serta surveilan penyakit	Persentase cakupan imunisasi anak dibawah 1 tahun mendapat imunisasi dasar lengkap (97,7 %)	100%	Rp. 970.070.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2) Anak Baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster) (80,5 %= 34.485 anak)		persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100 %				
							3) Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) kurang dari 24 jam (100 %)							
1.02.1.02.01.00.16.002	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	56.33%	9) persentase fasyankes yang melaksanakan strategi DOTS (96,95 %= 191 (RS dan Pusk) dari total 197)	optimalnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular	Annual Parasite Insidence 100%	100 %	Rp. 2.731.077.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan ARV (50% =14 faskes)		Jumlah Kasus kematian DBD di Fasyankes dilakukan audit klinis <1 per 100.000 sebesar 100%	100%				
							jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan audit kematian DBD sesuai standar (5 kab/kota)		Persentase Cakupan penemuan TB sebesar 34 %	100%				
							Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian kasus Malaria (5 kab/kota)		persentase DM diketemukan sebesar 10 %	100%				

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 137.289.585.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah puskesmas yang melakukan pendampingan pengobatan dan perawatan penderita kanker (50 faskes)		Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pneumoni lebih dari 60% sebesar 40%	100%				
							Jumlah puskesmas yang melakukan skrining dan faktor risiko hipertensi pada usia >15 tahun (30 %=30 puskesmas)		Persentase Kanker diketemukan sebesar 3 %					
							Jumlah puskesmas yang melakukan skrining dan faktor risiko kesehatan jiwa (60 %= 60 puskesmas)		persentase kasus jiwa diketemukan sebesar 10 %	100%				
							jumlah puskesmas yang melakukan skrining DM pada usia >15 tahun (50 faskes)		Persentase penderita HIV yang menerima pengobatan ARV sebesar 66 %	100%				
							Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumoni (75,12 % = 148 (RS dan Puskesmas dari total 197)		persentase PJPD ditemukan sebesar 10 %	100%				
							persentase klinik yang melaksanakan strategi DOTS (50%= 50 klinik)							
							Persentasi DPS yang melaksanakan strategi DOTS (40%= 40 DPS (Dokter Praktek Swasta))							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan — **Jumlah Pagu : Rp. 137.289.585.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.17	**PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN**										**Rp. 71.863.988.000,00**	**Rp. 1.600.000.000,00**		
1.02.1.02.01.00.17.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	41.08%	BKK pembangunan RSUD Wates tahap ke 2 (70 Miliyar)	terselenggaranya pelayanan kesehatan primer, rujukan dan kesehatan lainnya secara optimal	FKTP (puskesmas, klinik pratama), FKTL (RS) dan fasyankes lain (labkesda) yang memenuhi standar pelayanan (141 faskes)	100%	Rp. 71.560.811.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan pembinaan kesehatan tradisional diwilayah kerjanya (15 Puskesmas)		Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya (15 faskes)	100%				
							Jumlah faskes yang terintegrasi dengan sistem SPGDT (40 % = 30 faskes)							
							jumlah klinik pratama yang mendapatkan pembinaan pelayanan (20 % = 30 klinik)							
							Jumlah laboratorium kesehatan yang mendapatkan pembinaan wilayah (1 % = 1 laboratorium)							
							Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan haji (121 Puskesmas)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											**Jumlah Pagu : Rp. 137.289.585.000,00**			
Nomor	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**	
					Hasil Program		**Keluaran Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**SKPD**	**Jenis Kegiatan**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**1/2/3**	**1/2/3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
							Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan (80 %= 100 puskesmas)							
							jumlah RS yang mendapatkan pembinaan pelayanan (40 % = 30 RS)							
1.02.1.02.01.00.17.005	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	41.08%	jumlah klinik pratama yang mendapatkan pembinaan mutu (10 klinik pratama)	FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu	FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu (172 faskes)	100%	Rp. 303.177.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							jumlah laboratorium yang mendapatkan pembinaan (1 labkesda)							
							jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu (121 Puskesmas)							
							jumlah RS yang mendapatkan pembinaan mutu (40 RS)							
1.02.1.02.01.00.18	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN**										**Rp. 945.522.000,00**	**Rp. 1.100.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan — **Jumlah Pagu : Rp. 137.289.585.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.18.001	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan	50.24%	Jumlah FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan (40,32%=35 RS)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana	Jumlah FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan sebesar 82,65%	100%	Rp. 422.522.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	72.05%	Jumlah FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana (35 RS)							
							Jumlah FKTP yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana (201 FKTP)							
							Jumlah kab/kota yang menerapkan sistem informasi tenaga dan sarana kesehatan secara terintegrasi (3 kab/kota)							
1.02.1.02.01.00.18.002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Keshatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan	50.24%	jumlah perbekkes dan obat bufferstock (1 tahun)	optimalnya pelayanan kefaramsian FKTP dan FKTL	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kefarmasian, sediaan farmasi dan Perbekes serta pengendalian makanan (236 sarana)	100%	Rp. 523.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	72.05%	Jumlah Puskesmas dan RS yang mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian(35 Fasilitas Kesehatan)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											**Jumlah Pagu : Rp. 137.289.585.000,00**			
Nomor	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**	
					Hasil Program		**Keluaran Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**SKPD**	**Jenis Kegiatan**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**1/2/3**	**1/2/3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
							Jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian yang mendapatkan pembinaan (30 Sarana)							
							persentase makanan yang memenuhi syarat keamanan makanan (60 % = 120 (dari total 200 jumlah sample))							
1.02.1.02.01.00.19	**PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES**										**Rp. 10.083.062.000,00**	**Rp. 11.000.000.000,00**		
1.02.1.02.01.00.19.001	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Jumlah Layanan Pengembangan Laboratorium untuk Mendukung Program Rujukan dan Kebutuhan Masyarakat	11layanan	jumlah pelatihan untuk mendukung pengembangan layanan (2 paket)	pelayanan laboratorium kesehatan sesuai standar	Jumlah pengembangan layanan di Balai Laboratorium Kesehatan (2 (PME BTA, PME Laboratorium Patologi)	100%	Rp. 10.083.062.000,00	Rp. 11.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Jumlah pemenuhan alat dan gedung untuk mendukung pengembangan layanan (4 alat jenis, 1 unit gedung)							
1.02.1.02.01.00.20	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES**										**Rp. 7.517.200.000,00**	**Rp. 20.000.000.000,00**		
1.02.1.02.01.00.20.001	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Mantan Linatih yang Meningkat Kompetensinya	62%	Persentase SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya 62%	Penyelenggaraan pelayanan pelatihan SDM kesehatan yang sesuai standar	Jumlah pelatihan yang dievaluasi (3 pelatihan)	100%	Rp. 7.517.200.000,00	Rp. 20.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan — **Jumlah Pagu : Rp. 137.289.585.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.21	**PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS**										**Rp. 36.637.735.000,00**	**Rp. 60.000.000.000,00**		
1.02.1.02.01.00.21.001	Pelayanan Jaminan Kesehatan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	23layanan	pelayanan kepesertaan dan pengembangan jaminan (1 tahun)	pelayanan kesehatan komplemen dan suplemen JKN di DIY (22 jenis layanan)	persentase jenis layanan jamkesos yang diakses masyarakat sebesar 62 %	100%	Rp. 36.637.735.000,00	Rp. 60.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100%	pembiayaan klaim (12 bulan)							
							Pengembangan mutu bapel jamkesos (1 tahun)							
							Pengembangan penjaminan kesehatan (1 tahun)							
							penyelenggaraan administrasi perkantoran (12 bulan)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Rumah Sakit Jiwa Grhasia | **Jumlah Pagu : Rp. 22.741.156.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.02	**KESEHATAN**													
1.02.1.02.02.00	**Rumah Sakit Jiwa Grhasia**													
1.02.1.02.02.00.22	**PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA**										**Rp. 22.741.156.000,00**	**Rp. 26.115.271.600,00**		
1.02.1.02.02.00.22.001	Pelayanan Kesehatan Jiwa	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	RS Jiwa Grhasia	Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living)	87%	Pelayanan Farmasi, Laboratorium dan Radiologi (12 bulan)	optimalnya pelayanan kesehatan jiwa	mempertahankan akreditasi pelayanan kesehatan rumah sakit pada status tingkat Paripurna	100 %	Rp. 22.741.156.000,00	Rp. 26.115.271.600,00	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	Sedang Berjalan
					Angka Pasien Cidera karena Fiksasi	4%	Pelayanan gizi (12 bulan)							
					Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi kurang dari atau sama dengan 30 menit	84%	pembayaran Gaji dan Tunjangan Tenaga Pegawai Tidak Tetap (24 orang)							
					Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan Per Tahun	72%	Pemeliharaan rumah tangga RS (12 bulan)							
					Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Jiwa kurang dari atau sama dengan 60 menit	66%	Pemeliharaan sarana prasarana RS (12 bulan)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Rumah Sakit Jiwa Grhasia | **Jumlah Pagu : Rp. 22.741.156.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Tingkat Penggunaan Tempat Tidur/Bed Occupancy Rate (BOR)	60%	Pengadaan Media Promosi Informasi Rumah Sakit (3 paket)							
					Penyelesaian Berkas Pengajuan Klaim Pasien Jaminan Kesehatan	77%	pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit (12 bulan)							
					Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit	82%	Pengandaan Logistik RS (12 bulan)							
					Pemenuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Analisis Beban Kerja	87%	pengiriman diklat dan magang (28 jenis)							
					Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit	80%	penyelenggaraan Forum OPD (1 Kegiatan)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Rumah Sakit Paru Respira | **Jumlah Pagu : Rp. 14.788.799.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.02	**KESEHATAN**													
1.02.1.02.03.00	**Rumah Sakit Paru Respira**													
1.02.1.02.03.00.23	**PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA**										**Rp. 14.788.799.000,00**	**Rp. 18.346.559.040,00**		
1.02.1.02.03.00.23.001	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	RS Paru Respira	Angka Keberhasilan Pengobatan (Sucsess Rate) TB	83%	Bahan kimia dan bahan pakai habis (2 paket)	pelayanan kesehatan paru yang optimal	Pmempertahankan akreditasi pelayanan kesehatan rumah sakit pada status tingkat Utama	100%	Rp. 14.788.799.000,00	Rp. 18.346.559.040,00	Rumah Sakit Paru Respira	Sedang Berjalan
					Angka Kematian Pasien > 48 Jam	2%	Forum OPD (1 Kegiatan)							
					Rata-Rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari	80kali kunjungan	Logistik RS (12 bulan)							
					Bed Occupancy Rate (BOR)	60%	Obat-obatan RS (2 paket)							
					Length of stay (LOS)	5Hari	Pemeliharaan rumah tangga RS 912 bulan)							
							Pemeliharaan sarana prasarana RS (12 bulan)							
							Pengembangan mutu dan keselamatan pasien (1 paket)							
							Promosi RS (1 paket)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**													
1.03.1.03.01.00	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**													
1.03.1.03.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 9.854.365.000,00**	**Rp. 13.400.000.000,00**		
1.03.1.03.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat listrik 86 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100%	Dukungan sebesar 63,36 % terhadap terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	Rp. 6.152.000.000,00	Rp. 7.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Penataan arsip 50.779 arsip							
							Solar operasional genset 1 tahun							
							Alat tulis kantor 150 jenis							
							Barang cetakan 64 jenis							
							Belanja pengisian tabung gas 12 unit							
							Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 38 unit							
							Jasa Kebersihan kantor 267.632 m2							
							Jasa Komunikasi,Listrik,Air 1 tahun							
							Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 126 unit roda 2 : 87 unit roda 4 : 33 unit roda 6 : 5 unit roda 3 : 1 unit							
							Jasa surat menyurat 3500 surat							
							Penggandaan 958.000 lembar							
							Surat Kabar/Majalah 7 SKH							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jasa Laundry 1 tahun							
1.03.1.03.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Administrasi Keuangan 1044 OB	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan sebesar 28, 72 terhadap terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	Rp. 2.902.365.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Jasa Keamanan Kantor 12 bulan 28 orang							
							Jasa Pengelola Kepegawaian 108 OB							
							Jasa Perencana Program 60 OB							
							Jasa tenaga pendukung 44 orang							
1.03.1.03.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah 1 tahun	Kelancaran Koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan sebesar terhadap 7,92 % terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	Rp. 800.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Terselanggaranya rapat-rapat dan koordinasi 1 tahun							
1.03.1.03.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 3.194.517.000,00**	**Rp. 5.300.000.000,00**		
1.03.1.03.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebeluir 2 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	dukungan sebesar 18,10 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100 %	Rp. 668.750.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Peralatan Gedung Kantor 5 jenis							
							Perlengkapan gedung kantor 2 jenis							
1.03.1.03.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : 7 gedung seluas 24.000 m2	Terpelihara kantor sesuai standar Sarpras 100%	dukungan sebesar 42,29 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100 %	Rp. 1.062.247.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD 177 roda 2 : 87 unit roda 4 : 33 unit roda 6 : 5 unit Roda 3 : 1 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	dukungan sebesar 29,67 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100 %	Rp. 1.096.170.000,00	Rp. 1.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan alat-alat berat 6 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100%	dukungan sebesar 9,94 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100 %	Rp. 367.350.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan alat-alat komunikasi 3 jenis							
							Pemeliharaan alat-alat kantor 12 jenis							
							Pemeliharaan perlengkapan bermesin 1 jenis							
							Pemeliharaan perlengkapan kantor 8 jenis							
1.03.1.03.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 727.100.000,00**	**Rp. 737.000.000,00**		
1.03.1.03.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	LKJ dan LKJiP (2 dokumen)	Nilai LKJIP dari semula 77,17 (BB) menjadi 80 (A)	Dukungan sebesar 2,06% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Keuangan Audited : 1 laporan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 3 %	Dukungan sebesar 12,38% terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100 %	Rp. 90.000.000,00	Rp. 95.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Laporan Keuangan bulanan : 12 Laporan							
							Laporan Keuangan Semester : 2 Laporan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan							
							Laporan Keuangan Triwulan : 4 Laporan							
1.03.1.03.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pekerjaan Jasa Konsultansi digitalisasi arsip (1 dokumen)	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Dukungan sebesar 81,99% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	100 %	Rp. 596.100.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							DPA 2019 (1 dokumen)							
							DPA-P TH 2019 (1 dokumen)							
							Forum Perangkat Daerah (1 kali)	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020						
							Publikasi program/kegiatan SKPD (2 dokumen)							
							Renja SKPD TH 2020 (1 dokumen)							
							RKA TH 2020 (1 dokumen)							
							RKA-P TH 2019 (1 dokumen)							
							tenaga pendamping SKPD (6 bulan)							
1.03.1.03.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD : 12 bulan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan sebesar 3,57% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	100 %	Rp. 26.000.000,00	Rp. 27.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.00.19	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**										**Rp. 91.442.298.000,00**	**Rp. 150.000.000.001,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.19.001	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Lendah	Perbandingan antara Panjang Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik dan Sedang dengan Panjang Jaringan Jalan Provinsi	73.46%	Jembatan Tlacap (18 meter) Jembatan Tambakrejo (6 meter) Jembatan Gondanglegi (6 meter)	Dipertahankannya kelaikan fungsi 3 jembatan	Dukungan terhadap kondisi mantap jalan provinsi berupapeningkatan kondisi dari rusak menjadi sedang/baik sepanjang 10 km	100 %	Rp. 64.680.453.000,00	Rp. 100.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Perbandingan Panjang Jalan Baru yang Dibangun dibandingkan dengan Panjang Jalan Baru yang Direncanakan	23.44%	Ruas Jalan Brosot-Toyan 5 km	Tersedianya peningkatan kapasitas jalan akses bandara NYIA sebesar 35 %						
							Ruas jalan sampakan -singosaren 2 km	Tersedianya jalan dalam kondisi mantap pada ruas jalan provinsi						
							Ruas Jalan Tegalsari-Klepu 3 km	Tersedianya jalan dalam kondisi mantap pada ruas jalan provinsi di jalur bedah Menoreh sebesar 100 %						
1.03.1.03.01.00.19.002	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Bantul Karangmojo Ponjong Semin Tempel	Perbandingan antara Panjang Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik dan Sedang dengan Panjang Jaringan Jalan Provinsi	73.46%	Pemeliharaan Rutin Jalan	760,45 Km	Dukungan berupa dipertahankanya kondisi mantap jaringan jalan provinsi sebesar 100 % Dukungan data penyelenggaraan jalan pada tahun 2020	100 %	Rp. 18.161.845.000,00	Rp. 50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Perbandingan Panjang Jalan Baru yang Dibangun dibandingkan dengan Panjang Jalan Baru yang Direncanakan	23.44%	Pemeliharaan Rutin Jembatan	5225 M						
							Sertifikasi ruas jalan Provinsi	120 SPS						
1.03.1.03.01.00.19.003	Pembangunan Jalan dan Jembatan	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Depok	Perbandingan antara Panjang Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik dan Sedang dengan Panjang Jaringan Jalan Provinsi	73.46%	Pembangunan jembatan Gebang, Maguwoharjo, Depok, Sleman	100 m	Tertatanya kawasan Maguwoharjo - Embung Tambak Boyo - Candi Gebang	10%	Rp. 8.600.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Perbandingan Panjang Jalan Baru yang Dibangun dibandingkan dengan Panjang Jalan Baru yang Direncanakan	23.44%								
1.03.1.03.01.00.20	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI**										**Rp. 16.713.700.000,00**	**Rp. 30.600.000.001,00**		
1.03.1.03.01.00.20.005	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	24100SR	Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Kaliurang, Simpang MM UGM, Sleman (lanjutan)	1 paket	Penuntasan penanganan 2 jumlah titik genangan di kawasan perkotaan	100 %	Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 17.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Jumlah Sampah yang Dikelola di TPA Regional	600ton/hari	Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul (lanjutan)	1 paket						
					Lokasi Genangan yang Ditangani	1lokasi								
1.03.1.03.01.00.20.007	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Piyungan	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	24100SR	Pendampingan KPBU Pengembangan TPA Regional dan Limbah B3	1 Paket	Tahapan persiapan KBPU	100%	Rp. 77.776.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Jumlah Sampah yang Dikelola di TPA Regional	600ton/hari								
					Lokasi Genangan yang Ditangani	1lokasi								
1.03.1.03.01.00.20.008	Pengelolaan Sistem Jaringan Air Limbah	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	24100SR	. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan	bebas B3	Dukungan 100% operasi dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah terpusat untuk mempertahankan layanan sistem air limbah terpusat sebesar 24.100 SR	100 %	Rp. 2.876.610.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Jumlah Sampah yang Dikelola di TPA Regional	600ton/hari	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan	Coliform Max 50 JPT/100 ml						
					Lokasi Genangan yang Ditangani	1lokasi	Pemeliharaan jaringan air Limbah	234 km						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.20.009	Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	24100SR	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki	PH 6-9	Dukungan kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat untuk Mempertahankan layanan pengolahan air limbah terpusat dan lumpur tinja (IPLT) sebesar 100 m3/hari pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY dari 23.000 SR Menjadi 24	100 %	Rp. 1.127.072.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Jumlah Sampah yang Dikelola di TPA Regional	600ton/hari	Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja	1 unit						
					Lokasi Genangan yang Ditangani	1lokasi	Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT	BOD Max 75 mg/ltr						
1.03.1.03.01.00.20.010	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	24100SR	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL (Ambang Batas BOD Max)	75 mg/ltr	Dukungan kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan PemKab/Kota) pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY dari 23.000 SR Menjadi 24.100 SR	100 %	Rp. 2.432.242.000,00	Rp. 2.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Jumlah Sampah yang Dikelola di TPA Regional	600ton/hari	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform	Coliform Max10.000 JPT/100ml)						
					Lokasi Genangan yang Ditangani	1lokasi	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara	NH3 dan H2S max 1,500 ppm dan 0,010 ppm						
							Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge	bebas B3						
							Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	68 unit						
							Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL	1 tahun						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.20.011	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	24100SR	Pembuatan jaringan pipa lateral	3000 m	Dukungan Penambahan Layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di KPY sebesar 1000 SR	100 %	Rp. 4.200.000.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Jumlah Sampah yang Dikelola di TPA Regional	600ton/hari								
					Lokasi Genangan yang Ditangani	1lokasi								
1.03.1.03.01.00.21	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**										**Rp. 12.150.000.000,00**	**Rp. 210.000.000.000,00**		
1.03.1.03.01.00.21.004	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional	81648meter	Pendampingan KPBU Spam Regional	1 Paket	Dukungan terhadap penduduk berakses air minum melalui optimaslisasi 44 spam desa	100 %	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 200.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Air Curah yang Dikelola pada SPAM Regional	450liter/detik	Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES	12 Kelompok						
1.03.1.03.01.00.21.005	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional	81648meter	Operasi dan Pemeliharaan IPA	3 unit	Dukungan kegiatan Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum Regional Untuk Peningkatan Jumlah Air Curah yang diproduksi Spam Regional menjadi 450 lt/dtk	100 %	Rp. 9.150.000.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Air Curah yang Dikelola pada SPAM Regional	450liter/detik	Operasi dan Pemeliharaan Clearwell	2 unit						
							Operasi dan Pemeliharaan Intake dan Kantor	2 unit						
							Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan	70 km						
							Operasi dan Pemeliharaan Prasedimentasi	2 unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Operasi dan Pemeliharaan Reservoar	5 unit						
							penyusunan bussiness plan pengelolaan SPAM Regional	1 dokumen						
1.03.1.03.01.00.22	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU**										**Rp. 19.062.680.000,00**	**Rp. 38.000.000.000,00**		
1.03.1.03.01.00.22.006	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Air Baku yang Dihasilkan Setiap Tahun	219.5liter/detik	Operasional Sekretriat Dewan Sumber Daya Air DIY	1 dokumen	Penilaian kelayakan dan pembangunan sarpras penyediaan air baku guna mendukung penambahan kapasitas air baku sebesar 219,5 lt/detik	100 %	Rp. 7.462.680.000,00	Rp. 20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Air Baku yang Dipertahankan Ketersediannya	51.6%	Pembangunan Embung Jeruk Wudel, Girisubo, Gunungkidul	1 unit						
							Penilaian kelayakan potensi sumber air baku	1 dokumen						
							Penyusunan DED Broncupturing Panggang, Panggang, Gunungkidul	1 dokumen						
							Penyusunan DED Embung Ngreco, Pundong, Bantul	1 dokumen						
							Penyusunan DED Long Storage Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul	1 dokumen						
1.03.1.03.01.00.22.007	Pengelolaan Air Baku	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Nglipar	Air Baku yang Dihasilkan Setiap Tahun	219.5liter/detik	Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga	24 Embung	Dukungan mempertahankan air baku dari total sebesar 72 ltr/detik guna mendukung Pemenuhan Ketersediaan Air Baku	100 %	Rp. 11.600.000.000,00	Rp. 18.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Air Baku yang Dipertahankan Ketersediannya	51.6%	Kalibrasi Alat Hidrologi	2 Alat						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi	64 Pos Hidrologi & Data Pemantauan Kualitas Air						
							Papan Informasi Pos Hidrologi	5 buah						
							Pelaksanaan SIH3	1 Kegiatan						
							Pembersihan Intake Bendung	41 Bendung						
							Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga	8 Embung						
							Pengadaan Alat Hidrologi (ARR, AWLR Ultrasonic, Clock AWLR AOTT, Pan A)	1 Paket						
							Pengadaan Pos AWLR	2 Paket						
							Pengecatan Pos Hidrologi	30 pos hidrologi						
							Pengelolaan Data SDA	1 Kegiatan						
							Pengukuran Penampang AWLR	1 paket						
1.03.1.03.01.00.23	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**										**Rp. 16.750.000.000,00**	**Rp. 24.000.000.000,00**		
1.03.1.03.01.00.23.001	Pengembangan Jaringan Irigasi	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rerata Hasil Penilaian Kondisi FIsik Prasarana Jaringan Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	73.15%	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Ponggok	400 m	Peningkatan jaringan irigasi untuk mencapai persentase kondisi fisik sebesar 73,15 %	100 %	Rp. 3.750.000.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Rerata Hasil Penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	72.96%	Detail Engineering Design D.I. Blawong	1 dokumen						
							Detail Engineering Design D.I. Pendowo	1 dokumen						
							Detail Engineering Design D.I. Pijenan/Kamijoro	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Detail Engineering Design D.I. Sapon	1 dokumen						
							Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi 41 Daerah Irigasi	1 dokumen						
							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kucir	350 m						
							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuton	350 m						
							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sekarsuli (375 m)	375 m						
1.03.1.03.01.00.23.002	Pengelolaan Jaringan Irigasi	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Ponjong	Rerata Hasil Penilaian Kondisi FIsik Prasarana Jaringan Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	73.15%	Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi	41 DI	Dukungan untuk mempertahankan Luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 83 % guna mendukung Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi (66,48%)	100 %	Rp. 13.000.000.000,00	Rp. 20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Rerata Hasil Penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	72.96%	Koordinasi Tata Pengaturan SDA	Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I						
							OP Pompa DI. Simo	8 lokasi						
							Operasi Jaringan Irigasi	41 DI						
							Operasional Komisi Irigasi DIY & Operasional Sekretariat	1 dokumen						
							Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	41 DI						
							Pemeliharaan Berkala Sempadan & Jalan Inspeksi Jaringan Irigasi	20 D.I						
							Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	41 DI						
							Pengadaan Lampu Penerangan Bendung (Solar sell)	40 Unit						
							Pengadaan Patok Hektometer	500 bh						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penilaian Kondisi Jaringan Irigasi 41 Daerah Irigasi	1 dokumen						
							Review AKNPI 41 Daerah Irigasi	1 dokumen						
							Review Pengelolaan Aset Irigasi 41 Daerah Irigasi	1 dokumen						
1.03.1.03.01.00.24	**PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**										**Rp. 3.800.452.000,00**	**Rp. 6.000.000.000,00**		
1.03.1.03.01.00.24.001	Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	0%	1. tenaga ahli konstruksi bersertifikat (300 orang)	300 orang	Dukungan sebesar 30 % terhadap Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi Dan Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian	100 %	Rp. 1.282.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Jumlah Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang Diterbitkan	800LHU	2. Persentasie layanan system informasi jasa konstruksi : a. Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi b. Pengelolaan aplikasi system informasi jasa konstruksi (1 laporan) c. Penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan (12 laporan) d. Pendampingan masyarakat melalui Klinik Konstruksi (120 orang) e. Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi (1 laporan) f. Inventarisasi data dan penyelenggaraan konstruksi (1 laporan)	1 tahun						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	64.12%								
1.03.1.03.01.00.24.002	Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	0%	Dipertahankannya jumlah parameter terakreditasi	34 parameter	Dukungan sebesar 70 % terhadap Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	100 %	Rp. 2.518.452.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Jumlah Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang Diterbitkan	800LHU	Peningkatan kualitas sumber daya manuasi dan tenaga pendukung laboratorium	8 orang						
					Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	64.12%	Terlaksananya pengujian kualitas mutu air dan kualitas bahan bangunan	800 LHU						
							Tersedianya alat-alat laboratorium yang terkalibrasi	42 alat						
							Tersedianya alat-alat laboratorium yang terpelihara	42 alat						
1.04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**													
1.04.1.03.01.00	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**													
1.04.1.03.01.00.16	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN**										**Rp. 73.777.000.000,00**	**Rp. 86.800.000.000,00**		
1.04.1.03.01.00.16.007	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di DIY	21.75%	Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kec. Ngampilan, Kota YK	13,51 Ha	Dukungan sebesar 22 % untuk program pengembangan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh berupa penanganan PSU kawasan kumuh	100 %	Rp. 10.387.000.000,00	Rp. 20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	8%	Penanganan RTLH (Ngampilan)	62 unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Cakupan kawasan kumuh yang sudah tertangani	58.22%								
1.04.1.03.01.00.16.008	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di DIY	21.75%	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	4080 unit	Dukungan sebesar 77 % terhadap penyelenggaraan perumahan	100 %	Rp. 62.520.000.000,00	Rp. 65.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	8%	Perencanaan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni	2.500 unit						
					Cakupan kawasan kumuh yang sudah tertangani	58.22%	Tersusunnya usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN tahun 2020	1 dok						
1.04.1.03.01.00.16.009	Pengembangan Perumahan	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di DIY	21.75%	Tersedianya hasil pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman di DIY	1 dokumen	Dukungan sebesar 1 % terhadap pengembangan perumahan	100 %	Rp. 870.000.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	8%	Tersedianya koordinasi Pokja PKP DIY dan Pusat	1 kesepakatan						
					Cakupan kawasan kumuh yang sudah tertangani	58.22%	Tersusunnya kesepakatan bersama Pemda Kabupaten/Kota	1 dokumen						
1.04.1.03.01.00.17	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PSU KAWASAN**										**Rp. 15.700.000.000,00**	**Rp. 50.000.000.000,00**		
1.04.1.03.01.00.17.001	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Terbangunnya PSU Layak di Kawasan Permukiman	48titik	Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman	16 lokasi	Dukungan sebesar 20% Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umun terhadap penyelenggaraan PSU Kawasan	100 %	Rp. 3.200.000.000,00	Rp. 20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Terbangunnya PSU Layak di KAwasan Strategis Provinsi	32titik								
1.04.1.03.01.00.17.002	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Temon	Terbangunnya PSU Layak di Kawasan Permukiman	48titik	Penyediaan PSU di Daerah Relokasi Bandara baru : Palihan, Glagah, Janten	3 lokasi	Dukungan sebesar 80% terhadap penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) daerah relokasi terkena Bandara baru	100 %	Rp. 12.500.000.000,00	Rp. 30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Terbangunnya PSU Layak di KAwasan Strategis Provinsi	32titik	Terbangunnya Infrastruktur VIP ROOM Bandara Baru Kulon Progo	1 paket						
2	**Pilihan**													
2.05	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**													
2.05.1.03.01.00	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**													
2.05.1.03.01.00.17	**PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN**										**Rp. 10.461.200.000,00**	**Rp. 18.700.000.000,00**		
2.05.1.03.01.00.17.001	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	7848RT	Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga	3.496 SR	Dukungan tercapainya peningkatan prosentase penduduk berakses energi sebesar 77% melalui pemasangan SR	100 %	Rp. 8.091.200.000,00	Rp. 15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan jumlah bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	62unit	Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik : 2000 unit	1 dokumen						
					Penambahan jumlah izin ketenagalistrikan berijin yang sesuai dengan ketentuan	30izin								
2.05.1.03.01.00.17.002	Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	7848RT	Audit Energi	1 Dokumen	Dukungan peningkatan penduduk berakses energi sebesar 10% melalui pengaturan dan pengelolaan energi	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 2.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan jumlah bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	62unit	Penyusunan Materi Teknis dan Naskah Akademis Raperda Ketenagalistrikan	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Penambahan jumlah izin ketenagalistrikan berijin yang sesuai dengan ketentuan	30izin	Perhitungan Neraca Energi	1 dokumen						
							Raperda RUED	1 Dokumen						
2.05.1.03.01.00.17.003	Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	7848RT	Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan	4 Laporan	Dukungan upaya peningkatan Tertib Ijin Ketenagalistrikan sebesar 13%	100 %	Rp. 1.370.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan jumlah bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	62unit	Pengembangan Sistem Informasi pengawasan dan Pengendalian perizinan ketenagalistrikan	1 paket						
					Penambahan jumlah izin ketenagalistrikan berijin yang sesuai dengan ketentuan	30izin	Pengoperasian dan pemeliharaan Pembangkit Energi Baru Terbarukan	1 paket						
2.05.1.03.01.00.18	**PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI**										**Rp. 8.933.000.000,00**	**Rp. 17.000.000.000,00**		
2.05.1.03.01.00.18.001	Pendayagunaan Air Tanah dan Geologi	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	73%	Pembangunan Konstruksi Sumur Bor Air Tanah Dalam	10 Unit	Dukungan 62% berupa pembangunan sarana prasarana pengambilan air tanah di 7 kecamatan terhadap target penyediaan air bersih di daerah sulit air melalui air tanah	100 %	Rp. 5.468.000.000,00	Rp. 12.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer <20%	20> %	Pemodelan Geologi Akuifer pada Cekungan Air Tanah di Kota Yogyakarta	1 dokumen						
					Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	30izin	Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Resapan Cekungan Air Tanah Wates	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penyusunan SID Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam	2 dokumen						
2.05.1.03.01.00.18.002	Pengaturan dan Pembinaan Air Tanah dan Geologi	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	73%	Pembangunan Instalasi Sumur Pantau Air Tanah Dalam 3 unit	tersedianya sarana monitoring tinggi muka air tanah pada 2 CAT	Dukungan 30% data dan informasi rerata muka air tanah dari sumur pantau pada cekungan air tanah dari CAT di DIY terhadap upaya mempertahankan Rerata penurunan muka air tanah <20%	100 %	Rp. 2.625.000.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer <20%	20> %	Pembangunan Sumur Resapan Air Hujan Sebagai Imbuhan Air Tanah 100 unit	tersedianya sarana imbuhan air tanah pada 3 CAT						
					Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	30izin	Pemeliharaan Sumur Pantau dan AWLR di CAT Yogyakarta - Sleman	terpeliharanya sarana monitoring tinggi muka air tanah pada 1 CAT						
							Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah 1 dokumen	tersedianya data fluktuasi muka air tanah di DIY dalam 1 tahun						
							Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	1 laporan						
							Review Zona Konservasi Air Tanah CAT Yogyakarta-Sleman 1 dokumen	tersusunnya bahan penetapan zona konservasi pada CAT Yogyakarta - Sleman						
2.05.1.03.01.00.18.003	Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah dan Geologi	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	73%	Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah	4 laporan	Dukungan 8% pengawasan dan pengendailan air tanah terhadap pencapaian tertib pelaksanaan izin pengusahaan air tanah pada pemegang izin.	100 %	Rp. 840.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral — **Jumlah Pagu : Rp. 284.606.312.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer <20%	20> %	Pengembangan Sistem Informasi pengawasan dan Pengendalian perizinan air tanah	1 paket						
					Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	30izin								
2.05.1.03.01.00.19	**PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN**										**Rp. 2.040.000.000,00**	**Rp. 6.100.000.000,00**		
2.05.1.03.01.00.19.001	Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	19izin	Inventarisasi dan pemetaan area reklamasi yang terkendala pencairan Jaminan Reklamasi	1 Dokumen	Dukungan sebesar 50 % terhadap Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral	100 %	Rp. 985.000.000,00	Rp. 4.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Presentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7.5%	Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat	3 Dokumen						
							Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	5 Laporan						
							Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk kegiatan Pertambangan Rakyat	2 Dokumen						
							Updating Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batuan di DIY	1 Dokumen						
2.05.1.03.01.00.19.002	Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	19izin	Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan	4 laporan	Dukungan sebesar 50% terhadap Tertib Izin Usaha Pertambangan	100 %	Rp. 1.055.000.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Presentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7.5%	Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pertambangan	1 paket						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang — **Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**													
1.03.1.03.02.00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**													
1.03.1.03.02.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 1.400.000.000,00**	**Rp. 1.550.000.000,00**		
1.03.1.03.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor 52 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100%	Dukungan sebesar 45,16 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 465.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Barang cetakan dan penggandaan 20 jenis							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan (Roda 4: 6 unit; Roda 2: 6 unit)							
							Kebersihan gedung kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (1600 m2)							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 jenis							
							Pembayaran tagihan rekening air 12 bulan							
							Pembayaran tagihan rekening internet 12 bulan							
							Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan							
							Pembayaran tagihan rekening telepon 12 bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang — **Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengiriman dokumen 680 dokumen							
							Peralatan rumah tangga 5 jenis							
							Surat kabar 3 jenis							
							Surat keluar 860 surat							
							Surat masuk 970 surat							
							Terpeliharanya naskah arsip dinamis SKPD							
1.03.1.03.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran kepegawaian 1 org/12 bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan sebesar 25,81 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Bukti pembayaran pengelola barang/pengurus barang pengguna 15 org/12 bulan							
							Bukti pembayaran pengelola keuangan 21 org/12 bulan							
							Bukti pembayaran perencana program 2 org/12 bulan							
							Tersedianya jasa keamanan kantor 4 org/12 bulan							
1.03.1.03.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan	Kelancaran Koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan sebesar 29,03 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 535.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang — **Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Makan dan minum sidang 1300 os							
1.03.1.03.02.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 1.265.000.000,00**	**Rp. 1.900.000.000,00**		
1.03.1.03.02.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rehabilitasi gedung kantor, tempat/akses parkir 2 unit	Terbangunnya gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sapras 100%	Dukungan sebesar 35,67 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 850.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	drone 1 unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan Sebesar 12 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							gordyn 2 set							
							LCD proyektor 1 unit							
							mebeulair 2 set							
							mesin fotocopy 1 unit							
1.03.1.03.02.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan pemeliharaan taman 1600 m2	Terpelihara kantor sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan sebesar 9,09 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Rp. 115.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (6 unit)	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan sebesar 35,57 terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 420.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (6 unit)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang — **Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan perkantoran 5 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100%	Dukungan sebesar 7,67 terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.02.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 280.000.000,00**	**Rp. 300.000.000,00**		
1.03.1.03.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bahan LKJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2017 1 Laporan	Nilai LKJIP dari semula 77,17 (BB) menjadi 80 (A)	Dukungan sebesar 5,35 % terhadap terwujudnya kelancaran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Nilai LKJIP SKPD B pada Tahun 2017							
1.03.1.03.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan keuangan Bulanan 12 laporan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 3 %	Dukungan sebesar 10,73 % terhadap terwujudnya kelancaran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Laporan keuangan semester 2 laporan							
							Laporan keuangan tahunan gabungan 1 laporan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang — **Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Laporan keuangan triwulan 4 laporan							
1.03.1.03.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	DPA 2020 1 Dokumen	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Dukungan Sebesar 78,57 % terhadap terwujudnya kelancaran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100 %	Rp. 220.000.000,00	Rp. 240.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							DPA-P 2019 1 Dokumen							
							Forum Perangkat Daerah 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020						
							Pengembangan Data pada Sistem Informasi 1 Aplikasi							
							RKA 1 Dokumen							
							RKA-P 1 Dokumen							
1.03.1.03.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 1 Dokumen Laporan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan sebesar 5,35 % terhadap terwujudnya kelancaran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.02.00.25	**PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG**										**Rp. 900.000.000,00**	**Rp. 500.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang — **Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.02.00.25.002	Pembinaan Penataan Ruang	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Ekowisata Karst Kabupaten Gunungkidul Godean dan Pakem. Industri Sentolo Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan Koridor Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop dan Sadeng. Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo Kabupaten Bantul Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngerenehan dan pantai Gesing Kabupaten Gunungkidu Pantai Selatan dan gelombang laut Kabupaten	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Aspek Pengaturan dan Pembinaan	0%	Koordinasi Penataan Ruang Daerah di DIY	Terlaksananya Koordinasi Penataan Ruang Daerah di DIY	Dukungan 100% terhadap Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan dan pembinaan hingga mencapai 57,06%	100%	Rp. 550.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pengaturan dan Pembinaan	57.06%	Pembinaan teknis penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten	Terlaksananya pembinaan teknis penyusunan RTR Kabupaten untuk fasilitasi percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten						
							Sosialisasi Rencana Tata Ruang	Terlaksananya sosialisasi rencana tata ruang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang — **Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Kulon Progo, kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah, Pantai Congot Kabupaten Kulon Progo Pantai Wedi Ombo Kabupaten Gunungkidul Parangtritis dan Gumuk pasir Kabupaten Bantul Perkotaan Yogyakarta Sewon, kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri dan Piyungan Tempel dan Parangtritis Wilayah Gunung Merapi									
1.03.1.03.02.00.25.005	Pengaturan Tata Ruang	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan Perkotaan Yogyakarta Tempel dan Parangtritis	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Aspek Pengaturan dan Pembinaan	0%	Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	1 dokumen	Dukungan 100% terhadap Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan dan pembinaan hingga mencapai 57,06%	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pengaturan dan Pembinaan	57.06%								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | **Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.02.00.26	**PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG**										**Rp. 1.350.000.000,00**	**Rp. 1.800.000.000,00**		
1.03.1.03.02.00.26.001	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Ekowisata Karst Kabupaten Gunungkidul Godean dan Pakem. Industri Sentolo Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan Koridor Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop dan Sadeng. Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo Kabupaten Bantul Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngerenehan dan pantai Gesing Kabupaten Gunungkidu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Aspek Pelaksanaan	0%	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan keterpaduan pelaksanaan indikasi program	Terlaksananya Peningkatan kapasitas penyelenggaraan keterpaduan pelaksanaan indikasi program	Dukungan sebesar 100% terhadap Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan dan aspek pengawasan hingga mencapai 75,17%	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan	75.17%	Penyusunan dokumen Keterpaduan Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis untuk mendorong perwujudan rencana tata ruang	Tersusunnya 1 dokumen Keterpaduan Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis untuk mendorong perwujudan rencana tata ruang					

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang — **Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pantai Selatan dan gelombang laut Kabupaten Kulon Progo, kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah, Pantai Congot Kabupaten Kulon Progo Pantai Wedi Ombo Kabupaten Gunungkidul Parangtritis dan Gumuk pasir Kabupaten Bantul Perkotaan Yogyakarta Sewon, kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri dan Piyungan Tempel dan Parangtritis Wilayah Gunung Merapi										
1.03.1.03.02.00.26.002	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Ekowisata Karst Kabupaten Gunungkidul Godean dan Pakem. Industri Sentolo Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Aspek Pelaksanaan	0%	Monitoring dan evaluasi rekomendasi pemanfaatan ruang.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi rekomendasi pemanfaatan ruang yang sudah dikeluarkan di DIY.	Dukungan sebesar 100% terhadap Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan dan aspek pengawasan hingga mencapai 75,17%	100%	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.350.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | **Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Koridor Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop dan Sadeng. Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo Kabupaten Bantul Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngerenehan dan pantai Gesing Kabupaten Gunungkidu Pantai Selatan dan gelombang laut Kabupaten Kulon Progo, kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah, Pantai Congot	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan	75.17%	Pelaporan hasil pengendalian pemanfaatan ruang dan rakor pengendalian pemanfaatan ruang (amanat Permendagri 115/2017)	Terlaksananya rakor hasil pengendalian pemanfaatan ruang						
							Pengawasan pemanfaatan ruang di DIY	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang di DIY						
							Pengawasan Teknis untuk menilai kinerja penyelenggaran penataan ruang	Tersusunnya dokumen pengawasan teknis untuk menilai kinerja penyelenggaran penataan ruang						
							Perumusan penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY	Tersusunnya rencana tindak lanjut (action plan) penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | **Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Kabupaten Kulon Progo Pantai Wedi Ombo Kabupaten Gunungkidul Parangtritis dan Gumuk pasir Kabupaten Bantul Perkotaan Yogyakarta Sewon, kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri dan Piyungan Tempel dan Parangtritis Wilayah Gunung Merapi									
1.10	**PERTANAHAN**													
1.10.1.03.02.00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**													
1.10.1.03.02.00.15	**PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN**										**Rp. 250.000.000,00**	**Rp. 600.000.000,00**		
1.10.1.03.02.00.15.001	Layanan administrasi Pertanahan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Layanan Administrasi Pertanahan Sesuai Peraturan Perundangan	100%	Pelayanan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	"Terlaksananya pelayanan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum"	Dukungan 100% terhadap Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Penanganan permasalahan pertanahan	"Terlaksananya pelayanan pengaduan permasalahan pertanahan"						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | **Jumlah Pagu : Rp. 8.672.640.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.05	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													
1.05.1.05.01.00	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**													
1.05.1.05.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 1.159.015.000,00**	**Rp. 1.375.000.000,00**		
1.05.1.05.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengelolaan Arsip SKPD 1 paket	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 40% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 409.015.000,00	Rp. 550.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							Alat Tulis Kantor 43 jenis							
							Bukti Pembayaran Pajak / STNK Kendaraan Roda 2 10 unit							
							Bukti Pembayaran Pajak / STNK Kendaraan Roda 4 7 unit							
							Cetak dan Penggandaan 12 jenis							
							Kebersihan gedung kantor 12 bulan							
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 6 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 8.672.640.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Langganan surat kabar harian, majalah dan buku 5 jenis							
							Pembayaran tagihan rekening listrik, telepon dan internet 12 bulan							
1.05.1.05.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kinerja Pengelola barang 2 orang dalam 1 tahun	tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 28% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							2. Kinerja Pengelola kearsipan dan perpustakaan 2 orang dalam 1 tahun							
							3. Kinerja Penjaga keamanan 6 orang dalam 1 tahun							
							4. Kinerja Pengelola keuangan 9 orang dalam 1 tahun							
							5. Kinerja Pengelola kepegawaian 2 orang dalam 1 tahun							
							6. Kinerja Pegawai Non-PNS 5 orang dalam 11 bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik — **Jumlah Pagu : Rp. 8.672.640.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 32% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 440.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan							
							3. Makan minum rapat 12 bulan							
1.05.1.05.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 690.000.000,00**	**Rp. 924.000.000,00**		
1.05.1.05.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pengadaan Kursi Tamu Pimpinan 1 set	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Dukungan 8.40% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							2. Pengadaan Kamera Digital 1 buah							
							3. Pengadaan Handycam 1 buah							
1.05.1.05.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Perbaikan Rangka plafon 638 m2	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 16.81% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 8.672.640.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Pengecatan Gedung 3544 m							
1.05.1.05.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Belanja Jasa service 12 bulan	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 29.41% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							2. Belanja penggantian suku cadang 12 bulan							
							3. Belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas 12 bulan							
1.05.1.05.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pemeliharaan alat kantor 12 bulan	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 15.97% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 190.000.000,00	Rp. 209.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							2. Pemeliharaan Perlengkapan kantor 12 bulan							
1.05.1.05.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 345.785.000,00**	**Rp. 528.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | **Jumlah Pagu : Rp. 8.672.640.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	Nilai LKjIP : A	Dukungan 3.13% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 16.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 8.33% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 44.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan 78.13% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 240.785.000,00	Rp. 412.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						
1.05.1.05.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 10.42% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | **Jumlah Pagu : Rp. 8.672.640.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.00.18	**PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL**										**Rp. 2.075.074.000,00**	**Rp. 6.600.000.000,00**		
1.05.1.05.01.00.18.001	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Kecamatan se DIY	Skor / Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2.87angka	1. Laporan Fasilitasi FORKOPIMDA (1 Laporan)	Terlaksananya Pembinaan Ideologi dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan 100%	Dukungan 100% terhadap meningkatnya ketahanan ideologi di DIY	100%	Rp. 2.075.074.000,00	Rp. 6.600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							2. Laporan Pembinaan Wasbang (1 Laporan)							
							3. Laporan Rapat Koordinasi FORKOMPIMDA dengan unsur terkait (3 Laporan)							
							4. Laporan Kewaspadaan Dini Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi (1 Laporan)							
							5. Laporan POA (1 Laporan)							
							6. Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) (1 Laporan)							
							7. Rencana Aksi Penanganan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik (5 Renaksi)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 8.672.640.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							8. Renaksi Penangan Konflik Sosial (PKS) (1 Renaksi)							
							9. Laporan Kormonev Penanganan Perubahan Sosial dan dan Potensi Konflik (5 Laporan)							
1.05.1.05.01.00.19	**PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT**										**Rp. 3.602.766.000,00**	**Rp. 4.400.000.000,00**		
1.05.1.05.01.00.19.002	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor /Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.32angka	1. Jumlah kelompok sasaran peserta yang mendapatkan pendidikan politik (3 kelompok)	Terselenggaran Pendidikan Politik, Pembinaan Partai Politik, dan Rekomendasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 100%	Dukungan 66.25% terhadap meningkatnya ketahanan politik di DIY	100%	Rp. 2.650.000.000,00	Rp. 2.915.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							2. Partai politik yang memperoleh bantuan keuangan dan melaksanakan pendidikan politik (9 parpol yang memiliki perwakilan di DPRD DIY hasil Pemilu 2014)							
							3. Laporan dan Rekomendasi Pemanfaatan Hasil IDI DIY (1 laporan)							
1.05.1.05.01.00.19.003	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor /Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.32angka	Laporan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (1 Laporan)	Terselenggaranya Pemantauan Perkembangan Politik di DIY 100%	Dukungan 5% terhadap meningkatnya ketahanan politik di DIY	100%	Rp. 176.287.000,00	Rp. 220.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | **Jumlah Pagu : Rp. 8.672.640.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.00.19.004	Pembinaan Organisasi Masyarakat	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor /Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.32angka	1. Laporan Rekomendasi dan Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan (1 Laporan)	Tersedianya Rekomendasi dan Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan 100%	Dukungan 7.50% terhadap meningkatnya ketahanan politik di DIY	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.19.005	Pengelolaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor /Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.32angka	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (1 laporan)	Terselenggaranya Koordinasi Pelaksanaan P4GN 100%	Dukungan 12.50% terhadap meningkatnya ketahanan politik di DIY	100%	Rp. 197.600.000,00	Rp. 550.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.19.006	Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor /Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.32angka	1. Jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan 12.000 surat	Terselnggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Rekomendasi Penelitian 100%	Dukungan 8.75% terhadap meningkatnya ketahanan politik di DIY	100%	Rp. 278.879.000,00	Rp. 385.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							2. Jumlah peserta sosialisasi peraturan mengenai surat keterangan penelitian (SKP) 450 orang							
1.05.1.05.01.00.20	**PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI**										**Rp. 800.000.000,00**	**Rp. 880.000.000,00**		
1.05.1.05.01.00.20.001	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor/Nilai Indeks Ketahan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2.87angka	1. Laporan Pembekalan Pembauran Kebangsaan 3 Laporan (per caturwulan)	Terselenggaranya Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan 100%	Dukungan 10.08% terhadap meningkatnya ketahanan ideologi, ekonomi dan sosial budaya DIY	100%	Rp. 800.000.000,00	Rp. 880.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 8.672.640.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Rekomendasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 3 Rekomendasi (per caturuwulan)							
							3. Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 3 Rekomendasi (per caturwulan)							
							4.Laporan tentang Perkembangan kondisi ketahanan ekonomi dan sosial di DIY 3 Rekomendasi (per caturwulan)							
							5. Rekomendasi Kebijakan terkait Gerakan Nasional Revolusi Mental 1 Rekomendasi							
							6. Laporan pelaksanaan Rapat Konsolidasi Nasional Pengelolaan Asrama Mahasiswa di DIY 1 Laporan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja — **Jumlah Pagu : Rp. 9.315.618.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.05	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													
1.05.1.05.02.00	**Satuan Polisi Pamong Praja**													
1.05.1.05.02.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 1.429.450.000,00**	**Rp. 1.666.564.468,00**		
1.05.1.05.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Benda benda Pos (Materai dan Prangko) 2 Jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	25,81%	Rp. 344.003.000,00	Rp. 399.055.850,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Barang Cetakan 12 Jenis							
							03. Penggandaan 142.714 Lembar							
							04. Surat Kabar/Majalah 48 Eksemplar							
							05. Buku Kepustakaan 2 Jenis							
							06. Alat Rumah Tangga 10 Jenis							
							07. Pemasangan dan penggantian instalasi listrik 2 Paket							
							08. Pembayaran tagihan internet 12 Bulan							
							09. Pembayaran tagihan rekening listrik 12 Bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja | **Jumlah Pagu : Rp. 9.315.618.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							10. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Jenis							
							11. Pembayaran Tagihan Rekening Telepon 12 Bulan							
							12. Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional yang tepat waktu 31 Unit							
							13. Bukti pembayaran KIR kendaraan 5 Unit							
							14. Jasa Kebersihan Kantor 34.200 m2							
							15. Alat Tulis Kantor 38 Jenis							
1.05.1.05.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Bukti Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Perencana 16 Orang, 12 Bulan	tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	45,02%	Rp. 685.547.000,00	Rp. 667.552.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Bukti Pembayaran Honorarium Non PNS 11 Orang, 12 Bulan							
							03. Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor 10 Orang, 12 Bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja | **Jumlah Pagu : Rp. 9.315.618.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan 12 Bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 29,27% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	29,16%	Rp. 399.900.000,00	Rp. 599.955.868,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik 12 Bulan							
1.05.1.05.02.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 723.467.000,00**	**Rp. 774.725.000,00**		
1.05.1.05.02.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Pembangunan Pos Pengamanan dan Pos SAR Linmas yang berada di kawasan Pantai Glagah, Kulon Progo yang ikut tergusur proyek pembangunan Bandara NYIA Tahap II 1 Unit	Tersedianya gedung kantor sesuai kebutuhan 100%	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	15,02%	Rp. 197.800.000,00	Rp. 200.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Pengadaan tempat parkir bus dan truk 1 paket							
							03. Rehabilitasi Gedung Kantor Satpol PP DIY 1 paket							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja — **Jumlah Pagu : Rp. 9.315.618.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Perlengkapan gedung kantor 6 Jenis	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	13,63%	Rp. 122.250.000,00	Rp. 119.700.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Peralatan gedung kantor 3 Jenis							
							03. Meubeler 1 Jenis							
1.05.1.05.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 20 Unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	18,75%	Rp. 351.948.000,00	Rp. 384.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 10 Unit							
							03. Pemeliharaan Kendaraan Roda 6 2 Unit							
1.05.1.05.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 3 jenis	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2,53%	Rp. 51.469.000,00	Rp. 70.525.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Peralatan gedung kantor yang terpelihara 17 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja — **Jumlah Pagu : Rp. 9.315.618.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 242.713.000,00**	**Rp. 488.760.178,00**		
1.05.1.05.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	Nilai LKjIP : A	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1,05%	Rp. 4.600.000,00	Rp. 5.069.250,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2,80%	Rp. 13.231.000,00	Rp. 13.242.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	91,36%	Rp. 203.882.000,00	Rp. 448.448.328,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja | **Jumlah Pagu : Rp. 9.315.618.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	4,79%	Rp. 21.000.000,00	Rp. 22.000.100,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.00.21	**PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**										**Rp. 1.400.000.000,00**	**Rp. 1.388.000.000,00**		
1.05.1.05.02.00.21.001	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	40%	01. Laporan koordinasi petugas dengan mitra kerja terkait dalam rangka Pengendalian Tibum tranmas Perbatasan Kabupaten Jateng 1 laporan	Terlaksananya patroli ketertiban ketentraman umum masyarakat 100%	Dukungan 67,71% terhadap presentase wilayah rawan gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Rp. 753.000.000,00	Rp. 830.331.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Laporan patroli daerah perbatasan dan operasi bersama daerah perbatasan 12 Laporan Bulanan							
							03. Laporan penyelenggaraan dan pemeliharaan tibumtranmas melalui Operasi Tibumtranmas 70 Laporan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 9.315.618.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							04. Laporan Patroli Pengendalian Tibum tranmas dan Patroli Malam Hari dalam rangka antisipasi kenakalan remaja (klitih) dan gangguan tibum 425 Laporan							
							05. Laporan Mingguan Deteksi Dini gejolak sosial masyarakat 135 Laporan							
							06. Pengendalian gejolak sosial masyarakat atau unjuk rasa yang tertangani 120 Laporan							
							07. Anggota Pol PP yang dikirim untuk gelar Pasukan dalam rangka HUT Pol PP Nasional 10 orang							
							08. Peserta Diklat Dasar Pol PP 4 orang							
1.05.1.05.02.00.21.002	Pengamanan Aset Pemda DIY	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	40%	Laporan Pengamanan aset Pemda DIY melalui Kegiatan Pemantauan dan Pengamanan Penertiban Aset Pemda DIY Laporan Pengamanan 180 Aset	Terlaksananya pengamanan aset pemda DIY 100%	Dukungan 8,54% terhadap presentase wilayah rawan gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Rp. 90.000.000,00	Rp. 142.938.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja — **Jumlah Pagu : Rp. 9.315.618.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.00.21.003	Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wagub, dan Tamu Daerah	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	40%	Laporan Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah (Pengawalan ke Daerah Kabupaten dan Dalam Kota) 230 Laporan (Pam Gub/Wagub & Tamu Daerah)	Terlaksananya pengamanan dan pengawalan gubernur, wakil gubernur dan tamu daerah 100%	Dukungan 7,01% terhadap presentase wilayah rawan gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Rp. 92.000.000,00	Rp. 84.351.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.00.21.004	Pengamanan Objek Vital Pemda DIY	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	40%	01. Laporan Pengamanan Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur 12 Laporan Bulanan	Terlaksananya pengamanan objek vital Pemda DIY 100%	Dukungan 16,74% terhadap presentase wilayah rawan gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Rp. 165.000.000,00	Rp. 330.379.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Laporan pengamanan kegiatan Pemda Pada Hari Besar dan Sosial Kemasyarakatan 15 (Event Pengamanan)							
1.05.1.05.02.00.21.005	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	40%	Anggota Satpol PP yang meningkat jiwa korsa dan kesehatan jasmani nya 129 orang	Terlaksananya peningkatan kapasitas anggota Sat Pol PP sesuai kompetensi 100%	Dukungan % terhadap pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							Anggota Satpol PP yg meningkat kapasitas pengetahuan dan skill nya 129 orang							
1.05.1.05.02.00.22	**PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**										**Rp. 3.749.414.000,00**	**Rp. 3.330.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja — **Jumlah Pagu : Rp. 9.315.618.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.00.22.001	Pembinaan Potensi Masyarakat	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	25%	01. Rumusan sebagai bahan kebijakan Pemda terhadap optimalisasi potensi masyarakat 1 dokumen	Terlaksananya pembinaan potensi masyarakat sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 8,2% terhadap persentase SATLINMAS yang mampu melaksanakan tugas perlindungan masyarakat	100%	Rp. 170.354.000,00	Rp. 294.205.952,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Meningkatnya kapasitas bagi anggota Jaga Warga dan Potensi Masyarakat untuk bersinergi dengan unsur komunitas dan aparat kamtibmas 160 peserta							
							03. Data organisasi Jaga Warga dan Potensi Masyarakat di DIY 1 dokumen							
1.05.1.05.02.00.22.002	Pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	25%	01. Laporan monitoring penanganan ketenteraman, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu 5 Laporan	Terlaksananya pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 91,8% terhadap persentase SATLINMAS yang mampu melaksanakan tugas perlindungan masyarakat	100%	Rp. 3.579.060.000,00	Rp. 3.035.794.048,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Meningkatnya kompentensi satlinmas untuk mewujudkan perlindungan masyarakat 30 Orang							
							03. Profil Satlinmas DIY 1 dokumen							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja | **Jumlah Pagu : Rp. 9.315.618.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							04. Potensi Satlinmas Rescue Istimewa siap siaga dalam pengamanan di obyek wisata 301 Orang, 12 bulan							
							05. Anggota Satlinmas Rescue Istimewa terampil menangani laka di air 20 Orang							
1.05.1.05.02.00.23	**PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**										**Rp. 1.770.574.000,00**	**Rp. 1.105.450.000,00**		
1.05.1.05.02.00.23.001	Pengembangan dan Pendayagunaan PPNS	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	70%	01. PPNS yang terlatih dalam penegakan Perda 30 PPNS	Terlaksananya pengembangan dan pendayagunaan PPNS 100%	Dukungan 18,82% terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	100%	Rp. 224.971.000,00	Rp. 140.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Rekomendasi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas PPNS 50 PPNS se-DIY							
							03. Piket Sekretariat PPNS 40 laporan							
							04. Peserta diklat PPNS 4 orang							
1.05.1.05.02.00.23.002	Operasi Yustisi dan Non Yustisi bagi Pelanggar Perda/Perkada	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	70%	01. Laporan Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan 50 laporan	Terlaksananya operasi pelanggar perda/perkada sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 49,05% terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	100%	Rp. 1.299.994.000,00	Rp. 940.450.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 9.315.618.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Laporan Operasi Yustisi (Tipiring) 30 laporan							
							03. Laporan Operasi Yustisi (Acara Pemeriksaan Singkat) 10 laporan							
							04. Laporan Penegakan Perda dan Perkada di Perbatasan 2 laporan							
							05. Rekomendasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Terpadu 2 rekomendasi							
							06. Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda 4 rekomendasi							
							07. Data Terpadu Pelanggaran Perda 1 paket							
							08. Laporan Penyelidikan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada 12 laporan							
							09. Laporan Operasi Non Yustisi 60 laporan							
							10. Laporan Operasi Pekat 50 laporan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 9.315.618.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							11. Rekomendasi penanganan PEKAT 2 dokumen analisis dan rekomendasi							
							12. Laporan pengawasan kadar minuman beralhokol yang beredar 4 laporan							
1.05.1.05.02.00.23.003	Pengembangan Budaya Sadar Perda dan/ Perkada	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	70%	01. Pembentukan dan Pengembangan Kader Penegak Perda dan Perkada 8 Kecamatan dan 2 Desa	Terbentuknya kader budaya sadar perda dan perkada sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 32,13% terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	100%	Rp. 245.609.000,00	Rp. 25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Pembinaan Kelompok Rentan Pelanggar Perda dan Perkada 25 laporan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 18.703.989.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.05	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													
1.05.1.05.03.00	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**													
1.05.1.05.03.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 1.962.000.000,00**	**Rp. 2.710.000.000,00**		
1.05.1.05.03.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2 (20 unit)	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 52% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4 (19 unit)							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 6 (10 unit)							
							Bukti pembayaran rekening air PDAM (1 rekening, 12 bulan)							
							Bukti pembayaran rekening listrik (4 rekening, 12 bulan)							
							Bukti pembayaran rekening telepon (12 rekening, 12 bulan)							
							Bukti pembayaran surat kabar harian (3 jenis, 12 bulan)							
							Bukti pembayaran tagihan internet/TV berlanganan (1 rekening, 12 bulan)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 18.703.989.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Mutasi balik nama kendaraan dinas operasional (10 unit)							
							Pembayaran jasa kebersihan Gedung Kantor BPBD DIY (3 unit gedung, 12 bulan)							
							Pembelian Alat Listrik dan Elektronik (6 jenis)							
							Pembelian Alat-Alat/ Perlengkapan (15 jenis)							
							Pembelian ATK dan barang pakai habis lainnya (59 jenis)							
							Penggandaan dokumen (100.000 lembar)							
							Pengiriman paket (6 kali)							
							Tersedianya barang cetak (8 jenis)							
1.05.1.05.03.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 31,55% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 562.000.000,00	Rp. 950.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Kinerja 3 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 18.703.989.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kinerja tenaga kontrak Pengelola Arsip/Perpustakaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja tenaga kontrak pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja tenaga kontrak penjaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja tenaga kontrak penjaga reapiter dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
1.05.1.05.03.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik dalam 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 16,47% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 460.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun							
1.05.1.05.03.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 2.245.025.000,00**	**Rp. 1.550.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 18.703.989.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	AC Split ruang sekber (FPRB) dan ruang server Pusdalops 3 unit	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor sesuai Standar dan Kaidah 100%	Dukungan 28,42% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 1.085.825.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Apar gedung TRC & gedung pertemuan/media center 5 unit							
							Faximile 1 unit							
							UPS 4 unit							
1.05.1.05.03.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas operasional ATV sesuai RKPBMD 1 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 71,58% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 840.000.000,00	Rp. 920.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas operasional forklift sesuai RKPBMD 1 unit							
							Kendaraan dinas operasional motor tempel/ kapal sesuai RKPBMD 6 unit							
							Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMD 20 unit							
							Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin sesuai RKPBMD 10 unit							
							Kendaraan dinas operasional roda 4 solar sesuai RKPBMD 7 unit							
							Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBMD 9 unit							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 18.703.989.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor terawat 48 jenis, 12 bulan	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 28,42% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100 %	Rp. 319.200.000,00	Rp. 610.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 196.000.000,00**	**Rp. 212.000.000,00**		
1.05.1.05.03.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capain kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	Nilai LKjIP : A	Dukungan 9,04% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 14.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada seluruh program dan kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 16,76% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan 65,44% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem `pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 140.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi BPBD DIY yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website BPBD DIY secara kontinyu 100%						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 18.703.989.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						
1.05.1.05.03.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetpkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100 %	Dukungan 8,76% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 27.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.00.15	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA**										**Rp. 4.716.759.000,00**	**Rp. 8.500.000.000,00**		
1.05.1.05.03.00.15.001	Pengelolaan Pencegahan Bencana	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Bantul Berbah Dlingo Galur Girisubo Gondokusuman Imogiri Jetis Karangmojo Kotagede Kraton Lendah Nanggulan Ngawen Pajangan Pakualaman Pandak Pengasih Piyungan Playen Ponjong Purwosari Sedayu Srandakan Tegalrejo Temon Tepus Umbulharjo Trirenggo Jogo Tirto Tegal Tirto Dlingo Temuwuh Jepitu Karangawen Demangan Rejowinangun	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	25Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana baru yang terbentuk dan berkembang (dari hasil koordinasi dengan BNPB dan BPBD Kab/Kota) 10 desa/kelurahan	Terselenggaranya pencegahan bencana sesuai standart 100%	Dukungan 31,55 % terhadap administerasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 2.700.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	25Sekolah	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana baru yang terbentuk dan berkembang 15 desa/kelurahan							
							Fasilitasi Pengurangan Risiko Bencana melalui Forum PRB 12 bulan							
							Kajian Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 1 dokumen kajian							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 18.703.989.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Panembahan Patehan Bumirejo Banyuroto Gunung Ketur Giricahyo Girijati Argodadi Argomulyo Trimurti Karangwaru Kali Dengen Kebonrejo Plumbon Sumber Wungu Tahunan			Lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Peringatan HKBN Tahun 2019 1 Event & 1 Laporan							
1.05.1.05.03.00.15.002	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	25Desa/Kelurahan	Fasilitasi Kesiapsiagaan PB 12 bulan	Terselenggaranya Kesiapsiagaan Bencana sesuai Standart 100%	Dukungan 38% untuk Penurunan indeks risiko bencana	100 %	Rp. 2.016.759.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	25Sekolah	Pengembangan Rumah Sakit Aman Bencana 1 laporan koordinasi dan 1 draft regulasi							
							Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 1 Event							
							Rencana Kontijensi 1 dokumen							
							Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) / Sekolah Siaga Bencana 15 sekolah (3 sekolah setiap Kabupaten/Kota)							
1.05.1.05.03.00.16	**PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA**										**Rp. 7.305.282.000,00**	**Rp. 15.930.000.000,00**		
1.05.1.05.03.00.16.001	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	16menit	Kejadian Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan 240 laporan/kejadian	Pengelolaan Kedaruratan Bencana sesuai standart 100%	Dukungan 40% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana	100 %	Rp. 1.666.000.000,00	Rp. 2.530.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 18.703.989.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah istimewa Yogyakarta memiliki ketrampilan dalam penanganan darurat bencana DIY 1 kali gladi ruang (TTX)							
							Pelatihan Incident Command System 1 angkatan (1 angkatan ICS dasar)							
							Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan 7 jenis							
							Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana 28 Orang & 4 orang							
1.05.1.05.03.00.16.002	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	16menit	Kesiapsiagaan dan respon penanganan kedaruratan di DIY didukung dengan sistem reaksi cepat di Pusdalops PB DIY 1 set sistem terintegrasi/terpadu	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sesuai standart 100%	Dukungan 63,50% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana	100 %	Rp. 3.639.282.000,00	Rp. 8.800.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							operasional media center selama 12 bulan (informasi kebencanaan kepada publik) 12 laporan & 4 jenis							
							Pengembangan EWS terintegrasi (tahap 2) 1 set							
							PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana 12 laporan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 18.703.989.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.00.16.003	Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	16menit	(1) Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana 15 kelompok	Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai standart 100%	Dukungan 17,86% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana	100%	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 4.600.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							(2) Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana 1 kelompok							
							(3) Laporan administrasi update data logistik dan peralatan dalam rangka penanggulangan bencana 1 laporan update data							
							(4) Paket bantuan Logistik dan Peralatan dalam rangka Penanggulangan Bencana 1.200 paket logistik.							
							(5) Laporan Pengelolaan dan pendistribusian Logistik dan Peralatan 1 laporan data Sarpras PB							
							(6) Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk melakukan praktek Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana.							
							(7) Paket perlengkapan untuk Penanggulangan Bencana 1.000 seng, 100 deklit, 10.000 karung, Angkong 50 sets, Sekop Panjang 500 buah, Sekop Pendek 500 buah, 2000 bronjong unit							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 18.703.989.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.00.17	**PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA**										**Rp. 2.278.923.000,00**	**Rp. 9.470.000.000,00**		
1.05.1.05.03.00.17.001	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Bencana	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Indeks Pemulihan Pasca-Bencana	70skor/nilai	Kajian Inventarisir Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Pascabencana di DIY 1 Dokumen	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Bencana sesuai standart 100%	Dukungan terhadap peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 2.750.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Kajian Inventarisir Kondisi Sosial Masyarakat Pascabencana di DIY 1 Dokumen							
							KK yang mendapat Stimulan Perbaikan Rumah Pascabencana 20 KK							
							Lokasi terdampak bencana yang mendapat Sosialisasi Perumahan Pascabencana 4 Lokasi							
							masyarakat desa korban dampak bencana masyarakat dapat menyusun kerusakan dan kerugian pengkajian kebutuhan pasca bencana 10 perwakilan desa							
							Perwakilan Desa yang mengikuti Pelatihan Manajemen Pascabencana 5 Perwakilan Desa							
1.05.1.05.03.00.17.002	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Indeks Pemulihan Pasca-Bencana	70skor/nilai	1. Integrasi Peta potensi bencana terhadap peta tata ruang DIY 1 dokumen	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca-Bencana Sesuai Standart 100%	dukungan 70% terhadap pencapaian 70% pemulihan wilayah terdampak bencana pada tahun 2019	100%	Rp. 1.578.923.000,00	Rp. 6.720.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 18.703.989.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. kajian indek risiko Bencana DIY tahun 2019 1 dokumen							
							3. Kajian penanggulangan bencana tsunami dan abrasi 1 dokumen kajian							
							4. Pembangunan Huntap Pasca bencana 30 unit							
							5. Pelatihan rancang bangun tahan gempa 60 orang							
							6. Pelatihan JITU-PASNA (pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan GIS untuk relawan 40 org							
							7. Laporan Monev dan perhitungan DRI pasca bencana banjir longsor akibat siklon Cempaka 2017pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana tahun 2018 1 dokumen Laporan Monev pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana tahun 2018							
							8. Kajian penanggulangan bencana kekeringan (lanjutan) 1 dokumen							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial — **Jumlah Pagu : Rp. 45.350.068.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.06	**SOSIAL**													
1.06.1.06.01.00	**Dinas Sosial**													
1.06.1.06.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 16.631.564.000,00**	**Rp. 19.198.000.000,00**		
1.06.1.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kir roda 2 dan 4 untuk 1 tahun	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 11.968.381.000,00	Rp. 14.320.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Pembayaran Pajak STNK roda 2, 3, dan 4 untuk 1 tahun							
							Pembayaran tagihan rekening air Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
							Pembayaran tagihan rekening listrik Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
							Pembayaran tagihan rekening telepon Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
							Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
							Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
							Penyediaan Jasa kebersihan dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
							Penyediaan Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
							Penyediaan logistik kantor dan logistik klien 6 UPTD 1 tahun							
							Penyediaan Materai 3000 dan 6000 Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
							Penyediaan Surat kabar lokal/ nasional dan Majalah untuk Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
1.06.1.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa keamanan kantor dan tempat kerja Dinas dan UPTD untuk 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.296.026.000,00	Rp. 4.460.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Tertanganinya arsip tekstual Dinas dan UPTD 1 tahun							
							Tertib admnistrasi keuangan, barang dan kepegawaian Dinas dan UPTD 12 bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial — **Jumlah Pagu : Rp. 45.350.068.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah untuk Dinas dan UPTD 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 367.157.000,00	Rp. 418.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah untuk Dinas 1 tahun							
							Makanan dan Minuman rapat/ sidang/ tamu 1 tahun							
1.06.1.06.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 2.516.802.000,00**	**Rp. 9.550.000.000,00**		
1.06.1.06.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembangunan Pagar makam/ kuburan (1 unit)di BPSTW	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai 100%	Dukungan 100% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 347.059.000,00	Rp. 4.700.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Rehabilitasi Gedung untuk pembuatan Ruang Perpustakaan, dan Ruang Laktasi pada Dinas							
							Rehabilitasi Rumah Dinas (Teras dan Atap) (1 unit) di BPRSW							
1.06.1.06.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat kesehatan (6 jenis) di BRSPA		Dukungan 100 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 534.150.000,00	Rp. 2.400.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Pengadaan Kunci bengkel (1 unit), Mesin presensi elektronik, Almari (2 unit), AC (1 unit), Water Heater (10 unit), Karpet (1 unit), Komputer (2 unit), Note Book (2 unit), Printer (4 unit), Kursi tamu (1 unit), Peralatan dapur (5 jenis), Peralatan kesehatan (4 jenis)	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai dengan kebutuhan 100%						
							Pengadaan Mesin cuci (3 unit), Komputer PC (1 unit), Printer (1 unit) dan tempat pemandian jenasah kantor di BRSBKL							
							Pengadaan Rak Arsip untuk Dinas Janti							
							Pengadaan Whiteboard (2 bh), AC Split (2 unit), pompa air otomatis (1 unit), tandon (2 buah), televisi (1 unit), kulkas (1 unit), kamera digital (1 unit) untuk BRTPD							
							Pengadaan, Komputer (1 unit), Printer (1 unit), Gerinda tangan (2 unit), Bor tangan (2 unit), alat Band (1 pkt), mesin potong rumput (1 unit), Jet cleaner kompresor (1 unit), kulkas (1 unit) di BPRSR							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial — **Jumlah Pagu : Rp. 45.350.068.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengadaan, mesin Bordir (5 bh), Kursi keramas (3 bh), Televisi (2 unit), komputer PC (1 unit), printer (1 unit), lemari (11 bh), Matras (8 bh), Kompor Gas (3 bh), Kompor listrik (2 unit), lemari Makan (2 bh), kulkas (1 bh), rak piring (2 bh), LCD (1 bh), Tabung Pemadam Kebakaran (5 unit), dan Perlengkapan (1 pkt) pada BPRSW							
1.06.1.06.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Belanja bahan kimia (3 jenis), Pemeliharaan instalasi air minum/bersih (12 bln), Pemeliharaan instalasi air limbah/kotor (12 bln), Pemeliharaan bangunan gedung/tempat, kerja (pengecatan dapur dan penyekatan ruangan untuk laundry) (12 bulan) di BRTPD	Terpeliharanya bangunan gedung kantor 100%	Dukungan % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 486.687.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan Instalasi Air limbah/kotor (12 bulan), pembayaran Jasa Konsultasi (12 bulan), Pemeliharaan Bangunan Gedung tempat kerja (kran, pralon, gembok, Selot pintu, RBA) (12 bulan) di BRSBKL							
							Pemeliharaan Water Torn, Saluran Air Minum PDAM, Saluran Air Limbah/ Sedot WC, Kran Air Dinas dan Camp Assesment, Gedung Depo Arsip dan menaikan daya listrik gedung TMP pada Dinas							
							Pengecetan bangunan untuk sleman dan gunungkidul dan pembelian engsel pintu jendela dll dan sedot WC 5 kali di BRSPA							
							Penyediaan kran, slot, gembok, pralon, TBK di BPRSR							
							Terpeliharanya instalasi air limbah / kotor berupa sedot WC wisma klien (16 unit) di BPSTW							
							Terpeliharanya saluran air minum/bersih (Penggantian kran air dan penggantian pipa air), sedot WC (10 kali), penggantian jendela (14 bh), pintu (8 bh), kawat berduri (800 m), jalan setapak dan saluran air di BPRSW							
1.06.1.06.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2, 3, 4, 6 pada Dinas dan Balai	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 908.204.000,00	Rp. 1.150.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Belanja Jasa Service Roda 2,3, 4, 6 pada Dinas dan Balai							
							Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2, 3, 4, 6 pada Dinas dan Balai							
1.06.1.06.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Belanja BBM (genset,mesin potong rumput,mesin cuci mobil), Belanja Pemeliharaan Alat alat Kantor, Belanja Pemeliharaan Alat alat rumah tangga, Pemeliharaan Mebelair di BRSPA	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 240.702.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 45.350.068.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							BBM Genzet, Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin (Lift & Mesin potong rumput), Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin (Lift & Mesin potong rumput), Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor (CPU, Printer, Stabilizer, laptop, LCD proyektor, Lampu Balast, Mesin ketik, Servis AC, isi Freon, Suku Cadang AC, Faximile, Pompa air, Genzet, handy talky, Sound sistem pada Dinas								
							BBM untuk Genset dan Mesin Pemotong Rumput, Terpeliharanya Alat-alat bermesin (genset dan mesin pemotong rumput), Terpeliharanya Alat-alat kantor (komputer, Laptop, Gamelan,Faximili, mesin jahit, kompor gas, kulkas, mesin ketik, Steamer, pabuson, soundsystem,dropcup,keyboard,LCD,kamera, CCTV), Terpeliharanya Perlengkapan Kantor (AC, pompa air/jetpump) pada BPRSW								
							Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas, Pemeliharaan alat kantor (mesin jahit, mesin profil kayu, gerenda tangan, boor duduk, mesin pasah listrik, laptop, komputer CPU, printer, mesin ketik, Pemeliharaan alat rumah tangga (pompa ar, AC, mesin potong rumput) di BPRSR								
							Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (12 bulan), Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (12bulan), Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor(12 bulan) di BRSBKL								
							Belanja BBM genset dan mesin potong rumput (2400 ltr), Servise genset, diesel pump, mesin lift, mesin potong rumput (12 bln), Service komputer, laptop, CCTV, jaringan internet, mesin jahit (12 bln), Perbaikan AC ruangan dan isi freon (12 bln), Kalibrasi alat fisioterapi dan alat keperawatan (12 bln) pada BRTPD								
							Tersedianya BBM untuk genzet dan mesin potong rumput, Terpeliharanya instalasi air minum (pengantian kran air), Terpeliharanya alat-alat kantor (mesin ketik, komputer, note book, faximili), Terpeliharanya perlengkapan kantor (AC, CCTV, PABX, pompa air, kompos gas) di BPSTW								
1.06.1.06.01.00.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**										**Rp. 16.194.000,00**	**Rp. 17.800.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial — **Jumlah Pagu : Rp. 45.350.068.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembinaan pekerja sosial dan penilaian angka kredit	Terlaksananya penilaian angka pekerja sosial sebanyak 100%	dukungan terhadap peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur (peksos) bertambah/ meningkat dan kenaikan pangkat serta penyesuaian jabatan menurut angka kredit	100%	Rp. 16.194.000,00	Rp. 17.800.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 152.998.000,00**	**Rp. 159.500.000,00**		
1.06.1.06.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	Nilai LKjIP : A (dari angka 80,21 menjadi angka 81,20)	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 12.012.000,00	Rp. 13.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 16.966.000,00	Rp. 18.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dokumen perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA, ROPK, PK, Renja, SBK (6 dokumen)	Dokumen perencanaan dan pengelolaan web	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja	100%	Rp. 107.520.000,00	Rp. 110.500.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Forum OPD (1 kegiatan)							
							Pengelolaan Website Dinas							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial — **Jumlah Pagu : Rp. 45.350.068.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 16.500.000,00	Rp. 18.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.15	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**										**Rp. 4.913.103.000,00**	**Rp. 10.555.000.000,00**		
1.06.1.06.01.00.15.001	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis,Pemulung,Orang dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang Terpenuhi Kebutuhan	5.49%	Asistensi Keluarga Penyandang Disabilitas (50 org)	Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabiltias sesuai undang-undang/perda/pergub disabilitas	Penyandang Disabilitas mampu berfungsi sosial serta Anak bermasalah Sosial Dapat Dilayani, Dilindungi, Direhabilitasi, Direferal dan Reunifikasi	100%	Rp. 1.869.746.000,00	Rp. 4.700.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Bantuan Operasional LPA DIY (1 Lbg)							
							Bantuan Operasional Rumah Singgah (6 lbg)							
							Bantuan Operasional Yayasan Sayap Ibu (1 Lbg)							
							Bimbingan Sosial Pelayanan dan perlindungan Anak Jalanan dan Referal Anak serta Bimbingan Sosial Anak jalanan Hasil Penjangkauan pada Rumah Perlindungan Sosial (25 anak)							
							Family Gathering Keluarga Penyandang Disabilitas (450 org)							
							Kampanye sosial Penyandang Disabilitas (500 org)							
							Komite Penyandang Disabilitas							
							Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas mental dan orang tua wali (20 org)							
							Pengasramaan Murid SLB (50 anak)							
							Perlindungan anak Terlantar dalam Panti (400 anak)							
							Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis LKSA (17 anak)							
							Perlindungan bagi anak disabilitas melalui LKS (100 anak)							
							Perlindungan bagi anak yang Hidup Di Jalan /AHJ melalui Lembaga (100 anak)							
							Perubahan Perda 4/2012 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial — **Jumlah Pagu : Rp. 45.350.068.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Rekomendasi adopsi (Calon Orang Tua Angkat (COTA) 30 orang)							
1.06.1.06.01.00.15.002	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis,Pemulung,Orang dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang Terpenuhi Kebutuhan	5.49%	Bimbingan Mental, Sosial untuk Gelandangan, Pengemis dan Pemulung di Camp Assesment (150 org)	Tuna Sosial mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan IPWL termonitoring dengan baik	Gelandangan, pengemis, pemulung, ODHA, KTK dan Korban perdagangan Orang mendapatkan perlindungan sosial dan pemenuhan perlindungan dasar.	100%	Rp. 3.043.357.000,00	Rp. 5.855.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor yang di Monev (5 lbg)							
							Pemulangan PMKS ke daerah asal, perujukan ke TRC Kemensos atau panti Sosial (100 org)							
							Tersedianya tempat tinggal sementara bagi ODHA yang mengalami diskriminasi dan stigma (5 org)							
1.06.1.06.01.00.16	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**										**Rp. 2.129.056.000,00**	**Rp. 2.907.000.000,00**		
1.06.1.06.01.00.16.001	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	67.57%	Pemberian Jaminan Sosial Lanjut Usia untuk 500 orang	Lanjut usia terlantar terjamin kebutuhan dasarnya.	Lanjut usia terlantar mendapatkan perlindungan sosial dan pemenuhan perlindungan dasar.	100%	Rp. 1.302.335.000,00	Rp. 1.827.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Bantuan Permakanan Lanjut Usia Terlantar (dalam panti) untuk 60 orang							
							Bhakti Sosial Bedah Kamar untuk 10 orang							
							Fasilitasi Lanjut Usia melalui Home Care untuk 600 orang							
							Komisi Daerah Lanjut Usia DIY							
							Peringatan Hari Lanjut Usia untuk 1500 orang							
1.06.1.06.01.00.16.002	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	67.57%	Fasilitasi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan (1 tahun)	Kesiapsiagaan dan Korban Bencana tertangani	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	100%	Rp. 826.721.000,00	Rp. 1.080.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Fasilitasi perawatan (dimakamkan) Jenazah Terlantar (20 org)							
							Fasilitasi TAGANA untuk menjalankan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana (40 tagana)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial — **Jumlah Pagu : Rp. 45.350.068.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Fasilitasi visum/otopsi jenazah terlantar (5 org)							
							Pelayanan Bantuan Distribusi Air Bersih Bagi Korban Bencana (500 tanki)							
							Pembentukan dan Pelatihan Kampung Siaga Bencana (1 lokasi)							
1.06.1.06.01.00.17	**PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN**										**Rp. 5.474.097.000,00**	**Rp. 7.720.000.000,00**		
1.06.1.06.01.00.17.001	Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga meningkat ekonominya	2.15%	FGD Pengurus KUBE dan LKM (70 org)	Meningkat kemampuan pengelolaan usaha bagi Fakir Miskin dan penyaluran BPNT yang tertib dan tepat waktu serta tepat sasaran.	Pendapatan dan aset meningkat melalui ketrampilan berusaha	100%	Rp. 3.847.659.000,00	Rp. 4.220.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Jumlah RTSM PKH yang Mampu Melaksanakan Fungsi Sosial (825 org)							
							Pembinaan Bagi KPM Bantuan Sosial / Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran BPNT (5 K/K)							
							Peningkatan Kapasitas Pengurus LKM (50 org)							
							Peningkatan Kapasitas Pengurus KUBE (50 org)							
							Peningkatan Kapasitas Pengurus USEP KM (50 org)							
							Seleksi Prestasi Pendamping KUBE (50 org)							
1.06.1.06.01.00.17.002	Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga meningkat ekonominya	2.15%	Pengumpulan data PMKS dan PSKS pada 438 Desa	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanganan PMKS serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	100%	Rp. 1.626.438.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Penyuluhan melalui media peragaan (20 lokasi)							
							Penyuluhan sosial berbasis masyarakat melalui petugas penyuluh sosial masyarakat (200 org)							
							Penyuluhan sosial melalui media cetak (4 pkt)							
							Penyuluhan sosial melalui media elektronik (10 pkt)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial — **Jumlah Pagu : Rp. 45.350.068.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penyuluhan Sosial Tingkat Desa (20 lok)							
							Publikasi informasi Kesejahteraan Sosial melalui media surat kabar (16 pkt)							
							Sosialisasi Program penanganan PMKS (24 lok)							
							Sosialisasi program perlindungan dan jaminan sosial (300 org)							
1.06.1.06.01.00.18	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS**										**Rp. 1.924.229.000,00**	**Rp. 2.800.000.000,00**		
1.06.1.06.01.00.18.001	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Warga Binaan yang Mampu Hidup Mandiri dan Normatif	25.29%	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas (170 org) serta jaminan sosial bagi wredha disabilitas (15 Org) pada BRTPD	perlindungan dan rahabilitasi sosial terhadap warga binaan balai	Terpenuhinya dan terlindunginya hak-hal warga binaan balai dan mampu hidup mandiri serta berfungsis sosial	100%	Rp. 1.924.229.000,00	Rp. 2.800.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.19	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL**										**Rp. 1.638.780.000,00**	**Rp. 2.100.000.000,00**		
1.06.1.06.01.00.19.001	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Kemandirian Warga Binaan Secara Sosial Ekonomi	43.33%	Perlindungan, rehabilitasi sosial dan keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (wanita yang berpotensi menjadi wanita tuna susila) sebanyak 60 orang di Balai PRSW	PRSE mendapatkan perlindungan, rehabilitasi dan pelatihan ketrampulan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian warga binaan Balai dan dapat berfungsi sosial (43.33%)	100%	Rp. 1.638.780.000,00	Rp. 2.100.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.20	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK**										**Rp. 2.482.351.000,00**	**Rp. 3.500.000.000,00**		
1.06.1.06.01.00.20.001	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Kemandirian Warga Binaan Secara Sosial Ekonomi (Binakarya)	20%	Rehabilitasi mental, sosial dan pelatihan keterampilan bagi Gelandangan dan pengemis, dan perlindungan dan rehabilitasi mental, sosial bagi penderita eks psikotik di Balai RSBKL	Gelandangan pengemis mempunyai ketrampilan dan Eks psikotik dapat mengurus dirinya sendiri	Terwujudnya kemandirian bagi warga binaan balai dan dapat berfungsi sosial	100%	Rp. 2.482.351.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
					Persentase perubahan sosial warga binaan balai dan mampu hidup mandiri dan atau kembali ke keluarga	14.2%								
1.06.1.06.01.00.21	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL**										**Rp. 988.969.000,00**	**Rp. 1.200.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial — **Jumlah Pagu : Rp. 45.350.068.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.00.21.001	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Warga Binaan yang Mampu Hidup Normatif Dalam Pengasuhan Keluarga	77.5%	Anak terlantar memperoleh pembinaan mental sosial dan keterampilan (40 anak) dan memberikan perlindungan dan rahabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (40 anak) di Balai PRSR	Anak terlantar dan ABH mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan	Terwujudnya warga binaan balai yang mampu hidup normatif (77,50)	100%	Rp. 988.969.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.22	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL**										**Rp. 1.941.891.000,00**	**Rp. 2.300.000.000,00**		
1.06.1.06.01.00.22.001	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Warga Binaan yang Mampu Hidup Normatif Dalam Pengasuhan Keluarga	34.36%	Perlindungan dan pengasuhan bagi anak balita terlantar (25 anak), pembinaan dan perlindungan anak terlantar usia sekolah (80 anak) dan Perlindungan, rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (35 anak) di Balai RPSA	Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan balai	Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan Balai dan terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial (34.36%)	100%	Rp. 1.941.891.000,00	Rp. 2.300.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.23	**PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR**										**Rp. 1.373.644.000,00**	**Rp. 1.700.000.000,00**		
1.06.1.06.01.00.23.001	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Warga Binaan yang Terpenuhi Kebutuhan Hak Dasarnya	100%	Perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar (214 orang) di Balai PSTW	Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan balai	Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan balai dan terlindungi hak-haknya (100%)	100%	Rp. 1.373.644.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.24	**PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN**										**Rp. 3.166.390.000,00**	**Rp. 5.101.000.000,00**		
1.06.1.06.01.00.24.001	Penguatan Partisipasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase PSKS dan masyarakat yang mempunyai semangat nasionalisme dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	51.57%	Pembentukan Forum Komunikasi LK3 (50 org)	PSKS berpartisipasi dalam pembangunan kesos	Meningkatnya penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	Rp. 2.392.490.000,00	Rp. 4.100.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Peningkatan Kapasitas Pengelola LK3 (50 org)							
							Pertemuan Jejaring Kerja LK3 (50 org)							
							Terlaksana dan Terjalinnya koordinasi keg antara NGO Asing, Mitra lokal dan Pemerintah DIY, Kab/Kota. (Pertemuan NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah) (30 org)							
							Terlaksanananya rakor TKSK se DIY, pemberian honor untuk TKSK se DIY dan peningkatan kapasitas TKSK se DIY (Rakor TKSK, penguatan kapasitas TKSK, Pemberian Honor TKSK dan sarpras TKSK) (78 org)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial — **Jumlah Pagu : Rp. 45.350.068.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Terlaksananya UGB dan PUB sesuai dengan aturan yang berlaku. (Publikasi PUB dan UGB melalui Media Cetak (4 kali) dan Radio. (6 kali)							
							Terlaksananya Bimbingan bagi LKS dalam rangka persiapan Akreditasi. (Forum Orsos/LKS) (140 org)							
							Terlaksananya bimtek bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial panti sosial yang mampu memberikan pelayanan sosial dengan baik berdasar pada Pekerjaan Sosial. (Bimbingan Teknis Dasar Pekerjaan Sosial bagi Pengurus panti sosial.) (30 org)							
							Terlaksananya Evaluasi keg IPSM tahun N-1, persiapan keg tahun N dan tersusunnya usulan kegiatan IPSM tahun N+1 (Rakor IPSM se DIY) (100 org)							
							Terlaksananya Evaluasi keg karang taruna tahun N-1, persiapan keg tahun N dan tersusunnya usulan kegiatan karang taruna tahun N+1 (Rakor Karang Taruna DIY) (100 org)							
							Terlaksananya Evaluasi keg WKSBM tahun N-1, persiapan keg tahun N dan tersusunnya usulan kegiatan WKSBM tahun N+1 (Rakor WKSBM) (100 org)							
							Terlaksananya kegiatan UGB dan PUB di lokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dialog Interaktif tentang UGB dan PUB dengan Sekolah, PT dan Masyarakat.)							
							Terlaksananya kemah kebangsaan untuk meningkatkan semangat dan nilai-nilai kebangsaan dalam diri KT serta meningkatkan peran KT dalam pengabdian masyarakat (Kemah kebangsaan Karang taruna) (450 org)							
							Terlaksananya Pemberian Penghargaan terhadap LKS yang memiliki prestasi penyelenggaraan Kessos di tingkat DIY untuk mewakili DIY dalam seleksi ditingkat nasional (Orsos Prestasi) (5 LKS)							
							Terlaksananya pengabdian IPSM DIY dalam bentuk bakti sosial untuk menanamkan semangat kepedulian sosial di masyarakat (Karya bakti IPSM DIY) (250 org)							
							Terlaksananya peningkatan jejaring kerja KT DIY dengan KT Kab/kota (Pembinaan jejaring kerja KT DIY) (500 org)							
							Terlaksananya peningkatan kapasitas pengurus KT DIY dalam melaksanakan tugas organisasi (Penguatan kapasitas Pengurus KT DIY) (40 org)							
							Terlaksananya peningkatkan kapasitas pengurus IPSM dalam melaksanakan tugas organisasi (Penguatan kapasitas IPSM) (40 org)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial — **Jumlah Pagu : Rp. 45.350.068.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Terlaksananya rakor antar pilar sosial dan terjadinya sinergisitas antar pilar-pilar sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Rakor antar PSKS) (60 org)							
							Terlaksananya seleksi WKSBM dan terpilihnya WKSBM Prestasi TK Provinsi (Seleksi WKSBM Prestasi) (5 K/K)							
							Terlaksananya seleksi prestasi dan terpilihnya KT Prestasi TK Provinsi untuk mewakili DIY dalam seleksi prestasi tingkat Nasional (Seleksi KT Prestasi) (5 K/K)							
							Terlaksananya seleksi prestasi dan terpilihnya TKSK Prestasi TK Provinsi untuk mewakili DIY dalam seleksi prestasi tingkat Nasional (Seleksi TKSK Prestasi) (5 K/K)							
							Terlaksananya workshop Forum CSR, Dunia Usaha Perguruan Tinggi dan Instansi terkait lainnya. (Worshop CSR) (100 org)							
							Terlaksanya Bimbingan bagi LKS dalam rangka Regestrasi LKS On line ((Forum Orsos/LKS)) (140 org)							
							Terlaksanya peningkatan kapasitas pengurus FK WKSBM DIY dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas organisasi (Penguatan FK WKSBM DIY) (40 org)							
							Terpilihnya PSM Prestasi TK Provinsi untuk mewakili DIY dalam seleksi prestasi tingkat Nasional (Seleksi PSM Prestasi) (250 org)							
							Tersusunnya program kerja KT DIY tahun 2019 (Rakerda karang taruna DIY) (50 org)							
1.06.1.06.01.00.24.002	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase PSKS dan masyarakat yang mempunyai semangat nasionalisme dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	51.57%	Gerakan Nilai Kebangsaan dan Kesetiakawanan Sosial bagi pelajar (100 org)	Meningkatnya kerapihan dan keindahan TMPN/ TMP, Monumen dan Tetenger	Meningkatnya kerapihan dan keindahan TMPN/TMP, Monumen dan Tetenger serta kesejahteraan keluarga pahlawan	100%	Rp. 773.900.000,00	Rp. 1.001.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							Kunjungan ke tempat-tempat bersejarah (100 org)							
							Memperkuat Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (15 lok)							
							Pelayanan ziarah di Taman Makam Pahlawan (36 romb)							
							Pemeliharaan TMPN, Monumen dan Tetenger (6 lok)							
							Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (100 org)							
							Penghargaan bagi keluarga Pahlawan (7 org)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial — **Jumlah Pagu : Rp. 45.350.068.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (4 kegt)							
							Ziarah pengenalan Nilai-Nilai Kepahlawanan (100 org)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. | **Jumlah Pagu : Rp. 19.663.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.07	**TENAGA KERJA**													
1.07.1.07.01.00	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.**													
1.07.1.07.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 3.184.325.000,00**	**Rp. 3.650.000.000,00**		
1.07.1.07.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor 50 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan sebesar 56% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
							Barang cetakan 38 jenis							
							Barang logistic kantor 4 jenis/62 buah							
							Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan 12 bulan							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 47 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4 15 unit							
							Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6 2 unit							
							Bukti pembayaran retribusi sampah 12 Bulan							
							Kebersihan gedung kantor 6 gedung							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 44 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. | **Jumlah Pagu : Rp. 19.663.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid 2 jenis, 12 bulan							
							Pembayaran tagihan rekening telepon,listrik,air dan internet 12 bulan (1 dinas induk, 2 UPTD)							
							Pemilahan arsip keuangan in aktif 5600 berkas							
							Penggandaan 50000 lembar							
							Pengiriman dokumen 600 dokumen							
							Penjilidan 390 buku							
							Penyusutan arsip keuangan 4500 berkas							
							Peralatan rumah tangga 71 jenis, 841 buah							
							surat keluar440 surat							
							surat masuk 500 surat							
1.07.1.07.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 1 orang driver 1 orang	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan sebesar 34% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.098.840.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
							Kinerja 1 orang Front Office 1 orang							
							Kinerja 28 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK 28 orang							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. — **Jumlah Pagu : Rp. 19.663.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kinerja 31 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 31 orang							
							Kinerja 5 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 5 orang							
							Kinerja 7 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 7 orang							
1.07.1.07.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi,koordinasi dalam daerah dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100 %	Dukungan sebesar 10% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 335.485.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 3.091.183.000,00**	**Rp. 5.400.000.000,00**		
1.07.1.07.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rahab gedung untuk LTSA 1 unit	Terlaksananya Rehab Gedung untuk LTSA 100%	dukungan sebesar 35% terhadap kinerjan Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. — **Jumlah Pagu : Rp. 19.663.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan Kantor sesuai RKPBMD 7 jenis	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100%	dukungan sebesar 4% terhadap kinerjan Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 122.760.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
							Perlengkapan Kantor sesuai RKPBMD 11 jenis							
1.07.1.07.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 3 unit	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	dukungan sebesar 10% terhadap kinerjan Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 314.204.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	kendaraan dinas operasional roda 4 (9 unit)	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	dukungan sebesar 20% terhadap kinerjan Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 654.219.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
							Kendaraan operasional roda 2 (34 unit)							
1.07.1.07.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	BBM operasional genset 200 liter	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	dukungan sebesar 32% terhadap kinerjan Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. — **Jumlah Pagu : Rp. 19.663.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemeliharaan alat kantor 5 jenis							
							Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 10 jenis							
1.07.1.07.01.00.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**										**Rp. 155.456.000,00**	**Rp. 260.000.000,00**		
1.07.1.07.01.00.03.001	Pengembangan I S O	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Surveilence ISO 9001-2015 3 sertifikat	Kualitas manajemen layanan sesuai standar mutu 100 %	dukungan sebesar 85% terhadap Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 131.797.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1.Pengawas Ketenagakerjaan 19 orang	Pembinaan, pengembangan, kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fugnsional tertentu terlaksana 100%	dukungan sebesar 15% terhadap Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 23.659.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
							2.Instruktur 28 orang							
							3.Penguji K3 10 orang							
							Penilaian angka kredit jabatan fungsional							
1.07.1.07.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 576.553.000,00**	**Rp. 918.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. — **Jumlah Pagu : Rp. 19.663.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan KInerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2019	Nilai Lakip dari 79,00 menjadi 80.00	Dukungan 4% terhadap penatausahaan keunagan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 23.650.000,00	Rp. 26.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi fisik dan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 5% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 30.155.000,00	Rp. 32.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan 81% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 467.748.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						
1.07.1.07.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 10% terhadap penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 55.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.15	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**										**Rp. 4.576.960.000,00**	**Rp. 7.400.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. | **Jumlah Pagu : Rp. 19.663.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.15.001	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	3.81%	Pelatihan tenaga kerja institusional 12 akt/240 orang	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja terlaksana 100 % sesuai target	Dukungan 78 % terhadap target Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil sebesar 3,81%	100%	Rp. 3.374.463.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
							Pelatihan tenaga kerja mobile training unit 15 akt/300 orang							
							Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja di UMKM 200 orang							
1.07.1.07.01.00.15.002	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	3.81%	Pelatihan Aviation Security 40 orang	Terlaksananya pelatihan tenaga kerja profesional 100%	Dukungan 22% terhadap target Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil sebesar 3,81%	100 %	Rp. 1.202.497.000,00	Rp. 1.400.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
							Pelatihan Ground Staff 40 Orang							
							Pelatihan Nurse 30 orang							
1.07.1.07.01.00.16	**PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN**										**Rp. 1.427.764.000,00**	**Rp. 2.280.000.000,00**		
1.07.1.07.01.00.16.001	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan	375Orang	Sertifikasi Uji Kompetensi 520 orang	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja berjalan 100 % sesuai target dan tepat waktu	Dukungan sebesar 76% terhadap target Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan sebanya375 orang	100%	Rp. 745.619.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	77lembaga								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. | **Jumlah Pagu : Rp. 19.663.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.16.002	Pemagangan Tenaga Kerja	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan	375Orang	Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja 50 orang	Pemagangan Tenaga Kerja terlaksana 100% tepat sasaran	Dukungan sebesar 24% terhadap target Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan sebanyak 375 orang	100%	Rp. 610.278.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	77lembaga	Penyiapan peserta untuk mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang 40 orang							
1.07.1.07.01.00.16.003	Pembinaan Lembaga Pelatihan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan	375Orang	Lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi 85 lembaga	Tersedianya jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi 100 % sesuai target	Dukungan 100% terhadap jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi sebanyak 77 lembaga	100%	Rp. 71.867.000,00	Rp. 80.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	77lembaga								
1.07.1.07.01.00.17	**PROGRAM PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI**										**Rp. 4.583.881.000,00**	**Rp. 7.240.000.000,00**		
1.07.1.07.01.00.17.002	Penempatan Tenaga Kerja	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10665Orang	Penempatan tenaga kerja 1000 orang	Terlaksananya penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran 100 % tepat waktu dan tepat sasaran	Dukungan 9.38% terhadap Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran 10.665 Orang	100%	Rp. 401.375.000,00	Rp. 370.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. | **Jumlah Pagu : Rp. 19.663.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.17.003	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10665Orang	Informasi kesempatan kerja 3000 lowongan	Tersedianya Informasi Pasar Kerja yang akurat 100%	Dukungan 80.89% terhadap Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran 10.665 Orang	100%	Rp. 361.464.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
							Penempatan pencari kerja 8177 orang	Penyelenggaraan Bursa Kerja terlaksana 100% tepat waktu dan tepat sasaran						
1.07.1.07.01.00.17.004	Pembentukan Kesempatan Kerja	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10665Orang	Pembekalan Kewirausahaan dan Pendampingan Pola Kemitraan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) 10 kelompok/50 orang	Pembentukan Kesempatan Kerja terlaksana 100% tepat waktu dan tepat sasaran	Dukungan 3.19% terhadap Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran 10.665 Orang	100%	Rp. 1.380.000.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
							terlaksananya kegiatan pembuatan/perbaikan sarana infrastruktur masyarakat melalui sistem padat karya 5 paket							
1.07.1.07.01.00.17.005	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10665Orang	Pelatihan wirausaha baru bagi penyandang disabilitas 6 paket @ 5 orang	Terlaksananya pelatihan wirausaha bagi penyandang disabilitas 100%	Dukungan 0.28% terhadap Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran 10.665 Orang	100%	Rp. 395.032.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. | **Jumlah Pagu : Rp. 19.663.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.17.006	Pembinaan Lembaga Penempatan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10665Orang	Pemantauan tentang aturan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI, pelaksanaan bursa kerja dan penempatan tenaga kerja 104 BKK dan 14 PPPMI	Pembinaan Lembaga Penempatan terlaksana 100%	Dukungan 1.11% terhadap Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran 10.665 Orang	100%	Rp. 107.929.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.17.007	Penyelenggaraan Transmigrasi	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10665Orang	Penyelenggaraan Transmigrasi 50 KK	Terlaksananya penyelenggaraan transmigrasi 100%	Dukungan 0.47% terhadap Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran 10.665 Orang	100%	Rp. 1.290.781.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.17.010	Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10665Orang	Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) 500 orang	Terlaksananya perlindungan dan penempatan pekerja migran di Indonesia 100%	Dukungan 4.69% terhadap Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran 10.665 Orang	100%	Rp. 647.300.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
							Pencegahan dan Penyelesaian PMI Unprocedural 12 bulan/10 kasus/10 orang							
							Peningkatan Ketrampilan bagi Purna PMI 30 orang							
							Penyelenggaraan LTSA 12 bulan							
1.07.1.07.01.00.18	**PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL**										**Rp. 702.586.000,00**	**Rp. 970.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. | **Jumlah Pagu : Rp. 19.663.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.18.001	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1388perusahaan	Pemantauan tentang pengupahan 200 perusahaan	terlaksananya pengupahan dan kesejahteraan pekerja 100 %	Dukungan 49% terhadap Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (1388 perusahaan)	100%	Rp. 344.905.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
							Penetapan Upah Minimum Provinsi 1 SK Gub							
1.07.1.07.01.00.18.002	Pembinaan Hubungan Industrial	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1388perusahaan	Pemantauan tentang hubungan industrial 95 perusahaan	Terlaksananya pembinaan hubungan industrial 100 %	Dukungan 51% terhadap Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (1388 perusahaan)	100%	Rp. 357.681.000,00	Rp. 520.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.19	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN**										**Rp. 553.228.000,00**	**Rp. 610.000.000,00**		
1.07.1.07.01.00.19.001	Pemeriksaan dan Pengawasan K3	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja	61%	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3 650 perusahaan	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan K3 100%	Dukungan 84 % terhadap Jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja (61%)	100%	Rp. 464.238.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.19.002	Pembinaan Norma Kerja	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja	61%	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja 650 perusahaan	Terlaksananya pemantauan perusahaan 100%	Dukungan 16 % terhadap Jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja (61%)	100%	Rp. 88.990.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.20	**PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA**										**Rp. 811.800.000,00**	**Rp. 850.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. | **Jumlah Pagu : Rp. 19.663.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.20.001	Pengujian Lingkungan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Hiperkes dan KK	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Perusahaan Besar dan Menengah yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	398perusahaan	Laporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan Besar, Menengah dan UMKM 610 orang (Besar dan Menengah), 500 UMKM	Terlaksananya pengujian tenaga kerja, pemeriksaan tenaga kerja, hiperkes dan KK 100%	Dukungan 100 % terhadap jumlah perusahaan yang mempunyai kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja sesuai standar (398 perusahaan)	100%	Rp. 811.800.000,00	Rp. 850.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
							Laporan hasil Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan besar menengah dan UMKM 70 UMKM dan 35 perusahaan menengah dan besar							
							Sertifikasi Hiperkes dan KK 420 orang							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk — **Jumlah Pagu : Rp. 7.600.951.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**													
1.08.1.08.01.00	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk**													
1.08.1.08.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 1.307.071.000,00**	**Rp. 1.575.285.257,00**		
1.08.1.08.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran pajak/STNK 10 Unit Kendaraan Roda 2 dan 9 Unit Kendaraan Roda 4	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 674.167.000,00	Rp. 836.390.648,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15 Jenis							
							Kebersihan 2 Gedung (3.653 m2 dan 700 m2)							
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 1 tahun							
							Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid 4 jenis							
							Pembayaran Tagihan Telepon, Air Dan Listrik 12 Bulan							
							Pengelolaan Arsip dan perpustakaan dalam 11 bulan							
							Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD 1 Tahun							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk — **Jumlah Pagu : Rp. 7.600.951.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							peningkatan Sumberdaya aparatur : 1 tahun							
							Penyediaan Alat Tulis Kantor : 1 tahun							
							Penyediaan Barang Cetakan : 1 tahun							
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 2.360 surat masuk dan 6.161 surat keluar							
							Penyediaan Penggandaan : 1 tahun							
1.08.1.08.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 11 orang pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 441.722.000,00	Rp. 485.894.609,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							Kinerja 12 orang jasa keamanan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja 2 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
1.08.1.08.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan terhdap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perkantoran	100%	Rp. 191.182.000,00	Rp. 253.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk — **Jumlah Pagu : Rp. 7.600.951.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
1.08.1.08.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 849.269.000,00**	**Rp. 504.685.478,00**		
1.08.1.08.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perlengkapan dan Peralatan ruang kerja pegawai 1 paket (meja kursi rapat , Gorden/Vitrage)	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 400.464.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							Perlengkapan sesuai RKBMD 4 jenis (Genset, Mic Wireless, Tempat Sampah, Trolly)							
1.08.1.08.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung kantor sesuai RKBMD: 1 gedung (RDU: 415 m2, DPPPA & PP DIY 3.653 m2)	Terpelihara gedung 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 175.850.000,00	Rp. 193.435.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMD 10 unit dan Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMD 9 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 234.005.000,00	Rp. 257.405.478,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Peralatan Kantor : 2 Jenis (42 Unit AC dan 2 Unit Pompa Air)	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 38.950.000,00	Rp. 53.845.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk — **Jumlah Pagu : Rp. 7.600.951.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08.1.08.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 208.268.000,00**	**Rp. 235.290.000,00**		
1.08.1.08.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai LKjIP dari 78,48 menjadi 79	Dukungan terhadap sarana dan prasrana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 12.537.000,00	Rp. 15.070.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 27.455.000,00	Rp. 33.220.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022 (1 dokumen); Dokumen draft RKA-DPA (2 dokumen); Dokumen draft RKAP-DPPA 2 dokumen; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK (3 dokumen)	Tersusunnya ROPK tahun 2019, Renja 2020, RKA 2020, dan DPA 2019.	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 160.000.000,00	Rp. 176.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							Forum OPD 1 Kegiatan		KElancaran pelakasanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%				
							Pengelolaan data dan informasi selama 1 tahun							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | **Jumlah Pagu : Rp. 7.600.951.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Sinkronisasi program kegiatan dgn kab/kota 3 angkatan							
1.08.1.08.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas (1 tahun)	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 8.276.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.15	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**										**Rp. 1.480.651.000,00**	**Rp. 1.875.830.000,00**		
1.08.1.08.01.00.15.001	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	73%	Fasilitasi forum perlindungan korban kekerasan 1 forum	Terlaksananya upaya perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 100%	Terlayaninya Korban Tindak Kekerasan Perempuan Dan Anak	100%	Rp. 765.295.000,00	Rp. 880.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak Korban kekerasan dan integrasi P2TPA 1 lembaga							
							Fasilitasi TESA 1 Paket							
1.08.1.08.01.00.15.002	Pengembangan Data Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Penyediaan Data Gender dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	73%	Analisis dan Kajian Data Terkait Isu Gender dan Anak (Profil Pemenuhan Hak Anak 2019) 1 dokumen	Tersusunnya Data dan Profil Gender dan Anak yang aktual dan meliputi seluruh wilayah D.I.Yogyakarta 100%	Tersajinya data gender dan anak sesuai dengan kebutuhan	100%	Rp. 285.000.000,00	Rp. 390.830.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk — **Jumlah Pagu : Rp. 7.600.951.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Desiminasi Informasi gender dan Anak dan Penyusunan Media Kampanye Terpadu PP, PA dan Keluarga (Media KIE mendukung Perlindungan Perempuan dan Anak, Direktori Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan anak) 2 Dokumen							
							Update Data Gender dan perlindungan perempuan dan anak (Data gender dan Anak, Data Perlindungan Perempuan dan anak, Analisis Isu Gender dan Anak 2 Dokumen							
1.08.1.08.01.00.15.003	Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Pemenuhan Hak-hak anak	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	73%	Pembinaan Kabupaten/kota Layak Anak 5 Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pembinaan KLA di 5 kabupaten/kota di DIY untuk mendorong peningkatan status KLA.	Meningkatnya status/level KLA kabupaten/kota	100%	Rp. 430.356.000,00	Rp. 605.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.16	**PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**										**Rp. 1.853.711.000,00**	**Rp. 2.416.661.830,00**		
1.08.1.08.01.00.16.001	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan Anak	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Fasilitasi organiasai perempuan dan pengarusutamaan gender	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.34%	Advokasi PUG ke Pokja PUG DIY dan Kab/Kota 1 paket	Terselenggaranya KIE Pengarusutamaan Gender (PUG) di DIY 100%	Meningkatknya jumlah perempuan pengambil keputusan di DIY	100%	Rp. 592.177.000,00	Rp. 704.669.790,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							Evaluasi PUG OPD dan Kab/Kota 1 paket							
							Fasilitasi Organisasi Perempuan 3 organisasi							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 7.600.951.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kampanye pemilih cerdas berperspektif gender 1 paket							
							Pelatihan Peningkatan Kapasitas Caleg Perempuan 1 angkatan							
							Pelatihan Peningkatan Kapasitas perempuan Potensial dalam Bidang Politik 1 angkatan							
1.08.1.08.01.00.16.002	Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Bambanglipuro Banguntapan Dlingo Galur Imogiri Kokap Lendah Pajangan Panjatan Pundong Sentolo Srandakan Mulyodadi Tamanan Jatimulyo Karang Sewu Karang Tengah Kebon Agung Hargowilis Bumirejo Triwidadi Depok Seloharjo Srikayangan Sukoreno Trimurti	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.34%	Inisiasi 10 desa	Terbentuk dan terbinanya Desa Prima sesuai rencana kegiatan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di D.I.Yogyakarta 100%	Meningkatnya produktivitas ekonomi perempuan dengan model desa prima	100%	Rp. 1.261.534.000,00	Rp. 1.711.992.040,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							Monitoring dan evaluasi desa prima mandiri 1 kali							
							Pembinaan 15 desa							
							Pendampingan 15 desa							
1.14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**													
1.14.1.08.01.00	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk**													

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk — **Jumlah Pagu : Rp. 7.600.951.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.14.1.08.01.00.15	**PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK**										**Rp. 775.231.000,00**	**Rp. 1.100.000.000,00**		
1.14.1.08.01.00.15.001	Pembinaan Keluarga Berencana	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Advokasi Pengendalian Penduduk	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17anak	Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 kali	Terselenggaranya KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di DIY 100%	Dukungan terhadap Penyebarluasan Informasi dan Edukasi mengenai Pengendalian Penduduk dan KB	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							Koordinasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 kali							
							Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja dalam Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana 10 kali							
							Penyusunan juknis kependudukan dan survey kependudukan 2 paket							
1.14.1.08.01.00.15.002	Peningkatan Kesehatan Reproduksi	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Advokasi dan KIE Kespro remaja	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17anak	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 2 kali	Terbentuk dan terbinanya PIK R sesuai rencana kegiatan sebagai upaya memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di DIY 100%	Dukungan terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja di DIY sebesar 100%	100%	Rp. 275.231.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							Pembinaan dan Fasilitasi PIK R 1 paket							
							Pendidikan kespro remaja 3 angkatan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | **Jumlah Pagu : Rp. 7.600.951.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja 10 kelompok						
1.14.1.08.01.00.16	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**										**Rp. 1.126.750.000,00**	**Rp. 1.337.600.000,00**		
1.14.1.08.01.00.16.001	Pengembangan Bina Keluarga	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Pengembangan bina keluarga sejahtera di 5 kab/kota	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013kasus	Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera 20 kelompok	Terbinanya Bina Keluarga Sejahtera sesuai rencana kegiatan di DIY 100%	Dukungan terhadap Pelaksanaan Bina Keluarga Sejahtera yang sudah terbentuk di DIY sebesar 100%	100%	Rp. 660.750.000,00	Rp. 825.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Sejahtera 20 desa							
							Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera 20 desa							
							Penyusunan profil Keluarga Berencana dan Sejahtera 1 dokumen							
1.14.1.08.01.00.16.002	Peningkatan Ketahanan Keluarga	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Advokasi dan KIE ketahanan keluarga di DIY	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013kasus	Advokasi dan sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga 2 Angkatan	Terlaksananya upaya peningkatan ketahanan keluarga sesuai dengan perda ketahanan keluarga di DIY 100%	Dukungan terhadap Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Ketahanan Keluarga sebesar 100%	100%	Rp. 466.000.000,00	Rp. 512.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							Advokasi Ketahanan Keluarga 6 kali							
							Penyusunan juknis/pergub implementasi ketahanan keluarga 1 dokumen							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk — **Jumlah Pagu : Rp. 7.600.951.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							TOT Ketahanan Keluarga Sejahtera 2 angkatan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan — **Jumlah Pagu : Rp. 29.199.082.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.09	**PANGAN**													
1.09.1.09.01.00	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**													
1.09.1.09.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 4.885.030.000,00**	**Rp. 4.931.197.896,00**		
1.09.1.09.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	ATK 39 Jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100%	Dukungan sebesar 33,33% terhadap admistrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.883.833.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Barang cetakan penggandaan dan penjilidan 3 jenis							
							Jasa kebersihan kantor 1 tahun							
							Jasa KIR, STNK kendaraan roda 2 dan roda 4 1 tahun							
							Jasa pembayaran telepon, listrik dan internet 12 bulan							
							Komponen instalasi listrik 12 macam							
							Pengelolaan naskah dinas 1 tahun							
							Peralatan rumah tangga perkantoran 8 macam							
							Retribusi sampah 1 tahun							
							Suart keluar dan surat masuk 9.515 buah							
							Surat kabar dan majalah 5 macam							
1.09.1.09.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian selama 1 tahun	Tersedia pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 33,33% terhadap admistrasi perkantoran yang mendukung kelancaran kelancaran fungsi dan tugas SKPD	100%	Rp. 2.701.197.000,00	Rp. 2.701.197.896,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Honor penjaga keamanan kantor selama 1 tahun							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan — **Jumlah Pagu : Rp. 29.199.082.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.09.1.09.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Makan minum keperluan rapat kantor selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 33,33% terhadap adminstrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Perjalanan dinas dalam dan luar kota dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun							
1.09.1.09.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 4.750.464.000,00**	**Rp. 1.970.000.000,00**		
1.09.1.09.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konstruksi Gudang Unit Gesikan 1 unit	Terbangun gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.923.701.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pagar UPTD BPBPTDK 1 unit							
							Pembangunan Jalan Usaha Tani Unit Gading 1 unit							
							Perbaikan atap gedung PMHP Lantai 2; 1 Paket							
							Rehab Gedung A 1 Paket							
							rehab screen house unit ngipiksari 1 unit							
1.09.1.09.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Acces point (BKPP) 1 Unit	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 429.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Hub (BKPP) 1 Unit							
							Melengkapi musium arsip (rak arsip, filling kabinet, interior kerasipan) 1 Paket							
							Pengadaan AC (BPBPTDK) 2 unit							
							Pengadaan Almari arsip (BPBPTDK) 1 unit							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan — **Jumlah Pagu : Rp. 29.199.082.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengadaan Filling cabinet (BPBPTDK) 1 buah							
							pengadaan genset (BKPP) 1 unit							
							Pengadaan Kursi Ruang Tunggu UPTD BPTP 2 buah							
							Pengadaan Lemari Arsip UPTD BPTP 2 unit							
							Pengadaan Mic Wireless (BKPP) 1 Unit							
							Pengadaan Sound System (INDUK) 1 unit							
							Perlengkapan ruang laktasi (AC, Lemari Es, , dispenser, wastafel, meja, kursi) 1 Paket							
1.09.1.09.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Instalasi Air dan limbah Gedung A 1 tahun	Terpeliharanya gedung dan kantor 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 135.646.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Instalasi air dan limbah Gedung C 1 tahun							
							Pemeliharaan lab dan kandang barongan 1 tahun							
							Pemeliharaan Taman 1 tahun							
1.09.1.09.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas 1 tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.142.142.000,00	Rp. 1.150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
1.09.1.09.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan berkala peralatan (komputer, faximili, mesin tik, Printer, dll) 1 tahun	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 119.975.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung perkantoran 1 tahun							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan — **Jumlah Pagu : Rp. 29.199.082.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemeliharaan Instalasi listrik, Telp PABX, Jaringan Internet/LAN, Perawatan Laptop, Notebook, printer, monitor,LCD, 1 tahun							
							Servis AC, Penggantian suku cadang AC, Isi Freon, Servis Genset 1 tahun							
1.09.1.09.01.00.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**										**Rp. 44.810.000,00**	**Rp. 0,00**		
1.09.1.09.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional 1 tahun	Pembinaan, pengembangan, kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fugnsional tertentu terlaksana 100%	Dukungan sebesar 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 44.810.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
1.09.1.09.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 314.087.000,00**	**Rp. 0,00**		
1.09.1.09.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2019	Nilai LAKIP: A dari 81,70 menjadi 82,00	Dukungan sebesar 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
1.09.1.09.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan sebesar 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 13.020.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan — **Jumlah Pagu : Rp. 29.199.082.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.09.1.09.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Dokumen perencanaan SKPD TA.2020 dan perubahan TA. 2019	Kesesuaian Perencanaan Tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun							
1.09.1.09.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan sebesar 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 96.067.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
1.09.1.09.01.00.17	**PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN**										**Rp. 1.847.500.000,00**	**Rp. 2.380.000.000,00**		
1.09.1.09.01.00.17.002	Penanganan Keamanan Pangan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Data hasil pengawasan keamanan pangan daerah 1 Dokumen	Keamanan pangan terjamin 100% selama 1 tahun	Dukungan 20% terhadap persentase peningkatan ketersediaaan dan konsumsi pangan sebesar 0,08%	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 270.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Informasi pangan aman dan sehat konsumsi 1 kali							
							Sertifikasi Prima dan PD (Produk Dalam Negeri) 6 Buah							
1.09.1.09.01.00.17.003	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Kampanye penganekaragaman pangan 5 kali	Terlaksananya kegiatan gerakan B2SA sebanyak 100%	Dukungan 25% terhadap peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan sebesar 0,08%	100%	Rp. 260.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Mengikuti lomba cipta menu B2SA tingkat DIY 1 kali							
							Mengikuti lomba cipta menu B2SA Tingkat Nasional 1 kali							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan — **Jumlah Pagu : Rp. 29.199.082.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.09.1.09.01.00.17.004	Penyediaan Cadangan Pangan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Bambanglipuro Depok Gamping Imogiri Paliyan Ponjong Sleman Temon	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Cadangan pangan masyarakat 15 ton	Penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat berjalan optimal 100%	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan sebesar 0,8%	100%	Rp. 627.500.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							cadangan pangan pemerintah sejumlah 25 ton							
							Data ketersediaan dan kebutuhan pangan (NBM, HBKN Puasa, Idul Fitri,Natal/Tahun Baru, Analisis ketersediaan Pangan) 5 laporan							
1.09.1.09.01.00.17.005	Distribusi Pangan Masyarakat	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Kretek Pandak Panjatan Sleman	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Pra Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 2 Gapoktan	Pelatihan dan pemberdayaan distribusi dan akses pangan terlaksana 100%	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi sebesar 0,08%	100%	Rp. 600.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Data harga dan distribusi pangan serta data pasokan dan akses pangan 2 jenis							
							HPS Tingkat DIY, PEDA, HPS Nasional, Pameran Pangan Nusantara, HKP, pameran Soropadan, pameran Jakarta 3 kali							
							Pengembangan PUPM/TTI 2 unit							
1.09.1.09.01.00.17.006	Penyelenggaraan Jogja Benih	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	4 Kabupaten, 1 Kota	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Data, Informasi Perbenihan, dan Layanan Konsultasi 1 tahun	Lembaga Jogja Benih berjalan optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya 100%	Dukungan 5% terhadap terwujudnya dukungan terhadappersentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi sebesar 0.08%	100%	Rp. 110.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Kerjasama pelaku usaha perbenihan 4 komoditas							
1.09.1.09.01.00.18	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN**										**Rp. 900.000.000,00**	**Rp. 1.000.000.000,00**		
1.09.1.09.01.00.18.003	Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Gedang sari Kokap Panggang Playen Ponjong Rongkop Srandakan	Jumlah Desa Rawan Pangan	6desa rawan pangan	Desa Mandiri Pangan 8 desa	Pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan Desa Rawan Pangan terlaksana 100%	Dukungan 100% terhadap terwujudnya target peningkatan penanganan jumlah desa rawan pangan sebanyak 6 desa	100%	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan — **Jumlah Pagu : Rp. 29.199.082.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Peta Desa Rawan Pangan/SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) dan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) 2 dokumen							
							Rekomendasi kebijakan Ketahanan Pangan 1 dokumen							
2	**Pilihan**													
2.03	**PERTANIAN**													
2.03.1.09.01.00	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**													
2.03.1.09.01.00.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN**										**Rp. 1.057.279.000,00**	**Rp. 720.000.000,00**		
2.03.1.09.01.00.16.004	Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	UPTD BPSDMP DIY	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian	73nilai/skor	Partisipasi pelaksanaan PEDA 1 kali	Penyelenggaraan penyuluhan optimal dan meningkatnya nilai prestasi kerja penyuluh 100% tepat sasaran	Dukungan 30% terhadap target peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian dan perkebunan menjadi 73	100%	Rp. 562.279.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pembinaan Kapasitas Lembagaan Petani Perkebunan 4 Komoditas							
							Penilaian klas kelompok 1 dokumen							
							Programa Penyuluhan 1 dokumen							
							Temu Tugas Penyuluh 1 kali							
2.03.1.09.01.00.16.005	Pembinaan SDM Pertanian	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	UPTD BPSDMP DIY	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian	73nilai/skor	Pelatihan Petugas Peternakan 3 Angkatan	Diklat Teknis Pertanian terlaksana 100% tepat waktu	Terwujudnya dukungan sebesar 33,33% terhadap target peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian menjadi 73	100%	Rp. 495.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pelatihan teknis hortikultura bagi petugas 3 angkatan							
							Pelatihan teknis tanaman pangan bagi Petugas 3 angkatan							
							Penyusunan kurikulum pelatihan 10 kurikulum							
							Penyusunan tutorial audiovisual online 1 paket							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan — **Jumlah Pagu : Rp. 29.199.082.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.18	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN**										**Rp. 4.550.000.000,00**	**Rp. 1.200.000.000,00**		
2.03.1.09.01.00.18.001	Pengembangan Inkubator Agribisnis	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Nanggulan	Produksi Tanaman Pangan	2312780ton	Operasional JATP	JATP beroperasinal 1 tahun	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 2.210.874 ton	100%	Rp. 3.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Soft launching 1 kali							
2.03.1.09.01.00.18.002	Budidaya Tanaman Pangan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kota Jogja	Produksi Tanaman Pangan	2312780ton	Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu 1 sertifikat	Budidaya tanaman pangan berjalan sesuai target sebesar 2.312.780 ton	Dukungan terhadap peningkatan jumlah prpduksi tanaman pangan dari tahnun 2018 ke 2019 sebesar 103.011 ton	100%	Rp. 1.050.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pendampingan produksi tanaman pangan 4 unit							
							Pengelolaan alsintan 5 kab/kota							
							Perencanaan dan pengawasan pupuk dan pestisida (prov, kab, kota) 6 unit							
							Rapergub insentif PLP2B 1 dokumen							
							Rehabilitasi jaringan irigasi tersier 100 ha							
2.03.1.09.01.00.19	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA**										**Rp. 2.000.000.000,00**	**Rp. 2.000.000.000,00**		
2.03.1.09.01.00.19.001	Budidaya Tanaman Hortikultura	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kota Jogja	Produksi Hortikultura	397965ton	Budidaya hortikultura di lahan pekarangan 10 kelompok	Registrasi kebun, pemeliharaan dan pengelolaan tanaman hortikultura berjalan sesuai target 100%	Dukungan terhadap meningkatnya produksi tanaman hortikultura sebesar 397.965 ton	100%	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pendampingan budidaya surjan 6 kelompok							
							Pendampingan budidaya tanaman hias (Anggrek) 1 unit							
							Pendampingan tanaman buah di kawasan embung (Tonagoro, Kleco, Gorolangu, Nglanggeran, Sriten) 5 lokasi							
							Registrasi Kebun 250 kebun							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan — **Jumlah Pagu : Rp. 29.199.082.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Sertifikasi Mutu 1 dokumen							
2.03.1.09.01.00.20	**PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN**										**Rp. 815.000.000,00**	**Rp. 0,00**		
2.03.1.09.01.00.20.003	Budidaya peternakan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. Kulon Progo	Populasi Ternak	622842AU (Animal Unit)	Bimtek Pemotongan Hewan Qurban 280 orang	Pengembangan populasi ternak berjalan sesuai target 100%	Dukungan terhadap target peningkatan jumlah produksi ternak sebesar 622.842 AU (Animal Unit)	100%	Rp. 815.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Budidaya Hijauan Pakan Ternak (HPT) 2 Kelompok							
							Budidaya Itik Turi 4 kelompok							
							Budidaya Kambing/Domba 4 kelompok							
							Pembinaan Pengembangan Budidaya Ternak 1 tahun							
							Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan (penyediaan obat, vakisn, desinfektan, vit ADE, obat cacing). 1 tahun							
							Penyediaan Sarana Prasarana dalam rangka Mendukung Program UPSUS SIWAB 1 paket							
2.03.1.09.01.00.21	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN**										**Rp. 3.967.000.000,00**	**Rp. 800.000.000,00**		
2.03.1.09.01.00.21.001	Pengembangan Pembibitan Ternak	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	UPTD BPBPTDK DIY	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	92%	Produksi bibit ternak (sapi perah, sapi potong, kambing, domba) 50 ekor	Bibit ternak berkualitas tahun 2019 tersedia 100% tepat waktu dan tepat sasaran	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan jumlah bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 92%	100%	Rp. 3.255.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Produksi semen beku SNI :4869-1:2017 sebanyak 28.000 dosis							
2.03.1.09.01.00.21.003	Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	UPTD BPBPTDK DIY	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	92%	Operasional pos lalu lintas ternak 5 pos & 16 petugas	Kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan terjamin 100% selama satu tahun	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan jumlah bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 92%	100%	Rp. 712.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							PengajuanPemeliharaanSertifikat Akreditasi laboratorium 1 tahun							
							Uji sampel produk asal hewan dan penyakit hewan 650 sampel							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan — **Jumlah Pagu : Rp. 29.199.082.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.22	**PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN**										**Rp. 481.400.000,00**	**Rp. 500.000.000,00**		
2.03.1.09.01.00.22.003	Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul	Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI	95%	Data Pengamatan OPT 1 dokumen	OPT tanaman pangan terkendali 100%	Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI sebesar 95 (%)	100%	Rp. 481.400.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Data Peredaran dan penggunaan pestisida 1 dokumen							
							Fungsi LPMT Optimal 1 tahun							
							Gerakan pengendalian OPT pada 4 Kabupaten							
							Pembuatan agen hayati (Trico, Beauveria) sebanyak 6.500 dos							
							Pembuatan Agensia hayati sebanyak 7 jenis utk tanaman perkebunan dan penyebarannya 1 tahun							
							Pembuatan PGPR sebanyak 400 botol							
							Pengendalian busuk buah pada tanaman kakao 1 tahun							
							Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan pestisida nabati 1 tahun							
							Pengendalian Oryctes sp pada tanaman kelapa 1 tahun							
							Peramalan dan Pengamatan OPT tanaman Perkebunan 1 tahun							
							Regu Perlindungan Tanaman (RPT) terbina 160 orang							
2.03.1.09.01.00.23	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN**										**Rp. 1.285.167.000,00**	**Rp. 1.103.500.000,00**		
2.03.1.09.01.00.23.001	Pengelolaan Tanaman Perkebunan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo	Produksi Perkebunan	68877ton	Bimtek pengelolaan lahan dan air 2 komoditas	Peningkatan Produksi tanaman perkebunan sesuai target 100%	Dukungan sebesar % terhadap target peningkatan pendapatan perkebunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar Rp. ,- (dari Rp. ,- menjadi Rp. ,-)	100%	Rp. 649.900.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Budidaya tanaman perkebunan sesuai SOP (Kopi, Teh, Kako) 4 angk @ 25 org ; 16 kali, 1 Ha							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan — **Jumlah Pagu : Rp. 29.199.082.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Budidaya tanaman perkebunan sesuai SOP (Tembakau) 2 angk @ 25 org ; 3 kali, 2 Ha							
							Pemeliharaan Tanaman Perkebunan (Kopi, Kakao dan Kelapa) 3 komoditas							
							Pendampingan budidaya tanaman perkebunan (Kelapa, Kakao,Kopi, Teh dan Tembakau) 5 komoditas							
2.03.1.09.01.00.23.003	Pengelolaan Tanaman tembakau (Cukai)	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Gunung Kidul	Produksi Perkebunan	68877ton	Pelatihan Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Tembakau Dengan Sistem Sekolah Lapang 2 Angkatan @.25 org	Peningkatan Produksi tanaman tembakau sesuai target 100%	Peningkatan Mutu dan Penghasilan Petani Komoditas Perkebunan	100%	Rp. 435.000.000,00	Rp. 478.500.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pelatihan Petani Pengelolaan Alsintan (Sarpras) 3 Angk @ 25 org							
							Pelatihan Petani Pengelolaan Lahan dan Air (Sarpras) 2 Angk @ 25 org							
							Pelatihan Teknis Budidaya Tembakau sesuai GAP 2 Angk @ 25 org							
							Pembinaan dan Uji kadar Tar dan Nikotin 3 kabupaten							
							Sarpras (Kultivator) pengelolaan lahan tanaman tembakau 3 kelompok							
							Sarpras (pompa air dan perpipaan) pengelolaan air tanaman tembakau 2 kelompok							
2.03.1.09.01.00.23.004	Pembinaan Kelembagaan Petani tembakau (cukai)	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. Kulon Progo	Produksi Perkebunan	68877ton	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (Cukai) 4 kelompok	Peningkatan Mutu dan Penghasilan Petani Tembakau dalam 1 tahun	Peningkatan Mutu dan Penghasilan Petani Komoditas Perkebunan	100%	Rp. 200.267.000,00	Rp. 225.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pembinaan Jaringan Pemasaran Tembakau 3 kabupaten							
2.03.1.09.01.00.24	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN**										**Rp. 1.890.645.000,00**	**Rp. 0,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan — **Jumlah Pagu : Rp. 29.199.082.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.24.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	UPTD BPPTPH DIY	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Besertifikat yang Terdistribusi	85%	Benih kedelai BD 1 ha	Benih tanaman pangan bersertifikat tersedia 100%	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan benih Tanaman Pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 85%	100%	Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Benih kedelai BP 4,5 ha							
							Benih padi BD (Wijilan) 3 ha							
							Benih padi BP (Berbah) 6 ha							
							Benih padi BP (Gesikan) 5 ha							
							Benih Padi BP (Wijilan) 12 ha							
							Jagung 5 ha							
							Kacang hijau 1 ha							
							Kacang tanah 1 ha							
							Opkup padi BP sebanyak 10 ha							
2.03.1.09.01.00.24.002	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	UPTD BPPTPH DIY	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Besertifikat yang Terdistribusi	85%	Benih Tanaman Buah 5.000 batang	Benih tanaman hortikultura bersertifikat tersedia 100%	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan benih Tanaman Pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 85 %	100%	Rp. 430.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Benih Tanaman Hias 2.000 batang							
							Benih Anggur 100 batang							
							Benih Cabe 35 kg							
							Benih hasil pemurnian Cabe & tomat 500 gram							
							Benih Jamur Edibel 8.000 botol							
							Benih Stroberi 500 batang							
							Benih Tomat 35 kg							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan — **Jumlah Pagu : Rp. 29.199.082.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.24.003	Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Besertifikat yang Terdistribusi	85%	Pemeliharaan Kebun (Kopi, Kakao dan Kelapa) 1 tahun		Persentase Benih Tanaman Pertanian Besertifikat yang Terdistribusi sebanyak 85%	100%	Rp. 310.645.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Penyediaan Bibit Unggul Perkebunan (Kakao dan Kelapa) 2 komoditas	Benih tanaman Perkebunan tersedia sesuai standar						
2.03.1.09.01.00.25	**PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN**										**Rp. 410.700.000,00**	**Rp. 450.000.000,00**		
2.03.1.09.01.00.25.001	Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pertanian	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan	600hektar	Pembinaan dan Pengawalan sumber benih tanaman Perkebunan 1 tahun		Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan jumlah sertifikat benih tanaman Pertanian sebesar 600 ha	100%	Rp. 410.700.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pendampingan ISO 90001 1 tahun							
							Pengawasan Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan dan Perkebunan 1 tahun							
							Sertifikasi benih hortikultura 20 unit							
							Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Perkebunan 1 tahun							
							Sertifikat padi dan palawija 150 unit	Sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura tersedia sesuai standar selama tahun 2019						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan — **Jumlah Pagu : Rp. 38.890.066.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**													
1.03.1.11.01.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**													
1.03.1.11.01.00.15	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN AIR LIMBAH REGIONAL**										**Rp. 9.000.000.000,00**	**Rp. 14.000.000.000,00**		
1.03.1.11.01.00.15.001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Peningkatan Pengelolaan Persampahan Regional	0ton/hari	1. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill (10 Ha) 2. Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA (1 unit) 3. Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA(1, 2 Km) 4. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik (5 unit) 5.Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang (2 unit) 6. Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 unit) 7. Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA (35 orang) 8. Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA berupa pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA (2 kali) 9. Pengadaan Perlengkapan K3 (6 jenis)	Terwujudnya pengelolaan sampah di TPA Piyungan 600 ton/hari sebesar 100 %	Dukungan sebesar 100% terhadap tercapainya Pengelolaan Sampah pada TPA Regional sebesar 600 ton/hari	100%	Rp. 9.000.000.000,00	Rp. 14.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Ketersediaan Air Curah yang Dikelola	0SR								
					Layanan Sistem Air Limbah Terpusat yang Dikelola	0SR								
1.11	**LINGKUNGAN HIDUP**													
1.11.1.11.01.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**													
1.11.1.11.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 4.200.000.000,00**	**Rp. 6.087.500.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan — **Jumlah Pagu : Rp. 38.890.066.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL kantor 2 kali 2. Materai sebanyak 2340 lembar (materai 6000 & 3000) 3. Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 31 buah 4. Terkelolanya surat masuk 1000 surat 5. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 12 bulan 6. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan 7. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 230 unit 8. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan 9. Terlaksananya penataan arsip 12 m2 10. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 106 jenis 11. Terlaksananya pengadaan barang cetakan 31 jenis 12. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 jenis 13. Terlaksananya penggandaan/foto copy 100.000 lembar 14. Terlaksananya pengiriman surat keluar 2000 surat 15. Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box 16. Tersedianya bahan bacaan sejumlah 10 jenis selama 12 bulan 17. Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 46 jenis	Tersedianya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan sebesar 49,47% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 1.400.000.000,00	Rp. 2.250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan — **Jumlah Pagu : Rp. 38.890.066.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Tersedianya jasa keamanan kantor selama 12 bulan 2. Terlaksananya pengelolaan keuangan selama 12 bulan 3. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan 4. Tersedianya Tenaga jasa kearsipan 6 orang 5. Tersedianya Tenaga jasa driver /sopir 8 orang 6. Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorer/Tidak tetap 12 bulan 7. Terlaksananya Pengelolaan Barang 12 bulan 8. Terlaksananya Biaya Fumigasi 84 m3	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	Dukungan sebesar 24,40% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 2.100.000.000,00	Rp. 2.937.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Tersedianya makan dan minum rapat 12 bulan 2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah 12 bulan	Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait secara lancar 100%	Dukungan sebesar 26,13% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 3.856.039.000,00**	**Rp. 4.887.500.000,00**		
1.11.1.11.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 unit 2. Terlaksananya Rehabilitasi Kantor RPH Semanu dan RPH Giring 1 paket 3. Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP 1 paket	Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%	Dukungan sebesar 20% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 622.574.000,00	Rp. 743.750.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 15 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%	Dukungan sebesar 25,81% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 850.000.000,00	Rp. 843.750.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan — **Jumlah Pagu : Rp. 38.890.066.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya Gedung Kantor 10 unit	Terlaksananya pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 100%	Dukungan sebesar 8,06% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 787.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perawatan kendaraan dinas operasional 230 unit	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100%	Dukungan sebesar 17,74% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.637.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 36 jenis	Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor100%	Dukungan sebesar 48,39% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 783.465.000,00	Rp. 875.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**										**Rp. 26.776.000,00**	**Rp. 30.000.000,00**		
1.11.1.11.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit 2 kali - Penerbitan Jurnal 1 kali	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 100 %	Dukungan 20 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 26.776.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 334.700.000,00**	**Rp. 1.099.500.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan — **Jumlah Pagu : Rp. 38.890.066.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Tersusunnya LAKIP Th 2018 (1 laporan) 2. Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2018 (1 laporan)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 100%	Dukungan sebesar 7,32% terhadap terwujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 27.500.000,00	Rp. 33.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan) 2. Laporan Keuangan Semester (2 laporan) 3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan) 4. Laporan Keuangan triwulan (4 laporan)	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan100% tepat waktu	Dukungan sebesar 17,07% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 57.200.000,00	Rp. 80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Forum Perangkat Daerah 1 kali 2. Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen 3. Publikasi LH di Media Publik 3 media 4. Tersusunnya Renja OPD 2020 1 dokumen 5. Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020 (2 dokumen) 6. Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019 (2 dokumen) 7. Tersusunnya ROPK 2019 (1 dokumen)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	Dukungan sebesar 60,98% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 885.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD (12 dokumen)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 100%	Dukungan sebesar 14,63% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 101.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.16	**PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP**										**Rp. 2.000.000.000,00**	**Rp. 3.200.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan — **Jumlah Pagu : Rp. 38.890.066.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.00.16.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Lingkungan Hidup	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	45%	1. Terlaksananya Validasi KLHS 5 Kab/ Kota 2. Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 12 bulan 3. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan 4. Terlaksananya Penyusunan IKPLHD 1 dokumen 5. Terlaksananya Penetapan dan perhitungan IKLH tahunan DIY 1 dokumen	Terlaksananya pengkajian lingkungan hidup 100 %	Dukungan 46,95 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY sebesar 41,25 %	100 %	Rp. 1.490.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	100%								
1.11.1.11.01.00.16.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Lingkungan Hidup	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	45%	1. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan 2. Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 15 keg/usaha 3. Terlaksananya Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 12 bulan	Terlaksananya penaatan dan penegakan hukum lingkungan terpadu 100 %	Dukungan 53,05 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY sebesar 3	15 kegiatan/usaha	Rp. 510.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	100%								
1.11.1.11.01.00.17	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**										**Rp. 2.700.000.000,00**	**Rp. 3.700.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan — **Jumlah Pagu : Rp. 38.890.066.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.00.17.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Lingkungan Hidup	Kadar pencemar air TSS	32.99mg/l	1. Terlaksananya Gerakan bersih sungai : 65 lokasi 2. Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air 4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah) : 100 % 3. TerlaksananyaPemantauan Kualitas Udara 1 jenis (udara ambien) : 100 % 4. Terlaksananya inventarisasi Gas Rumah Kaca 1 dokumen	Terlaksananya pengendalian pencemaran air, udara dan tanah 100 %	Dukungan sebesar 66,67 % terhadap tercapainya sumber pencemar air sungai (point source sebanyak 192 usaha/keg dan non point source sebanyak 72 lokasi) yang ditangani di 10 sungai dan sumber pencemar udara (point source sebanyak 65 usaha/keg) yang ditangan	100 %	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.700.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Kadar pencemar Udara SO2	9.1ug/Nm3								
					Kadar pencemar air BOD	10.61mg/l								
					Kadar pencemar air COD	20.91mg/l								
					Kadar pencemar air fosfat	0.15mg/l								
					Kadar pencemar air DO	5.21mg/l								
					Kadar pencemar air koli tinja	45766.46MPN/100ml								
					Kadar pencemar air total koli	344887.24MPN/100ml								
					Kadar pencemar Udara NO2	10.5ug/Nm3								
					Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	192Usaha/Kegiatan								
					Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai	72lokasi								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan — **Jumlah Pagu : Rp. 38.890.066.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota	65Usaha/Kegiatan								
1.11.1.11.01.00.17.003	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Kadar pencemar air TSS	32.99mg/l	1. Koordinasi/ pembinaan pengelolaan limbah B3 : 5 kab/ kota 2. Pengelolaan Sampah : 5 Kab/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah dan limbah 100 %	Dukungan sebesar 33,33% terhadap tercapainya sumber pencemar air sungai (point source sebanyak 192 usaha/keg dan non point source sebanyak 72 lokasi) yang ditangani di 10 sungai dan sumber pencemar udara (point source sebanyak 65 usaha/keg) yang ditangani	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Kadar pencemar Udara SO2	9.1ug/Nm3								
					Kadar pencemar air BOD	10.61mg/l								
					Kadar pencemar air COD	20.91mg/l								
					Kadar pencemar air fosfat	0.15mg/l								
					Kadar pencemar air DO	5.21mg/l								
					Kadar pencemar air koli tinja	45766.46MPN/100ml								
					Kadar pencemar air total koli	344887.24MPN/100ml								
					Kadar pencemar Udara NO2	10.5ug/Nm3								
					Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	192Usaha/Kegiatan								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan — **Jumlah Pagu : Rp. 38.890.066.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai	72lokasi								
					Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota	65Usaha/Kegiatan								
1.11.1.11.01.00.18	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP**										**Rp. 2.400.000.000,00**	**Rp. 4.500.000.000,00**		
1.11.1.11.01.00.18.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3Penghargaan	1. Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH : 4 penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklim, Kalpataru) 2. Terselenggaranya kampanye penyadaran LH : 3 peringatan (Hari Sampah, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional) 3. Terselenggaranya pameran dalam dan luar daerah 4. Terselenggaranya verifikasi 4 jenis penghargaan : 5 kab/kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan dan perhargaan lingkungan hidup 100 %	Dukungan sebesar 54,56 % terhadap tercapainya Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup sebanyak 3 penghargaan	100 %	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.18.002	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3Penghargaan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY (DLHK dan BPIPBPJK) : 1 unit	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY 100 %	Dukungan sebesar 45,44 % terhadap tercapainya Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3 Penghargaan	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.19	**PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM**										**Rp. 4.968.006.000,00**	**Rp. 6.249.500.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan — **Jumlah Pagu : Rp. 38.890.066.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.00.19.002	Peningkatan tutupan vegetasi	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Lingkungan Hidup	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	160Ha	1. DED Pengembangan Wanadesa Caturharjo : 1 dokumen 2. DED Pengembangan Wanadesa Singosaren, Tamanan, Wirokerten : 1 dokumen 3. Monitoring Wanadesa : 4 Kab 4. Pemeliharaan Wanadesa : 10 lokasi 5. Penanaman RTH JJLS - Rest Area : 1 paket 6. Pengembangan Wanadesa Wisata Brosot, Galur, Kulon Progo : 1 lokasi	Terlaksananya peningkatan tutupan vegetasi 100 %	Dukungan sebesar 100% terhadap tercapainya persentase tutupan lahan sebesar 33,58	100%	Rp. 2.090.448.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1%								
1.11.1.11.01.00.19.003	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	D.I Yogyakarta	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	160Ha	1. Monitoring telagadesa : 2 kab 2. Pembangunan Telagadesa : 1 lokasi 3. Pemeliharaan Telagadesa : 2 lokasi 4. Pengelolaan DAS Prioritas : 12 bulan	Terlaksananya pengelolaan DAS 100 %	Terkelolanya DAS prioritas	12 bulan	Rp. 1.800.000.000,00	Rp. 148.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1%								
1.11.1.11.01.00.19.004	Konservasi Sumberdaya Hutan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	D.I Yogyakarta	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	160Ha	1. Inventarisasi Jenis dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar : 1 dokumen 2. Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial dan Lahan Pantai : 6 Ha 3. Pembinaan masyarakat sekitar KSA/KPA : 30 orang	Terlaksananya korservasi sumber daya hutan	Sumberdaya hutan terkonservasi	100%	Rp. 777.558.000,00	Rp. 856.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1%								
1.11.1.11.01.00.19.005	Pengamanan Hutan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	D.I Yogyakarta	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	160Ha	1. Fasilitasi administrasi penyuluhan kehutanan : 12 bulan 2. Keamanan Hutan Terjamin : 12 bulan 3. Rakor Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat : 50 orang	Terlaksananya Pengamanan Hutan 100 %	Hutan aman	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 245.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1%								
2	**Pilihan**													
2.04	**KEHUTANAN**													
2.04.1.11.01.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**													

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan — **Jumlah Pagu : Rp. 38.890.066.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.04.1.11.01.00.18	**PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN**										**Rp. 865.000.000,00**	**Rp. 953.000.000,00**		
2.04.1.11.01.00.18.001	Penataan Hutan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dlingo Kokap Paliyan Panggang Sapto sari	persentase kawasan hutan tertata	87.4%	1.Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan : 2 lokasi 2. Kajian Potensi Hutan Rakyat : 1 dokumen 3.Pemeliharaan dan Penegasan Tanda Batas Kawasan Hutan : 20 km 4. Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan : 20 Km	Terlaksananya penataan hutan 100 %	Kawasan hutan tertata	100%	Rp. 315.000.000,00	Rp. 346.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2%								
2.04.1.11.01.00.18.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	D.I Yogyakarta	persentase kawasan hutan tertata	87.4%	1. Monitoring dan pembinaan produksi hasil hutan : 4 BDH 2. Pembinaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu : 4 BDH 3. Pembinaan penatausahaan hasil hutan : 20 Perusahaan 4. Pengendalian peredaran hasil hutan : 4 BDH 5. Penyusunan potensi HHBK dan Jasa Lingkungan di luar kawasan = 2 Kabupaten	Terlaksananya penatausahaan produksi hasil hutan 100 %	Penatausahaan produksi hasil hutan sesuai dengan regulasi	100%	Rp. 240.000.000,00	Rp. 264.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2%								
2.04.1.11.01.00.18.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Gunungkidul, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Kulonprogo	persentase kawasan hutan tertata	87.4%	Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat : 4 kabupaten	Terlaksananya pengelolaan perhutanan sosial 100 %	Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat sesuai dengan regulasi	100%	Rp. 310.000.000,00	Rp. 342.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2%								
2.04.1.11.01.00.19	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG**										**Rp. 7.228.000.000,00**	**Rp. 6.786.500.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan — **Jumlah Pagu : Rp. 38.890.066.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.04.1.11.01.00.19.001	Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	BDH Playen, BDH Panggang, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH Kulonprogo-Bantul	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.62%	1. Penyusunan Dokumen Kendali Petak : 1 dokumen 2. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) : 1 dokumen 3. Penyusunan Rencana Teknis Tahunan : 4 dokumen	Terlaksanya Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya hutan 100 %	Rencana pengelolaan hutan yang mendukung pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung	100%	Rp. 415.000.000,00	Rp. 456.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
2.04.1.11.01.00.19.002	Perlindungan Hutan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	BDH Playen, BDH Panggang, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH Kulonprogo-Bantul	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.62%	Perlindungan Hutan terjamin : 12 bulan	Terlaksananya Perlindungan Hutan 100 %	Hutan terlindungi	12 bulan	Rp. 488.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
2.04.1.11.01.00.19.003	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	BDH Playen, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH Kulonprogo-Bantul, BDH Panggang	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.62%	1. Produk Hasil Hutan : 2 komoditas 2. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung : 20 Ha 3. Tanaman Kayu Putih Baru : 559.200 batang	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan 100%	Sumberdaya hutan dapat dimanfaatkan	100%	Rp. 6.325.000.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
2.04.1.11.01.00.20	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI**										**Rp. 742.872.000,00**	**Rp. 835.670.000,00**		
2.04.1.11.01.00.20.001	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Playen	Persentase hutan konservasi terkelola	75.86%	1. Pemeliharaan I tanaman bambu : 600 batang 2. Pemeliharaan satwa rusa : 6 ekor 3. Penataan batas dalam : 2 Km	Terlaksananya Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder 100 %	Tahura Bunder Beroperasi	12 bulan	Rp. 180.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
2.04.1.11.01.00.20.002	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Playen	Persentase hutan konservasi terkelola	75.86%	1. Pembinaan masyarakat sekitar Tahura Bunder : 4 Angkatan @30 orang 2. Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir) : 3 jenis 3. Promosi dan Publikasi Tahura Bunder : 12 bulan	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Tahura 100 %	Pelayanan pemanfaatan tahura bunder berjalan dengan baik	100%	Rp. 562.872.000,00	Rp. 635.670.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
2.04.1.11.01.00.21	**PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN**										**Rp. 568.673.000,00**	**Rp. 545.500.000,00**		
2.04.1.11.01.00.21.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Playen	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	325000batang	Tersedianya Bibit tanaman kehutanan bersertifikat : 600.000 batang	Terlaksananya Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan bersertifikat 100%	tersedianya bibit tanaman kehutanan berkualitas untuk kegiatan pembangunan kehutanan di DIY	100%	Rp. 568.673.000,00	Rp. 545.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan — **Jumlah Pagu : Rp. 132.169.448.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.15	**PERHUBUNGAN**													
1.15.1.15.01.00	**Dinas Perhubungan**													
1.15.1.15.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 4.700.000.000,00**	**Rp. 5.100.000.000,00**		
1.15.1.15.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD 12 bulan	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100%	Dukungan sebesar 28,19 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 6 jenis							
							Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan (12 cetakan dan 13 penggandaan dan penjilidan)							
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan							
							Penyediaan Alat Tulis Kantor 35 jenis							
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 12 bulan							
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 12 bulan							
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Kendaraan Roda 2 : 19 unit dan kendaraan Roda 4 : 14 unit)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan											**Jumlah Pagu : Rp. 132.169.448.000,00**			
Nomor	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**	
					Hasil Program		**Keluaran Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**SKPD**	**Jenis Kegiatan**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**1/2/3**	**1/2/3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan							
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 jenis							
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14 jenis							
1.15.1.15.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa keamanan kantor/ tempat kerja 12 bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan sebesar 61,81 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Rp. 2.900.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian 12 bulan							
							tenaga kerja pendukung (Dinas 49 orang dan Balai 13 orang)							
1.15.1.15.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah 12 bulan	Kelancaran Koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan sebesar 10 % terhadap terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 550.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Makan dan minum sidang (Dinas : 6000 0s dan Balai : 1000 os)							
1.15.1.15.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 1.215.500.000,00**	**Rp. 1.260.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan | **Jumlah Pagu : Rp. 132.169.448.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Meja : 12 unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan sebesar 4,94 % terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Printer : 8 unit							
							Rak server : 2 unit							
1.15.1.15.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Gedung kantor, Taman, Tempat parkir beserta lingkungannya 12 bulan	Terpelihara kantor sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan sebesar 25,34% terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 308.000.000,00	Rp. 320.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan roda 2 : 18 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan sebesar 47,09 % terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 572.500.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Kendaraan Roda 4 : 14 unit							
1.15.1.15.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan LAN 12 bulan	Terpelihara peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100%	Dukungan sebesar 16,46 % terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Peralatan kantor 8 jenis							
							Perlengkapan kantor 6 jenis							
1.15.1.15.01.00.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersedianya kendaraan roda 2 (1 unit)	terpenuhinya sarana prasaran untuk operasional SKPD 100%	Dukungan sebesar 6,17 % terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 75.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan — **Jumlah Pagu : Rp. 132.169.448.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 400.000.000,00**	**Rp. 429.000.000,00**		
1.15.1.15.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	LKJ (1 dokumen)	Nilai LKJIP dari semula 77,17 (BB) menjadi 80 (A)	Dukungan sebesar 2,125 % terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Rp. 8.500.000,00	Rp. 9.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							LKJiP (1 dokumen)							
1.15.1.15.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Keuangan Bulanan (12 dokumen)	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 3 %	Dukungan sebesar 8,75 % terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Rp. 35.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							laporan keuangan semester (2 dokumen)							
							Laporan Keuangan Tahunan (1 dokumen)							
							Laporan Keuangan Triwulan (4 dokumen)							
1.15.1.15.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	DPA 2020 : 2 Dokumen (Induk+Dinas)	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Dukungan sebesar 81,625 % terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Rp. 326.500.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							DPA-P 2019 : 2 Dokumen (Induk+Dinas)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 132.169.448.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Forum Perangkat Daerah : 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020						
							Pengembangan Data pada Sistem Informasi : 1 paket							
							Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY : 1 paket							
							Rencana Kerja (Renja) Dishub 2019 : 1 dokumen							
							ROPK dishub Tahun 2019 : 1 dokumen							
1.15.1.15.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD : 24 dokumen (12 Dinas dan 12 Induk)	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan sebesar 7,5 % terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.00.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI**										**Rp. 7.301.360.000,00**	**Rp. 7.400.000.000,00**		
1.15.1.15.01.00.16.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Jalan Provinsi	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.96%	Audit Keselamatan Jalan (5 Titik Sesuai DRK)	1 dokumen	Dukungan penurunan rasio jumlah kecelakaan <1	100%	Rp. 5.766.360.000,00	Rp. 5.800.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Evaluasi Kinerja keselamatan Jalan	1 dokumen						
							Pemeliharaan APILL	60 Lokasi						
							Pemeliharaan EWS	12 bulan						
							Pemeliharaan marka jalan	9.000 meter						
							Pemeliharaan rambu	200 Unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan | **Jumlah Pagu : Rp. 132.169.448.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemeliharaan Toponimi	24 Unit						
							Pengadaan dan pemasangan APJ Listrik	50 Unit						
							Pengadaan dan pemasangan APJ Surya	20 Unit						
							Pengadaan dan pemasangan Cermin tikungan	20 buah						
							Pengadaan dan pemasangan Deliniator	300 buah						
							Pengadaan dan pemasangan Pagar pengaman jalan	400 meter						
							Pengadaan dan pemasangan Paku marka	1000 buah						
							Pengadaan dan pemasangan Rambu LL	180 buah						
							Pengadaan dan pemasangan RPPJ	14 Unit						
							Pengadaan dan pemasangan Warning Light TS	5 Unit						
							Pengadaan dan pengecatan marka jalan	1000 meter						
							Pengadaan Light Bar Sirine (Kuning)	2 buah						
							Pengecatan tiang APILL	50 Lokasi						
							Perawaan Warning Light TS	27 Unit						
							Perawatan APJ Listrik	60 Unit						
							Perawatan APJ Surya	40 Unit						
							Rehab berat APILL	4 Lokasi						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 132.169.448.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Studi Kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi	1 dokumen						
							Tim sentral pelayanan gangguan fasilitas perlengkapan jalan	12 bulan						
1.15.1.15.01.00.16.004	Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.96%	Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	15 kali	Dukungan untuk menurunkan angka kecelakaan di Jalan Provinsi <1	100%	Rp. 1.535.000.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat SD	1 kali						
							Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ tingkat SLTA	1 kali						
							Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang	kendaraan						
							Penyelenggaraan Pemantauan Transportasi Hari-hari Besar	Angkutan Lebaran 16 hari, Angkutan Liburan 15 hari, dan Angkutan Natal dan Tahun Baru 8 hari						
1.15.1.15.01.00.17	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN**										**Rp. 113.405.788.000,00**	**Rp. 113.700.000.000,00**		
1.15.1.15.01.00.17.007	Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perkotaan dan jalan provinsi	Peningkatan Penyediaan Layanan Angkutan Umum dalam Trayek	0%	Penertiban perizinan	746 kendaraan	Dukungan sebesar 11 % terhadap peningkatan pelayanan angkutan	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	76%								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan | **Jumlah Pagu : Rp. 132.169.448.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Penyiapan Penyediaan Sarana Prasarana Angkutan Perkeretaapian	40%								
					Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	72.24%								
					Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek	76%								
					Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	40%								
1.15.1.15.01.00.17.010	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perkotaan DIY	Peningkatan Penyediaan Layanan Angkutan Umum dalam Trayek	0%	a. Alat penanda di halte portable 7 unit b. Pekerasan landasan halte portable di bahu jalan 45 lokasi c. Penerapan contraflow 2 ruas jalan d. Pengadaan halte portable 20 unit e. Prioritas bus di simpang 4 simpang f. Upgrade dan Data Internet CCTV 128 Armada g. kajian pengembangan sistem 2 aplikasi h. Pemeliharaan halte 122 halte permanen dan 85 TPB	Peningkatan pelayanan trans Jogja 60 %	Dukungan sebesar 62 % terhadap peningkatan pelayanan angkutan	100%	Rp. 112.705.788.000,00	Rp. 113.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	76%	Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan | **Jumlah Pagu : Rp. 132.169.448.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Penyiapan Penyediaan Sarana Prasarana Angkutan Perkeretaapian	40%	Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum 3 kali @35 peserta Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum 1 kali @ 80 peserta	Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Angkutan umum 100 %						
					Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	72,24%	Penataan AKDP Menuju Bandara Baru	1 dokumen kesepakatan (SK Gub)						
					Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek	76%	pengembangan park and ride eksisting	1 lokasi						
					Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	40%	Penyelenggaraan Angkutan Umum Buy The Service	12 bulan (17 Jalur 128 armada)						
1.15.1.15.01.00.17.012	Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Peningkatan Penyediaan Layanan Angkutan Umum dalam Trayek	0%	Business plan angkutan barang	1 dokumen	Dukungan sebesar 27 % terhadap peningkatan pelayanan angkutan	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	76%								
					Penyiapan Penyediaan Sarana Prasarana Angkutan Perkeretaapian	40%								
					Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	72.24%								
					Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek	76%								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan | **Jumlah Pagu : Rp. 132.169.448.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	40%								
1.15.1.15.01.00.18	**PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**										**Rp. 3.346.800.000,00**	**Rp. 3.400.000.000,00**		
1.15.1.15.01.00.18.004	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perkotaan Yogyakarta	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Prioritas	48%	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa LL	2 kawasan	Dukungan sebesar 39 % terhadap pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%	Rp. 1.295.700.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Peningkatan Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	0%	Pelaksanaan Evaluasi Dokumen Andalalin	12 bulan						
					Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	48%	Pelaksanaan forum LLAJ	12 bulan						
					Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	60%	Pemantauan Lalu Lintas dan Tinjauan Lapangan	3 kawasan						
							Pendampingan Pelaksanaan Penilaian WTN	5 kabupaten/kota						
							Perencanaan dan Pengaturan Kondisi Lalu Lintas Berbasis Teknologi Transportasi	12 bulan						
							Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang	1 dokumen						
1.15.1.15.01.00.18.005	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perkotaan Yogyakarta	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Prioritas	48%	Pemeliharaan ATCS	1 paket	Dukungan sebesar 61 % terhadap pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%	Rp. 2.051.100.000,00	Rp. 2.100.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan | **Jumlah Pagu : Rp. 132.169.448.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Peningkatan Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	0%	Penambahan fasilitas CC room	1 paket						
					Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	48%	Pengadaan dan Pemasangan Kamera ATCS	3 simpang (Condong Catur, Monjali, Demak Ijo)						
					Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	60%	Pengadaan Gembok	30 buah						
							Pengadaan Rambu Lalu Lintas	50 buah						
							Pengadaan RPPJ	4 buah						
							Pengadaan Traffic Cone	50 buah						
							Pengadaan Water Barrier	25 buah						
							Peningkatan Jaringan ATCS	2 simpang (Condong Catur, Monjali)						
1.15.1.15.01.00.19	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN**										**Rp. 1.800.000.000,00**	**Rp. 1.800.000.000,00**		
1.15.1.15.01.00.19.001	Penyelenggaraan Terminal Type B	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Terminal Jombor dan Wates	Penumpang yang Terlayani Angkutan Umum	4550penumpang per hari	Pengelolaan Terminal Tipe B	4550 penumpang/tahun	Dukungan sebesar 55,5 % terhadap pengembangan dan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan | **Jumlah Pagu : Rp. 132.169.448.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.00.19.004	Pengelolaan Park and Ride dan Perparkiran	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Parkir dan Park and Ride	Penumpang yang Terlayani Angkutan Umum	4550penumpang per hari	DED Pembangunan Kawasan Park and Ride Gamping	1 dokumen	Dukungan sebesar 44,5 % terhadap pengembangan dan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran	100%	Rp. 800.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Optimalisasi Tempat Parkir Bandara	1 dokumen kerjasama						
							Pengelolaan Park and Ride (Prambanan, Dongkelan, Gamping, Ngebean)	12 bulan						
							Study Kelayakan Park and Ride Ngemplak	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika — **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**													
1.16.1.16.01.00	**Dinas Komunikasi dan Informatika**													
1.16.1.16.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 1.773.758.000,00**	**Rp. 1.935.000.000,00**		
1.16.1.16.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Penyediaan Barang cetakan 10 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	44.20%	Rp. 889.983.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Perijinan Kendaraan roda 2 (dua) kendaraan 8 unit							
							Perijinan Kendaraan roda 4 (empat) kendaraan 12 unit							
							Alat Tulis Kantor 35 jenis							
							Benda-benda Pos (Materai, Perangko) 2 jenis							
							Bendera 1 jenis							
							Bukti pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bulan							
							Bukti Pembayaran Jasa Pengelolaan Arsip 12 bulan							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 jenis							
							Langganan Majalah 1 jenis							
							Langganan Surat Kabar 6 jenis							
							Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan							
							Pembayaran tagihan rekening telepon 12 bulan							
							Pemusnahan Arsip 12 bulan							
							Penggandaan dan penjilidan 17 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika | **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengiriman Dokumen 12 bulan							
							Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 jenis							
1.16.1.16.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja 12 bulan	tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	21.12%	Rp. 425.390.000,00	Rp. 425.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Pembayaran Tenaga Pengelola Pelayanan Perkantoran 12 bulan							
1.16.1.16.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Makanan dan Minuman Sidang 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	34.68%	Rp. 458.385.000,00	Rp. 610.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka pelaksanaan kelancaran tugas dinas 12 bulan							
1.16.1.16.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 1.116.409.000,00**	**Rp. 1.340.000.000,00**		
1.16.1.16.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	AC 1 PK 1 unit	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	25.26%	Rp. 138.327.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							almari arsip kaca 3 unit							
							almari es 1 buah							
							filling cabinet 5 unit							
							kamera pengawas 1 paket							
							kursi roda 1 buah							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika — **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							LCD proyektor 1 unit							
							scanner 1 unit							
1.16.1.16.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	DED Pembangunan Aula 1 Paket	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	31.20%	Rp. 542.601.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Gedung Kantor Terpelihara 12 bulan							
1.16.1.16.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan Roda 2 (dua) 8 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	48.41%	Rp. 352.456.000,00	Rp. 370.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Kendaraan Roda 4 (empat) 12 unit							
1.16.1.16.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Air Conditioner 25 unit	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	5.89%	Rp. 83.025.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Camera 2 unit							
							Genset 1 paket							
							Komputer (PC, Monitor, Printer, Scanner) 70 unit							
							LCD Projector 2 unit							
							Mesin Ketik Manual 5 unit							
							Notebook 12 unit							
							Pemeliharaan LAN 12 bulan							
							Peralatan listrik, telepon dan air 12 bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika — **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.16.1.16.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 334.003.000,00**	**Rp. 338.000.000,00**		
1.16.1.16.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Nilai LKjIP: A	terwujudnya penata usaha keuangan dan capaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	3.04%	Rp. 9.256.000,00	Rp. 10.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD 10%	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5 %	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	11.48%	Rp. 34.860.000,00	Rp. 36.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	73.99%	Rp. 254.887.000,00	Rp. 252.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Dinas Kominfo yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website Dinas Kominfo secara kontinyu 100%						
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika — **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.16.1.16.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	11.51%	Rp. 35.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.15	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**										**Rp. 5.974.762.000,00**	**Rp. 4.770.000.000,00**		
1.16.1.16.01.00.15.001	Pembinaan Kelembagaan KPID	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	65%	Laporan Monev Hubungan Kerja KPID DIY 1 dokumen	Terlaksananya pembinaan kelembagaan KPID 100%	Terselenggaranya Pemantauan Isi Siaran Televisi Lokal di DIY	100%	Rp. 2.008.531.000,00	Rp. 0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Persentase Capaian Kinerja KPID DIY 100%							
1.16.1.16.01.00.15.002	Pembinaan Kelembagaan KIP	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	65%	Laporan Monitoring dan Evaluasi Hubungan Kerja KID DIY 1 dokumen	Terlaksananya pembinaan kelembagaan KIP 100%	Dukungan terhadap tercapainya keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	21.59%	Rp. 1.169.850.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Persentase Capaian Kinerja KID DIY 100%							
1.16.1.16.01.00.15.003	Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	65%	Pengelolaan e-lapor 12 bulan	Terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik 100%	Dukungan terhadap tercapainya keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	5.23%	Rp. 283.310.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.15.004	Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	65%	Operasional MCAP 12 bulan	Terlaksananya pemberdayaan pengelolaan informasi publik 100%	Dukungan terhadap tercapainya keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	17.76%	Rp. 932.519.000,00	Rp. 970.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Pengelolaan co working space 12 bulan							
							Pengelolaan Layanan PPID Utama 12 bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika | **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penyebarluasan informasi pemerintah daerah melalui media massa cetak, elektronik, luar ruang dan forum pertemuan 12 bulan							
1.16.1.16.01.00.15.005	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	65%	Blueprint Jogja Smart Province Dimensi Smart Culture, Smart Environtment, Smart Living, dan Smart Society 4 dokumen	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 100%	Dukungan terhadap tercapainya keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	44.20%	Rp. 1.580.552.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							ILM (Iklan Layanan Masyarakat) di radio 1 paket							
							Institutional Repositoitory Digitalisasi Keistimewaan 1 paket							
							kelompok/komunitas masyarakat yang meningkat literasinya dalam menggunakan media sosial 3 komunitas/kelompok/lokasi							
							Konten videotron 3 buah							
							Mitra Lembaga Komunikasi Sosial yang terbina 3 Komunitas Informasi Masyarakat(KIM)							
							Pertunjukan Rakyat dalam rangka penyebarluasan informasi kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan 3 kali							
							perwakilan warga masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang Internet Sehat dan Aman 60 orang							
							Produk komunikasi visual informatif untuk peningkatan pemahaman masyarakat untuk menyebarkan konten positif 2 paket produk mutlimedia							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika | **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Rekomendasi pengembangan Media Seni Pertunjukan Rakyat (FK Metra Kab/Kota) 1 rekomendasi							
							Siaran Jogja Gumregah 1 paket siaran							
1.16.1.16.01.00.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**										**Rp. 4.433.846.000,00**	**Rp. 3.550.000.000,00**		
1.16.1.16.01.00.16.001	Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro	Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	24.39%	Literasi Penggunaan E-Office 120 orang	Terlaksananya pengkajian dan pengembangan sistem informasi 100%	Operasional data center Pemda DIY dengan SLA diatas 99%	30.34%	Rp. 1.233.605.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Operasional NOC, Data Center dan Server Pemda DIY 12 bulan							
							Pengembangan aplikasi di Pemda DIY 4 jenis/paket							
							Rekomendasi Pengembangan E-Government se-DIY 1 dokumen rekomendasi							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika — **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika | **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja									
1.16.1.16.01.00.16.002	Pengembangan Jogja Satu Data	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	24.39%	Literasi Renstra TIK 120 orang	Terlaksananya pengembangan Jogja Satu Data 100%	Operasional Data Center Pemda DIY dengan SLA diatas 99%	50.81%	Rp. 1.893.220.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Pengembangan IDMC 1 paket							
							Pengembangan Video Konferensi 1 paket							
							Peta Tematik Berbasis JIS 1 Paket							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika — **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika — **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja									
1.16.1.16.01.00.16.003	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	24.39%	Audit Eksternal ISO 9001 1 paket	Terselenggaranya Layanan Pengadaan Secara Elektronik 100%	Operasional Data Center PEmda DIY dengan SLA diatas 99%	12.58%	Rp. 509.895.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Operasional Layanan LPSE 12 bulan							
							Rekomendasi Pengembangan LPSE se-DIY 1 dokumen rekomendasi							
1.16.1.16.01.00.16.004	Pengaman Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup	Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	24.39%	Literasi keamanan informasi di ASN Pemda DIY 80 orang	Terlaksananya pengamanan informasi dan komunikasi 100%	Dukungan terhadap tercapainya perangkat daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	6.17%	Rp. 236.910.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Penerapan Single identity untuk akses internet di Pemda DIY 1 paket							
							Standarisasi Keamanan							

Informasi (ISO 27001) 1

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika | **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya									

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika — **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja										
1.16.1.16.01.00.16.006	Penyelenggaraan Tata Kelola Persandian	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan	Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	24.39%	CPU PABX 2 unit	Terselenggaranya tata kelola persandian 100%	Dukungan terhadap tercapainya perangkat daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	11.22%	Rp. 560.216.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika | **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan			jaringan PABX di lingkungan Pemda DIY terpelihara 12 bulan							
							keamanan informasi terhadap dokumen milik Pemda 12 bulan							
							Keamanan Ruang kerja dan Ruang rapat Pimpinan di lingkungan Pemda DIY 12 bulan							
							Pengaman Sinyal/Jammer 4 unit							
							Peringatan HUT Sandi 1 Event							
							repeater di Dlingo dan Kaliurang terpelihara 2 lokasi							
							suku cadang/spare part jaringan telepon 12 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja									
1.16.1.16.01.00.17	**PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI**										**Rp. 9.692.702.000,00**	**Rp. 9.700.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika | **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.16.1.16.01.00.17.001	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	76.5%	Digitalisasi Peta Infrastruktur Jaringan dan SOP Topologi Jaringan OPD Pemda DIY 1 paket	Terlaksananya pengembangan jaringan sistem informasi pemerintah daerah 100%	Dukungan terhadap tercapainya layanan publik yang terintegrasi dalam layanan berbasis TIK	94.89%	Rp. 9.069.317.000,00	Rp. 9.000.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Duckting jaringan FO di Kawasan Bandara Kulon Progo 5 Km							
							Jaringan komputer Pemda DIY terpelihara 12 bulan							
							Langganan backup bandwidth internet Pemda DIY 12 bulan							
							Langganan Bandwidth Internet Pemda DIY 12 bulan							
							Pengembangan NOC, Pengembangan Jaringan Intranet dan Pengadaan Peralatan Pendukung Interkoneksi Pemda DIY 16 titik							
							Terbangunnya Tiang LTE di Kawasan Bandara Kulon Progo 1 unit							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika — **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat									

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika | **Jumlah Pagu : Rp. 23.325.480.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				DPRD Sekretariat Parampara Praja										
1.16.1.16.01.00.17.003	Pengembangan dan Pengelolaam JITV	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	76.5%	Konten paket tayangan Pemda DIY 288 konten	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan JITV 100%	Dukungan terhadap tercapainya layanan publik yang terintegrasi dalam layanan berbasis TIK	5.11%	Rp. 623.385.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah — **Jumlah Pagu : Rp. 8.523.307.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.17	**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**													
1.17.1.17.01.00	**Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**													
1.17.1.17.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 1.587.933.000,00**	**Rp. 1.500.000.000,00**		
1.17.1.17.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran Pajak STNK Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4 18 unit	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 23% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 370.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Pengelolaan arsip dinamis 3 jenis							
							Penggandaan dan jilid 35000 lembar							
							Penyedia Jasa Kebersihan Perkantoran 12 bulan							
							Penyediaan ATK 20 jenis							
							Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 7 jenis							
							Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 jenis							
							Penyediaan Listrik 1 tahun (2951 KWH)							
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13 jenis							
							Penyediaan Retribusi Sampah 1 tahun							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | **Jumlah Pagu : Rp. 8.523.307.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penyediaan Telepon 3 sambungan 1 tahun							
							Surat kabar 2 jenis							
							Surat keluar 4000 surat							
							Surat masuk 3000 surat							
1.17.1.17.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	bukti pembayaran jasa administrasi kepegawaian 1 orang/bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 64% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.019.933.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							bukti pembayaran jasa admnistrasi keuangan 9 orang/bulan							
							bukti pembayaran jasa penyiap Fasilitasi Pengembangan Kinerja 1 orang/bulan							
							Jasa keamanan kantor/tempat kerja 12 bulan							
							Jasa tenaga honorer (PTT non PNS) 10 orang/bulan							
1.17.1.17.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Makanan dan Minuman sidang 1.450 orang	Kelancaran Koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 12% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 198.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan							
							Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah — **Jumlah Pagu : Rp. 8.523.307.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.17.1.17.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 3.019.628.000,00**	**Rp. 2.230.000.000,00**		
1.17.1.17.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rehab Gedung PLUT zona D dan E 1 unit	Terbangunnya gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sapras 100%	Dukungan 43% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.373.378.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Rehab Pagar Kantor Depan 1 unit							
							Relokasi gedung kantor 1 unit	Terselesaikannya relokasi kantor 100%						
1.17.1.17.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Display ruang pamer PLUT 4 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 47% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.320.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Mebeleur 3 jenis							
							Peralatan kantor 12 jenis							
							Perlengkapan kantor 6 jenis							
1.17.1.17.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Taman 50 m2	Terpelihara taman sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 1% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah — **Jumlah Pagu : Rp. 8.523.307.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.17.1.17.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan Dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2) sesuai RKPBMD 2 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 6% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor terpelihara 5 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 2% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 76.250.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Perlengkapan gedung kantor terpelihara 5 jenis							
1.17.1.17.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 213.746.000,00**	**Rp. 206.000.000,00**		
1.17.1.17.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 77,17 (BB) menjadi 80 (A)	Dukungan 5% terhadap penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 3 %	Dukungan 5% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah — **Jumlah Pagu : Rp. 8.523.307.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.17.1.17.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan 77% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 163.746.000,00	Rp. 160.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						
1.17.1.17.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah di tetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 14% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.00.17	**PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU**										**Rp. 1.085.500.000,00**	**Rp. 1.500.000.000,00**		
1.17.1.17.01.00.17.001	Penumbuhan dan Pembinaan Kewirausahaan	2. Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	DIY	jumlah wirausaha baru	749wirausaha	Inkubator Bisnis 300 tenant	Percepatan penumbuhan wirausaha baru melalui inkubator bisnis terlaksana 100% sesuai target	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan jumlah wirausaha baru dari tahun 2017 ke tahun 2019 sebesar 75% (322 WUB) dari semula 427 WUB menjadi 749 WUB	100%	Rp. 1.085.500.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.00.18	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN**										**Rp. 1.191.500.000,00**	**Rp. 1.100.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | **Jumlah Pagu : Rp. 8.523.307.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.17.1.17.01.00.18.001	Pembinaan Perkoperasian	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2036097Juta Rupiah	Diklat Kelembagaan dan SDM Koperasi 250 koperasi (10 akt @ 25 org)	Pembinaan Koperasi terlaksana 100%	Dukungan sebesar 60% terhadap terwujudnya target peningkatan nilai omzet koperasi sektor riil dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 0,50% (10.079 juta rupiah) semula 2.026.018 juta rupiah menjadi 2.036.097 juta rupiah	100%	Rp. 905.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Pelayanan Dekopin 7 Bidang							
							Pembinaan Kopsis dan Kopma 1 tahun							
							Penumbuhan Koperasi Sekunder 1 koperasi							
							Promosi dan Pemasaran Produk Koperasi (harkopnas 4 , Produk koperasi dan UKM 4, Pameran Penumbuhan kop sekunder 6)							
							Sosialisasi dan Publikasi Perkoperasian (dialog interaktif TV lokal 2 kali, iklan layanan masyarakat 4 kali, fragmen melaluk TV lokal 3 kali, penayangan iklan layanan masyarakat (running text) 30 kali)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | **Jumlah Pagu : Rp. 8.523.307.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.17.1.17.01.00.18.002	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2036097Juta Rupiah	Advokasi Kepatuhan Koperasi (Teradvokasinya 16 Koperasi selama 8 bulan)	Pengawasan dan penilaian koperasi terlaksana100 %	Dukungan sebesar 40% terhadap terwujudnya target peningkatan nilai omzet koperasi sektor riil dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 0,50% (10.079 juta rupiah) semula 2.026.018 juta rupiah menjadi 2.036.097 juta rupiah	100%	Rp. 286.500.000,00	Rp. 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Jumlah Koperasi Pasif Menurun 1 Tahun sejumlah 10 Koperasi							
							Nilai Kesehatan KSP dan USP Meningkat sejumlah 30 Koperasi							
							Pemeringkatan Koperasi sejumlah 50 koperasi							
							Pengawasan Koperasi 1 tahun (25 koperasi)							
							Penilaian Koperasi Berprestasi (15 Koperasi)							
1.17.1.17.01.00.19	**PROGRAM PENGEMBANGAN UKM**										**Rp. 1.050.000.000,00**	**Rp. 110.000.000,00**		
1.17.1.17.01.00.19.002	Pembinaan UKM	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Omset UKM Tahun n	83349Ribu Rupiah	Bimtek pelaku UMKM di lokasi Desa Preneur Tahap pengembangan 3 desa (3 akt @ 30 org)	Pembinaan UKM terlaksana 100%	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan nilai omset UKM dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 5% (3.969 ribu rupiah) dari semula 79.380 ribu rupiah menjadi 83.349 ribu rupiah	100%	Rp. 1.050.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Pameran produk UMKM di Mall 2 kali (@ 10 UMKM)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | **Jumlah Pagu : Rp. 8.523.307.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penumbuhan UKM di lokasi Desa Preneur tahap penumbuhan 6 desa (@ 30 org x 2 akt x 6 desa)							
1.17.1.17.01.00.20	**PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN**										**Rp. 375.000.000,00**	**Rp. 0,00**		
1.17.1.17.01.00.20.001	Pembinaan Manajemen Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	umlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM tahun n	15870000000Rp	Kemitraan dan Kontrak bisnis UMKM dengan lembaga pembiayaan dan perusahaan sejumlah 4 kontrak bisnis (50 UKM)	Pendampingan dan Temu Bisnis terlaksana 100 %.	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM dari tahun 2017 ke 2019 sebesar 32% (Rp3.870.000.000) dari semula Rp. 12.000.000.000 menjadi Rp. 15.870.000.000	100%	Rp. 375.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Pendampingan akses permodalan koperasi dan ukm 1 tahun (250 UKM + 53 Koperasi)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal | **Jumlah Pagu : Rp. 11.145.197.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.18	**PENANAMAN MODAL**													
1.18.1.18.01.00	**Dinas Perijinan dan Penanaman Modal**													
1.18.1.18.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 2.512.388.000,00**	**Rp. 2.975.627.000,00**		
1.18.1.18.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor 57 jenis	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan sebesar 29 %Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 722.388.000,00	Rp. 825.627.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Barang cetakan 7 jenis							
							Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 14 unit							
							Buku Ilmu Pengetahuan Umum 10ekslempar							
							Buku Peraturan Perundang-undangan 10ekslempar							
							Kebersihan gedung kantor 12 bulan, 2 lokasi							
							Komponen instalasi listrik bangunan kantor 13 jenis							
							Paket pengiriman 12 bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 11.145.197.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bln							
							Pembayaran tagihan rekening telpon 6 sambungan 12 bln							
							Pembayaran tagihan speedy 12 bulan							
							Pembayaran tagihan TV kaber 12 bulan							
							Penggandaan dokumen 190.000 lembar							
							penjilidan dokumen 100 lembar							
							Peralatan rumah tangga, alat pembersih dan bahan pembersih 15 jenis							
							Perlengkatan/alat penanganan arsip 14 jenis							
							Surat kabar dan majalah 5 jenis							
							Surat keluar 12.000 lembar							
							Surat masuk 13.900 lembar							
1.18.1.18.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa keamanan kantor/tempat kerja 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan sebear 57% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.440.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 11.145.197.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							bukti pembayaran Pengelola Keuangan, Pengelola Kepegawaian dan Pegawai (11 orang) dan 36 Pegawai Non PNS							
1.18.1.18.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan sebesar 14% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah 1 tahun							
							3. makan dan minuman rapat, tamu sesuai dengan kebutuhan tercukupi1 tahun							
1.18.1.18.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 755.345.000,00**	**Rp. 713.000.000,00**		
1.18.1.18.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Mebeleur 5 jenis	Tersedianya pelalatan dan perkantoran sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 57% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 442.250.000,00	Rp. 445.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							2. Peralatan kantor 8 jenis							
							3. Perlengkapan Kantor 3 Jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal — **Jumlah Pagu : Rp. 11.145.197.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rehab rumah dinas 1 unit	Terbangunnya rumah dinas yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 7 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran	100%	Rp. 52.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) 2 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 25% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 187.214.000,00	Rp. 188.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Mebelair 4 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 10% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 73.881.000,00	Rp. 80.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							2. Peralatan kantor 4 jenis							
							3. perlengkapan kantor 3 jenis							
1.18.1.18.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 389.464.000,00**	**Rp. 148.700.000,00**		
1.18.1.18.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2019	Nilai Lakip A	Dukungan 5% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 7.200.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal — **Jumlah Pagu : Rp. 11.145.197.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 6% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	Dukungan 76% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 294.464.000,00	Rp. 115.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							2. ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku	ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku						
							Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD Tahun 2021	1 dokumen laporan						
1.18.1.18.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 13 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 16.500.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.17	**PROGRAM PROMOSI INVESTASI**										**Rp. 1.150.000.000,00**	**Rp. 2.000.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal — **Jumlah Pagu : Rp. 11.145.197.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.17.001	Promosi Investasi	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Banguntapan	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip	863630Juta Rupiah	1. Promosi Investasi dalam dan luar negeri	Promosi investasi terlaksana 100%	Dukungan sebesar 43% terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi yang tercatat dalam ijin prinsip (Rp Juta) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 20% semula 863.630 juta rupiah menjadi 1.036.356	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							2. Temu Investor 2 kali	Temu Investor terlaksana 100%						
1.18.1.18.01.00.17.003	Penyiapan Potensi Investasi	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Banguntapan	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip	863630Juta Rupiah	Penyusunan Potensi Investasi DIY (5 Kab/kota) yang siap Jual	terselesaikannya Dok Penyusunan Potensi Investasi DIY (5 Kab/kota) yang siap Jual 100%	Dukungan sebesar 13% terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi yang tercatat dalam ijin prinsip dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 20% semula Rp. 863.630 menjadi 1.036.356 (Rp.Juta Rupiah)	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.17.004	Pengembangan Kemitraan	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Banguntapan	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip	863630Juta Rupiah	Kemitraan dengan negara lain (2 negara)	Terlaksananya kemitraan dengan negara lain 100%	Dukungan sebesar 43% terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi yang tercatat dalam ijin prinsip (Rp Juta) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 20% semula 863.630 menjadi 1.036.356 juta rupiah	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal — **Jumlah Pagu : Rp. 11.145.197.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.18	**PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI**										**Rp. 1.188.000.000,00**	**Rp. 1.100.000.000,00**		
1.18.1.18.01.00.18.003	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Banguntapan	pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	941819Juta Rupiah	1. Permasalahan Penanaman Modal menurun sejumlah 5 permasalahan (dari 10 menjadi 5)	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terisi 100% sesuai standar	Dukungan sebesar 42% terhadap terwujudnya peningkatan nilai realisasi investasi PMA & PMDN dari tahun 2018 ke 2019 semula 758.857 menjadi 782.614 (Rp Juta rupiah)	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							2. Perusahaan yang melaporkan LKPM meningkat sebanyak 10 perusahaan dari tahun sebelumnya	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terisi 100% sesuai standar						
1.18.1.18.01.00.18.004	Percepatan Realisasi Investasi	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Banguntapan	pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	941819Juta Rupiah	1. Reviuw RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)	Terselesaikannya Dok Reviuw RUPM 100%	Dukungan sebesar 58% terhadap terwujudnya peningkatan nilai realisasi investasi PMA & PMDN dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 3,13% semula 758.857 menjadi 782.614 (Rp Juta rupiah)	100%	Rp. 688.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							2. Reviuw Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi	Terselesaikannya Dok Reviuw Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi 100%						
1.18.1.18.01.00.19	**PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN**										**Rp. 2.350.000.000,00**	**Rp. 4.000.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal | **Jumlah Pagu : Rp. 11.145.197.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.19.001	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	95%	Jumlah surat Izin dan non izin yang diterbitkan 7000 izin	terselesaikannya permohonan perizinan dan layanan non perizinan 100%	Dukungan sebesar 52% terhadap capaian Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP sebesar 95%	100%	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.19.002	Penyusunan Standar dan Prosedur Perizinan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	95%	Standar Operasional Prosedur 1 dokumen	terpenuhinya dokumen SOP 100%	Dukungan sebesar 21% terhadap capaian Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP sebesar 95%	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Etika Pelayanan 1 dokumen							
							Maklumat Pelayanan Publik 1 dokumen							
							Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Maklumat Pelayanan Publik, Etika Pelayanan 1 dokumen							
1.18.1.18.01.00.19.003	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	95%	Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat, 1 dokumen	terlaksananya survey kepuasan masyarakat 100%	Dukungan sebesar 26% terhadap capaian Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP sebesar 95%	100 %	Rp. 600.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Dokumen Managemen Mutu Layanan 1 dokumen							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal — **Jumlah Pagu : Rp. 11.145.197.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Monitoring dan Evaluasi Pasca Izin Terbit 1 dokumen							
1.18.1.18.01.00.20	**PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PENGADUAN**										**Rp. 2.800.000.000,00**	**Rp. 4.225.000.000,00**		
1.18.1.18.01.00.20.001	Pengelolaan Pengaduan Perizinan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Waktu penyelesaian ijin usaha	5Hari	dokumen hasil survey 1 DOKUMEN	terselesaikannya pengaduan perijinan 100%	dukungan sebesar 29% terhadap capaian kinerja Waktu penyelesaian layanan perijinan sebesar 3 hari	100%	Rp. 800.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Pengembangan Aplikasi pengaduan mobile Apps 1 aplikasi							
1.18.1.18.01.00.20.002	Pengembangan PSE (Izin Online)	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Waktu penyelesaian ijin usaha	5Hari	Anjungan Perizinan Mandiri 2 alat	terselenggaranya layanan perijinan online 100%	dukungan sebesar 29% terhadap capaian kinerja Waktu penyelesaian layanan perijinan sebesar 3 hari	100	Rp. 800.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Aplikasi OSS usaha 4 sektor							
							Kartu Perizinan Mandiri 7000 kartu							
							On Job Training 10 kali							
1.18.1.18.01.00.20.003	Pembukaan Gerai dan Mobile Counter pada Lokasi Strategis dan Kantor Perwakilan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kulon Progo Kota Yogyakarta Sleman Bantul Gunungkidul Kantor Perwakilan DIY di Jakarta	Waktu penyelesaian ijin usaha	5Hari	gerai layanan 5 unit	terlaksanyanya layanan mobile counter	dukungan sebesar 26% terhadap capaian kinerja Waktu penyelesaian layanan perijinan sebesar 3 hari	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal | **Jumlah Pagu : Rp. 11.145.197.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.20.004	Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha di Daerah	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Waktu penyelesaian ijin usaha	5Hari	Dokumen hasil kajian 1 dokumen	terlaksananya evaluasi peraturan perizinan di daerah 100%	dukungan sebesar 15% terhadap capaian kinerja Waktu penyelesaian layanan perijinan sebesar 3 hari	100	Rp. 500.000.000,00	Rp. 575.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Dokumen Materi Teknis Raperda 2 dokumen							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan | **Jumlah Pagu : Rp. 6.617.915.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.22	**KEBUDAYAAN**													
1.22.1.22.01.00	**Dinas Kebudayaan**													
1.22.1.22.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 4.945.641.000,00**	**Rp. 6.640.405.370,00**		
1.22.1.22.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor sebanyak 49 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 52,08 % terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.684.833.000,00	Rp. 3.648.016.570,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Barang Cetakan sebanyak 22 Jenis							
							Bukti Pembayaran Pajak/ STNK kendaraan roda 4 sebanyak 13 unit (induk), 2 unit di UPT							
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan roda 6 sebanyak 4 unit							
							Bukti Pembayaran retribusi sampah selama 12 bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan | **Jumlah Pagu : Rp. 6.617.915.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kebersihan gedung kantor (1 induk, 3 UPT, Pleret, Gedung Akuisisi baru) selama 1 Tahun							
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (termasuk Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) sebanyak 84 jenis							
							Langganan surat kabar harian 2 jenis 12 bulan							
							Materai sebanyak 600 buah							
							Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet selama 12 bulan							
							Pembelian Bendera sebanyak 13 buah							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan | **Jumlah Pagu : Rp. 6.617.915.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penggandaan sebanyak 339210 lembar							
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran sebanyak 10 buah							
							Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih sebanyak 12 jenis							
							Peralatan rumah tangga sebanyak 16 jenis							
							Perangko kilat sebanyak 10 buah							
							Surat keluar sebanyak 400 buah							
1.22.1.22.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 20 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 42,65 % terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.700.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan | **Jumlah Pagu : Rp. 6.617.915.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kinerja 3 orang pengelola administrasi kepegawaian dan Perencana Tata Usaha dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja 35 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK							
							Kinerja pengelola barang 4 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang dan undangan yang berlaku							
1.22.1.22.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Extra fooding tersedia selama 12 bulan		Dukungan 5,27% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 260.808.000,00	Rp. 292.388.800,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan | **Jumlah Pagu : Rp. 6.617.915.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Konsultasi dan Koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%						
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
1.22.1.22.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 1.411.574.500,00**	**Rp. 1.668.232.346,00**		
1.22.1.22.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bangunan Gedung Kantor terpelihara sesuai RKBMD sebanyak 3 Unit (Induk, TBY, MSB)	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100 %	Dukungan 54,93% terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 775.384.000,00	Rp. 852.922.466,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Instalasi Air Limbah/Kotor terpelihara sesuai RKBMD sebanyak 14 unit							
							Instalasi air minum/bersih terpelihara sesuai RKBMD sebanyak 8 unit							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan | **Jumlah Pagu : Rp. 6.617.915.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.22.1.22.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sesuai Kebutuhan RKPMD sebanyak 14 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai standart sarpras 100 %	Dukungan 32,41% terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 457.525.500,00	Rp. 618.778.050,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan 20 titik Jaringan komputer	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 12,66 % terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 178.665.000,00	Rp. 196.531.830,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan 11 Jenis Perlengkapan kantor sesuai RKPBMD							
							Pemeliharaan 23 jenis Telepon dan Faximile							
							Pemeliharaan 3 jenis Meubeler							
							Pemeliharaan 500 buah buku/ bahan pustaka							
							Pemeliharaan 6 jenis Peralatan perkantoran sesuai RKBMD							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan | **Jumlah Pagu : Rp. 6.617.915.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.22.1.22.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 260.699.500,00**	**Rp. 417.452.750,00**		
1.22.1.22.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Rentsra dan IKU) paling lambat akhir februari 2019	Nilai LKJIP dari 78,98 menjadi 79,00	Dukungan 2,63 % terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 6.862.500,00	Rp. 7.548.750,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 10 kegiatan	laporan keuangan dengan deviasi 5%	Dukungan 45,95 % terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 119.791.000,00	Rp. 131.770.100,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan | **Jumlah Pagu : Rp. 6.617.915.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.22.1.22.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022 (1 dokumen); Dokumen draft RKA-DPA (2 dokumen); Dokumen draft RKAP-DPPA 2 dokumen; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK (3 dokumen)	Tersusunnya ROPK tahun 2019, Renja 2020, RKA 2020, dan DPA 2019.	Dukungan 49,12% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	100%	Rp. 128.046.000,00	Rp. 215.650.600,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. Sinkronisasi program dan kegiatan kab/kota							
							3. Forum OPD 1 Kegiatan							
							4. Pengelolaan Data dan Informasi dalam 1 tahun							
1.22.1.22.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas (1 tahun)	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 2,30% terhadap capaian terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 6.000.000,00	Rp. 62.483.300,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 22.918.543.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.23	**PERPUSTAKAAN**													
1.23.1.23.01.00	**Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah**													
1.23.1.23.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 6.499.498.000,00**	**Rp. 6.250.000.000,00**		
1.23.1.23.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor 50 jenis	Administrasi perkantoran yang teredia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 46,16% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.000.350.000,00	Rp. 2.800.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Barang cetakan 13 jenis							
							Bukti pembayaran 1 unit pajak kendaraan/STNK roda 6							
							Bukti pembayaran 7 unit pajak kendaraan/STNK roda 2							
							Bukti pembayaran 9 unit pajak kendaraan/STNK roda 4							
							Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
							Kebersihan gedung kantor 5 gedung/lokasi							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 36 jenis							
							Langganan surat kabar harian dan majalah 6 jenis 12 bulan							
							Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet 12 bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 22.918.543.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penggandaan 130.000 lembar							
							Pengiriman dokumen 12 bulan							
							Peralatan rumah tangga 15 jenis							
							Peraturan perundang-undangan 1 paket							
							Surat keluar 6.500 surat							
							Surat masuk 1.850 surat							
							Tertatanya arsip dinamis dan tersusutnya arsip yang sudah masuk masa retasi (1 daftar arsip inaktif BPAD, 1 kali penyusutan)							
1.23.1.23.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 11 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 46,13% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.998.040.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Kinerja 3 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja 4 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja 57 orang tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 22.918.543.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.23.1.23.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100 %	Dukungan 7,71% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 501.108.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
							Penyediaan ekstra fooding bagi 60 orang PNS selama 1 tahun							
1.23.1.23.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 6.546.980.000,00**	**Rp. 9.138.823.000,00**		
1.23.1.23.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembangunan landscape depo/gedung arsip 1 unit	Terbangunnya gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 72,92 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kealncaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.774.219.000,00	Rp. 7.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Review DED Interior							
1.23.1.23.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan peralatan sesuai RKBMD 3 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 3,82% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 250.320.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Pengadaan perlengkapan sesuai RKBMD 11 jenis							
1.23.1.23.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	- Pemeliharaan Gedung kantor sesuai RKPBMD 4 lokasi (Unit Malioboro, Unit TRM , Unit RBM, GTP) - Perbaikan roof top gedung Grha Tama Pustaka	Terpelihara gedung kantor standar Sarpras 100%	Dukungan 14,09% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 922.441.000,00	Rp. 1.122.261.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 22.918.543.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.23.1.23.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKPBMD terpelihara 7 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 6,11% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 442.678.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKPBMD terpelihara 9 unit							
							Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKPBMD terpelihara 1 unit							
1.23.1.23.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKPBMD 10 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 100%	Dukungan 3,05% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 273.884.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMD 14 jenis							
							Pemeliharaan meubelair kantor sesuai RKPBMD 5 jenis							
1.23.1.23.01.00.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**										**Rp. 220.034.000,00**	**Rp. 234.148.000,00**		
1.23.1.23.01.00.03.001	Pengembangan I S O	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Surveilence ISO 9001-2015	Layanan perpustakaan bersertifikat ISO 100%	Dukungan 49,99% terhadap peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	100%	Rp. 110.000.000,00	Rp. 114.148.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 22.918.543.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.23.1.23.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Penilaian Angka Kredit Arsiparis 2 kali (15 orang)	Penilaian angka kredit pustakawan dan arsiparis 100%	Dukungan 50,01% terhadap peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	100%	Rp. 110.034.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Penilaian Angka Kredit Pustakawan 2 kali (15 orang)							
							Rakor Arsiparis 1 kali							
							Rakor Pustakawan 1 kali							
1.23.1.23.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 545.000.000,00**	**Rp. 555.817.000,00**		
1.23.1.23.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LAKIP A (dari skor nilai 79,07 menjadi 80)	Dukungan 3,30% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 18.000.000,00	Rp. 18.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ)							
1.23.1.23.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 3,12% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 17.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 22.918.543.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.23.1.23.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	5 draft rintisan kerjasama		Dukungan 77,06% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 420.000.000,00	Rp. 432.817.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							buletin sangkakala 2 edisi							
							Forum OPD, Raker Penyusunan Program Kegiatan Kearsipan dan Perpustakaan; Dokumen PK, RKT/renja, RKA dan DPA	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019						
							Pengembangan website BPAD							
1.23.1.23.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan data sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan untuk 9 Program dan 23 Kegiatan selama 1 tahun	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 16,51% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 90.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.23.1.23.01.00.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**										**Rp. 805.462.000,00**	**Rp. 1.105.463.000,00**		
1.23.1.23.01.00.15.001	Pembinaan Perpustakaan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	39perpustakaan	Akreditasi perpustakaan 12 perpustakaan terakreditasi	Pembinaan perpustakaan sesuai standar perpustakaan	Dukungan 48,29% terhadap jumlah perpustakaan terstandard sesuai dengan peraturan	100%	Rp. 388.922.000,00	Rp. 488.922.500,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Bimtek perpustakaan 3 angkatan, 25 peserta /angkatan							
							Workshop akreditasi 2 kali, 60 peserta/workshop							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 22.918.543.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.23.1.23.01.00.15.002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dlingo Gedang sari Imogiri Jetis Kokap Ngawen Nglipar Playen Ponjong Sapto sari Semin Sentolo	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	39perpustakaan	Bedah Buku 12 kali	Peningkatan 925 jumlah anggota perpustakaan baru	Dukungan 51,71% terhadap meningkatnya jumlah perpustakaan terstandard sesuai dengan peraturan dari 29 perpustakaan menjadi 39 pepustakaan	100%	Rp. 416.540.000,00	Rp. 616.540.500,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Forum Perpustakaan 2 kali							
							Lomba Minat Baca 2 kali							
							Workshop Karya Tulis 2 kali							
1.23.1.23.01.00.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI**										**Rp. 2.625.000.000,00**	**Rp. 2.925.000.000,00**		
1.23.1.23.01.00.16.001	Pelestarian Bahan Pustaka	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan	10174Koleksi	Alih bahasa, bahasa belanda-bahasa Indonesia 1 judul 300 lembar dari 4 judul 1135 lembar menjadi 6 judul 1435 lembar	Bahan pustaka lestari dan termanfaatkan	Dukungan 27,62 % terhadap penambahan jumlah koleksi dan pengembanhan informasi perpustakaan (10174 koleksi)	100%	Rp. 725.000.000,00	Rp. 925.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Alih media buku langka 30.000 lembar dari 242.844 lembar menjadi 272.844 (5%)							
							Alih tulisan , bahasa Jawa - Bahasa Indonesia 1500 lembar							
							Fumigasi bahan Pustaka 3100 m3							
							Kotak Pelindung 607 buah							
							Penjilidan surat kabar 40 bendel							
							Perawatan buku 283.800 eks dari jumlah koleksi 286.750 eks							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 22.918.543.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Perbaikan buku rusak 2000 eks (10%)							
							Termite control 2250 m2							
1.23.1.23.01.00.16.002	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan	10174Koleksi	Koleksi Bahan Pustaka 1000 judul dan Karya Cetak Karya Rekam 5000 judul	Koleksi perpustakaan sesuai kebutuhan	Dukungan 72,38% terhadap penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	100%	Rp. 1.900.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Koleksi Buku Elektronik 1000 judul							
							Literatur Sekunder (Bibliografi Daerah 4 terbitan, Accesion List 1 terbitan,Katalog Induk Daerah 1 terbitan, Abstraksi budaya timur 1 terbitan)							
							Pemantauan Penerbit 200 Penerbit							
							Pengolahan Bahan Pustaka 10.000 eks							
1.23.1.23.01.00.17	**PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN**										**Rp. 4.112.653.000,00**	**Rp. 4.612.653.000,00**		
1.23.1.23.01.00.17.001	Layanan Perpustakaan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Anggota Baru Perpustakaan	6000Orang	Jumlah koleksi jaringan JLA yang bisa diakses masyarakat 20000 judul dari 1.220.000 judul menjadi 1.240.000	Pelayanan perpustakaan yang optimal	Dukungan 100% terhadap meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	100%	Rp. 4.112.653.000,00	Rp. 4.612.653.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Meningkatnya kualitas layanan JLA	5perpustakaan	Pemanfaatan fasilitas Delivery Order 240 anggota dari 240 menjadi 480							
							Peningkatan jumlah pemustaka ekstensi 200 orang dari 4400 menjadi 4600							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 22.918.543.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Peningkatan jumlah pemustaka Grhatama Pustaka 1% dari 186.850 menjadi 188.700 orang							
							Peningkatan jumlah pemustaka JLC 1% dari 8080 menjadi 8160 orang							
							Peningkatan jumlah pemustaka Pojok Baca 1% dari 44.440 menjadi 44.880 orang							
							Peningkatan jumlah pemustaka RBM 2% dari 35.700 menjadi 36.400 orang							
1.24	**KEARSIPAN**													
1.24.1.23.01.00	**Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah**													
1.24.1.23.01.00.16	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN**										**Rp. 713.976.000,00**	**Rp. 813.976.000,00**		
1.24.1.23.01.00.16.001	Penilaian dan Penyusutan Arsip	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan Jumlah SKPD yang Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar	70SKPD	Jumlah Arsip yang dinilai dan disusutkan 15000 berkas	Terlaksananya pengelolaan penyusutan arsip sesuai kentuan ANRI di SKPD DIY	Dukungan 51,04% terhadap peningkatan jumlah OPD/UPTD/Sekolah yang melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan standard	100%	Rp. 389.896.000,00	Rp. 439.896.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Pengolahan arsip inaktif 2500 berkas							
							Rekomendasi hasil pendampingan kesiapan penyusutan arsip LKD Kab/ kota 2 LKD							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 22.918.543.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.24.1.23.01.00.16.002	Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan Jumlah SKPD yang Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar	70SKPD	Pembinaan OPD/UPTD ; Bimtek pengelolaan Arsip ; Pembinaan LKD; Pengawasan Internal Kearsipan; Penyusunan Klasifikasi dan Akses Arsip	Terlaksananya pengelolaan kearsipan dinamis sesuai kentuan ANRI di SKPD DIY	Dukungan 48,96% terhadap peningkatan jumlah OPD/UPTD/Sekolah yang melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan standard	100%	Rp. 324.080.000,00	Rp. 374.080.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.23.01.00.17	**PROGRAM PELESTARIAN DAN LAYANAN ARSIP**										**Rp. 849.940.000,00**	**Rp. 1.296.340.000,00**		
1.24.1.23.01.00.17.001	Akuisisi Dan Penyelamatan Arsip	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	8000Berkas	Arsip Presiden RI di DIY tahun 2014-2017 : 1 tema arsip Presiden RI di DIY	Arsip tentang DIY terselamatkan	Dukungan 26,90% terhadap Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (8000 arsip)	100%	Rp. 228.600.000,00	Rp. 275.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Arsip 20 Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)							
							Arsip yang mempunyai keterkaitan dengan DIY kurun waktu sebelum tahun 1950 : Tema arsip periode sebelum 1950							
							Penelusuran Sumber Arsip/Referensi Arsip Kanwil DEPSOS Provinsi DIY :1 Tema Referensi Arsip Kanwil DEPSOS Provinsi DIY							
1.24.1.23.01.00.17.002	Pengelolaan Arsip Statis dan Naskah Sumber Arsip	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	8000Berkas	Terdokumentasinya arsip tekstual 2000 data dan arsip foto 500 data	Arsip lestari dan termanfaatkan	Dukungan 73,10% terhdap capaian jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	100%	Rp. 621.340.000,00	Rp. 1.021.340.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							1 Buku Naskah sumber arsip							
							Buku Guide Arsip: 1 buku							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 22.918.543.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Entry data SIKS (Sistem Informasi Kearsipan Statis) dan SIKN/JIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional/jarigan Informasi Kearsipan NAsional) : 5000 nomor							
							Fumigasi 753 m3							
							Penghilangan asam dan laminasi 2000 lembar arsip							
							Pengolahan 4000 berkas Arsip Statis BPAD DIY							
							Peningkatan jumlah pengguna arsip statis 600 orang							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan — **Jumlah Pagu : Rp. 18.733.672.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	**Pilihan**													
2.01	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**													
2.01.2.01.01.00	**Dinas Kelautan dan Perikanan**													
2.01.2.01.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 4.196.940.000,00**	**Rp. 4.266.765.000,00**		
2.01.2.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Listrik dan Elektronik 12 Jenis	Administrasi Perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100 %	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.800.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							Alat Tulis Kantor 50 Jenis							
							Barang cetakan 14 Jenis							
							Belanja jasa internet 12 bulan							
							Pembayaran jasa kebersihan kantor12 bulan							
							Pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
							Pembayaran tagihan listrik 12 bulan							
							Pembayaran tagihan telepon 12 bulan							
							Penggandaan sebanyak 166.500 lembar dan penjilidan 220 eksemplar							
							Pengiriman dokumen 12 bulan							
							Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 22 Jenis							
							Perangko, Material dan Benda Pos 2 Jenis							
							Perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas/operasional roda 2 sebanyak 35 unit							
							Perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas/operasional roda 3 sebanyak 4 unit							
							Perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas/operasional roda 4 sebanyak 21 unit							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan — **Jumlah Pagu : Rp. 18.733.672.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Surat kabar dan majalah 8 jenis 12 bulan							
							Surat Keluar 3580 bh							
							Surat Masuk 1498 bh							
2.01.2.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Belanja iuran BPJS PTT 12 bulan dan BPJS Non PNS 11 bulan	Kelancaran adminstrasi perkantoran 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.086.940.000,00	Rp. 1.766.765.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							Bukti Pembayaran Honorarium Non PNS 11 bulan							
							Bukti pembayaran honorarium Non PNS PTT SK Gub (BPTPB) 13 bl							
							Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Kepegawaian 36 orang 12 bulan							
							Bukti pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 24 orang x 3 bln							
							Bukti pembayaran jasa keamanan kantor 1 tahun							
							Honor tenaga analis pasar ikan (PPP 2 orang) 11 bulan							
							Honor tenaga arsiparis (PPP 2 orang) 11 bulan							
							Honor tenaga pencatat produksi perikanan (PPP 4 orang) 11 bulan							
							Honor tenaga pranata komputer (PPP 2 orang) 11 bl							
2.01.2.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan	Kelancaran Koordinasi dengan Pihak Terkait 100 %	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 310.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							Koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan							
							Makanan dan minuman rapat 10250 OS							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan — **Jumlah Pagu : Rp. 18.733.672.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 4.203.779.000,00**	**Rp. 0,00**		
2.01.2.01.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	DED gedung induk 1 dokumen		Dukungan 20% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	Rp. 2.458.926.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							fasilitasi akses disabilitas							
							Gudang alat BAT Sendangsari 30 m2							
							Kantor BAP Samas 56 m2							
							Kantor BAT Wonocatur 56 m2							
							Rehab atap rumah amdon 1 unit							
							Revitalisasi breakwater PPP 1 unit	Terbangun gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras 100%						
							ruang laktasi gedung induk							
							Saluran inlet kolam BAP Samas 15 m1 (BPTPB)							
2.01.2.01.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebeleur 7 Jenis	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 20% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 836.577.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							Peralatan kantor 9 Jenis							
							Perlengkapan kantor 9 Jenis							
2.01.2.01.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perbaikan dan pengecatan jendela kantor 36 bh	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 217.812.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan Kran Air 15 bh							
							Pemeliharaan paving blok 1 tahun							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 18.733.672.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemeliharaan saluran air lingkungan kantor 1 tahun							
							Pemeliharaan talang air 1 tahun							
							Pengecatan dinding 8400 m2							
							Pengecatan dinding pagar dan pembatas taman 600 m2							
							Pengecatan pintu besi gerbang dan sekeliling 1 paket							
							Pengecatan Pintu Pagar 3 Unit							
							Pengerukan selokan 5000 m							
							Perbaikan dan pengecatan pintu kantor 65 bh							
2.01.2.01.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kapal pengawasan 1 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 594.394.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							Kendaraan Roda 2 terpelihara 35 unit 1 tahun							
							Kendaraan Roda 3 terpelihara 4 unit 1 tahun							
							Kendaraan Roda 4 terpelihara 21 unit 1 tahun							
2.01.2.01.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebel terpelihara 2 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 96.070.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							Peralatan Kantor terpelihara 6 Jenis							
							Perlengkapan Kantor terpelihara 3 Jenis							
2.01.2.01.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 391.953.000,00**	**Rp. 500.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan — **Jumlah Pagu : Rp. 18.733.672.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2019	Nilai LKjIP A dari 83,10 menjadi 84,00	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja dan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 35.453.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Data Produksi Perikanan dan Kelautan 1 Tahun	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengelolaan teknologi informasi 100% tepat waktu	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							Forum Perencanaan OPD 1 kali							
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun							
2.01.2.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 51.500.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.16	**PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN**										**Rp. 180.000.000,00**	**Rp. 198.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan — **Jumlah Pagu : Rp. 18.733.672.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	1/2/3	1/2/3
2.01.2.01.01.00.16.001	Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pantai Selatan dan gelombang laut Kabupaten Kulon Progo, kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul	Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan	33.31milyar rupiah	Pengawasan Pelabuhan 80 orang	Operasional Pelabuhan Perikanan 100%	dukungan 55% terhadap target Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan 33,31 milyar rupiah	50 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							Pengelolaan Pelabuhan sesuai SOP 80 orang							
2.01.2.01.01.00.16.002	Pengembangan Pelabuhan Perikanan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pantai Selatan dan gelombang laut Kabupaten Kulon Progo, kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul	Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan	33.31milyar rupiah	Penerapan Pelayanan Pelabuhan 60 orang	Pengembangan Pelabuhan Perikanan sesuai target 100% dalam 1 tahun	dukungan 45% terhadap target Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan 33,31 milyar rupiah	50 %	Rp. 80.000.000,00	Rp. 88.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							Penerapan Sistem Embaran LAPAN bagi nelayan 60 orang							
2.01.2.01.01.00.17	**PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**Rp. 800.000.000,00**	**Rp. 976.500.000,00**		
2.01.2.01.01.00.17.001	Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kretek	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%	Pengawasan Mutu Produk Perikanan 20 kali	Keamanan perairan darat dan laut terjamin 1 Tahun	dukungan 35% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	100 %	Rp. 285.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%	Rekomendasi Hasil Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan 20 bh							
							Rekomendasi Hasil Pengawasan terpadu dilaut 5 bh							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan — **Jumlah Pagu : Rp. 18.733.672.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.17.002	Pengelolaan Laut dan Wilayah Pesisir	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Galur Girisubo Gondokusuman Kretek Panggang Panjatan Purwosari Sanden Srandakan Tanjungsari Temon Tepus Wates	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%	a. Pemahaman Mitigasi Bencana Alam Laut 4 Angkatan x 30 orang	Sumberdaya kelautan dan perikanan tersedia 100 % sebagai bahan untuk rehabilitasi/konservasi	dukungan 65% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	100%	Rp. 515.000.000,00	Rp. 676.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%	b. Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 4 Angkatan x 30 orang							
							c. Pemahaman Budaya Maritim 230 orang							
							d. Rehabilitasi Sumberdaya Hayati Pesisir 1 tahun							
							e. Dokumen Rekomendasi Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah Istimewa Yogyakarta 1 dokumen							
2.01.2.01.01.00.18	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP**										**Rp. 1.735.327.000,00**	**Rp. 3.100.000.000,00**		
2.01.2.01.01.00.18.001	Pengembangan Teknis Perikanan Tangkap	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Gedang sari Sapto sari Tanjungsari Temon	Produksi Perikanan Tangkap	6199ton	a. Sertifikasi BST (Basic Safety Training) 90 orang	Penerapan teknis penangkapan ikan sesuai SOP 100%	Dukungan 55% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap	100%	Rp. 1.123.087.000,00	Rp. 2.100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							b. Kader Nelayan 90 orang							
							c. Pemahaman Penggunaan Sarpras Penangkapan Ikan 360 orang							
2.01.2.01.01.00.18.002	Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Gedang sari Sapto sari	Produksi Perikanan Tangkap	6199ton	a. Pendampingan pemanfaatan perikanan tangkap 9 angkatan	Pendampingan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap terlaksana 100% tepat waktu	Dukungan 45% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap	100%	Rp. 612.240.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							b. Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap 2 Kemitraan							
							c. Pendafataran Buku Kapal Perikanan 3 Buku Kapal							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan — **Jumlah Pagu : Rp. 18.733.672.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.19	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN**										**Rp. 1.860.000.000,00**	**Rp. 2.735.000.000,00**		
2.01.2.01.01.00.19.001	Pengolahan Hasil Perikanan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Gedang sari Gondomanan Kokap Sapto sari Wates Wonosari	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	24.55kg/kapita/tahun	a. Pendampingan Produk Olahan Ikan tingkat pemula 20 kelompok	Pendampingan Pengolahan Hasil Perikanan terlaksana 100% tepat waktu	Dukungan 50% untuk Tingkat Konsumsi makan ikan (24,55 kg/kapita/tahun)	100%	Rp. 1.310.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							b. Pendampingan Olahan Ikan Tingkat Madya 6 kelompok							
							c. Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP) 10 sertifikat							
							d. SNI Produk olahan perikanan 2 sertifikat							
2.01.2.01.01.00.19.002	Pemasaran Hasil Perikanan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Depok Gedang sari Gondokusuman	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	24.55kg/kapita/tahun	a. Pemahaman Manfaat Makan Ikan 3000 orang	Pemasaran Produk Olahan Ikan terlaksana 100% tepat waktu dan tepat sasaran	Dukungan 30% untuk Tingkat Konsumsi makan ikan (24,55 kg/kapita/tahun)	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							b. Promosi Produk Perikanan (Hari Krida Pertanian, Investment Trade n Tourism) 2 kali							
							c. Informasi Harga Ikan 1 Tahun							
2.01.2.01.01.00.19.003	Operasional Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Bambanglipuro Bantul Depok Galur Gondokusuman Gondomanan Jetis Kokap Kretek Ngaglik Pakualaman Pengasih Playen Sapto sari Sleman Srandakan Tanjungsari Temon Wates Wonosari	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	24.55kg/kapita/tahun	Pengujian mutu produk perikanan 1000 sampel	Mutu Produk Perikanan Terjamin 1 Tahun	Dukungan 20% untuk Tingkat Konsumsi makan ikan (24,55 kg/kapita/tahun)	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 240.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.20	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA**										**Rp. 2.365.673.000,00**	**Rp. 2.715.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan — **Jumlah Pagu : Rp. 18.733.672.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.20.001	Pengembangan Teknis Perikanan Budidaya	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	89400ton	a. Sekolah lapang Teknis Budidaya perikanan (30 org x 5 angkt x 4 hari)15 kelompok	Penerapan teknis budidaya ikan sesuai SOP 100%	Dukungan 55% terhadap peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	100%	Rp. 865.673.000,00	Rp. 715.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							b. Rekomendasi Bimtek Sertifikatfikasi CBIB dan CPIB (30 org x 4 angkt x 1 hari) 50 rekomendasi							
2.01.2.01.01.00.20.002	Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	89400ton	Pendampingan Budidaya Perikanan (30 org x 5 angkt x 4 hari) 12 Kelompok	Pendampingan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya terlaksana 100% tepat waktu	Dukungan 45% terhadap peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	100%	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							Kemitraan Pelaku Usaha perikanan Budidaya 5 Kemitraan							
2.01.2.01.01.00.21	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA**										**Rp. 3.000.000.000,00**	**Rp. 3.450.000.000,00**		
2.01.2.01.01.00.21.001	Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Ikan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	84%	Rekomendasi hasil uji hama dan penyakit ikan 350 sampel	Hama dan penyakit Ikan tahun 2019 terkendali	Dukungan 25% Terhadap Prosentase benih perikanan budidaya bersertifikat terdistribusi	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 315.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.21.002	Perbanyakan Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	84%	Benih Ikan dan Udang 30.000.000 ekor	Benih udang dan ikan tahun 2019 tersedia tepat waktu dan jenis	Dukungan 75% Terhadap Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	100%	Rp. 2.800.000.000,00	Rp. 3.135.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							Calon Induk Ikan 9.000 kg							
							Udang dan Ikan Konsumsi 10.000 kg							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata — **Jumlah Pagu : Rp. 17.234.650.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	**Pilihan**													
2.02	**PARIWISATA**													
2.02.2.02.01.00	**Dinas Pariwisata**													
2.02.2.02.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 1.407.530.000,00**	**Rp. 1.980.000.000,00**		
2.02.2.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor 62 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 28 % Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Kebersihan gedung kantor							
							Majalah dan Surat kabar 5 jenis							
							Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh 12 bulan							
							Penggandaan 100.000 lembar							
							Pengiriman Dokumen 27 dokumen							
							Penyusutan arsip							
							Surat Keluar 27.500 surat							
							Barang cetakan 9 unit /buku							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas /operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu (roda dua : 6) (roda 4 : 7)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 17.234.650.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25 jenis							
							Pembayaran tagihan rekening air 1 unit 12 bulan							
							Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan 12 bulan							
							Pengelolaan arsip dinamis SKPD							
							Peralatan Rumah Tangga 28 jenis							
							Surat Masuk 15.000 surat							
2.02.2.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti Pembayaran Honorarium pengelola kepegawaian 1 orang/bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 50% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 707.530.000,00	Rp. 990.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Bukti Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan 9 orang							
							Fasilitator Sarana dan Prasarana 1 orang							
							Jasa Keamanan kantor/tempat kerja 12 bulan							
							Pengemudi 2 orang							
							Petugas Administrasi dan Dokumentasi 5 orang							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											**Jumlah Pagu : Rp. 17.234.650.000,00**			
Nomor	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**	
					Hasil Program		**Keluaran Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**SKPD**	**Jenis Kegiatan**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**1/2/3**	**1/2/3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
							Petugas Kearsipan 5 orang							
							Petugas website dinas 1 orang							
2.02.2.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100 %	Dukungan 21% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 440.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan							
							Makan dan Minum sidang 4.000 orang							
2.02.2.02.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 600.000.000,00**	**Rp. 605.000.000,00**		
2.02.2.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Taman 1 paket	Terpelihara gedung kantor dan taman sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 33% terhadap sapras aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai RKPBMD 13 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 50% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											**Jumlah Pagu : Rp. 17.234.650.000,00**			
Nomor	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**	
					Hasil Program		**Keluaran Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**SKPD**	**Jenis Kegiatan**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**1/2/3**	**1/2/3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
2.02.2.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan mebeleur 2 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 17% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Peralatan gedung kantor terpelihara 8 jenis							
							Perlengkapan gedung kantor terpelihara 3 jenis							
2.02.2.02.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 230.000.000,00**	**Rp. 308.000.000,00**		
2.02.2.02.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 78,31 (BB) menjadi 80 (A)	Dukungan 4% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 7 %	Dukungan 9% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata — **Jumlah Pagu : Rp. 17.234.650.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan 43% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019						
2.02.2.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 43% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.00.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA**										**Rp. 2.795.120.000,00**	**Rp. 10.395.000.000,00**		
2.02.2.02.01.00.15.001	Promosi Pariwisata	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY dan Luar DIY	jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	5926228Orang	Familiarization Tour 1 Tahun	Promosi pariwisata terlaksana 100% tepat sasaran	Dukungan sebesar 80% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 11% semula 5.232.010 wisatawan menjadi 5.807.531 wisatawan	100%	Rp. 2.445.120.000,00	Rp. 8.745.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Iuran EATOF 1 Kali							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 17.234.650.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jasa Petugas TIC 14 orang							
							Jogja International Travel Mart 1 kali							
							Pelayanan Informasi Pariwisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun dan TIC Bali dan Malioboro) Peningkatan pelayanan Informasi Pariwisata di 4 lokasi Display Counter TIS Bandara dan TIS stasiun Tugu							
							Pembuatan bahan promosi : - Pin Jogja, selendang batik, replika (Prambanan, Tugu Perak, Wayang, Becak Perak, Andong Perak, Pembatas Buku) - Baliho - Publikasi melalui media cetak - Buku informasi pariwisata - Peta Wisata/Tourist Map - Brosur - Calender of Event (Tahunan dan Bulanan) - Trophy							
							Pengembangan dan pengelolaan website visitingjogja.com 1 tahun							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata — **Jumlah Pagu : Rp. 17.234.650.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.00.15.002	Identifikasi dan Analisa Pasar Pariwisata	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	5926228Orang	Dokumen Analisa Belanja Wisatawan 1 dokumen	Informasi terkait jumlah, jenis Belanja Wisatawan dan Data Statistik Kepariwisataan DIY selesai 100% dan digunakan sebagai bahan analisa pasar	Dukungan sebesar 20% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 11% semula 5.232.010 wisatawan menjadi 5.807.531 wisatawan	100	Rp. 350.000.000,00	Rp. 1.650.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Dokumen Statistik Kepariwisataan 1 dokumen							
2.02.2.02.01.00.16	**PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA**										**Rp. 1.900.000.000,00**	**Rp. 4.400.000.000,00**		
2.02.2.02.01.00.16.001	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	17%	Bhakti Saka Pariwisata 1 Tahun	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata terlaksana 100%	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku pariwisata dari tahun 2018 ke 2019 semula 12% menjadi 14%	100	Rp. 1.900.000.000,00	Rp. 4.400.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Lomba SDM dan kelembagaan pariwisata 3 kali							
							Pelatihan dan Sertifikasi Pelaku Wisata 200 orang							
							Pemberdayaan Dimas Diajeng 1 tahun							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											**Jumlah Pagu : Rp. 17.234.650.000,00**			
Nomor	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**	
					Hasil Program		**Keluaran Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**SKPD**	**Jenis Kegiatan**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**1/2/3**	**1/2/3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
							Pembuatan Pergub Desa/Kampung wisata, Pokdarwis, Homestay 1 dokumen							
							Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pramuwisata 1 dokumen							
2.02.2.02.01.00.17	**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA**										**Rp. 752.000.000,00**	**Rp. 1.100.000.000,00**		
2.02.2.02.01.00.17.001	Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	100UJP	Bimbingan Teknis UJP (12 UJP)	Standarisasi dan peningkatan kualitas industri pariwisata terlaksana 100% tepat sasaran	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan jumlah usaha jasa pariwisata yang bersertifikasi sejumlah 62 UJP	100%	Rp. 752.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Pembinanaan dan Pengawasan UJP (5 UJP)							
							Sertifikasi UJP (4 UJP)							
2.02.2.02.01.00.18	**PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**										**Rp. 9.550.000.000,00**	**Rp. 33.000.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata | **Jumlah Pagu : Rp. 17.234.650.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.00.18.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	ODTW di DIY	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	2.14LOS	1.Pembangunan Akses Jalan Wisata Kawasan Karst Gunung Batur - Wediombo 5.000 m2	Pembangunan sarana dan prasarana selesai dan dapat digunakan 100%	Dukungan sebesar 59% terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 1% semula 1,97 hari menjadi 1,99 hari	100%	Rp. 5.500.000.000,00	Rp. 22.000.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2.Pembangunan Parkir 500 m2, Toilet 20 m2, Kios Kuliner 40 m2 di Desa Wisata Wonokerto							
							3.Pembangunan Lansekap Camping Ground 3.000 m2 dan Toilet 40m2 di Watumabur, Dlingo, Bantul							
							4.Masterplan dan DED Pengembangan Wisata Prambanan Timur (Jembatan Sembodo Handayani - Prambanan) 1 Dokumen							
							5.Pengembangan Fasilitas Kuliner Terminal wisata Plono 1 lokasi							
							6.Pengembangan Parkir Kawasan Nglinggo 1 lokasi							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 17.234.650.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							7.Pembangunan gazebo dan bangunan kuliner kopi di Sidorejo 1 lokasi							
2.02.2.02.01.00.18.003	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	ODTW di DIY	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	2.14LOS	Atraksi Kesenian di 13 desa wisata	Terselenggaranya event/festival dan ataraksi wisata di destinasi 100%	Dukungan sebesar 41% terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 1% semula 1,97 hari menjadi 1,99 hari	100%	Rp. 4.050.000.000,00	Rp. 11.000.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Atraksi Wisata di DTW 15 lokasi							
							Festival Layang-Layang Internasional 1 kali							
							Festival Lintas Komunitas 1 kali							
							Festival Perahu Naga 1 kali							
							Jogja International Airshow 1 kali							
							Pawai dan Pameran Pembangunan 1 kali							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan | **Jumlah Pagu : Rp. 12.032.534.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	**Pilihan**													
2.06	**PERDAGANGAN**													
2.06.2.06.01.00	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**													
2.06.2.06.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 2.333.999.000,00**	**Rp. 2.600.000.000,00**		
2.06.2.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor 63 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 52% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.202.385.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Barang cetakan 17 jenis							
							Barang cetakan untuk pengelolaan arsip 2 jenis							
							Bukti pembayaran Pajak/KIR kendaraan dinas/operasional roda 4 tepat waktu 2 unit							
							Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 tepat waktu 23 unit							
							Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
							Honor arsiparis 1 tahun							
							Kebersihan gedung kantor 87.354 m2							
							Komponen instalasi listrik/penerangan 20 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan | **Jumlah Pagu : Rp. 12.032.534.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan							
							Pembayaran tagihan rekening telepon 12 bulan							
							Penggandaan 164.460 lembar dan24 buku							
							Pengisian tabung pemadam kebakaran 20 tabung							
							Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20 jenis							
							Surat kabar 3 jenis							
							Surat Keluar 6450 surat							
							Surat Masuk 5400 surat							
2.06.2.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honorarium analis perdagangan 1 orang 12 bulan	tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 34% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 803.967.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Bukti pembayaran honorarium pemantau & monitoring harga bahan pokok dan bahan penting 1 orang 12 bulan							
							Bukti pembayaran honorarium pengelola barang 7 orang 12 bulan							
							Bukti pembayaran honorarium pengelola data 2 orang 12 bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 12.032.534.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian 4 orang 12 bulan							
							Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan 20 orang 12 bulan							
							Bukti pembayaran honorarium pengemudi 2 orang 12 bulan							
							Bukti pembayaran honorarium pengolah data kinerja ekspor 1 orang 12 bulan							
							Bukti pembayaran honorarium pranata komputer 1 orang 12 bulan							
							Bukti pembayaran jasa keamanan kantor 12 bulan							
2.06.2.06.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Makan dan minum sidang 7.500 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 14% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 327.647.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan							
							Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan							
2.06.2.06.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 1.102.035.000,00**	**Rp. 1.210.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan | **Jumlah Pagu : Rp. 12.032.534.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembuatan DED gedung kemasan (LIK) 1 DED	Terlaksananya pembuatan DED gedung kemasan (LIK) 100%	Dukungan 5% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebeler 2 jenis	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Dukungan 23% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 255.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Peralatan 5 jenis							
							Perlengkapan 5 jenis							
2.06.2.06.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan bangunan gedung dan tempat kerja 5 jenis	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 30% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 334.420.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sesuai RKP BMD 2 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 27% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 298.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur 2 jenis	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 15% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 164.615.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor 10 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan | **Jumlah Pagu : Rp. 12.032.534.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7 jenis							
2.06.2.06.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 316.500.000,00**	**Rp. 276.000.000,00**		
2.06.2.06.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 79,22 (BB) menjadi 81 (A)	Dukungan 3% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 19 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 4% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 12.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	Pembaharuan data secara kontinyu 100%	Dukungan 85% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 269.500.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan | **Jumlah Pagu : Rp. 12.032.534.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						
2.06.2.06.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 19 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 8% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.15	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR**										**Rp. 1.050.000.000,00**	**Rp. 2.672.600.000,00**		
2.06.2.06.01.00.15.001	Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY dan Jakarta	Net Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n	308.59Ribu US$	1. Pelayanan Penerbitan SKA Otomasi 16.000 set SKA	Pemasaran produk ekspor, pendampingan, dan pelayanan SKA Otomasi terlaksana 100%	Dukunganterhadap terwujudnya target peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri (RPJMD) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 2% (6,05 Ribu US$) semula 302.54 Ribu US$ menjadi 308.59 Ribu US$	100%	Rp. 1.050.000.000,00	Rp. 2.672.600.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							2. Pemasaran bagi IKM Ekspor sebanyak 4 Pameran (Pameran JIFFINA, Pameran IFEX, Pameran Inacraft, Pameran TEI)							
							3. Pelatihan dan Pendampingan IKM Ekspor sebanyak 3 angkatan @ 50 IKM							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 12.032.534.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4. Pelayanan KADIN (3 Pokja : (1) Perdagangan, distribusi dan Logistik, (2) Hubungan internasional, promosi, dan investasi, dan (3) UMKM, Koperasi, dan usaha daerah) 1 tahun							
2.06.2.06.01.00.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI**										**Rp. 2.496.000.000,00**	**Rp. 3.500.000.000,00**		
2.06.2.06.01.00.16.001	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY dan Jakarta	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	1.75milyar rupiah	1. Pameran Dalam Negeri sejumlah 6 pameran (Jogja PDN Ekspo dan Bisnis Forum, Pameran Crafina, Dekranas, Jakarta Fair, Produk Tradisional Kraton, Pameran Tetap)	Penguatan kapasitas perdagangan dalam negeri terlaksana 100%	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (RPJMD) sebesar 12,90% (200 juta rupiah) dari tahun 2018 ke 2019 semula 1,55 milyar rupiah menjadi 1,75 milyar rupiah	100%	Rp. 2.496.000.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							2. Bimtek PKL 20 kelompok							
							3. Pelayanan Dekranasda yang optimal 1 Tahun							
							4. Pelatihan Pemasaran Online sejumlah 8 Angkatan @30 Orang							
							5. Sekolah Pasar 5 Akt @ 30 Orang							
							6. Pembangunan Pasar Hewan Pengasih 1 unit							
2.06.2.06.01.00.17	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN**										**Rp. 550.000.000,00**	**Rp. 1.300.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan | **Jumlah Pagu : Rp. 12.032.534.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.00.17.001	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	5.61%	Operasi Pasar Beras di 5 Lokasi @ 2 kali	Barang dan jasa stabil dan aman selama 1 tahun	Dukungan terhadap terwujudnya target penurunan persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard (RPJMD) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 1,41% (0,08%) semula 5,69 % menjadi 5,61 %	100%	Rp. 550.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Operasi Pasar Komoditi Lainnya di 5 lokasi @ 2 kali							
							Operasional BPSK selama 12 bulan							
							Pembinaan dan pengawasan barang dan jasa yang beredar selama 12 bulan							
							Pengawasan bahan berbahaya selama 12 bulan							
							Pengujian mutu barang ber-SNI di laboratorium sejumlah 3 jenis barang ber-SNI							
							Stok dan Harga Kebutuhan Pokok stabil selama 12 bulan							
2.07	**PERINDUSTRIAN**													
2.07.2.06.01.00	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**													
2.07.2.06.01.00.18	**PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI**										**Rp. 900.000.000,00**	**Rp. 2.000.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan | **Jumlah Pagu : Rp. 12.032.534.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.06.01.00.18.001	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	21produk ATG	Pelayanan Jasa Bengkel Alat Produksi 6 unit Layanan	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna terlaksana 100%	Dukungan Terhadap Terwujudnya Peningkatan Jumlah produk Alat Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 14,29% (3 ATG) semula 18 ATG ke 21 ATG	100%	Rp. 900.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Pelayanan Teknologi Kemasan 6 unit layanan							
							Pelayanan Teknologi Perak dan Logam 3 Layanan							
							Penerapan ATG Hasil Rekayasa sejumlah 5 ATG							
2.07.2.06.01.00.19	**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**										**Rp. 2.984.000.000,00**	**Rp. 5.050.000.000,00**		
2.07.2.06.01.00.19.001	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Agro dan Kimia	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Produksi IKM	12979156Rp Juta	Pendampingan IKM Kayu dan Bambu 7 kelompok @ 20 Org	Pendampingan, pemasaran, dan Kemitraan IKM Agro dan Kimia terlaksana 100%	Dukungan sebesar 50% terhadap terwujudnya target peningkatan Nilai produksi IKM (RPJMD) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 2% (254.493 juta rupiah) semula 12.724.663 juta rupiah menjadi 12.979.156 juta rupiah	94%	Rp. 1.834.000.000,00	Rp. 4.700.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Pendampingan IKM Olahan Pangan 10 kelompok @ 20 orang							
							Pendampingan IKM Kimia 2 Akt @ 20 Org							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan | **Jumlah Pagu : Rp. 12.032.534.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pendampingan Sentra IKM 3 sentra (Bantul, Kulon Progo, Kota)							
							Pendampingan Standarisasi Produk Agrokim 3 jenis							
							Tes Pasar dan Temu Kemitraan IKM Unggulan Daerah 2 kali							
2.07.2.06.01.00.19.002	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Produksi IKM	12979156Rp Juta	Kemitraan dan Kontrak bisnis IKM IT dengan perusahaan sejumlah 3 kontrak bisnis	Pendampingan, pemasaran, dan kemitraan IKM Industri Logam, Sandang, dan Aneka terlaksana 100%	Dukungan sebesar 50% terhadap terwujudnya target peningkatan Nilai produksi IKM (RPJMD) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 2% (254.493 juta rupiah) semula 12.724.663 juta rupiah menjadi 12.979.156 juta rupiah	100%	Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Koordinasi percepatan kawasan industri 1 tahun							
							Pameran Muslim Fashion Festival 1 Kali							
							Partisipasi Pameran INAPA 1 kali							
							Pendampingan IKM Sandang dan Kulit 8 kelompok @ 20 Org							
							Pendampingan IKM Kerajinan Aneka (Mainan anak bambu kayu, kerang, serat alam) 3 kelompok @ 20 Org							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan | **Jumlah Pagu : Rp. 12.032.534.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.06.01.00.20	**PROGRAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**										**Rp. 300.000.000,00**	**Rp. 1.000.000.000,00**		
2.07.2.06.01.00.20.001	Pelayanan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra dibina	100unit	Forum Komunikasi HKI 50 orang	Pelayanan dan Pendampingan HKI terlaksana 100%	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah HKI yang terdaftar (RPJMD) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 11,11% (10 buah HKI) semula 90 HKI menjadi 100 HKI	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Pelayanan Konsultasi HAKI 200 orang							
							Pendampingan Pendaftaran HAKI 3 Jenis							
							Publikasi HAKI melalui 3 Media							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 3.940.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**													
4.01.4.01.01.00	**Sekretariat Daerah**													
4.01.4.01.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 3.912.700.000,00**	**Rp. 3.811.000.000,00**		
4.01.4.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Karangan bunga (2 jenis)	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 98,86 terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Rp. 1.230.350.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Makanan dan minuman Gubernur dan Wakil Gubernur (1 tahun)							
							Materai (2 jenis)							
							Medical checkUp (4 orang)							
							Pakaian Batik Gubernur dan Wakil Gubernur (8 stell)							
							Pakaian Dinas Harian (PDH) Gubernur dan Wakil Gubernur (6 stell)							
							Pakaian Sipil Lapangan (PSL) Gubernur dan Wakil Gubernur (4 stell)							
							Souvenir/Cinderamata (7 jenis)							
							Trophy (2 jenis)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 3.940.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 2 orang Sopir Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan yang berlaku (2 orang)	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	Dukungan 8,13% terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Rp. 40.900.000,00	Rp. 11.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Kinerja 3 orang ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan yang berlaku (3 orang)							
							Kinerja 5 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (5 orang)							
4.01.4.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Gubernur dan Wakil Gubernur (1 tahun)	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 15 % terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100 %	Rp. 2.641.450.000,00	Rp. 2.700.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 27.300.000,00**	**Rp. 17.200.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 3.940.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaiannya kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2019	Nilai LKjIP "A"	Dukungan 7,73 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 5.150.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 3 program 6 kegiatan	Laporan keuangan dengan deviasi 10%	Dukungan 35,05% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.850.000,00	Rp. 5.200.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan perubahan TA 2019)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%	Dukungan 29,02% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.300.000,00	Rp. 6.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 3.940.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 6 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 35,92% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 9.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan — **Jumlah Pagu : Rp. 5.426.130.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**													
1.12.4.01.02.01	**Biro Tata Pemerintahan**													
1.12.4.01.02.01.15	**PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**										**Rp. 1.014.040.000,00**	**Rp. 1.100.000.000,00**		
1.12.4.01.02.01.15.002	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	82.67%	Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/ marginal 500 akta	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai standart 100%	Dukungan sebesar 100% terhadap Peningkatan kepemilikan dokumen penting kependudukan	100%	Rp. 1.014.040.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/ marginal 200 akta							
							Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/ marginal 100 akta							
							Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar) 80 dokumen							
							Instansi yang bekerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan 3 instansi							
							Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY (akumulatif) 3 lembaga							
							Profil perkembangan kependudukan 1 dokumen							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											**Jumlah Pagu : Rp. 5.426.130.000,00**			
Nomor	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**	
					Hasil Program		**Keluaran Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**SKPD**	**Jenis Kegiatan**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**1/2/3**	**1/2/3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
							Rekomendasi penyelesaian permasalahan pencatatan sipil dan adminduk 2 rekomendasi							
							sistem informasi dalam rangka pemanfaatan data kependudukan 3 sistem							
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**													
4.01.4.01.02.01	**Biro Tata Pemerintahan**													
4.01.4.01.02.01.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 689.000.000,00**	**Rp. 703.000.000,00**		
4.01.4.01.02.01.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda dua 8 unit	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	32.72 %	Rp. 292.000.000,00	Rp. 295.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Alat tulis kantor36 jenis							
							Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 jenis							
							Barang cetakan 21 jenis							
							bukti pembayaran pajak/STNK Kendaraan dinas/operasional roda empat 5 unit							
							Jasa surat-menyurat 3 jenis							
							komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11 jenis							
							Penggandaan 80.000							
							Pengisian tabung pemadam 11 tabung							
							peralatan kebersihan dan bahan pembersih17 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan — **Jumlah Pagu : Rp. 5.426.130.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.01.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	bukti pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian 100 %	tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	3.27 %	Rp. 27.000.000,00	Rp. 28.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.01.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	64%	Rp. 370.000.000,00	Rp. 380.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan							
							Makanan dan minuman rapat 12 bulan							
4.01.4.01.02.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 328.400.000,00**	**Rp. 526.000.000,00**		
4.01.4.01.02.01.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembuatan ruang layanan data kependudukan dan PPID Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 1 paket	Terbangunnya gedung kantor yang dapat dimanfaatkan sesuai standart sarpras 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2,6 %	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.01.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	AC 2 unit	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	49,26 %	Rp. 99.400.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							meja 10 unit, kursi rapat 20 unit							
							Rak 6 buah							
4.01.4.01.02.01.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua sesuai RKPBMD (7 unit)	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	13.56%	Rp. 130.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan — **Jumlah Pagu : Rp. 5.426.130.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat sesuai RKPBMD (5 unit)							
4.01.4.01.02.01.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMD 15 jenis	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	7.72%	Rp. 74.000.000,00	Rp. 76.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.01.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 147.400.000,00**	**Rp. 150.800.000,00**		
4.01.4.01.02.01.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) Nilai 70	Nilai LKjIP : A	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	5.99%	Rp. 6.200.000,00	Rp. 6.500.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.01.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Keuangan Tahunan1 laporan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	7.82%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 32.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional 12 bulan							
							Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2018 1 laporan							
4.01.4.01.02.01.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 1 dokumen	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	72.29	Rp. 102.000.000,00	Rp. 103.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan — **Jumlah Pagu : Rp. 5.426.130.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 1 dokumen							
							Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD. 1 dokumen laporan							
							Materi Informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang lengkap dan terkini 1 dokumen							
							Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 1 dokumen							
							Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020 1 dokumen							
4.01.4.01.02.01.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 15 kegiatan 95%	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	8.88%	Rp. 9.200.000,00	Rp. 9.300.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.01.22	**PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA**										**Rp. 1.291.540.000,00**	**Rp. 1.320.000.000,00**		
4.01.4.01.02.01.22.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama tahun n	100%	Kajian kebijakan Otda/ Kerjasama 1 kajian/rekomendasi	Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan urusan 100%	Dukungan terhadap Persentase Jumlah kebijakan yang merespon dinamikapenyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	22.25%aparat	Rp. 737.930.000,00	Rp. 765.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan	100%	LPPD 1 dokumen							
							Rekomendasi penerapan NSPK 6 bidang urusan							
							Rekomendasi penyelenggaraan urusan pemerintahan 1 rekomendasi							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan — **Jumlah Pagu : Rp. 5.426.130.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.01.22.002	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama tahun n	100%	Kesepakatan kerjasama dalam negeri 5 naskah kerjasama	Terselenggaranya koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri 100%	Dukungan sebesar 50% terhadap persentase bahan rumusan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerjasama	100%	Rp. 553.610.000,00	Rp. 555.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan	100%	Rekomendasi tindak lanjut kerjasama dalam negeri 5 rekomendasi							
							Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU 2 SKB							
4.01.4.01.02.01.23	**PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN**										**Rp. 997.120.000,00**	**Rp. 961.000.000,00**		
4.01.4.01.02.01.23.002	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Desa Tertinggal yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	33.33%	Aparatur pemerintahan desa desa/ kelurahan yang meningkat pemahaman dan ketrampilannya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan 80 aparatur	Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan sesuai Prosedur 100%	Dukungan sebesar 100% terhadap persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	100%	Rp. 997.120.000,00	Rp. 961.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen APBDes Pro Poor 10 desa tertinggal							
							Kecamatan sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) 64 kecamatan							
							Laporan Hasil Pemantauan kinerja kecamatan 1 laporan							
							Laporan Hasil Pemantauan pengelolaan dana desa 1 laporan							
							Unsur Perwakilan BPD yang meningkat kapasitasnya dalam menyelenggarakan MUSDES 80 peserta							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan — **Jumlah Pagu : Rp. 5.426.130.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.01.24	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH**										**Rp. 958.630.000,00**	**Rp. 1.000.000.000,00**		
4.01.4.01.02.01.24.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Laporan monitoring persiapan dan pelaksanaan Pemilu 1 laporan	Terselnggaranya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Prosedur 100%	Dukungan terhadap Persentase Jumlah kebijakan yang merespon dinamikapenyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	14.35%	Rp. 488.280.000,00	Rp. 500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					Persentase Desa di Wilayah Perbatasan yang Terbina	1%	Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum 1 laporan							
							Peningkatan kapasitas anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 220 orang							
							Peresmian pengesahan pengangkatan anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 1 berkas usulan dan 5 draf SK							
							Usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD 2 usulan/draf SK							
4.01.4.01.02.01.24.002	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah 1 Dokumen	Terselenggaranya Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi sesuai Prosedur 100%	Dukungan terhadap Persentase Jumlah kebijakan yang merespon dinamikapenyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	13.69%	Rp. 470.350.000,00	Rp. 500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					Persentase Desa di Wilayah Perbatasan yang Terbina	1%	Draft Rapergub Pengelolaan Wilayah Perbatasan 1 dokumen							
							Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/ kota di DIY 1 dokumen							
							Pemahaman aparatur dan masyarakat tentang Pergub No. 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembenrian Nama RUPA BUMI Unsur Buatan 175 orang							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan | **Jumlah Pagu : Rp. 5.426.130.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Rekomendasi penyelesaian permasalahan wilayah perbatasan kabupaten/ kota dan atau antar provinsi 1 rekomendasi							
							Reviu pilar acuan batas DIY-Jateng 20 titik pilar batas							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum — **Jumlah Pagu : Rp. 5.553.575.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**													
4.01.4.01.02.02	**Biro Hukum**													
4.01.4.01.02.02.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 543.505.000,00**	**Rp. 558.000.000,00**		
4.01.4.01.02.02.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Administrasi Persuratan 7.000 surat	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Mendukung terhadap Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 180.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Arsip Dokumen Hukum 2 dokumen							
							ATK 51 jenis							
							Barang Cetakan 13 jenis							
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional 8 unit							
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6 jenis							
							Penggandaan 1 paket							
4.01.4.01.02.02.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 1 orang Pengelola Kepegawaian 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Mendukung terhadap Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 27.800.000,00	Rp. 28.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum — **Jumlah Pagu : Rp. 5.553.575.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kinerja 10 orang Pengelola Keuangan 1 tahun							
4.01.4.01.02.02.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Mendukung terhadap Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 335.705.000,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai kebutuhan 1 tahun							
4.01.4.01.02.02.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 235.600.000,00**	**Rp. 353.800.000,00**		
4.01.4.01.02.02.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	AC 2 unit	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor sesuai kaidah dan standar 100%	Mendukung terhadap Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp. 60.600.000,00	Rp. 168.800.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Almari besi 4 unit							
							Filling cabinet 6 unit							
4.01.4.01.02.02.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional 8 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Mendukung terhadap Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp. 95.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Fumigasi ruang perpustakaan 2 kali	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Mendukung terhadap Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp. 80.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 5.553.575.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							AC 20 buah							
							Komputer 25 buah							
							Mebeleur 20 buah							
							Mesin Ketik 3 buah							
							Notebook 10 buah							
							Pintu Kantor 12 buah							
							Printer 20 buah							
4.01.4.01.02.02.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 60.164.000,00**	**Rp. 62.500.000,00**		
4.01.4.01.02.02.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Nilai LKjIP : A	Mendukung 8,76% terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Rp. 6.664.000,00	Rp. 6.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan keuangan dengan deviasi maksimal 5%	Mendukung terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Rp. 7.500.000,00	Rp. 8.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum — **Jumlah Pagu : Rp. 5.553.575.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.02.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Mendukung terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 42.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							2. Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Hukum yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website Biro Hukum secara kontinyu 100%						
							3. Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020						
4.01.4.01.02.02.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Mendukung terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.500.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.15	**PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**										**Rp. 1.362.306.000,00**	**Rp. 1.452.000.000,00**		
4.01.4.01.02.02.15.001	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	Rancangan Keputusan Gubernur 200 Rancangan Keputusan	Tersusunnya Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah 100%	Mendukung 86,19% terhadap Capaian Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	100%	Rp. 1.212.306.000,00	Rp. 1.302.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Rancangan Peraturan Daerah 5 Rancangan Peraturan Daerah							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum | **Jumlah Pagu : Rp. 5.553.575.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum | **Jumlah Pagu : Rp. 5.553.575.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja										
4.01.4.01.02.02.15.002	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	Kajian Produk Hukum Daerah 8 Rekomendasi	Tersusunnya Rumusan Kebijakan di Bidang Hukum 100%	Mendukung 13,81% terhadap Capaian Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum — **Jumlah Pagu : Rp. 5.553.575.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 5.553.575.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja									
4.01.4.01.02.02.16	**PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM**										**Rp. 612.000.000,00**	**Rp. 645.500.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum | **Jumlah Pagu : Rp. 5.553.575.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.02.16.001	Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	Dokumen hasil fasilitasi/evaluasi produk hukum kabupaten/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan kesusilaan 45 Rancangan Produk Hukum	Tersusunnya Hasil Evaluasi Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota 100%	Mendukung 100% terhadap Capaian Program Pengawasan Produk Hukum	100%	Rp. 612.000.000,00	Rp. 645.500.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.17	**PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM**										**Rp. 740.000.000,00**	**Rp. 785.000.000,00**		
4.01.4.01.02.02.17.001	Penyebarluasan dan Digitalisasi Produk Hukum	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100%	Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah 2.600 buku	Penyebarluasan dan Digitalisasi Produk Hukum 100%	Mendukung 100% terhadap Capaian Program Dokumentasi Hukum	100%	Rp. 740.000.000,00	Rp. 785.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Jumlah informasi peraturan perundang-undangan 2.600 buku							
							Jumlah produk hukum yang diunggah ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 260 produk hukum							
							Legal Expo Bidang Hukum 1 Laporan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum — **Jumlah Pagu : Rp. 5.553.575.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian									

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 5.553.575.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja									
4.01.4.01.02.02.18	**PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM**										**Rp. 2.000.000.000,00**	**Rp. 2.445.000.000,00**		
4.01.4.01.02.02.18.001	Layanan Hukum Masyarakat	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi hubungan kerja Lembaga Ombudsman DIY 1 Laporan	Terselenggaranya Layanan Hukum di Masyarakat 100%	Mendukung 100% terhadap Capaian Program Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.445.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Pelaksanaan Perlindungan dan Pemajuan HAM di DIY 1 Laporan							
							Penyelesaian penanganan permasalahan hukum litigasi 2 Putusan							
							Penyelesaian penanganan permasalahan hukum non litigasi 1 Dokumen Penanganan							
							Rekomendasi perbaikan tata kelola usaha beretika dan perbaikan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum — **Jumlah Pagu : Rp. 5.553.575.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum | **Jumlah Pagu : Rp. 5.553.575.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam — **Jumlah Pagu : Rp. 2.775.514.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**													
4.01.4.01.02.03	**Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam**													
4.01.4.01.02.03.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 312.191.000,00**	**Rp. 419.500.000,00**		
4.01.4.01.02.03.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Surat keluar 650 surat	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang medukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 76.945.000,00	Rp. 88.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Alat Tulis Kantor 21 jenis							
							Barang cetakan 2 jenis							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda dua yang tepat waktu 2 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda empat yang tepat waktu 4 unit							
							Buku peraturan perundang-undangan 5 buku							
							Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 2 jenis							
							Majalah 2 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 2.775.514.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penggandaan 80.000 lembar							
							Pengiriman dokumen 200 dokumen							
							Peralatan kebersihan kantor 15 jenis							
							Surat kabar 2 jenis 12 bulan							
							Surat masuk 3.000 surat							
4.01.4.01.02.03.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Honorarium Pengelola Kepegawaian dan penatausahaan Administrasi Keuangan Biro 12 orang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 94.560.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 140.686.000,00	Rp. 181.500.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah 12 bulan							
							Makanan dan Minuman Sidang 1.000 os							
4.01.4.01.02.03.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 173.020.000,00**	**Rp. 150.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam | **Jumlah Pagu : Rp. 2.775.514.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.03.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Air Conditioner 2 PK 2 unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	Dukungan 33.33 % terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	Rp. 65.500.000,00	Rp. 0,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Penataan Ruang Kantor 1 paket							
							Scaner 1 unit							
							UPS 1 unit							
4.01.4.01.02.03.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat Terpenuhi 4 unit	terpeliharanya kendaraaan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 33.33 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelacaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 81.670.000,00	Rp. 120.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Terpelihara 2 unit							
4.01.4.01.02.03.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara 11 jenis	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun	Dukungan 33,33% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.850.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 38.419.000,00**	**Rp. 51.180.300,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam — **Jumlah Pagu : Rp. 2.775.514.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.03.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2018	Nilai LKjIP = A dari 75,76 menjadi 80,00	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.605.000,00	Rp. 4.500.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 14 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0 %	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.630.000,00	Rp. 6.680.300,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Dokumen perencanaan SKPD TA. 2019 dan Perubahan TA. 2018	Kesesuaian Perencanaan Tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	100%	Rp. 25.240.000,00	Rp. 35.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun							
4.01.4.01.02.03.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 14 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.944.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam — **Jumlah Pagu : Rp. 2.775.514.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.03.34	**PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH**										**Rp. 599.580.000,00**	**Rp. 400.000.000,00**		
4.01.4.01.02.03.34.001	Pengendalian Inflasi Daerah	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 kabupaten 1 kota	Rumusan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	40%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah 1 dokumen	rekomendasi pengendalian inflasi daerah berjalan lancar	Dukungan terhadap rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	100%	Rp. 599.580.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.35	**PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN**										**Rp. 1.414.304.000,00**	**Rp. 1.550.000.000,00**		
4.01.4.01.02.03.35.001	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kabupaten 1 kota	Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30%	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah 2 dokumen	Dokumen Rekomendasi Pengembangan Ekonomi 100%	Dukungan sebesar 60% terhadap rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	100%	Rp. 1.199.939.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Rekomendasi kebijakan pengembangan kepariwisataan DIY 1 dokumen							
							Rekomendasi Percepatan Pembangunan Daerah 1 tahun							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam | **Jumlah Pagu : Rp. 2.775.514.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.03.35.002	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kabupaten 1 kota	Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30%	Kebijakan Kemudahan Investasi dan Perijinan Berusaha 1 dokumen	Dokumen Rekomendasi Pengembangan Ekonomi 100%	Dukungan sebesar 40% tehadap rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	100%	Rp. 214.365.000,00	Rp. 250.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.39	**PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA DAERAH PEREKONOMIAN**										**Rp. 238.000.000,00**	**Rp. 242.000.000,00**		
4.01.4.01.02.03.39.003	Penyusunan Kebijakan Green Economic	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 kabupaten 1 kota	Rumusan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30%	Rencana Aksi Green Economic 1 dokumen	Dokumen Rekomendasi green economic dan pegnelolaan sumberdaya alam 100%	Dukungan terhadap peningkatan prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	100%	Rp. 238.000.000,00	Rp. 242.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan | **Jumlah Pagu : Rp. 5.206.472.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**													
4.01.4.01.02.04	**Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan**													
4.01.4.01.02.04.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 577.252.000,00**	**Rp. 638.000.000,00**		
4.01.4.01.02.04.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Administrasi Pembangunan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Terlaksananya pengiriman Surat Keluar 2500 surat	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan thd tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 60 %	100%	Rp. 232.832.000,00	Rp. 280.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							02. Terlaksananya pengelolaan Surat Masuk 2500 surat							
							03. Terlaksananya Pengiriman surat/dokumen 40 dokumen							
							04. Terlaksananya pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 (2 unit) dan roda 4 (5 unit)							
							05. Tersedianya Alat Tulis Kantor 23 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 5.206.472.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							06. Tersedianya Barang Cetakan 11 jenis							
							07. Terlaksananya Fotokopi 105.000 berkas							
							08. Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 jenis							
							09. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor 14 jenis							
							10.Tersedianya surat kabar, majalah dan buku perpustakaan 4 jenis							
							11.Terkelolanya arsip dinamis 5000 berkas							
4.01.4.01.02.04.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan dan kepegawaian 12 bulan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	Dukungan thd tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 15 %	100%	Rp. 24.420.000,00	Rp. 28.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Tersedianya makan dan minuman rapat 3000 orang 2. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 bulan	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan sebesar 25% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang menudkung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 320.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan — **Jumlah Pagu : Rp. 5.206.472.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 247.220.000,00**	**Rp. 306.000.000,00**		
4.01.4.01.02.04.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9 jenis 2. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	Dukungan sebesar 40% terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%	100%	Rp. 114.750.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional 7 unit (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat)	Terpeliharanya kendaraaan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan sebesar 20% terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 3 jenis 2. Terpeliharanya Peralatan gedung kantor 12 jenis 3. Terpeliharanya Meuleber 2 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	Dukungan sebesar 40% dalam pencapaiannya peningkatan sarana prasarana aparatur sebesar 100%	100%	Rp. 32.470.000,00	Rp. 36.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 132.000.000,00**	**Rp. 150.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan — **Jumlah Pagu : Rp. 5.206.472.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Konsep LKPJ dan LPPD 1 laporan 2. LAKIP 1 laporan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 100%	Dukungan sebesar 25% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100%	Rp. 7.000.000,00	Rp. 9.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Laporan keuangan Bulanan (12 bulan) 2. Laporan Keuangan Triwulan (4 laporan) 3. Laporan keuangan Semester (2 laporan) 4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan)	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan 100% tepat waktu	Dukungan sebesar 25% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 13.000.000,00	Rp. 17.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Tersusunnya Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan PembangunanTh. 2019 (1 dokumen) 2. Tersusunnya RKA dan DPA Th. 2019 (1 dokumen) 3. Tersusunnya RKA-P dan DPA-P Th. 2019 (1 dokumen) 4. Tersusunnya ROPK Th.2018 (1 dokumen) 5. Pengembangan Sistem Informasi (1 dokumen) 6. Forum Perangkat Daerah 1 kali	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	Dukungan sebesar 25% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 96.000.000,00	Rp. 106.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan — **Jumlah Pagu : Rp. 5.206.472.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersusunnya Laporan monitoring dan evaluasi Biro Administrasi Pembangunan (12 dokumen)	Tersusunnya laporan monev Biro pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan 100% tepat waktu	Dukungan sebesar 25% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100%	Rp. 16.000.000,00	Rp. 18.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.28	**PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**										**Rp. 2.600.000.000,00**	**Rp. 3.900.000.000,00**		
4.01.4.01.02.04.28.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Daerah Istimewa Yogyakarta	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan	100%	1. Terselenggaranya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 12 bulan 2. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang/jasa 4 dokumen 3. Terlaksananya pelaksanaan pengadaan yang terintegrasi (1 aplikasi)	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang berkualitas 100%	Presentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100%	100%	Rp. 2.400.000.000,00	Rp. 3.200.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.28.002	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Daerah Istimewa Yogyakarta	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan	100%	1. Terlaksananya bimtek pengadaan barang/jasa (4 kali) 2. Tersusunnya dokumen strategi pengadaan (4 dokumen) 3. Tersusunnya roadmap kematangan organisasi Unit Layanan Pengadaan beserta bukti dukungnya (1 dokumen)	Terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa 100 %	Presentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100%	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan | **Jumlah Pagu : Rp. 5.206.472.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.30	**PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH**										**Rp. 550.000.000,00**	**Rp. 1.520.000.000,00**		
4.01.4.01.02.04.30.001	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Daerah Istimewa Yogyakarta	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti	65%	1. Tersusunnya Bahan Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (1 dokumen) : Kajian Pengembangan Infrastruktur Wilayah Guna Pendukung Pusat Pertumbuhan Baru (Kota Satelit) Pada Kawasan Pansela DIY	Tersedianya bahan kebijakan infratsruktur daerah 100%	Presentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 65%	100%	Rp. 237.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.30.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	daerah Istimewa Yogyakarta	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti	65%	Tersusunnya laporan monev kebijakan infrastruktur daerah (1 dokumen)	Tersedianya laporan Koordinasi, monitoring, dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah 100%	Presentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 65%	100%	Rp. 313.000.000,00	Rp. 320.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.31	**PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**										**Rp. 500.000.000,00**	**Rp. 870.000.000,00**		
4.01.4.01.02.04.31.001	Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Daerah Istimewa Yogyakarta	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	65%	Tersusunnya Bahan Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (1 dokumen) : Naskah Akademik Rapergub Percepatan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 - 2030	Tersedianya Bahan Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (1 dokumen) : Naskah Akademik Rapergub Percepatan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 - 2030 100%	Presentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 65%	100%	Rp. 235.100.000,00	Rp. 550.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan | **Jumlah Pagu : Rp. 5.206.472.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.31.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Daerah Istimewa Yogyakarta	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	65%	1. Tersusunnya laporan monev kebijakan pembangunan berkelanjutan (1 dokumen) 2. Tersusunnya laporan penyelenggaraan kegiatan pokja PP2AS (1 dokumen)	Tersedianya Laporan Monev Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 100%	Presentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 65%	100%	Rp. 264.900.000,00	Rp. 320.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.32	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH**										**Rp. 600.000.000,00**	**Rp. 640.000.000,00**		
4.01.4.01.02.04.32.001	Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Daerah Istimewa Yogyakarta	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	75%	Tersedianya bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah (1 dokumen)	Tersedianya bahan kebijakan pengembangan sumber - sumber pembiayaan non pemerintah 100%	Presentase rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 55%	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 420.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.32.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	3. New Yogyakarta International Airport	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Daerah Istimewa Yogyakarta	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	75%	Tersedianya laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah (1 dokumen)	Tersedianya laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan sumber - sumber pembiayaan non pemerintah 100%	Presentase rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti sebsar 55%	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Organisasi | **Jumlah Pagu : Rp. 3.794.734.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**													
4.01.4.01.02.05	**Biro Organisasi**													
4.01.4.01.02.05.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 562.000.000,00**	**Rp. 580.000.000,00**		
4.01.4.01.02.05.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor 51 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 11,54% terhadap administrasi perkantoran yang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 90.000.000,00	Rp. 95.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 paket							
							Barang cetakan 13 jenis							
							Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 18 jenis							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 2 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4 5 unit							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Organisasi | **Jumlah Pagu : Rp. 3.794.734.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Langganan surat kabar harian dan majalah 4 jenis, 12 bulan							
							Penggandaan 33.000 lembar							
							Pengiriman dokumen 1 paket							
							surat keluar 2.700 lembar							
							Surat masuk 2.500 lembar							
4.01.4.01.02.05.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja pengelola barang 2 orang	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima	100%	Rp. 140.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Kinerja pengelola kepegawaian 1 orang							
							Kinerja pengelola keuangan 9 orang							
							Kinerja pengelola keuangan danais 8 KPA urusan kelembagaan							
4.01.4.01.02.05.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultansi dan koordinasi dalam dan luar daerah 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait	100%	Rp. 332.000.000,00	Rp. 335.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Makan minum rapat 2.000 os							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Organisasi — **Jumlah Pagu : Rp. 3.794.734.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 250.000.000,00**	**Rp. 60.000.000,00**		
4.01.4.01.02.05.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebeleur sesuai RKBMD 5 jenis	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor sesuai Standar dan Kaidah 100%	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.05.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD (2 unit)	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras	100%	Rp. 95.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD (5 unit)							
4.01.4.01.02.05.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perlengkapan kantor sesuai RKPBMD (10 jenis)	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan	100%	Rp. 55.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.05.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**										**Rp. 50.000.000,00**	**Rp. 60.000.000,00**		
4.01.4.01.02.05.03.004	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pelatihan motivasi 50 orang pegawai	Motivasi kerja pegawai meningkat 100%	Meningkatnya motivasi pegawai	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Organisasi | **Jumlah Pagu : Rp. 3.794.734.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.05.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 137.604.000,00**	**Rp. 150.000.000,00**		
4.01.4.01.02.05.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerjaa Instansi Pemerintah (LKJiP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RKT dan IKU) paling lambat akhir Maret 2018	Nilai LKjIP : A (>80)	Dukungan 4,07% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.604.000,00	Rp. 6.500.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.05.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada seluruh program dan kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 10,9% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 18.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.05.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan 81,39% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi SKPD	100%	Rp. 112.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Organisasi yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website Biro Organsiasi secara kontinyu 100%						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Organisasi | **Jumlah Pagu : Rp. 3.794.734.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						
4.01.4.01.02.05.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 8 program 20 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 3,63% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.500.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.05.19	**PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI**										**Rp. 775.130.000,00**	**Rp. 850.000.000,00**		
4.01.4.01.02.05.19.001	Perumusan Kebijakan Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	75%	Dokumen LKjIP dan PK SKPD 42 dokumen (semua OPD Pemda DIY)	Tersusunnya Kebijakan Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi 100%	Dukungan 100% terhadap peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	100%	Rp. 775.130.000,00	Rp. 850.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Laporan monev RB 1 laporan dan rekomendasi							
4.01.4.01.02.05.21	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI**										**Rp. 2.020.000.000,00**	**Rp. 2.175.000.000,00**		
4.01.4.01.02.05.21.001	Perumusan Kebijakan Standarisasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	1inovasi	Evaluasi SOP Internal SKPD 1 Laporan	Tersusunnya Kebijakan Standarisasi 100%	Dukungan 53,5% terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi (APBD)	100%	Rp. 1.080.000.000,00	Rp. 1.150.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 3.794.734.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							pemeliharaan aplikasi E SHBJ/SB 1 Aplikasi							
							Rapergub SHBJ 1 Rapergub							
							Rapergub Standar Belanja 1 Rapergub							
							Rapergub Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 1 Rapergub							
4.01.4.01.02.05.21.002	Rumusan Kebijakan Pelayanan Umum	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	1inovasi	Hasil seleksi inovasi pelayanan publik 5 penyelenggara pelayanan	Tersusunnya Kebijakan Pelayanan Umum 100%	Dukungan 46,53% Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi (APBD)	100%	Rp. 940.000.000,00	Rp. 1.025.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Jumlah inovasi pelayanan publik yang dibina 10 penyelenggara pelayanan							
							Rekomendasi hasil monev Indeks Kepuasan Masyarakat 9 unsur penilaian							
							Rekomendasi monev kepatuhan Standar Pelayanan 6 komponen							
							Rekomendasi monev Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol — **Jumlah Pagu : Rp. 15.985.750.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**													
4.01.4.01.02.06	**Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol**													
4.01.4.01.02.06.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 5.796.250.000,00**	**Rp. 7.270.000.000,00**		
4.01.4.01.02.06.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	3 Surat kabar harian dan 1 majalah (12 bulan)	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 87,59% terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Rp. 5.195.000.000,00	Rp. 6.300.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Alat tulis kantor (156 jenis)							
							Arsip Inaktif tertata (9000 berkas)							
							Belanja jasa kebersihan kantor (12 bulan)							
							Belanja jasa pemeliharaan taman (12 bulan)							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 (34 unit)							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3 (1 unit)							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 (43 unit)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol | **Jumlah Pagu : Rp. 15.985.750.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 6 (2 unit)							
							Cetak kalender (4 jenis)							
							Cetakan Umum (39 jenis)							
							Jasa keamanan kantor (12 bulan)							
							Jasa pengiriman pos dalam dan luar daerah (12 bulan)							
							Kelestarian Arsip Inaktif (900 m3)							
							Ketertiban Administrasi Pengurusan Naskah Dinas TI Setda (25.000 berkas)							
							Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor (28 jenis)							
							Pembayaran tagihan rekening air 13 langganan, rekening telepon 76 sambungan, listrik 25 sambungan (12 bulan)							
							Pemeliharaan aquarium air laut dan air tawar (4 paket)							
							Penggandaan (12 bulan)							
							Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (12 bulan)							
							PNS Terampil Kearsipan Dinamis (30 orang)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol — **Jumlah Pagu : Rp. 15.985.750.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							PNS Terampil Sisminkada (100 orang)							
4.01.4.01.02.06.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 10 orang pengelola keuangan (12 bulan)	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	Dukungan 0,93% terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi	100%	Rp. 65.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Kinerja 3 orang pengelola barang (12 bulan)							
							Kinerja 3 orang pengelola kepegawaian (12 bulan)							
4.01.4.01.02.06.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan (1 tahun)	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 11,32 terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Rp. 536.250.000,00	Rp. 900.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Perjalanan dinas dalam dan luar daerah tersedia sesuai kebutuhan (1 tahun)							
4.01.4.01.02.06.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 2.093.000.000,00**	**Rp. 2.200.000.000,00**		
4.01.4.01.02.06.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Meubeler sesuai RKBMD (1 jenis)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 23,28% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Rp. 143.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Peralatan sesuai RKBMD (1 jenis)							
							Perlengkapan sesuai RKBMD (7 jenis)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol — **Jumlah Pagu : Rp. 15.985.750.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung bersejarah 4 unit (2.740,85 m²)	Terpeliharanya Rumah dan Gedung Kantor sebesar 100%	Dukungan 11,64% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Gedung kantor 10 unit (10.095,15 m²)							
							Pagar Kepatihan (3.266 m²)							
4.01.4.01.02.06.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biaya retribusi parkir (12 bulan)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%	Dukungan 32,60% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Kelengkapan kendaraan (21 jenis)							
							Kendaraan dinas jabatan (4 unit)							
							Kendaraan dinas/ operasional roda 4 (43 unit)							
							Kendaraan dinas/ operasional roda 6 (2 unit)							
							Kendaraan dinas/operasional roda 2 (34 unit)							
							Kendaraan dinas/operasional roda 3 (1 unit)							
							Kendaraan tidak bermotor sepeda roda 2 (11 unit)							
							Pengecatan kendaraan (12 bulan)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol — **Jumlah Pagu : Rp. 15.985.750.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	BBM untuk operasional genset dan mesin pemotong rumput (12 bulan)	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%	Dukungan 9,78% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan Instalasi air limbah/kotor (53 m^1)							
							Pemeliharaan instalasi air minum/bersih (533 m^1)							
							Pemeliharaan jaringan listrik (12 bulan)							
							Pemeliharaan Meubeler (6 jenis)							
							Pemeliharaan Peralatan Kantor (20 jenis)							
							Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (11 jenis)							
4.01.4.01.02.06.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**										**Rp. 150.000.000,00**	**Rp. 150.000.000,00**		
4.01.4.01.02.06.03.004	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peserta peningkatan motivasi aparatur (125 orang)	Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%	Dukungan 100% terhadap kelancaran peningkatan kapasitas aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 79.000.000,00**	**Rp. 97.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol — **Jumlah Pagu : Rp. 15.985.750.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaiannya kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2019	Nilai LKjIP "A"	Dukungan 5,49% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 19 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 10,97% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD.	1 dokumen laporan	Dukungan 73,67 terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 55.000.000,00	Rp. 68.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%						
4.01.4.01.02.06.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 19 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 9,87% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 9.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.25	**PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN**										**Rp. 2.960.000.000,00**	**Rp. 3.600.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol — **Jumlah Pagu : Rp. 15.985.750.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.25.001	Penyelenggaraan Layanan Kerumahtanggan Pimpinan dan Tamu	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	82skor	Alat-alat/perlengkapan 23 jenis	Terselenggaranya layanan kerumahtanggan kepada pimpinan dan tamu sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 100% terhadap pencapaian kualitas layanan kerumahtanggaan pimpinan dan tamu sesuai dengan standar pelayanan	100%	Rp. 2.960.000.000,00	Rp. 3.600.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Makanan dan minuman tamu 5 jenis							
							Pakaian Kerja Lapangan pengemudi 15 stel							
							Pakaian Kerja Lapangan pramuladi 20 stel							
							Pegawai Non PNS (3 orang PTT dan 32 orang pegawai kontrak Non PNS) 35 orang							
							Pemeliharaan bangunan bersejarah 9 unit							
							Pemeliharaan meubeleur 6 jenis							
							Pemeliharaan perlengkapan kantor 5 jenis							
							Pengisian tabung Damkar 4 jenis							
							Pengisian tabung gas 12 kg 60 kali							
							Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 14 jenis							
							Sewa kendaraan 12 bulan							
							Sewa peralatan dan perlengkapan kantor 10 jenis							
							Sewa tanaman 696 buah							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol — **Jumlah Pagu : Rp. 15.985.750.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.26	**PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN**										**Rp. 2.600.000.000,00**	**Rp. 2.750.000.000,00**		
4.01.4.01.02.06.26.001	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	82skor	Cetak undangan upacara/acara lainnya 5.000 set	Terselenggaranya layanan keprotokolan kepada pimpinan dan tamu sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 100% terhadap pencapaian kualitas keprotokolan terhadap pimpinan dan tamu yang memuaskan	100%	Rp. 2.600.000.000,00	Rp. 2.750.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Entertainment 12 bulan							
							Executive lounge concordia 1.200 pax							
							Guide/penerjemah 96 oh							
							Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS 5 orang							
							Makanan dan minuman rapat 900 os							
							Pakaian petugas protokol 3 jenis							
							Pembaca doa 60 oh							
							Pengawalan jalan raya 380 oh							
							Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan							
							Perlengkapan petugas protokol 3 jenis							
							Petugas dimas diajeng 36 orang							
							Ruangan VIP concordia 100 ruang							
							Table Manner Course untuk Ketua dan Anggota DPRD DIY beserta Pejabat Eselon II di Lingkup Pemda DIY 150 pax							
							Upacara PHBN 9 upacara							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol — **Jumlah Pagu : Rp. 15.985.750.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Upacara/Acara lainnya 34 kali							
4.01.4.01.02.06.27	**PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT**										**Rp. 2.307.500.000,00**	**Rp. 3.100.000.000,00**		
4.01.4.01.02.06.27.001	Pembinaan Kemitraan Kehumasan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Pemda	276936pengunjung	Meningkatnya networking Bakohumas Daerah 60 orang	Pembinaan kemitraan kehumasan di DIY sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 25,31% terhadap kelancaran peningkatan jumlah pengakses informasi Pemda	100%	Rp. 538.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Meningkatnya networking public relation Pemerintah dan swasta 60 orang							
							Meningkatnya wawasan ASN di bidang kehumasan 90 orang							
							Naskah Sambutan Pimpinan 1.000 sambutan							
							Penyebarluasan informasi melalui Pawai Pembanguan 1 kegiatan							
4.01.4.01.02.06.27.002	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Pemda	276936pengunjung	Penyebarluasan informasi melalui media cetak/online/medsos 27 kali	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Pemda DIY sesuai standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 49,16% terhadap kelancaran peningkatan jumlah pengakses informasi Pemda	100%	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang 150 buah							
							Penyebarluasan informasi melalui media radio 18 kali							
							Penyebarluasan informasi melalui media SPD Jogjawara 9.100 eksemplar							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol — **Jumlah Pagu : Rp. 15.985.750.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penyebarluasan informasi melalui media TV 25 kali							
4.01.4.01.02.06.27.003	Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Pemda	276936pengunjung	Analisis Media Management (IMM) 1 tahun	Pembinaan kemitraan antara Pemda DIY dengan Media dan Pers sebesar 100%	Dukungan 25,52% terhadap kelancaran peningkatan jumlah pengakses informasi Pemda	100%	Rp. 519.500.000,00	Rp. 800.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Optimalisasi jejaring media dan pers 1 tahun							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat — **Jumlah Pagu : Rp. 5.215.085.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**													
4.01.4.01.02.07	**Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat**													
4.01.4.01.02.07.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 232.057.000,00**	**Rp. 289.000.000,00**		
4.01.4.01.02.07.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor 40 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 24,68% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 57.285.000,00	Rp. 59.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							Barang Cetakan 8 jenis							
							Barang Penggandaan 12300 lembar	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%						
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu 3 unit							
							Buku Referensi/Peraturan Perundangan 1 paket							
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 jenis							
							Surat Kabar 2 jenis							
							Surat Keluar 5500 surat							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat — **Jumlah Pagu : Rp. 5.215.085.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Surat Masuk 2160 surat							
4.01.4.01.02.07.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 12,09% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 28.072.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
4.01.4.01.02.07.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah : 12 bulan /1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 63,21% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 146.700.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah : 12 bulan /1 tahun							
							Makanan dan Minuman Sidang : 2000 orang							
4.01.4.01.02.07.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 170.134.000,00**	**Rp. 148.000.000,00**		
4.01.4.01.02.07.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan Air Conditioner = 1 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 39,08% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 66.500.000,00	Rp. 68.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat | **Jumlah Pagu : Rp. 5.215.085.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengadaan Alat-Alat Studio = 1 jenis							
							Pengadaan Komputer = 4 jenis							
							Pengadaan Mesin Ketik = 1 jenis							
4.01.4.01.02.07.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMD terpelihara : 3 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 8,36% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 82.934.000,00	Rp. 80.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.07.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMD Terpelihara : 8 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMD	100%	Rp. 20.700.000,00	Rp. 0,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.07.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 56.025.000,00**	**Rp. 60.500.000,00**		
4.01.4.01.02.07.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai LKjIP SKPD Skor A	Dukungan 6,60% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.700.000,00	Rp. 4.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat — **Jumlah Pagu : Rp. 5.215.085.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.07.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan 12,49% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.500.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.07.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1). Forum OPD 2). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 3). Dokumen Perencanaan Renja 2020 4). Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2019 5). Rencana Strategis 2017-2022	Tersusunnya dokumen perencanaan dan informasi pendukung 100%	Dukungan 69,61% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 39.000.000,00	Rp. 42.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.07.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 11,28% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 6.325.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.07.37	**PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT**										**Rp. 381.262.000,00**	**Rp. 880.000.000,00**		
4.01.4.01.02.07.37.003	Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa/Kelurahan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rumusan Bahan Kebijakan Rekayasa Sosial Masyarakat yang Ditindaklanjuti	0kebijakan	Pembinaan Kelompok Masyarakat desa melalui model Global Gotong Royong 2 desa	Terbentuk dan terbinanya 8 kelompok Masyarakat Desa model Global Gotong Royong dan Segoro Amarto	Terbentuknya kelompok masyarakat desa dengan model Global Gotong Royong	100%	Rp. 381.262.000,00	Rp. 880.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat — **Jumlah Pagu : Rp. 5.215.085.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pembinaan Kelompok Masyarakat desa melalui model segara amarta 6 kelurahan		Terbentuknya kelompok masyarakat desa dengan model Segara Amarta	100%				
4.01.4.01.02.07.38	**PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MASYARAKAT**										**Rp. 980.000.000,00**	**Rp. 1.600.000.000,00**		
4.01.4.01.02.07.38.001	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rumusan Bahan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	0kebijakan	Kajian optimalisasi pelayanan PMKS melalui Camp Asessment 1 Dokumen Kebijakan	Tersusunnya rumusan bahan kebijakan peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat 100%	Dukungan pada Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	100%	Rp. 980.000.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Badan Hukum BUMDes 1 Dokumen							
							Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kampung KB 1 Dokumen							
							Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Peran CSR Dalam Penanganan PMKS 1 Dokumen							
							Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pelindungan Anak 1 Dokumen							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat											Jumlah Pagu : Rp. 5.215.085.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bina Keluarga Lansia 1 Dokumen							
							Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Perempuan Dalam Politik 1 Dokumen							
							Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu 1 Dokumen							
							Penyusunan Kajian Indeks Ketahanan Keluarga 1 Dokumen Kebijakan							
							Penyusunan Need Assessment dalam rangka penurunan angka kemiskinan di 9 lokasi 1 Dokumen Kebijakan							
							Penyusunan Pergub Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak 1 Dokumen Kebijakan							
4.01.4.01.02.07.41	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA**										**Rp. 3.395.607.000,00**	**Rp. 4.037.668.910,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat | **Jumlah Pagu : Rp. 5.215.085.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.07.41.003	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Daerah IStimewa Yogyakarta	Rumusan Bahan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Sumberdaya Manusia	0kebijakan	BBGRM dan HKG PKK Tk Provinsi 1 paket	Terlaksananya Fasilitasi lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan di DIY sesuai dengan rencana kegiatan 100%	Dukungan terhadap Penguatan 4 Jenis Lembaga Kemasyarakatan	100%	Rp. 3.395.607.000,00	Rp. 4.037.668.910,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							Fasilitasi Pokjanal Posyandu Tk. Provinsi 1 paket							
							Fasilitasi TMMD 15 lokasi							
							Pembinaan Desa/Kelurahan melalui Lomba Desa/Kelurahan 1 paket							
							Penguatan TP PKK 1 paket							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual — **Jumlah Pagu : Rp. 9.771.795.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**													
4.01.4.01.02.08	**Biro Bina Mental Spiritual**													
4.01.4.01.02.08.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 232.057.000,00**	**Rp. 269.000.000,00**		
4.01.4.01.02.08.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor 40 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 24,68% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 57.285.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Barang Cetakan 8 jenis							
							Barang Penggandaan 12300 lembar							
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu 2 unit							
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu 3 unit							
							Buku Referensi/Peraturan Perundangan 1 paket							
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 jenis							
							Surat Kabar 2 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual | **Jumlah Pagu : Rp. 9.771.795.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Surat Keluar 5500 surat							
							Surat Masuk 2160 surat							
4.01.4.01.02.08.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 12,09% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 28.072.000,00	Rp. 29.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
4.01.4.01.02.08.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah : 12 bulan /1 tahun	Kelancaran koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 63,21% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 146.700.000,00	Rp. 180.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah : 12 bulan /1 tahun							
							Makanan dan Minuman Sidang : 2000 orang							
4.01.4.01.02.08.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 170.134.000,00**	**Rp. 177.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual — **Jumlah Pagu : Rp. 9.771.795.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.08.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan Peralatan Komputer = 3 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 39,08% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 66.500.000,00	Rp. 70.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Pengadaan Perlengkapan kantor = 1 jenis							
4.01.4.01.02.08.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMD terpelihara : 2 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 48,74% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 82.934.000,00	Rp. 85.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMD terpelihara : 4 unit							
4.01.4.01.02.08.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMD Terpelihara : 8 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 100%	Dukungan 12,16% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 20.700.000,00	Rp. 22.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 56.025.000,00**	**Rp. 61.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual — **Jumlah Pagu : Rp. 9.771.795.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.08.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai LKjIP SKPD Skor A dari 79 menjadi 80	Dukungan 6,60% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.700.000,00	Rp. 4.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.08.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan 12,49% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.000.000,00	Rp. 8.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.08.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1). Forum OPD 2). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 3). Dokumen Perencanaan Renja 2020 4). Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2019 5). Rencana Strategis 2017-2022	Tersusunnya dokumen perencanaan Biro Bina Mental Spiritual dan informasi pendukung 100%	Dukungan 69,61% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 39.000.000,00	Rp. 42.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.08.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 11,28% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 6.325.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual — **Jumlah Pagu : Rp. 9.771.795.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.08.48	**PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN**										**Rp. 8.674.070.000,00**	**Rp. 13.768.885.000,00**		
4.01.4.01.02.08.48.001	Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2buah	Kajian feasibilitas pembentukan embarkasi haji di DIY	Tersusunnya rumusan bahan kebijakan bina mental dan sarana keagamaan 100%	Dukungan 4,27% terhadap Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	100%	Rp. 370.185.000,00	Rp. 165.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
					Terlayaninya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4layanan								
4.01.4.01.02.08.48.002	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Jakarta	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2buah	Penyelenggaraan festival keagamaan dan pengiriman kontingen ke Tingkat Nasional STQ (perolehan dari 2 piala menjadi 4 piala)	Terfasilitasinya penyelenggaraan festival keagamaan 100%	Dukungan 23,69% terhadap jumlah layanan lembaga keagamaan	100%	Rp. 2.054.640.000,00	Rp. 2.354.640.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
					Terlayaninya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4layanan	Penyelenggaraan festival keagamaan Pesparani Tingkat DIY (kontingen Pesparani yang berkualitas)							
							Penyelenggaraan festival keagamaan Utsawa Dharma Gita Tingkat DIY (kontingen Utsawa Dharma Gita yang berkualitas)							
4.01.4.01.02.08.48.003	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2buah	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 8 lembaga dan 50 tempat ibadah	Pembinaan mental dan rohani yang optimal 100%	Dukungan 72,05% terhadap jumlah layanan lembaga keagamaan	100%	Rp. 6.249.245.000,00	Rp. 11.249.245.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 9.771.795.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Terlayaninya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4layanan	Pengiriman TPHD (Tim Pendamping Haji Daerah) 29 orang							
							Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan terhadap 5 Agama pada 18 Hari Keagamaan							
4.01.4.01.02.08.49	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT**										**Rp. 396.663.000,00**	**Rp. 440.801.000,00**		
4.01.4.01.02.08.49.001	Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	2buah	Laporan Sektor dan Rekomendasi Sektor Kesehatan 1 Dokumen	Tersusunnya rumusan bahan kebijakan kesehatan masyarakat 100%	Dukungan 100% pada Program Penyusunan Kebijakan Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	100%	Rp. 396.663.000,00	Rp. 440.801.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Penyusunan Kajian Kebijakan Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat 1 Dokumen Kebijakan							
							Penyusunan Kajian Kebijakan Penanganan Stunting 1 Dokumen Kebijakan							
4.01.4.01.02.08.50	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA**										**Rp. 242.846.000,00**	**Rp. 270.327.500,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual | **Jumlah Pagu : Rp. 9.771.795.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.08.50.003	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Manusia	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rumusan Bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	2buah	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan pendidikan berkarakter 1 dokumen	Tersusunnya rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia 100%	Dukungan 100% pada Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia	100%	Rp. 242.846.000,00	Rp. 270.327.500,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perpustakaan SMA dan SMK berstandar nasional 1 dokumen							
							Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan revitalisasi SMK (LSP 1,2,3) 1 dokumen							
							Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan UKS 1 dokumen							
							Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan komitmen daerah tentang pemberian fasilitas atlit daerah berprestasi 1 dokumen							
							Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan minat baca di lingkungan SMK/SMA/SLB 1 dokumen							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 9.771.795.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tata nilai budaya di Perguruan Tinggi 1 dokumen							
							Penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan Inklusi 1 dokumen							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Paniradya Kaistimewan | **Jumlah Pagu : Rp. 1.050.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**													
4.01.4.01.02.09	**Paniradya Kaistimewan**													
4.01.4.01.02.09.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 712.000.000,00**	**Rp. 795.000.000,00**		
4.01.4.01.02.09.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor (27 jenis)	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 25,22% terhadap kelancaran pelayana administrasi kantor yang mendukung tugas dan fungsi skpd	100%	Rp. 72.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
							Barang cetakan (18 jenis)							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda dua (7 unit)							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda empat (10 unit)							
							Buku/ Kepustakaan (1 tahun)							
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2 jenis)							
							Majalah (2 jenis)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Paniradya Kaistimewan | **Jumlah Pagu : Rp. 1.050.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penggandaan (2.000 lembar)							
							Pengiriman dokumen (1 tahun)							
							Peralatan Rumah Tangga (6 jenis)							
							Surat Kabar (3 SKH)							
4.01.4.01.02.09.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (1 orang)	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	Dukungan 39,40% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 290.000.000,00	Rp. 315.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
							Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (1 orang)							
							Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (1 orang)							
							Kinerja pegawai honorer/non PNS/tidak tetap dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (9 orang)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Paniradya Kaistimewan											Jumlah Pagu : Rp. 1.050.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (5 orang)							
							Kinerja perencana dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (1 orang)							
4.01.4.01.02.09.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik (1 tahun)	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 35,38% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan (1 tahun)							
4.01.4.01.02.09.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 304.500.000,00**	**Rp. 335.000.000,00**		
4.01.4.01.02.09.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor (7 jenis)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 31,43% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 62.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Paniradya Kaistimewan											Jumlah Pagu : Rp. 1.050.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.09.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas / operasional roda dua (7 unit)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%	Dukungan 91,03% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 230.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas / operasional roda empat (10 unit)							
4.01.4.01.02.09.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor (5 jenis)	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%	Dukungan 8,97% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 12.500.000,00	Rp. 15.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.09.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 33.500.000,00**	**Rp. 36.500.000,00**		
4.01.4.01.02.09.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP: A	Dukungan 14,77% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.800.000,00	Rp. 5.500.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Paniradya Kaistimewan — **Jumlah Pagu : Rp. 1.050.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.09.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 15,21% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.500.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.09.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD.	1 dokumen laporan	Dukungan 55,74% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 16.700.000,00	Rp. 17.500.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
							ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%						
4.01.4.01.02.09.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 99%	Dukungan 14,28% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 6.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penghubung Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 4.271.219.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**													
4.01.4.01.04.00	**Badan Penghubung Daerah**													
4.01.4.01.04.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 2.034.705.000,00**	**Rp. 2.410.000.000,00**		
4.01.4.01.04.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Arsip Dinamis SKPD 35.000 berkas	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 52,26% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung Kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
							ATK 33 jenis							
							Barang cetakan 6 jenis							
							Barang penggandaan 32.710 lembar							
							Bukti pembayaran air 2 sambungan selama 12 bulan							
							Bukti pembayaran internet 2 jaringan selama 12 bulan							
							Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh selama 12 bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Penghubung Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 4.271.219.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu 11 unit							
							Bukti pembayaran telepon 5 saluran selama 12 bulan							
							Kebersihan Anjungan DIY LT: 6.308m2 ; LB:5.227,5 m2							
							Kebersihan Kantor Menteng LT: 1.420m2 ; LB: 1.087m2							
							Kebersihan mess Pedati LT: 1.200 m2 ; LB: 978 m2							
							Pengiriman 1 tahun							
							Pengisian tabung gas 30 kali							
							Pengisian tabung pemadam kebakaran 10 tabung							
							Peralatan listrik 8 jenis							
							Surat kabar 720 eks							
							Surat keluar 660 lembar							
							Surat masuk 600 lembar							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penghubung Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 4.271.219.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.04.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 2 orang pengelola barang dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 26,74% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 634.705.000,00	Rp. 640.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
							Kinerja 5 orang pengelola website							
							Kinerja1 orang pengelola kepegawaian dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja10 orang pengelola keuangan dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja12 orang keamanan kantor dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
4.01.4.01.04.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak ketiga 100 %	Dukungan 21,01% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 520.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Penghubung Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 4.271.219.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun		Dukungan 21,01% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%				
							Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
4.01.4.01.04.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 479.403.000,00**	**Rp. 441.000.000,00**		
4.01.4.01.04.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 4 jenis	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 3,37% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 144.403.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung sesuai RKBMD ; Anjungan DIY di TMII LB:5.227,5 m2, gedung kantor di Menteng LB: 1.087m2, gedung di Pedati LB: 978 m2 3 unit	Terpeliharanya Rumah dan Gedung Kantor sebesar 100%	Dukungan 1,66% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 75.000.000,00	Rp. 76.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas operasional roda dua 2 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standart sarpras 100 %	Dukungan 5,05% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 230.000.000,00	Rp. 235.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penghubung Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 4.271.219.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kendaraan Dinas Opersional roda empat 8 unit							
4.01.4.01.04.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor sesuai RKPBMD 9 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %	Dukungan 0,66% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 76.850.000,00**	**Rp. 85.300.000,00**		
4.01.4.01.04.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir bulan Februari 2019	Nilai LKJiP SKPD A	Dukungan 4,75% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.650.000,00	Rp. 4.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi anggaran SKPD sesuai dokumen yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 10,15% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penghubung Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 4.271.219.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.04.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan 80,94% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 62.200.000,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
							ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%						
4.01.4.01.04.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran aliran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 95%	Dukungan 4,16% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.200.000,00	Rp. 3.500.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.43	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH**										**Rp. 620.261.000,00**	**Rp. 610.000.000,00**		
4.01.4.01.04.00.43.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penginapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	85angka indeks	Sarana prasarana penginapan sebanyak32 jenis	terpenuhinya sarana dan prasarana penginapan sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 27,61% terhadap fasilitas layanan Kaperda terhadap masyarakat DIY di Jakarta	100%	Rp. 160.261.000,00	Rp. 180.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penghubung Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 4.271.219.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.04.00.43.002	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	85angka indeks	Tamu yang memberikan apresiasi positif terhadap pelayanan 85%	Terselenggaranya layanan kepada pimpinan dan tamu sesuai standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 44,83 % terhadap layanan Kaperda yang mendukung pelayanan	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 270.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.43.003	Pelayanan Informasi dan Koordinasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	85angka indeks	Rekomendasi rencana aksi 2 rekomendasi	Terselenggaranya layanan informasi dan koordinasi sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 27,56% terhadap layanan Kaperda yang mendukung pelayanan	100%	Rp. 160.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.45	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PROMOSI POTENSI DAN SENI BUDAYA**										**Rp. 1.060.000.000,00**	**Rp. 1.180.000.000,00**		
4.01.4.01.04.00.45.001	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah			Peserta promosi potensi daerah yang ingin mengikuti kembali even yang sama 83%	Perluasan jaringan pemasaran potensi daerah yang sesuai standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 76,25% terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan promosi potensi daerah	100%	Rp. 810.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.45.002	Promosi Seni dan Budaya Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Perwakilan Daerah			Sampel audience promosi seni budaya daerah yang tertarik terhadap Yogyakarta 78%	Terlaksananya promosi seni dan budaya daerah sesuai standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 23,75% terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan event seni dan budaya	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD | **Jumlah Pagu : Rp. 69.440.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**													
4.02.4.01.06.00	**Sekretariat DPRD**													
4.02.4.01.06.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 4.310.000.000,00**	**Rp. 4.743.254.450,00**		
4.02.4.01.06.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor (30 jenis)	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 51,27 % terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran OPD	100 %	Rp. 2.200.000.000,00	Rp. 2.461.881.400,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Barang cetakan (22 jenis buku)							
							General Check Up pimpinan dan anggota DPRD (55 orang)							
							Jumlah Surat Keluar (2500 surat)							
							Jumlah Surat Masuk (2500 surat)							
							Kebersihan gedung kantor 163.932m2 (12 bulan)							
							Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor (12 bulan)							
							Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional (39 unit)							
							Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan 300m3 (12 bulan)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 69.440.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) 375 Kwh (12 bulan)							
							Pembayaran SMS gateway 1 nomor telephone (12 bulan)							
							Penggandaan (7 materi/bahan)							
							Pengiriman dokumen (12 paket)							
							Retribusi sampah perkotaan (12 bulan)							
							Tertatanya arsip aktif dan dinamis (5 bagian)							
4.02.4.01.06.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	Dukungan 34,74 % terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran OPD	100 %	Rp. 1.510.000.000,00	Rp. 1.668.079.050,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)							
							Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (9 orang)							
							Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (25 orang)							
							Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (2 orang)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD — **Jumlah Pagu : Rp. 69.440.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (5 orang)							
4.02.4.01.06.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik (1 tahun)	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 13,99 % terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran OPD	100 %	Rp. 600.000.000,00	Rp. 613.294.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan (1 tahun)							
4.02.4.01.06.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 2.045.000.000,00**	**Rp. 5.559.297.150,00**		
4.02.4.01.06.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor (13 jenis)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 37,17 % terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	100 %	Rp. 645.000.000,00	Rp. 2.107.160.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.4.01.06.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%			Dukungan 36,69 % terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 2.079.955.350,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan Gedung kantor 4 Unit	Terpeliharanya Rumah dan Gedung Kantor sebesar 100%						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Sekretariat DPRD											**Jumlah Pagu : Rp. 69.440.000.000,00**			
Nomor	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**	
					Hasil Program		**Keluaran Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**SKPD**	**Jenis Kegiatan**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**1/2/3**	**1/2/3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
4.02.4.01.06.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMD (12 unit)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%	Dukungan 15,54 % terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	100 %	Rp. 750.000.000,00	Rp. 881.334.300,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMD (27 unit)							
4.02.4.01.06.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor (5 jenis)	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%	Dukungan 8,66 % terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 490.847.500,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Perlengkapan Gedung Kantor (3 jenis)							
4.02.4.01.06.00.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**										**Rp. 150.000.000,00**	**Rp. 412.500.000,00**		
4.02.4.01.06.00.03.004	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengiriman Peserta Pelatihan Pengembangan SDM (150 Orang)	Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%	Dukungan 100% terhadap capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 412.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.4.01.06.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 255.000.000,00**	**Rp. 339.717.950,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD | **Jumlah Pagu : Rp. 69.440.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.01.06.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP "A"	Dukungan 7,73 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 26.257.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.4.01.06.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 21,60 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 73.361.750,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.4.01.06.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	1 dokumen	Dukungan 63,57 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	Rp. 155.000.000,00	Rp. 215.974.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD | **Jumlah Pagu : Rp. 69.440.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.01.06.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 23 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,10 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 24.125.200,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.4.01.06.00.15	**PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**										**Rp. 34.560.000.000,00**	**Rp. 48.108.680.400,00**		
4.02.4.01.06.00.15.001	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya (55 orang, 4 kali)	Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %	Dukungan 8,18 % terhadap capaian Kinerja DPRD DIY	100%	Rp. 2.440.000.000,00	Rp. 3.936.455.600,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.4.01.06.00.15.002	Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	Keputusan DPRD tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY 1 dokumen	Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%	Dukungan 9,37 % terhadap capaian Kinerja DPRD DIY	100%	Rp. 2.537.000.000,00	Rp. 4.509.983.500,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS 2020 2 dokumen							
							Nota kesepakatan bersama KUPA & PPAS 2019 2 dokumen							
							Persetujuan bersama Raperda APBD 2020 1 dokumen							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD | **Jumlah Pagu : Rp. 69.440.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Persetujuan bersama Raperda APBD P 2019 1 dokumen							
							Persetujuan bersama Raperda Pertangg Pelaks APBD 2018 1 dokumen							
4.02.4.01.06.00.15.004	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	Dokumen audio visual DPRD (4 komisi)	Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 78,73 % terhadap capaian Kinerja DPRD DIY	100%	Rp. 28.008.000.000,00	Rp. 37.874.419.550,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Dokumentasi 40 bahan acara sebagai dokumen politik yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan							
							Jumlah produk hukum yang dibahas (17 keputusan hasil pansus/panja/AKD)							
							Laporan hasil delegasi DPRD (3 laporan)							
							Laporan hasil kerja Badan Kehormatan (1 laporan x 3 masa sidang)							
							Laporan hasil kerja DPRD (1 laporan)							
							Laporan hasil kerja komisi kepada pimpinan dewan (3 masa sidang x 4 komisi)							
							Laporan Hasil Konsultasi/koordinasi Badan kehormatan keluar daerah (5 laporan)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 69.440.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Laporan hasil konsultasi/koordinasi Banmusy ke luar daerah (5 laporan)							
							Laporan hasil koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah (2 laporan x 4 Komisi)							
							Laporan hasil kunjungan kerja (4 laporan x 4 Komisi)							
							Laporan hasil pendampingan mitra kerja (2 laporan x 4 Komisi)							
							Laporan komisi hasil pembahasan : RAPBD 2020; RAPBD P 2019; KUA-PPAS 2020; KUPA-PPAS Perubahan 2020; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran (6 Laporan x 4 komisi)							
							Pembentukan Alat Kelengkapan Tetap DPRD (5 Kepwan)							
							Pengawasan komisi dengan peninjauan dalam daerah (25 kali)							
							Penyusunan Tata Tertib (1 Perwan)							
							Program Kerja DPRD (2 keputusan Program Kerja DPRD)							
							Review jadwal kegiatan DPRD (12 Bulan)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Sekretariat DPRD											**Jumlah Pagu : Rp. 69.440.000.000,00**			
Nomor	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**	
					Hasil Program		**Keluaran Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**SKPD**	**Jenis Kegiatan**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**1/2/3**	**1/2/3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
							Seleksi Anggota baru KIP periode 2019-2022 (1 rekomendasi)							
4.02.4.01.06.00.15.005	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	Pandangan Umum fraksi (140 PU fraksi)	Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%	Dukungan 3,72 % terhadap capaian Kinerja DPRD DIY	100%	Rp. 1.575.000.000,00	Rp. 1.787.821.750,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Pendapat Akhir fraksi (140 PU fraksi)							
							Surat Rekomendasi fraksi (20 Rekomendasi penunjukan anggota alat kelengkapan DPRD dan kebijakan politik lainnya)							
4.02.4.01.06.00.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH**										**Rp. 10.545.000.000,00**	**Rp. 10.059.486.250,00**		
4.02.4.01.06.00.16.001	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	Draft Raperda Inisiatif 5 naskah akademik dan 5 draft raperda inisiatif DPRD	Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%	Dukungan 49,94 % terhadap capaian pengembangan regulasi daerah	100%	Rp. 6.190.000.000,00	Rp. 6.894.542.050,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Kajian/harmonisasi terhadap 16 raperda							
							Kepwan Propemperda/is 2 keputusan							
							Laporan hasil konsultasi/koordinasi Bapemperda keluar daerah 5 laporan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD — **Jumlah Pagu : Rp. 69.440.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.01.06.00.16.002	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD DIY	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	Rekomendasi tindak lanjut pengawasan DPRD (8 Rekomendasi DPRD DIY hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dewan)	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%	Dukungan 12,18 % terhadap capaian pengembangan regulasi daerah	100%	Rp. 715.000.000,00	Rp. 1.681.428.100,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.4.01.06.00.16.003	Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	1. Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD (6 Dokumen)	Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%	Dukungan 10,74 % terhadap capaian pengembangan regulasi daerah	100%	Rp. 1.240.000.000,00	Rp. 1.483.516.100,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							2. Kajian Pertimbangan Kebijakan DPRD (8 Dokumen) a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Ekonomi Dan Keuangan c. Bidang Pembangunan d. Bidang Kesejahteraan Rakyat							
4.02.4.01.06.00.16.004	Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	Buku perpustakaan 6 jenis.	Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%	Dukungan 17,81 % terhadap capaian pengembangan regulasi daerah	100%	Rp. 2.400.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Majalah 5 jenis,							
							Penataan dokumentasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD (12 bulan),							
							Penyebarluasan informasi produk hukum (6 produk hukum untuk mendukung kinerja dewan),							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Sekretariat DPRD											**Jumlah Pagu : Rp. 69.440.000.000,00**			
Nomor	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**	
					Hasil Program		**Keluaran Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**SKPD**	**Jenis Kegiatan**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**1/2/3**	**1/2/3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
							Sosialisasi/publik hearing produk hukum DPRD (4 produk hukum DPRD),							
							Surat kabar harian 8 jenis,							
4.02.4.01.06.00.18	**PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN**										**Rp. 17.575.000.000,00**	**Rp. 23.540.675.400,00**		
4.02.4.01.06.00.18.001	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	80%	Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia (5 pertemuan pimpinan sewan),	Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%	Dukungan 54,96% terhadap capaian peningkatan kehumasan dan keprotokolan	100%	Rp. 10.740.000.000,00	Rp. 12.938.099.900,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 laporan sebagai bahan referensi pengambilan keputusan,							
							Layanan rapat paripurna istimewa DPRD (Rapur Istimewa Rutin 5 kl, Rapur Istimewa Pelantikan Pimpinan 1 kl,							
							Layanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan DPRD (1 tahun)							
							Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD 330 stel,							
							Pendampingan eksekutif ke luar negeri sebagai bahan referensi pengambilan keputusan (10 laporan)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD | **Jumlah Pagu : Rp. 69.440.000.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Rapur Istimewa Pelantikan Anggota 1 kl (7 kali),							
4.02.4.01.06.00.18.002	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	80%	Membentuk jejaring kerja dan komunikasi bagi terpenuhinya jejaring kemitraan dengan media massa 4 Stakeholders	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 20,20% terhadap capaian peningkatan kehumasan dan keprotokolan	100%	Rp. 2.940.000.000,00	Rp. 4.755.740.550,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Olahraga Persahabatan 3 team							
							Publikasi aktivitas kinerja DPRD dan Hasil kerja DPRD melalui media massa 10 jenis sarana media							
4.02.4.01.06.00.18.003	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	80%	Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat 660 Lokasi	Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%	Dukungan 24,84 % terhadap capaian peningkatan kehumasan dan keprotokolan	100%	Rp. 3.895.000.000,00	Rp. 5.846.834.950,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/ unjuk rasa 22 Laporan							
							Laporan sarasehan/coffee morning/openhouse 2 laporan							
							Rekomendasi kaukus parlemen perempuan DIY 1 rekomendasi							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat — **Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.03	**INSPEKTORAT**													
4.03.4.01.07.00	**Inspektorat**													
4.03.4.01.07.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 1.581.257.000,00**	**Rp. 1.750.000.000,00**		
4.03.4.01.07.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor 13 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 29,72% terhadap tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 436.593.000,00	Rp. 750.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							Barang cetakan 9 jenis							
							Jasa kebersihan gedung kantor 12 bulan							
							Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor 6 jenis							
							Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2 5 unit							
							Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4 13 unit							
							Paket pengiriman 12 bulan							
							Pembelian Meterai 320 lembar							
							Penggandaan dokumen dokumen 71.300 lembar							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat | **Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengiriman surat khusus/perangko 300 Surat							
							Pengisian tabung pemadam kebakaran 3 buah							
							Peralatam kebersihan dan bahan pembersih 5 jenis							
							Retribusi sampah kantor 12 bulan							
							Tagihan internet up to 2 MBps 12 bulan							
							Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listirk 500 Kwh, rekening air 10 m3 12 bulan							
							Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif 12 bulan							
4.03.4.01.07.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan kantor yang prima 100%	Dukungan 24.09% terhadap tercapainya Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 644.082.000,00	Rp. 500.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							Kinerja 1 orang pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kinerja 1 orang penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja 10 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK							
							Kinerja 2 orang Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja 5 orang pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK							
							Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
4.03.4.01.07.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 49.67% terhadap tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 500.582.000,00	Rp. 500.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat — **Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.01.07.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 18.461.410.000,00**	**Rp. 235.000.000,00**		
4.03.4.01.07.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung Tempat Kerja (3 lantai, 2.502 m2)	Tersedianya gedung tempat kerja 100%	Dukungan 98.35% terhadap tercapainya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 18.284.071.000,00	Rp. 0,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.03.4.01.07.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD 5 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 0,44% terhadap tercapainya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 139.739.000,00	Rp. 200.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD 13 unit							
4.03.4.01.07.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 8 jenis	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 0,12% terhadap tercapainya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 37.600.000,00	Rp. 35.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD 1 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat — **Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.01.07.00.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**										**Rp. 125.660.000,00**	**Rp. 150.000.000,00**		
4.03.4.01.07.00.03.002	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat 5 orang	Tersedianya aparatur pemerintahan yang berkapasitas baik 100%	Dukungan 81,41% terhadap tercapainya meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 101.700.000,00	Rp. 120.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek 4 angkatan 70 orang							
4.03.4.01.07.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun untuk 2 periode @ 50 orang	Tersedianya aparatur pemerintahan yang berkapasitas 100%	Dukungan 21,16% terhadap tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 23.960.000,00	Rp. 30.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.03.4.01.07.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 89.263.000,00**	**Rp. 95.162.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat — **Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.01.07.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	Nilai LKjIP : A	Dukungan 1,03% terhadap tercapainya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 1.162.000,00	Rp. 1.162.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.03.4.01.07.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 1,45% terhadap tercapainya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 1.638.000,00	Rp. 4.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.03.4.01.07.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan 73,88% terhadap tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 83.650.000,00	Rp. 85.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat — **Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.01.07.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 19 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 2,48% terhadap tercapainya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.813.000,00	Rp. 5.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.03.4.01.07.00.16	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN**										**Rp. 8.065.982.000,00**	**Rp. 9.040.000.000,00**		
4.03.4.01.07.00.16.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	82%	Evaluasi LKJiP Pemerintah Daerah DIY 41 LHE	Terlaksananya pengawasan internal OPD Pemda DIY 100%	Dukungan 74.65% terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	Rp. 5.692.952.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	82%	Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD 41 Laporan							
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	82%	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 190 LHP							
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	82%	Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 41 Laporan							
							Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY 41 Laporan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat — **Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Peer Review antar Inspektorat Provinsi 2 Laporan							
							Pengelolaan Dana Keistimewaan 2 Laporan							
4.03.4.01.07.00.16.002	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	82%	Survey Kepuasan Masyarakat 1 Laporan	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 100%	Dukungan 15.36 % terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	Rp. 1.437.525.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	82%	Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa 4 Laporan							
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	82%	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2019 1 SK Gubernur							
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	82%	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi 1 Laporan							
							Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah 1 Laporan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Inspektorat											**Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00**			
Nomor	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**	
					Hasil Program		**Keluaran Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**SKPD**	**Jenis Kegiatan**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**1/2/3**	**1/2/3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
							Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018 1 Laporan							
							Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu 4 Laporan							
4.03.4.01.07.00.16.004	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	82%	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota 5 Laporan EKPPD	Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 100%	Dukungan 2,31% terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	Rp. 216.385.000,00	Rp. 350.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	82%								
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	82%								
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	82%								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat | **Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.01.07.00.16.005	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	82%	Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP 4 kali	Terselenggaranya Gelar Pengawasan Daerah dan pemutakhiran data TLHP sesuai standar 100%	Dukungan 3.35% terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	Rp. 313.465.000,00	Rp. 450.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	82%								
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	82%								
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	82%								
4.03.4.01.07.00.16.006	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	82%	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan 95% dari total Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pengawasan 100%	Dukungan 0,29% terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	Rp. 27.230.000,00	Rp. 40.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	82%								
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	82%								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat — **Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	82%								
4.03.4.01.07.00.16.007	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	82%	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus 50 LHP	Terlaksananya pemeriksaan khusus sesuai jumlah kasus 100%	Dukungan 4,04% terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	Rp. 378.425.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	82%								
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	82%								
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	82%								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Wajib**													
1.20	**STATISTIK**													
1.20.4.02.01.00	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**													
1.20.4.02.01.00.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH**										**Rp. 2.125.000.000,00**	**Rp. 2.850.000.000,00**		
1.20.4.02.01.00.15.001	Pengelolaan Data Dan Statistik Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1. Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS 2020: 1 dokumen sebanyak 50 eksemplar 2. Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusuna KUA/PPAS 2020: 1 dokumen sebanyak 50 eksemplar 3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS 2020: 1 dokumen sebanyak 50 eksemplar 4. Analisis IPM per kecamatan sebagai bahan pendukung perencanaan: 1 dokumen sebanyak 50 eksemplar	Tersedianya 4 dokumen analisis untuk mendukung perencanaan	Dukungan 50% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% Dukungan 50% terhadap Tingkat kepuasan pelanggan sebesar 69%	100% 100%	Rp. 1.448.298.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
					Tingkat Kepuasan Pelanggan	69%								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.4.02.01.00.15.002	Penyajian dan Informasi Data Statistik	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1. Penyelenggaran Forum Data : 1 forum 2. Update Aplikasi Jogjadataku : 1 aplikasi 3. Penyelenggaran Simpul Jaringan: 1 forum 4. Update Aplikasi Geoportal DIY: 1 aplikasi	Terwujudnya update Aplikasi Jogjadataku & Aplikasi Geoportal DIY, dan terselenggaranya forum data dan simpul jaringan 100% tepat waktu.	Dukungan 50% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% Dukungan 50% terhadap Tingkat kepuasan pelanggan sebesar 69%	100% 100%	Rp. 676.702.000,00	Rp. 1.050.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
					Tingkat Kepuasan Pelanggan	69%								
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.04	**PERENCANAAN**													
4.04.4.02.01.00	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**													
4.04.4.02.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 2.281.806.000,00**	**Rp. 2.566.646.978,00**		
4.04.4.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Surat keluar : 3.000 surat - Surat masuk : 5.000 surat - Pengiriman dokumen 266 kali - benda pos : 2700 lembar 2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik 12 bulan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaran	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 40,90% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 982.863.000,00	Rp. 1.030.026.978,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Dinas/Operasional Roda 2 sebanyak 7 unit - Pembayaran Pajak/STNK Kendaran Dinas/Operasional roda 4 sebanyak 14 unit 4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor: - Pembersihan kantor BAPPEDA dan UPT BSD 12 bulan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor: - Alat tulis kantor (101 jenis) 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: - Barang cetakan (15 jenis) - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya (153.340 lembar) 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (16 jenis) 8. Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih (19 jenis) 9. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - surat kabar:5 jenis - Buku Ilmu Pengetahuan Umum (1 paket) - Buku Ilmu Pengetahuan & Teknologi (1 paket) - Buku Peraturan perundang-undangan (2 paket) 10. Pengelolaan Arsip Dinamis : - Penataan Arsip (30 m/150 boks) - Penilaian dan Penyusutan Arsip (25 m/125 boks)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan 12 bulan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	Dukungan sebesar 3,14% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 75.547.000,00	Rp. 82.360.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Penyediaan makanan dan minuman rapat 7272 os 2. Pelaksanaan koordinasi / konsolidasi / konfirmasi / konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya 12 bulan	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan sebesar 55,96% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 1.223.396.000,00	Rp. 1.454.260.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 1.179.655.000,00**	**Rp. 1.032.834.000,00**		
4.04.4.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terlaksananya pengadaan: Komputer PC 8 unit, komputer note book 4 unit, printer 4 unit, UPS 13 unit, kamera 2 unit, soundsystem 1 unit, telepon 1 unit, faximili 2 unit, audio set 1 set, Telepon Wireless 1 unit, Meja Kerja 8 unit, kursi kerja staf 8 unit, kursi tunggu tamu 1 unit, sofa tamu kepala 1 unit, almari arsip/filing cabinet 3 unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	Dukungan 38,26% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yant mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 480.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung kantor terpelihara (2 unit)	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	Dukungan 22,32% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 280.000.000,00	Rp. 290.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional: 1. Kendaran dinas roda 4 (14 unit) 2. Kendaran dinas roda 2 (7 unit)	Terpeliharanya kendaraaan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 29,23% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 291.726.000,00	Rp. 397.546.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 1. Jaringan komputer/internet (2 paket) 2. Generator set (1 unit) 3. Komputer PC (60 unit) 4. Printer (30 unit) 5. Komputer note book (18 unit) 6.Mesin tik manual (13 unit) 7. LCD proyektor (7 unit) 8. Sound system (4 unit) 9. Faksimile (2 unit) 10. CCTV (1 unit) 11. AC split (57 unit) 12. AC floor standing (4 unit) 13. Tabung pemadam kebakaran (6 bh) 14. Almari besi, almari, dan filling cabinet (42 bh) 15. Meja Kerja (30 buah) 17. Isi freon AC 5 unit	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	Dukungan 10,20% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yant mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 127.929.000,00	Rp. 145.288.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**										**Rp. 108.460.000,00**	**Rp. 118.306.000,00**		
4.04.4.02.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu: - Penilaian Angka Kredit (2 Kali) - Penerbitan Jurnal (1 kali)	Terlaksananya pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu 100%	Dukungan 100% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100%	Rp. 108.460.000,00	Rp. 118.306.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 492.555.000,00**	**Rp. 520.224.485,00**		
4.04.4.02.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja BAPPEDA (1 dokumen)	Nilai LKJiP A (dari 83,24 menjadi 83,50)	Dukungan 3,32% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 16.335.000,00	Rp. 17.968.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan selama 12 bulan	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan100% tepat waktu	Dukungan 6,55% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 32.256.000,00	Rp. 35.481.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Rencana kerja, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda sejumlah 8 dokumen 2. Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan website bappeda dan jaringan internet) selama 12 bulan 3. Forum Perangkat Daerah 1 kali	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	Dukungan 87,65% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 431.708.000,00	Rp. 453.293.528,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dokumen laporan monev BAPPEDA sejumlah 1 dokumen	Tersusunnya laporan monev BAPPEDA100% tepat waktu	Dukungan 2,49% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 12.256.000,00	Rp. 13.481.457,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.15	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**Rp. 2.113.389.000,00**	**Rp. 2.450.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.15.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100%	1. Dokumen Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2020 Sebagai bahan Konsultasi Publik: 1 dokumen sebanyak 75 buku 2. Dokumen Rancangan RKPD DIY Tahun 2020 Sebagai Bahan Musrenbang: 1 dokumen sebanyak 250 buku 3. Dokumen Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun Sebagai Bahan Pembahasan dengan Tim TAPD: 1 dokumen sebanyak 125 buku 4. Dokumen Penetapan RKPD DIY Tahun 2020 Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2020: 1 dokumen sebanyak 200 buku 5. Dokumen Rancangan Perubahan RKPD DIY Tahun 2019: 1 dokumen sebanyak 75 buku 6. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD DIY Tahun 2019: 1 dokumen sebanyak 125 buku 7. Dokumen Penetapan Perubahan RKPD DIY Tahun 2019 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2019: 1 dokumen sebanyak 200 buku 8. Hasil Musrenbang Sejumlah 1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Gubenur RKPD DIY Tahun 2020 dan perubahan RKPD tahun 2019, 100% Tepat Waktu	Dukunngan 66,67% terhadap persentase perencanaan yang berkualitas sebesar 100% Dukungan 66,67% terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebesar 100%	100%	Rp. 1.777.189.000,00	Rp. 2.050.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100%								
4.04.4.02.01.00.15.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektoral	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100%	1. Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2020 Sebagai Bahan Penghantaran di DPRD :1 dokumen (200 buku) 2. Dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2020 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD :1 dokumen (200 buku) 3. Dokumen Penghantaran KUPA-PPAS Tahun 2019 Sebagai Bahan Pembahasan di DPRD: 1 dokumen (200 buku) 4. Dokumen Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Tahun 2019 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD-Perubahan 2019: 1 dokumen (200 buku)	Tersusunnya Dokumentasi KUA-PPAS Tahun 2020 dan KUPA-PPAS Tahun 2019, 100% tepat waktu	Dukungan 33,33 % terhadap persentase perencanaan yang berkualitas sebesar 100% Dukungan 33,33% terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebesar 100%	100%	Rp. 336.200.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
					Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100%								
4.04.4.02.01.00.16	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN**										**Rp. 750.713.000,00**	**Rp. 1.054.416.440,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.16.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	84.78%	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020 serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 (1 Dokumen) 2. Dokumen Hasil Monev Sektor pertanian dan kelautan (Antara pusat DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020 dan perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2019 (1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang pertanian dan kelautan Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% tepat waktu	Dukungan 41,30% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 84,78%	100%	Rp. 210.281.000,00	Rp. 231.309.650,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.16.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	84.78%	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 Sejumlah 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor Dunia Usaha (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2019 Sejumlah 1 Dokumen 3. Updating aplikasi potensi usaha sejumlah 1 aplikasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub bidang dunia usaha Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% tepat waktu.	Dukungan 54,35% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 84,78%	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 772.029.990,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.16.003	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	84.78%	Dokumen Hasil Monev RAD Pangan dan Gizi (1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi 100% tepat waktu	Dukungan 4,35% persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 84,78%	100%	Rp. 40.432.000,00	Rp. 51.076.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.17	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA**										**Rp. 1.375.000.000,00**	**Rp. 1.825.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.17.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDM	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	89.87%	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 sejumlah 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor SDM (Antara Pusat, DIY dan Kabupaten/Kota) Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2019 sejumlah 1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid SDM Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% Tepat Waktu	Dukungan 34,78% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 89,87%	100%	Rp. 190.000.000,00	Rp. 210.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.17.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesra	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	89.87%	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019 Sejumlah 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor Kesra Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2019 sejumlah 1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid Kesra Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% Tepat Waktu	Dukungan 28,65% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 89,87%	100%	Rp. 479.350.000,00	Rp. 865.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta															
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.17.004	Penanggulangan Kemiskinan Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	89.87%	1. Dokumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY sebagai bahan Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020 1 dokumen 2. Dokumen RAD SDGs DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan untuk mencapai target RAD SDGs DIY Tahun 2020 1 dokumen 3. Dokumen evaluasi CSR/TSLP sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan CSR/TSLP Tahun 2020 (1 dokumen) 4. Pengembangan aplikasi penanggulangan kemiskinan (1aplikasi)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid Kesra Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% Tepat Waktu	Dukungan 26,42% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 89,87%	100%	Rp. 705.650.000,00	Rp. 750.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.18	**PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA**										**Rp. 856.030.000,00**	**Rp. 1.141.995.230,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.18.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	80%	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 (1 dokumen) 2. Dokumen hasil Monev Sektor Perhubungan, infrastruktur wilayah, dan ESDM (Antara Pusat,DIY, Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2019 (1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid perhubungan, infrastruktur wilayah, dan ESDM Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% Tepat Waktu	Dukungan 53,57% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana prasrana sebesar 80%	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.18.003	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	80%	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 (1 dokumen) 2. Dokumen hasil Monev Sektor Tata Ruang dan LH (Antara Pusat,DIY, Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2019 (1 dokumen) 3. Dokumen Neraca Sumber Daya Alam Daerah (1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev subbid Tata Ruang dan LH Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% Tepat Waktu	Dukungan 39,29% terhadap persentase ketercapaian program Pembangunan bidang sarana prasarana sebesar 80 %	100%	Rp. 460.000.000,00	Rp. 231.361.680,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.18.004	PEP RAD Gas Rumah Kaca	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	80%	Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca 100% tepat waktu	Dukungan 7,14% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana prasrana sebesar 80%	100%	Rp. 146.030.000,00	Rp. 160.633.550,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.19	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN**										**Rp. 710.000.000,00**	**Rp. 1.135.108.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.19.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	90.5%	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020 serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 sejumlah 1 dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor Pemerintahan Umum (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2019 sejumlah 1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020 serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% Tepat Waktu	Dukungan sebesar 61,76% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang pemerintahan sebesar 90,50%	100%	Rp. 460.000.000,00	Rp. 852.297.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.19.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	90.5%	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 Sejumlah 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor Administrasi Publik (Antar Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020, dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2019 sejumlah 1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev subbid administrasi publik Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% tepat waktu	Dukungan sebesar 38,24% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang pemerintahan sebesar 90,50%	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 282.811.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah — **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.20	**PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**Rp. 1.859.000.000,00**	**Rp. 2.352.000.000,00**		
4.04.4.02.01.00.20.001	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Capaian Kegiatan SKPD	89%	1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/2018: 1 dokumen dan TWI-III/2019: 3 dokumen (340 buku) 2. Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY s.d 2018: 1 dokumen (75 buku),Evaluasi Hasil RKPD DIY: 1 dokumen (130 buku), Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY s.d. 2018: 1 dokumen (65 buku), Evaluasi Hasil Renja OPD DIY: 1 dokumen (130 buku), Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota 2018: 1 dokumen (25 buku), dan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota: 1 dokumen (24 buku) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan	1. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan daerah tepat waktu sesuai target dan berkualitas 2. Tersedianya 6 dokumen hasil evaluasi tersusun tepat waktu, sbg umpan	Dukungan 50 % terhadap Persentase capaian kegiatan SKPD sebesar 89% Dukungan 50 % terhadap Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	100%	Rp. 1.397.692.500,00	Rp. 1.681.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
					Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	100%	3. Update web Monev APBD (1 paket) dan APBN(1 Paket) 4. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan program strategis tahun 2019 (1 dokumen)	3. Ter-updatenya web monev APBD (1 paket) dan APBN (1 paket) 4. Hasil evaluasi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan & perencanaan yang lebih baik						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.20.002	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Capaian Kegiatan SKPD	89%	1. Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2018: 1 dokumen (150 eks) sesuai dengan PP 3 Tahun 2007 2. Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2018: 1 dokumen (10 eks) sesuai dengan Permenpan 53/2014 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubenur Tahun 2019: 1 dokumen (10 eks) sesuai dengan permenpan 53/2014	1. Tersusunnya Penghantaran LKPJ oleh Gubenur tepat waktu. 2.Terlaporkannya LKj ke Pemerintah Pusat tepat waktu 3. Tersusunnya PK Gubenur tepat waktu	Dukungan 50% terhadap Persentase capaian kegiatan SKPD sebesar 89% Dukungan 50% terhadap Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	100%	Rp. 461.307.500,00	Rp. 671.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
					Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	100%	4. Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2018: 1 dokumen (20 eks) 5. Laporan Kinerja APBN TW IV: 1 dokumen (2018) dan TW I-III: 3 dokumen (2019) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan (20 eks)	4. Tersampaikannya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kab/Kota Tahun 2018 sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Kab/Kota 5.Tersampaikannya laporan kinerja APBN					
4.07	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**													
4.07.4.02.01.00	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**													
4.07.4.02.01.00.16	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										**Rp. 500.000.000,00**	**Rp. 925.303.810,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 14.351.608.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.07.4.02.01.00.16.001	Penelitian Pembangunan Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih untuk Mendukung Pembangunan Daerah	60%	Hasil penelitian sebagai bahan pendukung perencanaan: 2 dokumen sebanyak 100 eksemplar	Tersedianya 2 hasil penelitian untuk mendukung perencanaan 100 %	Dukungan 50% terhadap Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 60%	100%	Rp. 247.519.100,00	Rp. 456.602.960,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.07.4.02.01.00.16.002	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi DIY	Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih untuk Mendukung Pembangunan Daerah	60%	Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah: 1 dokumen	Tersedianya 1 dokumen untuk mendukung perencanaan 100 %	Dukungan 50% terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 60%	100%	Rp. 252.480.900,00	Rp. 468.700.850,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.05	**KEUANGAN**													
4.05.4.03.01.00	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset**													
4.05.4.03.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 10.354.943.000,00**	**Rp. 10.565.315.000,00**		
4.05.4.03.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor 44 jenis	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 65,70% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 6.716.245.000,00	Rp. 6.800.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Barang cetakan 15 jenis							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 21 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4 29 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6 1 unit							
							Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
							Kebersihan gedung kantor 10 gedung, 2 depo							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 jenis							
							Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid 8 jenis, 12 bulan							
							Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan langganan internet 12 bulan							
							Pemilahan arsip keuangan in aktif 5.000 berkas							
							Penggandaan 660.000 berkas							
							Pengiriman dokumen 114 berkas							
							Penjilidan 770 buku							
							Penyusutan arsip keuangan 2.540 berkas							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Surat keluar 13.000 dokumen							
							Surat masuk 7.600 dokumen							
4.05.4.03.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 14 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tyahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 21,73% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.408.198.000,00	Rp. 2.450.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Kinerja 14 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja 64 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
							Kinerja keamanan kantor 20 orang dalam 1 tahun sesuai dengan SPK							
4.05.4.03.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 12,57% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.230.500.000,00	Rp. 1.315.315.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 12 bulan							
4.05.4.03.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 10.892.320.000,00**	**Rp. 2.511.995.658.000,00**		
4.05.4.03.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	DED Rehabilitasi gedung Samsat Pembantu Maguwoharjo1 dokumen DED	Terbangunnya gedung kantor yang dapat dimanfaatkan sesuai standart sarpras 100%	Dukungan 21,62% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.567.350.000,00	Rp. 2.500.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Kanopi tempat parkir, ruang genzet dan mushola KPPD Kulon Progo							
							Pembangunan lift barang, partisi front office, ruang baca perpustakaan, ruang bermain anak, penutup eskalator dan ruang arsip lt2 KPPD Bantul							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebeleur sesuai RKBMD 2 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 39, 42% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.475.470.000,00	Rp. 8.100.658.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Peralatan kantor sesuai RKBMD 5 jenis							
							Perlengkapan kantor sesuai RKBMD 8 jenis							
4.05.4.03.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Depo kantor terpelihara sesuai RKBMD 2 unit	Terpeliharanya bangunan, rumah dan gedung kantor 100 %	Dukungan 8,11% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.202.800.000,00	Rp. 1.225.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Gedung kantor terpelihara sesuai RKBMD 11 unit							
							Mushola terpelihara sesuai RKBMD 1 unit							
							Ruang laktasi terpelihara sesuai RKBMD 1 unit							
							Smoke aroe terpelihara sesuai RKBMD 1 unit							
							Tempat parkir terpelihara sesuai RKBMD 2 unit							
4.05.4.03.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD 26 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai standart sarpras 100 %	Dukungan 5,85% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 879.500.000,00	Rp. 880.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD 27 unit							
							Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD 1 unit							
4.05.4.03.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	AC terpelihara sesuai RKBMD 60 unit selama 12 bulan	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 12,02% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.767.200.000,00	Rp. 1.790.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Jaringan komputer terpelihara sesuai RKBMD 1 jenis selama12 bulan							
							Peralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD 32 jenis selama 12 bulan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKBMDPeralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD 9 jenis selama12 bulan							
4.05.4.03.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 392.633.000,00**	**Rp. 410.200.000,00**		
4.05.4.03.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	LKjIP Tahun 2018 yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, IKU) paling lambat bulan Maret 2019 1 dokumen	LKjIP dengan capaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan dengan nilai : A	Dukungan 2,53% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.4.03.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi keuangan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	laporan keuangan dengan deviasi 5%	Dukungan 6,82% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 27.000.000,00	Rp. 29.700.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.4.03.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum OPD untuk Musrenbang RKPD 1 kali	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 100%	Dukungan 85,86% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 330.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Informasi SKPD yang lengkap akurat dan up to date : 12 bulan							
							Informasi yang sesuai dengan data profil SKPD (profil BUKP, pelayanan KBM dan info publik OPD) 3 materi							
							ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SKPD 100%	Dukungan 4,80% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.633.000,00	Rp. 19.500.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.4.03.01.00.16	**PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH**										**Rp. 2.160.000.000,00**	**Rp. 2.170.000.000,00**		
4.05.4.03.01.00.16.001	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA,2018 disusun paling lambat Maret 2019 2 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 100%	Dukungan 70,97% terhadap laporan keuangan daerah yang akuntabel	100%	Rp. 1.530.000.000,00	Rp. 1.540.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Laporan keuangan Pemda DIY TA.2018 Audited selesai Mei 2019 1 dokumen							
							Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran SKPD selesai Juli 2019 2 dokumen							
							Perda Pertanggungjawaban APBD TA.2018 ditetapkan paling lambat Agustus 2019 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2018 1 dokumen							
4.05.4.03.01.00.16.002	Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	Pengelolaan Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi akrual 1 sistem aplikasi	Terlaksananya Pengelolaan Sistem dan Sumber Daya Pelaporan Keuangan Daerah	Dukungan 29,00% terhadap laporan keuangan daerah yang akuntabel	100%	Rp. 630.000.000,00	Rp. 630.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.4.03.01.00.17	**PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH**										**Rp. 875.000.000,00**	**Rp. 890.000.000,00**		
4.05.4.03.01.00.17.001	Pengendalian Belanja Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Keakuratan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	Dokumen SP2D 120 PA dan KPA diterbitkan 2 hari setelah dokumen SPP/SPM dinyatakan sah, lengkap, dan akurat	Terlaksananya Pengendalian Belanja Daerah 100%	Dukungan 100% terhadap penatausahaan keuangan daerah yang akurat	100%	Rp. 875.000.000,00	Rp. 890.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Gaji yang dikeluarkan dan disampaikan sebelum tanggal 5 tiap bulan 200 bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu memahami penatausahaan keuangan daerah							
							Laporan IWP TA.2019 (Taspen, Taperum dan BPJS kesehatan) sesuai dengan SP2D : 1 laporan							
4.05.4.03.01.00.18	**PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**										**Rp. 2.005.000.000,00**	**Rp. 2.025.000.000,00**		
4.05.4.03.01.00.18.001	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Persentase Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota yang ditindaklanjuti	100%	Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota TA.2020 paling lama 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota TA.2020 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Pengyusunan APBD TA.2020 : 5 Keputusan Gubernur	Terlaksananya Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota 100%	Dukungan 6,91% terhadap pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten	100%	Rp. 140.000.000,00	Rp. 140.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota Ta.2018 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman penyusunan pertanggungjawaban APBD TA.2018 : 5 Keputusan Gubernur							
							Hasil evaluasi perubahan APBD Kab/Kota TA 2019 paling lama 15 hari kerja setelah Raperda PAPBD Kabupaten/Kota TA.2019 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2019 : 5 Keputusan Gubernur							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.18.002	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Persentase Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota yang ditindaklanjuti	100%	keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara, PA dan KPA Dana Dekon/TP Tahun 2020 diterbitkan paling lambat Desember 2019 sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah : 9 Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara, PA/KPA, 22 Keputusan Gubernur tentang penunjukan KPA Dana dekon TA yang tepat dan akurat.	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Prosedur 100%	Dukungan 48,64% terhadap pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten	100%	Rp. 965.000.000,00	Rp. 985.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Pembinaan PPK BLUD : 6 BLUD							
							Peraturan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah (PMK dan Permendagri) : 2 peraturan gubernur tentang Sisdur pengelolaan keuangan daerah							
4.05.4.03.01.00.18.003	Pembinaan BUKP dan BUMD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota yang ditindaklanjuti	100%	Dana bergulir BUKP Rp4.000.000.000,-	Terlaksananya Pembinaan BUKP dan BUMD Sesuai Prosedur 100%	Dukungan 44,44% terhadap pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten	100%	Rp. 900.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Keputusan kepada DPPKA tentang RKAT berdasarkan SE tentang pedoman Penyusunan RKAT 2020 selambat-lambatnya akhir Nopember 2019 : 1 dokumen keputusan							
							Laporan Keuangan Tahunan BUKP TA.2018 dan pembagian laba TA.2018 yang sesuai dengan Keputusan Gubernur : 2 dokumen laporan keuangan BUKP TA.2018 dan laporan pembagian laba BUKP TA.2019 yang tepat dan akurat							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Laporan rasio deviden terhadap penyertaan modal BUKP : dari semula Rp4.591.887.256,86 atau 25,39% (tahun 2018) menjadi sebesar Rp4.821.481.619,70 atau 31,66% (tahun 2019).							
							Penurunan NPL : dari 19,72% (tahun 2018) menjadi 18,00 (tahun 2019)							
							Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY : Rp204.440.000.000,-							
							Penyertaan modal pada PT Taru Martani : Rp34.157.000.000,-							
							Rapat koordinasi BUKP : 5 kali							
							Training peningkatan kapasitas manajemen BUKP : 5 angkatan							
4.05.4.03.01.00.19	**PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH**										**Rp. 3.100.000.000,00**	**Rp. 3.100.000.000,00**		
4.05.4.03.01.00.19.001	Perencanaan Pendapatan Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Persentase Kontribusi Pendapatan Paajak, Retribusi, BUMD, PAD Lain yang Sah Terhadap Belanja Daerah	31.73%	SKPD berpendapatan menyusun perubahan anggaran pendapatan TA.2019 dan anggaran pendapatan TA.2020 tepat waktu dan tepat hitungan : 2 naskah rancangan perubahan anggaran pendapatan 2019 dan anggaran pendapatan 2020	Terlaksananya Perencanaan Pendapatan Daerah Sesuai Standard 100%	Dukungan6,45% terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.4.03.01.00.19.002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Bambanglipuro Bantul Depok Gedang sari Godean Gondokusuman Jetis Kalibawang Nanggulan Pakem Pakualaman Paliyan Piyungan Rongkop Samigaluh Sedayu Semin Sewon Sleman Srandakan Tempel Wates Wonosari	Persentase Kontribusi Pendapatan Paajak, Retribusi, BUMD, PAD Lain yang Sah Terhadap Belanja Daerah	31.73%	1. Regulasi dari pemerintah pusat terkait pungutan pajak daerah ditetapkan paling lambat akhir Desember 2018, sosialisasi pajak daerah, koordinasi dengan SKPD berpendapatan, razia kendaraan bermotor secara rutin, pelayanan kesamsatan dan SKPD berpendapatan yang prima, penagihan piutang pajak daerah maksimal, data base kendaraan yang akurat dan terkini (up to date). : PAD semula Rp1.650.069.932.213,93 (tahun 2018) menjadi Rp1.872.590.896.121,26 (tahun 2019)	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sesuai Standard 100%	Dukungan 95,05% terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah	100%	Rp. 2.900.000.000,00	Rp. 2.900.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset | **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Koordinasi yang baik dengan pihak ketiga (dealer otomotif dan PT Jasa Raharja) : LLPAD yang sah semula Rp1.773.432.740.847,- (tahun 2018) menjadi Rp1.184.655.350,- (tahun 2019)							
							3. Intensifikasi melalui sosialisasi kepada WP Pusat, koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penerimaan dana transfer dan regulasi pengelolaan dan pelaporan dana transfer, koordinasi SKPD pengelola dana transfer setiap bulan : Dana perimbangan semula Rp2.287.023.595.000,- (tahun 2018) menjadi Rp2.304.371.942.260,- (tahun 2019)							
4.05.4.03.01.00.25	**PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD**										**Rp. 9.215.507.000,00**	**Rp. 9.461.584.000,00**		
4.05.4.03.01.00.25.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840Rupiah	1. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kota Yogyakarta Rp147.100.000.000 (tahun 2018) menjadi Rp166.302.557.231,90,- (tahun 2019) terdiri dari: Sedan: 7.000 unit, Jeep: 3.300 unit, Minibus: 33.000 unit, Bus/Microbus: 773 unit, Truk: 1.852 unit, Pick Up: 5.300 unit, Sepeda motor:: 190.000 unit	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta 100%	Dukungan 81,92% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	100%	Rp. 1.600.000.000,00	Rp. 1.768.800.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920Rupiah	2. Peningkatan Pendapatan pajak daerah dari BBNKB Kota Yogyakarta dari Rp81.084.600.000,- (tahun 2018) menjadi Rp89.386.827.307,39,- (tahun 2019) terdiri dari : Sedan: 610 unit, Jeep: 510 unit, Minibus: 6.000 unit, Bus/microbus: 115 unit, Truck: 100 unit, Pick Up: 630 unit, Sepeda Motor: 20.000 unit							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080Rupiah								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840Rupiah	1 dokumen Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi wajib pajak yang belum mendaftar KPPD Kota Yogyakarta 20.000 WP	Terselenggaranya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta 100%	Dukungan 18,08% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	100%	Rp. 345.000.000,00	Rp. 390.500.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920Rupiah	Penagihan potensi pajak dengan status dimiliki KPPD Kota sebesar Rp1.000.000.000,- dari Data perkiraan potensi wajib pajak dengan status dimiliki 7.000 WP							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080Rupiah	Peningkatan pendapatan dari tertagihnya piutang pajak sebesar Rp5.000.000,- dari data perkiraan piutang pajak KBM Kota Rp20.000.000,-							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.003	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840Rupiah	1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Bantul Rp. 152.570.000.000,- ((Tahun 2018) menjadi Rp173.434.326.482,47 (tahun 2019) terdiri dari: Sedan 6.916 unit, jeep 3.412 unit, station wagon 37.495 unit, bus 144 unit, microbus 718 unit, Truck 4.346 unit, pick up 9.568 unit, sepeda motor 389.968 unit	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul 100%	Dukungan 84,70% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD bantul	100%	Rp. 1.580.750.000,00	Rp. 1.609.750.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920Rupiah	2. Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Bantul semula Rp. 87.904.800.000,- (Tahun 2018) menjadi Rp.96.905.345.492,13 (tahun 2019) terdiri dari :Sedan 994 unit, jeep 536 unit, station wagon 6.656 unit, bus 21 unit, microbus 217 unit, Truck 484 unit, pick up 1.057 unit, sepeda motor 37.197 unit							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.004	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840Rupiah	1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftarsejumlah 14.000 WP	Terlaksanakannya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul 100%	Dukungan 15,30% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Bantul	100%	Rp. 285.700.000,00	Rp. 290.715.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar sebesar Rp93.000.000,-							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya piutang pajak KBM sebesar Rp15.000.000,- dari Data perkiraan piutang KBM : Rp5.000.000.000,-							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki sebesar Rp825.000.000,- dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 10.000 KBM							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000Rupiah								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.25.005	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840Rupiah	1. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB semula Rp49.099.920.000,- (tahun 2018) menjadi Rp56.479.365.111,47 (tahun 2019) terdiri dari : Sedan: 1.619 unit, Jeep: 595 unit, St.Wagon: 10.134 unit, bus/mikrobus: 317 unit, truk: 1.705 unit, pickup: 3.450 unit, sepeda motor: 149.767 unit	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo 100%	Dukungan 84.60% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Kulonprogo	100%	Rp. 1.179.101.000,00	Rp. 1.181.101.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920Rupiah	2. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB semula Rp25.765.200.000,- (tahun 2018) menjadi Rp28.403.290.920,11 (tahun 2019) terdiri dari : Sedan: 217 unit, Jeep: 75 unit, St.Wagon: 1.824 unit, minibus: 20 unit, truck: 180 unit, pick up: 470 unit, sepeda motor: 15.664 unit						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.006	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840Rupiah	1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 10.500 KBM	Terselenggaranya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo 100%	Dukungan 15,40% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Kulonprogo	100%	Rp. 215.719.000,00	Rp. 215.719.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar sebesar Rp93.000.000							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya piutang pajak KBM Rp15.000.000 dari Data perkiraan piutang KBM Rp25.000.000,-							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki sebesar Rp825.000.000 dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 3.400 WP							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000Rupiah							
4.05.4.03.01.00.25.007	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Gunungkidul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840Rupiah	1. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Gunungkidul semula Rp53.300.000.000 (tahun 2018) menjadi Rp59.825.521.070,43 (tahun 2019) terdiri dari: Sedan:1.685 unit, Jeep: 643 unit, St.Wagon: 12.369 unit, Mikrobus: 517 unit, Truck: 2.587 unit, Pick up: 2.245 unit, Sepeda motor: 169.082 unit	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul 100%	Dukungan 84,05% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Gunungkidul	100%	Rp. 1.223.501.000,00	Rp. 1.223.501.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920Rupiah	2. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB Gunungkidul semula Rp26.270.400.000,- (tahun 2018) menjadi Rp28.960.218.193,05 (tahun 2019) terdiri dari: Sedan: 321 unit, Jeep: 541 unit, St.Wagon: 12.106 unit, Micro bus: 44 unit, Truck: 264 unit, Pick Up: 606 unit, Sepeda motor: 18.436 unit)							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080Rupiah							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160Rupiah							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000Rupiah							
4.05.4.03.01.00.25.008	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Gunungkidul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840Rupiah	1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor yang terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 10.500 KBM	Terselenggaranya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul 100%	Dukungan 14,95% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Gunungkidul	100%	Rp. 230.238.000,00	Rp. 233.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar sebesar Rp93.000.000,-							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya piutang pajak KBM sebesar Rp15.000.000,- dari Data perkiraan piutang pajak KBM Rp.25.000.000,-							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki 825.000.000,- dari Data potensi pajak KBM status dimilliliki 3.400 WP							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.009	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840Rupiah	1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB semula Rp292.950.000.000 (2018) menjadi Rp334.814.902.825,19 (tahun 2019) terdiri dari : Sedan: 12.594 unit, Jeep: 6286 unit, Minibus: 67.776 unit, Bus/mikrobus: 1.055 unit, Pick up: 11.298 unit, Light truck 4.044 unit, truck: 236 unit, sepeda motor: 495.345 unit	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman 100%	Dukungan 79,50% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Sleman	100%	Rp. 2.030.000.000,00	Rp. 2.020.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920Rupiah	2. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB semula Rp168.975.000.000 (tahun 2018) menjadi Rp186.276.298.387,94 (tahun 2019) terdiri dari : Sedan: 1.140 unit, Jeep: 790 unit, St.Wagon: 9.430 unit, bus: 15 unit, microbus: 144 unit, truck : 152 unit, sepeda motor: 30.000 unit							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160Rupiah								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.010	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840Rupiah	1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi wajib pajak yang belum mendaftar 25.000 WP	Terselenggaranya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman 100%	Dukungan 20,50% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Sleman	100%	Rp. 525.498.000,00	Rp. 528.498.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920Rupiah	Data potensi PABT dan Air Permukaan sebesar 497.400 M3							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya piutang pajak kendaraan bermotor Rp147.000.000,- dari Data perkiraan piutang pajak kendaraan bermotor Rp147.000.000							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000Rupiah								
4.05.4.03.01.00.27	**PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH**										**Rp. 3.947.676.000,00**	**Rp. 3.954.000.000,00**		
4.05.4.03.01.00.27.001	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%	Perda APBD TA.2020 ditetapkan paling lambat Desember 2019 yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, ASB dan SHBJ dan peraturan perundangan yang berlaku Permendagri) tepat dan akurat 1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sesuai Prosedur 100%	Dukungan 75,02% terhadap APBD dan PAPBD yang tepat dan akurat	100%	Rp. 2.961.676.000,00	Rp. 2.962.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%								
4.05.4.03.01.00.27.002	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%	Perda PAPBD TA.2019 ditetapkan paling lambat September 2019 sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (RPJMD, RKPD Perubahan, KUPA/PPAS, ASB dan SHBJ) tepat dan akurat 1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sesuai Prosedur 100%	Dukungan 18,77% terhadap APBD dan PAPBD yang tepat dan akurat	100%	Rp. 741.000.000,00	Rp. 742.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.27.003	Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%	DPA SKPD disahkan 24 hari kerja setelah APBD TA.2020 yang tepat dan akurat ditetapkan sesuai dengan Perda APBD TA.2020 sejumlah 73 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sesuai Prosedur 100%	Dukungan 6,21% terhadap APBD dan PAPBD yang tepat waktu dan akurat	100%	Rp. 245.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%	DPPA SKPD disahkan 24 hari kerja setelah Perubahan APBD TA.2019 yang tepat dan akurat ditetapkan sesuai dengan Perda Perubahan APBD TA.2019 sejumlah 130 dokumen DPPA PA/KPA							
							SPD PA/KPA diterbitkan satu hari kerja sesuai dengan DPA SKPD TA.2019 yang tepat dan akurat dan telah disahkan sejumlah 120 dokumen SPD PA/KPA							
4.05.4.03.01.00.28	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**										**Rp. 3.176.000.000,00**	**Rp. 3.180.000.000,00**		
4.05.4.03.01.00.28.001	Penatausahaan Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100%	1 Laporan hasil pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai Standard 100%	Dukungan 15,33% terhadap pengelolaan BMD yang sesuai dengan prosedur	100%	Rp. 487.000.000,00	Rp. 487.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							2 Laporan semesteran Barang Milik Daerah							
							Penetapan Status Penggunaan 39 dokumen							
							Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2020 pada minggu keempat bulan Juni 2019 sebanyak 39 dokumen							
4.05.4.03.01.00.28.002	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100%	Penjualan dan penghapusan bangunan gedung kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur sebanyak 5 unit	Terlaksananya Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Sesuai Standard 100%	Dukungan11,71% terhadappengelolaan BMD sesuai dengan prosedur	100%	Rp. 372.000.000,00	Rp. 375.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan keputusan gubernur sebanyak 10 unit kendaraan R2 dan 5 unit kendaraan R4							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset — **Jumlah Pagu : Rp. 47.200.283.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan keputusan gubernur sebanyak 5 jenis							
4.05.4.03.01.00.28.003	Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kab/Kota se DIY	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100%	Asuransi Barang Milik Daerah sebanyak 4 polis	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Sesuai Standard 100%	Dukungan72,96% terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur	100%	Rp. 2.317.000.000,00	Rp. 2.318.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Bukti setor PBB sebanyak 15 STS							
							Rancangan Peraturan Gubernur tentang monitoring dan evaluasi BMD 1 naskah Rapergub							
							Rehabilitasi rumah dinas sebanyak 5 unit							
							Sertifikasi tanah sebanyak 7 dokumen							
							Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sejumlah 32 orang							
4.05.4.03.01.00.29	**PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH**										**Rp. 1.081.204.000,00**	**Rp. 1.102.000.000,00**		
4.05.4.03.01.00.29.001	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	57.14%	Laporan hasil evaluasi pemanfataan barang milik daerah 1 dokumen	Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai prosedur 100%	Dukungan 35,58% terhadap pendayagunaan barang milik daerah yang optimal	100%	Rp. 454.934.000,00	Rp. 475.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Laporan hasil road map pemanfaatan barang milik daerah 1 dokumen							
							Obyek pemanfaatan barang milik daerah 4 obyek							
4.05.4.03.01.00.29.002	Penilaian Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	57.14%	Hasil kajian High Best Use (HBU) Barang Milik Daerah Idle 1 dokumen	TerlaksananyaPenilaian Barang Milik Daerah sesuai standard 100%	Dukungan 64,42% terhadap pendayagunaan barang milik daerah yang optimal	100%	Rp. 626.270.000,00	Rp. 627.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Laporan hasil penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan 6 dokumen							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 17.479.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.06	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**													
4.06.4.04.01.00	**Badan Kepegawaian Daerah**													
4.06.4.04.01.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 2.207.950.000,00**	**Rp. 2.720.000.000,00**		
4.06.4.04.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor 60 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 67,46% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 1.425.640.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Bahan Bacaan (langganan surat kabar) 2 jenis							
							Barang cetakan dan penggandaan 21 jenis							
							Fumigasi 3 ruang arsip							
							Jasa kebersihan kantor 1 tahun							
							Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun							
							Jasa surat menyurat dan paket pengiriman 1 tahun							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 17.479.736.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (roda dua 4 unit dan roda 4 7 unit) 1 tahun							
							Pengelolaan arsip dinamis SKPD 6 bidang							
							Peralatan dan perlengkapan kantor 25 jenis							
							Peralatan rumah tangga 19 jenis							
4.06.4.04.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 15 orang pengelola keuangan, pengelola kepegawaian dan pengelola barang 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 15,90% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 382.310.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Kinerja 9 orang tenaga keamanan kantor/gedung/tempat kerja 1 tahun							
4.06.4.04.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Penyediaan makanan dan minuman (rapat dan tamu) 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 16,64% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 420.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 1 tahun							
4.06.4.04.01.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 1.646.865.000,00**	**Rp. 1.985.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 17.479.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Almari 4 buah	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Dukungan 2,78% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 296.030.000,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Bendera Merah putih 2 buah							
							bendera merah putih kipas 10 buah							
							Bendera merah putih kipas sedang 4 buah							
							Faximili 1 buah							
							Filling Cabinet 4 buah							
							Kursi 80 buah							
							Meja 40 buah							
							Radio Komunikasi 1 buah							
							Rak 5 buah							
							Sofa 4 buah							
							Soundsystem 1 buah							
							umbul umbul 4 buah							
4.06.4.04.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan drainase dan pemasangan conblok 1 paket	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 4,49% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 1.168.123.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan drainase dan pemasangan konblok 1 paket							
							Pemeliharaan instalasi listrik 5 paket							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 17.479.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor BKD 1 tahun							
							Pemeliharaan rutin dan berkala gedung mutasi, pengembangan dan khp 1 paket							
							Pemeliharaan tanaman 1 tahun							
							Penambahan selasar gedung tengah 1 paket							
							Pengecatan gedung arsip 1 paket							
4.06.4.04.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bahan bakar minyak, gas dan pelumas 1 tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 0,48% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 158.100.000,00	Rp. 160.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Jasa service kendaraan dinas/operasional 1 tahun							
							Penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional 1 tahun							
4.06.4.04.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan alat-alat kantor 1 tahun	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 0,08% terhadap peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 24.612.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan mebeleur 1 tahun							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 17.479.736.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengisian tabung pemadam kebakaran 1 tahun							
4.06.4.04.01.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 207.000.000,00**	**Rp. 235.000.000,00**		
4.06.4.04.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 22 kegiatan	Nilai LKjIP : A	Dukungan 5,29% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.4.04.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 22 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 17,62% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.4.04.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan 63,88% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian target kinerja program yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 145.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, Renstra, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 17.479.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 22 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 13,22% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 12.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.4.04.01.00.15	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN**										**Rp. 2.728.940.000,00**	**Rp. 3.600.000.000,00**		
4.06.4.04.01.00.15.001	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	79%	Formasi dan proyeksi kebutuhan pegawai 2 dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur Sesuai Standart 100%	Dukungan 60,33% terhadap perencanaan, pengadaan pegawai dan pengelolaan data kepegawaian	100%	Rp. 1.241.433.000,00	Rp. 2.800.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	80.8%	Rekrutmen Pegawai sesuai formasi 400 orang							
4.06.4.04.01.00.15.002	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	79%	Blue print tata kelola sistem informasi ASN Pemda DIY 1 dokumen	Pengelolaan Sistem Informasi serta Dokumentasi Aparatur Sesuai Standart 100%	Dukungan 39,67% terhadap perencanaan, pengadaan pegawai dan pengelolaan data kepegawaian	100%	Rp. 1.487.507.000,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 17.479.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	80.8%	ID Card PNS Pemda DIY 12.100 ID Card							
							Pegadaan mesin presensi 6 unit							
							Pelatihan pengelola administrasi kepegawaian 1 kali 485 orang							
							Pemeliharaan mesin presensi 248 unit							
							Rekapitulasi data ASN Pemda DIY dan Kabupaten/Kota 12 laporan							
							Sistem informasi aplikasi kepegawian terpelihara dan update 3 aplikasi							
							Validasi data nominatif PNS per OPD 2 kali							
4.06.4.04.01.00.16	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI**										**Rp. 4.836.228.000,00**	**Rp. 6.200.000.000,00**		
4.06.4.04.01.00.16.002	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	80%	SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi jabatan (data PNS yang mengikuti diklat, tugas belajar, ijin belajar, keterangan belajar, ijin luar negeri, ujian dinas dan sekolah kedinasan 150 orang	Terselenggaranya Pengembangan Profesionalisme Aparatur sesuai prosedur 100%	Dukungan 59,59% terhadap peningkatan kualitas SDM dan pengembangan karier pegawai	100%	Rp. 3.172.348.000,00	Rp. 3.700.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 17.479.736.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.01.00.16.003	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	80%	Pengisian Jabatan Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV dan V), dan Kepala Sekolah 1105 jabatan	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur Sesuai Standart 100%	Dukungan 40,41% terhadap peningkatan kualitas SDM dan pengembangan Karier pegawai	100%	Rp. 1.663.880.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Pengisian Jabatan Fungsional 5700 jabatan							
							Pengisian Jabatan Pelaksana 3911 jabatan							
							Pengisian jabatan pimpinan tinggi 1 JPT Madya dan 45 JPT Pratama							
							Perpindahan aparatur (mutasi) PNS 100 PNS							
4.06.4.04.01.00.17	**PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI**										**Rp. 2.590.232.000,00**	**Rp. 1.850.000.000,00**		
4.06.4.04.01.00.17.001	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	89%	Fasilitasi JKK/JKM 10 orang	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur Sesuai Standart 100%	Dukungan 97,75% pembinaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai	100%	Rp. 2.244.398.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Lomba olahraga ASN DIY 4 cabang lomba							
							MTQ ASN DIY (Tartil, Tilawah, Tartil, Dakwah) 4 cabang lomba							
							Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 500 orang							
							Pengiriman Atlit Pornas Korpri 300 orang							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 17.479.736.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Peningkatan kinerja organisasi dan aparatur (hasil penilaian TPP), Sosialisasi dan Bimtek penilaian kinerja aparatur, sosialisasi dan Bimtek TPP, Pendampingan TPP untuk UP di OPD 110 Pegawai							
4.06.4.04.01.00.17.003	Penegakan Disiplin Aparatur	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	89%	Bimtek PNS 150 PNS	Terlaksananya Penegakan Disiplin Aparatur sesuai Prosedur 100%	Dukungan 2,25% terhadap pembinaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai	100%	Rp. 345.834.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin selama 1 tahun 14 kasus							
							Penetapan hukum pegawai 200 surat							
							Pengelolaan LHKPN 100%							
4.06.4.04.01.00.18	**PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**										**Rp. 1.421.499.000,00**	**Rp. 1.450.000.000,00**		
4.06.4.04.01.00.18.001	Pengelolaan Sertifikasi Layanan Mutu	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	77nilai	Alih media kepegawaian ke arsip elektronik 1 paket	Pengelolaan Sertifikasi Layanan Mutu Sesuai Standart 100%	Dukungan 55,79% terhadap peningkatan penatausahaan kepegawaian daerah	100%	Rp. 691.307.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Kartu identitas (karis/karsu dan karpeg) 300 kartu							
							Layanan pelanggan meningkat melalui sertifikasi layanan mutu 1 laporan							
							Pemeliharaan aplikasi arsip 1 aplikasi							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											**Jumlah Pagu : Rp. 17.479.736.000,00**			
Nomor	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**	
					Hasil Program		**Keluaran Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**SKPD**	**Jenis Kegiatan**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**1/2/3**	**1/2/3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
							Tata kelola dokumen kepegawaian perorangan dan kolektif 400 SK							
4.06.4.04.01.00.18.002	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	77nilai	Kenaikan pangkat Akurat dan Tepat Waktu 900 PNS	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun sesuai Prosedur 100%	Dukungan 44,21% terhadap peningkatan penatausahaan kepegawaian daerah	100%	Rp. 730.192.000,00	Rp. 750.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Pembekalan PNS Calon Pensiun BUP 1 Tahun 700 PNS							
							Pemensiunan Pegawai Akurat dan Tepat Waktu 700 PNS							
							Rakor Kenaikan Pangkat Terpadu 2 Periode							
4.06.4.04.01.00.19	**PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI**										**Rp. 1.841.022.000,00**	**Rp. 2.200.000.000,00**		
4.06.4.04.01.00.19.001	Pengukuran Kompetensi Pegawai	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Kompetensi Individu yang Terpetakan	23.09%	Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY 716 orang	Terselenggaranya Pengukuran Kompetensi Pegawai Standart 100%	Dukungan 73,08% terhadap pengelolaan pengukuran kompetensi pegawai	100%	Rp. 1.236.022.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY 260 orang							
							Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi luar DIY 200 orang							
							Simulasi assessment center 1 paket							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah | **Jumlah Pagu : Rp. 17.479.736.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.01.00.19.002	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Pegawai	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Kompetensi Individu yang Terpetakan	23.09%	Kerjasama melalui upaya promosi dan penyelenggaran workshop pengembangan kemitraan 2 kali	Terlaksananya Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Pegawai Sesuai Standart 100%	Dukungan 26,92% terhadap pengelolaan pengukuran kompetensi pegawai	100%	Rp. 605.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Kompetensi sumber daya assessor melalui diklat dan pelatihan 1 tahun 8 orang							
							Pemahaman tentang lembaga sertifikasi profesi 30 orang							
							Kesepakatan kerjasama pengukuran kompetensi 2 kesepakatan							
							Pemenuhan kompetensi pengelola LSP PDN DIY 3 orang							
							Survey IKM dan Survey evaluasi kemitraan 2 laporan							
							Terpublikasinya paper/artikel tentang pelayanan pelanggan pengukuran kompetensi 1 artikel							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan — **Jumlah Pagu : Rp. 12.521.605.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan**													
4.06	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**													
4.06.4.04.02.00	**Badan Pendidikan dan Pelatihan**													
4.06.4.04.02.00.01	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp. 2.220.253.000,00**	**Rp. 2.580.000.000,00**		
4.06.4.04.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor 40 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	100%	Rp. 947.253.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Cetak 13 jenis							
							Jasa Kebersihan 3 asrama, 2 Gedung kantor, 1 Laboratorium, 1 masjid, 2 kelas, 6 rumah dinas, 1 gedung menza							
							KIR kendaraan Roda empat 1 unit							
							Komponen instalasi listrik 23 jenis							
							Langganan surat kabar, majalah, tabloid 12 bulan							
							Pembayaran telepon, listrik, air, dan TV 12 bulan							
							Penggandaan 61.250 lembar							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan | **Jumlah Pagu : Rp. 12.521.605.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengisian tabung pemadam kebakaran 5 buah							
							Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 16 jenis							
							Terbayarnya pajak STNK kendaraan roda dua 6 unit dan roda empat 6 unit							
							Terkelolanya arsip dinamis							
4.06.4.04.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Administrasi surat menyurat dan pengiriman 1 tahun	Tersedianya pelayanan kantor yang prima 100%	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima	100%	Rp. 1.018.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Kinerja pegawai tidak tetap dalam 1 tahun sesuai dengan kontrak 20 orang							
							Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 2 orang							
							Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 2 orang							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan | **Jumlah Pagu : Rp. 12.521.605.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kinerja pengelola Keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 11 orang							
							Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK 15 orang							
4.06.4.04.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait	100%	Rp. 255.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan 1 tahun							
4.06.4.04.02.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp. 868.252.000,00**	**Rp. 3.392.500.000,00**		
4.06.4.04.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembelian AC (2 PK) 3 unit	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	100%	Rp. 80.000.000,00	Rp. 1.575.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	DED Jaringan listrik 1 paket	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor	100%	Rp. 590.000.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							DED pembangunan taman 1 paket							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan | **Jumlah Pagu : Rp. 12.521.605.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Laundry (sprei, gordyn, taplak meja, cover kursi) 35.000 kg							
							Pemeliharaan sumur dalam 1 buah							
							Perawatan taman dan perawatan kebun lingkungan 15.058 meter persegi							
							Perawatan taman lingkungan asrama 28.340 meter persegi							
							Perbaikan atap 160 meter persegi							
							Perbaikan kamar mandi/WC 12 buah							
							Perbaikan lantai 25 meter persegi							
							Perbaikan pintu 12 buah							
							Perbaikan saluran pipa ledeng 9 buah							
							Rehabilitasi pagar 1 paket							
4.06.4.04.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (roda 2 dan roda 4) 12 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras	100%	Rp. 117.152.000,00	Rp. 127.500.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor terpelihara 10 jenis	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan	100 %	Rp. 81.100.000,00	Rp. 90.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan | **Jumlah Pagu : Rp. 12.521.605.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Perlengkapan gedung kantor terpelihara 5 jenis							
4.06.4.04.02.00.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**										**Rp. 174.027.000,00**	**Rp. 190.000.000,00**		
4.06.4.04.02.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan penilaian angka kredit, peningkatan kapasitas SDM aparatur 1 tahun	Tersedianya SDM aparatur yang berkapasitas baik 100%	Peningkatan kapasitas SDM	100%	Rp. 174.027.000,00	Rp. 190.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN**										**Rp. 301.206.000,00**	**Rp. 319.500.000,00**		
4.06.4.04.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 21 kegiatan	Nilai LKjIP : A	Nilai LKjIP	A	Rp. 7.000.000,00	Rp. 8.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan pada 7 program 21 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Deviasi realisasi keuangan SKPD	1%	Rp. 18.206.000,00	Rp. 19.500.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan — **Jumlah Pagu : Rp. 12.521.605.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019	2 dokumen	Rp. 250.000.000,00	Rp. 263.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Update data dan pengelolaan website, SIM Diklat, E-learning secara kontinyu	100%				
4.06.4.04.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 21 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas	100%	Rp. 26.000.000,00	Rp. 29.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.20	**PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN**										**Rp. 5.241.392.000,00**	**Rp. 9.300.000.000,00**		
4.06.4.04.02.00.20.001	Diklat Kepemimpinan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	10%	Diklat Kepemimpinan Tingkat III 80 orang	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat III sesuai standar 100%	Aparatur yang memiliki kompetensi menduduki jabatan Eselon III	100%	Rp. 3.917.000.000,00	Rp. 7.100.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 200 orang		Aparatur yang memiliki kompetensi menduduki jabatan Eselon IV	100%				
4.06.4.04.02.00.20.002	Pelatihan Dasar CPNS	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	10%	Latsar CPNS Golongan II Reguler 40 orang	Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS Sesuai Standard 100%	Aparatur yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS Gol II	100%	Rp. 1.324.392.000,00	Rp. 2.200.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan — **Jumlah Pagu : Rp. 12.521.605.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Latsar CPNS Golongan III Reguler 160 orang		Aparatur yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS Gol III	100%				
4.06.4.04.02.00.21	**PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL**										**Rp. 2.598.475.000,00**	**Rp. 3.970.000.000,00**		
4.06.4.04.02.00.21.001	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	10%	Diklat Bendahara 30 orang	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Sesuai Standard 100%	Aparatur yang kompeten dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	100%	Rp. 1.357.280.000,00	Rp. 2.050.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan DIY 60 orang		Aparatur yang kompeten sebagai Bendahara	100%				
							Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Bendahara 60 orang		Aparatur yang kompeten untuk menduduki jabatan administrator	100%				
							Diklat Pengkaderan Pejabat Administrator 30 orang		Aparatur yang kompeten untuk menduduki jabatan pengawas	100%				
							Diklat Pengkaderan Pejabat Pengawas 30 orang		Aparatur yang memahami ideologi pancasila, wawasan kebangsaaan dan keistimewaan DIY	100%				
							Diklat Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis 30 orang		Aparatur yang mempunyai kemampuan dalam penyusunan perencanaan pengembangan kawasan strategis	100%				

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan — **Jumlah Pagu : Rp. 12.521.605.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.02.00.21.002	Diklat Fungsional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	10%	Diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan 30 orang	Terlaksananya Diklat Fungsional sesuai standar 100%	Aparatur calon pejabat fungsional yang kompeten dan menguasai penyusunan peraturan perundang-undangan	100%	Rp. 1.241.195.000,00	Rp. 1.920.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Diklat Kearsipan 30 orang		Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan kearsipan	100%				
									Aparatur yang kompeten dan menguasai proses penyidikan pegawai negeri sipil	100%				
4.06.4.04.02.00.22	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN**										**Rp. 217.800.000,00**	**Rp. 580.000.000,00**		
4.06.4.04.02.00.22.001	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	81%	Kesepakatan Diklat Kemitraan 10 berita acara	Terlaksananya Promosi Kemitraan diklat 100%	Kesepakatan pengiriman peserta diklat dari luar daerah	100%	Rp. 152.358.000,00	Rp. 340.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Monitoring Diklat Kemitraan 1 laporan							
4.06.4.04.02.00.22.002	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	81%	Pemeliharaan bahan pustaka 12.730 buku	Terlaksananya Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat sesuai standar 100%	Bahan pustaka terpelihara dan bisa dimanfaatkan dengan baik	100%	Rp. 65.442.000,00	Rp. 240.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Penerbitan buletin diklat 4 edisi		Terbitnya buletin diklat sebagai media informasi kediklatan	100%				
4.06.4.04.02.00.23	**PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU**										**Rp. 900.200.000,00**	**Rp. 983.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan — **Jumlah Pagu : Rp. 12.521.605.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.02.00.23.002	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	78indeks survei	Pedoman penyelenggaraan diklat 5 kurikulum	Tersusunnya Kurikulum dan Silabus Diklat sesuai standar 100%	Tersusunnya pedoman penyelenggaraan diklat (kurikulum)	100%	Rp. 180.000.000,00	Rp. 198.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.23.003	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	78indeks survei	Akreditasi lembaga skor 91	Terlaksananya pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat Sesuai Standard 100%	Bandiklat DIY diakui telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2019	100%	Rp. 428.500.000,00	Rp. 470.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Audit eksternal ISO 9001:2015 1 laporan		Tersedianya dokumen pengajuan akreditasi yang lengkap dan akurat untuk mendukung pelaksanaan reakreditasi diklat	100%				
							Hasil evaluasi pasca diklat 10 laporan		Tersedianya laporan penjaminan mutu penyelenggaraan diklat	100%				
							Penjaminan mutu 1 laporan		Tersusunnya laporan hasil audit eksternal yang akurat guna mendukung pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	100%				
							Sertifikat ISO 9001:2015 1 sertifikat		Tersusunnya laporan hasil evaluasi pasca diklat yang akurat untuk 10 jenis diklat yang dilaksanakan tahun 2018	100%				
4.06.4.04.02.00.23.004	Penelitian Kediklatan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	78indeks survei	Hasil penelitian 4 laporan	Terlaksananya Penelitian Kediklatan sesuai kebutuhan 100%	Tersusunnya laporan penelitian kediklatan yang tepat dan akurat untuk 4 judul hasil penelitian	100%	Rp. 291.700.000,00	Rp. 315.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Pedoman standar mutu penyelenggaraan diklat 1 pedoman		Tersusunnya standar mutu penyelenggaraan diklat	100%				

Tabel 6-2 Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Urusan Keistimewaan Tahun 2019

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 13.653.756.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	**Keistimewaan**													
3.02	**KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH (KEISTIMEWAAN)**													
3.02.4.01.01.00	**Sekretariat Daerah**													
3.02.4.01.01.00.15	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN**										**Rp. 4.150.000.000,00**	**Rp. 0,00**		
3.02.4.01.01.00.15.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Organisasi Dinas Kebudayaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kantor Perwakilan Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Parampara Praja	persentase capaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan	67%	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 2021 3 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan sesuai standard 100%	Terselenggaranya perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100%	Rp. 1.900.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 13.653.756.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.15.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	DIY	persentase capaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan	67%	Hasil monev pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan tahun 2019 3 dokumen	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan sesuai standard 100%	Terselenggaranya monev program/kegiatan keistimewaan tahun 2019	100%	Rp. 2.250.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.4.01.01.00.16	**PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN URUSAN KEISTIMEWAAN**										**Rp. 1.953.116.000,00**	**Rp. 0,00**		
3.02.4.01.01.00.16.001	Penyusunan Kebijakan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	DIY	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan	63%	Dokumen kebijakan strategis urusan Kebudayaan tahun 2021 1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Urusan Kebudayaan sesuai standard 100%	Tersusunnya kebijakan urusan Kebudayaan tahun 2021	100%	Rp. 813.116.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan kebudayaan tahun 2019 1 Laporan							
3.02.4.01.01.00.16.002	Penyusunan Kebijakan Urusan Pertanahan	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	DIY	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan	63%	Dokumen kebijakan strategis urusan pertanahan tahun 2021 1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Urusan Pertanahan sesuai standard 100%	Tersusunnya kebijakan urusan pertanahan tahun 2021	100%	Rp. 345.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan pertanahan tahun 2019 1 Laporan							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 13.653.756.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.16.003	Penyusunan Kebijakan Urusan Tata Ruang	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	DIY	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan	63%	Dokumen kebijakan strategis urusan tata ruang tahun 2021 1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Urusan Tata Ruang sesuai standard 100%	Tersusunnya kebijakan urusan tata ruang tahun 2021	100%	Rp. 275.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan tata ruang tahun 2019 1 Laporan							
3.02.4.01.01.00.16.004	Penyusunan Kebijakan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	DIY	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan	63%	Dokumen kebijakan strategis urusan kelembagaan dan tata cara tahun 2021 1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Sesuai Standard 100%	Tersusunnya kebijakan urusan kelembagaan dan tata cara tahun 2021	100%	Rp. 520.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan kelembagaan dan tata cara tahun 2019 1 laporan							
3.02.4.01.01.00.17	**PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**										**Rp. 3.695.640.000,00**	**Rp. 0,00**		
3.02.4.01.01.00.17.001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	86.5%	Draf Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah 1 Rapergub	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Tersusunnya kebijakan kelembagaan perangkat daerah	100%	Rp. 2.010.640.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Penyelenggaraan FORDASI	1 laporan FORDASI						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 13.653.756.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Sinkronisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan UPT	15 Rapergub Tusi Perangkat Daerah dan 8 Rapergub Tusi UPT						
							Sosialisasi Perdais Kelembagaan Pemda DIY	32 Perangkat Daerah						
							Usulan Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2020	1 Dokumen Usulan Kegiatan Urusan Kelembagaan dari seluruh SKPD Pengampu Urusan Kelembagaan 2020						
3.02.4.01.01.00.17.002	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Kota se DIY	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	86.5%	Evaluasi dan pendampingan penataan kelembagaan di Kabupaten/Kota	5 rekomendasi	Terselenggaranya pembinaan kelembagaan kabupaten/kota	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara DIY	3 rekomendasi						
3.02.4.01.01.00.17.003	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	86.5%	Peningkatan pemahaman tentang Kelembagaan Pemerintah DIY berdasarkan Perdais	750 orang	Pemahaman ASN tentang kelembagaan Pemda DIY berdasarkan Perdais meningkat	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.4.01.01.00.17.004	Perumusan kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	86.5%	dokumen analisis beban kerja	1 dokumen	Tersusunnya kebijakan analisis jabatan dan pengembangan kinerja jabatan	100%	Rp. 1.085.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							dokumen analisis jabatan	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 13.653.756.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							dokumen standar kompetensi jabatan	1 dokumen						
3.02.4.01.01.00.18	**PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**										**Rp. 1.450.000.000,00**	**Rp. 0,00**		
3.02.4.01.01.00.18.001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	77.6%	ASN yang meningkat pemahamannya tentang nilai-nilai Budaya Pemerintahan	300 orang	Internalisasi budaya SATRIYA di pemda DIY	100%	Rp. 950.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Banner SATRIYA	225 buah						
							grand design "SATRIYA"	1 dokumen						
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerinatahan	1 keputusan Gub, 1 keputusan Sekda						
							pemenang lomba "Mars SATRIYA	1 lagu						
							Pemenang Lomba Budaya Pemerintahan SATRIYA	6 SKPD/UPT						
							Pin SATRIYA yang terdistribusi dan dipakai sebagai kelengkapan atribut pakaian kerja ASN	3000 buah						
							rencana aksi tahunan budaya pemerintahan	1 dokumen						
							terlatihnya agen perubahan	225 ASN						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 13.653.756.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.18.002	Implementasi Budaya Pemerintahan Sleman	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Sleman	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	77.6%	ASN Pemkab Sleman yang meningkat pemahamannya tentang Budaya Pemerintahan	100 orang	Internalisasi budaya pemerintahan di kabupaten Sleman	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 laporan						
							Terbentuknya Agen Perubahan	100 ASN						
3.02.4.01.01.00.18.003	Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kota Yogyakarta	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	77.6%	ASN Pemkot Yogyakarta yang meningkat pemahamannya tentang Budaya Pemerintahan	100 orang	Internalisasi budaya pemerintahan Kota Yogyakarta	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 laporan						
							Terbentuknya Agen Perubahan	100 orang						
3.02.4.01.01.00.18.004	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Bantul	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Bantul	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	77.6%	ASN Pemkab Bantul yang meningkat pemahamannya tentang Budaya Pemerintahan	100 orang	Internalisasi budaya pemerintahan kabupaten Bantul	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 laporan						
							Terbentuknya Agen Perubahan	100 orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 13.653.756.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.18.005	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Kulon Progo	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Kulonprogo	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	77.6%	ASN Pemkab Kulon progo yang meningkat pemahamannya tentang Budaya Pemerintahan	100 orang	Internalisasi budaya pemerintahan kabupaten Kulon Progo	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 laporan						
							Terbentuknya Agen Perubahan	100 orang						
3.02.4.01.01.00.18.006	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Gunungkidul	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Gunungkidul	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	77.6%	ASN Pemkab Gunungkidul yang meningkat pemahamannya tentang Budaya Pemerintahan	100 orang	Internalisasi budaya pemerintahan di kabupaten Gunungkidul	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 laporan						
							Terbentuknya Agen Perubahan	100 orang						
3.02.4.01.01.00.19	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PARAMPARA PRAJA**										**Rp. 1.870.000.000,00**	**Rp. 0,00**		
3.02.4.01.01.00.19.001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	DIY	Indeks kepuasan layanan kepada Paramparapraja	72indeks	Bahan Rekomendasi kepada Parampara praja	15 rekomendasi	Terlaksananya kebijakan Parampara Praja	100%	Rp. 1.870.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.4.01.01.00.20	**PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN**										**Rp. 535.000.000,00**	**Rp. 0,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 13.653.756.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.20.005	Pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	DIY	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Terpenuhi	70%	Sarana dan Prasarana lembaga keistimewaan	100%	Pemenuhan sarpras lembaga keistimewaan	100%	Rp. 535.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	**Keistimewaan**													
3.03	**KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)**													
3.03.1.22.01.00	**Dinas Kebudayaan**													
3.03.1.22.01.00.15	**PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN**										**Rp. 25.461.746.000,00**	**Rp. 29.000.000.000,00**		
3.03.1.22.01.00.15.001	Pembinaan dan pengembangan kesejarahan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	11sumber sejarah	Dialog Sejarah	a) 200 org (DIY) b) 200 org di Kota Yk (Seminar)	Dukungan 29,34 % terhadap jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi dibanding yang tercatat dengan target 8 even	100%	Rp. 8.316.845.000,00	Rp. 7.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	6karya	Kajian Sejarah	2 Kajian tentang Sejarah DIY; 5 kajian sejarah di Bantul Sejarah Kab. Bantul, Jagalan (KCB Kotagede, Mangir, Upacara Adat Rabu Pungkasan dan Kupatan Kring Jolosutro), 3 Kajian di Sleman (Adat istiadat, tetenger, sejarah lokal), 3 kajian GK, 1 di KP					
					Rasio Kunjungan Museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0.55rasio	LOmba Cerdas Cermat Sejarah untuk SD dan SMP	a) siswa SD dan SMP se kabupaten Bantul b) 12 regu di Kulon progo c) siswa SD dan SMP perwakilan 18 kecamatan di Gunungkidul						
							Lomba Penulisan Fiksi Lokal dan Sejarah Lokal	50 peserta (Sleman) 1 tema Sejarah Kota						
							Napak Tilas Sejarah	150 org						
							Pembentukan komunitas Sejarah	3 Komunitas						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Peningkatan Kapasitas Guru dan Masyarakat tentang Sejarah Lokal	a) Kab Bantul: 200 Guru dan 100 Masyarakat b)Kab Gunungkidul: 4 kali @50 orang						
							Penulisan Sejarah Lokal dan Fiksi Lokal	a) 2 tema di Kulon Progo (Sejarah perkebunan teh di Kulon progo dan Waduk Sermo) b) Penyusunan Buku Pedalangan Gagrag Ngayogyakarta Serial Baratayuda Versi Ki Simun Cermojoyo (Gunungkidul) edisi 2 dan 3						
							Peringatan Hari besar bersejarah	7 hari bersejarah						
							Publikasi Sejarah	a) 2 kali b) Cetak Buku Sejarah 500 eks (Kota)						
3.03.1.22.01.00.15.002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY dan Kab/Kota	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	11sumber sejarah	Bimtek Sesorah dan Pranata Adicara	100 peserta	Dukungan 29,42 % terhadap jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan dengan target 3 macam	100%	Rp. 10.624.352.000,00	Rp. 9.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	6karya	Diaspora Jawa	1 kajian						
					Rasio Kunjungan Museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0.55rasio	Fasilitasi Pementasan Sastra Jawa	10 kali						
							Gelar Macapat Masal	2 kali, 1000 org						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kompetisi Kebahasaan dan Kesastraan	10 bidang lomba (antara lain: Mocopat, Sesorah, Geguritan, Alih Aksara, Pranataadicara, Sandiwara Bahasa Jawa) di DIY dan Kab/Kota						
							Lomba Penulisan Novel Berbahasa Jawa	5 novel, 200 nominator						
							Macapat rutin dan Masal	DIY, 5 kab/kota						
							Pawiyatan Jawa	120 org, 6 bulan						
							Pawiyatan Pamong	600 peserta						
							Pembelajaran Bahasa Jawa Melalui Media Animasi	1 judul						
							Penayangan Sastra di TV	10 kali tayang						
							Penerbitan Majalah Bahasa Jawa "Sempulur"	4 edisi 800 eks						
							Penerbitan Majalah Remaja Berbahasa Jawa	4 edisi, 500 eks						
							Pengirimam Kontingen Macapat ke TMII	50 orang						
							Senja Bersastra	2 kali						
							Siaran Sandiwara Radio Bahasa Jawa	8 kali						
							Temu Karya Sastra	5 provinis, 100 peserta						
3.03.1.22.01.00.15.003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY dan Kab/Kota	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	11sumber sejarah	1. Raker Barahmus	1 kali 36 anggota Barahmus	Dukungan 50 % jumlah museum yang terakreditasi dengan target 3 museum	100 %	Rp. 6.520.549.000,00	Rp. 13.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	6karya	2. Fasilitasi SDM Museum	1 angkatan, 70 sdm						
					Rasio Kunjungan Museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0.55rasio	3. WKM	1 tahun						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4. Cerdas Cermat Permuseuman berjenjang di DIY dan kab/kota	3 Juara (500 peserta di tiap kab/kota)						
							5. Pameran Museum	3 Jenis						
							6. Duta Museum	3 Juara Pa/Pi (DIY dan tiap kab/Kota secara berjenjang)						
3.03.1.22.01.00.16	**PROGRAM PENGUATAN MUSEUM SONOBUDOYO**										**Rp. 29.606.000.000,00**	**Rp. 29.700.000.000,00**		
3.03.1.22.01.00.16.001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	0.6indeks	Edukasi Komunitas Museum	12 Kali Penyelenggaraan	Dukungan 12,18 % terhadap Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo dengan target 80 %	100%	Rp. 3.606.000.000,00	Rp. 3.700.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang diinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh koleksi	57.94%	Alih Aksara dan Alih Bahasa Koleksi Naskah	masing-masing 2000 halaman jadi						
							Digitalisasi Koleksi Museum	40 ribu						
							Gelar Wisata Museum Sonobudoyo	1 kali event						
							Pagelaran Wayang Durasi Singkat	275 kali						
							Pameran Lokal Museum Sonobudoyo	5 kali pameran						
							Pameran Nasional Museum Sonobudoyo	3 kali pameran						
							Pameran Temporer Museum Sonobudoyo	1 kali pameran						
							Pemeliharaan/Konservasi Koleksi Museum	6 Koleksi Museum						
							Pengadaan Wayang untuk Pagelaran Wayang Durasi Singkat	1 paket						
							Perencanaan Security System Museum Sonobudoyo Unit II	1 Dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Seminar dan Workshop Pengelolaan Koleksi Museum Sonobudoyo	2 Penyelenggaraan						
3.03.1.22.01.00.16.002	Pengembangan Museum Sonobudoyo	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	0.6indeks	Terlaksanannya Pembangunan Gedung Pameran Baru Museum Sonobudoyo	1 Unit Gedung 4 lantai	Dukungan 87,82 terhadap Persentase benda koleksi Museum (BKM) yang direvitalisasi dibanding seluruh Koleksi MSB sebesar 30 %	100%	Rp. 26.000.000.000,00	Rp. 26.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang diinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh koleksi	57.94%								
3.03.1.22.01.00.17	**PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA**										**Rp. 91.777.904.000,00**	**Rp. 92.450.000.000,00**		
3.03.1.22.01.00.17.001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa	persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	12.21%	Pemberian Legalitas WBCB	1. Inventarisasi dan dokumentasi WBCB (1 tahun) 2. Penetapan WBCB (TACB DIY 1 tahun) 3. Penyusunan regulasi WBCB (2 draft) 4. Panduan teknis WBCB (5 panduan) 5. Arahan pelestarian WBCB (DP2WB DIY 1 tahun)	Dukungan 30,47 % terhadap capaian persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan dengan target 63,09 persen (1331 buah)	100%	Rp. 27.660.000.000,00	Rp. 28.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Pembinaan pelestarian WBCB	Pelatihan WBCB (4 kali)						
							Penelitian WBCB	1. Kajian WBCB (5 dokumen) 2. Perencanaan teknis WBCB (aset kasultanan, aset kadipaten, aset pemerintah, aset masyarakat) 10 dokumen)						
							Pengadaan Tanah dan bangunan Petilasan Mbak Demang	±1.100 m² (Kab Sleman)						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengelolaan WBCB	Badan/lembaga Pengelola 3 KCB						
							Penyebarluasan informasi WBCB	1. Sosialisasi sadar lestari (2 kegiatan) 2. Penerbitan buletin Mayangkara (2 edisi) 3. Travel Heritage (2 lokasi) 4. Penerbitan buku pelestarian WBCB (2 judul)						
3.03.1.22.01.00.17.002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya.	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY, Kab/Kota	persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	12.21%	Pengamanan WBCB	1. Penanda WBCB di KCB Kotagede dan KCB Kotabaru; 2. Tim Pengawasan dan Pengendalian (1 Tim Mitigasi); 3. Pemagaran Situs (KWB Pleeret dan Situs Warung Boto);	Dukungan 67,05 % terhadap capaian Persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan dengan target 63,09 persen	100%	Rp. 61.867.904.000,00	Rp. 61.950.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Pengamanan WBCB di Kab/Kota	Registrasi Nasional, TACB/DP2WB, Landscape (Pegadaian Tempel) DED (Rumah Singgah Pangsar Sudirman, DED makam Bulan, DED Situs watu Gilang, DED Makam Girilooyo, Pembuatan Gapura Kapanewon Tempel, Lanscape Pegadaian Tempel, DED Gondang dan Sokoliman						
							Penyelamatan WBCB	1. Ekskavasi KWB Pleret dan Situs Warungboto 2. Akuisisi Lahan dan Bangunan Situs Panggung Krapyak 3. Penetapan zonasi 3 situs di KCB Kraton						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Perawatan WBCB	1. Juru Pelihara (50 orang, tarif UMR) 2. Pemeliharaan Bangunan dan Struktur (Tugu Pal Putih, Jagang Beteng Vrederburg ; Situs Masjid Kauman; Rumah Kalang Kotagede; Joglo Kotagede; Rumah Panembahan; Rumah Ketandan; Situs Kedaton) 3. Pemugaran WBCB (10 BCB						
							Perawatan WBCB di Kab/Kota	Sleman: Konstruksi Rehab SMP 1 Sleman, Rumah Sigit di Sleman; Kulon Progo: CB DUwet KP (pengecatan body, lantai, penangkal petir); Gunungkidul: Pemugaran CB Bangsal Sewokoprojo dan Sokoliman GK						
3.03.1.22.01.00.17.003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	12.21%	1. Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia	1. Tim Penyiapan (1 kali)	Dukungan terhadap capaian persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan dengan target 63,09 persen	100 %	Rp. 2.250.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. Konsultansi Perencanaan Yogyakarta Warisan Dunia	2. Konsultansi Perencanaan 1 dokumen						
							3. Konsultansi Kajian Yogyakarta Warisan Dunia	3. Konsultansi Kajian 2 dokumen						
							4. Sosialisasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	4. Sosiaisasi Sumbu Filosofi 1 kali						
3.03.1.22.01.00.18	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA**										**Rp. 234.075.000.000,00**	**Rp. 240.050.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.18.001	Pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Jumlah even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya	5.79%	1. Bimbingan Seni Anak	1. 150 anak yang menguasai seni tari, musik, vokal, teater dan seni rupa	Dukungan 80 % terhadap capaian jumlah even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya dengan target 19 even	100%	Rp. 114.075.000.000,00	Rp. 115.050.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah Taman Budaya di Kab/Kota	1Taman	10. Terpeliharanya Taman Budaya	Penataan Lingkungan Taman Budaya Yogyakarta 12.000 m2						
							11. Pembangunan Gedung Kesenian	1 Gedung Kesenian DIY yang representatif						
							2. Terselenggaranya Pameran Seni Rupa	1 event						
							3. Terselenggaranya Pentas Seni di Taman Budaya	5 Cabang Seni						
							4. Jumlah Duta Budaya yang mengikuti Temu Karya Taman Budaya	Mengikuti Temu Karya Taman Budaya se Indonesia di Palu Sulawesi Tengah						
							5. Penerbitan Majalah dan Buku seni budaya	Majalah Mata Jendela dan 3 judul Buku Profil seni yang terdistribusikan						
							6. Pendokumentasian dan Publikasi kegiatan Taman Budaya selama 1 tahun	Dokumentasi dan pubilkasi						
							7. Revitalisasi dan Eksperimentasi	Revitalisasi Seni dan Eksperimentasi Seni						
							8. Pasar Kangen	1. Pasar Kangen 2. pentas Tradisi Pasar kangen						
							9. Jogja Njathil	Jathilan 1000 orang selama 1 jam di jalur lingkar Taman Budaya Yogyakarta						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.18.002	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Kabupaten/Kota	Jumlah even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya	5.79%	Pembangunan Fisik Taman Budaya Gunungkidul dan Bantul	Pembangunan Fisik Taman Budaya Gunungkidul dan Bantul	Dukungan 40 % terhadap capaian jumlah Taman Budaya di Kab/Kota dengan target 1 taman budaya	100%	Rp. 120.000.000.000,00	Rp. 125.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah Taman Budaya di Kab/Kota	1Taman								
3.03.1.22.01.00.19	**PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN**										**Rp. 32.875.800.000,00**	**Rp. 33.100.000.000,00**		
3.03.1.22.01.00.19.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	realisasi jumlah pelayanan	15jumlah pelayanan	1. Sarpras Dinas kebudayaan 2. Rehab Joglo anjungan TMII 3. Alat Musik Tradisional	1 tahun 1 Bangunan 1 set (Sleman)	Dukungan 55,28 terhadap capaian realisasi jumlah pelayanan dengan target 3 jumlah pelayanan	100%	Rp. 18.374.768.000,00	Rp. 18.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.22.01.00.19.003	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	DIY	realisasi jumlah pelayanan	15jumlah pelayanan	1. Langganan WIFI pada ruang publik	1. 112 titik	Dukungan 44,72 terhadap capaian realisasi jumlah pelayanan dengan target 3 jumlah pelayanan	100%	Rp. 14.501.032.000,00	Rp. 14.600.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. Langganan bandwidth desa	2. 12 bulan						
							3. Pemeliharaan Peralatan Wifi Acces Point Jalan Malioboro dan CCTV	3. 12 bulan						
							4. Pemeliharaan Peralatan Videotron	4. 12 bulan						
							5. Pemeliharaan Peralatan Studio Jogja Istimewa TV dan Ruang Command Center IDMC	5. 12 bulan						
							6. Pengadaan CCTV Pendukung Aplikasi Jogja Istimewa	6. 2 lokasi						
							7. Pengadaan Peralatan Pendukung Sistem Informasi	7. 3 peralatan						
							8. Main power untuk perlatan acces point, videotron dan CCTV	8. 12 bulan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.20	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEBUDAYAAN**										**Rp. 5.450.000.000,00**	**Rp. 5.950.000.000,00**		
3.03.1.22.01.00.20.001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	99.08%	1. Dokumen pengelolaan Anggaran 2. Sinkronisiasi program dan kegiatan	1. Dokumen	Dukungan 68,97 terhadap capaian realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan dengan target 99,08 persen	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya	20kerjasama								
3.03.1.22.01.00.20.002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	99.08%	Monitoring dan evaluasi	1 Dokumen	Dukungan 31,03 % terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan dengan target 99,08 persen	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya	20kerjasama								
3.03.1.22.01.00.20.003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	DIY	realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	99.08%	Kemitraan di Luar MPU	3 daerah	Dukungan 100 % terhadap capaian realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan dengan target 99,08 persen	100%	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 4.200.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya	20kerjasama	Lembaga Pelestari	25 Lembaga						
							Mitra Sister Province	2 Sister province						
							MPU	4 Kali						
3.03.1.22.01.00.21	**PROGRAM PELESTARIAN TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**										**Rp. 73.484.200.000,00**	**Rp. 73.900.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.21.001	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa	Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	1.87%	Hibah Kraton dan Puro Pakualaman	2 lembaga	Dukungan 80 % terhadap capaian jumlah lembaga adat dan pelestari budaya yang maju 110 lembaga	100%	Rp. 62.500.000.000,00	Rp. 63.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	330kelompok								
					Jumlah Desa Mandiri Budaya Tahun n	5Desa								
3.03.1.22.01.00.21.002	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	1.87%	1.Dukungan kegiatan untuk Kraton dan Puro dan lembaga adat dan tradisi 2. Terbinanya lembaga adat dan tradisi di Kab/Kota	1. 1 tahun 2. 40 kali	Dukungan 7,47 terhadap Jumlah lembaga adat dan pelestari budaya yang maju 110 lembaga	100%	Rp. 5.500.000.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	330kelompok								
					Jumlah Desa Mandiri Budaya Tahun n	5Desa								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.21.003	Pembinaan Jagawarga	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	1.87%	1) Penyelenggaraan rapat-rapat forum JW di tingkat provinsi 2) Fasilitasi kegiatan rapat-rapat JW ditingkat padukuhan (tiga bulan)/ RW/ Kampung 3) Pendampingan terhadap JW tingkat provinsi 4) Pelaksanaan lomba JW tingkat provinsi 5) Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan JW di tingkat provinsi 6) Monev bulan bakti JW 7) Pembinaan administrasi JW 8) Pendampingan proses pendataan potensi daerah masing-masing wilayah JW 9) Pelatihan dan pengembangan kapasitas tim Pembina JW melalui orientasi tugas JW/ pendidikan dan pelatihan 10) Pendataan JW di lingkungan provinsi 11) Inventarisasi dan pengkajian potensi dan permasalahan wilayah lingkup tugas JW	Terbinanya 113 jaga warga	Dukungan 100 % terhadap capaian jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya dengan target 123 kelompok	100%	Rp. 4.300.000.000,00	Rp. 3.400.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	330kelompok	Pembentukan jagawarga di kab/kota	5 kab/kota						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya Tahun n	5Desa								
3.03.1.22.01.00.21.004	Pengembangan Ekonomi Perempuan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	1.87%	Inisiasi 5 Desa Prima Mandiri Budaya	5 Calon Desa Prima mandiri budaya	Dukungan 15 % Jumlah desa mandiri budaya dengan target 5 desa terhadap	100%	Rp. 184.200.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	330kelompok								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Semua SKPD											**Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**			
Nomor	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**	
					Hasil Program		**Keluaran Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**SKPD**	**Jenis Kegiatan**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**1/2/3**	**1/2/3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
					Jumlah Desa Mandiri Budaya Tahun n	5Desa								
3.03.1.22.01.00.21.005	Pengembangan Kewirausahaan Desa	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	1.87%	Kewirausahaan Desa sejumlah 5 desa di desa mandiri budaya	5 kab/kota	Dukungan 1,00 % terhadap capaian persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing dengan target 0,10%	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	330kelompok								
					Jumlah Desa Mandiri Budaya Tahun n	5Desa								
3.03.1.22.01.00.21.006	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	1.87%	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan Desa	5 Desa budaya	Dukungan 1,0 % terhadap persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing dengan target 0,10%	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	330kelompok								
					Jumlah Desa Mandiri Budaya Tahun n	5Desa								
3.03.1.22.01.00.22	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DAN SENI**										**Rp. 162.205.262.000,00**	**Rp. 166.947.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	1/2/3	1/2/3
3.03.1.22.01.00.22.001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	27.35%	1. pendampingan desa budaya 2. gelar potensi 3. sarpras seni 4. kandidat desa mandiri budaya	1. 200 or 2. 56 Desa 3. 56 sarpras seni 4. 5 desa di kab/kota	Dukungan 7,98 % terhadap capaian persentase nilai nilai adat dan seni yang sudah dilestarikan dengan target 27,36 persen atau 316 nilai adat dan seni	100%	Rp. 15.500.000.000,00	Rp. 15.700.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.22.01.00.22.002	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Kab/Kota di DIY	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	27.35%	Pelatihan dan gelar seni budaya rintisan desa budaya	1. 2 rintisan kelurahan budaya di Kota Yogyakarta 2. 5 rintisan desa budaya di Kabupaten Bantul 3. 16 rintisan desa budaya di Kabupaten Kulon Progo 4. 32 rintisan desa budaya di Kabupaten Sleman 5. 14 rintisan desa budaya di Kabupaten Gunungkidul	Dukungan 8,95 terhadap persentase nilai nilai adat dan seni yang sudah dilestarikan dengan target 27,36 persen atau 316 nilai adat dan seni	100%	Rp. 15.150.000.000,00	Rp. 15.300.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.22.01.00.22.003	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	27.35%	Lomba Lukis DIY- Kyoto	DIY didukung 5 kab/kota	Dukungan 12,16 terhadap persentase nilai nilai adat dan seni yang sudah dilestarikan dengan target 27,36 persen atau 316 nilai adat dan seni	100%	Rp. 22.445.000.000,00	Rp. 22.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Pembinaan Sanggar	Kab Sleman : 10 sanggar						
							Pembinaan seni rupa, perfilman, seni klasik, seni kerakyatan dan seni musik	5 cabang seni di DIY dan Kab/Kota						
							Peningkatan apresiasi film indie bagi siswa melalui : workshop dan Lomba Film Indie bagi siswa SMA/SMK	Kabupaten Sleman: 30 regu penggiat Film Indie						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.22.004	Misi Kebudayaan ke dalam dan luar Negeri dalam rangka diplomasi Budaya	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Luar DIY dan Negara	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	27.35%	Kab/Kota : 1. Hadeging Nagari / GSBY(DIY-Jakarta) 2. Sumatera barat dan Sulawesi Selatan 3. Lainnya	5 Kab/Koita	Dukungan 6,31 terhadap capaian persentase nilai nilai adat dan seni yang sudah dilestarikan dengan target 27,36 persen atau 316 nilai adat dan seni	100 %	Rp. 10.871.336.000,00	Rp. 12.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Misi ke Sister Province	5 Sister Province						
3.03.1.22.01.00.22.005	Penghargaan Seniman dan Budayawan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	27.35%	4 kategori 3 kategori di kab/kota	5 orang tiap kategori	Dukungan 1,18 % terhadap persentase nilai nilai adat dan seni yang sudah dilestarikan dengan target 27,36 persen atau 316 nilai adat dan seni	100%	Rp. 1.816.616.000,00	Rp. 2.400.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.22.01.00.22.006	Festival Kebudayaan Yogyakarta	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	27.35%	1. Jumlah Karya Seni Yang ditampilkan	Terlaksananya Festival Kesenian Yogyakarta di: 1. Tingkat DIY meliputi: - 5 Jenis Karya Seni (Kriya, Rupa, Pertunjukan, Musik, Suara)	Dukungan 6,68 terhadap capaian persentase nilai nilai adat dan seni yang sudah dilestarikan dengan target 27,36 persen atau 316 nilai adat dan seni	100%	Rp. 11.500.000.000,00	Rp. 12.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. Jumlah penonton	Meningkat dari 138.000 menjadi 150.000 pengunjung						
							3. Dukungan kab/kota	5 kab/kota						
3.03.1.22.01.00.22.007	Gelar Budaya Jogja	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY dan kab/kota	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	27.35%	1. Festival berjenjang (Ketoprak, Teater, Sendratari, Langencarita, Karawitan Perempuan) 2. pentas Seni 3. Festival Garis Imaginer Sleman 4. Festival Godhong Apa-apa Kota 5. Festival Dhaksinarga dan Carnival Gunungkidul 6. Festival Budaya menoreh di Kulon progo 7. Festival Budaya Iconic Bantul	5 kab/kota 9 Pentas 1 even 1 even 1 even	Dukungan 17,03 % terhadap persentase nilai nilai adat dan seni yang sudah dilestarikan dengan target 27,36 persen atau 316 nilai adat dan seni	100%	Rp. 28.051.585.000,00	Rp. 28.400.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.22.008	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	27.35%	publikasi seni budaya DIY (Citra Jogja, liputan radio, muhibah budaya, Animasi)	1 tahun	Dukungan 1,96 % terhadap persentase nilai nilai adat dan seni yang sudah dilestarikan dengan target 27,36 persen atau 316 nilai adat dan seni	100%	Rp. 3.370.000.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.22.01.00.22.009	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	27.35%	1 Upacara Adat dan Tradisi 2. Fasilitasi Himpunan Penghayat Kepercayaan 3 Peningkatan SDM	5 Kab/Kota	Dukungan 6,12 % terhadap persentase nilai nilai adat dan seni yang sudah dilestarikan dengan target 27,36 persen atau 316 nilai adat dan seni	100%	Rp. 9.002.906.000,00	Rp. 9.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.22.01.00.22.010	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam masyarakat	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	27.35%	1. pentas adiluhung 2. pembinaan pedalangan (PEPADI, Dalang Muda, dalang Anak) 3. pembinaan dalang dan Pentas Wayang 4. tata nilai 5. WBTB 6. JIHF 7 Dewan Kebudayaan	6 lembaga 5 kab/kota 5 kab/kota 1 dokumen 10 wbtb 1 even 1 tahun	Dukungan 9,99 % terhadap persentase nilai nilai adat dan seni yang sudah dilestarikan dengan target 27,36 persen atau 316 nilai adat dan seni	100%	Rp. 15.432.071.000,00	Rp. 15.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.22.01.00.22.011	Selendang Sutera	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	27.35%	Sarasehan kemah budaya karnaval pentas seni	100%	Dukungan 1,02 % terhadap capaian persentase nilai nilai adat dan seni yang sudah dilestarikan dengan target 27,36 persen atau 316 nilai adat dan seni	100%	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.22.01.00.22.012	Penyelengaraan Even Penggiat Seni	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	27.35%	pentas even seni	300 pentas	Dukungan 13,78 % terhadap persentase nilai nilai adat dan seni yang sudah dilestarikan dengan target 27,36 persen atau 316 nilai adat dan seni	100%	Rp. 25.623.348.000,00	Rp. 26.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.22.013	Gelar Seni Budaya Daerah	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Jakarta	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	27.35%	Pentas Seni dan Budaya Daerah sebanyak 32 kali acara Pengunjung Kirab dan Atraksi Budaya Rakyat Yogyakarta	9500 peserta 1200 orang	Dukungan 0,66% terhadap capaian persentase nilai nilai adat dan seni yang sudah dilestarikan dengan target 27,36 persen atau 316 nilai adat dan seni	100%	Rp. 1.296.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.22.01.00.22.014	Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DKI Jakarta	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	27.35%	Pelatihan seni tradisional Yogyakarta selama 10 bulan	120 orang	Dukungan 0,07 % terhadap capaian persentase nilai nilai adat dan seni yang sudah dilestarikan dengan target 27,36 persen atau 316 nilai adat dan seni	100%	Rp. 146.400.000,00	Rp. 147.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.22.01.00.23	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ARSIP KRATON DAN KADIPATEN**										**Rp. 5.815.000.000,00**	**Rp. 6.000.000.000,00**		
3.03.1.22.01.00.23.001	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan arsip bernilai sejarah Kasultanan dan Kadipaten	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Kraton Pakualaman	Jumlah arsip kraton dan kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	2000Berkas	Cakupan arsip Kasultanan dan Kadipaten yang dialih tulisankan dari Jawa ke Latin dan dar Jawa Kawi ke Indonesia	250 lembar/ 250 lembar	Dukungan 100 % terhadap capaian jumlah arsip kraton dan kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi dengan target dari 22.805 eks menjadi 26.805 eks	100 %	Rp. 5.815.000.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Cakupan arsip Kasultanan dan Kadipaten yang dialihkan bahasakan dari bahasa Jawa ke Indonesia	500 lembar						
							Promosi dan Sosialisasi Kearsipan melalui pameran	2 kali						
							Terolahnya arsip tekstual dan arsip foto Kasultanan dan Kadipaten	3000 berkas tekstual dan 1000 berkas foto						
							Aplikasi media akses dan SIKS untuk layanan arsip Kasultanan dan Kadipaten yang dikembangkan	2 Aplikasi						
							Backup Plus Slim 4 TB - HDD / HD / Hardisk / Harddisk External	2 buah						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Cakupan Alih Media dari tekstual ke digital arsip Kasultanan dan Kadipaten	40.500 data/ lembar						
							Cakupan Alih Media dari tekstual ke digital Koleksi Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten	20.000 data/ lembar						
							Cakupan dokumen arsip Kasultanan dan Kadipaten yang dirawat dengan penghilangan asam dan laminasi	9000 lembar dan 9000 lembar						
							Cakupan fumigasi ruang arsip dan perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten	1800 m3						
							Cakupan termitt control ruang arsip dan perpustakaan di Kasultanan dan Kadipaten	731 m2						
							Dokumen sejarah lisan	2 Dokumen						
							Jumlah bahan pustaka di perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten yang dirawat	50.000 eks						
							Kamera DSLR canon 70 D , lensa, Tripot, Tas,	4 buah						
							Laptop	4 buah						
							Naskah Kuno yang sudah diputrani	600 lembar						
							Tersusunnya data penelusuran dan akuisisi arsip kesejarahan/ kebudayaan terkait Yogyakarta di dalam negeri dan di luar negeri	5 data						
3.03.1.22.01.00.24	**PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA**										**Rp. 20.085.216.000,00**	**Rp. 20.500.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.24.001	Pembinaan Muatan Lokal	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter	43.39%	Telaksananya evaluasi pendidikan berbasis budaya	1 dokumen evaluasi pendidikan berbasis berbudaya	Dukungan sebesar 70% terhadap ketercapaian Persentase lembaga pendidikan yang menerapkan pendidikan berkarakter dengan target 42,69 persen	100 %	Rp. 14.325.471.000,00	Rp. 14.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							cakupan siswa yang mendapatkan ketrampilan membatik	324 siswa SD dan SMP pada 19 sekolah di GK						
							Implementasi pendidikan Kemataraman Lomba Bahasa, Busana, Adat istiadat dan Seni Siswa	64643 siswa di KP 22 jenis lomba						
							Jumlah Laboratorium Seni Budaya yang dibangun	Terbangunnya 3 lab seni budaya untuk SMP						
							Jumlah peserta yang mengikuti program pelatihan Seniman Masuk Sekolah	200 siswa dari 10 sekolah						
							Tersedianya sarpras pendidikan berkarakter	Revitalisasi Sekolah Seni (Tahap 1), dan Tiga Set Gamelan yang berfungsi dengan baik						
3.03.1.22.01.00.24.003	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter	43.39%	Terselenggaranya program studi pendidikan	Operasional 3 Prodi (Kriya kulit, tari, karawitan) selama 1 tahun dapat berjalan dengan lancar	Dukungan 80,92% terhadap capaianPersentase lembaga pendidikan yang menerapkan pendidikan berkarakter dengan target 42,69 persen	100 %	Rp. 5.759.745.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.22.01.00.25	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA**										**Rp. 33.370.000.000,00**	**Rp. 33.720.000.000,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.25.001	Pengembangan Lumbung Mataraman	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.08%	Optimalisasi lahan pekarangan di 15 desa	Pemenuhan ketersediaan pangan tingkat rumah tangga di 5 kab/kota	Dukungan 2,66% terhadap persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing dengan target 0,10%	100%	Rp. 1.100.000.000,00	Rp. 1.150.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Pemanfaatan lahan pekarangan berbasis potensi lokal	10 lokasi (Kulon Progo)						
3.03.1.22.01.00.25.002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.08%	Event Skala internasional (3 event)	Penyelenggaraan Atraksi Wisata Budaya terlaksana 100%	Dukungan 57,64 terhadap persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing dengan target 0,10%	100%	Rp. 17.070.000.000,00	Rp. 17.270.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Event Skala Lokal (peningkatan lokal)							
							Event Skala Nasional (5 event)							
							Geopark Night Specta (Kab GK)							
3.03.1.22.01.00.25.003	Pengembangan Industri Kreatif	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.08%	1. Pembuatan Moulding Gamelan sejumlah 3 jenis (Kethuk, Gong, Gong Suwukan) 2. Pelatihan Rancakan Gamelan sebanyak 1 akt @ 20 orang 3. Pelatihan Pengecoran Gamelan sebanyak 2 akt @ 20 orang	Pengembangan Gamelan sejumlah 3 jenis (Kethuk, Gong, Gong Suwukan)	Dukungan 29,60 terhadap capaian persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing dengan target 0,10%	100%	Rp. 13.500.000.000,00	Rp. 13.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							1. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Jamu sebanyak 3 akt, @20 IKM 2. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Aromaterapi sebanyak 5 akt @ 20 IKM 3. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Spa Tradisional sebanyak 3 akt @ 20 IKM 4. Kemitraan Usaha Produk IKM Biofarmaka sebanyak 1 akt @ 100 IKM	Kemampuan produksi pengolahan, kemasan dan kemitraan usaha produk IKM Biofarmaka (produk jamu, aromaterapi, spa tradisional) meningkat sejumlah 320 IKM						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							1. Seminar Batik sejumlah 100 peserta 2. Pameran Batik sejumlah 150 IKM 3. Pendampingan IKM Batik sejumlah 5 kelompok 4. Pameran Gelar Batik Nusantara sejumlah 10 IKM 5. Peningkatan produksi IKM Batik sejumlah 5 angkatan 6. Partisipasi Pameran Jogja Fashion Week sejumlah 50 IKM 7. Parade Batik sejumlah 1 kali 8. Pembangunan Workshop Batik di Tancep , Ngawen, GK sejumlah 1 lokasi 9. Penyusunan Buku Batik sejumlah 2 judul (Panduan memilih Batik dan Batik Yang Dikembangkan Masyarakat Jogjakarta) 10. Fasilitasi HKI Batik (merk) sejumlah 6 kelompok	Pengembangan Batik Jogja untuk mempertahankan Jogja sebagai Kota Batik Dunia						
							Gebyar batik di destinasi wisata	2 kali di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk dan Pantai Selatan (Kab Gunungkidul)						
							Pameran Kriya budaya sejumlah 1 kali	Pameran Kriya budaya terlaksana sesuai target 100%						
							Pelatihan pengrajin batik	40 orang di Desa Tancep, Kecamatan Ngawen (Kab Gunungkidul)						
							Pembinaan dan pendampingan pengrajin IKM Batik	250 IKM (Kab Bantul)						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 714.206.128.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	1/2/3	1/2/3
3.03.1.22.01.00.25.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kesehatan	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.08%	1. Survey Pemetaaan Penyehatan Tradisional 2. Pelatihan Penyehat Tradisional (Herbalis, Pijat Refleksi dan Akupresur), Pelatihan Akupuntur bagi dokter RS, dan Akupresur bagi dokter RS dan Puskesmas 3. Pembinaan Hatra 4. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi	6 Layanan: 5 Puskesmas, 1 RSUD	Dukungan 3,5 %terhadap persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya yang berdaya saing (0,10%)	100%	Rp. 1.700.000.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 143.324.500.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	**Keistimewaan**													
3.04	**PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)**													
3.04.1.03.02.00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**													
3.04.1.03.02.00.15	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN**										**Rp. 47.456.000.000,00**	**Rp. 0,00**		
3.04.1.03.02.00.15.001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1. Ketimpangan Wilayah	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	9419bidang tanah	1. Terdaftarkannya 75 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta sejumlah 75 bidang tanah	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	9398 bidang	Rp. 44.556.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	23dokumen	10. Terdaftarkannya 2392 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Gunungkidul sejumlah 2392 bidang tanah						
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	60bidang tanah	11. Terlaksananya pengukuran Tanah Desa 30 desa di Kabupaten Gunungkidul	Pengukuran Tanah Desa 30 desa di Kabupaten Gunungkidul						
							12. Terdaftarkannya 2597 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Sleman sejumlah 2597 bidang tanah						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 143.324.500.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							13. Terlaksananya pengukuran Tanah Desa 30 desa di Kabupaten Sleman	Pengukuran Tanah Desa 30 desa di Kabupaten Sleman						
							14. Tersedianya 75 Peta desa di 17 Kecamatan Kabupaten Bantul	Tersedianya acuan batas administrasi wilayah Desa dan Sarana Prasarana Desa 75 desa Kabupaten bantul						
							2. 1 dokumen hasil identifikasi di 100 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten di kota yogyakarta	Data tanah kasultanan dan tanah kadipaten 100 bidang yang teridentifikasi						
							3. Tanda Identitas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 120 Bidang	Kepastian identitas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta sejumlah 120 bidang tanah						
							4. Pembuatan Peta Dasar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	Tersedianya Peta Dasar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 143.324.500.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							5. - tanda identitas kepemilikan tanah desa di 20 desa. - 1 dokumen berisi data hasil inventarisasi dan identifikasi tanah desa. - Peta Bidang sebaran tanah desa	Jumlah bidang tanah desa yang terinventarisasi dan teridentifikasi						
							6. Terdaftarkannya 844 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Bantul sejumlah 844 bidang tanah						
							7. Terlaksananya pengukuran Tanah Desa 30 desa di Kabupaten Bantul	Pengukuran Tanah Desa 30 desa di Kabupaten Bantul						
							8. Terdaftarkannya 193 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kulonprogo sejumlah 193 bidang tanah						
							9. Terlaksananya pengukuran Tanah Desa 30 desa di Kabupaten Kulonprogo	Pengukuran Tanah Desa 30 desa di Kabupaten Kulonprogo						
3.04.1.03.02.00.15.002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	1. Ketimpangan Wilayah	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	9419bidang tanah	1. 1 Dokumen hasil inventarisasi dokumen administrasi pertanahan di 20 desa.	Dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara	Jumlah bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	9398 bidang	Rp. 900.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

dan tanah desa

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 143.324.500.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	23dokumen	2. 10.000 lembar dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara.	Dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara						
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	60bidang tanah								
3.04.1.03.02.00.15.003	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	1. Ketimpangan Wilayah	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	9419bidang tanah	1. Tersedianya data spasial Tanah kasultanan / Tanah Kadipaten 17 kecamatan di kabupaten Sleman	Survey data spasial tanah kasultanan dan tanah kadipaten 17 kecamatan di kabupaten Sleman	Jumlah bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	9.398 bidang	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	23dokumen	2. Tersedianya basis data pertanahan terbaru dalam Sistem Informasi Pertanahan di kabupaten Sleman	Basis data pertanahan terbaru kabupaten Sleman						
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	60bidang tanah								
3.04.1.03.02.00.15.004	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	1. Ketimpangan Wilayah	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	9419bidang tanah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Operasional Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten Melalui Pendampingan Tenaga Ahli selama 10 bulan	Pelayanan Operasional Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten Melalui Pendampingan Tenaga Ahli	Jumlah bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	9.398 bidang	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 143.324.500.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	23dokumen								
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	60bidang tanah								
3.04.1.03.02.00.16	**PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN**										**Rp. 93.718.500.000,00**	**Rp. 0,00**		
3.04.1.03.02.00.16.001	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1. Ketimpangan Wilayah	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	peningkatan fasilitasi penerbitan dokumen acuan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0%	tersusunnya 1 Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di 20 Desa	Kesesuaian terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di 20 Desa	capaian desa yang telah tertib administrasi tanah desa	10,2 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Bidang Tanah Desa yang Didaftarkan di BPN	0bidang tanah								
					Persentase Desa yang sudah Mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	5.1%								
					Persentase Pengajuan Permohonan Serat Kekancingan yang Ditindaklanjuti	100%								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 143.324.500.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.04.1.03.02.00.16.002	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	1. Ketimpangan Wilayah	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	peningkatan fasilitasi penerbitan dokumen acuan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0%	1. 100 rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kepastian hukum penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 100 rekomendasi	capaian desa yang telah tertib administrasi tanah desa	10,2 %	Rp. 3.123.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Bidang Tanah Desa yang Didaftarkan di BPN	0bidang tanah	10. Tersedianya aturan pemanfaatan tanah desa	20 Draft RaPerdes Pemanfaatan Tanah Desa						
					Persentase Desa yang sudah Mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	5.1%	11. Tersedianya aturan pemanfaatan tanah desa	20 Draft RaPerdes Pemanfaatan Tanah Desa						
					Persentase Pengajuan Permohonan Serat Kekancingan yang Ditindaklanjuti	100%	2. 60 Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Desa.	Kepastian hukum penggunaan Tanah Desa sejumlah 60 rekomendasi						
							3. 100 rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kepastian hukum penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 100 rekomendasi						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 143.324.500.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4. 30 rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kepastian hukum penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bantul sejumlah 30 rekomendasi (20 rekomendasi Tanah Kasultanan dan 10 rekomendasi Izin penggunaan Tanah Desa)						
							5. 30 rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kepastian hukum penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kulonprogo sejumlah 30 rekomendasi (20 rekomendasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, serta 10 rekomendasi Izin penggunaan Tanah Desa)						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 143.324.500.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							6. 30 rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kepastian hukum penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gunungkidul sejumlah 30 rekomendasi (20 rekomendasi Tanah Kasultanan dan 10 rekomendasi Izin penggunaan Tanah Desa)						
							7. 50 rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kepastian hukum penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sleman sejumlah 50 rekomendasi (20 rekomendasi Tanah Kasultanan dan 30 rekomendasi Izin penggunaan Tanah Desa).						
							8. Tersedianya aturan pemanfaatan tanah desa	20 Draft RaPerdes Pemanfaatan Tanah Desa						
							9. Tersedianya aturan pemanfaatan tanah desa	20 Draft RaPerdes Pemanfaatan Tanah Desa						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 143.324.500.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.04.1.03.02.00.16.003	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1. Ketimpangan Wilayah	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	peningkatan fasilitasi penerbitan dokumen acuan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0%	1. Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga di 5 desa di Kulonprogo	Penanganan permasalahan tanah desa untuk memberikan kepastian hak atas tanah desa	capaian desa yang telah tertib administrasi tanah desa	10,2 %	Rp. 2.200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Bidang Tanah Desa yang Didaftarkan di BPN	0bidang tanah	2. Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga di 5 desa di Sleman	Penanganan permasalahan tanah desa untuk memberikan kepastian hak atas tanah desa						
					Persentase Desa yang sudah Mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	5.1%	3. Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga di 5 desa di Bantul	Penanganan permasalahan tanah desa untuk memberikan kepastian hak atas tanah desa						
					Persentase Pengajuan Permohonan Serat Kekancingan yang Ditindaklanjuti	100%	4. Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga di 5 desa di Gunungkidul	Penanganan permasalahan tanah desa untuk memberikan kepastian hak atas tanah desa						
							5. 100% penanganan terhadap aduan permasalahan pertanahan	Tertanganinya permasalahan keberatan dan sengketa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100%						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 143.324.500.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							6. Tersedianya 1 Dokumen hasil inventarisasi permasalahan tanah desa di 20 Desa	Inventarisasi Permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga di 20 desa.						
							7. Terverifikasinya permohonan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	rekomendasi penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga						
3.04.1.03.02.00.16.004	Pembebasan Lahan Pengganti Pemanfaatan Tanah Kasultanan/Kadipaten	1. Ketimpangan Wilayah	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	peningkatan fasilitasi penerbitan dokumen acuan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0%	1. 8731 m2 tanah terbebaskan di Kelurahan Rejowinagun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta	Penyediaan lahan untuk pemindahan kantor pemerintahan pada 1 lokasi (KPPD DIY di Kota Yogyakarta)	capaian desa yang telah tertib administrasi tanah desa	10,2 %	Rp. 87.995.500.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Bidang Tanah Desa yang Didaftarkan di BPN	0bidang tanah								
					Persentase Desa yang sudah Mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	5.1%								
					Persentase Pengajuan Permohonan Serat Kekancingan yang Ditindaklanjuti	100%								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 143.324.500.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.04.1.03.02.00.17	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN URUSAN PERTANAHAN**										**Rp. 1.550.000.000,00**	**Rp. 0,00**		
3.04.1.03.02.00.17.001	Perencanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan pertanahan	100%	1. Terselenggaranya Pradesk pembahasan urusan pertanahan 2. Terbentuknya Tim Penanganan Urusan Pertanahan	1. Penyelenggaraan Pradesk Pembahasan urusan pertanahan di DIY 2. Tersusunnya rumusan penanganan urusan pertanahan	persentase realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan pertanahan	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.04.1.03.02.00.17.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan (Pertanahan)	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan pertanahan	100%	1 Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pertanahan	Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan 100%	persentase realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan pertanahan	100 %	Rp. 550.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.04.1.03.02.00.18	**PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN PERTANAHAN**										**Rp. 600.000.000,00**	**Rp. 0,00**		
3.04.1.03.02.00.18.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	realisasi pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	100%	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Pertanahan)	persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	100 %	Rp. 600.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	**Keistimewaan**													
3.05	**TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)**													
3.05.1.03.02.00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**													
3.05.1.03.02.00.15	**PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**										**Rp. 11.765.000.000,00**	**Rp. 0,00**		
3.05.1.03.02.00.15.001	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Ekowisata Karst Kabupaten Gunungkidul Godean dan Pakem. Industri Sentolo Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan Koridor Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop dan Sadeng. Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	22.78%	1). Tersedianya dokumen Raperda, Validasi KLHS dan BIG, persub ATR RTR satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten: 1. Satuan Ruang Strategis Kasultanan Keprabon: Kawasan Masjid Pathok Negoro 2. Satuan Ruang Strategis Kasultanan Bukan Keprabon: Kawasan Perbukitan Menoreh;	Tersedianya 1 dokumen bahan untuk penetapan raperda RTR KSP Sosial Budaya	Persentase ketersediaaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	20,33 %	Rp. 6.365.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							10). - Naskah Akademik; - Raperda RDTR Kecamatan Girisubo	1 dokumen 1 dokumen						
							11). Raperda RDTR Kawasan Budaya Sokoliman	1 dokumen						
							12). Raperda RDTR Kawasan Budaya Gondang Karangmojo	1 dokumen						
							13). Raperda RDTR Kawasan Budaya Bleberan, Playen	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Kabupaten Bantul Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngerenehan dan pantai Gesing Kabupaten Gunungkidul Pantai Selatan dan gelombang laut Kabupaten Kulon Progo, kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah, Pantai Congot Kabupaten Kulon Progo Pantai Wedi Ombo Kabupaten Gunungkidul Parangtritis dan Gumuk pasir Kabupaten Bantul Perkotaan Yogyakarta Sewon, kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri dan Piyungan Tempel dan Parangtritis Wilayah Gunung Merapi			14). Master Plan Koridor Pantai Selatan Gunungkidul	1 dokumen						
							2). Tersedianya Matek/Raperda RTR Kawasan Girigondo	Tersedianya 1 dokumen bahan untuk penetapan raperda RTR KSP Sosial Budaya						
							3). Tersedianya Matek/Raperda RTR Kawasan Karst Gunungsewu	Tersedianya 1 dokumen bahan untuk penetapan raperda RTR KSP Sosial Budaya						
							4). Sayembara Penataan Kawasan Plengkung Gading-Panggung Krapyak	Tersedianya rancangan desain kawasan Plengkung Gading-Panggung Krapyak						
							5). 1. Tersusunnya Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K) dan penetapnnya sebagai Peraturan Gubernur DIY 2. Tersusunnya Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RAPWP3K) dan penetapannya sebagai Peraturan Gubernur DIY 3. Tersusunnya dan ditetapkannya Peraturan Gubernur DIY tentang Perijinan Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K)	1. Tersedianya bahan untuk penetapan Rapergub DIY tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K) 2. Tersedianya bahan untuk penetapan Rapergub DIY tentang Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RAPWP3K)						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							6). Naskah Materi Teknis RDTR dan P2 Kecamatan Tanjungsari	1 dokumen						
							7). Naskah Materi Teknis RDTR dan P2 Kecamatan Saptosari	1 dokumen						
							8). Naskah Materi Teknis RDTR dan P2 Kecamatan Purwosari	1 dokumen						
							9). Penyusunan Studi Perencanaan Pengadaan Tanah Pasar Baru, Terminal dan Pusat Cendera Mata di Kawasan Pakem 1 Dokumen	Penataan Kawasan Pasar Baru, Terminal dan Pusat Cendera Mata di Kawasan Pakem						
3.05.1.03.02.00.15.002	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo Kabupaten Bantul Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngerenehan dan pantai Gesing	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	22.78%	1. Tersedianya dokumen RTBL dan DED Kawasan Pansela	1. 3 Dokumen RTBL 2. 3. Dokumen DED	Persentase ketersediaaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	20,33 %	Rp. 2.450.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							2. Tersedianya dokumen RTBL Kawasan Watu Gilang	1 dokumen RTBL						
							3. Tersedianya dokumen RTBL Kawasan Pendidikan Kebudayaan (Panggung Krapyak)	1 dokumen RTBL						
							4. Tersedianya dokumen di kawasan Siung Wediombo: 1. RTBL wilayah Siung, 1 dokumen 2. RTBL Wilayah Wediombo, 1 dokumen	2 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Kabupaten Gunungkidu Pantai Selatan dan gelombang laut Kabupaten Kulon Progo, kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah, Pantai Congot Kabupaten Kulon Progo Pantai Wedi Ombo Kabupaten Gunungkidul Parangtritis dan Gumuk pasir Kabupaten Bantul			5. 1. Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kalasan 2. Tersedia kajian lingkungan hidup strategis 3. Tersedianya materi teknis RDTR Kalasan 4. Tersusunnya dokumen naskah akademis kecamatan Kalasan 5. Tersedianya draf raperda RDTR Kecamatan Kalasan	1 dokumen						
3.05.1.03.02.00.15.003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo Kabupaten Bantul	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	22.78%	1. Tersusunnya Rencana Induk pada satuan ruang strategis: Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan Keprabon: Samas - Parangtritis	Tersedianya bahan untuk penyusunan Raperda RTR satuan ruang strategis: Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan Keprabon: Samas - Parangtritis 1 Dokumen	Persentase ketersediaaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	20,33 %	Rp. 1.700.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							2. Tersedianya dokumen DED Kawasan Goa Jepang	1 dokumen DED						
							3. Tersedianya dokumen DED Kawasan Ambarbinangun	1 dokumen DED						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Semua SKPD											**Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00**			
Nomor	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**	
					Hasil Program		**Keluaran Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**SKPD**	**Jenis Kegiatan**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**1/2/3**	**1/2/3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
							4. Tersedianya dokumen DED dan Identifikasi Lahan Kawasan Kotagede	1. 1 Dokumen DED 2. 1 Dokumen Identifikasi Lahan						
3.05.1.03.02.00.15.004	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	22.78%	1). Tersosialisasikannya dokumen tata ruang berupa: 1. Perdais Tata Ruang Keistimewaan	Disampaikannya dokumen Perdais Tata Ruang Keistimewaan kepada Desa / Kelurahan di 18 satuan ruang strategis	Persentase ketersediaaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	20,33 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							2). Tersosialisasikannya dokumen tata ruang berupa: Perda RTRW DIY	Disampaikannya dokumen Perda RTRW DIY kepada Stakeholder						
3.05.1.03.02.00.15.005	Penetapan RTR KSP DIY	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	22.78%	Pendampingan penetapan RTR KSP DIY	Tersedianya bahan untuk penyusunan raperda RTR KSP DIY	Persentase ketersediaaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	20,33 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.03.02.00.15.006	Penyusunan KLHS RDTR Kecamatan Patuk	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Patuk	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	22.78%	Penyusunan KLHS RDTR Kecamatan Patuk	1 dokumen	KLHS RDTR Kecamatan Patuk	1 dokumen	Rp. 350.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.03.02.00.16	**PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**										**Rp. 1.186.291.405.000,00**	**Rp. 7,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.03.02.00.16.001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Perkotaan Yogyakarta	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	15.83%	1). Pengadaan dan pemasangan : a. APILL ATCS TS : 2 Paket (Brosot dan Kasongan); b. Deliniator TS : 10 unit (Mangunan dan Jl. Parangtritis); c. Rambu Lalu Lintas : 100 buah (Jalan Provinsi di 4 Kabupaten); d. Paku Jalan : 700 buah (Jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung kidul); e. Marka Jalan : 10.000 meter (Nanggulan-Tegalsari, Dekso-Klangon, Karangmojo-Semin, Barong-Panggang-Parangtritis); f. APJ TS Antik (Khas Jogja) : 100 unit (Batas Jateng – Kalibawang, JJLS); g. Warning Light TS : 6 Unit (Balangan, Kebonagung); h. RPPJ : 100 Buah (Imogiri, Dlingo); i. Kontroler Bantu ATCS : 2 unit (Simpang Karangnongko); j. Pelican Crossing : 2 unit (Jalan Prambanan – Piyungan); k. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket l. APJ Listrik : 80 unit	Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage City)	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	29, 44 %	Rp. 474.410.283.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							10). Pengadaan 1 (satu) bidang tanah	Tersedianya lahan di Jl. Suryatmajan untuk Penataan Kawasan Perkantoran Kompleks Kepatihan seluas 277 m2						
							11). 1. Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro Sepanjang 1,5 Km Secara Baik Selama 12 Bulan 2. 1 Dokumen Kesepakatan Bersama Penataan PKL Sisi Selatan Kawasan Malioboro Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PKL	1. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana pada kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km 2. Rekayasa Sosial kepada PKL di 1 Sisi Kawasan Malioboro (Sisi Selatan)						
							12). 1. Operasionalisasi Sekretariat Bersama Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Budaya 2. Dokumen Kebijakan Sekretariat Bersama SRS Tanah Kasultanan dan SRS Tanah Kadipaten	1. Operasionalisasi Sekretariat Bersama Pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten 2. Bahan Rumusan Kebijakan (1 dokumen)						
							13). Penataan SAH Kawasan Sumbu Filosofi (Sirip-sirip Malioboro)	Tertatanya kawasan sirip - sirip malioboro						
							14). Penataan Pedestrian kawasan sumbu filosofis (Sirip-sirip Malioboro) lokasi Jl. Pajeksan, Jl. Dagen, Jl. Perwakilan	Tertatanya kawasan sirip - sirip malioboro						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							15). Penataan Pedestrian Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Jl. Senopati	Tertatanya kawasan sirip - sirip malioboro						
							2). Penataan lalu lintas di Kawasan Heritage City (Malioboro, Keraton, Puro Pakualaman, Kota Baru, Kotagede): 1. Petugas Jogo Margo 140 org 2. Forum lalu lintas satuan ruang strategis 3. Sarana pendukung (sepeda motor : 6 unit, HT : 50 unit, lampu cabai : 60 buah, seragam 280 stel, jas hujan 140 buah)	Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas di Kawasan Harritage						
							3). 1. Pembangunan Pasar Sore 2. Kios dan Parkir Motor	Pembangunan Kantong Parkir Pasar Sore						
							4). Pembangunan Halte Trans Jogja (Jl. Margo Utomo, Taman Pintar dan TKP Senopati)	Pembangunan Halte Trans Jogja di Sumbu Filosofis						
							5). Pembangunan Tolilet Bawah Tanah (Depan Taman Pintar)	Tersedianya sarana dan prasarana toilet bawah tanah (depan Taman Pintar)						
							6). Pembangunan Underpass Depan Taman Pintar	Tersedianya sarana dan prasarana Underpass Depan Taman Pintar						
							7). Pembangunan Konstruksi Jogja Planning Gallery	Tersedianya Konstruksi Bangunan Jogja Planning Gallery						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							8). Pembangunan Ducting Utilitas Segmen Jalan Marga Utama	Tersedianya sarana dan prasarana Ducting Utilitas Segmen Jalan Marga Utama						
							9). 1. Pekerjaan Gudang Underground dan Toilet Tamu 2. Penataan Taman Lingkungan Komplek Kepatihan 3. Pekerjaan Interior Gedung Gadri 4. Pekerjaan Interior Gedung Preanom 5. Pekerjaan Interior Ruang Rapat Sekda 6. Pekerjaan Pengecatan Bangsal Kepatihan 7. Pengadaan Genset 1 Unit	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka tertatanya kawasan perkantoran Kompleks Kepatihan						
							Pembebasan Lahan Akibat Pembangunan di Sumbu Filosofi	1. tanah terbebaskan di Jl Hos Cokroaminoto Kelurahan Tegalrejo Yogyakarta seluas 9588 m2 2. tanah terbebaskan di di Jalan Kusumanegara Kota Yogyakarta seluas 5297 m2						
3.05.1.03.02.00.16.002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo Kabupaten Bantul Pantai Sadeng,	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	15.83%	1). Pembebasan Tanah JJLS	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan JJLS	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	29,44 %	Rp. 375.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngerenehan dan pantai Gesing Kabupaten Gunungkidu Pantai Selatan dan gelombang laut Kabupaten Kulon Progo, kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah, Pantai Congot Kabupaten Kulon Progo Pantai Wedi Ombo Kabupaten Gunungkidul			2). Tertatanya Kawasan goa gajah	1 kawasan					
							3). Tertatanya Kawasan Baron	1 kawasan						
3.05.1.03.02.00.16.003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo Kabupaten Bantul	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	15.83%	Pembangunan akses jalan wisata Depok	5 km lebar 5 meter	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	29,44 %	Rp. 30.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD | **Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.03.02.00.16.004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	15.83%	Rehabilitasi Pasar Kota Gede Penataan SAH Kawasan Kotagede	Tersedianya sarana dan prasarana Tempat Jual Beli (Pasar) di Kota Gede	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	29,44%	Rp. 54.300.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.03.02.00.16.005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	15.83%	1. Terselenggaranya paket penataan kawasan Blok IB Kawasan Tonogoro	Penataan fasilitas di Kawasan Tonogoro: pendopo 1 unit, musholla 1 unit, gazebo 1 unit, toilet 1 unit, gapura 1 unit, lampu taman 74 unit, drainase 360 m, penunjuk arah 3 unit	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	29,44 %	Rp. 12.371.720.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							2. Terselenggaranya paket penataan kawasan Blok 1C	Jalan Lingkungan 251m, Tempat sampah 10 unit, Lampu dan tiang listrik 8 unit, Panggung 1 unit, tempat parkir 1 unit, Toilet 1 unit, TPS 1 unit, Lampu taman 26 unit, Saluran Drainase 391 m, penunjuk arah 3 unit					

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							3. Terselenggaranya paket penataan kawasan Blok IA Kawasan Pesanggrahan Bulu	Penataan fasilitas di Kawasan Pesanggrahan Bulu: pekerjaan jalan, kolam pesanggrahan, gerbang pesanggrahan, pemugaran pesanggrahan, papan informasi dan penunjuk arah, jaringan drainase, lampu penerangan						
							4. Terselenggaranya paket penataan koridor ke Makam Girigondo	Penataan fasilitas di Kawasan Makam Girigondo: pedestrian 440 m, utilitas lingkungan (penerangan, drainase, dll.) 1 paket						
							5. 1. Terlaksananya pengadaan RPPJ, Cermin Tikungan,LPJU, pagar pengaman jalan, dan Konsultan Pengawas 2. Koordinasi kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Lalu Lintas Kawasan Suroloyo-Sendangsono	Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas						
							6. Tersedianya 1 dokumen kajian Pengembangan Wisata Bekas Tambang Mangan Kliripan	Tersedianya 1 dokumen pengembangan kawasan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.03.02.00.16.007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	15.83%	1. Peningkatan Jalan Yogyakarta-Barongan-Imogiri 3,65 Km	1. Terlaksananya Peningkatan Jalan Yogyakarta-Barongan-Imogiri 3,65 Km	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	29,44%	Rp. 41.000.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							2. "Tertatanya Kawasan imogiri: a. Lanmark (tetenger) b. Gapura c. Pekerjaan Jalan menuju situs d. penataan eks pasar imogiri e. Pembayaran pelepasan tanah untuk gapura"	2. Tertatanya Kawasan imogiri						
3.05.1.03.02.00.16.008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	15.83%	"Tertatanya Kawasan Pleret: 1. Lanmark (tetenger) 2. Gapura 3. Pekerjaan Jalan menuju situs 4. Penataan Titik Nol kawasan Pleret 5. Miniatur Kerajaan 6. Pembayaran pelepasan tanah untuk gapura"	Tertatanya Kawasan Pleret	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	29,44%	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.03.02.00.16.009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	15.83%	1. Pembangunan Area Konservasi Kawasan Lava Bantal	Penataan Kawasan Cagar Alam Geo Tapak Lava Bantal Berbah	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	29,44%	Rp. 1.700.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.03.02.00.16.010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	15.83%	1.Penataan Kawasan Kotabaru: SAH, Trotoar, dan PJU	1 kawasan	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	29,44%	Rp. 16.228.594.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							2.Penghijauan pada boulevard Jl. Suroto Kotabaru	1 kawasan						
3.05.1.03.02.00.16.012	Pengadaan tanah dan Peningkatan Jalan Jalur Bedah Menoreh	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	15.83%	"1. Pengadaan tanah (Perencanaan dan Persiapan)	1. 50.000 m2 (@ 500 rb)	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	29,44%	Rp. 66.280.808.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							2. Peningkatan Jalan (Ngori-Serguyu)	2. 3,150 km						
							3. Pembangunan jalan (Pelem Dukuh-Jarakan)	3. 2,6 km						
							4. Pembangunan Jembatan"	4. 1 unit"						
3.05.1.03.02.00.16.014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Gunung Sewu	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Patuk	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	15.83%	Pengadaan lahan untuk pengembangan Kawasan Ngoro-oro-Gading	400.000 m2	Tersedianya lahan untuk pengembangan Jalan Alternatif Ngoro-oro-Gading	400.000 m2	Rp. 100.000.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.03.02.00.17	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS**										**Rp. 500.000.000,00**	**Rp. 0,00**		
3.05.1.03.02.00.17.001	Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang	1. Ketimpangan Wilayah	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	60%	- Tersusunnya dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan ruang kawasan strategis - Dokumen evaluasi penyelenggaraan penataan ruang	Tersedianya 1 Dokumen Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang,	-	-	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.03.02.00.18	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN URUSAN TATA RUANG**										**Rp. 700.000.000,00**	**Rp. 0,00**		
3.05.1.03.02.00.18.001	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan tata ruang	100%	Tersedianya 1 Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang	Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang 100%	-	-	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.03.02.00.18.002	Perencanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan tata ruang	100%	Penyelenggaraan Pradesk Pembahasan urusan tata ruang di DIY	Terselenggaranya Pradesk pembahasan urusan tata ruang	-	-	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.03.02.00.19	**PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN TATA RUANG**										**Rp. 1.000.000.000,00**	**Rp. 0,00**		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD — **Jumlah Pagu : Rp. 1.200.256.405.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.03.02.00.19.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Tata Ruang)	4. Pendukung Prioritas	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	realisasi pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang	100%	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana Pendukung	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Tata Ruang)	-	-	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Tabel 7-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,29	80,72	81,68
2	Indeks Gini	0,3917	0,3846	0,3635
3	Persentase Angka Kemiskinan	11,23%	10,19%	7,00%
4	Indeks Pemberdayaan gender	69,91	70,02	70,32
5	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	11,46%	11,68%	12,04%
6	Pertumbuhan Ekonomi	5,24%	5,26%	5,34%

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,58	60,51	66,15
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	76,5%	78%	82,5%
9	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	21,11%	30,42%	54,44%
10	Indeks Williamson	0,4559	0,4542	0,4489
11	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
12	Nilai Akuntabilitas Pemerintah	A	A	A
13	Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	65,22%	73,91%	91,30%
14	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	7.998	9.419	21.877

Tabel 7-2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
	Urusan Pendidikan			
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	57,45	58,03	58,41
2	Rata-rata hasil ujian nasional SMK	57,65	57,89	58,29
3	Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	96,91%	97,25%	98,63%
4	Capaian APK pendidikan Menengah	95,03	96,72	99,74
5	Capaian APK pendidikan khusus	80,21	81,78	86,50
	Urusan Kesehatan			
1	Persentase puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	67,77%	100%	100%

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
2	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	64,89%	67,18%	73.28%
3	Persentase Pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa	55%	60%	75%
4	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan kesehatan Paru	73,2%	74,8%	81,3%
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	90,69%	91,58%	94,25%
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	86.98%	88.71%	94,14%
3	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	83,25%	84%	86,25%
4	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	88,60%	64,66%	87,81%
5	Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	24.84 %	27,69 %	44,49 %
6	Peningkatan aksesibilitas Jalan	94,28%	95,76%	100%
7	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	52,56%	64,29%	99,49%
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase Penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	94,82%	95,49%	97,50%
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Skor Indeks Ketahanan Nasional DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya	2,98	2,97	3,01
2	Rerata Jumlah Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Lingkungan	320	330	360
3	Indeks Ketahanan Daerah	68	71	80

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
	Urusan Sosial			
1	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	42,38%	40,97%	44,28%
2	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	51,56%	51,57%	51,6%
	Urusan Tenaga Kerja			
1	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	524	1050	2625
2	Jumlah kesempatan kerja	1,980,354	2,020,452	2,149,001
3	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial	10	20	50
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.48	0.47	0.45
	Urusan Pangan			
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,92	90,22	92,12
2	Pengeluaran makanan	n/a	40,29%	38,65%
	Urusan Pertanahan			
1	persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	100%	100%	100%
2	persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	29,99%	46,51%	88,67%

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
	Urusan Lingkungan Hidup			
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang lingkungan hidup	88,56 %	91,47 %	100 %
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
1	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	4	7	15
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4	4	N/A
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Umur menikah pertama perempuan	24.40	24.40	24.40
2	Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran)	98.00%	98.00%	98.00%
	Urusan Perhubungan			
1	Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan tingkat pelayanan jalan	44.29%	44.92%	49.79%
	Urusan Komunikasi dan Informatika			
1	Peringkat Keterbukaan Informasi Bagi Badan Publik level Provinsi	8	7	4
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	omzet koperasi (Rp Juta)	3.697.739	3.716.227	3.772.250
2	omzet UKM (Rp Milyar)	10.483	10.692	11.347
3	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM	0,2%	0,3%	0,4%
	Urusan Penanaman Modal			

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
1	nilai PMTB dalam PDRB DIY (Rp Juta)	36.855.448,-	38.698.221,-	44.798.028,-
2	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat	82	83	85
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga			
1	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	8,7%	10%	11,8%
2	Prestasi cabang olah raga	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 8 POPNAS
	Urusan Kebudayaan			
1	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	568	618	768
2	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	5,12 %	5,71 %	7,40 %
3	Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya	5,29 %	5,79 %	12,79 %
4	Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY	4,13 %	4,28 %	4,75 %
5	jumlah desa budaya yang naik status menjadi desa mandiri budaya	N/A	5	20
	Urusan Perpustakaan			
1	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	23%	24%	27%
	Urusan Kearsipan			
1	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	5750	6300	7500
	Urusan Pariwisata			
1	spending money wisatawan	7.397.452,-	7.672.683,-	8.830.595,-

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
2	nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY (Rp Juta)	9.297.230,-	9.855.064,-	11.737.538,-
	Urusan Pertanian			
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Rp Juta)	7.041.831,-	7.112.249,-	7.327.757,-
	Urusan Kehutanan			
1	nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY (Rp Juta)	734.713,-	742.060,-	764.545,-
	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral			
1	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	93.02%	95.60%	100.00%
2	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan sesuai ketentuan	27	49	115
	Urusan Perdagangan			
1	Nilai Sektor Perdagangan dalam PDRB DIY (Rp Juta)	8.122.805,-	8.528.946,-	9.873.321,-
	Urusan Perindustrian			
1	Nilai Industri Pengolahan dalam PDRB DIY (Rp Juta)	12.151.563,-	12.637.626	14.215.611
	Urusan Kelautan dan Perikanan			
1	Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY (Rp Juta)	318.947	322.136	331.897
2	Peningkatan Status Kawasan Konservasi	20%	30%	100%
	Perencanaan Pembangunan			
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	83,50%	84,00%	85,50%
	Keuangan			

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
1	Transparansi dan akutanbilitas pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%
2	Optimalisasi aset di Pengelola Barang Milik Daerah	5.950.608.853	6.234.617.858	6.967.568.518
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
1	Persentase kualitas manajemen SDM Aparatur	78,00%	79,50%	85,00%
2	Akreditasi Badan Diklat	91	91	93
	Penelitian dan Pengembangan			
1	Persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	50%	75%	75%
	Pengawasan			
1	Persentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	80%	82%	90%
	Sekretariat Dewan			
1	1) Skor Indek Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (Bobot 50%) 2) Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (Bobot 50%)	75%	80%	90%
2	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95,50%	96,00%	96,50%
	Sekretariat Daerah			
1	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	80%	85%	100%

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
2	Persentase bahan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang menjadi rumusan kebijakan	70%	N/A	N/A
3	Persentase bahan kebijakan pengelolaan pembangunan masyarakat yang menjadi rumusan kebijakan	70%	N/A	N/A
4	Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokoleran, kerumahtanggan, dan persandian serta persuratan	86%	86%	88%
5	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	10	16	40
6	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %
7	Persentesae Kualitas produk hukum, layanan hukum dan layanan informasi produk hukum	100 %	100 %	100 %
8	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	79%	79,7%	83%
9	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100 %	100 %	100 %
10	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti	50%	65%	80%
11	Persentase rumusan bahan Kebijakan yang mernjadi kebijakan	N/A	75%	100%

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
	penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual			
12	rumusan bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	N/A	4	4
13	Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	N/A	4	4
14	Skor Indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi pemerintah daerah	80	82	88
15	Peningkatan kepuasan jumlah stakeholder yang mendapatkan layanan kaperda	84	N/A	N/A
16	Peningkatan kualitas layanan kaperda	N/A	87	90
17	rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	97,8	97,9	98,2
18	Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai prosedur	-	-	100

BAB 8 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan tahun kedua RPJMD 2017-2022 yang merupakan RPJMD periode ketiga dari 4 tahapan RPJPD. RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2019 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2019 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Yogyakarta, 26 Juni 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

1201